



**PEMERINTAH
KOTA SAWAHLUNTO**



Peraturan Daerah Kota Sawahlunto
Nomor 02 Tahun 2025
Tentang :

RPJMD

KOTA SAWAHLUNTO



RIYANDA PUTRA, S.J.P.
Wali Kota Sawahlunto

H. JEFFRY HIBATULLAH
Wakil Wali Kota Sawahlunto



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

- TAHUN 2025-2029 -

Visi :

“Sawahlunto Kota Wisata yang Estetik, Futuristik, Hidup & Menghidupi”

**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2025**



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 113);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
dan
WALI KOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 – 2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sawahlunto.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Sawahlunto.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Sawahlunto.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

Pasal 2

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan Daerah dalam melaksanakan program pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ditetapkan.

Pasal 3

Pengaturan RPJMD Tahun 2025-2029 bertujuan untuk :

- a. menetapkan strategi dan kebijakan hukum pembangunan Daerah serta merumuskan program pembangunan terpadu sinkron dan bersinergi dengan pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Sumatera Barat serta menampung kondisi dan karakteristik Daerah;
- b. menjabarkan visi misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2025-2029 dengan memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah serta indikasi kerangka pendanaan;
- c. memberikan pedoman guna mewujudkan keseimbangan lingkungan sosial dan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan; dan
- d. menetapkan pedoman untuk penyusunan RKPD, Renstra PD, dan rencana kerja perangkat daerah.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup RPJMD Tahun 2025-2029 meliputi penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan serta prioritas dan program strategis Bupati dan Wakil Bupati disertai dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan dan kinerja lima tahunan Pemerintah Daerah.
- (3) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat gambaran umum Daerah;
 - c. bab III memuat visi, misi, dan program prioritas pembangunan Daerah;
 - d. bab IV memuat program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - e. bab V memuat penutup.
- (4) Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan;
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan terhadap RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (3) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD Tahun 2025-2029 kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (4) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 19 Agustus 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

RIYANDA PUTRA

19 AUG 2025
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

INDRA MULYONO, SH, MH
NIP. 19820411 201001 1 014

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 19 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ROVANLY ABDAMS

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA
BARAT: (1 / 45 /2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 – 2029

I. UMUM

Sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang mengamanatkan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk dapat memayungi dan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, rencana strategis perangkat daerah, dan rencana kerja perangkat daerah, serta penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, agar kegiatan pembangunan daerah Tahun 2025-2029 dapat bersinergi dengan pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Sumatera Barat serta menampung kondisi dan karakteristik Daerah.

Adapun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 berisi arah kebijakan umum, program prioritas pembangunan daerah yang disertai kerangka kebutuhan pendanaan dan penetapan indikator daerah yang merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dalam merumuskan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang terpadu yang akan dituangkan di dalam dokumen perencanaan pembangunan periode 5 tahun dan perencanaan tahunan daerah bagi seluruh pelaksana pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 114

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 - 2029

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. LATAR BELAKANG	I- 1
1.2. DASAR HUKUM	I- 3
1.3. HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPJMD KOTA SAWAHLUNTO DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA	I- 6
1.3.1. HUBUNGAN RPJMD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025-2029 DENGAN RPJPD TAHUN 2025-2045	I- 6
1.3.2. HUBUNGAN RPJMD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025-2029 DENGAN RPJMN TAHUN 2025-2029	I- 6
1.3.3. HUBUNGAN RPJMD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025-2029 DENGAN RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029	I- 6
1.3.4. HUBUNGAN RPJMD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025-2029 DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2012-2032	I- 7
1.3.5. HUBUNGAN RPJMD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025-2029 DENGAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KOTA SAWAHLUNTO	I- 7
1.3.6. HUBUNGAN RPJMD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025-2029 DENGAN RKPD DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029	I- 8
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN	I- 8
1.4.1. MAKSUD	I- 8
1.4.2. TUJUAN	I- 8
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN	I- 9
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II- 1
2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	II- 1
2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	II- 30
2.1.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH	II- 72
2.1.4. ASPEK PELAYANAN UMUM	II-102
2.1.5. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RPD TAHUN 2024	II-135
2.1.6. CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KEWENANGAN KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2020-2024	II-145
2.1.7. CAPAIAN SDGs TAHUN 2021 – 2024	II-153
2.2. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	II-163
2.2.1. KINERJA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2019-2024	II-165
2.2.2. PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025-2029	II-189
2.3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	II-211
2.3.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	II-235
2.3.2. ISU STRATEGIS	II-239
BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	
3.1. PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KOTA SAWAHLUNTO 2025-2045	III- 1
3.1.1. VISI DAN SASARAN VISI RPJPD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025-2045	III- 1
3.1.2. MISI RPJPD KOTA SAWAHLUNTO	III- 2
3.1.3. ARAH DAN SASARAN PEMBANGUNAN RPJPD KOTA SAWAHLUNTO	III- 3
3.2. PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2025-2029	III- 5
3.2.1. VISI RPJMN TAHUN 2025-2029	III- 5
3.2.2. MISI RPJMN TAHUN 2025-2029	III- 5

3.2.3	SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN TAHUN 2025-2029.....	III- 6
3.3	PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029	III- 7
3.3.1	VISI RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029.....	III- 7
3.3.2	MISI RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029	III- 8
3.3.3	SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT	III- 9
3.4	VISI DAN MISI RPJMD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025-2029	III- 9
3.4.1	VISI RPJMD TAHUN 2025-2029	III- 9
3.4.2	MISI RPJMD TAHUN 2025-2029.....	III- 11
3.4.3	TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024-2030	III- 12
3.4.4	KETERKAITAN ANTARA VISI MISI RPJMD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025-2029 DENGAN RPJPD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025-2045.....	III- 17
3.4.5	KETERKAITAN ANTARA VISI MISI RPJMD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025-2029 DENGAN VISI MISI RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT DAN VISI MISI RPJMN	III- 19
3.5	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	III- 23
3.5.1	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN MENURUT TUJUAN DAN SASARAN.....	III- 23
3.5.2	PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2025-2029.....	III- 51
3.5.3	ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TERHADAP FOKUS PRIORITAS RPJMN TAHUN 2025-2029	III-100
3.5.4	ARAH PEMBANGUNAN WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT RPJMN TAHUN 2025-2029.....	III-181
3.5.5	STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA SAWAHLUNTO RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2030	III-186
3.5.6	ARAH PEMBANGUNAN PENATAAN RUANG KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025-2029	III-189
3.5.7	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN WARISAN TAMBANG BATUBARA OMBILIN SAWAHLUNTO.....	III-193
3.5.8	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN GEOSITE POTENSIAL GEOPARK SAWAHLUNTO 2025-2029.....	III-194
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH		
4.1	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	IV- 1
4.2	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	IV- 39
4.2.1	INDIKATOR KINERJA MAKRO	IV-39
4.2.2	INDIKATOR KINERJA UTAMA	IV-39
4.2.3	INDIKATOR KINERJA DAERAH	IV-43
BAB V PENUTUP		
5.1	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN RPJMD	V- 1
5.1.1	PEDOMAN TRANSISI	V- 1
5.1.2	KAIDAH PELAKSANAAN	V- 1
5.2	PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD	V- 2
5.2.1	PENGENDALIAN PELAKSANAAN RPJMD.....	V- 5
5.2.2	EVALUASI AKHIR RPJMD TAHUN 2025-2029.....	V- 3
5.3	MANAJEMEN RISIKO PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	V- 3
5.4	TATA KELOLA SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA SAWAHLUNTO.....	V- 5
5.4.1	MEMPERKUAT TATA KELOLA PEMBANGUNAN DAN MENDORONG TRANSFORMASI DIGITAL DAERAH	V- 5
5.4.2	PORTAL SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA SAWAHLUNTO	V- 6
5.4.3	PORTAL SATU DATA INDONESIA KOTA SAWAHLUNTO MENDORONG REFORMASI BIROKRASI DAN TRANSFORMASI LAYANAN PUBLIK BERBASIS KEBUTUHAN MASYARAKAT	V- 6
5.5	KOLABORASI MULTIPIHAK DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	V- 6
LAMPIRAN		
LAMPIRAN I. METADATA INDIKATOR KINERJA DAERAH		
LAMPIRAN II. MANAJEMEN RISIKO PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Administratif Per-Kecamatan Kota Sawahlunto	II- 2
Tabel 2.2	Jumlah RT, RW, Dan Dusun Per Kecamatan Kota Sawahlunto	II- 2
Tabel 2.3	Ketinggian Wilayah Kota Sawahlunto	II- 3
Tabel 2.4	Kemiringan Lahan Kota Sawahlunto	II- 4
Tabel 2.5	Persentase Luas Lahan Menurut Penggunaan per Kecamatan Kota Sawahlunto Tahun 2024	II- 7
Tabel 2.6	Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kota Sawahlunto Berdasarkan Kecamatan Tahun 2025	II- 9
Tabel 2.7	Status DDDTLH Jasa Penyediaan Pangan	II- 10
Tabel 2.8	Indeks Ketahanan Pangan Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024	II- 11
Tabel 2.9	Konsumsi Listrik Per Kapita (Kwh/Kapita) Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024	II- 11
Tabel 2.10	Prevalansi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024	II- 12
Tabel 2.11	Skor Pola Pangan Harapan Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024	II-13
Tabel 2.12	Capaian Air Baku Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024	II-14
Tabel 2.13	Persentase Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan Tahun 2020 - 2024	II-14
Tabel 2.14	Persentase Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan Kabupaten/Kota Tahun 2024	II-15
Tabel 2.15	Indeks Tutupan Lahan Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024	II-16
Tabel 2.16	Data Sanitasi Aman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2024	II-17
Tabel 2.17	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat (Persen) Tahun 2020 - 2024	II-18
Tabel 2.18	Komponen Akses Sanitasi Layak Dan Akses Sanitasi Aman	II-18
Tabel 2.19	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024	II-19
Tabel 2.20	Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024	II-20
Tabel 2.21	Nilai Indeks Risiko Bencana (IRBI) Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024	II-22
Tabel 2.22	Indeks Ketahanan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024	II-22
Tabel 2.23	Jumlah Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024	II-23
Tabel 2.24	Komposisi Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024 Berdasarkan Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin	II-26
Tabel 2.25	Komposisi Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2024 Berdasarkan Pendidikan Dan Jenis Kelamin	II-27
Tabel 2.26	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024	II-27
Tabel 2.27	Kepadatan Penduduk Kota Sawahlunto (Jiwa/Km2) Tahun 2020 - 2024	II-28
Tabel 2.28	Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto Berdasarkan Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Tahun 2025-2030	II-28
Tabel 2.29	Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025-2030	II-29
Tabel 2.30	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	II-29
Tabel 2.31	Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto Menurut Lapangan Usaha (Supply Side) Dan Jenis Pengeluaran (Demand Side) Tahun 2020 - 2024	II-32
Tabel 2.32	Tingkat Kemiskinan Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024	II-33
Tabel 2.33	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 - 2024	II-34
Tabel 2.34	Posisi Kota Sawahlunto Dalam 10 Kabupaten/Kota Dengan Persentase Penduduk Miskin Terendah Level Nasional Tahun 2020-2024	II-35
Tabel 2.35	Perkembangan PDRB ADHB Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 - 2024 (juta rupiah/jiwa)	II-38
Tabel 2.36	PDRB ADHK Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 - 2024 (juta rupiah/jiwa)	II-39
Tabel 2.37	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024	II-41

Tabel 2.38 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024	II-42
Tabel 2.39 Gini Ratio Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024 ..	II-44
Tabel 2.40 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024	II-47
Tabel 2.41 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2024.....	II-47
Tabel 2.42 Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (Ribu Rupiah) Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2024.....	II-48
Tabel 2.43 Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024	II-50
Tabel 2.44 Jumlah Kematian Ibu Di Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024.....	II-50
Tabel 2.45 Angka Kematian Ibu Di Kota Sawahlunto (per 100.000 kelahiran hidup) Tahun 2020-2024	II-51
Tabel 2.46 Prevalensi Stunting Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020 – 2024.....	II-51
Tabel 2.47 Cakupan Penemuan Dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Covarage) (%) Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024	II-52
Tabel 2.48 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate) Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024	II-52
Tabel 2.49 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kota Sawahlunto 2020-2024.....	II-53
Tabel 2.50 Indeks Keluarga Sehat Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024.....	II-53
Tabel 2.51 Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Tahun 2020-2024.....	II-54
Tabel 2.52 Angka Literasi/Numerasi Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024	II-54
Tabel 2.53 Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2024	II-56
Tabel 2.54 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2024	II-57
Tabel 2.55 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Yang Berkualitas Pendidikan Tinggi Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024	II-58
Tabel 2.56 Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja Di Bidang Keahlian Menengah Tinggi Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024	II-59
Tabel 2.57 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024	II-60
Tabel 2.58 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024	II-60
Tabel 2.59 Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024.....	II-61
Tabel 2.60 Persentase Pelestarian Cagar Budaya Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024.....	II-63
Tabel 2.61 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya (Tangible) Dan Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (Intangible) Di Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024	II-63
Tabel 2.62 Kampung Moderasi Beragama Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024.....	II-64
Tabel 2.63 Indeks Pembangunan Keluarga Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024	II-65
Tabel 2.64 IKG Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024	II-66
Tabel 2.65 Perkembangan Indeks Perlindungan Anak Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2020-2024	II-67
Tabel 2.66 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2023	II-67
Tabel 2.67 Perkembangan Indeks Perlindungan Anak Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2020-2024	II-68
Tabel 2.68 Capaian Indeks Penyusun IPA Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, Nasional Tahun 2021-2023.....	II-69
Tabel 2.69 IPG Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, Nasional Tahun 2020-2024 ..	II-70
Tabel 2.70 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024.....	II-71
Tabel 2.71 Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020-2024	II-72
Tabel 2.72 Angka Ketergantungan Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024	II-74
Tabel 2.73 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024.....	II-75

Tabel 2.74 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 – 2024	II-75
Tabel 2.75 Rasio PDRB Akomodasi Dan Makan Minum Terhadap PDRB Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024	II-77
Tabel 2.76 Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribuan Orang) Tahun 2020-2024.....	II-77
Tabel 2.77 Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Kota Sawahlunto Terhadap PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi Tahun 2020-2024.....	II-78
Tabel 2.78 Proporsi Jumlah UKM Non Pertanian Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024.....	II-79
Tabel 2.79 Proporsi Jumlah Industri Kecil Dan Menengah Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024	II-80
Tabel 2.80 Rasio Kewirausahaan Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024	II-80
Tabel 2.81 Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB Kota Sawahlunto (%) Tahun 2020-2024	II-81
Tabel 2.82 Return On Asset (ROA) dari BUMD Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024	II-82
Tabel 2.83 Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024	II-83
Tabel 2.84 Persentase Tenaga Kerja Formal Menurut Daerah Tempat Tinggal Tahun 2021-2024	II-83
Tabel 2.85 Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal Dan Informal Berdasarkan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	II-84
Tabel 2.86 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024	II-85
Tabel 2.87 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020-2024	II-85
Tabel 2.88 TPAK Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020-2024	II-86
Tabel 2.89 Capaian Indeks Inovasi Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024.....	II-86
Tabel 2.90 Rasio Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024	II-87
Tabel 2.91 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024	II-88
Tabel 2.92 Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024	II-89
Tabel 2.93 Persentase Stabilitas Harga Dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024.....	II-89
Tabel 2.94 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024.....	II-90
Tabel 2.95 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024.....	II-90
Tabel 2.96 Empat Kriteria Pengukuran Indikator.....	II-91
Tabel 2.97 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak Dan Terjangkau Kota Sawahlunto Tahun 2020- 2024	II-91
Tabel 2.98 Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024	II-92
Tabel 2.99 Persentase Desa Mandiri Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024.....	II-92
Tabel 2.100 Perkembangan Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024	II-92
Tabel 2.101 Indeks Desa Membangun Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024	II-93
Tabel 2.102 Status Desa di Kota Sawahlunto Berdasar Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2020-2024	II-94
Tabel 2.103 Skor Dan Status Indeks Desa Membangun Kecamatan Dan Desa di Kota Sawahlunto Tahun 2024	II-95
Tabel 2.104 Laju Inflasi Kota Sawahlunto Menurut Lapangan Usaha dan Pengeluaran Tahun 2020 – 2024.....	II-98
Tabel 2.105 Total Dana Pihak Ketiga di Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024.....	II-99
Tabel 2.106 Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Kabupaten/Kota Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024	II-100
Tabel 2.107 Total Kredit Dan PDRB ADHB Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024	II-101
Tabel 2.108 Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024	II-102
Tabel 2.109 Indeks Reformasi Hukum Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024	II-102
Tabel 2.110 Perkembangan Indeks SPBE Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024.....	II-103

Tabel 2.111 Perhitungan Indeks Pelayanan Publik.....	II-104
Tabel 2.112 Perkembangan Indeks Pelayanan Publik Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024	II-104
Tabel 2.113 Perkembangan Survei Penilaian Integritas (SPI) Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024.....	II-104
Tabel 2.114 Perkembangan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024.....	II-105
Tabel 2.115 Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 – 2024.....	II-106
Tabel 2.116 Penanganan Pelanggaran Perda di Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024.....	II-107
Tabel 2.117 Penilaian Capaian Aksi HAM Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024.....	II-107
Tabel 2.118 Persentase Penegakan Perda Di Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024.....	II-108
Tabel 2.119 Angka Kriminalitas Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024.....	II-109
Tabel 2.120 Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Di Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024.....	II-109
Tabel 2.121 Perkembangan Persentase Kerjasama Wajib Yang Dilaksanakan Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024.....	II-110
Tabel 2.122 Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan Dan Keamanan Kota Sawahlunto Dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024	II-111
Tabel 2.123 Angka Literasi/Numerasi Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024	II-111
Tabel 2.124 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024	II-112
Tabel 2.125 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024	II-112
Tabel 2.126 Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024.....	II-113
Tabel 2.127 Indeks Keluarga Sehat Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024.....	II-113
Tabel 2.128 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024.....	II-113
Tabel 2.129 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak Dan Terjangkau Kota Sawahlunto Tahun 2020- 2024	II-114
Tabel 2.130 Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024.....	II-114
Tabel 2.131 Indeks Kesejahteraan Sosial Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024	II-115
Tabel 2.132 Capaian Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) Se-Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.....	II-115
Tabel 2.133 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2020–2024.....	II-116
Tabel 2.134 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Sawahlunto Tahun 2020–2024.....	II-117
Tabel 2.135 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Sawahlunto Tahun 2020–2024	II-118
Tabel 2.136 Perkembangan Indeks Perlindungan Anak Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2020-2024	II-118
Tabel 2.137 Indeks Ketahanan Pangan Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024	II-119
Tabel 2.138 Indeks Tertib Administrasi Pertanahan Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024.....	II-119
Tabel 2.139 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024	II-120
Tabel 2.140 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024.....	II-120
Tabel 2.141 Indeks Desa Membangun Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024.....	II-121
Tabel 2.142 Indeks Pembangunan Keluarga Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024	II-121
Tabel 2.143 Rasio Konektivitas Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024	II-121
Tabel 2.144 Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024	II-122
Tabel 2.145 Kontribusi UMKM Terhadap PDRB Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024.....	II-122
Tabel 2.146 Persentase Peningkatan Investasi Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024.....	II-123
Tabel 2.147 Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024	II-123
Tabel 2.148 Indeks Partisipasi Olahraga Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024	II-124
Tabel 2.149 Indeks Pembangunan Statistik Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024.....	II-124
Tabel 2.150 Perkembangan Indeks SPBE Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024.....	II-125
Tabel 2.151 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024	II-125
Tabel 2.152 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024	II-126

Tabel 2.153 Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Pada Lingkup Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024	II-126
Tabel 2.154 Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan Tahun 2020-2024	II-127
Tabel 2.155 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum Terhadap PDRB Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024	II-127
Tabel 2.156 Nilai Tukar Petani Tahun 2020-2024	II-128
Tabel 2.157 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024	II-128
Tabel 2.158 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024	II-128
Tabel 2.159 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024	II-129
Tabel 2.160 Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024	II-129
Tabel 2.161 Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024	II-130
Tabel 2.162 Opini BPK Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024	II-130
Tabel 2.163 Indeks Profesionalitas ASN Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024	II-131
Tabel 2.164 Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024	II-131
Tabel 2.165 Persentase Kebijakan Berbasis Bukti Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024	II-132
Tabel 2.166 Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024	II-132
Tabel 2.167 Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Tahun 2020-2024	II-133
Tabel 2.168 Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Di Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024	II-134
Tabel 2.169 Indeks Harmoni Indonesia Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024	II-134
Tabel 2.170 Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2024	II-135
Tabel 2.171 Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Sawahlunto Tahun 2024	II-138
Tabel 2.172 Capaian SPM Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024	II-146
Tabel 2.173 Capaian SDGs Tahun 2021 - 2024	II-153
Tabel 2.174 Perkembangan Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2019-2024	II-165
Tabel 2.175 Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2020-2024	II-166
Tabel 2.176 Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2019-2024	II-169
Tabel 2.177 Perkembangan Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2019 - 2024	II-169
Tabel 2.178 Perkembangan Realisasi PAD, Tingkat Capaian, Tingkat Pertumbuhan Anggaran dan Tingkat Pertumbuhan Realisasi Tahun 2019-2024	II-171
Tabel 2.179 Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)	II-171
Tabel 2.180 Perkembangan Capaian Realisasi Pendapatan Transfer Kota Sawahlunto Tahun 2019-2024	II-172
Tabel 2.181 Perkembangan Capaian Realisasi Dana Bagi Hasil Kota Sawahlunto Tahun 2019-2024	II-172
Tabel 2.182 Perkembangan Capaian Realisasi dan Pertumbuhan Dana Alokasi Umum Kota Sawahlunto Tahun 2019-2024	II-173
Tabel 2.183 Perkembangan Capaian Realisasi dan Pertumbuhan Dana Alokasi Khusus Kota Sawahlunto Tahun 2019-2024	II-173
Tabel 2.184 Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi Tahun 2019-2024	II-174
Tabel 2.185 Lain - lain Pendapatan yang Sah Tahun 2019-2024	II-174
Tabel 2.186 Perkembangan Capaian Realisasi, Pertumbuhan Anggaran dan Tingkat Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019-2024	II-175
Tabel 2.187 Perkembangan Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Komponen Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2019-2024	II-176
Tabel 2.188 Perkembangan Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2019-2024	II-177

Tabel 2.189	Perkembangan dan Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2019-2024	II-179
Tabel 2.190	Perkembangan Rasio Keuangan Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2019-2024 (%)	II-180
Tabel 2.191	Perkembangan Proporsi Realisasi Anggaran Belanja Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2019-2024	II-186
Tabel 2.192	Perkembangan Realisasi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2019-2023.....	II-187
Tabel 2.193	Perkembangan dan Rata-rata Pertumbuhan Defisit Riil Anggaran Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2019-2024.....	II-188
Tabel 2.194	SILPA Kota Sawahlunto TA 2019-2024	II-188
Tabel 2.195	Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025-2030	II-195
Tabel 2.196	Proyeksi Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025-2030	II-200
Tabel 2.197	Belanja Pegawai Kota Sawahlunto Tahun 2026-2030.....	II-201
Tabel 2.198	Proyeksi Pemenuhan Belanja Infrastruktur 2026-2030	II-201
Tabel 2.199	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025-2030	II-202
Tabel 2.200	Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025- 2030	II-203
Tabel 2.201	Proyeksi dan Arah Belanja Wajib dan Mengikat Kota Sawahlunto Tahun 2025-2030	II-204
Tabel 2.202	Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025-2030	II-204
Tabel 3.1	Sasaran Visi RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2045.....	III- 2
Tabel 3.2	Sasaran Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 Tahap I Pelaksanaan RPJPD Kota Sawahlunto	III- 4
Tabel 3.3	Sasaran Visi RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029.....	III- 10
Tabel 3.4	Misi RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029	III- 11
Tabel 3.5	Penjabaran Visi Misi Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029	III- 13
Tabel 3.6	Penyelarasan Sasaran Visi RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2045 dengan Sasaran Visi RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029	III- 18
Tabel 3.7	Penyelarasan Misi RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2045.....	III- 19
Tabel 3.8	Penyelarasan Visi RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029	III- 20
Tabel 3.9	Penyelarasan Sasaran Visi RPJMN Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029	III- 20
Tabel 3.10	Penyelarasan Sasaran Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029	III- 21
Tabel 3.11	Penyelarasan Misi RPJMD Kota Sawahlunto dengan , RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dan RPJMN	III- 22
Tabel 3.12	Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 VISI: SAWAHLUNTO KOTA WISATA YANG ESTETIK, FUTURISTIK, HIDUP DAN MENGHIDUPI	III- 23
Tabel 3.13	Arah kebijakan Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029	III- 26
Tabel 3.14	Program Prioritas Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029	III- 52
Tabel 3.15	Arah kebijakan, Program Prioritas dan Target Kinerja dan pagu indikatif Pembangunan Daerah terhadap Penurunan Kemiskinan Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029	III-101
Tabel 3.16	Arah kebijakan, Program Prioritas dan Target Kinerja dan pagu indikatif Pembangunan Daerah terhadap Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Manusia Kota Sawahlunto Tahun 2026-2030	III-126
Tabel 3.17	Arah kebijakan, Program Prioritas dan Target Kinerja dan pagu indikatif Pembangunan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Kota Sawahlunto Tahun 2026-2030	III-139
Tabel 3.18	Arah kebijakan, Program Prioritas dan Target Kinerja dan pagu indikatif Pembangunan Daerah terhadap Penanggulangan Stunting Kota Sawahlunto Tahun 2026-2030	III-160

Tabel 3.19	Lokasi Prioritas dan Highlight Indikasi Intervensi Pembangunan Wilayah Provinsi Sumatera Barat RPJMN Tahun 2025-2029	III-181
Tabel 3.20	Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan Rencana Struktur Ruang Kota Sawahlunto 2025-2045	III-190
Tabel 3.21	Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan Rencana Pola Ruang Kota Sawahlunto 2025-2045	III-191
Tabel 4.1	Program Perangkat Daerah	IV- 2
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Makro.....	IV- 39
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Utama	IV- 40
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Daerah	IV- 44

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kota Sawahlunto Tahun 2025 ...	II- 9
Grafik 2.2	Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kota Sawahlunto Berdasarkan Kecamatan Tahun 2025	II- 9
Grafik 2.3	Status DDDTLH Jasa Penyediaan Pangan.....	II-10
Grafik 2.4	Perbandingan Konsumsi dan Keragaman Pangan Pola Harapan Ideal Berdasarkan Kelompok Pangan Tahun 2024	II-13
Grafik 2.5	Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Sawahlunto Dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024.....	II-16
Grafik 2.6	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024	II-24
Grafik 2.7	Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2020 – 2024.....	II-30
Grafik 2.8	Kontribusi Lima Lapangan Usaha Dominan Kota Sawahlunto Berdasarkan PDRB ADHB Tahun 2024 (Dalam persen).....	II-31
Grafik 2.9	Kontribusi Dan Pertumbuhan Jenis Pengeluaran Kota Sawahlunto Tahun 2024 (Dalam persen)	II-31
Grafik 2.10	Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto (Rupiah/Kapita/Bulan) Tahun 2020-2024	II-33
Grafik 2.11	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024	II-34
Grafik 2.12	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024	II-36
Grafik 2.13	Perkembangan PDRB ADHB Per Kapita Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024	II-37
Grafik 2.14	Perkembangan PDRB ADHK Per Kapita Kota Sawahlunto Dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024	II-39
Grafik 2.15	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020 – 2024.....	II-43
Grafik 2.16	Perkembangan Gini Ratio Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2020 – 2024	II-45
Grafik 2.17	IPM Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia Tahun 2020 – 2024	II-46
Grafik 2.18	Perbandingan Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020 – 2024 (Satuan Dalam Tahun)	II-49
Grafik 2.19	Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020 – 2024	II-55
Grafik 2.20	Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020 – 2024	II-57
Grafik 2.21	Indeks Ketimpangan Gender Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024	II-65
Grafik 2.22	Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Sebulan Kelompok Makanan dan Non Makanan Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 (Dalam Rp).....	II-73
Grafik 2.23	Persentase Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Sebulan Kelompok Makanan dan Non Makanan Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024	II-73
Grafik 2.24	Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024.....	II-76
Grafik 2.25	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024	II-83
Grafik 2.26	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024	II-96
Grafik 2.27	Laju Inflasi Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024	II-96
Grafik 2.28	Laju Inflasi Kota Sawahlunto, Kota Padang Dan Kota Bukittinggi Tahun 2020-2024	II-97
Grafik 2.29	Laju Inflasi Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2020-2024	II-97
Grafik 2.30	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB di Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024	II-99
Grafik 2.31	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Kabupaten/Kota, Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024	II-100
Grafik 2.32	Total Kredit/Dan PDRB ADHB Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024	II-101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Administrasi Kota Sawahlunto.....	II-	1
Gambar 2.2	Peta Kemiringan Lereng Kota Sawahlunto	II-	4
Gambar 2.3	Peta Curah Hujan Kota Sawahlunto	II-	5
Gambar 2.4	Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2025-2029	II-	190
Gambar 2.5	Analisis Proyeksi Belanja Daerah tahun 2025-2029.....	II-	199
Gambar 3.1	Arah Pembangunan Wilayah Provinsi Sumatera Barat RPJMN Tahun 2025-2029.....	III-	181
Gambar 3.2	Daerah Tujuan Ekspor Utama Kota Sawahlunto.....	III-	188
Gambar 3.3	Peta Rencana Struktur Ruang Kota Sawahlunto 2025-2045	III-	189
Gambar 3.4	Peta Rencana Pola Ruang Kota Sawahlunto Tahun 2025-2045	III-	191
Gambar 3.5	Konsep Lokasi Pusat Pengembangan Informasi Geopark.....	III-	194
Gambar 3.6	Peta Sebaran Geopark Kota Sawahlunto.....	III-	195



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Daerah sesuai kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam peraturan tersebut mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan Perencanaan Pembangunan daerah untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah untuk lima tahun kedepan yang merupakan penjabaran visi misi dan program-program kepala daerah terpilih ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan dan keuangan daerah. Dokumen ini ditetapkan enam bulan setelah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik.

Penyusunan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 dilaksanakan setelah pelantikan Riyanda Putra, S.IP sebagai Wali Kota Sawahlunto dan H. Jeffry Hibatullah sebagai Wakil Wali Kota Sawahlunto berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 dan telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 di Istana Negara oleh Presiden Republik Indonesia, dengan dasar inilah disusun dokumen RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029.

Penyusunan Dokumen RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 merupakan tahapan pembangunan jangka menengah pertama pada periode RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2045. Untuk menjaga keselarasan dengan arah dan tujuan pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat, maka dalam penyusunan dokumen RPJMD

Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 juga mengacu kepada RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

Berdasarkan evaluasi dan kondisi daerah saat ini, masih tingginya tingkat pengangguran dan ketimpangan antarwilayah, belum optimalnya kualitas layanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan, belum optimalnya pengelolaan pariwisata dengan keterbatasan sumber daya manusianya dan akses transportasi sehingga masih melambatnya pertumbuhan ekonomi. Keadaan lingkungan dan risiko bencana menjadi perhatian dalam merencanakan pembangunan kedepannya. Keunggulan yang dimiliki Kota Sawahlunto dengan status *Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto* (OCMHS) dan *Geopark* Nasional Sawahlunto diharapkan dapat meningkatkan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha dan daya saing daerah yang merupakan tujuan Pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 juga harus memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai amanah Permendagri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. KLHS berfungsi untuk penjaminan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam perumusan kebijakan dan skenario pembangunan daerah guna menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa depan. Skenario pembangunan merupakan alternatif pelaksanaan pembangunan beserta gambaran potensi dampak yang ditimbulkan. Sehingga RPJMD ini akan menjadi dasar evaluasi kinerja pemerintah daerah melalui indikator tujuan dan sasaran yang terukur, berkontribusi dalam percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) serta menjadi panduan yang mengarahkan pengelolaan keuangan daerah melalui kebijakan *money follows program priorities*, yang memfokuskan belanja daerah pada program strategis dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Penyusunan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, adalah : Pendekatan Teknokratis, Pendekatan Partisipatif, Pendekatan Politis, Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, Pendekatan Holistik-tematik, Pendekatan Integratif dan Pendekatan Spasial.

Proses penyusunan dokumen RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan Penyusunan mencakup : Pembentukan Tim Penyusunan dan Orientasi mengenai RPJMD, Penyusunan agenda kerja tim penyusun, Analisa data evaluasi hasil pembangunan sebelumnya, Inventaris data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lainnya.

- b. Pembahasan Visi dan Misi secara Teknokratik
- c. Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal)
- d. Pelaksanaan Forum Konsultasi Rancangan Awal
- e. Pengajuan Rancangan awal kepada DPRD
- f. Pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJMD
- g. Konsultasi Rancangan Awal RPJMD
- h. Musrenbang
- i. Perumusan Rancangan Akhir
- j. Review Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terhadap rancangan akhir
- k. Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah RPJMD ke DPRD
- l. Evaluasi Ranperda RPJMD
- m. Penetapan Ranperda RPJMD

Dokumen RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 sebagai pedoman utama dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renstra perangkat daerah wajib mengacu pada arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang termuat dalam RPJMD agar terdapat keselarasan sehingga pelaksanaan program kegiatan dapat mencapai tujuan pembangunan yang telah direncanakan.

Dokumen RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah, DPRD, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat menjadi fondasi yang kokoh untuk mewujudkan visi Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029.

1.2 DASAR HUKUM

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sawahlunto Tahun 2025-2045, didasarkan pada beberapa peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 mengatur pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 2025-2029;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 08 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032;
22. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 113).

1.3 HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPJMD KOTA SAWAHLUNTO DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA

1.3.1 Hubungan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kota Sawahlunto 2025-2045

RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2045 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto pada setiap lima tahun sesuai dengan tahapan RPJPD. RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 menjadi tahapan pertama RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2045. RPJMD harus memperhatikan isu strategis, sasaran pokok, dan arah kebijakan pembangunan yang ada di dalam RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2045. Dalam menyusun visi misi kepala daerah terpilih mengacu pada RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2045 begitu juga dalam menyusun dokumen RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 sehingga adanya konsistensi dan kesinambungan pembangunan dari jangka menengah menuju jangka Panjang.

1.3.2 Hubungan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang wajib mempedomani dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Keselarasan dalam dokumen tersebut meliputi keselarasan dalam visi, misi, tujuan sasaran, arah kebijakan, strategi dan program prioritas nasional. Dengan menjamin konsistensi kebijakan pembangunan nasional dan daerah sehingga meningkatkan peluang alokasi pendanaan nasional ke daerah seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), dana insentif daerah dan sebagainya. Untuk itu perlu memastikan bahwa pembangunan daerah memberikan kontribusi nyata terhadap tujuan nasional serta memperkuat daya saing daerah dalam rangka pembangunan Nasional dan Global Sinkronisasi antara keduanya menjadi syarat untuk menjamin keberhasilan pembangunan nasional yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.3.3 Hubungan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Dalam penyusunan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 memperhatikan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029. Adapun yang harus diperhatikan meliputi visi, misi, tujuan, sasaran dan program prioritas Provinsi. Pencapaian target kinerja pembangunan Kota Sawahlunto secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian target pembangunan Provinsi Sumatera Barat, untuk itu prioritas pembangunan Kota Sawahlunto diarahkan pada upaya untuk mendukung target pencapaian Provinsi Sumatera Barat.

1.3.4 Hubungan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032

Penyusunan RPJMD Kota Sawahlunto memperhatikan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032, untuk melihat struktur ruang, pola ruang dan program penataan ruang. Kondisi saat ini Kota Sawahlunto proses pengusulan Rancangan Peraturan Daerah untuk Perubahan RTRW Kota Sawahlunto, sedangkan untuk materi teknis sudah diakomodir dalam dokumen RPJMD terkait arah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah, serta struktur dan pola ruang wilayah sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang dan pembangunan.

1.3.5 Hubungan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Sawahlunto

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur di seluruh Indonesia nomor 600.11.2/8754/Bangda karena KLHS menjadi instrumen penting dalam proses perencanaan pembangunan untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan berkelanjutan dan tidak merugikan lingkungan.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan berpedoman kepada KLHS maka dokumen RPJMD Kota Sawahlunto dapat menjamin pembangunan di Kota Sawahlunto berlangsung secara adil dan berkelanjutan, meminimalkan risiko dan dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan hidup dan masyarakat, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam pembangunan daerah serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Hubungan substantif antara RPJMD dan KLHS adalah sebagai berikut:

1. KLHS berfungsi sebagai dasar ilmiah dan pertimbangan strategis dalam menyusun tujuan, sasaran, dan arah kebijakan RPJMD.
2. KLHS menyajikan analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta identifikasi isu strategis lingkungan hidup dan keberlanjutan sosial ekonomi;
3. Hasil dan rekomendasi KLHS wajib diintegrasikan ke dalam RPJMD, baik pada tingkat perumusan visi dan misi, maupun dalam penentuan prioritas program, lokasi kegiatan, dan indikator kinerja.

Sehubungan hal tersebut, dengan berpedoman kepada KLHS maka bertujuan agar RPJMD dapat menjamin bahwa pembangunan di Sawahlunto berlangsung secara adil dan berkelanjutan, meminimalkan risiko dan dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan hidup dan masyarakat, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam pembangunan daerah serta mendukung pencapaian

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), hal ini agar arah kebijakan pembangunan di RPJMD dapat berkualitas, inklusif, dan tangguh terhadap perubahan iklim, bencana, serta ketimpangan sosial.

1.3.6 Hubungan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 dengan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah disusun sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah bersifat indikatif. RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Dokumen RPJMD yang disusun akan menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dan dijabarkan tiap tahun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dokumen RKPD akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA/PPAS untuk menyusun Rancangan APBD setiap tahunnya, serta menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

I.4 MAKSUD DAN TUJUAN

I.4.1 Maksud

Maksud penyusunan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 adalah menjabarkan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi seluruh pihak baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Sawahlunto.

I.4.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan dokumen RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 adalah :

1. Menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah
Menerjemahkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto terpilih ke dalam arah kebijakan pembangunan, strategi, tujuan, sasaran dan program prioritas yang terukur dan realistis dalam periode lima tahun pemerintahan.
2. Menyelaraskan dengan dokumen Perencanaan Jangka Panjang dan Nasional
Memastikan keterpaduan dan konsistensi antara perencanaan jangka menengah daerah dengan RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, serta dokumen rencana sektoral dan rencana tata ruang wilayah (RTRW).
3. Pedoman Pembangunan Daerah
RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 menjadi acuan utama bagi perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Sawahlunto dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), serta dalam penyusunan

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) setiap tahun.

4. Mewujudkan Tata Kelola Pembangunan yang Akuntabel dan Partisipatif
Mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat berbasis data dan informasi serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara aktif.
5. Menjamin Efektifitas dan Efisiensi Pembangunan
RPJMD dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya daerah secara efisien dan berkeadilan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

I.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Kota Sawahlunto meliputi gambaran dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, serta menjadi pijakan perumusan target pembangunan dalam lima tahun kedepan. Bab ini juga menguraikan gambaran pengelolaan keuangan daerah tahun sebelumnya dan kerangka pendanaan untuk pembangunan lima tahun kedepan serta permasalahan pembangunan daerah terkait dengan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta isu strategis daerah yang prioritas untuk diselesaikan selama lima tahun kedepan, berdasarkan analisa data.

BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih dengan mempedomani RPJPD Tahun 2025-2045 serta RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menjelaskan program Perangkat Daerah yang dirumuskan dalam Renstra beserta target indikator kinerja program dan pagu indikatif menurut urusan pemerintahan daerah dalam upaya pencapaian visi dan misi RPJMD. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui indikator makro, indikator kinerja sasaran visi RPJMD, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

BAB V

PENUTUP

Bab ini berisikan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Manajemen Resiko Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata kelola Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi, serta Kolaborasi Multipihak dalam Perencanaan Pembangunan Kota Sawahlunto sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan.

LAMPIRAN I

METADATA INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH

Lampiran ini Metadata Indikator Pembangunan Daerah memuat informasi terstruktur yang menjelaskan secara rinci mengenai setiap indikator yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029 Indikator Utama, Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Program.

LAMPIRAN II

MANAJEMEN RESIKO PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Lampiran ini Manajemen Risiko Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuat substansi sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan mengendalikan berbagai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

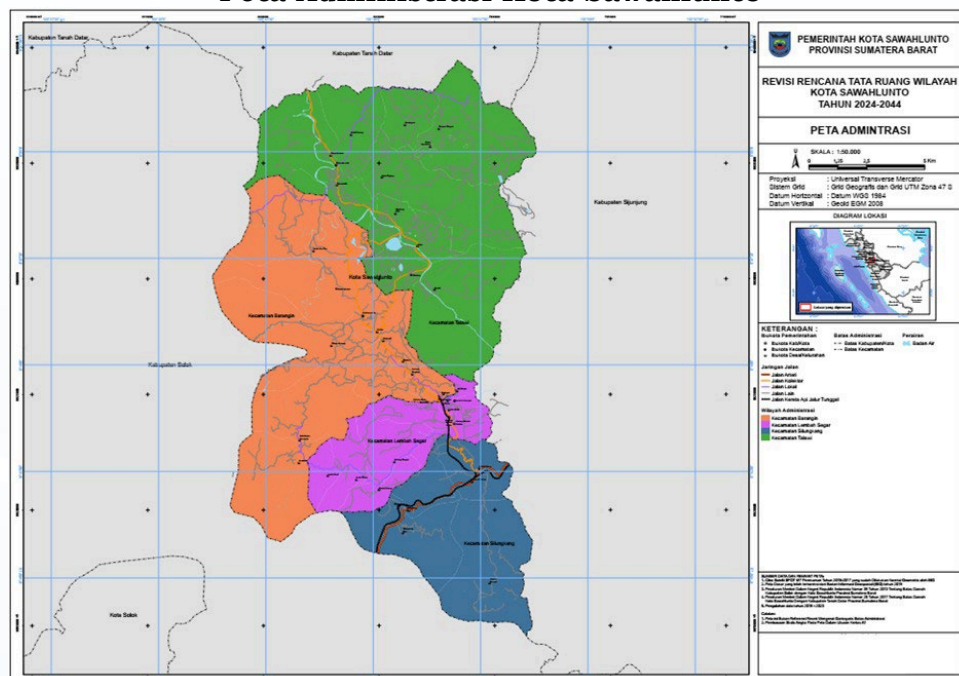
A. Posisi dan Peran Strategis Daerah

1. Kondisi Geografi dan Administrasi

Secara geografis Kota Sawahlunto berada pada gugusan perbukitan Bukit Barisan dengan posisi koordinat antara 100°41'00' - 100°49'60" Bujur Timur dan 00°33'40'-00°48'33' Lintang Selatan. Batas wilayah Kota Sawahlunto meliputi :

- Sebelah Utara : Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung
- Sebelah Selatan : Kabupaten Solok
- Sebelah Barat : Kabupaten Solok
- Sebelah Timur : Kabupaten Sijunjung

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kota Sawahlunto



Sumber Data : Rancangan Revisi RTRW Kota Sawahlunto 2025-2045

Kota Sawahlunto memiliki luas wilayah 231,94 km² atau 23.194,55 ha yang sebelumnya seluas 273,45 km². Perubahan luas wilayah ini berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, sesuai dengan Surat Kapus PPBW BIG No. B-3.11/PBW-BIG/IGD.04.04/10/2022 tanggal 03 Oktober 2022.

Secara administratif Kota Sawahlunto terdiri dari 4 (empat) kecamatan. Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Lembah Segar dengan luas sebesar 10,37 % dari luas Kota Sawahlunto sedangkan kecamatan terluas adalah Kecamatan Talawi dengan luas sebesar 39,09 % dari luas Kota Sawahlunto.

Berikut rincian kecamatan yang ada di Kota Sawahlunto beserta luas wilayah masing-masing.

Tabel 2.1
Luas Administratif Per Kecamatan Kota Sawahlunto

Kecamatan	Luas	
	(Ha)	(%)
Barangin	7.849,19	33,84
Lembah Segar	2.404,83	10,37
Silungkang	3.873,91	16,70
Talawi	9.066,62	39,09
Total	23.194,55	100,00

Sumber Data : Rancangan Revisi RTRW Kota Sawahlunto 2025-2045

Di samping kecamatan, Kota Sawahlunto juga terdiri dari 27 Desa dan 10 Kelurahan. Berikut Desa dan Kelurahan beserta jumlah RT, RW, dan Dusun per-Desa/Kelurahan di Kota Sawahlunto :

Tabel 2.2
Jumlah RT, RW Dan Dusun Per Kecamatan Kota Sawahlunto

No	Kecamatan Desa/Kelurahan	RT	RW	Dusun
(1) Kecamatan Barangin		32	13	25
01	Desa Lumindai	-	-	5
02	Desa Balai Batu Sandaran	-	-	3
03	Kel. Saringan	11	5	-
04	Kel. Lubang Panjang	7	2	-
05	Kel. Durian I	6	2	-
06	Kel. Durian II	8	4	-
07	Desa Talago Gunung	-	-	4
08	Desa Santur	-	-	5
09	Desa Kolok Mudiak	-	-	3
10	Desa Kolok Nan Tuo	-	-	5
(2) Kecamatan Lembah Segar		32	14	22
01	Desa Lunto Barat	-	-	4
02	Desa Lunto Timur	-	-	4
03	Desa Pasar Kubang	-	-	3
04	Desa Kubang Tengah	-	-	5
05	Desa Kubang Utara Sikabu	-	-	6
06	Kel. Pasar	6	3	-
07	Kel. Kubang Sirakuk Utara	8	2	-
08	Kel. Kubang Sirakuk Selatan	4	2	-
09	Kel. Aur Mulyo	6	3	-
10	Kel. Tanah Lapang	4	2	-
11	Kel. Air Dingin	4	2	-
(3) Kecamatan Silungkang		-	-	21
01	Desa Silungkang Oso	-	-	4
02	Desa Taratak Banchah	-	-	3
03	Desa Muaro Kalaban	-	-	6
04	Desa Silungkang Tigo	-	-	5
05	Desa Silungkang Duo	-	-	3
(4) Kecamatan Talawi		-	-	39
01	Desa Sikalang	-	-	4
02	Desa Rantih	-	-	2
03	Desa Salak	-	-	3
04	Desa Sijantang Koto	-	-	3
05	Desa Talawi Hilir	-	-	4
06	Desa Talawi Mudik	-	-	4
07	Desa Bukik Gadang	-	-	3
08	Desa Batu Tanjung	-	-	4
09	Desa Kumbayau	-	-	4
10	Desa Data Mansiang	-	-	2
11	Desa Tumpuak Tengah	-	-	6
Jumlah		64	27	107

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka, 2024

Dari tabel di atas, diketahui bahwa Kota Sawahlunto mempunyai keunikan sebagai sebuah kota, yang mana Kota Sawahlunto didominasi oleh desa yang merupakan karakter kabupaten. Kondisi tersebut mengakibatkan Kota Sawahlunto juga memperoleh dana pembangunan untuk pemerintah terendah yaitu Dana Desa. Hal ini menjadi sebuah kekuatan bagi Sawahlunto untuk dapat membangun daerahnya, dengan anggaran dana desa yang mendekatkan pelaku pembangunan dan objek pembangunan itu sendiri.

2. Topografi

Kondisi topografi Kota Sawahlunto didominasi daerah perbukitan. Kota Sawahlunto memiliki kemiringan lereng dan morfologi yang begitu beragam, mulai dari dataran sampai dengan perbukitan terjal, dengan rentang lereng 0-8% sampai dengan lebih dari 40%. Namun sebagian besar berada pada kelereng 25-40 % dengan area seluas 6.768,08 Ha, terletak di bagian selatan Kota Sawahlunto, meliputi Kecamatan Lembah Segar dan Kecamatan Silungkang.

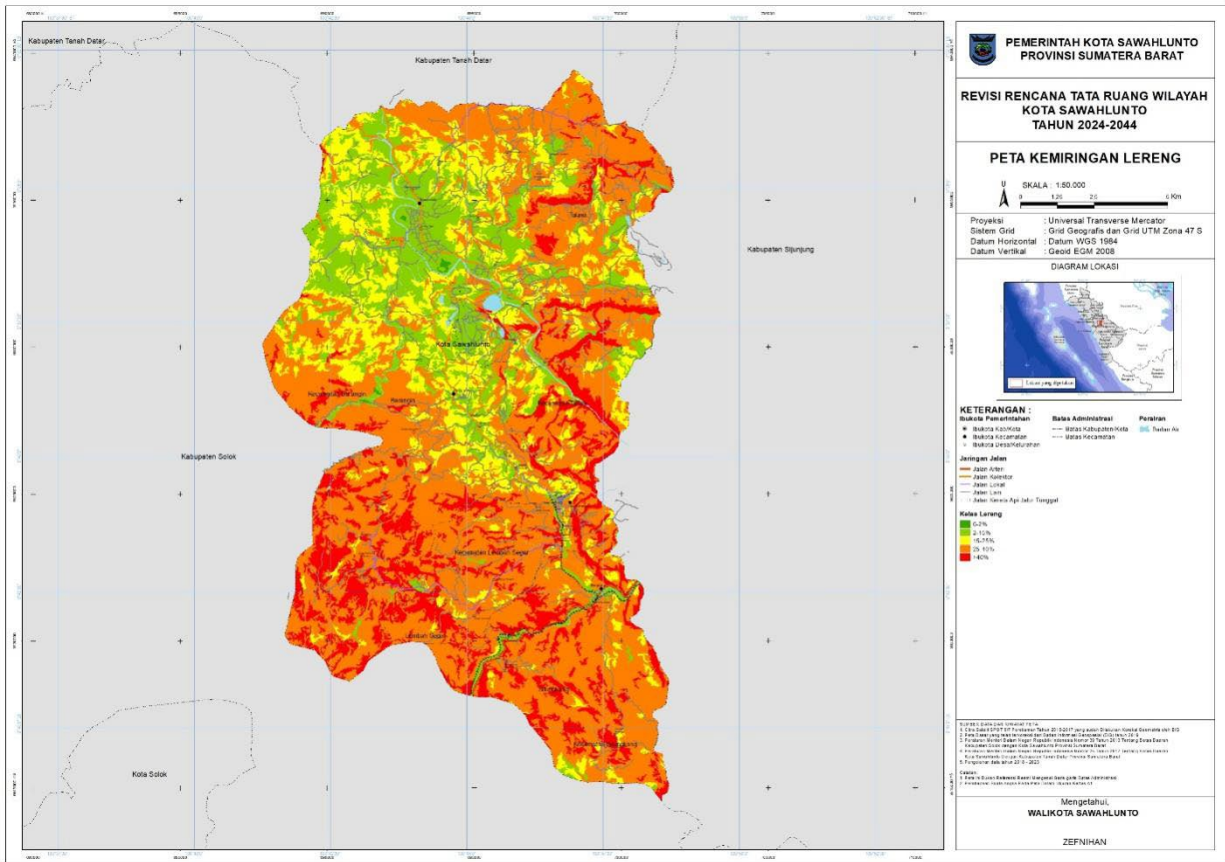
Tabel 2.3
Ketinggian Wilayah Kota Sawahlunto

Kecamatan	Tinggi Kecamatan (mdpl)	Ibu Kota Kecamatan
Talawi	650	Talawi Mudik
Barangin	650	Santur
Lembah Segar	785	Aur Mulyo
Silungkang	548	Muaro Kalaban

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025

Ketinggian wilayah Kota Sawahlunto cukup bervariasi mulai dari 175 mdpl sampai dengan > 975 mdpl. Mayoritas terletak pada ketinggian 175–375 mdpl dengan luas sebesar 10.392,39 ha yang terletak di Kecamatan Barangin dan Kecamatan Talawi. Sedangkan untuk ketinggian lebih dari 975 meter di atas permukaan laut terletak di Kecamatan Barangin. Ketinggian pusat daerah kecamatan di Kota Sawahlunto lebih jelas terlihat pada tabel di atas.

Gambar 2.2
Peta Kemiringan Lereng Kota Sawahlunto



Sumber Data : Rancangan Revisi RTRW Kota Sawahlunto 2025-2045

Berdasarkan Peta Kemiringan Lahan Kota Sawahlunto di atas terlihat bahwa kelas kemiringan lahan kategori datar (0 – 2 %) berada di Kecamatan Silungkang seluas 29 Ha dan di Kecamatan Talawi Seluas 991 Ha. Sementara kelas kemiringan lahan kategori Curam (> 40 %) berada di Kecamatan Silungkang. Kemiringan Lahan berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Kemiringan Lahan Kota Sawahlunto

Kecamatan	Luas Lahan Dengan Kelerengan (Ha)				
	0 – 2%	2 – 15%	15 – 5%	25 –40%	> 40%
Talawi	991	1.420	2.680	3.195	1.653
Barangin	343	1.514	1.432	3.450	2.136
Lembah Segar	240	358	694	1.836	2.110
Silungkang	29	288	735	340	1.901

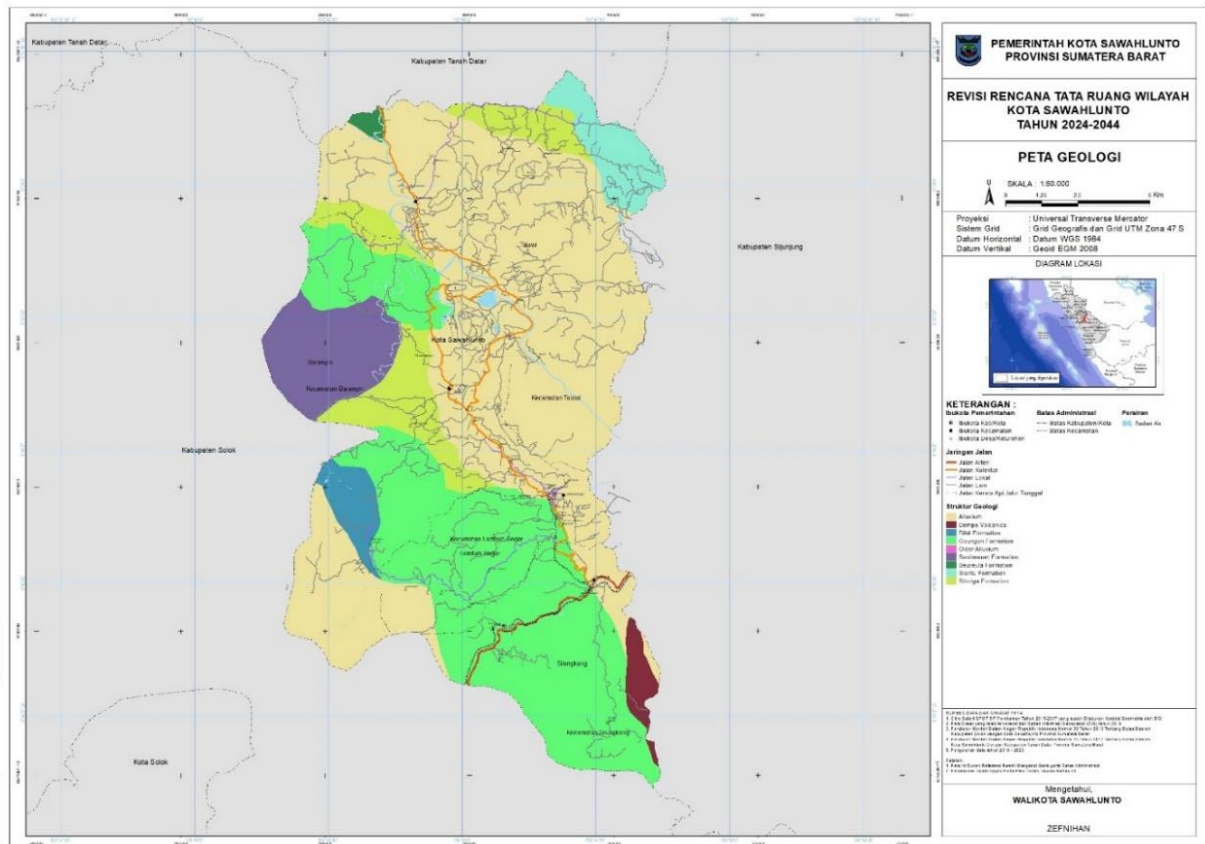
Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, 2024

Pada tabel di atas terlihat kemiringan lahan di Kota Sawahlunto memiliki kemiringan yang beragam, dari mulai dataran sampai dengan perbukitan terjal. Bentang alam yang landai terletak hampir di tengah Kota Sawahlunto, tetapi umumnya merupakan jalur-jalur sempit sehingga sulit untuk dikembangkan menjadi permukiman perkotaan. Posisinya memanjang sepanjang Sesar Sawahlunto, memisahkan perbukitan terjal yang terletak di kedua sisinya. Dataran yang relatif landai sehingga dimungkinkan untuk pengembangan permukiman perkotaan hanya dijumpai di Kecamatan Talawi, Pusat Kota Lama dan sebagian wilayah di Kecamatan Barangin yang wilayahnya relatif datar sebesar 18 % dari luas wilayah.

3. Kondisi Geologi

Kota Sawahlunto terletak pada cekungan pra-tersier Ombilin yang terbentuk belah ketupat panjang dengan ujung bulat, selebar 22,50 km dan panjang 47,00 km. Formasi ombilin merupakan lapisan paling muda menurut kategori zaman tersier atau berumur sekitar 2 juta tahun. Kota Sawahlunto terletak di atas Formasi Sawahlunto, batuan yang terbentuk pada zaman Kala *Eocen* sekitar 40 - 60 juta tahun yang lalu. Berikut merupakan Peta Geologi Kota Sawahlunto :

Gambar 2.3
Peta Geologi Kota Sawahlunto



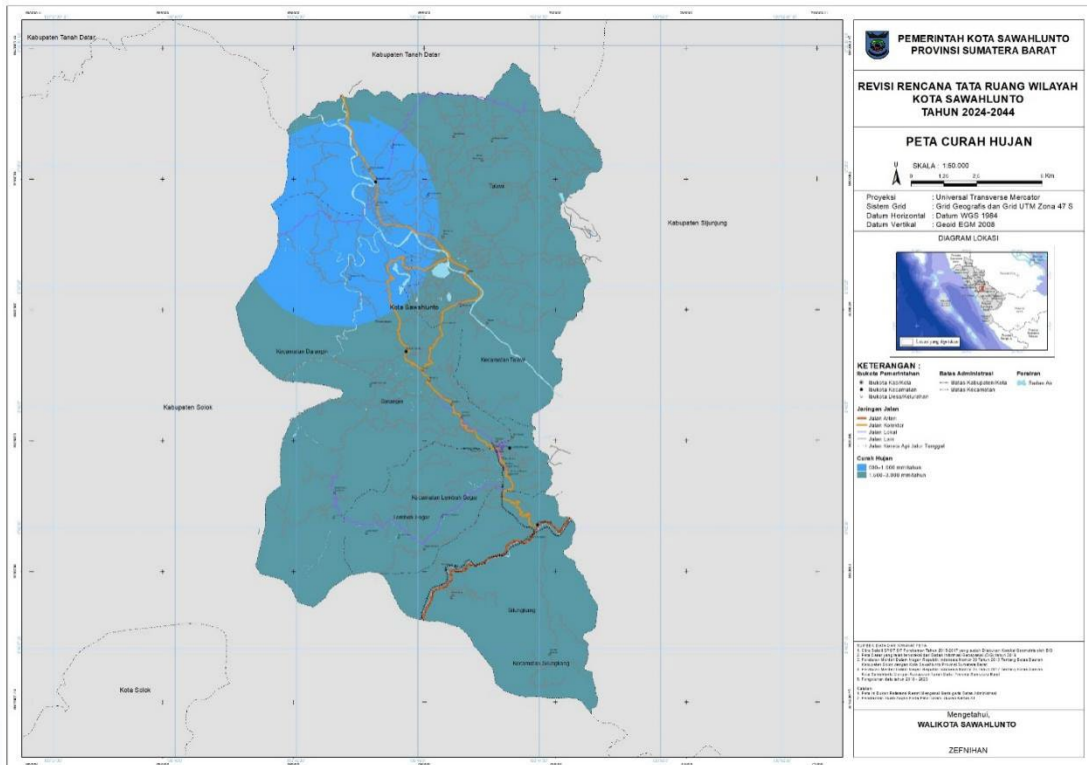
Sumber Data : Rancangan Revisi RTRW Kota Sawahlunto 2025-2045

Kota Sawahlunto memiliki dua buah sesar geser yaitu sesar geser Sawahlunto dan sesar geser Batu Tajam berarah Barat Laut sampai dengan Tenggara, mengikuti arah sesar besar Sumatera. Jalur kedua sesar tersebut berada di daerah perbukitan sebelah Barat Daya jalan raya Sawahlunto sampai dengan Santur. Secara regional, struktur geologi yang berkembang di cekungan ombilin berarah ke Barat Laut sampai dengan Tenggara dan Timur Laut sampai dengan Barat Daya, baik itu berupa sesar/patahan maupun lipatan. Cekungan Ombilin ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian oleh sesar normal Tanjung Ampalu/sesar Pamuatan yaitu bagian timur merupakan blok yang turun (mengarah kebawah) sedangkan bagian Barat yaitu daerah Sawahlunto dan sekitarnya merupakan blok yang relatif naik.

4. Kondisi Klimatologi

Kota Sawahlunto memiliki suhu rata-rata 22 °C sampai dengan 28 °C, perbedaan antara temperatur siang dan malam antara 5 °C sampai dengan 7 °C. Curah hujan di Kota Sawahlunto berkisar antara 2.200 mm/tahun sampai dengan 2.400 mm/tahun mayoritas terletak di Kecamatan Barangin dan Lembah Segar. Berikut merupakan pemetaan kondisi curah hujan Kota Sawahlunto :

Gambar 2.4
Peta Curah Hujan Kota Sawahlunto



Sumber Data : Rancangan Revisi RTRW Kota Sawahlunto 2025-2045

Tingkat curah hujan di Kota Sawahlunto terbagi dalam 2 (dua) kategori yaitu curah hujan kategori rendah dengan besaran 0-1000 mm/tahun dan curah hujan kategori sedang dengan besaran 1000-3000 mm/tahun dengan suhu rata – rata 22 °C sampai dengan 28 °C, perbedaan antara temperatur siang dan malam antara 5 °C sampai dengan 7 °C. Daerah dengan curah hujan rendah ada di sebagian kecil Kecamatan Barangin dan Talawi.

5. Peran Strategis Daerah

Kota Sawahlunto merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat yang dijuluki sebagai Kota Arang. Julukan tersebut tak lepas dari tambang batubara yang aktif semenjak zaman kolonial Belanda, tetapi telah berhenti beroperasi dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini Kota Sawahlunto berkembang menjadi Kota Wisata tua yang multietnik dan menjadi salah satu Kota Tua terbaik di Indonesia. Di kota yang didirikan pada tahun 1888 ini, banyak berdiri bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda. Sebagian telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Kota Sawahlunto. Pada tahun 2001 seluruh pemangku kebijakan di lingkungan pemerintah Kota Sawahlunto bersepakat untuk merubah arah dan haluan pembangunan daerah dari Kota Tambang menjadi Kota Wisata. Kesepakatan ini dituangkan ke dalam visi

Kota Sawahlunto melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kota yaitu “Sawahlunto Tahun 2020 Menjadi Kota Wisata Tambang Yang Berbudaya”. Sejak saat itulah seluruh arah pembangunan ditujukan terhadap pembangunan wisata di Kota Sawahlunto.

Kerja keras pemerintah Kota Sawahlunto perlahan menuai hasil. Pada tanggal 6 Juli 2019 *Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto* (OCMHS) atau yang disebut dengan Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto (WTBOS) telah ditetapkan sebagai Warisan Dunia UNESCO dengan keputusan Komite Warisan Dunia. Ini merupakan langkah besar pemerintah Kota Sawahlunto dalam mewujudkan mimpi menjadi Kota Wisata. Kawasan WTBOS yang ditetapkan meliputi 7 (tujuh) kabupaten/kota, yaitu : Kota Sawahlunto, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Solok, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Padang Pariaman.

Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto (OCMHS) merupakan warisan budaya dunia ke-5 setelah Candi Borobudur, Candi Prambanan, Situs Purba Sangiran, dan *Cultural Landscape* Subak Bali. Cikal bakal pengajuan ini dimulai sejak tahun 2009, penggarapan secara intens untuk proses nominasi, evaluasi, hingga penetapan berlangsung cukup cepat, dimana hanya membutuhkan waktu 4 (empat) tahun sejak masuk dalam daftar sementara (*tentative list*) pada 30 Januari 2015. OCMHS ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO pada tanggal 6 Juli 2019 pukul 12.15 waktu Baku, Azerbaijan (<https://whc.unesco.org/en/list/1610>) yang dihadiri oleh 22 (dua puluh dua) orang delegasi Republik Indonesia dengan Ketua Delegasi Prof. Rosa Surya Putra selaku Duta Besar/Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, dihadiri juga oleh Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. Irwan Prayitno, S.Psi, M.Sc dan Deri Asta, SH selaku Walikota Sawahlunto.

Selain wisata sejarah, Kota Sawahlunto juga fokus pada pengembangan wisata alam. Kota Sawahlunto telah mendapatkan status *Geopark* Nasional untuk kawasan wisata Batu Runcing di Desa Silungkang Oso Kecamatan Silungkang. Pada tahun 2021, tengah menuju status UNESCO *Global Geopark*. *Geopark* atau Taman Bumi sendiri menjadi salah satu upaya Kota Sawahlunto untuk menuju pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Selain itu, Kota Sawahlunto juga berkomitmen untuk menjadi salah satu kota di Indonesia yang mendapatkan dukungan peningkatan kapasitas dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta energi melalui *Global Covenant of Mayors for Climate & Energy (GCoM) Asia*.

B. Potensi Sumber Daya Alam

Kota Sawahlunto dilalui oleh Daerah Aliran Sungai (DAS) Indragiri yang terdiri dari 5 (lima) buah sungai atau batang utama yaitu :

➤ **Batang Ombilin**

Sungai Ombilin merupakan sungai terbesar yang mengalir dari utara ke selatan, dari Desa Talawi ke Desa Rantih Kecamatan Talawi. Sungai ini berhulu dari danau Singkarak dan bermuara di Batang Kuantan Riau, dengan debit sungai di daerah Sikalang-Rantih lebih dari 10 m³/s.

- **Batang Malakutan**
Sungai ini mengalir dari Barat yang berhulu di Desa Siberambang, Kecamatan X Koto, Kabupaten Solok ke Timur melewati Desa Kolok Mudiak dan Desa Kolok Nan Tuo di Kecamatan Barangin yang akhirnya bertemu dengan Batang Ombilin.
- **Batang Lunto**
Sungai ini berhulu di Desa Lumindai, Kecamatan Barangin dan mengalir dari arah Barat menuju Timur dan membelah kota dan bermuara di Batang Ombilin.
- **Batang Sumpahan**
Sungai ini berhulu di Kubang Utara Sikabu di Kecamatan Lembah Segar kemudian bertemu dengan Batang Lunto di Kelurahan Pasar dan akhirnya bermuara di Batang Ombilin.
- **Batang Lasi**
Sungai ini berhulu di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok yang mengalir menyusuri jalan Nasional Solok ke Sijunjung di Kecamatan Silungkang dan keluar di perbatasan Kota Sawahlunto sampai dengan Sijunjung. Sungai ini kemudian bertemu juga dengan Batang Ombilin di Sungai Kuantan atau Indragiri.

Sumber daya air yang ada 2 (dua), yaitu:

- **Air Tanah**
Keberadaan air tanah terbatas pada kedalaman di bawah 400 meter sementara celahan batuan batupasir penyusun formasi Sawah Tambang dan formasi Sawahlunto kurang mengindikasikan adanya lapisan pembawa air sehingga potensi air tanah sangat kecil. Kecilnya potensi ini menyebabkan air tanah tidak dapat diandalkan sebagai salah satu sumber air baku di Kota Sawahlunto.
- **Mata Air**
Mata air muncul pada lereng bukit, dimana debit kurang dari 2 liter/s yang terdapat di Sikalang, mengalir sepanjang tahun, sumber mata air ini umumnya jernih dan digunakan sebagai salah satu sumber air bersih penduduk setempat dan PDAM. Mata air lain dijumpai ke arah Tenggara Sawahlunto di Bukit Sibantar Desa Sikalang, sementara itu sumber mata air dengan debit cukup besar yaitu lebih dari 5 liter/s, mengalir sepanjang musim, terdapat di Desa Balai Batu Sandaran. Mata air tersebut muncul pada kontak antara batu gamping dan lapisan tufa yang ditampung pada kolam permanen dan dialirkan melalui pipa besi sebagai salah satu sumber air bersih di Kota Sawahlunto.

Tabel 2.5
Persentase Luas Lahan Menurut Penggunaan Per Kecamatan
Kota Sawahlunto Tahun 2024

Penggunaan Lahan	Kecamatan			
	Silungkang	Lembah Segar	Barangin	Talawi
Tanah Tidak ada Bangunan	95,01	94,14	94,53	87,89
Tanah Permukiman	3,69	5,34	4,41	4,04
Perairan	0,44	-	0,39	1,39
Tanah Perkantoran dan Perdagangan	0,65	0,28	0,27	0,12
Tanah Industri dan Pergudangan	-	-	0,08	0,34

Penggunaan Lahan	Kecamatan			
	Silungkang	Lembah Segar	Barangin	Talawi
Tanah Jasa	0,03	0,14	0,09	0,18
Taman	-	-	0,03	0,00
Penggunaan Tanah lainnya	0,17	0,10	0,21	6,03
Total	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka, 2024

Pada tahun 2024, penggunaan lahan terbesar adalah tegalan seluas 6.492,73 ha atau 26,67% dari total luas Kota Sawahlunto. Sedangkan kawasan permukiman seluas 959,02 yaitu 3,94% dari total luas Kota Sawahlunto.

Berdasarkan Rancangan Revisi RTRW Kota Sawahlunto 2025–2045 kawasan strategis yang dijadikan prioritas dalam penataan ruang dan mempunyai pengaruh yang penting untuk pengembangan kota adalah bidang ekonomi dan sosial budaya.

➤ **Kawasan Strategis Ekonomi**

- Desa Kolok Mudiak, Desa Kolok Nan Tuo, Desa Santur di Kecamatan Barangin.
- Desa Rantih, Desa Salak, Desa Sikalang, Desa Talawi Hilir di Kecamatan Talawi.
- Desa Muaro Kalaban di Kecamatan Silungkang.

➤ **Kawasan Strategis Sosial dan Budaya**

- Kelurahan Air Dingin, Kelurahan Aur Mulyo, Kelurahan Kubang Sirakuk Utara, Kelurahan Kubang Utara Sikabu, Kelurahan Pasar Kelurahan Tanah Lapang di Kecamatan Lembah Segar;
- Kelurahan Saringan di Kecamatan Barangin.

C. Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pengendalian Lingkungan Hidup, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sementara itu, daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/ atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada forum koordinasi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (PPPE) seluruh Indonesia menyepakati penggunaan konsep jasa ekosistem (*ecosystem services*) sebagai metode dalam mengukur daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Metode ini dinilai lebih mudah penyusunannya dan dapat digunakan dalam banyak keperluan penyusunan perencanaan Pembangunan pada setiap tingkatan wilayah.

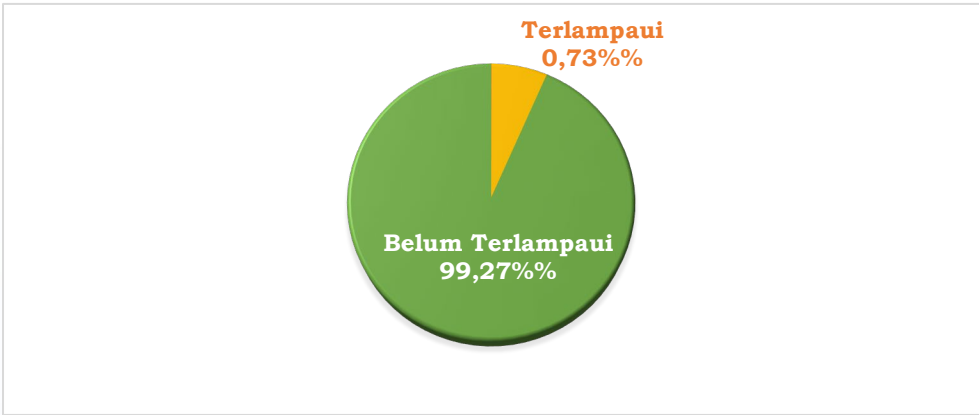
a. Daya Dukung Air

Air mempunyai fungsi yang sangat vital bagi lingkungan terutama bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Kekurangan air akan mengganggu pertumbuhan dan produktivitas tanaman serta akan berpengaruh pada kemampuan dalam menyediakan jasa lingkungan hidup salah satunya sebagai penyedia pangan.

Status daya dukung air Kota Sawahlunto berdasarkan Surat Keputusan Menteri LH dan Kehutanan Nomor 146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional diketahui sudah terlampaui seluas 170 hektar (0,7%) yang terdapat di Kecamatan Talawi. Jika dilihat dari status air Kota Sawahlunto, secara keseluruhan status air Kota Sawahlunto belum terlampaui.

Berikut status daya dukung air di Kota Sawahlunto berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 :

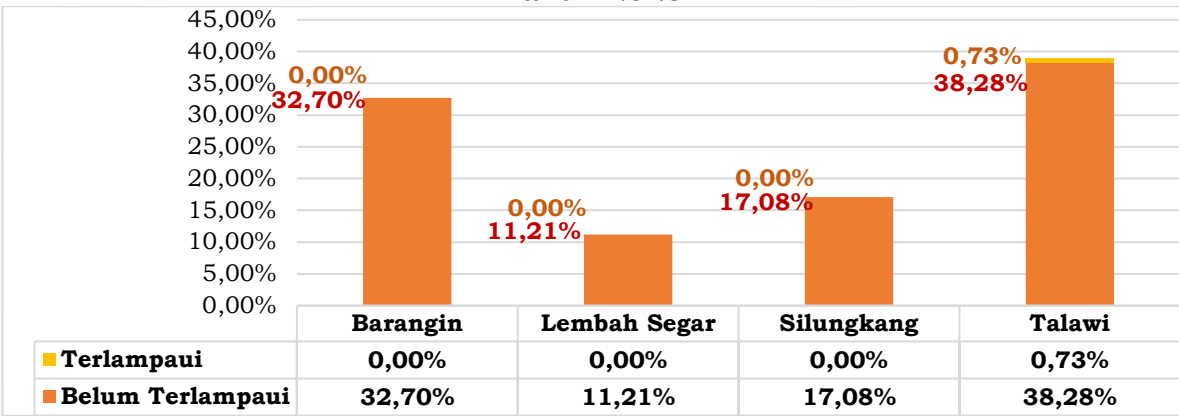
Grafik 2.1
Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kota Sawahlunto Tahun 2025



Sumber Data : KLHS RPJMD Kota Sawahlunto 2025-2029

Berikut status daya dukung air di Kota Sawahlunto menurut kecamatan yang ada:

Grafik 2.2
Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kota Sawahlunto Berdasarkan Kecamatan Tahun 2025



Sumber Data : KLHS RPJMD Kota Sawahlunto 2025-2029

Tabel 2.6
Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kota Sawahlunto Tahun 2025

Kecamatan	Belum Terlampaui (Ha)	Terlampaui (Ha)	Total
Barangin	7.584	0	7.584
Lembah Segar	2.600	0	2.600
Silungkang	3.962	0	3.962
Talawi	8.878	170	9.048
Total	23.024	170	23.194

Sumber Data : KLHS RPJMD Kota Sawahlunto 2025-2029

b.

Daya Dukung Pangan

Daya dukung pangan merupakan kemampuan suatu wilayah guna menyediakan kebutuhan pangan. Kota Sawahlunto sendiri memang bukan dikenal sebagai daerah penghasil tanaman pangan yang dikarenakan beberapa faktor. Untuk lebih jelasnya daya dukung pangan Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.7

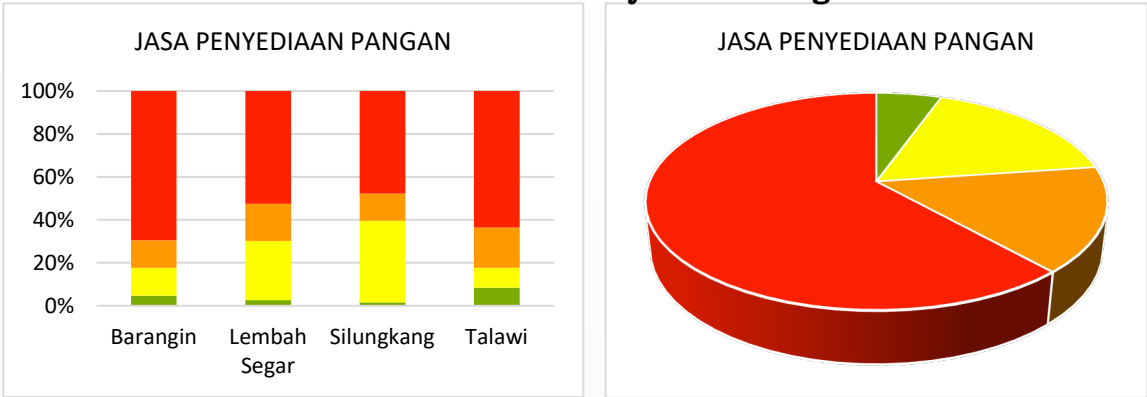
Status DDDTLH Jasa Penyediaan Pangan

Kecamatan	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Total
Barangin		364,6223	985,7445	973,0769	5292,245	7615,689
Lembah Segar		69,16372	719,8244	447,5916	1369,991	2606,571
Silungkang		62,68983	1473,147	494,7709	1856,231	3886,838
Talawi		765,3268	841,6642	1698,7	5779,756	9085,447
Total		1.261,803	4.020,38	3.614,14	14.298,22	23.194,54

Sumber Data : KLHS RPJMD Kota Sawahlunto 2025-2029

Grafik 2.3

Status DDDTLH Jasa Penyediaan Pangan



Dari data Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Jasa Penyediaan Pangan, dapat dilihat bahwa secara umum Daya dukung jasa penyediaan pangan Kota sawahlunto sangat rendah, yaitu sekitar 61,64 persen dari wilayah Sawahlunto.

D.

Bertahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

1.

Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan

dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan.

Tabel 2.8
Indeks Ketahanan Pangan Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan Pangan	67,36	69,82	73,85	84,38	83,45

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025

Indeks Ketahanan Pangan Kota Sawahlunto tahun 2020-2021 tergolong tinggi dengan kriteria “tahan” yang menunjukkan kondisi ketahanan pangan yang baik. Dan mulai tahun 2022 hingga tahun 2024 Indeks Ketahanan Pangan Kota Sawahlunto sudah tergolong sangat tinggi dengan kriteria “sangat tahan” yang bermakna Kota Sawahlunto dalam kondisi ketahanan pangan yang sangat baik.

2. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)

Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase atau probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya.

Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasikan semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya.

Tabel 2.9
Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan
Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Kepulauan Mentawai	7,08	8,36	11,19	10,62	9,31
Kab. Pesisir Selatan	5,2	6,23	6,49	8,65	8,82
Kab. Solok	6,71	6,5	7,07	6,83	8,94
Kab. Sijunjung	5,68	6,01	6,69	5,88	8,67
Kab. Tanah Datar	7,02	6,8	7,38	9,54	9,1
Kab. Padang Pariaman	5,55	5,61	6,95	7,41	8,68
Kab. Agam	6,5	6,77	9,05	9,86	9,24
Kab. Lima Puluh Kota	6,12	6,36	7,24	6,85	8,83
Kab. Pasaman	8,04	7,11	8,86	8,67	8,74
Kab. Solok Selatan	6,3	5,17	8,04	8,01	10,95
Kab. Dharmasraya	5,67	6,03	6,65	6,25	7,51
Kab. Pasaman Barat	5,9	6,13	6,47	7,21	8,55
Kota Padang	4,64	5	6,81	6,52	8,57
Kota Solok	5,02	5,84	5,7	6,71	7,89
Kota Sawahlunto	6,41	6,15	9,22	8,76	8,19
Kota Padang Panjang	6,05	6,4	7,13	6,81	5,33
Kota Bukittinggi	4,27	3,86	8,1	6,21	7,35
Kota Payakumbuh	5,37	5,09	6,7	6,51	8,17
Kota Pariaman	3,75	5,29	7,55	8,38	7,3
Provinsi Sumatera Barat	5,86	6,02	7,31	7,63	8,88

Sumber Data : sumbar.bps.go.id

PoU Kota Sawahlunto tahun 2024 berada di posisi kedua tertinggi dari 7 kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat setelah Kota Padang. PoU Kota Sawahlunto sebesar 8,19 bermakna 8,19 % penduduk Kota Sawahlunto mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif.

Tingginya Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Kota Sawahlunto bukan disebabkan ketidakmampuan ekonomi masyarakat Kota Sawahlunto, tetapi lebih pada pola konsumsi pangan yang belum sesuai dengan standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Hal ini mengacu pada pendapatan masyarakat (PDRB Per Kapita) Kota Sawahlunto yang berada pada posisi ke-4 tertinggi di Provinsi Sumatera Barat setelah Kota Bukittinggi, Kota Padang dan Kota Padang Panjang. Di samping itu tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto juga masuk dalam 10 kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia selama lima tahun terakhir.

Pola konsumsi pangan masyarakat Kota Sawahlunto yang belum sesuai dengan standar kecukupan energi sebagaimana terlihat pada skor pola pangan harapan (PPH) Kota Sawahlunto. Sasaran Skor PPH ideal yaitu 100% sesuai dengan bobotnya masing-masing sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pola Pangan Harapan yang menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam memotret kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui penilaian jumlah dan komposisi pangan berdasarkan PPH.

Tabel 2.10
Skor Pola Pangan Harapan Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

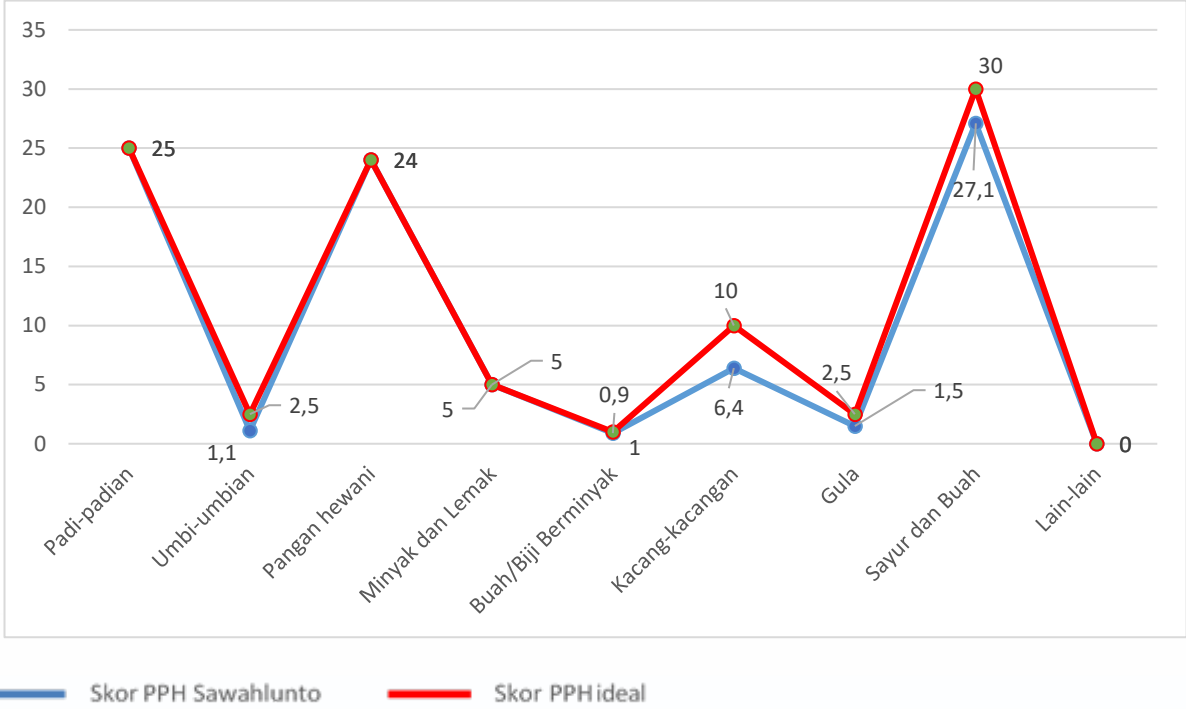
No	Kelompok Pangan	Survei Analisis Konsumsi Pangan Tahun				
		Skor PPH				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Padi-padian	20,4	22,5	23,7	25,0	25,0
2.	Umbi-umbian	0,9	0,8	1,5	1,0	1,1
3.	Pangan hewani	22,7	22,5	23,6	24,0	24,0
4.	Minyak dan Lemak	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
5.	Buah/Biji Berminyak	1,0	0,9	0,8	1,0	0,9
6.	Kacang-kacangan	6,1	6,8	5,1	5,6	6,4
7.	Gula	0,8	0,5	0,6	1,3	1,5
8.	Sayur dan Buah	26,7	25,4	24,9	25,2	27,1
9.	Lain-lain	0	0	0,0	0,0	0,0
	Total	83,7	84,5	85,1	88,2	91,1

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, 2025

Berikut skor pola pangan harapan (PPH) Kota Sawahlunto disandingkan dengan skor PPH ideal sebagaimana terlihat pada grafik berikut :

Grafik 2.4

Perbandingan Konsumsi dan Keragaman Pangan Pola Harapan Ideal Berdasarkan Kelompok Pangan Tahun 2024



Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, 2024

Pada grafik di atas terlihat konsumsi pangan masyarakat Kota Sawahlunto berada di bawah kondisi ideal, hal ini tergambar dari komposisi dan jumlah pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat Kota Sawahlunto yang rata-rata berada di bawah skor PPH ideal, kecuali pada kelompok padi padian, pangan hewani, minyak/lemak yang mempunyai skor sama dengan idealnya. Untuk itu ke depan perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Sawahlunto bagaimana pola makan yang sehat dan sesuai dengan kebutuhan energi tubuh untuk beraktivitas, serta diversifikasi makanan dengan pola “kenyang tak mesti dengan makan nasi”.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa daerah yang *PoUnya* tinggi tidak selalu disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat daerah tersebut untuk membeli makanan yang bergizi dan sesuai dengan kebutuhan energinya, namun ada yang disebabkan rendahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat daerah tersebut tentang pola makan yang bergizi, seimbang dan aman.

3. Konsumsi Listrik Per Kapita

Konsumsi listrik per kapita adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kwh (*kilo watt hours*) energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung dari sumber energi oleh seluruh penduduk suatu wilayah.

Konsumsi listrik per kapita juga dapat digunakan sebagai indikator taraf hidup masyarakat. Semakin tinggi taraf hidup masyarakat, semakin tinggi pula kecenderungan penggunaan peralatan listrik oleh masyarakat yang berdampak pada semakin tingginya pemakaian (konsumsi)

Tabel 2.11
Konsumsi Listrik Per Kapita (Kwh/Kapita)
Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Konsumsi Listrik (MWh) yang tercatat di PT PLN Ranting Silungkang {(KWh)/kapita}	1.254.712	1.203,602	1.237,862	1.245,528	1.270,532
2	Jumlah Konsumsi Listrik (MWh) yang tercatat di PT PLN ULP Kota Sawahlunto {(KWh)/kapita}	1.339,263	1.351,463	1.355,532	1.394,636	1.416,714

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka 2025

Pada tabel di atas terlihat perkembangan konsumsi listrik per kapita di Kota Sawahlunto berfluktuasi selama lima tahun terakhir (tahun 2020-2024) dengan kisaran 1.203,602 kwh/kapita hingga 1.416,714 kwh/kapita. Peningkatan konsumsi listrik per kapita di Kota Sawahlunto seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Kota Sawahlunto.

4. Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum. SPAM meliputi jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan. SPAM Jaringan Perpipaan adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan (Rumah Tangga) melalui sistem perpipaan. SPAM bukan jaringan perpipaan terdiri atas : sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air, bangunan penangkap mata air.

Berikut persentase akses rumah tangga terhadap sumber air minum jaringan perpipaan Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir:

Tabel 2.12
Persentase Akses Rumah Tangga Terhadap
Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan
Tahun 2020- 2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan	50,90	51,55	55,05	49,67	52,81

Sumber Data : Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sawahlunto, 2025

Persentase akses rumah tangga terhadap sumber air minum jaringan perpipaan Kota Sawahlunto selama periode tahun 2020-2024 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Penurunan tahun 2023 disebabkan adanya kerusakan jaringan perpipaan yang disebabkan oleh bencana alam dan umur konstruksi.

Tabel 2.13
Persentase Akses Rumah Tangga Terhadap
Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan Kabupaten/Kota
Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Persentase (%)
1	Kab. Kepulauan Mentawai	6,61
2	Kab. Pesisir Selatan	17,66
3	Kab. Solok	21,80
4	Kab. Sijunjung	34,59
5	Kab. Tanah Datar	21,78
6	Kab. Padang Pariaman	17,88
7	Kab. Agam	16,73
8	Kab. Lima Puluh Kota	11,99
9	Kab. Pasaman	28,72
10	Kab. Solok Selatan	27,56
11	Kab. Dharmasraya	0,46
12	Kab. Pasaman Barat	14,65
13	Kota Padang	47,79
14	Kota Solok	87,72
15	Kota Sawahlunto	49,67
16	Kota Padang Panjang	63,71
17	Kota Bukittinggi	35,92
18	Kota Payakumbuh	84,06
19	Kota Pariaman	17,98
	Provinsi Sumatera Barat	26,94

Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat

Rumah tangga yang memiliki akses terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan di kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Barat bervariasi. Pada tahun 2024 kabupaten/kota dengan Persentase akses rumah tangga terhadap sumber air minum jaringan perpipaan tertinggi adalah Kota Solok dan yang terendah adalah Kabupaten Dharmasraya, sedangkan Kota Sawahlunto berada pada posisi ke-4 tertinggi setelah Kota Solok, Kota Payakumbuh dan Kota Padang Panjang.

5. Kapasitas Air Baku (m3/detik)

Kapasitas air baku (m³/detik) adalah debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air lainnya.

Air baku merupakan kebutuhan pokok, karena sampai saat ini air adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan dapat dimanfaatkan manusia untuk konsumsi atau melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Perkembangan kapasitas air baku Kota Sawahlunto tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.14
Capaian Air Baku Kota Sawahlunto
Tahun 2020 - 2024

No	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kapasitas Air Baku M3/detik	0,101	0,104	0,142	0,144	0,110

Sumber Data : Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota sawahlunto, 2024

Kapasitas air baku di Kota Sawahlunto secara umum mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2024 terjadi penurunan kapasitas air baku sebesar 0,034 M3/detik. Penurunan ini disebabkan terjadinya bencana alam pada IPA Lunto dan rusaknya pompa utama Rantih. Langkah -langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan sumber air baku adalah memperbaiki sarana dan prasaran serta mencari alternatif sumber air baku sebaik mungkin dengan sistem grafitisasi agar lebih efisien.

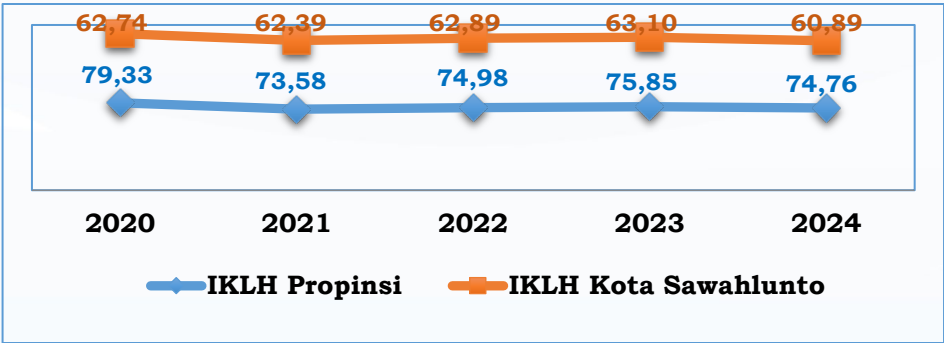
E. Lingkungan Hidup Berkualitas

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah : (1) Kualitas Air, yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD,COD, Total Fosfat, Fecal Coli; (2) Kualitas udara, yang diukur berdasarkan parameter-parameter : SO2 dan NO2; dan (3) Kualitas tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan. dan dinamika vegetasi.

Grafik 2.5
Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Kota Sawahlunto Dan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020-2024



Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2025

Berdasarkan data Provinsi Sumatera Barat, capaian IKLH Kota Sawahlunto tahun 2020-2024 berkisar antara 60 hingga 63,10 yang berada pada kategori “sedang” ($50 \leq x < 70$). Pada tahun 2024 terjadi penurunan IKLH Kota Sawahlunto, hal ini disebabkan penurunan Indeks Kualitas Air (IKA) sebagai akibat badan air sungai tercemar. Kondisi ini diketahui berdasarkan pemantauan kualitas air pada tahun 2024 yang menunjukkan bahwa dari 14 titik pemantauan air, hanya 1 titik yang memenuhi baku mutu air, 4 titik pencemaran sedang dan 9 titik pencemaran ringan. Hal ini mencerminkan limbah rumah tangga yang belum terkelola dengan baik.

2. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Akses sanitasi aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T).

Akses sanitasi aman sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virus yang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Oleh sebab itu perlu menciptakan kondisi lingkungan yang mendukung kualitas air baku, menyediakan layanan air minum dan sanitasi yang aman dengan melibatkan masyarakat secara menyeluruh (inklusif).

Berikut rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Provinsi Sumatera Barat tahun 2023-2024 :

Tabel 2.15
Data Sanitasi Aman Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023-2024

No	Kabupaten/Kota	Sanitasi Aman (%)	
		2023	2024
1	Kab. Kepulauan Mentawai	5,49	2,64
2	Kab. Pesisir Selatan	4,59	6,70
3	Kab. Solok	4,79	4,90
4	Kab. Sijunjung	3,63	2,48
5	Kab. Tanah Datar	4,42	4,89
6	Kab. Padang Pariaman	4,83	6,34
7	Kab. Agam	14,48	12,70
8	Kab. Lima Puluh Kota	7,95	5,60
9	Kab. Pasaman	0,57	0,96
10	Kab. Solok Selatan	7,86	5,44
11	Kab. Dharmasraya	4,09	5,62
12	Kab. Pasaman Barat	1,26	2,74
13	Kota Padang	19,40	18,56
14	Kota Solok	13,00	16,25
15	Kota Sawahlunto	9,74	13,43
16	Kota Padang Panjang	9,87	8,42
17	Kota Bukittinggi	7,71	6,38
18	Kota Payakumbuh	16,35	19,48
19	Kota Pariaman	16,84	16,92
	Provinsi Sumatera Barat	8,57	8,65

Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat

Rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi aman di Provinsi Sumatera Barat masih sangat rendah, yakni di bawah 20 %. Pada tahun 2024 kabupaten/kota yang telah melaksanakan sanitasi aman tertinggi adalah Kota Payakumbuh dan yang terendah adalah Kabupaten Pasaman, sedangkan Kota Sawahlunto berada pada posisi ke-5 tertinggi setelah Kota Payakumbuh, Kota Padang, Kota Pariaman dan Kota Solok.

Data Akses sanitasi aman mulai tersedia tahun 2023, sebelumnya indikator kinerja yang dipantau dan dievaluasi adalah Rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak. Berikut rumah tangga dengan akses sanitasi layak di Provinsi Sumatera Barat tahun 2020-2024 :

Tabel 2.16
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat (Persen) Tahun 2020 – 2024

Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Kepulauan Mentawai	61.73	71.05	69.09	72.28	75.64
Kab. Pesisir Selatan	71.51	71.40	73.68	76.82	78.93
Kab. Solok	50.36	47.63	57.28	59.75	62.56
Kab. Sijunjung	64.95	72.63	74.14	72.18	74.53
Kab. Tanah Datar	62.86	53.73	57.49	62.99	65.02
Kab. Padang Pariaman	59.72	55.86	59.76	61.77	63.73
Kab. Agam	71.58	77.25	74.84	77.04	77.00
Kab. Lima Puluh Kota	53.86	55.69	64.19	60.64	64.31
Kab. Pasaman	40.90	45.26	42.81	46.74	49.35
Kab. Solok Selatan	59.17	58.57	55.33	54.69	56.71
Kab. Dharmasraya	84.16	82.71	81.09	81.57	85.99
Kab. Pasaman Barat	63.65	70.28	68.98	71.64	73.49
Kota Padang	82.50	80.13	76.10	78.56	78.22
Kota Solok	89.19	91.40	92.47	94.35	92.19
Kota Sawahlunto	80.77	86.45	86.86	90.18	91.24
Kota Padang Panjang	72.15	73.04	77.42	76.31	79.57
Kota Bukittinggi	90.25	89.93	85.09	89.32	89.07
Kota Payakumbuh	87.75	89.49	87.10	87.75	87.93
Kota Pariaman	81.81	79.56	82.91	84.18	85.99
Provinsi Sumatera Barat	68.11	68.68	69.27	70.97	72.82

Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2025

Rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak di Kota Sawahlunto cenderung meningkat dan merupakan kabupaten/kota dengan Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi layak tertinggi kedua setelah Kota Solok.

Perbedaan akses sanitasi aman dengan akses sanitasi layak dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.17
Komponen Akses Sanitasi Layak Dan Akses Sanitasi Aman

Komponen	Akses Layak	Akses Aman
Bangunan Atas	Kloset leher angsa	Kloset leher angsa
Bangunan Bawah	Tangki septik dan lubang tanah (khusus perdesaan)	Tangki Septik atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL)
Pengguna	Bangunan atas digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu.	Bangunan atas digunakan oleh satu rumah tangga
Frekuensi Penyedotan	(tidak dinilai)	Minimal sekali dalam jangka waktu 5 tahun terakhir

Sumber Data : Meta Data Target Indikator Sanitasi (Bappenas, PPAS, Usaid Iuwash Plus)

3. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)

Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah mempertimbangkan karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan ;

- Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti *biokonversi maggot* BSF, *vermi composting*, *biodigester*, dsb.
- Daur ulang materi (*material recovery*) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti; plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Rantai nilai daur ulang materi biasanya melibatkan beberapa langkah seperti industri daur ulang swasta yang membeli, memproses, dan memperdagangkan bahan mulai dari pengambilan hingga diproses ulang menjadi produk, bahan, atau zat yang memiliki nilai pasar. Pada rantai daur ulang materi ini melibatkan pemulung informal, lapak, pengepul, bandar, dan pendaur ulang rantai akhir.

Tabel 2.18

Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah

Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024

No	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Timbulan Sampah Tahunan (Ton/Tahun)	6,852.82	6,843.52	6,882.56	6,925.99	6,988.44
2	Pengurangan Sampah Tahunan (Sampah Terolah) (Ton/Tahun)	1,472.73	1,407.80	1,701.03	1,743.90	1,829.74
3	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (% Pengurangan Sampah)	21.49	20.57	24.72	25.18	26.18

Sumber Data : SIPSN DPKP2LH Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah Kota Sawahlunto semakin meningkat, walaupun peningkatannya belum begitu signifikan. Hal ini disebabkan masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya sampah dan lingkungan hidup sehat serta terbatasnya sarana dan prasarana pengolahan sampah. Cakupan pelayanan sampah di Kota Sawahlunto meliputi : Sudah dilayani (90% atau 34 desa/kelurahan) dan Belum terlayani (10% atau 3 desa/kelurahan).

- Proporsi RT dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)
 Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pelayanan rumah tangga untuk pengumpulan sampah. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah adalah rumah tangga yang :

- Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah misal : fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu; atau
- Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200 m, dilayani dengan frekuensi tetap dan rutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu.

Tabel 2.19
Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024

No	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rumah Tangga	14.257	14.314	14.371	14.630	14.847
2	Rumah tangga dengan akses terhadap layanan penuh pengumpulan sampah	2.457	3093	3215	3097	2470
3	Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah Kota Sawahlunto	17,23	21,61	22,37	21,17	16,64

Sumber Data : DPKP2LH 2024

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah Kota Sawahlunto selama tahun 2020-2024 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun, hal ini disebabkan adanya perilaku sebagian masyarakat yang tidak taat terhadap kewajiban untuk membayar retribusi sampah, sehingga layanan sampah tidak beroperasi di beberapa lokasi.

5. Indeks Tutupan Lahan

Indeks Tutupan Lahan (*Land Cover Index*) adalah metrik yang menggambarkan distribusi dan karakteristik tutupan lahan di suatu wilayah. Ini biasanya digunakan dalam analisis spasial dan pemantauan lingkungan untuk memahami perubahan penggunaan lahan dan dampaknya terhadap ekosistem.

Indeks tutupan lahan memberikan informasi yang penting dalam pemetaan, perencanaan lingkungan, pemantauan perubahan iklim, dan analisis ekologi. Dengan memantau perubahan dalam distribusi tutupan lahan dari waktu ke waktu, maka dapat dipahami dampak aktivitas manusia dan alam terhadap lingkungan, serta perlunya merencanakan pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Metode pemantauan indeks tutupan lahan meliputi penginderaan jauh, survei lapangan, dan analisis data spasial menggunakan teknologi GIS (Sistem Informasi Geografis). Luas Tutupan Lahan (LTL) dihitung dari penjumlahan luas sebagai berikut :

- a. Hutan lahan kering primer, hutan rawa primer, hutan mangrove primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, hutan mangrove sekunder dan hutan tanaman;

- b. Semak/belukar dan semak/belukar rawa yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, sekitar danau/ waduk, sempadan pantai dan lahan kemiringan lereng > 25% (lebih besar dari dua puluh lima persen) dikalikan 0,6 (nol koma enam);
- c. Ruang terbuka hijau seperti hutan kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati dikalikan 0,6 (nol koma enam);
- d. Rehabilitasi hutan dan lahan, dikalikan 0,0 – 0,6 (nol koma nol sampai nol koma enam).

Tabel 2.20
Indeks Tutupan Lahan Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Tutupan Lahan Kota Sawahlunto (%)	38,76	36,95	37,01	38,12	39,73

Sumber Data : DPKP2LH Kota Sawahlunto 2024

Pada tabel di atas terlihat Indeks Tutupan Lahan Kota Sawahlunto tahun 2020-2024 berkisar antara 36,95 hingga 39,73 dan berada pada kategori “kurang” (Kategori Indeks Kualitas Tutupan Lahan : Sangat Baik (90 – 100), Baik (70 – 89), Sedang (50 – 69), Kurang (25 – 49), Sangat Kurang (0 – 24).

F. Reliensi Terhadap Bencana Dan Perubahan Iklim

Bencana yang terjadi di Kota Sawahlunto pada umumnya dipengaruhi oleh faktor-faktor geologi, litologi, struktur geologi (patahan) kemiringan lereng, geomorfologi, air tanah dan daya dukung tanah. Berdasarkan data yang diperoleh, bencana yang sering terjadi berupa tanah longsor dan aktivitas sesar (patahan).

a. Gempa Bumi

Kota Sawahlunto memiliki potensi kebencanaan yang kemungkinan akan terjadi gempa bumi, sedangkan longsor dan struktur patahan akan cenderung mejadi kendala dalam pembangunan wilayah. Berdasarkan data spasial kerawanan gempa bumi di Kota Sawahlunto dari mulai rendah, sedang dan tinggi, mayoritas kerawanan gempa bumi Kota Sawahlunto berada pada rawan gempa bumi tinggi, dipengaruhi oleh struktur geologi, lereng dan morfologi serta vegetasi yang ada.

b. Gerakan Tanah Atau Rawan Longsor

Kerawanan bencana gerakan tanah atau longsor di Kota Sawahlunto cukup bervariasi dari mulai kerawanan rendah, sedang dan tinggi. Kerawanan bencana longsor dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti aktivitas manusia, keberadaan vegetasi, jenis tanah dan kelerengan. Mayoritas kerawanan bencana longsor di Kota Sawahlunto berstatus “sedang” dengan luas 15.003,77 ha.

1. Indeks Resiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRBI) dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk melihat potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya,

kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.

Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRBI), diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan menunjukkan bahwa tingkat kapasitas suatu wilayah semakin baik (meningkat), dengan asumsi nilai bahaya dan kerentanan dianggap konstan. Klasifikasi tingkat Indeks Risiko Bencana (IRBI adalah sebagai berikut : Rendah (Indeks <13), Sedang (Indeks 13 – 144), Tinggi (Indeks >144).

Kota Sawahlunto merupakan kota yang relatif rawan bencana karena kondisi topografi Kota Sawahlunto yang didominasi daerah perbukitan dengan kemiringan lereng dan morfologi yang begitu beragam, mulai dari dataran sampai dengan perbukitan terjal, dengan rentang lereng 0-8% sampai dengan lebih dari 40%, sebagian besar berada pada kelerengan 25-40 %. Disamping topografi Kota Sawahlunto yang rawan bencana longsor, perubahan iklim juga menjadi pemicu bencana kekeringan, banjir dan angin puting beliung. Sehingga beberapa kawasan di Kota Sawahlunto menjadi daerah rawan bencana. Tercatat dalam kurun lima tahun terakhir bencana longsor dan angin puting beliung adalah kejadian yang paling sering terjadi di Kota Sawahlunto.

Potensi kerawanan bencana gerakan tanah atau longsor di Kota Sawahlunto cukup bervariasi dari mulai kerawanan rendah, sedang dan tinggi. Kerawan bencana longsor dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti aktivitas manusia, keberadaan vegetasi, jenis tanah dan kelerengan. Mayoritas kerawanan bencana longsor di Kota Sawahlunto berstatus “sedang” dengan luas 15.003,77 ha. Berdasarkan hal tersebut, Kota Sawahlunto mempunyai risiko bencana seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.21
Nilai Indeks Risiko Bencana (IRBI) Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	113,20	113,20	109,56	108,94	114,22

Sumber Data : BPBD Kota Sawahlunto, 2025

Pada tabel di atas terlihat nilai Indeks Risiko Bencana Kota Sawahlunto berfluktuatif pada tahun 2020 - 2024 yang berada pada kelas kategori risiko sedang. Penilaian IRBI ini dikeluarkan oleh BNPB dengan dasar nilai IKD Kabupaten/Kota. Penilaian IRBI didasarkan pada ancaman, kerentanan dan ketahanan terhadap bencana. Dalam pengkajian risiko bencana ini perlu dipertimbangkan analisa data dan rekaman kejadian yang terjadi, analisa para ahli dan masyarakat lokal terhadap kemungkinan ancaman, analisa kerugian jiwa, harta benda dan lingkungan yang terdampak. Sehingga hasil kajian risiko tersebut dapat digunakan sebagai kebijakan pemerintah untuk pengurangan risiko bencana.

Pemerintah Kota Sawahlunto telah mempunyai dokumen Kajian Risiko Bencana 2022-2027 dan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana. Dokumen ini dapat dijadikan sebagai dasar penghitungan pengurangan risiko bencana dan proyeksi risiko bencana di Kota Sawahlunto untuk masa akan datang.

2. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) digunakan sebagai upaya mengurangi indeks risiko bencana yang diharapkan mampu dilaksanakan di daerah dengan implementasi fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasinya. IKD disusun untuk semua jenis bencana berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan dini, pendidikan, pelatihan, keterampilan, mitigasi, dan sistem kesiapsiagaan. Semakin besar nilai IKD semakin baik karena semakin besar nilai IKD menunjukkan atau menggambarkan kesiapan kapasitas pemerintah daerah dalam penanganan bencana semakin baik. Nilai indeks ketahanan daerah berada pada rentang nilai 0 - 1, dengan klasifikasi : Rendah (Indeks $\leq 0,4$), Sedang (Indeks $0,4 - 0,8$), Tinggi (Indeks $0,8 - 1$).

Berikut perkembangan Indeks Ketahanan Daerah Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir :

Tabel 2.22
Indeks Ketahanan Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,44	0,56	0,50	0,46	0,43

Sumber Data : BPBD Kota Sawahlunto, 2025

Nilai Indeks Ketahanan Daerah Kota Sawahlunto tahun 2020-2024 berada dalam kategori sedang. Indeks Ketahanan Daerah berbanding terbalik dengan Indeks Risiko Bencana, semakin tinggi nilai ketahanan daerah maka akan semakin kecil nilai risiko bencana daerah tersebut.

Penanggulangan bencana merupakan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi oleh setiap daerah. Karena menyangkut keselamatan dan kemaslahatan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Sawahlunto menyiapkan rangkaian kegiatan sosialisasi pencegahan bencana kepada masyarakat, menyampaikan informasi rawan bencana dan pembentukan desa tangguh bencana sebagai bentuk inovasi Kota Sawahlunto menghadapi bencana. Selain itu pemerintah Kota Sawahlunto juga menyiapkan sarana prasarana darurat kebencanaan. Selain itu untuk penanganan fasilitas umum yang terdampak bencana Pemerintah Kota Sawahlunto juga bisa mengajukan proposal ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat ke daerah membantu daerah dalam segi pembiayaan.

Pengukuran IKD Kota Sawahlunto dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto yang meliputi tujuh pengukuran, yaitu : 1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; 2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; 3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; 4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; 5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; 6) Perkuatan kesiapsiagaan; dan 7) Penanganan darurat bencana.

G. Demografi

Data demografi memberikan informasi tentang komposisi populasi seperti usia, jenis kelamin, status perkawinan, serta tingkat pendidikan. Data-data ini sangat penting untuk perencanaan pembangunan, dengan kata lain data demografi membantu dalam memahami bagaimana struktur populasi dapat berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan masyarakat.

1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Perkembangan populasi penduduk Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.23
Jumlah Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024

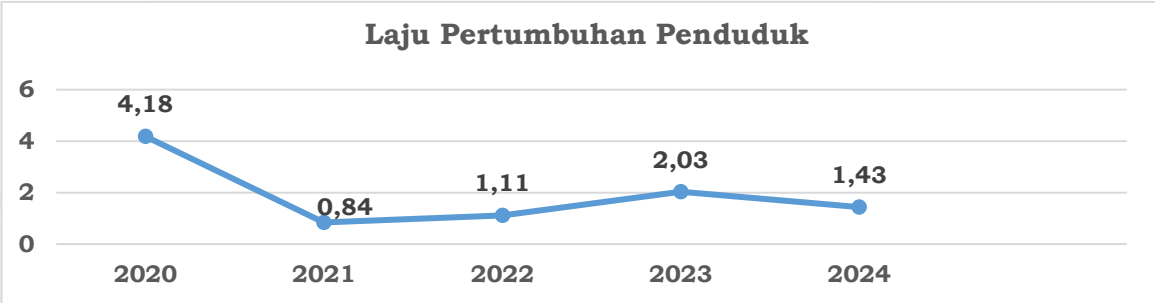
Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk (Jiwa)	65.138	65.687	66.413	67.760	68.730
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	4,18	0,84	1,11	2,03	1,43

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2021-2025

Secara administratif jumlah penduduk Kota Sawahlunto meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata peningkatan per tahun 1,92 %. Peningkatan jumlah penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2020.

Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya yang disebabkan adanya kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk.

Grafik 2.6
Laju Pertumbuhan Penduduk
Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024



Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2021-2025, Data Diolah Tahun 2025

Dari grafik di atas terlihat laju pertumbuhan penduduk Kota Sawahlunto periode tahun 2020-2024 berfluktuatif. Penurunan laju pertumbuhan penduduk terjadi pada tahun 2021 dan tahun 2024, sedangkan tahun 2022-2023 cenderung

meningkat. Meningkatnya jumlah penduduk tentunya akan memicu munculnya permasalahan kependudukan. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin besar kebutuhan akan ketersediaan pangan, sarana dan prasarana atau fasilitas umum, fasilitas kesehatan, pendidikan dan lainnya. Oleh sebab itu data laju pertumbuhan penduduk sangat dibutuhkan untuk memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang dan memprediksi kebutuhan sarana dan prasarana umum yang dibutuhkan

2. Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk menurut kelompok umur menggambarkan banyak hal, diantaranya kebutuhan pelayanan, tingkat produktivitas serta konsumsi. Kelompok umur 0 - 14 tahun membutuhkan pelayanan sosial dan fasilitas umum yang lebih besar, seperti pelayanan kesehatan serta pendidikan, sehingga secara umum tingkat konsumsi akan lebih tinggi dibandingkan dengan produksi yang mampu dihasilkan. Hal yang sama juga terjadi pada kelompok umur di atas 65 tahun, dimana produktivitas secara umum mulai menurun, di sisi lain mereka membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih besar dibandingkan kelompok umur lainnya. Kelompok umur 0 - 14 tahun dan kelompok umur di atas 65 tahun disebut juga penduduk usia non produktif. Sedangkan kelompok usia 15 - 64 tahun atau disebut juga penduduk usia produktif, produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya, sehingga semakin besar jumlah penduduk pada kelompok umur ini semakin besar peluang untuk meningkatkan produktivitas suatu wilayah.

Komposisi penduduk ini juga akan berpengaruh pada Rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan merupakan perbandingan jumlah penduduk usia non produktif terhadap jumlah penduduk usia. Semakin tinggi rasio ketergantungan, semakin besar beban yang harus ditanggung penduduk produktif, sebaliknya semakin kecil rasio ketergantungan, semakin kecil beban kelompok umur produktif untuk menanggung penduduk usia tidak produktif.

Berikut komposisi penduduk Kota Sawahlunto berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin tahun 2020-2024 :

Tabel 2.24
Komposisi Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024
Berdasarkan Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Jenis Kelamin 2020		Jml	Jenis Kelamin 2021		Jml	Jenis Kelamin 2022		Jml	Jenis Kelamin 2023		Jml	Jenis Kelamin 2024		Jml
	L	P		L	P		L	P		L	P		L	P	
0 – 4	3.011	2.809	5.820	3011	2810	5821	3019	2818	5837	3120	2950	6060	3.090	2.940	6.030
5 – 9	2.624	2.545	5.169	2598	2528	5126	2592	2526	5118	2750	2640	5400	2.870	2.720	5.590
10 – 14	2.837	2.608	5.445	2797	2581	5378	2751	2556	5307	2660	2590	5250	2.630	2.600	5.220
15 – 19	2.867	2.622	5.489	2860	2617	5477	2863	2621	5484	2840	2640	5480	2.810	2.640	5.450
20 – 24	2.721	2.597	5.318	2708	2582	5290	2701	2573	5274	2820	2590	5400	2.840	2.590	5.430
25 – 29	2.620	2.546	5.166	2640	2547	5187	2660	2553	5213	2710	2630	5340	2.740	2.640	5.370
30 – 34	2.422	2.337	4.759	2447	2361	4808	2479	2390	4869	2600	2530	5130	2.670	2.600	5.270
35 – 39	2.396	2.310	4.706	2430	2333	4763	2469	2364	4833	2420	2330	4750	2.450	2.340	4.790
40 – 44	2.260	2.217	4.477	2289	2242	4531	2323	2270	4593	2360	2270	4630	2.390	2.290	4.670
45 – 49	2.138	2.125	4.263	2179	2154	4333	2225	2194	4419	2190	2160	4360	2.210	2.180	4.390
50 – 54	1.907	1.950	3.857	1943	1982	3925	1984	2017	4001	2020	2030	4050	2.070	2.060	4.120
55 – 59	1.753	1.761	3.514	1800	1795	3595	1852	1836	3688	1820	1850	3670	1.830	1.870	3.710
60 – 64	1.246	1.367	2.613	1280	1403	2683	1319	1438	2757	1530	1580	3110	1.620	1.650	3.270
65 – 69	942	1.092	2.034	986	1140	2126	1030	1186	2216	1040	1200	2240	1.080	1.240	2.320
70 – 74	506	638	1.370	545	679	1224	588	726	1314	670	830	1500	730	900	1.630
75 +	517	847	1.138	542	878	1420	575	915	1490	540	860	1400	570	890	1.460
Jumlah	32.767	32.371	65.138	33.055	32.632	65.687	33.430	32.983	66.413	34.090	33.670	67.760	34.570	34.150	68.730

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025

Komposisi penduduk Kota Sawahlunto menunjukkan bahwa kelompok umur 0-4 adalah yang paling dominan. Dan dari komposisi penduduk juga dapat dihitung Rasio Ketergantungan Kota Sawahlunto dengan capaian di bawah 50, yang berarti bahwa satu orang penduduk tidak produktif ditanggung oleh 1-2 orang penduduk produktif. Pada tahun 2024, Rasio ketergantungan Kota Sawahlunto sebesar 47,88 yang berarti setiap 100 orang penduduk produktif di Kota Sawahlunto menanggung 48 orang penduduk yang tidak produktif yang terdiri dari anak-anak dan lansia.

Tabel 2.25
Komposisi Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2024
Berdasarkan Pendidikan Dan Jenis Kelamin

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah (%)
		Laki-laki (%)	Perempuan (%)	
1	Tidak/Belum Sekolah	12,65	11,83	24,48
2	Belum Tamat SD/Sederajat	5,74	5,18	10,92
3	Tamat SD/Sederajat	8,02	6,81	14,83
4	SLTP/ Sederajat	6,94	6,53	13,47
5	SLTA/ Sederajat	12,84	11,98	24,81
6	Diploma I/II	0,27	0,50	0,77
7	Akademi/Diploma III/ Sarjana Muda	0,88	1,55	2,44
8	Diploma IV/Strata-I	2,74	5,02	7,76
9	Strata-II	0,24	0,28	0,52
10	Strata-III	0,00	0,00	0,01
	SAWAHLUNTO	50,32	49,68	100,00

Sumber Data : Disduk dan Capil Kota Sawahlunto, 2024

Komposisi penduduk Kota Sawahlunto berdasarkan pendidikan menunjukkan bahwa pendidikan penduduk Kota Sawahlunto yang dominan adalah SLTA sederajat dengan komposisi laki-laki lebih banyak dari perempuan. Hal ini sejalan dengan program pemerintah yang menerapkan wajib belajar 13 tahun dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.

3. Rasio Penduduk

Penduduk Kota Sawahlunto didominasi oleh penduduk laki-laki dengan rasio jenis kelamin penduduk terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.26
Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Lembah Segar	99,88	100,27	100,62	100,82	101,15
Barangin	99,92	99,94	99,97	99,80	99,79
Silungkang	102,47	102,50	102,52	102,35	102,28
Talawi	102,75	102,69	102,62	102,35	102,20
Total	101,22	101,30	101,36	101,25	101,23

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2021-2025

Berdasarkan tabel di atas, Rasio jenis kelamin penduduk Kota Sawahlunto di atas 100 yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan, dengan kata lain pada setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat

penduduk laki-laki lebih dari 100 orang. Pada tahun 2024, Rasio jenis kelamin penduduk Kota Sawahlunto sebesar 101,23 yang berarti pada setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat penduduk laki-laki sebanyak 102 orang.

4. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk yang tinggi pada suatu wilayah dapat memudahkan dalam pelayanan sosial, namun jika telah melebihi kapasitas dapat menyebabkan degradasi lingkungan. Kepadatan penduduk yang tinggi juga dapat meningkatkan kerawanan sosial jika tidak didukung oleh pertumbuhan ekonomi wilayah yang tinggi pula. Secara umum, tingkat kepadatan penduduk di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.27
Kepadatan Penduduk Kota Sawahlunto (Jiwa/Km²)
Tahun 2020 – 2024

Kecamatan	Kepadatan Penduduk				
	2020	2021	2022	2023	2024
Silungkang	346,46	348,80	352,08	358,61	363,10
Lembah Segar	253,94	255,04	256,83	260,97	263,62
Barangin	229,07	232,03	235,61	241,43	245,95
Talawi	202,16	203,69	205,78	209,76	212,58
Kota Sawahlunto	238,21	240,22	242,87	247,79	251,33

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2021-2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa kepadatan penduduk di Kota Sawahlunto belum merata. Beberapa kecamatan dengan wilayah yang lebih luas, jumlah penduduknya lebih sedikit, seperti Kecamatan Talawi dan Kecamatan Barangin. Sebaliknya Kecamatan Silungkang dan Kecamatan Lembah Segar dengan wilayah yang lebih sempit, jumlah penduduknya lebih banyak. Hal ini disebabkan Kecamatan Silungkang berada pada jalur lintas Sumatera dan Kecamatan Lembah Segar merupakan ibukota Sawahlunto dan merupakan pusat pemukiman dan perekonomian.

5. Analisa Proyeksi Kependudukan

Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Kota Sawahlunto tahun 2025 - 2030 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sawahlunto, maka diperoleh data proyeksi jumlah penduduk sebagai berikut :

Tabel 2.28
Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto
Berdasarkan Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin
Tahun 2025-2030

Kelompok Umur	Jenis Kelamin 2025		Jumlah	Jenis Kelamin 2030		Jumlah
	L	P		L	P	
0 – 4	3.000	2.876	5.876	3.021	2.896	5.917
5 – 9	3.044	2.862	5.906	3.048	2.946	5.994
10 – 14	2.615	2.616	5.231	3.048	2.955	6.003
15 – 19	2.768	2.644	5.412	2.559	2.662	5.221
20 – 24	2.849	2.599	5.448	2.766	2.630	5.396
25 – 29	2.768	2.633	5.401	2.909	2.644	5.553

Kelompok Umur	Jenis Kelamin 2025		Jumlah	Jenis Kelamin 2030		Jumlah
	L	P		L	P	
30 – 34	2.719	2.669	5.388	2.880	2.768	5.648
35 – 39	2.490	2.382	4.872	2.803	2.734	5.537
40 – 44	2.406	2.299	4.705	2.512	2.383	4.895
45 – 49	2.242	2.190	4.432	2.395	2.284	4.679
50 – 54	2.097	2.081	4.178	2.213	2.157	4.370
55 – 59	1.854	1.898	3.752	2.047	2.040	4.087
60 – 64	1.684	1.710	3.394	1.789	1.855	3.644
65 – 69	1.137	1.289	2.426	1.543	1.627	3.170
70 – 74	773	961	1.734	949	1.146	2.095
75 +	605	935	1.540	878	1.314	2.192
Jumlah	35.051	34.644	69.695	37.360	37.041	74.401

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Sawahlunto

Tabel di atas memperlihatkan perkiraan jumlah penduduk Kota Sawahlunto mengalami peningkatan sebanyak 6,75 % selama 5 tahun ke depan. Dari tabel proyeksi di atas juga terlihat bahwa jumlah penduduk yang berusia produktif (kelompok umur 15-64 tahun) cukup besar. Hal ini merupakan bonus demografi bagi pembangunan daerah sebagai tenaga produktif dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Di samping dampak positif, meningkatnya jumlah penduduk Kota Sawahlunto juga mempunyai dampak negatif, seperti muncul permasalahan kependudukan. Oleh sebab itu Pemerintah Sawahlunto perlu mempersiapkan berbagai kebijakan untuk mengatasi dampak negatif tersebut, seperti kesiapan penyediaan pangan (termasuk kawasan pertanian), penyediaan berbagai sarana prasarana fasilitas umum, seperti kesehatan, pendidikan dan lainnya agar kesejahteraan penduduk terjamin. Disamping itu juga harus memperhatikan keseimbangan alam, ketersediaan lapangan kerja dan keamanan lingkungan.

Jumlah penduduk Kota Sawahlunto 5 tahun ke depan berdasar jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.29
Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025-2030

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2024 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)	
		2025	2030
Laki-Laki	34.570	35.051	37.360
Perempuan	34.150	34.644	37.041
Rasio Jenis Kelamin	101,23	101,17	100,86

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Sawahlunto

Dari tabel di atas diketahui bahwa rasio atau perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan untuk 5 tahun ke depan dapat dikatakan seimbang. Hal ini merupakan informasi yang penting dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan ke depan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan agar dilaksanakan secara adil.

Adapun proyeksi rasio ketergantungan Kota Sawahlunto selama 5 tahun ke depan diperkirakan sebagai berikut :

Tabel 2.30
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2024 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)	
		2025	2030
0-14 Tahun	16.840	17.013	17.914
15-64 Tahun	46.470	46.982	49.030
> 65 Tahun	5.410	5.700	7.457
Angka Ketergantungan	47,88	48,34	51,74

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Sawahlunto

Memperhatikan tabel di atas, diperkirakan rasio ketergantungan di Kota Sawahlunto akan semakin meningkat untuk 5 tahun ke depan, hal ini mengandung arti semakin tinggi pula beban yang harus ditanggung penduduk produktif (usia 15-64 tahun) untuk membiayai hidup penduduk non produktif. Oleh sebab itu perlu upaya maksimal Pemerintah Kota Sawahlunto untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja usia produktif dengan meningkatkan kualitas SDM, mendukung program antinatalitas dan memperluas lapangan pekerjaan.

2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

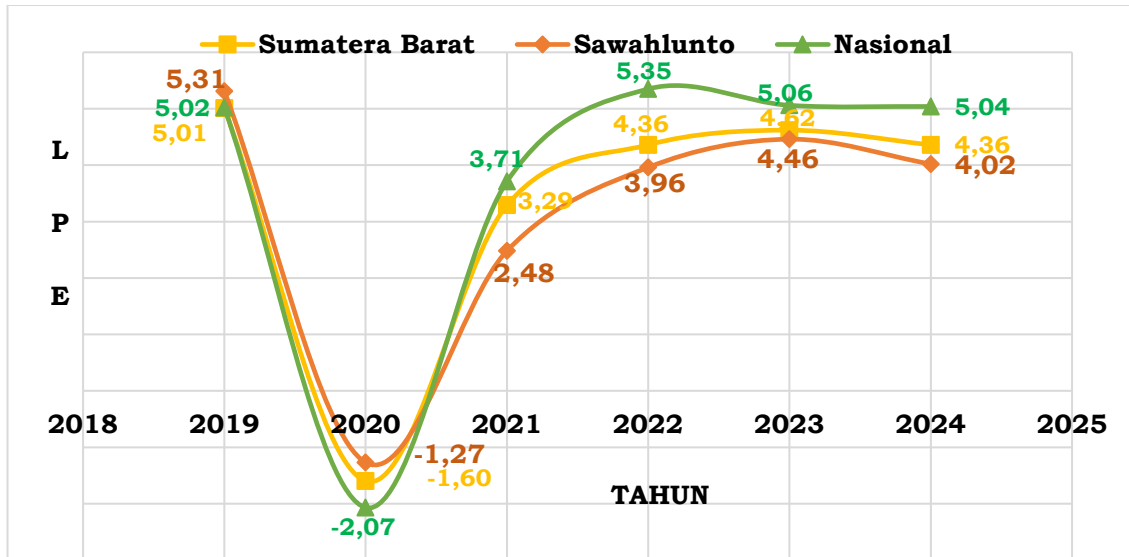
A. Kesejahteraan Ekonomi

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang dapat memberikan gambaran atas dampak kebijakan pembangunan yang dilaksanakan, khususnya dalam bidang ekonomi. PDRB digunakan untuk mengetahui kondisi pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB juga digunakan untuk mengetahui struktur perekonomian; untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran atau kesejahteraan, untuk mengetahui tingkat inflasi atau deflasi, berdasarkan perubahan harga produsen.

Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Sawahlunto sebesar 4,02%, angka ini menurun sebesar 9,87% dari tahun 2023 yang mencapai 4,46%. Berikut perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir (2020-2024) disandingkan dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional.

Grafik 2.7
Pertumbuhan Ekonomi
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2020 – 2024



Sumber Data : BPS, 2025

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto sebelum pandemi covid-19 (tahun 2019) berada di angka 5,31 persen dan angka ini berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan saat pandemi covid-19 melanda pada awal Maret 2020, ekonomi Kota Sawahlunto mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,27 persen, angka ini juga lebih baik dari angka pertumbuhan ekonomi Nasional dan Provinsi Sumatera Barat yang mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen dan 1,62 persen. Namun saat perekonomian mulai menggeliat pada tahun 2021 sampai tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto didorong oleh pertumbuhan positif di sebagian besar lapangan usaha (*Supply Side*) dan sebagian jenis pengeluaran (*Demand Side*), terutama lapangan usaha atau jenis pengeluaran yang memberikan kontribusi yang cukup besar (dominan) pada struktur perekonomian Kota Sawahlunto.

Berikut 5 lapangan usaha dominan Kota Sawahlunto sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini.

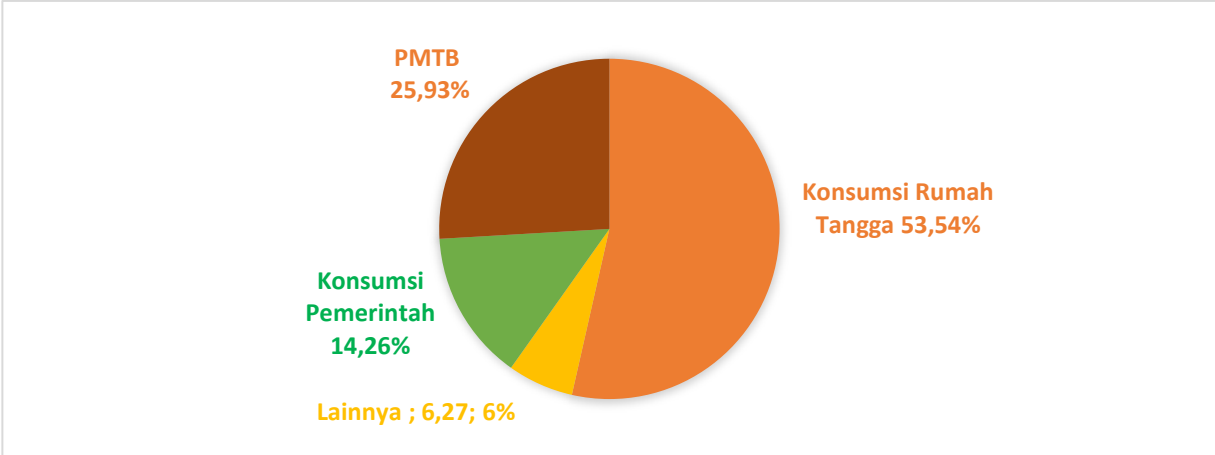
Grafik 2.8
Kontribusi Lima Lapangan Usaha Dominan Kota Sawahlunto
Berdasarkan PDRB ADHB Tahun 2024 (Dalam persen)



Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025

Berikut 4 jenis pengeluaran dominan Kota Sawahlunto sebagaimana terlihat pada grafik berikut :

Grafik 2.9
Kontribusi Jenis Pengeluaran
Kota Sawahlunto Tahun 2024 (Dalam persen)



Sumber Data : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025

Semakin tinggi pertumbuhan lapangan usaha (*supply side*) dominan dan jenis pengeluaran (*demand side*) dominan, semakin besar pula dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2024, beberapa lapangan usaha (*supply side*) dominan dan jenis pengeluaran (*demand side*) dominan mengalami perlambatan pertumbuhan dari tahun sebelumnya yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto juga melambat, seperti: *Lapangan usaha Industri Pengolahan, pertumbuhannya turun dari 5,07% menjadi 3,13%; *Lapangan usaha Konstruksi, pertumbuhannya turun dari 5,83% menjadi 3,59%; *Lapangan usaha Informasi dan Komunikasi, pertumbuhannya turun dari 7,69% menjadi 4,63%; Jenis Pengeluaran PMTB, pertumbuhannya turun dari 7,22% menjadi 2,87%, disamping itu terdapat satu lapangan usaha yang berkontraksi sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.31
Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto
Menurut Lapangan Usaha (*Supply Side*)
Dan Jenis Pengeluaran (*Demand Side*)
Tahun 2020 – 2024

No	Lapangan Usaha (<i>Supply Side</i>)	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,71	7,07	4,93	2,47	1,53
2	Pertambangan dan Penggalian	8,89	-28,23	-3,04	-0,87	-6,13
3	Industri Pengolahan	-2,98	4,91	2,56	5,07	3,13
4	Pengadaan Listrik dan Gas	-6,17	5,11	1,98	3,93	4,18
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,31	5,35	-0,70	3,61	2,14
6	Konstruksi	-5,21	3,18	3,19	5,83	3,59
7	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	-0,69	4,17	5,08	4,86	5,07
8	Transportasi dan Pergudangan	-10,96	4,35	3,53	5,60	5,37
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-10,10	9,38	11,63	5,92	6,44
10	Informasi dan Komunikasi	8,19	7,08	5,77	7,69	4,63
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,91	9,49	5,55	3,63	4,58
12	Real Estat	0,13	4,94	5,94	6,27	4,95
13	Jasa Perusahaan	-3,16	3,43	5,14	5,10	5,11

No	Lapangan Usaha (Supply Side)	2020	2021	2022	2023	2024
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,62	2,09	2,05	1,01	5,54
15	Jasa Pendidikan	4,41	4,85	4,00	1,94	2,94
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,26	7,35	4,48	7,15	5,03
17	Jasa Lainnya	-9,28	6,83	9,32	7,48	8,80
No	Jenis Pengeluaran (Demand Side)	2020	2021	2022	2023	2024
1	Konsumsi Rumah Tangga	-2,61	2,2	3,56	2,81	3,65
2	Konsumsi LNPRT	-4,25	2,12	-0,27	5,19	4,29
3	Konsumsi Pemerintah	-9,41	2,60	-3,07	0,01	1,86
4	PMTB	-3,59	2,11	4,40	7,22	2,87
PDRB ADHK Kota Sawahlunto		-1,27	2,48	3,96	4,46	4,02

Sumber Data : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025

Pada tabel di atas terlihat selama empat tahun terakhir lapangan usaha Pertambangan dan Penggalan mengalami kontraksi (minus), lapangan usaha ini pada tahun 2024 memberikan kontribusi sebesar 3,65% terhadap PDRB ADHB Kota Sawahlunto (posisi ke 9), hal ini menjadi penyebab utama rendahnya pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2024.

2. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan atau istilah lainnya Persentase penduduk miskin adalah banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk regional.

Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Berikut perkembangan garis kemiskinan Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir :

Grafik 2.10
Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto
(Rupiah/Kapita/Bulan) Tahun 2020–2024



Sumber Data : BPS, 2025

Pada grafik di atas terlihat Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata peningkatan per tahun sebesar 7%. Meningkatnya Garis Kemiskinan di suatu wilayah kadang kala juga akan meningkatkan

jumlah orang miskin di wilayah tersebut jika rata-rata pengeluaran per kapita per bulan masyarakatnya ada yang tidak meningkat atau bahkan menurun. Dengan tidak meningkatnya rata-rata pengeluaran per kapita per bulan sebagian masyarakat, dianggap sebagian masyarakat tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan.

Berikut perkembangan kemiskinan Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir :

Tabel 2.32

Tingkat Kemiskinan Kota Sawahlunto

Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	399.688	412.757	443.301	487.610	524.196
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	1360	1520	1470	1470	1520
Tingkat Kemiskinan (%)	2,16	2,38	2,28	2,27	2,33
Penduduk Miskin Ekstrem (%)	0,00	0,39	0,82	0,00	0,63

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2021-2025
[Surat Kemenko PMK Nomor : B-464/13/D-I/KPS.01.00/02/2024](#)

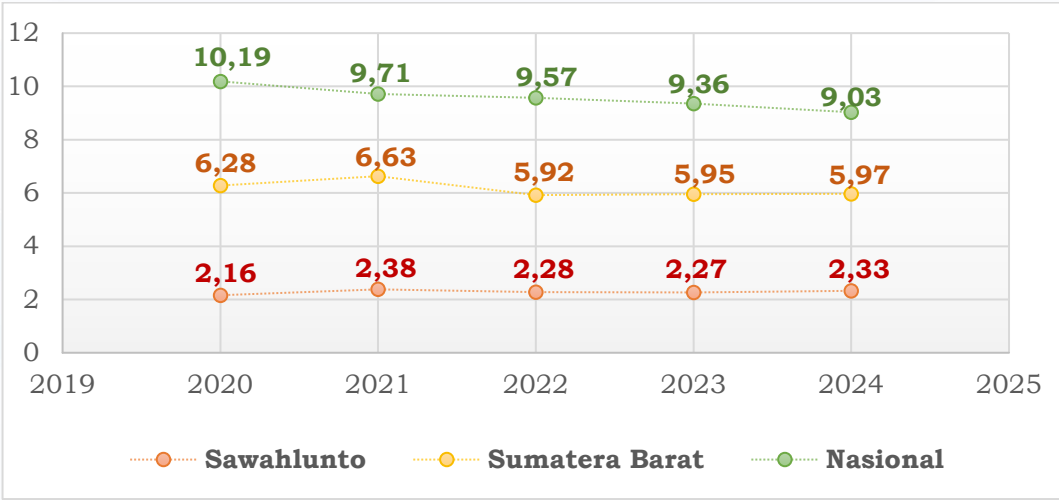
Pada tahun 2024 tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto meningkat sebesar 0,06 poin atau 2,64% dari tahun sebelumnya. Berikut perkembangan Angka Kemiskinan Kota Sawahlunto disandingkan dengan Angka Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional selama lima tahun terakhir :

Grafik 2.11

Perkembangan Tingkat Kemiskinan

Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional

Tahun 2020-2024



Sumber Data : BPS, 2025

Pada grafik di atas terlihat tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto jauh di bawah tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Berikut tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto disandingkan dengan tinggi kemiskinan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tertera pada tabel berikut :

Tabel 2.33
Perkembangan Tingkat Kemiskinan
Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020 – 2024

Kabupaten / Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	14,35	14,84	13,97	13,72	13,89
Pesisir Selatan	7,61	7,92	7,11	7,34	7,49
Solok	7,81	8,01	7,12	7,13	7,31
Sijunjung	6,78	6,80	6,00	5,88	5,78
Tanah Datar	4,40	4,54	4,26	4,16	4,28
Padang Pariaman	6,95	7,22	6,25	6,34	6,27
Agam	6,75	6,85	6,22	6,60	6,83
Lima Puluh Kota	6,86	7,29	6,59	6,80	6,92
Pasaman	7,16	7,48	6,85	6,80	6,74
Solok Selatan	7,15	7,52	6,51	6,45	6,56
Dharmasraya	6,23	6,67	5,56	5,56	5,32
Pasaman Barat	7,04	7,51	6,93	6,92	7,00
Kota					
Padang	4,40	4,94	4,26	4,17	4,06
Solok	2,77	3,12	3,02	3,05	3,07
Sawahlunto	2,16	2,38	2,28	2,27	2,33
Padang Panjang	5,24	5,92	5,14	5,24	5,31
Bukittinggi	4,54	5,14	4,46	4,11	4,08
Payakumbuh	5,65	6,16	5,66	5,44	5,19
Pariaman	4,10	4,38	4,13	4,20	4,26
Sumatera Barat	6,28	6,63	5,92	5,95	5,97

Sumber Data : BPS, 2025

Pada tabel di atas terlihat bahwa tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto adalah yang terendah di Provinsi Sumatera Barat selama lima tahun terakhir (2020-2024). Bahkan Kota Sawahlunto merupakan salah satu dari 10 kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin terendah level nasional, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.34
Posisi Kota Sawahlunto Dalam 10 Kabupaten/Kota
Dengan Persentase Penduduk Miskin Terendah Level Nasional
Tahun 2020-2024

Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1. Kabupaten Badung	1. Kota Sawahlunto 2,38	1. Kota Sawahlunto 2,28	1. Kota Sawahlunto 2,27	1. Kota Balikpapan 2,23
2. Kota Denpasar	2. Kota Tangerang Selatan 2,57	2. Kota Balikpapan 2,45	2. Kota Balikpapan 2,31	2. Kabupaten Badung 2,23
3. Kota Sawahlunto	3. Kota Depok 2,58	3. Kabupaten Bangka Barat 2,46	3. Kota Depok 2,38	3. Kota Sawahlunto 2,33
4. Kota Tangerang Selatan	4. Kabupaten Badung 2,62	4. Kota Tangerang Selatan 2,50	4. Kota Tangerang Selatan 2,57	4. Kota Depok 2,34
5. Kota Depok	5. Kabupaten Bangka Barat 2,75	5. Kota Depok 2,53	5. Kota Denpasar 2,68	5. Kota Tangerang Selatan 2,36
6. Kabupaten Banjar	6. Kota Pekanbaru 2,83	6. Kabupaten Badung 2,53	6. Kota Sungai Penuh 3,00	6. Kota Denpasar 2,59
7. Kota Balikpapan	7. Kota Balikpapan 2,89	7. Kabupaten Banjar 2,79	7. Kota Solok 3,05	7. Kabupaten Bangka Barat 2,59
8. Kota Pekanbaru	8. Kota Denpasar 2,96	8. Kota Denpasar 2,97	8. Kota Jakarta Selatan 3,10	8. Kota Sungai Penuh 2,92
9. Kabupaten Bangka Barat	9. Kabupaten Banjar 3,04	9. Kota Sungai Penuh 2,97	9. Kota Pekanbaru 3,16	9. Kota Jakarta Selatan 3,03
10. Kota Kota Solok	10. Kota Solok 3,12	10. Kota Solok 3,02	10. Kota Dumai 3,21	10. Kota Batu 3,06

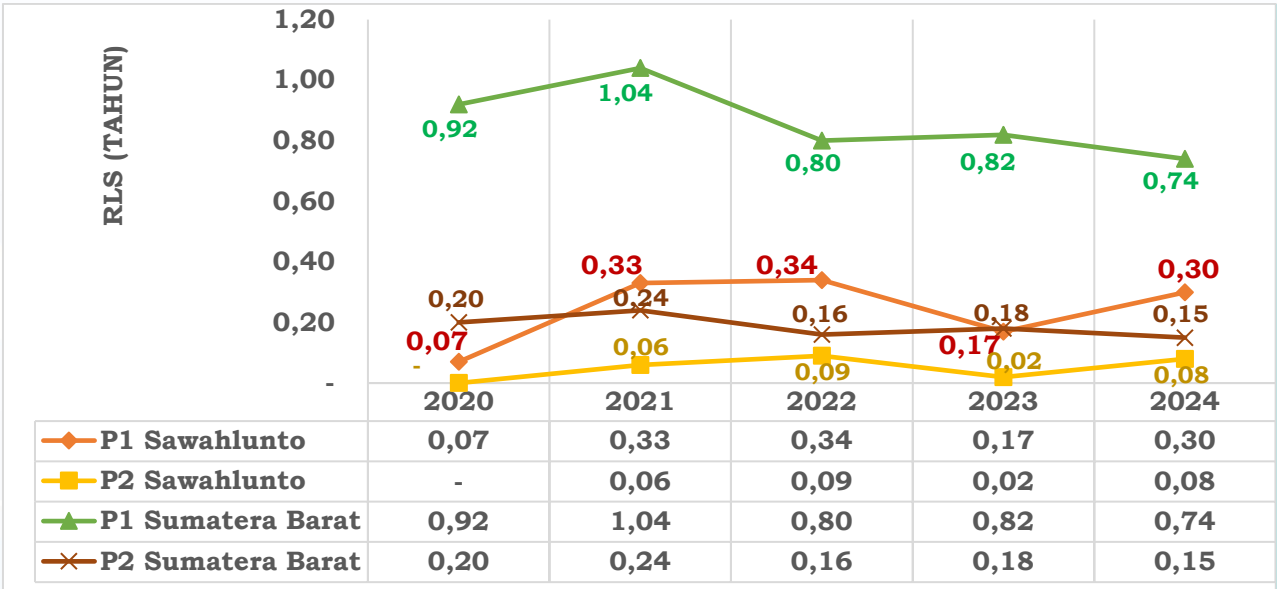
Sumber Data : BPS, Berita Resmi Statistik, 2024

Kota Sawahlunto selama tahun 2020-2024 masuk dalam 10 kabupaten/kota dengan Persentase Penduduk Miskin Terendah Level Nasional. Bahkan selama tiga tahun (tahun 2021-2023), angka kemiskinan Kota Sawahlunto adalah yang terendah di Indonesia. Namun pada tahun 2024, Kota Sawahlunto berada pada posisi 3.

Selain Persentase penduduk miskin, kondisi kemiskinan suatu daerah juga dapat dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin (BPS, <https://www.bps.go.id>).

Berikut perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir (2020 – 2024) :

Grafik 2.12
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Dan
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024



Sumber Data : BPS 2025

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Sawahlunto selama tahun 2020-2024 berkisar antara 0,07-0,34 dan tergolong rendah, hal ini mengandung makna rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kota Sawahlunto berada dekat dengan garis kemiskinan atau berada di sekitar garis kemiskinan. Jika dibandingkan dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Sumatera Barat yang berada jauh di atas Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Sawahlunto, mengandung makna bahwa rata-rata pengeluaran masing-masing penduduk miskin Kota Sawahlunto lebih tinggi (lebih baik) dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran masing-masing penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat.

Sedangkan perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Sawahlunto selama kurun waktu tahun 2020-2024 berada pada kisaran 0,00 – 0,09 dan tergolong rendah. Jika dibandingkan dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Provinsi Sumatera Barat yang berada jauh di atas Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Sawahlunto, mengandung makna penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin di Kota Sawahlunto lebih merata dibandingkan dengan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat.

Meningkatnya Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Sawahlunto tahun 2024 sejalan dengan meningkatnya tingkat kemiskinan. Meningkatnya Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kota Sawahlunto menjauh dari garis kemiskinan. Meningkatnya Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan meningkatnya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kota Sawahlunto. Kondisi sebaliknya terjadi pada Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Sumatera Barat yang mengalami penurunan meskipun tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat meningkat.

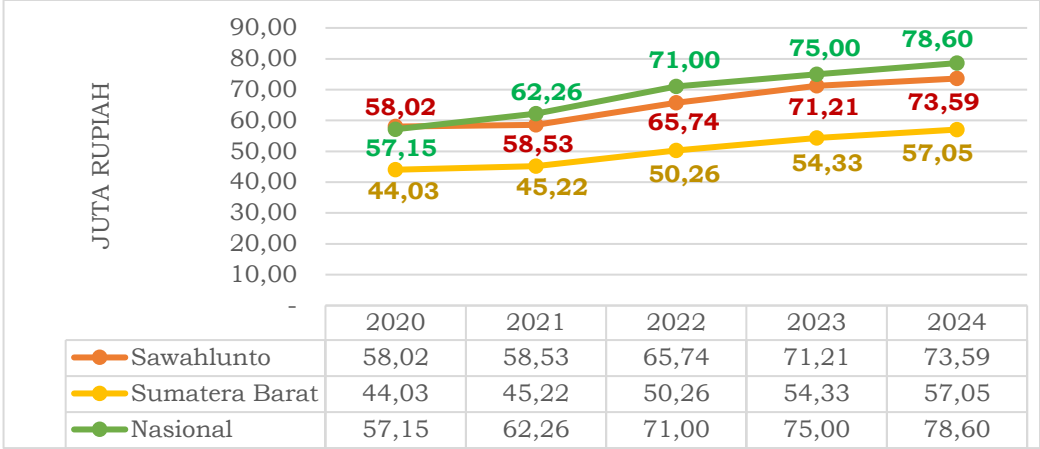
3. PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk atau per jiwa atau satu orang penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. PDRB Per Kapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB ADHB dan PDRB ADHK suatu daerah dengan jumlah penduduk pertengahan tahun daerah bersangkutan. Oleh karena itu, meningkat atau menurunnya PDRB Per Kapita ditentukan oleh meningkat atau menurunnya PDRB dan bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk. PDRB Per Kapita biasanya dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB), namun juga dapat dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK). Peningkatan PDRB Per Kapita biasanya dianggap sebagai tanda ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, PDRB Per Kapita tidak dapat mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi.

Pada tahun 2024, PDRB ADHB per kapita Kota Sawahlunto mencapai 73,597 juta/jiwa/tahun. Realisasi PDRB ADHB per kapita tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp 2,38 juta/jiwa/tahun atau 3,35% dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 71,21 juta/jiwa/tahun. Peningkatan PDRB ADHB per kapita Kota Sawahlunto tahun 2024 lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 8,32%.

Berikut disajikan perkembangan PDRB ADHB per kapita Kota Sawahlunto pada periode tahun 2020-2024 disandingkan dengan PDRB ADHB per kapita Provinsi Sumatera Barat dan PDB ADHB per kapita Nasional :

Grafik 2.13
Perkembangan PDRB ADHB Per Kapita
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2020-2024



Sumber Data : BPS 2025

Pada periode tahun 2020-2024 PDRB ADHB per kapita Kota Sawahlunto lebih tinggi dibandingkan PDRB ADHB per kapita Provinsi Sumatera Barat, namun lebih rendah dibandingkan PDB ADHB per kapita Nasional kecuali tahun 2020. Peningkatan PDRB ADHB per kapita Kota Sawahlunto selama kurun waktu tahun 2020–2024 sejalan dengan peningkatan PDRB ADHB per kapita Provinsi Sumatera Barat dan PDB ADHB per kapita Nasional.

Berikut perkembangan PDRB ADHB per kapita Kota Sawahlunto tahun 2020-2024, disandingkan dengan PDRB ADHB per kapita kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Barat :

Tabel 2.35
Perkembangan PDRB ADHB Per Kapita
Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020 – 2024 (juta rupiah/jiwa)

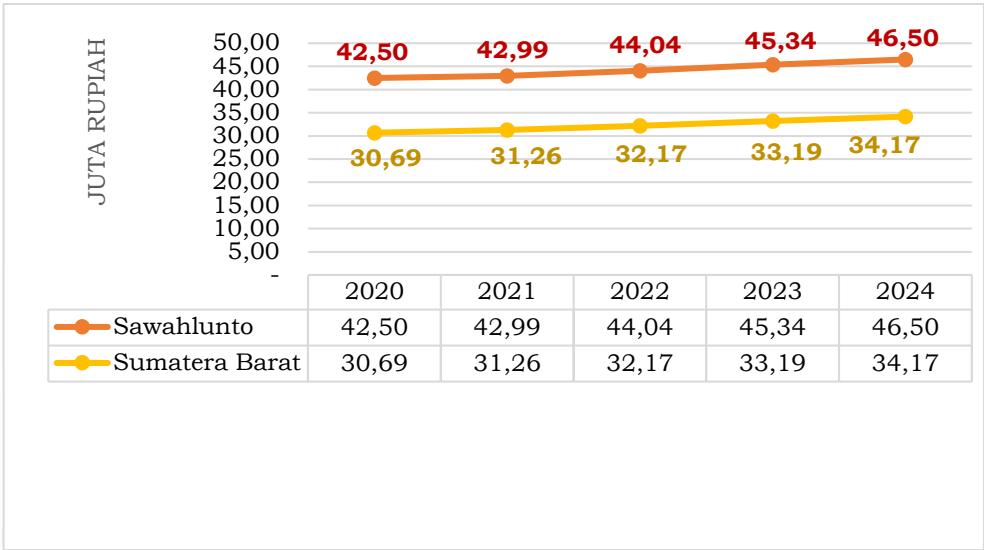
Kabupaten / Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	49,46	54,60	60,45	64,69	67,34
Pesisir Selatan	29,96	29,27	32,08	34,31	35,99
Solok	35,96	35,88	39,42	42,72	44,81
Sijunjung	37,87	40,29	44,34	47,91	50,61
Tanah Datar	37,34	36,29	39,72	42,89	45,07
Padang Pariaman	42,94	42,31	50,02	55,54	58,39
Agam	41,19	39,91	43,94	47,41	50,02
Lima Puluh Kota	40,24	41,81	45,69	49,45	51,98
Pasaman	31,32	31,09	33,70	36,27	38,25
Solok Selatan	31,81	31,31	34,19	36,78	38,91
Dharmasraya	40,41	46,45	51,88	55,63	58,71
Pasaman Barat	33,75	36,47	40,31	43,43	46,26
Kota					
Padang	64,67	70,88 (1)	78,36	84,53	88,23
Solok	56,05	57,01	62,88	67,59	69,99
Sawahlunto	58,02	58,53	65,74	71,21	73,59
Padang Panjang	63,82	64,12	70,73	76,31	80,01
Bukittinggi	65,00	74,00	82,85	89,74	93,97
Payakumbuh	49,63	51,81	57,73	62,02	64,21
Pariaman	55,86	55,41	61,23	66,20	69,17
Sumatera Barat	44,03	45,22	50,26	54,33	57,05

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025

PDRB ADHB per kapita Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir berada di posisi keempat tertinggi dibandingkan 19 kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Barat, setelah Kota Bukittinggi, Kota Padang dan Kota Padang Panjang.

Sebagai perbandingan, berikut disajikan perkembangan PDRB ADHK per kapita Kota Sawahlunto pada periode tahun 2020-2024 disandingkan dengan PDRB ADHK per kapita Provinsi Sumatera Barat.

Grafik 2.14
Perkembangan PDRB ADHK Per Kapita
Kota Sawahlunto Dan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020-2024



Sumber Data : BPS 2025

Pada grafik di atas terlihat bahwa PDRB ADHK per kapita Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir lebih tinggi dari PDRB ADHK per kapita Provinsi Sumatera Barat.

Berikut disandingkan PDRB ADHK per kapita Kota Sawahlunto dengan PDRB ADHK per kapita kabupaten/kota pada periode tahun 2020-2024:

Tabel 2.36
PDRB ADHK Per Kapita
Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020 – 2024 (juta rupiah/jiwa)

Kabupaten / Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	33,83	34,28	35,42	36,31	37,21
Pesisir Selatan	18,84	19,19	19,67	20,19	20,67
Solok	25,07	25,59	26,35	27,16	27,87
Sijunjung	28,52	29,03	29,77	30,65	31,44
Tanah Datar	25,81	26,40	27,17	28,04	28,78
Padang Pariaman	27,77	27,96	29,36	30,44	31,29
Agam	27,32	27,82	28,59	29,49	30,29
Lima Puluh Kota	28,89	29,53	30,35	31,36	32,24
Pasaman	20,49	20,86	21,36	21,95	22,47
Solok Selatan	21,69	21,99	22,45	23,05	23,56
Dharmasraya	32,74	33,28	34,09	34,96	35,69
Pasaman Barat	26,17	26,73	27,41	28,18	28,92
Kota					
Padang	48,07	49,18 (1)	50,65	52,30	54,09
Solok	38,79	39,37	40,29	41,35	42,36

Kabupaten / Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Sawahlunto	42,50	42,99	44,04	45,34	46,50
Padang Panjang	45,34	46,21	47,54	49,12	50,63
Bukittinggi	50,02	51,34	53,28	55,38	57,43
Payakumbuh	31,75	32,44	33,44	34,54	35,64
Pariaman	37,76	38,66	39,92	41,34	42,71
Sumatera Barat	30,69	31,26	32,17	33,19	34,17

Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2025

PDRB ADHK per kapita Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir berada di posisi keempat tertinggi dibandingkan kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Barat, setelah Kota Bukittinggi, Kota Padang dan Kota Padang Panjang.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran adalah orang yang termasuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) namun belum/tidak bekerja. Pengangguran disebabkan oleh jumlah pencari kerja yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Oleh karena itu, keberadaan pengangguran mencerminkan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan potensi tenaga kerja yang ada. Adapun tingkat pengangguran terbuka Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.37
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	2020			2021			2022			2023			2024		
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
1	Jumlah Pengangguran Terbuka (Jiwa)	1.538	1.171	2.709	1.362	695	2.057	1.073	625	1.698	1.146	636	1.782	1.394	728	2.122
2	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (Jiwa)	18.948	14.071	33.019	18.951	13.292	32.243	19.353	14.620	33.973	20.626	15.174	35.800	21.807	16.449	38.256
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,12	8,32	8,20	7,19	5,23	6,38	5,54	4,27	5,00	5,56	4,19	4,98	6,39	4,43	5,55

Sumber Data : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2025, Data diolah

Pada tabel di atas terlihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Sawahlunto selama 5 tahun terakhir berfluktuatif dengan TPT Laki-laki lebih tinggi dibandingkan TPT Perempuan.

Pada tahun 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Sawahlunto meningkat dari tahun 2023. Peningkatan ini salah satunya disebabkan tidak diselenggarakan kegiatan *Job Fair* tahun 2024 di Kota Sawahlunto dan berkurangnya kegiatan pelatihan tenaga kerja pada BLK Kota Sawahlunto, dimana pada tahun 2024 kegiatan yang terlaksana hanya sebanyak 6 paket pelatihan yang dibiayai dari dana APBN. Sementara pada tahun 2023 terlaksana sebanyak 13 paket pelatihan, 6 paket pelatihan dibiayai oleh dana APBN dan 7 paket pelatihan dibiayai oleh dana APBD Kota Sawahlunto.

Berikut perkembangan TPT kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Barat selama lima tahun terakhir :

Tabel 2.38
Tingkat Pengangguran Terbuka
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020 – 2024

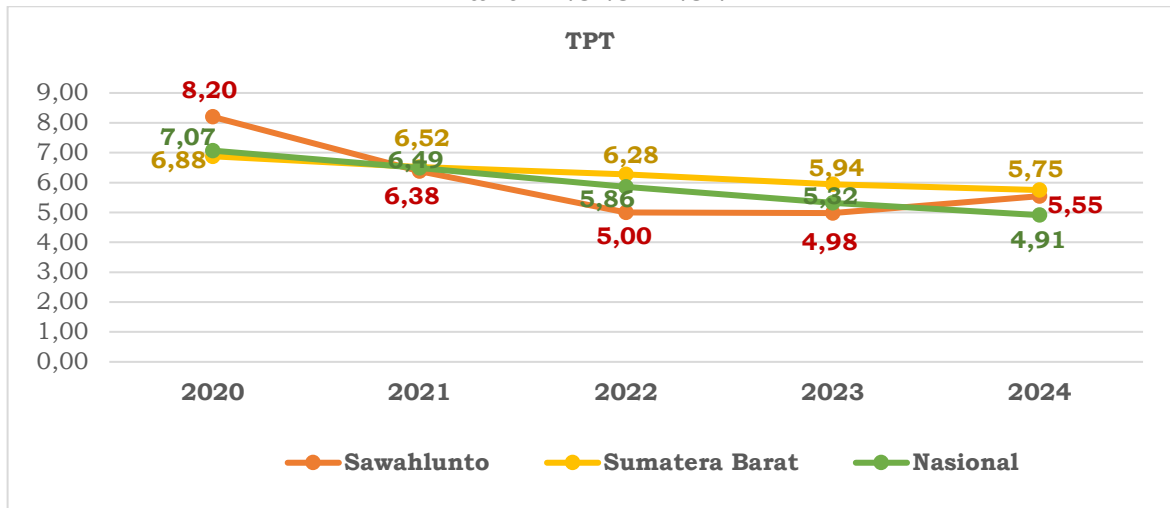
Kabupaten / Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	3,98	2,79	1,39	1,33	1,44
Pesisir Selatan	7,00	5,97	4,61	4,75	5,06
Solok	4,65	4,67	5,89	4,99	4,91
Sijunjung	5,30	3,57	4,87	4,71	4,73
Tanah Datar	4,79	4,63	5,91	5,35	5,30
Padang Pariaman	8,13	8,41	6,60	6,69	6,59
Agam	4,61	5,06	4,93	4,96	4,73
Lima Puluh Kota	3,03	2,25	3,72	3,95	3,68
Pasaman	5,04	4,92	5,38	5,09	5,25
Solok Selatan	5,62	4,84	3,71	2,57	2,30
Dharmasraya	5,31	5,00	6,23	6,22	6,02
Pasaman Barat	4,69	5,02	6,33	6,01	6,34
Kota					
Padang	13,64	13,37	11,69	10,86	9,88
Solok	8,35	5,15	3,90	3,72	3,62
Sawahlunto	8,20	6,38	5,00	4,98	5,55
Padang Panjang	7,22	4,90	4,84	5,49	4,94
Bukittinggi	7,51	6,09	4,90	4,99	4,72
Payakumbuh	6,68	6,47	5,16	4,84	4,87
Pariaman	5,73	6,09	5,19	5,68	5,32
Sumatera Barat	6,88	6,52	6,28	5,94	5,75

Sumber Data : Berita Resmi Statistik, No.66/11/13/Th. XXVII, 05 November 2024

Pada tabel di atas terlihat, TPT Kota Sawahlunto berfluktuasi selama lima tahun terakhir. TPT Kota Sawahlunto adalah yang tertinggi kedua pada tahun 2024, diantara 7 kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat setelah Kota Padang, Sedangkan untuk level kabupaten/kota berada pada posisi kelima tertinggi setelah Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Dharmasraya.

Berikut perkembangan TPT Kota Sawahlunto disandingkan dengan TPT Provinsi Sumatera Barat dan Nasional selama tahun 2020-2024 :

Grafik 2.15
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2020 – 2024



Sumber Data : BPS, 2025

Pada grafik di atas terlihat bahwa TPT Kota Sawahlunto berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. TPT tertinggi Kota Sawahlunto terjadi pada tahun 2020 saat Covid 19 melanda, dan angka tersebut lebih tinggi dari TPT Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Pada tahun 2021-2023, seiring dengan usainya Covid 19 dan pulihnya perekonomian, TPT Kota Sawahlunto menurun, bahkan TPT Kota Sawahlunto lebih rendah dari TPT Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Namun pada tahun 2024 TPT Kota Sawahlunto kembali meningkat dan lebih tinggi dari TPT Nasional, namun lebih rendah dari TPT Provinsi Sumatera Barat.

5. Indeks Gini

Indeks Gini (Gini Ratio) merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran/pendapatan secara menyeluruh. Gini Ratio yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi, Gini Ratio yang semakin mendekati 0 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin rendah. Gini Ratio yang bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pengeluaran/pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pengeluaran/pendapatan yang sama. Sedangkan, Gini Ratio yang bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Gini Ratio diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pengeluaran/pendapatan antar penduduk (bps.go.id).

Gini Ratio Kota Sawahlunto tahun 2024 berhasil turun sebesar 0,009 poin atau 2,92% dibandingkan tahun 2023. Realisasi Gini Ratio turun dari 0,308 pada tahun 2023 menjadi 0,299 pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan target Gini Ratio Kota Sawahlunto tahun 2024 sebesar 0,289 pada RPD Kota Sawahlunto 2024-2026, maka capaian tahun 2024 ini hampir mendekati target dengan capaian sebesar 96,54%

dengan prediket capaian “sangat tinggi”. Penurunan Gini Ratio tahun 2024 ini disebabkan oleh semakin membaiknya kondisi perekonomian dan sosial masyarakat Kota Sawahlunto yang ditandai dengan meningkatnya PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto, meningkatnya IPM Kota Sawahlunto beserta semua komponen pembentuknya serta rendahnya laju inflasi. Hal ini juga tidak terlepas dari dukungan kebijakan pemerintah kota khususnya terkait pelayanan dasar, pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, bantuan sosial dan subsidi yang diterapkan di Kota Sawahlunto.

Tabel 2.39
Gini Ratio Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020 – 2024

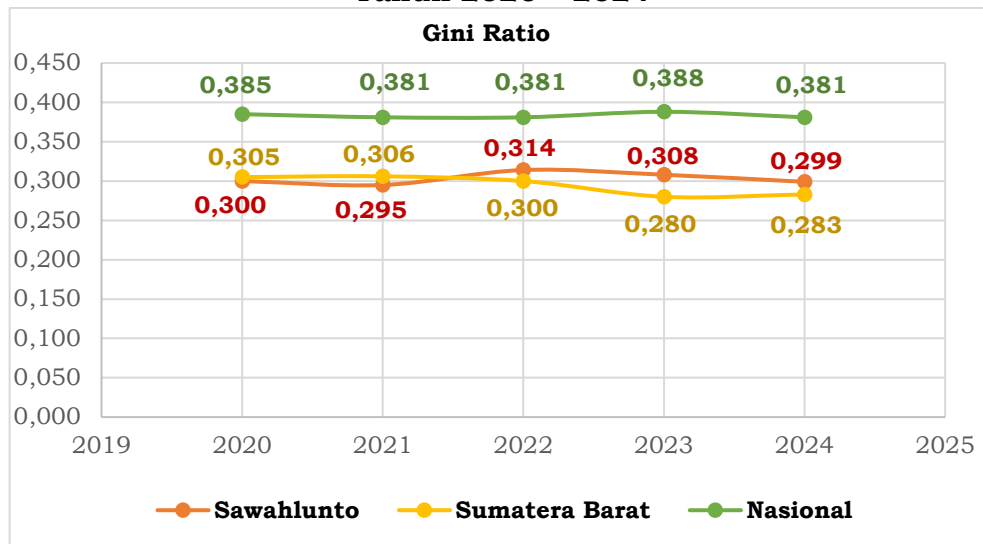
Kabupaten / Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	0,273	0,321	0,233	0,259	0,267
Pesisir Selatan	0,264	0,253	0,246	0,259	0,224
Solok	0,277	0,246	0,243	0,235	0,241
Sijunjung	0,269	0,270	0,243	0,263	0,239
Tanah Datar	0,273	0,250	0,251	0,260	0,258
Padang Pariaman	0,257	0,269	0,245	0,257	0,253
Agam	0,278	0,272	0,298	0,255	0,249
Lima Puluh Kota	0,222	0,244	0,208	0,194	0,220
Pasaman	0,310	0,248	0,230	0,243	0,217
Solok Selatan	0,307	0,277	0,253	0,271	0,313
Dharmasraya	0,280	0,268	0,287	0,291	0,233
Pasaman Barat	0,258	0,261	0,277	0,238	0,240
Kota					
Padang	0,312	0,343	0,354	0,312	0,324
Solok	0,286	0,277	0,288	0,256	0,251
Sawahlunto	0,300	0,295	0,314	0,308	0,299
Padang Panjang	0,394	0,306	0,296	0,273	0,266
Bukittinggi	0,265	0,286	0,317	0,255	0,272
Payakumbuh	0,325	0,316	0,311	0,316	0,313
Pariaman	0,310	0,301	0,272	0,289	0,281
Sumatera Barat	0,305	0,306	0,300	0,280	0,283

Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Barat 2025

Meskipun capaian Gini Ratio Kota Sawahlunto tahun 2024 mengalami penurunan, namun secara regional Provinsi Sumatera Barat, capaian Gini Ratio Kota Sawahlunto termasuk 4 (empat) tertinggi dari 19 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, di bawah Kota Padang, Kota Payakumbuh dan Kabupaten Solok Selatan. Dan Gini Ratio Kota Sawahlunto juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi Sumatera Barat.

Berikut perkembangan Gini Ratio Kota Sawahlunto tahun 2020-2024, disandingkan dengan Gini Ratio Provinsi Sumatera Barat dan Nasional :

Grafik 2.16
Perkembangan Gini Ratio
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional
Tahun 2020 – 2024



Sumber Data : BPS, 2025

Pada grafik di atas terlihat bahwa Gini Ratio Kota Sawahlunto pada tahun 2020-2021 lebih rendah dari Gini Ratio Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, yang bermakna perbedaan pengeluaran/pendapatan antar penduduk di Kota Sawahlunto lebih merata dibandingkan perbedaan pengeluaran/pendapatan antar penduduk Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Pada tahun 2022-2024, Gini Ratio Kota Sawahlunto lebih tinggi dibandingkan Gini Ratio Provinsi Sumatera Barat, namun masih lebih rendah dibandingkan Gini Ratio Nasional.

6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator makro pembangunan daerah untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk suatu daerah dapat mengakses hasil pembangunan dalam bidang kesehatan, pendidikan dan pendapatan.

Semakin tinggi nilai IPM menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik yang berkorelasi dengan kebijakan ekonomi terhadap pembangunan manusia.

IPM adalah indikator makro yang perhitungannya menjadi tanggungjawab Badan Pusat Statistik (BPS), dimana IPM memiliki tiga dimensi yang digunakan sebagai dasar perhitungannya, yaitu :

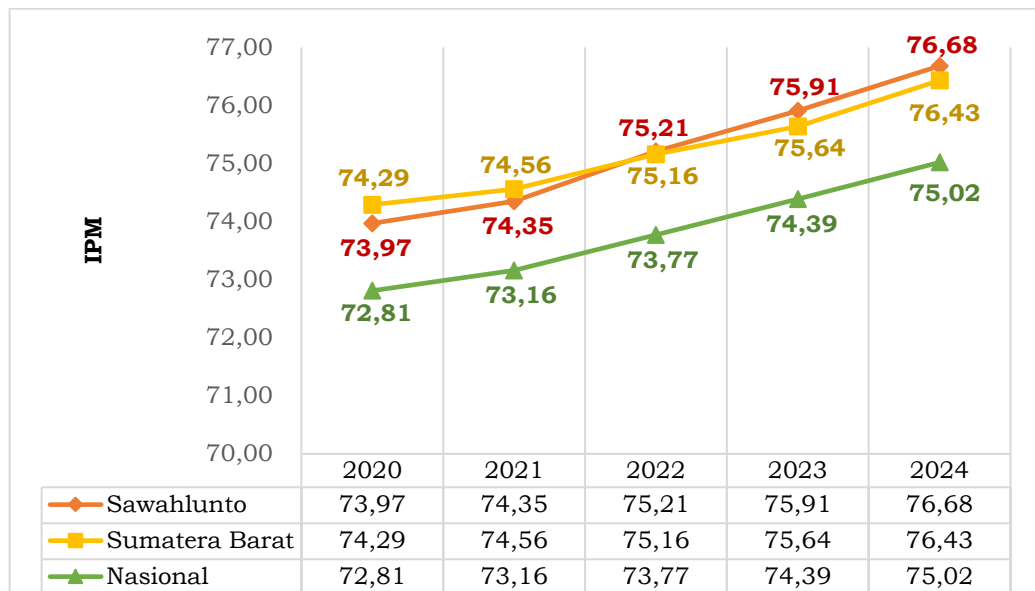
a. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*);

Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi.

- b. Pengetahuan (*knowledge*);
Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. HLS didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.
- c. Standard hidup layak (*decent standard of living*). Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Berikut perkembangan IPM Kota Sawahlunto disandingkan dengan IPM Provinsi Sumatera Barat dan IPM Nasional selama lima tahun terakhir :

Grafik 2.17
IPM Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia
Tahun 2020 – 2024



Sumber Data : Berita Resmi Statistik, No. 72/12/13/Th.XXVII, 2 Desember 2024

IPM Kota Sawahlunto pada tahun 2024 sebesar 76,68, angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,77 poin atau 1,01 % dibandingkan tahun 2023. Peningkatan IPM Kota Sawahlunto tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan peningkatan IPM tahun 2023 yang meningkat sebesar 0,70 poin atau 0,93 %. Status pencapaian IPM Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir tergolong “Tinggi”. Dan capaian IPM Kota Sawahlunto tahun 2022-2024 lebih tinggi dibandingkan IPM Provinsi Sumatera Barat dan IPM Nasional.

Berikut perkembangan IPM Kota Sawahlunto disandingkan dengan IPM kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat selama lima tahun terakhir :

Tabel 2.40
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024

Kabupaten / Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	63,71	63,98	64,83	65,79	66,67
Pesisir Selatan	70,87	71,01	71,72	72,24	72,87
Solok	70,44	70,60	71,39	71,92	72,29
Sijunjung	70,36	70,48	71,32	72,30	72,88
Tanah Datar	74,01	74,14	74,87	75,57	76,49
Padang Pariaman	72,80	72,92	73,67	74,54	74,90
Agam	73,11	73,20	73,84	74,44	75,08
Lima Puluh Kota	70,82	71,03	71,64	72,05	72,51
Pasaman	68,35	68,48	69,12	69,85	70,61
Solok Selatan	70,69	70,88	71,36	72,24	73,17
Dharmasraya	72,30	72,65	73,19	73,87	74,82
Pasaman Barat	70,30	70,57	71,39	72,03	72,78
Kota					
Padang	83,22	83,30	83,69	83,98	84,38
Solok	78,41	78,53	79,35	79,66	80,06
Sawahlunto	73,97	74,35	75,21	75,91	76,68
Padang Panjang	78,43	78,52	79,28	79,76	80,60
Bukit Tinggi	80,68	80,79	81,52	81,88	82,61
Payakumbuh	79,06	79,24	79,70	80,14	80,76
Pariaman	78,55	78,72	79,31	79,76	80,49
Sumatera Barat	74,29	74,56	75,16	75,64	76,43

Sumber Data : Berita Resmi Statistik, No. 72/12/13/Th.XXVII, 2 Desember 2024

Pada tabel di atas terlihat bahwa IPM Kota Sawahlunto meningkat dari tahun ke tahun, namun IPM Kota Sawahlunto ini merupakan yang terendah diantara 7 kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Peningkatan IPM Kota Sawahlunto selama tahun 2020-2024 didukung oleh peningkatan semua komponen pembentuk IPM yaitu Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP).

Tabel 2.41
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2024

Kabupaten / Kota	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)			Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Kabupaten						
Kepulauan Mentawai	12,89	12,90	12,91	7,48	7,76	8,03
Pesisir Selatan	13,35	13,36	13,37	8,43	8,58	8,81
Solok	13,30	13,55	13,56	7,89	7,90	7,91
Sijunjung	12,64	12,72	12,76	8,30	8,57	8,62
Tanah Datar	14,59	14,78	15,05	8,90	9,02	9,29
Padang Pariaman	13,93	14,19	14,20	8,16	8,41	8,42
Agam	13,88	13,89	14,16	8,98	9,22	9,23
Lima Puluh Kota	13,40	13,41	13,42	8,08	8,12	8,13
Pasaman	13,05	13,25	13,52	8,12	8,13	8,14
Solok Selatan	12,73	12,80	13,07	8,41	8,69	8,85
Dharmasraya	12,51	12,68	12,89	8,56	8,71	8,98

Kabupaten / Kota	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)			Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Pasaman Barat	13,69	13,70	13,72	8,55	8,81	8,99
Kota						
Padang	16,54	16,56	16,57	11,60	11,62	11,63
Solok	14,34	14,36	14,37	11,35	11,36	11,37
Sawahlunto	13,42	13,69	13,86	10,43	10,44	10,53
Padang Panjang	15,07	15,29	15,47	11,92	11,94	12,00
Bukit Tinggi	14,99	15,01	15,28	11,63	11,64	11,65
Payakumbuh	14,29	14,30	14,57	10,82	10,88	10,89
Pariaman	14,61	14,79	14,80	10,78	10,79	11,06
Sumatera Barat	14,10	14,11	14,30	9,18	9,28	9,44

Sumber Data : Berita Resmi Statistik, No. 72/12/13/Th.XXVII, 2 Desember 2024

Pada tabel di atas, Angka HLS dan RLS Kota Sawahlunto mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun capaiannya merupakan yang terendah diantara 7 kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Angka HLS Kota Sawahlunto tahun 2024 sebesar 13,86, yang berarti lamanya waktu sekolah bagi anak usia sekolah di Kota Sawahlunto diharapkan mencapai 13,86 tahun atau dapat menyelesaikan D1. Sedangkan nilai RLS Kota Sawahlunto tahun 2024 sebesar 10,53, bermakna rata-rata masa sekolah yang dialami penduduk Kota Sawahlunto usia 25 tahun ke atas adalah selama 10,53 tahun atau menyelesaikan SLTA kelas 1 (kelas X). Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Kota Sawahlunto yang lebih baik.

Pembentuk IPM terakhir adalah Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (*Purchasing Power Parity-PPP*). Berikut Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan Kota Sawahlunto disandingkan dengan Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat selama tiga tahun terakhir.

Tabel 2.42
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (Ribuan Rupiah)
Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022-2024

Kabupaten / Kota	2022	2023	2024
Kabupaten			
Kepulauan Mentawai	6.567	6.891	7.192
Pesisir Selatan	9.686	9.953	10.211
Solok	10.539	10.717	10.988
Sijunjung	10.582	11.018	11.395
Tanah Datar	10.695	10.905	11.223
Padang Pariaman	11.159	11.432	11.756
Agam	10.171	10.402	10.686
Lima Puluh Kota	10.035	10.285	10.648
Pasaman	8.619	8.908	9.194
Solok Selatan	10.560	10.884	11.240
Dharmasraya	11.650	11.901	12.254
Pasaman Barat	9.381	9.538	9.888
Kota			
Padang	14.889	15.089	15.458
Solok	12.515	12.709	12.995

Kabupaten / Kota	2022	2023	2024
Sawahlunto	10.537	10.829	11.187
Padang Panjang	11.153	11.310	11.840
Bukit Tinggi	13.633	13.859	14.297
Payakumbuh	13.687	13.978	14.260
Pariaman	13.150	13.355	13.784
Sumatera Barat	11.130	11.380	11.718

Sumber Data : Berita Resmi Statistik, No. 72/12/13/Th.XXVII, 2 Desember 2024

Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (*Purchasing Power Parity-PPP*) Kota Sawahlunto mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun capaiannya merupakan yang terendah diantara 7 kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Meskipun demikian, hal ini menunjukkan adanya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat yang didorong oleh meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat Kota Sawahlunto

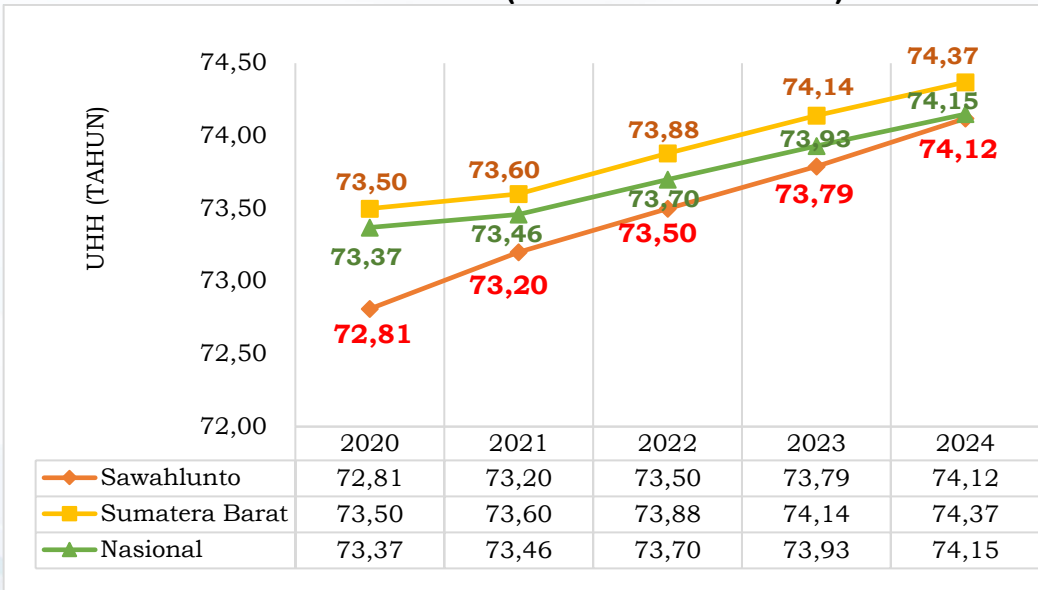
B. Kesehatan Untuk Semua

1. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah rata rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. UHH merupakan salah satu komponen pembentuk IPM. UHH menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat.

Semakin tinggi Usia Harapan Hidup menunjukkan semakin baik tingkat kesehatan masyarakat, sehingga kesempatan untuk hidup cenderung semakin panjang. Sebaliknya semakin rendah Usia Harapan Hidup menunjukkan semakin buruk tingkat kesehatan yang cenderung memperpendek usia harapan hidup.

Grafik 2.18
Perbandingan Usia Harapan Hidup (UHH)
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2020 – 2024 (Satuan Dalam Tahun)



Sumber Data : Badan Pusat Statistik 2024

Usia harapan hidup saat lahir Kota Sawahlunto menunjukkan peningkatan selama periode tahun 2020-2024, yaitu dari 72,81 tahun pada tahun 2020 meningkat menjadi 74,12 tahun pada tahun 2024. Artinya, rata-rata bayi yang lahir di Kota Kota Sawahlunto pada tahun 2024 memiliki harapan hidup hingga usia 74,12 tahun.

Berikut perkembangan Usia harapan hidup (UHH) Kota Sawahlunto disandingkan dengan Usia harapan hidup (UHH) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat selama tiga tahun terakhir.

Tabel 2.43
Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024

Kabupaten / Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	70,33	70,33	70,91	71,06	71,21
Pesisir Selatan	73,02	73,12	73,20	73,27	73,44
Solok	71,51	71,72	72,12	72,31	72,52
Sijunjung	71,78	71,93	72,27	72,59	72,89
Tanah Datar	73,50	73,69	73,84	74,19	74,26
Padang Pariaman	73,48	73,58	73,67	73,77	73,88
Agam	73,79	73,91	74,07	74,22	74,39
Lima Puluh Kota	72,74	72,79	73,03	73,25	73,42
Pasaman	71,15	71,34	71,71	72,04	72,36
Solok Selatan	71,32	71,52	71,89	72,72	72,50
Dharmasraya	73,04	73,47	73,84	74,04	74,25
Pasaman Barat	71,71	71,83	72,14	72,44	72,75
Kota					
Padang	74,43	74,47	74,71	74,94	75,20
Solok	73,86	73,98	74,31	74,56	74,85
Sawahlunto	72,81	73,20	73,50	73,79	74,12
Padang Panjang	73,83	73,93	74,03	74,24	74,48
Bukit Tinggi	74,58	74,70	75,02	75,33	75,62
Payakumbuh	74,08	74,18	74,48	74,77	75,08
Pariaman	73,59	73,69	73,98	74,20	74,37
Sumatera Barat	73,50	73,60	73,88	74,14	74,37

Sumber Data : Berita Resmi Statistik, No. 72/12/13/Th.XXVII, 2 Desember 2024

Pada tabel di atas terlihat Usia harapan hidup (UHH) Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir merupakan yang terendah diantara 7 kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

2. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah perhitungan yang digunakan untuk mengetahui status kesehatan keluarga. IKS merupakan bagian dari Program Indonesia Sehat yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). IKS mengukur kesehatan masyarakat secara menyeluruh, mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan.

Tabel 2.44
Indeks Keluarga Sehat Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024

Urian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Keluarga Sehat Kota Sawahlunto	0,24	0,29	0,29	0,34	0,45

Sumber Data : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto, 2025

Pada tabel di atas terlihat Indeks Keluarga Sehat Kota Sawahlunto mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun masih berada pada kategori “Keluarga Tidak Sehat”. Oleh karena itu perlu upaya Pemerintah Kota Sawahlunto untuk meningkatkan Keluarga Sehat di Kota Sawahlunto.

3. Prevalensi Stunting

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005.

Tabel 2.45
Prevalensi Stunting
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2020 – 2024

No	<i>Prevalensi Stunting</i>	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kota Sawahlunto	na	21,1	13,7	19,5	20
2	Provinsi Sumatera Barat	na	23,3	25,2	23,6	24,9
3	Indonesia	na	24,4	21,6	21,5	19,8

Sumber Data : SSGI,2021-2022 dan SKI 2023, SSGI 2024

Prevalensi balita stunting Kota Sawahlunto berdasarkan data survei status gizi Indonesia (SSGI) dan survei kesehatan Indonesia (SKI) berfluktuasi dengan kisaran antara 13,7% hingga 21,1%. Tahun 2020 data tidak tersedia karena kendala covid 19, sedangkan pada tahun 2024, Angka prevalensi stunting Kota Sawahlunto berada di bawah Provinsi Sumatera Barat dan di atas angka prevalensi stunting nasional.

4. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran Hidup)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu digunakan untuk memantau jumlah kematian ibu yang terjadi sebagai akibat langsung dari komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Angka ini menjadi sangat penting karena memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu wilayah.

Tabel 2.46
Jumlah Kematian Ibu Di Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Puskesmas	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Talawi	0	1	1	0	2
2.	Kolok	1	0	0	0	0
3.	Sungai Durian	0	0	1	0	0
4	Lunto	0	0	0	0	0
5	Kap Teleng	0	0	0	0	0
6	Silungkang	1	0	0	0	0
Jumlah Kematian Ibu		2	1	2	0	2

Sumber Data : Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Sawahlunto, 2024

Pada tabel di atas terlihat jumlah kematian ibu di Kota Sawahlunto selama kurun waktu lima tahun terakhir berfluktuasi dengan jumlah kematian ibu tertinggi per tahun sebanyak 2 orang. Berikut perkembangan Angka kematian Ibu di Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir :

Tabel 2.47
Angka Kematian Ibu Di Kota Sawahlunto
(per 100.000 kelahiran hidup)
Tahun 2020-2024

No	Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Kematian Ibu	2	1	2	0	2
2	Jumlah Kelahiran Hidup	973	970	894	861	1145
3.	Angka Kematian Ibu	205,55	103,09	233,71	0	174,67

Sumber Data : Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto, 2024

Jumlah kelahiran hidup di Kota Sawahlunto sampai tahun 2024 tidak pernah mencapai 100.000 karena jumlah penduduk Kota Sawahlunto kurang dari 100.000 orang. Oleh karena itu AKI di Kota Sawahlunto pada tahun 2024 mencapai 174,67 per 100.000 angka kelahiran hidup. Semakin rendah nilai AKI menunjukkan semakin tinggi peranan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan antenatal, persalinan, dan pasca persalinan, serta meningkatkan akses pelayanan kesehatan dalam artian fasilitas kesehatan mudah dijangkau dan terjangkau oleh masyarakat. Disamping itu tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya pelayanan kesehatan selama kehamilan dan persalinan telah meningkat.

5. Cakupan Penemuan Dan Pengobatan Kasus TBC (%)

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) adalah Persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu. Indikator ini sangat diperlukan dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan.

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis mencakup dua aspek penting : 1). penemuan kasus, yang merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis; 2). pengobatan kasus yang merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu yang didiagnosis dengan tuberkulosis.

Cakupan penemuan dan pengobatan tuberkolosis ini dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberkolosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus yang ada dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Adapun perkembangan dari cakupan penemuan dan pengobatan TBC adalah sebagai berikut :

Tabel 2.48
Cakupan Penemuan Dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis
(Treatment Covarage) (%)
Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

Cakupan Penemuan Dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Covarage) (%)	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	na	8,00	32	48	35
Pesisir Selatan	na	55,10	68	69	56
Solok	na	12,40	26	30	36
Sijunjung	na	20,00	26	32	40
Tanah Datar	na	24,60	51	43	38
Padang Pariaman	na	51,40	51	92	84
Agam	na	22,50	31	37	35
Lima Puluh Kota	na	25,30	31	31	32
Pasaman	na	37,70	48	69	57
Solok Selatan	na	30,50	57	57	56
Dharmasraya	na	14,00	30	41	56
Pasaman Barat	na	49,00	64	66	74
Kota					
Padang	na	48,00	60	67	89
Solok	na	29,00	43	102	100
Sawahlunto	na	12,00	19	38	30
Padang Panjang	na	31,00	40	90	85
Bukittinggi	na	29,00	61	11	143
Payakumbuh	na	14,00	34	69	67
Pariaman	na	37,00	56	109	72

Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2025

Data Cakupan penemuan dan pengobatan tuberkolosis pada tahun 2020 tidak tersedia karena tidak dilakukan perhitungan sebagai dampak dari wabah Covid 19. Sedangkan pada tahun 2021-2024 cakupan penemuan dan pengobatan TBC ini angkanya masih rendah karena masih banyak masyarakat yang enggan memeriksakan penyakit TBCnya..

6. Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (%)

Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) adalah persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap. Angka keberhasilan pengobatan tuberculosi diperlukan dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap yang dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah.

Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis diperoleh dari membandingkan jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dibandingkan dengan semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan. Perkembangan keberhasilan pengobatan tuberkulosis di Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.49
Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis
(Treatment Success Rate)
Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	na	50,00	91	60	71
Pesisir Selatan	na	91,00	93	90	91
Solok	na	31,00	93	92	9
Sijunjung	na	95,50	90	96	4
Tanah Datar	na	87,50	88	88	2
Padang Pariaman	na	85,00	85	84	7
Agam	na	60,40	85	86	10
Lima Puluh Kota	na	90,20	89	83	5
Pasaman	na	63,00	91	79	10
Solok Selatan	na	56,40	97	94	3
Dharmasraya	na	13,20	92	88	5
Pasaman Barat	na	66,10	85	82	13
Kota					
Padang	na	90,10	89	90	5
Solok	na	90,00	87	69	9
Sawahlunto	88,9	88,89	96,5	94,05	94
Padang Panjang	na	94,00	87	75	12
Bukittinggi	na	89,10	94	92	8
Payakumbuh	na	90,00	91	91	5
Pariaman	na	90,10	89	90	12

Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2025, DinkesdaldudukKB 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis di Kota Sawahlunto mengalami peningkatan berfluktuasi dengan kisaran 88% hingga 96,5 %.

7. Cakupan kepesertaan JKN (%)

Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPS Kesehatan dimana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan pemerintah.

Perkembangan kepesertaan jaminan kesehatan di Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.50
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
Kota Sawahlunto 2020-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	95,99	97,64	99,73	100,72	101,03
Pertumbuhan (%)	0,94	1,72	2,14	0,99	0,30

Sumber Data : Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto, 2024

Dari data di atas dapat kita lihat bahwa JKN di Kota Sawahlunto selama tahun 2020-2024 mengalami peningkatan. Peningkatan ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah dan kesadaran masyarakat dalam kepesertaan JKN. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang tinggi di Kota Sawahlunto ini mencerminkan beberapa hal penting, yaitu : 1). sebagian besar penduduk Kota Sawahlunto sudah memiliki akses ke pelayanan kesehatan; 2). tingkat kesadaran masyarakat Kota Sawahlunto tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan

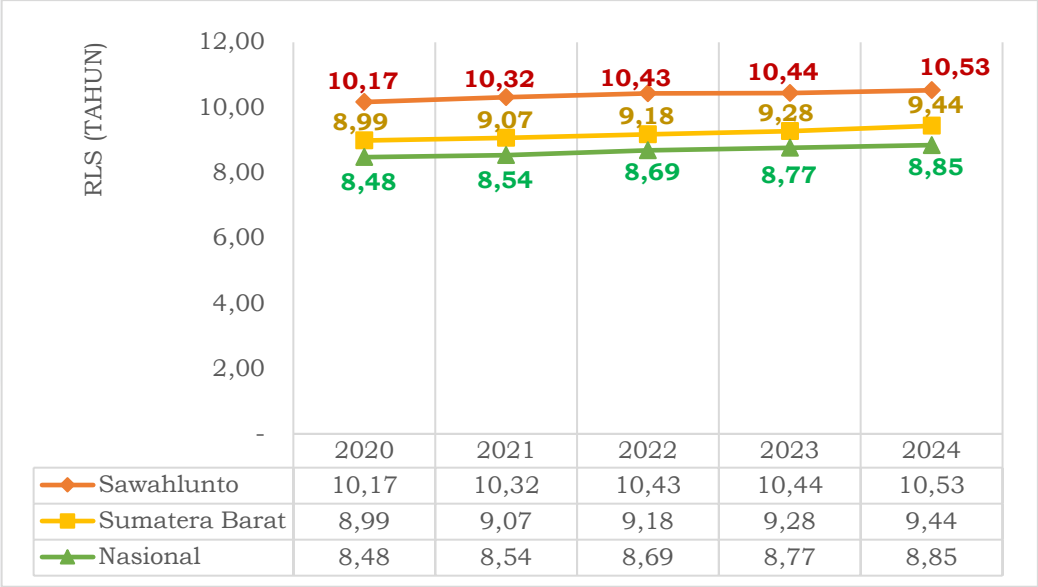
kesehatan yang berkualitas sudah tinggi; 3). komitmen pemerintah daerah yang tinggi untuk mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional; 4). banyaknya masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan.

C. Pendidikan Berkualitas yang Merata

1. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Semakin tingginya angka RLS, semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan (diselesaikan) oleh masyarakat suatu daerah. Adapun perkembangan RLS Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Grafik 2.19
Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2020 – 2024



Sumber Data : Badan Pusat Statistik 2024

Angka capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Sawahlunto terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga tahun 2024 dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 0,87% dan berada di atas RLS Provinsi dan Nasional. Angka RLS Kota Sawahlunto tahun 2024 sebesar 10,53, bermakna rata-rata masa sekolah yang dialami penduduk Kota Sawahlunto usia 25 tahun ke atas selama 10,53 tahun atau telah menyelesaikan SLTA kelas 1 (kelas X) dan telah menyelesaikan wajib belajar 9 tahun.

Berikut perbandingan RLS Kota Sawahlunto dengan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat :

Tabel 2.51
Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2024

Kabupaten / Kota	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	7,09	7,20	7,48	7,76	8,03
Pesisir Selatan	8,26	8,27	8,43	8,58	8,81
Solok	7,86	7,87	7,89	7,90	7,91
Sijunjung	8,11	8,12	8,30	8,57	8,62
Tanah Datar	8,61	8,62	8,90	9,02	9,29
Padang Pariaman	7,87	7,88	8,16	8,41	8,42
Agam	8,96	8,97	8,98	9,22	9,23
Lima Puluh Kota	7,99	8,07	8,08	8,12	8,13
Pasaman	8,09	8,10	8,11	8,13	8,14
Solok Selatan	8,28	8,32	8,41	8,69	8,85
Dharmasraya	8,47	8,55	8,56	8,71	8,98
Pasaman Barat	8,19	8,27	8,55	8,81	8,99
Kota					
Padang	11,58	11,59	11,60	11,62	11,63
Solok	11,03	11,04	11,35	11,36	11,37
Sawahlunto	10,17	10,32	10,43	10,44	10,53
Padang Panjang	11,62	11,63	11,92	11,94	12,00
Bukit Tinggi	11,33	11,34	11,63	11,64	11,65
Payakumbuh	10,73	10,81	10,82	10,88	10,89
Pariaman	10,59	10,67	10,78	10,79	11,06
Sumatera Barat	8,99	9,07	9,18	9,28	9,44

Sumber Data : Berita Resmi Statistik, No. 72/12/13/Th.XXVII, 2 Desember 2024

Pada tabel di atas terlihat bahwa RLS Kota Sawahlunto merupakan yang terendah diantara 7 kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

2. Harapan Lama Sekolah

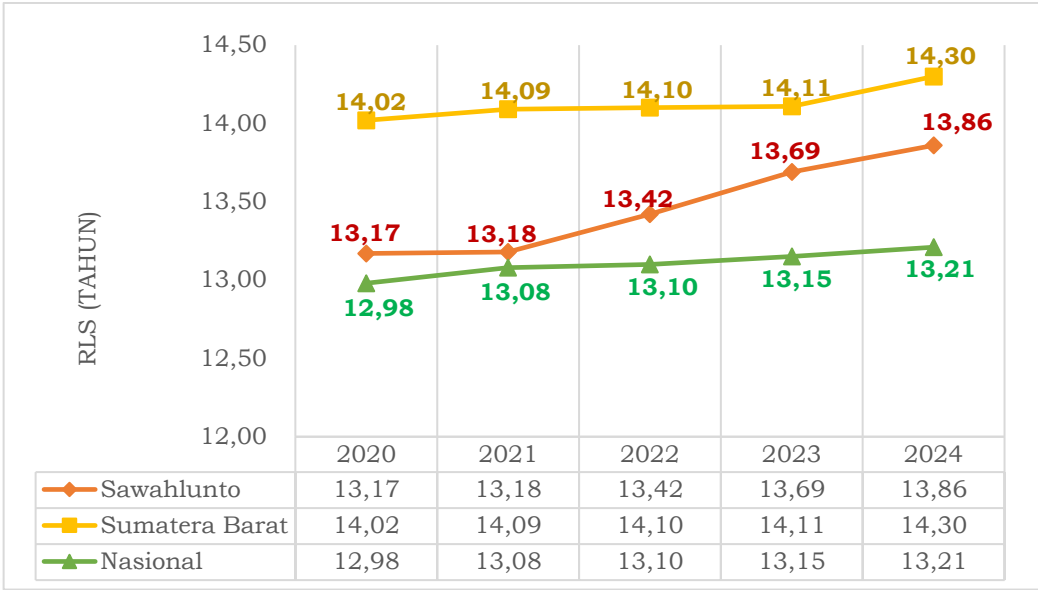
Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan lamanya waktu sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas. Adapun perkembangan HLS Kota Sawahlunto pada lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Grafik 2.20

Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS)

Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional

Tahun 2020 – 2024



Sumber Data : Badan Pusat Statistik 2024

Pada grafik di atas, Angka HLS Kota Sawahlunto mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, namun Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Sawahlunto masih jauh di bawah Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 2.52

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten/Kota

Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2024

Kabupaten / Kota	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	12,82	12,89	12,89	12,90	12,91
Pesisir Selatan	13,32	13,33	13,35	13,36	13,37
Solok	13,04	13,05	13,30	13,55	13,56
Sijunjung	12,37	12,38	12,64	12,72	12,76
Tanah Datar	14,33	14,34	14,59	14,78	15,05
Padang Pariaman	13,67	13,68	13,93	14,19	14,20
Agam	13,87	13,88	13,88	13,89	14,16
Lima Puluh Kota	13,29	13,30	13,40	13,41	13,42
Pasaman	12,80	12,81	13,05	13,25	13,52
Solok Selatan	12,71	12,72	12,73	12,80	13,07
Dharmasraya	12,43	12,44	12,51	12,68	12,89
Pasaman Barat	13,61	13,68	13,69	13,70	13,72
Kota					
Padang	16,52	16,53	16,54	16,56	16,57
Solok	14,32	14,33	14,34	14,36	14,37
Sawahlunto	13,17	13,18	13,42	13,69	13,86
Padang Panjang	15,06	15,07	15,07	15,29	15,47
Bukit Tinggi	14,97	14,98	14,99	15,01	15,28
Payakumbuh	14,26	14,27	14,29	14,30	14,57
Pariaman	14,54	14,55	14,61	14,79	14,80
Sumatera Barat	14,02	14,09	14,10	14,11	14,30

Sumber Data : Berita Resmi Statistik, No. 72/12/13/Th.XXVII, 2 Desember 2024

Angka HLS Kota Sawahlunto tahun 2024 sebesar 13,86, yang berarti lamanya waktu sekolah bagi anak usia sekolah di Kota Sawahlunto diharapkan mencapai 13,86 tahun atau dapat menyelesaikan D1. Dan angka HLS Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir merupakan yang terendah diantara 7 kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

3. Angka Literasi/Numerasi

Literasi dan numerasi adalah kemampuan dasar yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Literasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, dan memahami teks tertulis, sementara numerasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan memanipulasi angka.

Komponen literasi numerasi meliputi : 1). pemahaman angka dan operasi matematika dasar (penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian); 2). pemahaman konsep matematika kompleks (pecahan, persentase, rasio, proporsi, geometri, statistik, dan probabilitas); 3). kemampuan memecahkan masalah matematika; 4). pemahaman statistik dan probabilitas; 5). kemampuan berpikir kritis terhadap informasi numerik; 6). pemahaman dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Adapun perkembangan angka literasi numerasi di Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 2.53
Angka Literasi/Numerasi Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

NO	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata-Rata Nilai UN SD	7,42	-	-	-	-
2	Rata-Rata Nilai UN SMP	5,55	-	-	-	-
3	Persentase siswa dengan nilai <i>assessment</i> kompetensi (numerasi minimum) SD	-	39,43	45,33	68,80	75,29
4	Persentase siswa dengan nilai <i>assessment</i> kompetensi (numerasi minimum) SMP	-	69,67	70,07	57,52	77,01
5	Persentase siswa dengan nilai <i>assessment</i> kompetensi (Literasi minimum) SD	-	60,90	62,38	83,87	87,26
6	Persentase siswa dengan nilai <i>assessment</i> kompetensi (Literasi minimum) SMP	-	69,67	70,07	80,10	83,51

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2025

Mulai tahun 2021 ujian nasional pada tingkat SD dan SMP tidak dilaksanakan lagi, sebagai gantinya digunakan angka literasi/numerasi dengan rentang nilai 1- 100. Selama rentang waktu tahun 2021-2023, capaian angka literasi/numerasi dan SD dan SMP bervariasi. Untuk angka numerasi SD berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat, sedangkan angka numerasi SMP berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Selanjutnya untuk angka literasi SD memiliki kecenderungan meningkat, sementara angka literasi SMP berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Dalam upaya meningkatkan nilai literasi dilakukan peningkatan pembelajaran berbasis *assesment* kompetensi minimum (AKM) melalui peningkatan kompetensi tenaga pendidik dalam menyusun dan mengolah soal AKM.

4. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi (membaca, menulis, dan memahami teks) tertulis masyarakat.

IPLM merupakan indikator kinerja kunci (IKK) urusan pemerintahan bidang perpustakaan pada Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020. Terdapat 7 unsur pembangunan literasi masyarakat, yaitu : 1).pemerataan layanan perpustakaan; 2).ketercukupan koleksi; 3).ketercukupan tenaga perpustakaan; 4).tingkat kunjungan masyarakat per hari; 5).jumlah perpustakaan ber-SNP; 6).keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/promosi; 7).anggota perpustakaan.

Tabel 2.54
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Sawahlunto	72,13	72,43	74,14	88,33	94,81

Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2024-2025,
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Sawahlunto, 2024

IPLM Kota Sawahlunto meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2024 terdapat 6 unsur dari 7 unsur pembangunan literasi masyarakat yang sudah mendapat nilai sempurna (1). Satu unsur pembangunan literasi masyarakat yang belum mendapatkan nilai sempurna adalah unsur pemerataan layanan perpustakaan dengan capaian sebesar 0,6369.

5. Indeks Literasi Digital

Literasi digital merupakan minat baca secara digital, yang mana masyarakat mencari bahan bacaan atau informasi yang bermanfaat melalui teknologi komputer dan internet seperti ponsel atau laptop. Indeks literasi digital dihitung hanya sampai level provinsi, sedangkan untuk level kabupaten dan kota belum ada..

6. Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional

Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional adalah jumlah satuan pendidikan di suatu wilayah yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di wilayah tersebut.

Asesmen nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Asesmen nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di bawah Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, asesmen nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hasil capaian asesmen nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu : 1). Perlu intervensi khusus; 2). Dasar; 3). Cakap; 4). Mahir. Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada kabupaten/kota tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.

Adapun perkembangan persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca dan numerasi di Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :

Tabel 2.55
Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai
Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional
Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional					
Literasi (%)	na	na	79,09	81,99	85,49
Numerasi (%)	na	na	47,01	63,16	76,16

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2025

Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada assesmen tingkat nasional untuk literasi membaca untuk numerasi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

7. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi digunakan untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Jenjang pendidikan tinggi mencakup, Diploma I-IV, S1, S2, S2 Terapan dan S3. Tingginya proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik.

Berikut proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi di Kota Sawahlunto tahun 2020-2024 :

Tabel 2.56
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas
Yang Berkualitas Pendidikan Tinggi Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah lulusan S1	4.358	4.692	4.873	5.071	5.319
2	Jumlah lulusan S2	270	289	315	331	355
3	Jumlah lulusan S3	2	3	3	5	6
4	Jumlah lulusan D1 & 2	577	575	565	549	528
5	Jumlah lulusan Akademi/Diploma/ Sarjana Muda (D3)	1.545	1.606	1.630	1.659	1.671

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
6	Jumlah lulusan S1/S2/S3/D1 & D2/Akademi/Diploma/Sarjana Muda	6.752	7.165	7.386	7.615	7.879
7	Jumlah Penduduk berusia 15 Tahun ke atas	48.704	49.362	50.151	51.060	51.880
8	Proporsi Penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan tinggi Kota Sawahlunto	13,86	14,52	14,73	14,91	15,19
	Proporsi Penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan tinggi Provinsi Sumatera Barat	12,6	11,22	11,6	11,48	11,16

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto, 2025

Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi di Kota Sawahlunto selama tahun 2020-2024 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan angka ini lebih tinggi dari proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi Provinsi Sumatera Barat.

8. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)

Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi bekerja di bidang keahlian menengah tinggi adalah pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas lulusan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan tinggi mencakup Diploma I-IV, S1, S2, S2 Terapan dan S3, sedangkan pendidikan menengah adalah SMA/MA/SMLB/Paket C, SMK dan MAK.

Bidang keahlian menengah (*semi-skilled*) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat kompleksitas sedang untuk menyelesaikan tugas yang umumnya bersifat rutin dan tidak membutuhkan kemampuan mental tinggi. Bidang keahlian tinggi (*skilled*) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja dengan pengetahuan dan keterampilan komprehensif atas pekerjaan yang dilakukannya sehingga mampu menyelesaikan tugas yang sifatnya kompleks dan membutuhkan kemampuan mental tinggi.

Perkembangan persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi di Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.57
Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja Di Bidang Keahlian Menengah Tinggi Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi dan sedang bekerja pada keahlian menengah atau tinggi (orang)	na	na	13.457	15.090	na
Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi dan sedang bekerja (orang)	na	na	19.192	20.595	na

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	na	na	70,12	73,27	na

Sumber Data : BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka

Pada tabel di atas terlihat bahwa persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi di Kota Sawahlunto selama rentang tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan (data 2020-2021 dan 2024 tidak tersedia). Meningkatnya persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi menggambarkan peningkatan *link and match* tenaga kerja antara dunia pendidikan (*supply*) dan lapangan kerja (*demand*) dengan klasifikasi keahlian yang sesuai dengan tingkat pendidikan.

D. Perlindungan Sosial yang Adaptif

1. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah jumlah pekerja yang memiliki program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja. Semakin tinggi cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap resiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak.

Adapun perkembangan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :

Tabel 2.58
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan (Orang)	13.604	19.379	24.687	27.416	21.155
2	Jumlah Semesta Penduduk Bekerja (Orang)	30.310	30.186	32.275	34.018	36.134
3	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	44,88	64,20	76,49	80,59	58,55

Sumber Data : BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Kota Sawahlunto selama rentang tahun 2020-2024 berfluktuasi. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 80,59% dan terendah pada tahun 2020 sebesar 44,88%. Terjadi penurunan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Sawahlunto yang menunjukkan bahwa tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Sawahlunto semakin rendah.

2. Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Persentase disabilitas bekerja di sektor formal merupakan proporsi penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar dan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai terhadap total angkatan kerja penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal mendapatkan *jobs security*, penghasilan yang stabil, serta cakupan perlindungan sosial yang lebih baik untuk mendapatkan kehidupan yang layak dibandingkan mereka yang bekerja di sektor informal.

Perkembangan persentase disabilitas bekerja di sektor formal selama lima tahun terakhir disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.59

Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pekerja Penyandang Disabilitas Sektor Formal (Orang)	na	na	0	122	na
2	Angkatan Kerja Penyandang Disabilitas (Orang)	na	na	34	221	na
3	Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	na	na	0,00	55,20	na

Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2024

Data Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal tahun 2020-2021 dan 2024 tidak tersedia. Namun terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada disabilitas yang bekerja di sektor formal di Kota Sawahlunto pada tahun 2023. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah Kota Sawahlunto terus berupaya untuk selalu memberi penghargaan, serta terus memenuhi hak bagi para penyandang disabilitas, terutama memberikan hak dan kesempatan yang sama dalam mengakses fasilitas umum di bidang kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan layanan sosial.

E. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (Kampung Moderasi Beragama)

Kampung Moderasi Beragama merupakan program dari Kementerian Agama Republik mulai tahun 2023 dan digunakan sebagai proxy dari Indeks kerukunan umat beragama (IKUB) karena data capaian IKUB di Kota Sawahlunto sampai tahun 2024 belum tersedia. Indeks kerukunan umat beragama menggambarkan sejauh mana tingkat kerukunan umat beragama. IKUB diukur melalui tiga indikator kerukunan umat beragama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama.

Moderasi beragama merupakan cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem, radikalisme, ujaran kebencian, hingga retaknya hubungan antar umat beragama yang menjadi problem yang dihadapi bangsa saat ini. Moderasi beragama dapat diukur dari 4 indikator, yakni : Komitmen kebangsaan, Toleransi, Anti kekerasan, Adaptif budaya lokal.

Dalam mewujudkan moderasi beragama di Kota Sawahlunto telah disosialisasikan kampung moderasi beragama. Program kampung moderasi beragama merupakan program dari Kementerian Agama Republik Indonesia untuk membentuk

sebuah kampung, desa atau kelurahan dengan sifat toleransi umat beragama yang tinggi dan menciptakan kerukunan antar umat beragama di tengah masyarakat, yang bertujuan untuk memperkuat kehidupan bermasyarakat.

Tabel 2.60
Kampung Moderasi Beragama Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Desa/Kelurahan sebagai Kampung Moderasi Beragama	na	na	na	2	2

Sumber Data : Satpol PP dan Damkar Kota Sawahlunto Tahun 2024

Dalam mewujudkan moderasi beragama di Kota Sawahlunto, telah disosialisasikan kampung moderasi beragama. Program kampung moderasi beragama merupakan program dari Kementerian Agama Republik Indonesia untuk membentuk sebuah kampung, desa atau kelurahan dengan sifat toleransi umat beragama yang tinggi dan menciptakan kerukunan antar umat beragama di tengah masyarakat, yang bertujuan untuk memperkuat kehidupan bermasyarakat. Kota Sawahlunto sudah memiliki 2 (dua) desa/kelurahan yakni Desa Sikalang dan Kelurahan Tanah Lapang sebagai kampung moderasi beragama. Target akhir seluruh desa/kelurahan di Kota Sawahlunto akan menjadi Kampung Moderasi Beragama.

2. Indeks Pembangunan Kebudayaan (Persentase Pelestarian Cagar Budaya)

Pelestarian Cagar Budaya yang merupakan indikator proxy dari Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Indeks Pembangunan Kebudayaan hanya tersedia sampai tingkat provinsi.

Pelestarian cagar budaya sangat penting untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai historis, budaya, dan artistik yang ada di dalamnya. Pelestarian cagar budaya tidak hanya memberikan manfaat budaya tetapi juga dapat berdampak positif pada ekonomi lokal melalui pariwisata. Situs bersejarah yang terawat dengan baik dapat menarik pengunjung dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi komunitas setempat. Cagar budaya merupakan warisan sejarah yang tidak hanya mencerminkan identitas suatu bangsa, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan antara generasi.

Ombilin Coal Mining Heritage Of Sawahlunto (OCMHS) adalah salah satu cagar budaya Kota Sawahlunto. OCMHS merupakan kawasan kota tua bekas peninggalan penjajahan Belanda yang terletak di tengah-tengah Kota Sawahlunto. OCMHS merupakan warisan dunia yang telah diakui oleh UNESCO pada sidang sesi ke-43 pertemuan Komite Warisan Dunia di Kota Baku Azerbaijan pada tanggal 6 Juli 2019.

Ombilin Coal Mining Heritage Of Sawahlunto (OCMHS) melewati 7 kabupaten/kota dengan tiga zona :

1. Zona A : Situs dan Kota Tambang Sawahlunto, meliputi Kota Sawahlunto dengan tambang terbuka dan jaringan tambang yang disokong dengan fasilitas pengolahan batu bara dan berbagai fasilitas kota tambang yang lengkap;

2. Zona B : Jaringan infrastruktur perkeretaapian, meliputi Kota Sawahlunto, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Padang dengan jaringan kereta api teknik tingkat tinggi terdiri dari rel gigi, jembatan dan terowongan yang menghubungkan lokasi tambang hingga pelabuhan Emmahaven (Teluk Bayur) sepanjang 155 kilometer di medan pegunungan yang sulit;
3. Zona C : Fasilitas gudang batu bara di pelabuhan Teluk Bayur atau Emmahaven (*Coal Storage Facilities at Emmahaven Port*) di Kota Padang di pantai samudera hindia sebagai tempat memuat batu bara yang akan dikapalkan ke seluruh wilayah Belanda dan wilayah eropa lainnya.

OCMHS merupakan bukti sejarah Kota Sawahlunto yang berawal dengan penemuan deposit batu bara serta dampak revolusi barat di Hindia Belanda. Lebih satu abad hasil batu bara Sawahlunto berkontribusi bagi penggerak pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia dan Sumatera Barat khususnya. Meskipun aktivitas tambang sudah tidak beroperasi lagi namun dampak pembangunan berupa tinggalan bersejarah dan pengalaman (wujud budaya) yang diperoleh masih dapat dirasakan masyarakat hingga saat ini. Sehingga besarnya nilai sejarah pencapaian di bidang industri tambang berskala global yang dimiliki Warisan Budaya Tambang Batu Bara Ombilin Sawahlunto (WBTBOS)/*Ombilin Coal Mining Heritage Of Sawahlunto* (OCMHS) menjadikan penting untuk dilindungi, dilestarikan dan dipromosikan bagi generasi masa kini dan masa depan sebagai bagian dari Warisan Dunia umat manusia.

Berikut perkembangan pelestarian cagar budaya Kota Sawahlunto selama kurun waktu tahun 2020-2024 :

Tabel 2.61
Persentase Pelestarian Cagar Budaya Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya (<i>tangible</i>) yang di lestarikan (objek)	83	85	88	92	94
2.	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (<i>Intangible</i>) yang dilestarikan (objek)	13	35	43	45	49
3.	Jumlah Cagar Budaya (<i>tangible dan Intangible</i>) yang dilestarikan (objek)	96	120	131	137	143
4.	Jumlah Total Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya (<i>tangible</i>) Daerah (objek)	144	153	164	163	163
5.	Jumlah Total Warisan Budaya Tak Benda (<i>Intangible</i>) Daerah (objek)	225	215	215	215	215
6.	Jumlah Total Cagar Budaya (<i>tangible dan Intangible</i>) Daerah (objek)	369	368	379	378	378
7.	Persentase Pelestarian Cagar Budaya	26,02	32,61	34,56	36,24	37,8

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto, 2023

Pada tabel di atas terlihat bahwa pemerintah Kota Sawahlunto konsisten dari tahun ke tahun melakukan pelestarian terhadap cagar budaya yang ada, baik yang berupa benda, situs dan kawasan cagar budaya (*tangible*) maupun yang berupa warisan budaya tak benda (*intangible*) yang dilestarikan (objek). Jumlah cagar budaya (*tangible dan intangible*) yang dilestarikan sampai tahun 2024 sudah berjumlah 143 objek atau 37,8 %.

Tabel 2.62
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya (*Tangible*) Dan
Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (*Intangible*) Di Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya (<i>tangible</i>)						
1.	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang di lestarikan (unit)	83	85	88	92	94
2.	Jumlah Total Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Daerah (unit)	144	153	164	163	163
3.	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dikelola (unit)	21	94	102	137	143
Warisan Budaya Tak Benda (<i>Intangible</i>)						
1.	Manuskrip	5	5	5	5	5
2.	Tradisi Lisan	46	43	43	43	43
3.	Adat Istiadat	40	40	40	40	40
4.	Ritus	12	13	13	13	13
5.	Pengetahuan Tradisional	18	18	18	18	18
6.	Teknologi Tradisional	27	19	19	19	19
7.	Seni	38	38	38	38	38
8.	Bahasa	2	2	2	2	2
9.	Permainan Rakyat	35	35	35	35	35
10.	Olahraga Tradisional	2	2	2	2	2
11.	Jumlah Total Warisan Budaya Tak Benda (<i>Intangible</i>)	225	215	215	215	215
12.	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	13	35	43	45	49

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto

Dua warisan budaya tak benda (*intangible*) yang sudah masuk ke dalam Warisan Budaya Tak Benda Indonesia (WBTDI) adalah Songket Silungkang (masuk kedalam Pengetahuan Tradisional) dan Bahasa Tangsi (masuk kedalam Bahasa).

F. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

1. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan pencapaian perlindungan anak di Indonesia. IPA digunakan untuk menilai sejauh mana hak-hak anak terpenuhi dan sejauh mana anak-anak mendapatkan perlindungan khusus.

IPA disusun oleh Kemen PPPA bersama BPS yang menyajikan potret perlindungan anak melalui presentasi 5 klaster. Penyajian lima Klaster ini mengacu pada Konvensi Hak Anak dengan mengaplikasikan 4 Klaster pembentuk Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan 1 Klaster pembentuk Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). Klaster pembentuk Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) terdiri dari Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan; Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Klaster IV Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang. Sedangkan Klaster pembentuk Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) adalah Klaster V Perlindungan Khusus.

Adapun capaian klaster pembentuk IPA Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.63
Perkembangan Indeks Perlindungan Anak Kota Sawahlunto,
Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
IPA Sawahlunto	na	65,70	67,61	65,47	na
IPA Provinsi Sumatera Barat	67,21	61,98	63,65	62,38	na
IPA Nasional	66,89	61,38	63,30	63,83	na

Sumber Data : SIGA KemenPPPA

IPA Kota Sawahlunto tahuntahun 2020 dan tahun 2024 tidak tersedia, sedangkan IPA tahun 2021-2023 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Meskipun demikian, IPA Kota Sawahlunto selalu berada di atas IPA Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.



Tabel 2.64
Capaian Indeks Penyusun IPA Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, Nasional
Tahun 2021-2023

Wilayah	Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan			Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif			Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan			Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya			Klaster V Perlindungan Khusus		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Sawahlunto	48,2	51,96	47,82	84,65	84,72	88,03	79,89	85,5	80,97	36,05	29,95	29,79	75,34	80,92	75,46
Sumatera Bara t	47,72	51,44	50,28	85,02	84,78	84,78	73,17	72,66	73,41	28,67	32,79	29,23	70,01	71,5	69,08
Indonesia	46,74	49,04	47,68	76,68	78,64	80,32	76,47	77,15	77,9	30,99	33,96	34,56	71,89	73,61	74,45

Sumber Data : SIGA KemenPPPA

Pada tabel di atas terlihat bahwa klaster Perlindungan Khusus pembentuk Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) dan tiga dari empat klaster pembentuk Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Kota Sawahlunto, yaitu : Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan, Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Klaster IV Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya mengalami penurunan pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan anak di Kota Sawahlunto pada tahun 2023 belum optimalnya.

Belum optimalnya perlindungan anak di Kota Sawahlunto didukung oleh data lain yang menunjukkan masih adanya keluarga miskin sebanyak 1621 keluarga yang tentunya terdapat anak usia 0-17 tahun yang beresiko hidup dalam kemiskinan, adanya anak terlantar sebanyak 34 orang dan rasio angka partisipasi sekolah (APS) Kota Sawahlunto di bawah 100 yang bermakna adanya anak usia 7-17 tahun yang putus sekolah, masih terdapat 136 dari 19,009 (0, 72%) anak usia 0-18 tahun yang belum memiliki akta kelahiran, masih terdapatnya perempuan yang melahirkan diluar faskes, masih terdapatnya balita stunting (prevalensi stunting) sebesar 13,7% berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia.

2. Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) meliputi tiga dimensi yaitu ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan. Indeks ini berkolaborasi positif dengan Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Keluarga merupakan instrumen untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga. Indeks Pembangunan Keluarga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang dan rentan.

Kriteria iBangga adalah sebagai berikut : Nilai iBangga < 40 (kurang baik /rentan), Nilai iBangga 40 – 70 (cukup baik/berkembang), Nilai iBangga > 70 (baik /tangguh).

Tabel 2.65
Indeks Pembangunan Keluarga Kota Sawahlunto,
Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
iBangga Kota Sawahlunto	na	54,05	57,77	64,28	63,88
iBangga Provinsi Sumatera Barat	51,74	53,54	56,12	60,99	61,20
iBangga Nasional	53,57	54,01	56,07	61,43	62,40

Sumber Data : BKKBN 2025

Indeks Pembangunan Keluarga Kota Sawahlunto selama periode 2020-2024 berada pada kriteria cukup baik (berkembang). Hal ini menandakan kualitas Keluarga di Kota Sawahlunto sudah semakin baik walaupun masih berada pada posisi berkembang. Indeks Pembangunan Keluarga Kota Sawahlunto lebih tinggi dibandingkan dari Indeks Pembangunan Keluarga Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yang juga berada pada kriteria cukup baik (berkembang).

3. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

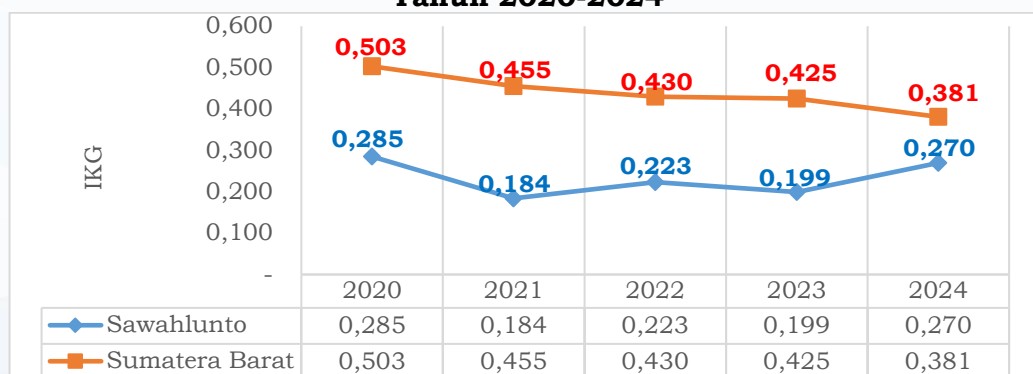
Kesetaraan gender menjadi target pembangunan di banyak negara terutama yang mengalami disparitas pembangunan yang tinggi. Ketimpangan pembangunan menurut gender mengakibatkan pembangunan tidak dapat mencapai potensinya secara optimal. Kondisi yang ideal dalam pembangunan manusia yang diharapkan adalah kelompok penduduk laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama untuk berperan dalam pembangunan, memegang kendali atas sumber daya pembangunan yang ada, serta menerima manfaat dari pembangunan yang setara dan adil. Kesetaraan gender sendiri dapat dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi dalam segala bidang.

Menyadari bahwa kesetaraan gender memainkan peran yang penting dalam pembangunan, maka pengukuran ketimpangan gender telah menjadi suatu kebutuhan. Dengan melakukan pengukuran ketimpangan gender, maka akan diperoleh data-data yang diperlukan untuk memahami, mengatasi, dan mengentaskan ketimpangan yang ada. Data tersebut juga bermanfaat sebagai dasar untuk membuat kebijakan publik yang akuntabel dan berkontribusi terhadap kesetaraan gender dan kehidupan yang lebih adil bagi setiap orang, oleh sebab itu dibutuhkan kajian perihal Indeks Ketimpangan Gender (IKG).

Nilai Indeks Ketimpangan Gender berada pada rentang ambang nilai 0 sampai 1. Semakin rendah nilai Indeks Ketimpangan Gender suatu wilayah, semakin merata pembangunan gender di wilayah tersebut dan sebaliknya, semakin tinggi nilai Indeks Ketimpangan Gender suatu wilayah menunjukkan semakin timpang pembangunan gender di wilayah tersebut.

Adapun perkembangan Indeks Ketimpangan Gender Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Grafik 2.21
Indeks Ketimpangan Gender Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024



Sumber Data : Berita Resmi BPS 25 April 2025

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Sawahlunto berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat selama lima tahun terakhir. Meskipun demikian, IKG Kota Sawahlunto lebih rendah dibandingkan IKG Provinsi Sumatera Barat. hal ini menunjukkan bahwa pembangunan gender di Kota Sawahlunto lebih merata dibandingkan Provinsi Sumatera Barat.

Berikut disandingkan IKG Kota Sawahlunto dengan IKG kabupaten/kota lainnya Se-Provinsi Sumatera Barat

Tabel 2.66
IKG Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Indeks Ketimpangan Gender Menurut Kabupaten/Kota				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Kepulauan Mentawai	0,855	0,851	0,85	0,851	0,849
Kab. Pesisir Selatan	0,492	0,505	0,517	0,482	0,468
Kab. Solok	0,449	0,48	0,403	0,423	0,377
Kab. Sijunjung	0,516	0,527	0,501	0,465	0,491
Kab. Tanah Datar	0,387	0,312	0,305	0,336	0,344
Kab. Padang Pariaman	0,778	0,75	0,763	0,751	0,722
Kab. Agam	0,384	0,359	0,239	0,162	0,355
Kab. Lima Puluh Kota	0,441	0,549	0,496	0,492	0,453
Kab. Pasaman	0,525	0,535	0,522	0,527	0,464
Kab. Solok Selatan	0,824	0,804	0,787	0,811	0,805
Kab. Dharmasraya	0,566	0,553	0,528	0,539	0,457
Kab. Pasaman Barat	0,554	0,532	0,519	0,494	0,419
Kota Padang	0,200	0,32	0,171	0,198	0,172
Kota Solok	0,270	0,19	0,18	0,182	0,147
Kota Sawahlunto	0,285	0,184	0,223	0,199	0,270
Kota Padang Panjang	0,153	0,192	0,153	0,135	0,081
Kota Bukittinggi	0,273	0,236	0,156	0,159	0,080
Kota Payakumbuh	0,279	0,325	0,295	0,153	0,175
Kota Pariaman	0,377	0,331	0,286	0,374	0,120
Provinsi Sumatera Barat	0,503	0,455	0,43	0,425	0,381

Sumber Data : Berita Resmi BPS 25 April 2025

Pada tahun 2024, IKG Kota Sawahlunto merupakan yang tertinggi pada level kota di Provinsi Sumatera Barat. Tingginya IKG menunjukkan bahwa kesetaraan gender di Kota Sawahlunto belum optimal atau ada kesenjangan yang besar antara pencapaian laki-laki dan perempuan, khususnya dalam aspek kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Sedangkan pada level kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat, IKG terendah adalah Kota Bukittinggi dan IKG tertinggi adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hal ini mengandung arti bahwa pembangunan gender di Kota Bukittinggi adalah yang paling merata di Provinsi Sumatera Barat dan yang paling tidak merata (timpang) adalah di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

4. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kesetaraan gender dalam pembangunan manusia, dengan membandingkan pencapaian laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi dasar : kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Semakin mendekati 100 nilai IPG, semakin kecil kesenjangan pembangunan gender dan jika IPG 100 bermakna tidak ada lagi kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan atau pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan sudah sama (setara).

Adapun capaian IPG Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.67
IPG Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, Nasional
Tahun 2020–2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
IPG Kota Sawahlunto	95,48	95,73	95,17	95,36	95,73
IPG Sumatera Barat	94,17	94,34	94,72	94,93	95,25
IPG Nasional	91,06	91,27	91,63	91,85	91,85

Sumber Data : BPS

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Sawahlunto berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat selama lima tahun terakhir. IPG Kota Sawahlunto lebih tinggi dari IPG Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yang bermakna pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan di Kota Sawahlunto lebih merata dibandingkan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Tabel 2.68
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Sawahlunto
Tahun 2020–2024

Kabupaten/Kota	[UHH SP 2010] Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Kepulauan Mentawai	89,59	89,81	89,91	89,57	90,13
Kab. Pesisir Selatan	95,12	95,41	95,75	95,57	95,83
Kab. Solok	96,18	96,19	96,29	96,17	96,22
Kab. Sijunjung	93,03	93,40	94,16	94,28	94,39
Kab. Tanah Datar	97,57	97,58	97,62	97,73	97,48
Kab. Padang Pariaman	92,69	92,78	93,08	93,32	93,92
Kab. Agam	97,01	96,95	97,00	97,19	97,09
Kab. Lima Puluh Kota	95,03	94,91	94,85	94,77	94,86
Kab. Pasaman	92,45	92,47	92,51	92,7	92,91
Kab. Solok Selatan	95,08	95,14	95,20	95,27	95,53
Kab. Dharmasraya	88,31	88,32	88,56	89,11	89,71
Kab. Pasaman Barat	90,26	90,14	90,17	90,05	90,32
Kota Padang	93,64	93,81	93,85	93,94	94,04
Kota Solok	97,05	97,05	96,67	96,64	96,90
Kota Sawahlunto	95,48	95,73	95,17	95,36	95,73
Kota Padang Panjang	97,70	97,78	98,24	98,19	98,23
Kota Bukittinggi	98,89	98,99	99,36	99,17	98,66
Kota Payakumbuh	98,46	98,6	98,61	98,58	98,93
Kota Pariaman	98,49	98,62	98,64	98,07	98,11
Provinsi Sumatera Barat	94,17	94,34	94,72	94,93	95,25

Sumber Data : Berita Resmi BPS 8 April 2025

Meskipun IPG Kota Sawahlunto lebih tinggi dari IPG Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, namun merupakan nilai yang terendah kedua setelah Kota Padang diantara 7 kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang bermakna kesetaraan gender dalam pembangunan manusia di Kota Sawahlunto masih lebih rendah dibandingkan kota-kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

5. Indeks Pembangunan Pemuda (Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan)

Indeks Pembangunan Pemuda Kota Sawahlunto sampai tahun 2024 belum dihitung. Oleh sebab itu untuk memberikan informasi capaian kinerja pembangunan pemuda, ditampilkan gambaran tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan.

Kepemudaan dan olahraga merupakan bagian dari urusan pembangunan yang mengedepankan kreativitas generasi penerus bangsa. Perkembangan organisasi pemuda ini perlu ditingkatkan lagi sebagai salah satu antisipasi dalam mengurangi tingkat kriminalitas dan perilaku menyimpang pemuda di Kota Sawahlunto sehingga masalah sosial ini dapat dituntaskan. Perkembangan kepemudaan dan Olahraga yang ada di Kota Sawahlunto terlihat dari realisasi kinerja daerah setiap tahunnya, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.69
Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	15	16	4,13	5,3	5,25
2	Peningkatan prestasi olahraga (medali)	82	162	177	382	385
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	1	1	0,008	2,77	3

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2024

Pada tabel di atas terlihat bahwa prestasi olahraga Kota Sawahlunto dari tahun 2020 hingga tahun 2024 meningkat yang ditunjukkan oleh peningkatan perolehan medali seiring dengan banyaknya event atau lomba yang diikuti. Pemerintah Kota Sawahlunto sangat memperhatikan dan mendukung aktivitas organisasi kepemudaan dan olahraga yang ada di Kota Sawahlunto. Namun persentase tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir berfluktuasi dengan kecenderungan menurun.

6. Indeks Perlindungan Khusus Anak

Indeks perlindungan khusus anak (IPKA) adalah indikator yang menggambarkan kondisi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti anak penyandang disabilitas, pekerja anak, dan anak terlantar baik secara nasional maupun di tingkat provinsi.

Adapun capaian IPKA Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.70
Perkembangan Indeks Perlindungan Khusus Anak Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
IPKA Sawahlunto	na	79.71	82.73	78.66	)*
IPKA Provinsi Sumatera Barat	72.62	72.86	74.42	72.87	)*
IPKA Nasional	73.11	73.59	75.21	75.72	)*

Sumber Data : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

*) Data belum Launching

Pada tabel di atas terlihat bahwa IPKA Kota Sawahlunto lebih tinggi (baik) dari IPKA Provinsi Sumatera Barat dan IPKA Nasional, namun capaiannya berfluktuasi.

Perlindungan khusus anak hingga saat ini masih menjadi salah satu isu penting karena memiliki beragam tantangan. Perlindungan khusus anak diantaranya adalah perlindungan akan resiko kemiskinan, fenomena pekerja anak, kekerasan, maupun perlindungan terhadap anak dengan disabilitas.

Berikut disandingkan capaian IPKA Kota Sawahlunto dan IPKA kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2023:

Tabel 2.71
Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)
Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021 - 2023

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2021	Peringkat	2022	Peringkat	2023	Peringkat
Kota Padang Panjang	82,05	4	82,36	3	85,74	1
Kota Payakumbuh	83,71	2	81,51	5	85,47	2
Kab. Dharmasraya	79,58	8	76,41	9	85,3	3
Kota Solok	84,71	1	81,27	6	83,81	4
Kab.Lima Puluh Kota	79,65	7	80,39	7	82,94	5
Kota Padang	82,24	3	82,22	4	82,02	6
Kota Bukittinggi	76,68	11	82,69	2	79,97	7
Kab.Sijunjung	71,35	15	77,51	8	79,27	8
Kota Sawah Lunto	79,71	6	82,73	1	78,66	9
Kab.Pasaman	66,17	18	59,9	18	77,79	10
Kab.Pasaman Barat	72,91	14	72,62	14	77,2	11
Kab.Solok	74,96	13	68,49	15	72,54	12
Kab.Padang Pariaman	68,39	16	65,95	17	72,46	13
Kab.Pesisir Selatan	67,27	17	67,59	16	71,61	14
Kab.Solok Selatan	75,3	12	75,62	10	70,94	15
Kab.Tanah Datar	79,92	5	75,04	11	70,61	16
Kota Pariaman	79,07	9	74,32	12	69,75	17
Kab.Agam	78,67	10	72,69	13	66,25	18
Kab.Kepulauan Mentawai	52,3	19	56,09	19	62,15	19

Sumber Data : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada tabel di atas terlihat IPKA Kota Sawahlunto pernah menjadi yang tertinggi dibandingkan 18 kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 IPKA Kota Sawahlunto mengalami penurunan yang disebabkan masih adanya anak yang beresiko hidup dalam kemiskinan karena terdapat keluarga miskin sebanyak 1621 keluarga, fenomena pekerja anak, kekerasan terhadap anak, maupun perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas.

2.1.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

A. Daya Saing Sumber Daya Manusia

1. Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan (*dependency ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia non produktif (penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk usia 65 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun). Semakin tinggi angka ketergantungan menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk non produktif, demikian pula sebaliknya.

Tabel 2.72
Angka Ketergantungan Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	16.434	16.325	16.262	16.710	16.840
2	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	4.542	4.770	5.020	5.140	5.410
3	Jumlah penduduk usia non produktif (1) & (2)	20.976	21.095	21.282	21.850	22.250
4	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	44.162	44.592	45.131	45.920	46.470
5	Angka ketergantungan (3)/(4)	47,50	47,31	47,16	47,58	47,88

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2021-2025, Data Diolah 2025

Pada tabel di atas terlihat bahwa angka ketergantungan Kota Sawahlunto selama tahun 2020-2024 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat, pada kisaran angka 47,16 hingga 47,88. Angka ketergantungan di bawah 50 berarti bahwa satu orang penduduk tidak produktif ditanggung oleh 1 - 2 orang penduduk produktif. Pada tahun 2024, angka ketergantungan Kota Sawahlunto sebesar 47,88 yang berarti tiap 100 orang penduduk yang berusia produktif (15-64) mempunyai tanggungan sebanyak 48 orang penduduk non produktif.

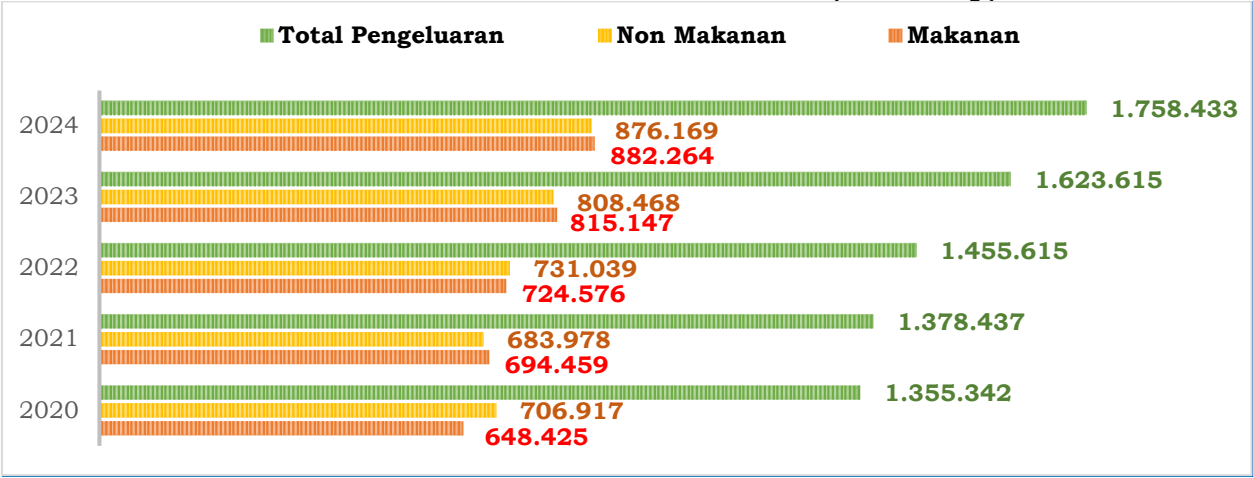
2. Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan

Rata-rata pengeluaran per kapita merupakan rata-rata konsumsi makanan dan non makanan per individu dalam satu tahun. Pengeluaran seseorang dipengaruhi oleh pendapatan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh terhadap pergeseran pola pengeluaran. “Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi pengeluaran non makanan”. Atau dengan kata lain, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, “semakin rendah persentase pengeluaran konsumsi untuk makanan terhadap total pengeluaran, semakin baik tingkat kesejahteraan”

Pengeluaran konsumsi untuk makanan digunakan untuk membeli padi-padian, umbi-umbian, ikan/udang/cumi/kerang, daging, telur dan susu, sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan kelapa, bahan minuman, bumbu-bumbuan, konsumsi lainnya, makanan dan minuman jadi, dan rokok. Sedangkan “pengeluaran konsumsi untuk non makanan” digunakan untuk membiayai perumahan dan fasilitas rumah tangga; aneka komoditas dan jasa; pakaian, alas kaki,

dan tutup kepala; komoditas tahan lama; pajak, pungutan, dan asuransi; keperluan pesta dan upacara/kenduri.

Grafik 2.22
Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Sebulan
Kelompok Makanan dan Non Makanan
Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 (Dalam Rp)

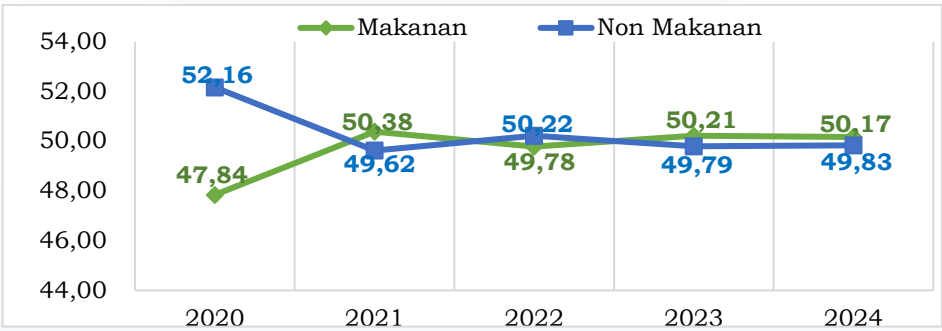


Sumber : BPS, Sawahlunto Dalam Angka 2025

Selama kurun waktu 2020-2024, pengeluaran konsumsi makanan mendominasi pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kota Sawahlunto, kecuali tahun 2020 dan 2022, dimana kondisi pada kedua tahun ini pengeluaran konsumsi kelompok non makanan lebih tinggi dari pengeluaran konsumsi kelompok makanan.

Berikut persentase pengeluaran konsumsi per kapita sebulan kelompok makanan dan non makanan :

Grafik 2.23
Persentase Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Sebulan
Kelompok Makanan dan Non Makanan Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024



Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025, Data Diolah 2025

Selama kurun waktu 2020-2024, persentase pengeluaran konsumsi per kapita sebulan kelompok makanan di Kota Sawahlunto di atas 50%, kecuali tahun 2020 dan 2022. Hal ini menunjukkan, kondisi ekonomi masyarakat Kota Sawahlunto tahun 2020 dan tahun 2022 lebih baik atau lebih sejahtera berdasarkan Teori ekonomi modern (Walt Whitman Rostow) yang mengatakan salah satu ciri perekonomian yang modern adalah jika tujuan utama konsumsi masyarakatnya adalah untuk meningkatkan arti hidup, sehingga masyarakat lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan tersier dibanding kebutuhan primer dan sekunder. Atau dengan kata lain, “semakin tinggi perekonomian suatu masyarakat, konsumsi untuk kebutuhan non makanan semakin tinggi”.

Pada tahun 2020 dan tahun 2022 proporsi pengeluaran konsumsi non makanan di Kota Sawahlunto lebih besar dari pengeluaran konsumsi untuk makanan. Hal ini didukung oleh rendahnya laju inflasi kelompok makanan akibat pandemi covid-19 pada tahun 2020 yang menyebabkan pasar sepi sehingga harga-harga menjadi turun. Disamping itu, penyelenggaraan sekolah dan aktivitas lainnya dilakukan secara daring sehingga memerlukan tambahan biaya untuk kuota internet (pengeluaran kelompok non makanan). Sedangkan pada “tahun 2022, inflasi pada kelompok non makanan lebih tinggi” dari pada kelompok makanan yang dipicu oleh naiknya harga pertalite, pertamax dan solar bersubsidi pada bulan September 2022. Disamping kenaikan harga bahan bakar minyak, juga terjadi kenaikan tarif air dan listrik, harga bahan bakar rumah tangga (gas elpiji), harga barang perlengkapan/peralatan pemeliharaan rutin rumah tangga, harga alat kesehatan, dan biaya transportasi.

3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas adalah perbandingan antara jumlah output yang dihasilkan dengan jumlah input yang dibutuhkan untuk menghasilkan output tersebut (Husein Umar, dkk). Berdasarkan definisi tersebut maka dianalogikan output daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB ADHK) suatu daerah dan input adalah jumlah tenaga kerja yang ada pada daerah tersebut.

Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kota Sawahlunto tahun 2020–2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.73
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kota Sawahlunto
Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHK (Rp. Miliar)	2760,92	2829,35	2941,27	3072,35	3195,86
Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	-1,27	2,48	3,96	4,46	4,02
Jumlah Tenaga Kerja (Jiwa)	30310	30186	32275	34018	36134
Pertumbuhan Tenaga Kerja (%)	4,10	-0,41	6,92	5,40	6,22
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kota Sawahlunto (Juta/Jiwa)	91,09	93,73	91,13	90,32	88,44

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025, Data Diolah 2025

Produktivitas Tenaga Kerja Kota Sawahlunto tiga tahun terakhir terus menerus mengalami penurunan, hal ini disebabkan peningkatan jumlah tenaga kerja (input) lebih besar dari peningkatan produksi (output), dimana jumlah tenaga kerja meningkat pada kisaran 4,10% - 6,92%, sementara produksi meningkat pada kisaran 2,48% - 4,46%.

Untuk melihat pada lapangan usaha mana tenaga kerjanya paling produktif, maka Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja dirinci berdasarkan lapangan usaha yang ada. Output diwakili oleh PDRB ADHK menurut lapangan usaha dan input diwakili oleh jumlah penduduk yang bekerja pada lapangan usaha.

Lapangan usaha terdiri dari tiga kategori, yakni pertanian, manufaktur dan jasa. Lapangan usaha manufaktur terdiri dari pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, dan daur ulang; serta konstruksi. Sedangkan lapangan usaha Jasa terdiri dari perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum; pergudangan dan transportasi; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; *real estate*; serta jasa-jasa lainnya.

Tabel 2.74

Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kota Sawahlunto

Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 – 2024

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) (Miliar Rupiah)					
Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian	219,53	235,05	246,63	252,71	256,56
Manufaktur	872,14	829,59	843,74	879,54	895,97
Jasa	1.706,40	1.764,73	1.850,90	1.940,10	2.043,32
Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha (Jiwa)					
Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian	5.646	5.547	4.646	5.300	4.920
Manufaktur	7.361	7.350	8.766	8.126	9.105
Jasa	17.303	17.289	18.863	20.592	22.109
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rupiah/Jiwa)					
Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian	38,88	42,37	53,08	47,68	52,15
Manufaktur	118,48	112,87	96,25	108,24	98,40
Jasa	98,62	102,07	98,12	94,22	92,42

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025, Data Diolah 2025

Pada tabel di atas terlihat bahwa lapangan usaha yang paling produktif adalah manufaktur, kecuali pada tahun 2022 lapangan usaha Jasa lebih produktif. Sedangkan lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah Jasa.

Tantangan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja Kota Sawahlunto adalah rendahnya kualitas SDM karena 39,46% angkatan kerja Kota Sawahlunto masih didominasi oleh lulusan SMP ke bawah, ketidaksesuaian keahlian (*mismatch*) antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja, informasi pasar kerja belum mampu menjadi intelijen pasar kerja yang baik, dan pasar kerja Kota Sawahlunto belum mampu merespons perubahan cepat dari jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian, struktur penduduk, serta pola budaya kerja.

B.

Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

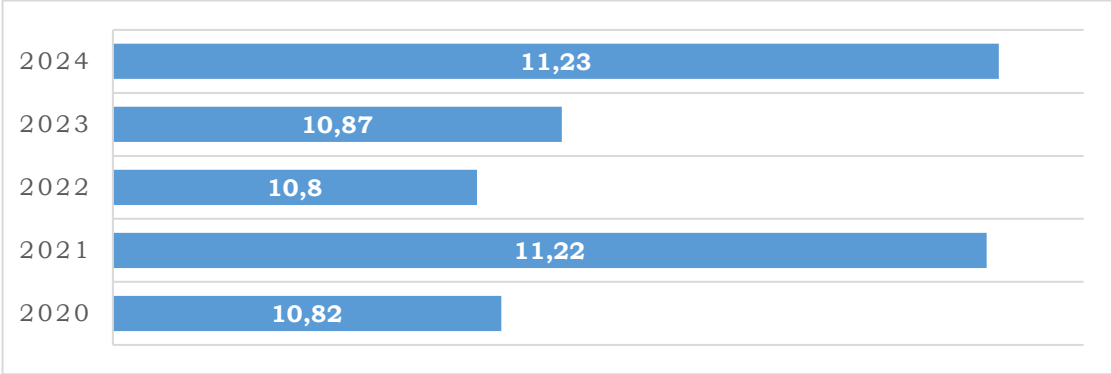
1.

Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB Industri Pengolahan mencerminkan rasio hasil nilai tambah lapangan usaha Industri Pengolahan terhadap total nilai PDRB. Industri pengolahan meliputi : industri makanan dan minuman, industri pengolahan tembakau, industri tekstil, industri pakan ternak, industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki.

Berikut rasio PDRB Industri Pengolahan terhadap nilai total PDRB Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir :

Grafik 2.24
Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024



Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2025

Pada grafik di atas terlihat bahwa rasio PDRB sektor industri pengolahan Kota Sawahlunto selama tahun 2020-2024 berada dalam rentang 10,80 % hingga 11,23 %. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2024 dan rasio terendah terjadi pada tahun 2022. Industri pengolahan adalah lapangan usaha dominan ketiga dalam struktur perekonomian Kota Sawahlunto setelah lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (15,47 %) dan lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (12,07). Semakin besar rasio yang diberikan oleh suatu lapangan usaha terhadap PDRB suatu daerah, semakin besar pula peranannya dalam meningkatkan atau menurunkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

2. Rasio PDRB Akomodasi, Makan Dan Minum

Rasio PDRB akomodasi makan minum adalah persentase PDRB suatu wilayah yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait akomodasi dan makan minum. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh aktivitas akomodasi dan makan minum pada suatu wilayah, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB wilayah tersebut, ceteris paribus.

Tabel 2.75
Rasio PDRB Akomodasi Dan Makan Minum Terhadap PDRB
Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Tambah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (miliar rupiah)	75,26	84,02	97,53	107,22	116,28
Total PDRB (miliar rupiah)	3.656,59	3.851,69	4.389,76	4.825,30	5.058,00
Rasio (%)	2,06	2,18	2,22	2,22	2,30

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka, 2025

Pada tabel di atas, rasio PDRB akomodasi makan minum Kota Sawahlunto sangat rendah dan berfluktuasi selama kurun waktu tahun 2020-2024 dalam rentang nilai 2,06 % hingga 2,30 %. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2024 dan terendah pada tahun 2020.

3. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi (%)

PDRB ekonomi kreatif adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi yang terkait dengan aktivitas ekonomi kreatif pada suatu wilayah. PDRB ekonomi kreatif pada struktur perekonomian Kota Sawahlunto berada pada lapangan usaha Jasa Lainnya.

Proporsi PDRB ekonomi kreatif terhadap PDRB ekonomi kreatif provinsi adalah bagian PDRB ekonomi kreatif suatu wilayah yang dikontribusikan terhadap PDRB ekonomi kreatif provinsi. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh subsektor ekonomi kreatif, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB provinsi, ceteris paribus.

Berikut perkembangan proporsi PDRB ekonomi kreatif Kota Sawahlunto terhadap PDRB ekonomi kreatif Provinsi Sumatera Barat selama lima tahun terakhir:

Tabel 2.76
Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Kota Sawahlunto
Terhadap PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Tambah PDRB ADHB Lapangan Usaha Jasa Lainnya Kota Sawahlunto (miliar rupiah)	207,45	225,47	261,89	295,84	329,51
Nilai Tambah PDRB ADHB Lapangan Usaha Jasa Lainnya Provinsi Sumatera Barat (miliar rupiah)	4.548,12	4.939,66	5.849,83	6.593,88	7.184,02
Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Kota Sawahlunto Terhadap PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi (%)	4,56	4,56	4,48	4,49	4,59

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2025

Pada tabel di atas, proporsi PDRB ekonomi kreatif Kota Sawahlunto terhadap PDRB ekonomi kreatif Provinsi Sumatera Barat selama kurun waktu tahun 2020-2024 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat dalam rentang nilai 4,48 % hingga 4,59 %. Proporsi tertinggi terjadi pada tahun 2024.

Pada tahun 2024 terdapat 145 pelaku ekonomi kreatif di Kota Sawahlunto, 71 pelaku diantaranya merupakan pelaku ekonomi kreatif professional dan 22 orang diantaranya sudah memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pelaku ekonomi kreatif Kota Sawahlunto bergerak di sub sektor Seni Pertunjukan, Musik, Kuliner, Kriya, Fashion, Desain Komunikasi Visual, Desain Interior, Photography, Desain Produk, Film, Animasi dan Video, Periklanan dan Seni Rupa.

4. Rasio Kewirausahaan Daerah

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar

adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar.

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.

Rasio kewirausahaan Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir disajikan pada tabel dibawah ini

Tabel 2.77
Rasio Kewirausahaan Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Berusaha Dibantu Buruh Tetap (Orang)	558	893	868	1148	1589
Total Angkatan Kerja (Orang)	33.019	32.243	33.973	35.800	36.134
Rasio Kewirausahaan	1,69	2,77	2,55	3,21	4,40

Sumber Data : Kota Sawahlunto Tahun 2025, Data diolah

Pada tabel di atas, rasio kewirausahaan Kota sawahlunto selama tahun 2020-2024 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat pada kisaran 1,69 % hingga 4,40 %. Meningkatnya rasio kewirausahaan pada tahun 2024 dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah UMKM di Kota Sawahlunto dan kebijakan Dana Bergulir dengan Bunga Rendah.

5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk perempuan usia kerja yang aktif secara ekonomi. Rasio TPAK perempuan dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk perempuan angkatan kerja dengan jumlah penduduk perempuan usia kerja (15-64 tahun).

Berikut disajikan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.78
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Perempuan Angkatan Kerja (Jiwa)	14.071	13.292	14.620	15.174	16.449
Jumlah Penduduk Perempuan Usia Kerja (Jiwa)	23.648	23.930	24.205	25.572	25.967
TPAK Perempuan (%)	59,50	55,55	60,40	59,34	63,35

Sumber Data : Kota Sawahlunto Tahun 2025, Data Diolah

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari tahun 2020-2024, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Kota Sawahlunto mengalami kenaikan sebesar 3,85%. Dengan meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan tersebut menunjukkan bahwa semakin bertambah proporsi penduduk perempuan usia kerja

yang sedang bekerja. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya perempuan lulusan SMK dan Perguruan Tinggi yang masuk dunia kerja.

Berikut disajikan TPAK Perempuan Kota Sawahlunto berdasarkan kelompok umur selama lima tahun terakhir pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.79
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan
Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Perempuan Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur (Jiwa)					
15-19	537	283	-1	466	646
20-24	989	908	1.285	1.696	1.879
25-29	1.843	1.649	1.818	1.589	1.697
30-34	1.634	1.650	1.710	1.699	1.778
35-39	1.827	1.778	1.854	1.952	1.641
40-44	1.610	1.681	2.033	1.704	2.033
45-49	1.767	1.580	1.877	1.665	1.737
50-54	1.321	1.308	1.243	1.528	1.626
55-59	1.083	1.066	1.145	1.224	1.416
60-64	612	596	680	774	838 ¹
65+	848	793	783	877	1.158
Jumlah Penduduk Perempuan Usia Kerja Menurut Kelompok Umur (Jiwa)					
15-19	2.356	2.355	2.361	2.643	2.645
20-24	2.004	2.006	1.998	2.583	2.586
25-29	2.549	2.529	2.512	2.627	2.637
30-34	2.589	2.585	2.579	2.533	2.606
35-39	2.606	2.621	2.625	2.337	2.344
40-44	2.418	2.472	2.507	2.276	2.292
45-49	2.208	2.249	2.294	2.167	2.182
50-54	1.793	1.841	1.885	2.036	2.064
55-59	1.534	1.573	1.620	1.860	1.883
60-64	1.152	1.185	1.232	1.590	1.663
65+	2.439	2.513	2.592	2.920	3.065
TPAK Perempuan Menurut Kelompok Umur (%)					
15-19	22,79	12,02	0	17,63	24,42
20-24	49,35	45,26	64,31	65,66	72,66
25-29	72,30	65,20	72,37	60,49	64,35
30-34	63,11	63,83	66,30	67,07	68,23
35-39	70,11	67,84	70,63	83,53	70,01
40-44	66,58	68,00	81,09	74,87	88,70
45-49	80,03	70,25	81,82	76,83	79,61
50-54	73,68	71,05	65,94	75,05	78,78
55-59	70,60	67,77	70,68	65,81	75,20
60-64	53,13	50,30	55,19	48,68	42,22
65+	34,77	31,56	30,21	30,03	37,78

Sumber Data : Kota Sawahlunto Tahun 2025, Data Diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa TPAK Perempuan Kota Sawahlunto berdasarkan kelompok umur selama rentang tahun 2020-2024 berfluktuasi. TPAK Perempuan yang paling tinggi tahun 2024 ada pada kelompok umur 40-44 tahun, disusul oleh kelompok umur 45-49 tahun, dan umur 50-54 tahun. TPAK Perempuan yang paling rendah ada pada kelompok umur 15-19 tahun, dan umur 65 tahun ke atas. Ini menunjukkan bahwa pada usia ini (15-19 tahun) mereka lebih banyak masuk kategori bukan angkatan kerja (sekolah). Begitu juga pada kelompok umur tua (diatas 65 tahun), TPAK rendah dikarenakan mereka masuk pada masa purnabakti (pensiun).

Berikut disajikan TPAK Perempuan Kota Sawahlunto berdasarkan pendidikan selama lima tahun terakhir pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.80

TPAK Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan

Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Perempuan Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan (Jiwa)					
SD ke bawah	3.344	3.079	3.376	2.966	3.246
SLTP/Sederajat	1.994	1.967	2.061	1.949	2.049
SLTA/Sederajat	4.632	4.089	4.624	5.322	6.382
Perguruan Tinggi	4.101	4.157	4.559	4.937	4.772
Jumlah Penduduk Perempuan Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan (Jiwa)					
SD ke bawah	6.245	6.225	6.022	5.729	6.278
SLTP/Sederajat	4.591	4.991	4.946	4.966	4.437
SLTA/Sederajat	7.853	7.982	7.717	8.518	9.412
Perguruan Tinggi	4.959	4.731	5.520	6.359	5.840
TPAK Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan (%)					
SD ke bawah	53,55	49,46	56,06	51,77	51,70
SLTP/Sederajat	43,43	39,41	41,67	39,25	46,18
SLTA/Sederajat	58,98	51,23	59,92	62,48	67,81
Perguruan Tinggi	82,70	87,87	82,59	77,64	81,71

Sumber Data : Kota Sawahlunto Tahun 2025, Data Diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa TPAK Perempuan Kota Sawahlunto berdasarkan tingkat pendidikan selama rentang tahun 2020-2024 berfluktuasi. Pada tahun 2024, TPAK Perempuan yang paling tinggi merupakan tamatan perguruan tinggi dan SLTA/Sederajat. Sedangkan TPAK Perempuan paling rendah merupakan pendidikan SLTP/Sederajat dan SD ke bawah.

Semakin tinggi pendidikan terakhir yang ditamatkan penduduk perempuan itu maka semakin besar peluang perempuan tersebut untuk bekerja dibanding perempuan yang memiliki pendidikan lebih rendah.

6. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah pengukuran dari himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 388 ayat (9) dan ayat (11) menyatakan bahwa “pemerintah pusat memberikan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah” dan “pemerintah pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan inovasi”. Sebagai bentuk penjabaran dari perundangan tersebut maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah sebagai petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan praktik-praktik inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan sasaran mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

Inovasi Daerah harus memenuhi beberapa kriteria yang meliputi : 1). mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi; 2). memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat; 3). tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; 4). merupakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah; dan 5). dapat direplikasi.

Pelaksanaan inovasi daerah tentunya perlu diperkuat dengan upaya dan langkah-langkah strategis agar inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi masif untuk dapat diterapkan secara berkelanjutan. Disamping itu perlu menjadikan inovasi sebagai salah satu budaya dalam pemecahan masalah dalam pelaksanaan pemerintahan yang selaras dengan kebijakan daerah. Saat ini pelayanan kepada masyarakat dituntut untuk lebih cepat (*faster*), lebih mudah (*easier*), lebih murah (*cheaper*), lebih pintar (*smarter*) dan lebih baik (*better*). Adapun capaian Indeks Inovasi Daerah Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.81
Capaian Indeks Inovasi Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Skor Indeks Inovasi Daerah	1264	44,64	58,98	70,39	72,87
Predikat	Sangat Inovatif	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif

Sumber Data : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Pada tabel di atas terlihat bahwa capaian skor Indeks Inovasi Daerah Kota Sawahlunto tahun 2020 berbeda jauh dengan capaian tahun 2021-2024, yang disebabkan perbedaan metode penilaian. Pada periode tahun 2021-2024 Skor Indeks Inovasi Daerah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, terutama pada tahun 2023 dimana Kota Sawahlunto berhasil meningkatkan predikat menjadi kota sangat inovatif, dan berlanjut sampai tahun 2024.

7. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribuan Orang)

Jumlah tamu wisatawan mancanegara adalah jumlah tamu asing (wisatawan mancanegara) yang menginap di hotel berbintang dan non berbintang di daerah tertentu. Semakin tinggi jumlah tamu wisatawan mancanegara yang menginap di hotel berbintang dan non berbintang di daerah tersebut maka akan meningkatkan devisa dari sektor pariwisata secara nasional. Apalagi Kota Sawahlunto telah ditetapkan sebagai kota warisan dunia dengan warisan tambang batu bara Ombilin (WTBOS), hal ini diharapkan akan memberi dampak yang positif bagi peningkatan tamu wisatawan mancanegara di Kota Sawahlunto.

Tabel 2.82
Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribuan Orang)
Tahun 2020-2024

Pengunjung	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	0,007	0,007	0,076	0,0501	0,199

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2025

Pada tabel di atas, jumlah tamu wisatawan mancanegara yang menginap di hotel berbintang yang ada di Kota Sawahlunto selama kurun waktu lima tahun terakhir cenderung meningkat. Peningkatan jumlah tamu wisatawan mancanegara ke Kota

Sawahlunto terus diupayakan dengan meningkatkan aksesibilitas dan infrastruktur destinasi wisata, promosi budaya, pengembangan objek wisata, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kepariwisataan. Salah satunya rencana konkritnya adalah penyelenggaraan symposium internasional yang akan diselenggarakan di Kota Sawahlunto tahun 2025 dengan menghadirkan tamu dari berbagai negara. Hal ini menjadi peluang besar bagi Kota Sawahlunto dalam mempromosikan berbagai seni kebudayaan dan destinasi pariwisata yang sudah tercatat menjadi OCMHS dan Geopark Nasional Sawahlunto dengan mengajak tamu untuk berkunjung dan melaksanakan kegiatan pada lokasi tersebut.

8. Proporsi Jumlah Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Non Pertanian (%)

Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah non pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama.

Usaha kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari UMKM yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi UKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi usaha mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. UKM adalah ragam usaha yang dilakukan dengan skala kecil sampai dengan menengah. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 menjelaskan tentang usaha kecil, mikro, serta menengah sebagai berikut :

- Usaha kecil merupakan bisnis yang memiliki pendapatan dari 300 juta hingga 2,5 miliar setiap tahunnya.
- Usaha menengah merupakan usaha yang memiliki pendapatan 2,5 miliar hingga dengan 50 miliar setiap tahunnya, karyawan yang dimiliki oleh usaha menengah harus sekitar 30 hingga 100 pekerja.
- Usaha mikro merupakan bisnis yang mempunyai pendapatan 300 juta setiap tahunnya serta memiliki karyawan sekitar kurang dari 20 orang.

Berikut perkembangan proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian di Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir :

Tabel 2.83
Proporsi Jumlah UKM Non Pertanian Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah UKM Non Pertanian	563	6	30	28	29
2	Jumlah Unit Usaha	3.565	3.973	4.003	4.352	4.730
3	Proporsi (%)	15,79	0,15	0,75	0,64	0,61

Sumber Data : Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, 2024

Pada tabel di atas terlihat jumlah UKM non pertanian selama kurun waktu tahun 2020-2024 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun, terutama tahun 2021 dimana terjadi penurunan yang sangat signifikan, hal ini disebabkan dampak dari wabah Covid 19. Namun mulai tahun 2024 jumlah UKM non pertanian meningkat kembali.

9. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) Pada Level Kabupaten/Kota

Proporsi jumlah industri kecil dan menengah (IKM) merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap seluruh unit industri pada tahun yang sama.

IKM adalah sebuah perusahaan yang menghasilkan produk berupa kebutuhan yang diperlukan oleh makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. IKM memproduksi barang-barang yang dijual oleh UKM (Usaha Kecil Menengah). Oleh karena itu, IKM sangat berkaitan dengan UKM dan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena setiap produk yang dihasilkan oleh IKM akan dijual kembali kepada masyarakat oleh UKM. Jadi UKM juga bertugas untuk memasarkan produk yang dihasilkan oleh IKM, dan tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku IKM juga melakukan aktivitas UKM sekaligus. Setiap pelaku IKM juga bisa langsung memasarkan produknya sendiri dengan bantuan UKM atau tanpa bantuan UKM lainnya.

Adapun perkembangan proporsi jumlah industri kecil dan menengah di Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :

Tabel 2.84
Proporsi Jumlah Industri Kecil Dan Menengah Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Unit Industri Kecil Menengah	1.584	1.703	1.779	1.755	1.842
2	Jumlah Unit Industri	1.584	1.703	1.779	1.755	1.842
3	Proporsi	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Koperasi UKM Perindustrian Dan Perdagangan, 2024

Berdasarkan tabel di atas, jumlah industri kecil dan menengah Kota Sawahlunto tahun 2020-2024 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Semua IKM yang ada di Kota Sawahlunto termasuk dalam kategori industri kecil dan menengah, belum ada industri dengan kategori besar. Dengan demikian jumlah industri kecil dan menengah Kota Sawahlunto sama dengan jumlah total industri Kota Sawahlunto, sehingga proporsi jumlah industri kecil dan menengah Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir adalah sebesar 100 %.

10. Rasio Volume Koperasi Terhadap PDRB

Rasio volume koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB suatu wilayah. Semakin besar rasio volume koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut.

Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. Koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara

yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi biasa disebut sisa hasil usaha atau SHU, biasanya dihitung berdasarkan andil.

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.

Berikut perkembangan rasio voume usaha koperasi terhadap PDRB Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir :

Tabel 2.85
Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB Kota Sawahlunto (%)
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Volume Usaha Koperasi (Rp)	57.792.083	38.657.300	32.069.047	41.426.853	34.943.237
Total PDRB (miliar rupiah)	3.656,59	3.851,69	4.389,76	4.825,30	5.058,00
Rasio (%)	0,0016	0,0010	0,0007	0,0009	0,0007

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025, Data Diolah 2025

Rasio volume koperasi terhadap PDRB Kota Sawahlunto sangat kecil sekali yang berkisar antara 0,0007 % hingga 0,0016 % dan mengalami pergerakan yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Penurunan rasio volume koperasi terhadap PDRB disebabkan semakin berkurangnya jumlah koperasi di Kota Sawahlunto yang berakibat menurunnya volume usaha koperasi di Kota Sawahlunto.

11. ROA BUMD

Return On Asset (ROA) adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. ROA dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA memberikan gambaran tentang seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Semakin tinggi ROA, semakin efisien perusahaan dalam mengelola asetnya. Namun, perlu dicatat bahwa ROA yang tinggi tidak selalu berarti sukses, karena ada faktor lain seperti tingkat utang dan risiko yang juga harus dipertimbangkan.

Pemerintah Kota Sawahlunto memiliki 4 (empat) BUMD, yaitu : PT Lembu Betina Subur (LBS), PT. Wahana Wisata Sawahlunto (WWS), PT. Bumi Sejahtera Mandiri (BSM) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Tabel 2.86
Return On Asset (ROA) dari BUMD Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	BUMD	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	PT Lembu Betina Subur (LBS)	na	na	na	na	na
2	PT. Wahana Wisata Sawahlunto (WWS)	na	na	na	na	na
3	PT. Bumi Sejahtera Mandiri (BSM)	na	na	na	na	na
4	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	1,09	(6,83)	(4,92)	(4,33)	(3,80)

Sumber Data : Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto

Dari empat BUMD yang ada di Kota Sawahlunto, hanya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang dapat dihitung *Return On Asset* (ROA)nya. PT Lembu Betina Subur (LBS) berdasarkan laporan keuangannya disarankan untuk dilikuidasi. PT. Wahana Wisata Sawahlunto (WWS) tidak bisa dihitung ROAny karena laporan keuangannya tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. PT. Bumi Sejahtera Mandiri (BSM) belum bisa dihitung ROAny karena belum beroperasi dan dana penyertaan modal dari Pemda Kota Sawahlunto hanya cukup untuk pengurusan izin tambang dan *feasibility study*(FS)nya saja. Negatifnya nilai ROA Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) bermakna perusahaan mengalami kerugian dan tidak mampu menghasilkan laba dari asset yang dimiliki, namun perusahaan ini harus tetap beroperasi karena PDAM memiliki fungsi sosial dan pelayanan publik sehingga Pemerintah Daerah memberikan dukungan dalam bentuk subsidi untuk menutupi kerugian operasional dan memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat.

12. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)

Tenaga kerja formal adalah tenaga kerja yang dengan status pekerjaan utama termasuk dalam pekerja dengan kategori berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, dan buruh/karyawan/pegawai.

Proporsi penciptaan lapangan kerja formal (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa dominan pekerja dengan status pekerjaan utama yang termasuk dalam pekerja formal sesuai dengan ketentuan nasional yang berlaku. Semakin tinggi nilai proporsi penciptaan lapangan kerja formal, maka semakin dominan kekuatan ekonomi nasional dalam menciptakan lapangan kerja formal.

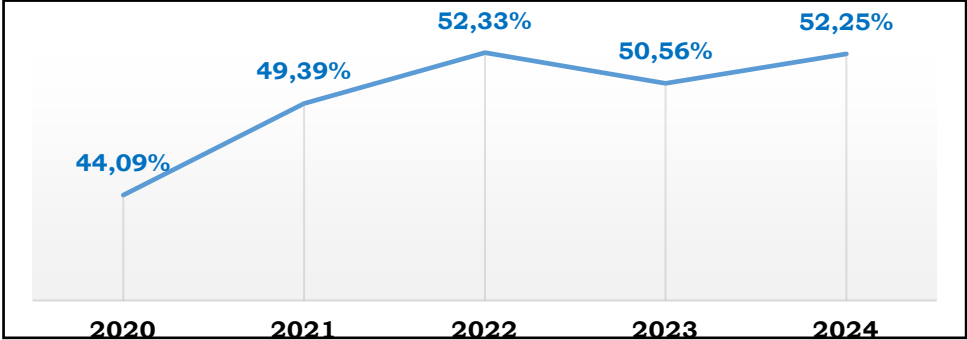
Berikut disajikan tabel dan grafik proporsi penciptaan lapangan kerja formal Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.87
Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Berusaha sendiri	7.842	8.385	8.408	9.109	9.367
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap	3.659	2.699	2.974	3.025	3.268
3	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	558	893	868	1.148	1.589
4	Buruh/karyawan/pegawai	12.806	14.017	16.021	16.051	17.291
5	Pekerja bebas di pertanian	663	319	152	1.396	546
6	Pekerja bebas di non pertanian	1.810	1.532	1.130		862
7	Pekerja keluarga/tak dibayar	2.972	2.341	2.722	3.289	3211
8	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) = (3+4)/(1 s.d 7)	44,09	49,39	52,33	50,56	52,25

Sumber Data : Kota Sawahlunto Tahun 2025, Data Diolah

Grafik 2.25
Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024



Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2025, Data diolah

Dari tabel dan grafik di atas terlihat bahwa proporsi penciptaan lapangan kerja formal Kota Sawahlunto selama rentang tahun 2020-2024 berfluktuasi dan cenderung meningkat dalam kisaran 44 % hingga 52,33 %. Capaian proporsi penciptaan lapangan kerja formal Kota Sawahlunto pada tahun 2024 sudah berada di atas rata-rata persentase tenaga kerja formal perkotaan sebagaimana hasil sakernas.

Tabel 2.88
Persentase Tenaga Kerja Formal Menurut Daerah Tempat Tinggal
Tahun 2021-2024

No	Daerah Tempat Tinggal	2021	2022	2023	2024
1	Perkotaan	51,12	52,38	51,34	51,76
2	Perdesaan	27,59	26,21	27,37	28,72
3	Perkotaan + Perdesaan	40,55	40,69	40,89	42,05

Sumber Data : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Pada tabel di atas terlihat bahwa proporsi penciptaan lapangan kerja formal di perkotaan lebih besar dari pada di perdesaan. Karena penduduk usia kerja di perkotaan biasanya tingkat pendidikannya lebih tinggi dan lebih menyukai bekerja di lapangan kerja formal karena sektor formal melindungi hak-hak pekerja dan memastikan gaji yang adil, menyediakan lebih banyak peluang untuk kemajuan karier dan pengembangan professional, disertai dengan manfaat seperti asuransi kesehatan, rencana pensiun, dan waktu liburan berbayar. Di samping itu rata-rata upah/gaji bersih sebulan pekerja formal lebih tinggi dari pekerja informal.

Berikut perbandingan rata-rata upah/gaji bersih sebulan pekerja formal dan informal berdasarkan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 2.89
Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal Dan Informal
Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2024

Kabupaten / Kota	Pekerja Formal	Pekerja Informal
Kabupaten		
Kepulauan Mentawai	2.429.633	1.003.415
Pesisir Selatan	2.381.367	1.682.574
Solok	2.314.010	1.514.266
Sijunjung	2.558.029	1.693.227
Tanah Datar	2.539.714	1.501.423
Padang Pariaman	2.411.883	1.587.876
Agam	2.627.037	1.737.969
Lima Puluh Kota	2.343.721	1.673.446

Kabupaten / Kota	Pekerja Formal	Pekerja Informal
Pasaman	2.430.026	1.434.525
Solok Selatan	3.052.717	1.478.229
Dharmasraya	2.651.515	1.984.367
Pasaman Barat	2.609.232	1.943.819
Kota		
Padang	3.226.305	2.356.319
Solok	3.314.700	2.208.694
Sawahlunto	2.741.492	1.394.212
Padang Panjang	3.334.028	3.052.374
Bukittinggi	3.260.014	2.364.287
Payakumbuh	2.934.764	2.083.604
Pariaman	3.087.313	1.863.960
Sumatera Barat	2.772.393	1.771.990

Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Pada tabel di atas terlihat bahwa rata-rata upah/gaji bersih sebulan pekerja formal jauh lebih tinggi dari pekerja informal. Hal ini terjadi di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Barat.

Upah/gaji bersih sebulan pekerja formal di Kota Sawahlunto pada tahun 2024 jauh di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat sebagaimana yang ditetapkan pada Keputusan Gubernur Sumbar Nomor : 562-768-2023 Tanggal 20 November 2023 sebesar Rp. 2.811.449,27. dan berada pada posisi ke-8 dari 19 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat.

Sementara itu rata-rata upah/gaji bersih sebulan pekerja informal Kota Sawahlunto berada pada posisi terendah ke-2 di tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Barat setelah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

C. Penerapan Ekonomi Hijau

1. Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan

Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan adalah proporsi nilai tambah PDRB yang bersumber dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap total nilai PDRB. Semakin besar nilai tambah PDRB yang dihasilkan oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan suatu wilayah, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB wilayah tersebut, ceteris paribus.

Perkembangan Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.90
Rasio Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB
Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (miliar rupiah)	326,25	345,21	383,10	410,68	442,91
Total PDRB (miliar rupiah)	3.656,59	3.851,69	4.389,76	4.825,30	5.058,00
Rasio (%)	8,92	8,96	8,73	8,51	8,76

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka, 2025

Pada tabel di atas terlihat rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB selama tahun 2020-2024 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Menurunnya rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, mengindikasikan semakin menurun kinerja dan produktivitas sektor pertanian kehutanan dan perikanan di Kota Sawahlunto. Hal ini tidak menjadi permasalahan bagi Kota Sawahlunto karena sektor yang dominan dalam kegiatan perkotaan adalah sektor tersier atau sektor jasa yang mencakup berbagai kegiatan seperti perdagangan, keuangan, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Sektor pertanian bagi perkotaan berfungsi sebagai penyedia pangan, bahan baku industri, dan lapangan kerja. Selain itu, pertanian juga berkontribusi pada ketahanan pangan dan stabilitas harga.

2. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan

Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan kontribusi tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap penciptaan nilai tambah melalui proses produksi barang dan/jasa, menggambarkan *output* yang dihasilkan oleh setiap tenaga kerja pada tahun tertentu. Semakin tinggi nilai kontribusi tenaga kerja yang dihasilkan, menunjukkan semakin produktif tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan salah satu sektor yang strategis untuk meningkatkan perekonomian daerah, karena lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dapat menyerap tenaga kerja yang cukup besar.

Berikut disajikan produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir :

Tabel 2.91
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2022	2024
1	PDRB ADHK Pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (miliar rupiah)	219,53	235,05	246,63	252,71	256,56
2	Tenaga Kerja Pada Lapangan Usaha Pertanian (orang)	5.646	5.547	4.646	5.300	4.920
3	Produktivitas Tenaga Kerja Pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan (miliar rupiah per tenaga kerja/tahun)	38,88	42,37	53,08	47,68	52,15

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025

Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Kota Sawahlunto selama tahun 2020-2024 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat pada kisaran 38,88 juta rupiah per tenaga kerja per tahun hingga 53,08 juta rupiah per tenaga kerja per tahun. Produktivitas tertinggi terjadi pada tahun 2022 dan terendah terjadi tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja Kota Sawahlunto yang bekerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan semakin kurang produktif. Rendahnya produktivitas di lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dibandingkan lapangan usaha lainnya disebabkan faktor pendidikan tenaga kerja dan tingginya jumlah tenaga kerja di sektor tersebut.

D. Transformasi Digital

Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. Survei IMDI di Kota Ssawahlunto mulai dilaksanakan sejak tahun 2022.

Tabel 2.92
Indeks Masyakat Digital Indonesia Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Pilar	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Infrastruktur dan Ekosistem	na	na	42	61,51	58,74
2	Keterampilan Digital	na	na	50,24	63,50	58,55
3	Pemberdayaan	na	na	26,13	26,50	20,80
4	Pekerjaan	na	na	38,44	38,18	35,98
	IMDI Kota Sawahlunto	na	na	38,99	47,25	43,04
	IMDI Provinsi Sumatera Barat	na	na	42,26	46,06	44,13
	IMDI Nasional	na	na	37,80	43,18	43,34

Sumber Data : Puslitbang Aptika IKP - BPSDM Kominfo, 2024

Hasil survei tahun 2024 menyatakan bahwa IMDI Kota Sawahlunto lebih rendah dari IMDI Provinsi Sumatera Barat dan IMDI Nasional. Pilar pemberdayaan merupakan pilar dengan nilai terendah, hal ini disebabkan karena masih banyak masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital untuk aktivitas keuangan, dimana hanya sebanyak 40% masyarakat yang pernah bertransaksi menggunakan internet/mobile banking, diikuti oleh sekitar 38% masyarakat yang pernah bertransaksi melalui *e-wallet*.

E. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

1. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) menunjukkan seberapa besar peranan atau kontribusi komponen PMTB terhadap PDRB Kota Sawahlunto. Pembentukan Modal Tetap Bruto merupakan komponen pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut jenis pengeluaran bersama-sama dengan komponen

pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, Ekspor barang dan jasa dan pengeluaran perubahan inventori

Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak termasuk dalam PMTB, tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah.

Capaian proporsi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.93
Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)
Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
PMTB ADHK (Miliar Rupiah)	652,49	666,26	695,56	745,75	767,19
PDRB ADHK (Miliar Rupiah)	2.760,92	2.829,35	2.941,27	3.072,35	3.195,86
Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	23,63%	23,55%	23,65%	24,27%	24,01%

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025, Data Diolah 2025

Besaran PMTB (% PDRB) di Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat dan merupakan kontributor kedua terbesar terhadap PDRB Kota Sawahlunto setelah pengeluaran konsumsi rumah tangga dari sisi pengeluaran (*demand side*). Semakin tinggi kontribusi Pembentukan Modal tetap Bruto (% PDRB), semakin besar peranan atau kontribusi komponen PMTB terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto.

2. Ekspor Barang Dan Jasa (% PDRB)

Ekspor barang dan jasa (% PDRB) merupakan share/kontribusi Ekspor barang dan jasa terhadap PDRB Kota Sawahlunto.

Ekspor barang dan jasa merupakan komponen pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut jenis pengeluaran bersama-sama dengan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dan pengeluaran perubahan inventori.

Ekspor barang dan jasa merupakan transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen (penduduk) suatu perekonomian dengan non residen. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun.

Berikut capaian proporsi ekspor barang dan jasa (% PDRB) Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir :

Tabel 2.94

Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Kota Sawahlunto

Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Ekspor Barang dan Jasa (Miliar Rupiah)	315,78	332,62	375,76	413,23	456,88
PDRB ADHK (Miliar Rupiah)	2.760,92	2.829,35	2.941,27	3.072,35	3.195,86
Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	11,44	11,76	12,78	13,45	14,30

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025, Data Diolah 2025

Besaran Ekspor barang dan jasa (% PDRB) selama lima tahun terakhir cenderung meningkat dan merupakan kontributor keempat terhadap PDRB Kota Sawahlunto dari sisi pengeluaran (*demand side*) setelah pengeluaran konsumsi rumah tangga, PMTB dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah.

3.

Persentase Stabilitas Harga Dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok

Persentase stabilitas harga dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu) adalah perbandingan standar deviasi harga rata-rata selama bulan Januari sampai Desember dengan rata-rata harga barang kebutuhan pokok selama bulan Januari sampai Desember yang dinyatakan dalam persentase (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020).

Perhitungan persentase stabilitas harga dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok bertujuan untuk melihat kestabilan harga barang kebutuhan pokok. Semakin kecil persentase stabilitas harga dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu) menunjukkan bahwa harga barang kebutuhan pokok selama satu tahun tersebut berada dalam keadaan stabil. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020, target persentase stabilitas harga dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu) tahun 2020-2024 berada pada kisaran 5,9 % – 6 %.

Barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat (Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021). Sedangkan jenis barang kebutuhan pokok ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 sebagai berikut : 1). Barang kebutuhan pokok hasil pertanian, yang terdiri dari : beras, kedele (bahan baku tahu dan tempe), cabe, bawang merah; 2). Barang kebutuhan pokok hasil industri, yang terdiri dari : gula, minyak goreng, tepung terigu; 3). Barang kebutuhan pokok hasil peternakan dan perikanan, yang terdiri dari : daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar (bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang).

Berikut perkembangan persentase stabilitas harga dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu) Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir :

Tabel 2.95
Persentase Stabilitas Harga Dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

Indikator	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase stabilitas harga dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu)(%)	9,09	8,05	7,79	10,42	7,13

Sumber Data : Diskoperindag 2024

Persentase stabilitas harga dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu) di Kota Sawahlunto tahun 2020-2024 berada dalam kondisi tidak stabil karena berada di atas target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebesar $\leq 6\%$ sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020.

Barang kebutuhan pokok di Kota Sawahlunto pada tahun 2024 yang memiliki ketidakstabilitas harga adalah beras, cabe merah, cabe rawit, bawang merah, daging ayam ras (broiler), telur ayam ras, tepung terigu dan gula pasir.

F. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

1. Indeks Kinerja Infrastruktur

Indeks Kinerja Infrastruktur adalah suatu ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai kondisi dan kualitas infrastruktur di suatu wilayah atau sektor tertentu. Indeks ini biasanya mengukur berbagai aspek infrastruktur, seperti akses ke fasilitas dasar (air bersih, sanitasi, listrik), kualitas jalan dan jembatan, ketersediaan layanan publik, dan lain-lain.

Tabel 2.96
Indeks Kinerja Infrastruktur Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

Indikator	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kinerja Infrastruktur Kota Sawahlunto	NA	NA	NA	NA	69,18

Sumber Data : Dinas PUPR, Dinas PKP2LH, 2025

Indeks Kinerja Infrastruktur Kota Sawahlunto mulai dihitung pada tahun 2024 dengan capaian tergolong “Cukup”.

2. Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan (%)

Persentase rumah tangga (RT) yang memiliki akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan diperlukan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat di Indonesia dari sektor perumahan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga dari sektor perumahan.

Berikut perkembangan rumah tangga (RT) yang memiliki akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan di Kota Sawahlunto pada tahun 2020-2024 :

Tabel 2.97
Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan di Kota Sawahlunto Tahun 2020- 2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah yang layak huni dan terjangkau (unit)	13.884	12.793	12,742	13.322	13.569
2	Jumlah rumah (unit)	14.257	14.314	14.371	14.630	14.847
3	Persentase Rumah Tangga (RT) yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau (Rasio Rumah Layak Huni)	97,38	89,37	88,66	91,06	91,39

Sumber Data : DPKP2LH Kota Sawahlunto, 2024

Persentase rumah tangga (RT) yang memiliki akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan di Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Namun pada tahun 2024, jumlah rumah layak huni dan terjangkau bertambah sebanyak 247 unit karena adanya upaya dari Pemerintah Kota Sawahlunto berupa kegiatan RTLH sebanyak 30 unit dan pembangunan unit rumah baru oleh masyarakat sebanyak 217 unit.

Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah yang memenuhi syarat : a). Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; dan b). Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (persetujuan bangunan gedung) dan SLF (sertifikat laik fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut :

Tabel 2.98
Empat Kriteria Pengukuran Indikator

NO	Kriteria
1.	Ketahanan bangunan (<i>durable housing</i>) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat
2.	Kecukupan luas tempat tinggal (<i>sufficient living space</i>) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2 \text{ m}^2$
3.	Memiliki akses air minum layak
4.	Memiliki akses sanitasi layak

Sumber Data : Data Baseline Kotaku 2020

3. Persentase Desa Mandiri (%)

Desa Mandiri (Desa Sembada) adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan (Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun).

Status kemajuan dan kemandirian Desa ditetapkan berdasar Indeks Desa Membangun ini diklasifikasi dalam 5 status Desa yakni:

- Desa Mandiri (Desa Sembada) adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan;
- Desa Maju (Desa Pra Sembada) adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan;
- Desa Berkembang (Desa Madya) adalah desa potensial menjadi desa maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan;
- Desa Tertinggal (Desa Pra-Madya) adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya;
- Desa Sangat Tertinggal (Desa Pratama) adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Berikut status kemajuan dan kemandirian desa di Kota Sawahlunto berdasarkan Indeks desa membangun (IDM) selama lima tahun terakhir :

Tabel 2.99
Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa	Jumlah Desa				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0
2	Tertinggal	0	0	0	0	0
3	Berkembang	17	14	10	6	1
4	Maju	9	12	14	17	19
5	Mandiri	1	1	3	4	7

Sumber Data : Dinas Sosial, PMDPPA Kota Sawahlunto, 2024

Desa Mandiri pertama di Kota Sawahlunto adalah Desa Talawi Mudik pada tahun 2019, diikuti oleh Desa Muaro Kalaban dan Desa Santua pada tahun 2022, selanjutnya Desa Silungkang Tigo pada tahun 2023. Dan pada tahun 2024 bertambah lagi 3 desa mandiri, yaitu Desa Kolok Nan Tuo, Desa Talawi Hilie, dan Desa Sikalang.

Adapun persentase Desa mandiri di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.100
Persentase Desa Mandiri Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2023
Jumlah Desa Mandiri	1	1	3	4	7
Jumlah Total Desa	27	27	27	27	27
Persentase Desa Mandiri Kota Sawahlunto (%)	3,70	3,70	11,11	14,81	25,92

Sumber : Dinas Sosial, PMDPPA Kota Sawahlunto, 2024

Pada tabel di atas terlihat persentase desa mandiri di Kota Sawahlunto masih sangat sedikit, walaupun mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir.

4. Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan alat ukur untuk menilai status kemajuan desa berdasarkan tiga dimensi utama : sosial, ekonomi, dan ekologi. Dimensi ini diterjemahkan dalam indikator yang mencakup akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga keberlanjutan lingkungan.

Pengukuran pembangunan desa di Indonesia mengalami perubahan signifikan dari Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi Indeks Desa (ID) mulai tahun 2025 berdasarkan Permendesa PDT Nomor 9 Tahun 2024.

Berikut Capaian rata-rata IDM Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional selama lima tahun terakhir :

Tabel 2.101
Indeks Desa Membangun
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-Rata IDM Kota Sawahlunto	0,7004	0,7157	0,7433	0,7542	0,7876
Rata-rata IDM Sumatera Barat	0,6996	0,718	0,7402	0,7514	0,7733
Rata-rata IDM Nasional	0,621	0,672	0,6724	0,6935	0,7034

Sumber Data : Kemendesa PDPT

Dari tabel di atas, terlihat rata-rata capaian IDM di Kota Sawahlunto dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dan mulai tahun 2021 Indeks Desa Membangun Kota Sawahlunto sudah tergolong klasifikasi “Desa Maju”. Hal ini mengindikasi bahwa Kota Sawahlunto semakin berbenah dalam pembangunan segala aspek sehingga menyokong pemenuhan nilai dari masing-masing indikator penyusun IDM.

Berikut Status Desa di Kota Sawahlunto berdasar Indeks Desa Membangun (IDM) selama lima tahun terakhir :

Tabel 2.102
Status Desa di Kota Sawahlunto Berdasar Indeks Desa Membangun (IDM)
Tahun 2020-2024

No	Klasifikasi Status Desa	2020		2021		2022		2023		2024	
		Jumlah Desa	%	Jumlah Desa	%	Jumlah Desa	%	Jumlah Desa	%	Jumlah Desa	%
1	Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2	Tertinggal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3	Berkembang	17	62,96	14	51,85	10	37,03	6	22,22	1	3,7
4	Maju	9	33,33	12	44,44	14	51,85	17	62,96	19	70,3
5	Mandiri	1	3,7	1	3,7	3	11,11	4	14,81	7	25,92

Sumber Data : Dinsos PMDPPA Kota Sawahlunto

Tabel 2.103
Skor Dan Status Indeks Desa Membangun
Kecamatan Dan Desa di Kota Sawahlunto
Tahun 2024

Kecamatan/Desa	IDM	Status
Kecamatan Silungkang	0,7996	Maju
Desa Silungkang Duo	0,7463	Maju
Desa Silungkang Oso	0,7446	Maju
Desa Siungkang Tigo	0,9562	Mandiri
Desa Muaro Kalaban	0,8433	Mandiri
Desa Taratak Boncah	0,7076	Maju
Kecamatan Barangin	0,7961	Maju
Desa Santur	0,8437	Mandiri
Desa Kolok Mudiak	0,756	Maju
Desa Kolok Nan Tuo	0,8352	Mandiri
Desa Talago Gunung	0,769	Maju
Desa Lumindai	0,7759	Maju
Desa Balai Batu Sandaran	0,7967	Maju
Kecamatan Talawi	0,7851	Maju
Desa Talawi Hilie	0,9013	Mandiri
Desa Talawi Mudiak	0,8708	Mandiri
Desa Bukit Gadang	0,763	Maju
Desa Batu Tanjung	0,7132	Maju
Desa Kumbayau	0,7889	Maju
Desa Tumpuk Tengah	0,7316	Maju
Desa Datar Mansiang	0,7087	Maju
Desa Sijantang Koto	0,8025	Maju
Desa Salak	0,8138	Maju
Desa Sikalang	0,8744	Mandiri
Desa Rantih	0,6683	Berkembang
Kecamatan Lembah Segar	0,7706	Maju
Desa Lunto Timur	0,7949	Maju
Desa Lunto Barat	0,8029	Maju
Desa Kubang Tengah	0,7189	Maju
Desa Kubang Utara Sikabu	0,809	Maju
Desa Pasa Kubang	0,7273	Maju

Sumber Data : DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto, 2024

Pada tabel di atas terlihat bahwa semua kecamatan di Kota Sawahlunto sudah berstatus maju pada tahun 2024 berdasarkan Skor Indeks Desa Membangun. Dan dari 27 desa yang ada di Kota Sawahlunto, masih terdapat 1 desa yang berada pada status berkembang, sedangkan desa dengan status maju 19 dan desa dengan status mandiri ada 7 desa.

5. Proporsi Kontribusi PDRB Kota

Proporsi kontribusi PDRB kota merupakan rasio Produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) Kota Sawahlunto terhadap PDRB ADHB Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 2.104

Perkembangan Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten Dan Kota

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	1,92	1,91	1,91	1,89	1,88
Pesisir Selatan	5,82	5,90	5,82	5,76	5,77
Solok	5,59	5,60	5,53	5,54	5,54
Sijunjung	3,78	3,78	3,74	3,73	3,76
Tanah Datar	5,38	5,37	5,28	5,26	5,27
Padang Pariaman	7,41	7,29	7,78	8,02	8,07
Agam	8,42	8,47	8,38	8,36	8,42
Lima Puluh Kota	6,42	6,39	6,27	6,27	6,28
Pasaman	3,71	3,73	3,64	3,63	3,66
Solok Selatan	2,29	2,28	2,25	2,25	2,28
Dharmasraya	4,23	4,25	4,29	4,27	4,31
Pasaman Barat	6,30	6,30	6,26	6,25	6,36
Kota					
Padang	25,70	25,75	25,57	25,48	25,34
Solok	1,67	1,68	1,68	1,68	1,67
Sawahlunto	1,51	1,52	1,54	1,54	1,52
Padang Panjang	1,44	1,44	1,43	1,43	1,43
Bukittinggi	3,57	3,57	3,57	3,56	3,54
Payakumbuh	2,82	2,89	2,89	2,87	2,84
Pariaman	2,06	2,08	2,06	2,06	2,05
Provinsi Sumatera Barat	100	100	100	100	100

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025

Pada tabel di atas terlihat Proporsi Kontribusi PDRB Kota Sawahlunto terhadap Provinsi Sumatera Barat selama lima tahun terakhir berkisar antara 1,51%-1,54% dan merupakan kabupaten/kota yang memiliki proporsi kontribusi PDRB kota terendah kedua. Sedangkan kabupaten/kota yang memberikan proporsi kontribusi PDRB terhadap Provinsi Sumatera Barat terbesar adalah Kota Padang dengan kisaran 25,34%- 25,75% dan yang terendah adalah Kota Padang Panjang dengan kisaran 1,43%-1,44%. Semakin tinggi proporsi kontribusi PDRB Kota, semakin besar peranan atau kontribusi Kota Sawahlunto terhadap ekonomi Provinsi Sumatera Barat.

G. Stabilitas Ekonomi Makro

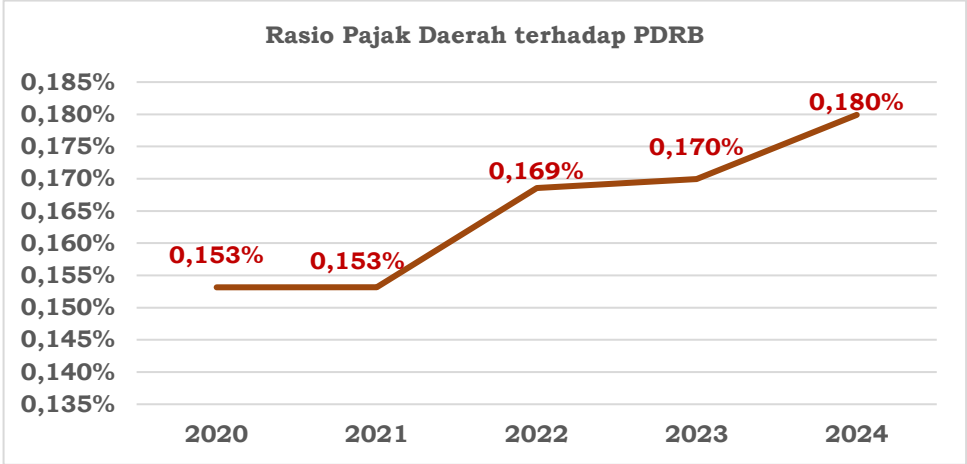
1. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Rasio pajak daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah dan semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah.

Grafik 2.26

Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kota Sawahlunto

Tahun 2020-2024



Sumber Data : BPKAD Kota Sawahlunto Tahun 2024

Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025, Data Diolah 2025

Berdasarkan grafik di atas, rasio pajak daerah terhadap PDRB Kota Sawahlunto selama tahun 2020-2024 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Meskipun meningkat, Pajak daerah Kota Sawahlunto hanya mampu berkontribusi kurang dari 1% untuk membiayai pembangunan Kota Sawahlunto.

2.

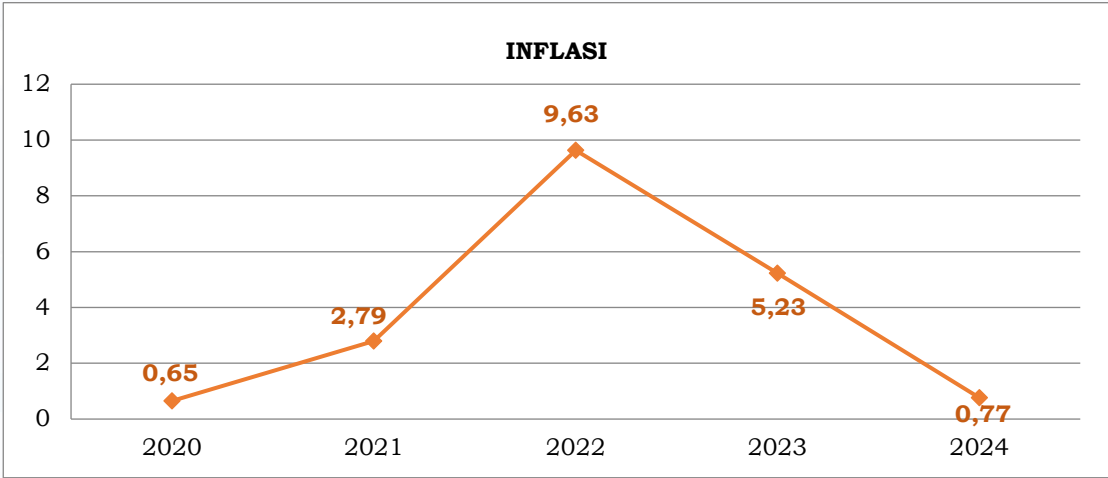
Tingkat Inflasi

Laju inflasi Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir berfluktuasi dengan kecenderungan menurun.

Grafik 2.27

Laju Inflasi Kota Sawahlunto

Tahun 2020-2024



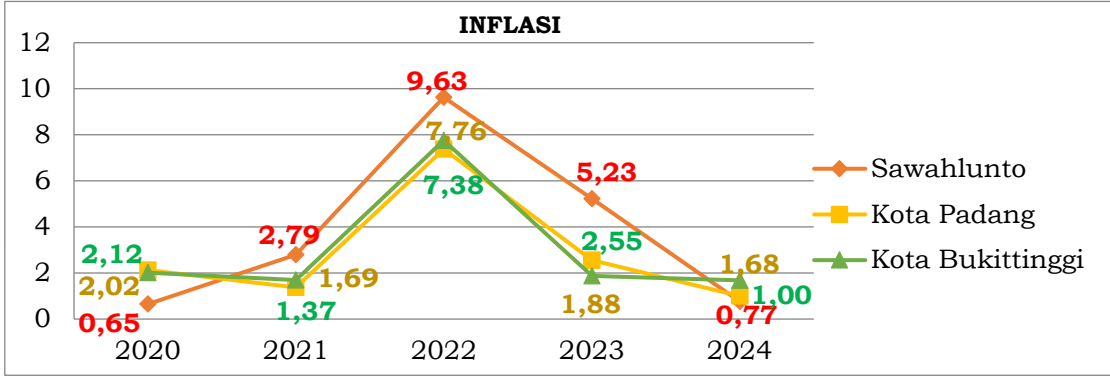
Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025, Data Diolah 2025

Pada grafik di atas terlihat laju inflasi Kota Sawahlunto tahun 2022 dan 2023 melampaui target laju inflasi yang telah ditetapkan Pemerintah sebesar 4 % melalui PMK No.101/PMK.010/2021 tanggal 28 Juli 2021. Namun pada tahun 2024, angka inflasi Kota Sawahlunto sudah berhasil berada di bawah target Nasional yang ditetapkan sebesar 3,5%.

Tingginya laju inflasi di Kota Sawahlunto tentu saja berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Sawahlunto, terutama masyarakat yang berpenghasilan tetap. Tingginya inflasi atau naiknya harga-harga barang secara umum akan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, sehingga jumlah barang yang

dapat dibeli oleh masyarakat menjadi lebih sedikit karena pendapatan mereka tidak naik. Akibatnya kesejahteraan masyarakat menurun. Dampak selanjutnya, masyarakat akan menurunkan minat menabungnya. Dengan turunnya tingkat tabungan masyarakat pada bank, tentunya berdampak pada berkurang jumlah uang yang dapat dipinjamkan oleh bank kepada investor. Akibatnya investasi akan berkurang dan berdampak pada berkurangnya jumlah produksi yang pada akhirnya akan menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi.

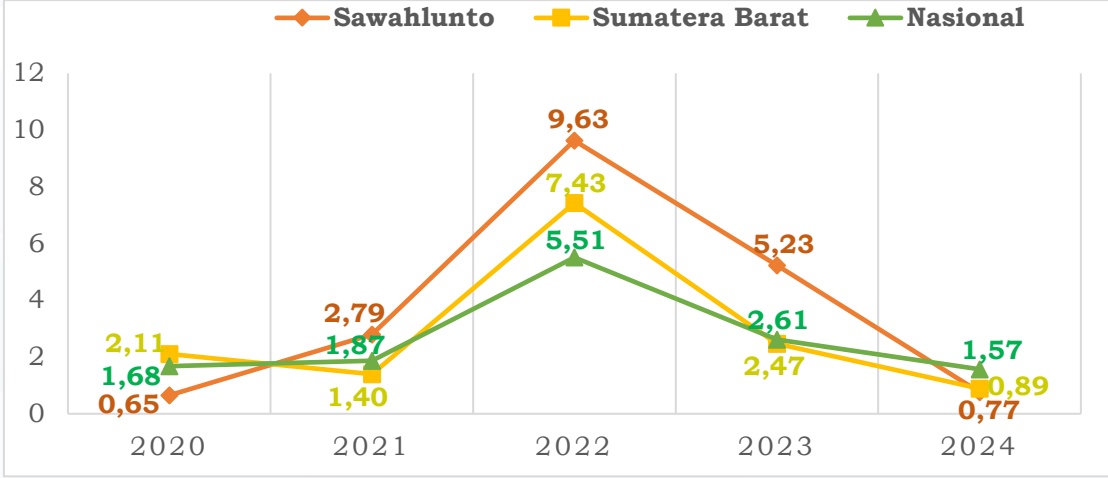
Grafik 2.28
Laju Inflasi Kota Sawahlunto, Kota Padang Dan Kota Bukittinggi
Tahun 2020-2024



Sumber Data : Badan Pusat Statistik 2025, Data Diolah 2025

Berdasarkan grafik di atas terlihat pada saat terjadi deflasi, laju inflasi Kota Sawahlunto lebih rendah dari Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Namun jika terjadi inflasi, laju inflasi Kota Sawahlunto lebih tinggi dari Kota Padang dan Kota Bukittinggi.

Grafik 2.29
Laju Inflasi Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional
Tahun 2020-2024



Sumber Data : Badan Pusat Statistik 2025, Data Diolah 2025

Pada grafik di atas terlihat bahwa pada saat terjadi deflasi, laju inflasi Kota Sawahlunto lebih rendah dari Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Namun jika terjadi inflasi, laju inflasi Kota Sawahlunto lebih tinggi dari Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Tabel di bawah ini memperlihatkan lapangan usaha dan jenis pengeluaran yang berkontribusi besar terhadap laju inflasi Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir:

Tabel 2.105
Laju Inflasi Kota Sawahlunto
Menurut Lapangan Usaha dan Pengeluaran
Tahun 2020 – 2024

Lapangan Usaha						
No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-0,44	-1,17	5,76	4,62	6,23
2	Pertambangan dan Penggalian	-18,65	15,52	64,07	10,85	-22,93
3	Industri Pengolahan	3,91	4,16	6,99	5,27	5,01
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,12	0,63	1,49	1,83	0,03
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,20	1,12	5,59	3,41	3,99
6	Konstruksi	2,42	1,66	9,60	4,65	0,98
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,35	-0,99	10,38	5,65	2,56
8	Transportasi dan Pergudangan	3,28	1,83	8,57	4,43	-1,43
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,59	2,07	3,99	3,80	1,88
10	Informasi dan Komunikasi	-0,63	1,91	6,38	8,15	2,07
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,59	2,52	5,33	2,05	0,49
12	Real Estat	0,81	0,75	4,32	5,67	2,33
13	Jasa Perusahaan	0,84	0,98	2,86	5,42	0,64
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,12	3,07	7,61	4,59	-0,70
15	Jasa Pendidikan	0,52	0,16	7,23	4,40	1,77
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,42	2,60	4,95	4,96	2,73
17	Jasa Lainnya	2,06	1,74	6,25	5,10	2,37
Jenis Pengeluaran						
No	Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1,34	2,20	7,06	4,25	2,20
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,08	1,69	5,67	5,14	2,18
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,45	2,25	2,02	0,28	3,78
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,98	4,06	5,09	3,42	2,48
Laju Inflasi Kota Sawahlunto		0,65	2,79	9,63	5,23	0,77

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025, Data Diolah 2025

Pada tabel di atas, lapangan usaha dan jenis pengeluaran yang realisasinya melebihi target inflasi nasional adalah yang berwarna (merah muda, coklat dan kuning), dan mempunyai andil yang besar terhadap laju inflasi di Kota Sawahlunto.

Pada tahun 2024, terdapat 3 lapangan usaha dan 1 jenis pengeluaran yang melampaui target inflasi maksimal yang telah ditetapkan Pemerintah sebesar 3,5%, yaitu : lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan laju inflasi sebesar 6,23%; lapangan usaha Industri Pengolahan dengan laju inflasi sebesar 5,01%; lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan laju inflasi sebesar 3,99 %; dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dengan laju inflasi sebesar 3,78%.

3. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB

Total dana pihak ketiga/PDRB (%) adalah rasio total dana pihak ketiga perbankan di suatu wilayah terhadap PDRB wilayah tersebut pada suatu waktu tertentu yang menggambarkan tingkat besaran perbandingan dana pihak ketiga perbankan suatu daerah terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian daerahnya.

Peningkatan Total dana pihak ketiga/PDRB menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin kuatnya sektor keuangan di suatu daerah. Di bawah ini disajikan tabel total dana pihak ketiga di Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir.

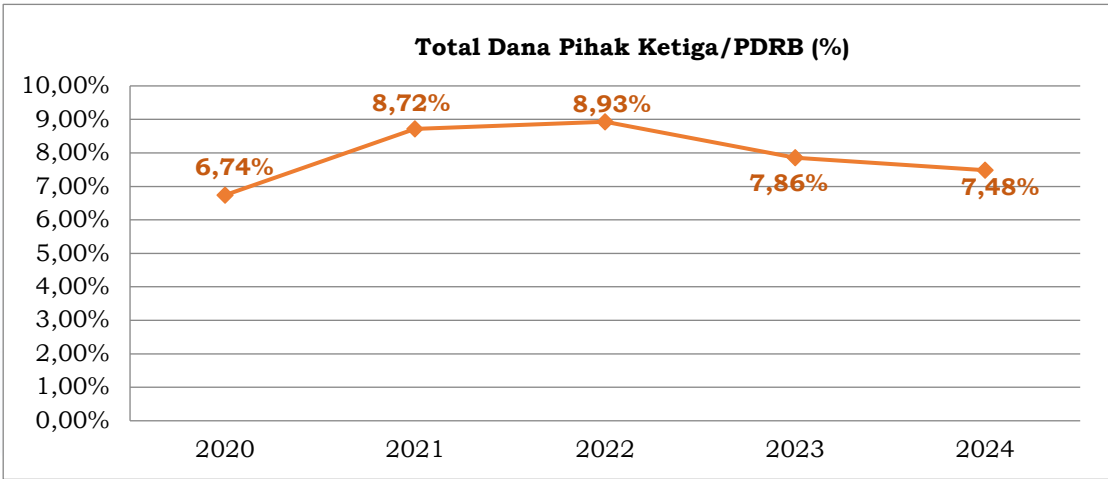
Tabel 2.106
Total Dana Pihak Ketiga di Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Total Dana Pihak Ketiga (miliar rupiah)	246,61	335,97	391,86	379,31	378,48
PDRB ADHB (miliar rupiah)	3.656,60	3.851,69	4.389,76	4.825,30	5.058,00
Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	6,74%	8,72%	8,93%	7,86%	7,48%

Sumber Data : Bank Indonesia Tahun 2025, BPS Kota Sawahlunto Tahun 2025

Di bawah ini disajikan grafik total dana pihak ketiga di Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir :

Grafik 2.30
Total Dana Pihak Ketiga/PDRB di Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024



Sumber Data : Bank Indonesia Tahun 2025, BPS Kota Sawahlunto Tahun 2025

Pada tabel dan grafik di atas terlihat bahwa rasio Total Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB dalam lima tahun terakhir di Kota Sawahlunto menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif pada kisaran 6,74 % hingga 8,93 %. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2022 dan rasio terendah terjadi pada tahun 2020. Penurunan rasio total dana pihak ketiga terhadap PDRB menunjukkan menurunnya tingkat simpanan masyarakat di Kota Sawahlunto, tabungan merupakan produk simpanan yang mendongkrak kenaikan dana pihak ketiga, sementara Giro dan Deposito mengalami kenaikan yang lambat dan cenderung masih fluktuatif.

4. Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Kabupaten/Kota (Rupiah)
- Nilai transaksi saham per kapita per kabupaten/kota adalah total nilai transaksi saham yang dilakukan oleh investor berdasarkan domisili (Provinsi/Kabupaten/Kota) selama setahun dibagi dengan jumlah penduduk daerah tersebut (Provinsi/Kabupaten/Kota). Total nilai transaksi saham merupakan hasil dari volume atau jumlah saham yang ditransaksikan dikali dengan harga saham. Semakin

tinggi nilai transaksi saham menunjukkan partisipasi masyarakat yang masuk dalam pasar modal meningkat.

Berikut disajikan nilai transaksi saham per kapita di Kota Sawahlunto selama 5 tahun terakhir pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.107
Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Kabupaten/Kota
Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

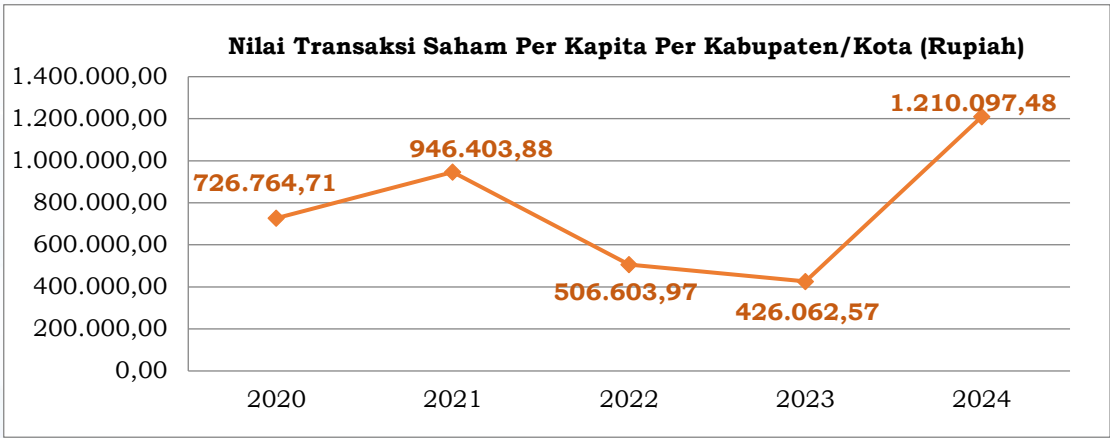
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Transaksi Saham (Miliar Rupiah)	47,34	62,28	33,83	28,87	83,17
Jumlah Penduduk (Jiwa)	65.138	65.807	66.778	67.760	68.730
Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Kabupaten/Kota (Rupiah)	726.764,71	946.403,88	506.603,97	426.062,57	1.210.097,48

Sumber Data : Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2024, BPS Kota Sawahlunto Tahun 2025

Pada tabel di atas terlihat bahwa nilai transaksi saham Kota Sawahlunto berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Penurunan nilai transaksi saham terjadi pada tahun 2022 dan tahun 2023 disebabkan lesunya ekonomi, serta kehati-hatian investor dalam melakukan transaksi. Meskipun terjadi peningkatan investor perorangan (SID) pada tahun tersebut, namun peningkatannya tidak berbanding lurus dengan peningkatan nilai transaksi saham karena kebanyakan investor perorangan yang masuk pasar modal merupakan anak-anak muda yang masih duduk di bangku kuliah yang baru mencoba menjadi investor dengan modal Rp. 100 ribu

Berikut disajikan perkembangan turun naiknya nilai transaksi saham per kapita di Kota Sawahlunto selama 5 tahun terakhir :

Grafik 2.31
Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Kabupaten/Kota
Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024



Sumber Data : Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2024, BPS Kota Sawahlunto Tahun 2025

Meskipun Nilai transaksi saham Kota Sawahlunto pada tahun 2024 meningkat sangat signifikan, namun angka ini merupakan yang terendah kedua dari 6 kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten/kota dengan nilai transaksi saham tertinggi adalah Kota Padang dengan nilai transaksi sebesar Rp. 7.448,96 Miliar dan yang terendah adalah Kota Pariaman dengan nilai transaksi sebesar Rp. 65,48 Miliar.

5. Total Kredit/PDRB

Total Kredit/PDRB (%) menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di lingkup daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Semakin tinggi nilai Total Kredit/PDRB (%) menunjukkan semakin berfungsinya perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha-usaha dalam perekonomian lingkup daerah tersebut. Berikut disajikan Total Kredit dan PDRB ADHB Kota Sawahlunto selama 5 tahun terakhir :

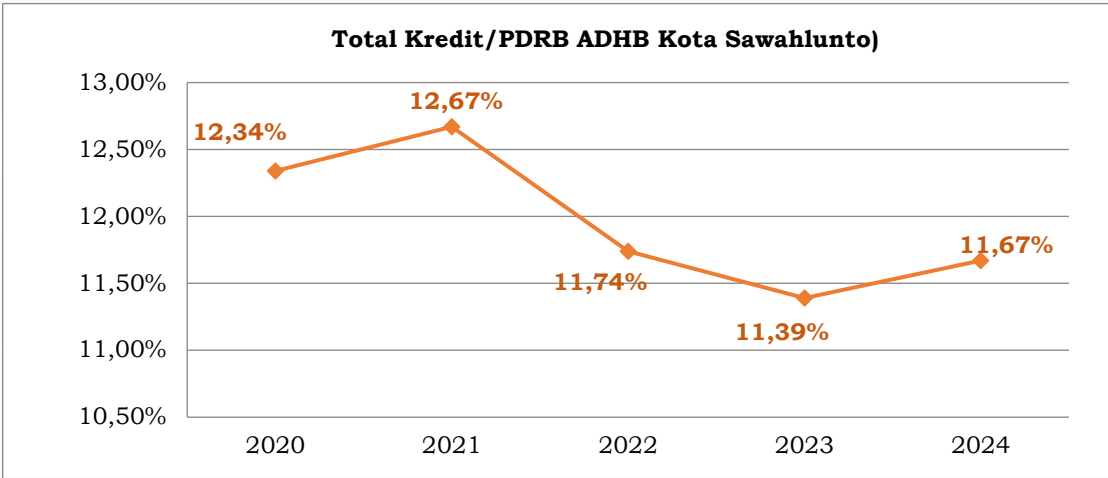
Tabel 2.108
Total Kredit Dan PDRB ADHB Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Total Kredit (miliar rupiah)	451,10	488,08	515,46	549,44	590,15
Pertumbuhan Total Kredit	-	8,20%	5,61%	6,59%	7,41%
PDRB ADHB (miliar rupiah)	3.656,59	3.851,69	4.389,76	4.825,30	5.058,00
Pertumbuhan PDRB ADHB	-	5,34%	13,97%	9,92%	4,82%
Total Kredit/PDRB ADHB (%)	12,34%	12,67%	11,74%	11,39%	11,67%

Sumber Data : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2025, Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2025

Berikut disajikan perkembangan turun naiknya rasio Total Kredit/ PDRB ADHB di Kota Sawahlunto selama 5 tahun terakhir :

Grafik 2.32
Rasio Total Kredit/ PDRB ADHB Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024



Sumber Data : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2025, Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2025

Pada tabel dan grafik di atas terlihat Rasio Total Kredit terhadap PDRB Kota Sawahlunto berfluktuasi selama periode tahun 2020-2024 dengan kecenderungan menurun. Penurunan Rasio Total Kredit terhadap PDRB Kota Sawahlunto terjadi pada tahun 2022 dan tahun 2023. Hal ini disebabkan pertumbuhan Total Kredit lebih rendah dari Pertumbuhan PDRB ADHB. Penurunan Rasio Total Kredit terhadap PDRB Kota Sawahlunto tersebut menunjukkan bahwa fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan berkurang dalam menyalurkan pendanaan pada usaha-usaha dalam perekonomian Kota Sawahlunto pada tahun tersebut.

6.

Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)

Rasio PDRB sektor jasa keuangan (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi lapangan usaha jasa keuangan terhadap PDRB suatu daerah dan sejauh mana sektor jasa keuangan mampu menjalankan fungsinya, baik sebagai motor penggerak maupun penopang pertumbuhan ekonomi bagi suatu daerah.

Berikut disajikan perkembangan rasio PDRB sektor jasa keuangan selama lima tahun terakhir :

Tabel 2.109

Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan Kota Sawahlunto

Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jasa Keuangan (miliar rupiah)	124,28	139,51	155,10	164,02	172,38
2	PDRB ADHB (miliar rupiah)	3.656,59	3.851,69	4.389,76	4.825,30	5.058,00
3	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)	3,40	3,62	3,53	3,40	3,41

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025, Data diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio PDRB sektor jasa keuangan Kota Sawahlunto selama rentang tahun 2020-2024 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Di samping itu kontribusi sektor jasa keuangan sangat rendah terhadap perekonomian Kota Sawahlunto dengan kisaran 3,40 % hingga 3,62 % sehingga belum mampu menjadi motor penggerak maupun penopang pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto.

2.1.4

ASPEK PELAYANAN UMUM

A.

Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

1.

Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.

Semakin tinggi nilai Indeks Reformasi Hukum, maka semakin berhasil pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum oleh lembaga yang bersangkutan.

Tabel 2.110

Indeks Reformasi Hukum Kota Sawahlunto

Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Reformasi Hukum	na	na	na	55,38	97,5

Sumber Data : Portal RB Tahun 2024-2025

Penilaian Indeks Reformasi Hukum Kota Sawahlunto mulai dilaksanakan pada tahun 2023. Indeks Reformasi Hukum tahun 2024 meningkat sangat drastis dengan Kategori AA (Istimewa). Rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk pemerintah daerah Kota Sawahlunto agar pelaksanaan reformasi hukum dipertahankan dan ditingkatkan.

2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka instansi pusat dan pemerintah daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja tata kelola dan manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan pemantauan dan evaluasi SPBE.

Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain.

Adapun capaian Indeks SPBE Pemerintah Kota Sawahlunto dalam kurun waktu 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.111
Perkembangan Indeks SPBE Pemerintah Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks SPBE	2,88	2,07	2,84	3,09	3,41
Prediket	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Sumber Data : Laporan Hasil Pemantauan SPBE

Capaian SPBE Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2020–2024 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Penurunan Indeks SPBE tahun 2021 disebabkan adanya perubahan metode penilaian.

Meskipun capaian SPBE Kota Sawahlunto cenderung meningkat, namun terdapat beberapa kelemahan, seperti: a). konsep kebijakan internal Siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Pemerintah Kota Sawahlunto belum tersedia atau masih dalam bentuk draft (terdapat SOP yang menggunakan SDLC dalam bentuk file excel); b). Pemerintah Kota Sawahlunto belum menerapkan kegiatan Manajemen Pengetahuan, program kegiatan yang terarah dan terencana; dan c). Pemerintah Kota Sawahlunto belum melaksanakan Audit Keamanan.

Dengan demikian perlu dilakukan perbaikan sebagai berikut : 1). Melengkapi Kebijakan pengembangan aplikasi dengan siklus dan proses pengelolaan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE secara menyeluruh di IPPD. Kebijakan juga mengatur pengendalian dan keterpaduan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE pada semua unit kerja/perangkat daerah IPPD dengan Instansi Pusat dan Pemda lainnya secara menyeluruh; 2). Melakukan penerapan Manajemen Pengetahuan yang tertuang di dalam Peta Rencana SPBE. Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.

Optimalisasi Penerapan Manajemen Pengetahuan dengan menggunakan Sistem Aplikasi Manajemen Pengetahuan; 3). Melakukan audit keamanan untuk keamanan infrastruktur dan keamanan aplikasi. Audit Keamanan Infrastruktur SPBE Nasional (dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun oleh BSSN). Audit Keamanan Infrastruktur SPBE IPPD (dilaksanakan 1 kali dalam 2 tahun oleh IPPD, berkoordinasi dengan Kemenkominfo). Audit Keamanan Aplikasi umum (dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun oleh BSSN). Audit Keamanan Aplikasi khusus (dilaksanakan 1 kali dalam 2 tahun oleh IPPD, berkoordinasi dengan Kemenkominfo).

3. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme SDM, aspek sarana prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan serta aspek inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.

Berdasarkan hasil penilaian Kemenpan RB, berikut capaian Indeks Pelayanan Publik Kota Sawahlunto tahun 2020-2024 :

Tabel 2.112
Perkembangan Indeks Pelayanan Publik Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pelayanan Publik	na	3.15 (B-)	4.21 (A-)	3,56 (B)	3,18 (B-)

Sumber Data : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2025

Hasil evaluasi tahun 2024, terjadi penurunan Indeks Pelayanan Publik Kota Sawahlunto yang disebabkan menurunnya Indeks Pelayanan Publik beberapa perangkat daerah Kota Sawahlunto, seperti: IPP Dinas Sosial Kota Sawahlunto dengan capaian 2,67 (tergolong kategori cukup) dan IPP RSUD Kota Sawahlunto dengan capaian 3,09 (tergolong kategori baik dengan catatan).

4. Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK (Nilai)

Survey Penilaian Integritas (SPI) adalah indeks yang diukur dengan survei masyarakat yang dibangun untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/PD).

Kriteria nilai survei penilaian integritas (SPI) menggunakan skala 0-100, dimana semakin tinggi nilai menunjukkan semakin baik tingkat integritas instansi. Indeks SPI diklasifikasikan menjadi tiga kategori : nilai 0 – 72.9 (rentan); nilai 73 - 77.9 (waspada); nilai 78 – 100 (terjaga).

Tabel 2.113
Perkembangan Survei Penilaian Integritas (SPI) Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
SPI KPK (Nilai) Kota Sawahlunto	NA	73,37	70,71	75,38	76,95
SPI KPK (Nilai) Provinsi Sumatera Barat	NA	75,44	70,57	71,41	67,20
SPI KPK (Nilai) Nasional	NA	72,43	71,94	70,97	71,53

Sumber Data : Jaga.id

Hasil SPI Tahun 2024 menempatkan Pemerintah Kota Sawahlunto dalam kategori waspada yang berarti praktik korupsi masih terjadi di Kota Sawahlunto berdasarkan penilaian dari responden internal, eksternal maupun eksper. Hal ini terjadi akibat dari sistem pencegahan antikorupsi yang ada saat ini belum berjalan optimal dan/atau meningkatnya kemunculan oknum pejabat/pegawai yang kurang berintegritas pada unit kerja/layanan lembaga yang mengindikasikan bahwa Kota Sawahlunto perlu meningkatkan upaya pencegahan korupsi untuk menghindari potensi risiko yang ada. Sementara Provinsi Sumatera Barat dan Nasional berada dalam kategori rentan yang menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Barat dan Nasional memiliki risiko korupsi yang tinggi dan perlu perbaikan signifikan dalam sistem integritas dan pencegahan korupsi. Dengan demikian Pemerintah Kota Sawahlunto lebih baik tingkat integritas instansinya dibandingkan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Berdasarkan rekomendasi dari KPK, Pemerintah Kota Sawahlunto perlu memperkuat upaya perbaikan yang berfokus pada penguatan level integritas di kalangan pejabat/pegawai disertai dengan penyempurnaan sistem pencegahan anti korupsi yang sudah ada dan berjalan, agar menjadi lebih efektif. Untuk menjamin akurasi dan ketepatan program dalam menjawab risiko korupsi lembaga yang bersifat kontekstual serta strategi, mitigasi dapat disusun dan diimplementasikan secara efektif.

5. Indeks Persepsi Anti Korupsi

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) adalah sebuah indeks yang mengukur persepsi masyarakat terhadap perilaku korupsi (SPI Komponen Eksternal). IPAK memberikan gambaran tentang bagaimana masyarakat memandang perilaku korupsi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam pelayanan publik, birokrasi, dan interaksi sosial.

Evaluasi terhadap Indeks Persepsi Anti Korupsi bertujuan untuk memahami sejauh mana masyarakat menganggap perilaku korupsi dapat diterima atau ditoleransi, serta menilai kepuasan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam memberantas korupsi. Semakin tinggi nilai IPAK menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin antikorupsi, sebaliknya nilai indeks yang semakin rendah menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.

Tabel 2.114

Perkembangan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
IPAK Kota Sawahlunto	NA	91,11	83,96	88,04	87,67
IPAK Provinsi Sumatera Barat	NA	82,97	80,69	84,47	89,35
IPAK Nasional	NA	80,17	82,79	84,97	86,44

Sumber Data : Jaga.id

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Kota Sawahlunto tahun 2024 menunjukkan bahwa masyarakat Kota Sawahlunto berperilaku lebih permisif terhadap korupsi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini berbeda dengan masyarakat pada level Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yang menunjukkan bahwa pada tahun 2024 masyarakat Provinsi Sumatera Barat dan Nasional berperilaku lebih anti korupsi dibandingkan tahun sebelumnya.

6. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja.

Tabel 2.115

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	na	2,32 (Rendah)	2,9510 (Sedang)	3,0444 (Sedang)	na

Sumber Data : 1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7.6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2023 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) provinsi dan kabupaten/kota pada tahun 2022

2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-2109 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2024 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023.

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 dengan pelaksanaan penilaian tahun 2025 belum tersedia atau belum dirilis. Namun Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto tahun 2022 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, hal ini terlihat dari perubahan status “rendah” ke status “sedang”.

B.

Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial

1. Persentase Penegakan Perda

Persentase Penegakan Peraturan Daerah (Perda) mengacu pada ukuran keberhasilan pelaksanaan dan penerapan Perda yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Indikator ini mengukur seberapa efektif Perda tersebut dijalankan dalam praktik, apakah sesuai dengan standar prosedur yang berlaku, dan apakah tujuannya tercapai.

Persentase Penegakan Perda dapat diartikan sebagai : 1). Tingkat Kepatuhan (Seberapa banyak warga masyarakat, pelaku usaha, atau pihak-pihak terkait yang mematuhi isi dan ketentuan Perda); 2). Efektivitas Penindakan (Seberapa efektif tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan aparat terkait dalam mengatasi pelanggaran Perda); 3). Pencapaian Tujuan Perda (Seberapa jauh Perda yang bersangkutan berhasil mencapai tujuan yang ingin dicapai, seperti menjaga ketertiban umum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau melindungi lingkungan).

Tabel 2.116
Persentase Penegakan Perda Di Kota Sawahlunto
Tahun 2020 - 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penegakan Perda	100	100	100	100	100

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Petugas Satpol PP Kota Sawahlunto sudah menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat dengan baik selama tahun 2020-2024. Hal ini terlihat dari penegakan Perda yang sudah terlaksana 100%, meskipun Pelanggaran Perda dari tahun ke tahun berfluktuasi dengan kecenderungan menurun.

2. Persentase Capaian Aksi HAM

Aksi HAM (Hak Asasi Manusia) merupakan upaya komprehensif untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. Aksi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, lembaga, dan masyarakat. Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan capaian pelaksanaan aksi HAM secara berkala. Pencapaian aksi HAM menjadi salah satu indikator dalam penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM.

Kabupaten/Kota Peduli HAM adalah program pemerintah untuk mendorong pemerintah daerah (kabupaten/kota) agar lebih memperhatikan dan mengimplementasikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM). Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara berbagai satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dalam upaya pemenuhan HAM.

Kriteria Peduli HAM untuk daerah kabupaten/kota bertujuan : a). mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota agar lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; b). memperkuat sinergi antara organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, dan instansi terkait di daerah, guna mendukung upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan c). memberikan penilaian terhadap struktur, proses, dan hasil capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Berikut penilaian capaian Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Sawahlunto pada tahun 2020-2024:

Tabel 2.117
Penilaian Capaian Aksi HAM Kota Sawahlunto
Tahun 2020 - 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penilaian Capaian Aksi HAM	Kota Peduli HAM"	Kota Peduli HAM	Kota Peduli HAM	Kota Peduli HAM	Kota Peduli HAM

Sumber Data : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025

Kota Sawahlunto selama tahun 2020-2024 sudah memperoleh penilaian Kota Peduli HAM. Perolehan gemilang ini sudah dicapai Kota Sawahlunto sejak tahun 2017 atas penilaian Aksi HAM di Kota Sawahlunto tahun 2016, dan penilaian Kota Peduli HAM pada tahun 2024 diperoleh atas penilaian Aksi HAM di Kota Sawahlunto tahun 2023. Sedangkan penilaian terhadap Aksi HAM tahun 2024 tidak dilaksanakan pada tahun 2025 karena terdapat tantangan yang kompleks dalam pelaksanaannya. Dibutuhkan upaya yang berkelanjutan untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut agar HAM dapat benar-benar ditegakkan dan dilindungi.

3. Indeks Demokrasi Indonesia (Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilu)

Indeks Demokrasi Indonesia adalah indikator komposit yang menunjukkan perkembangan demokrasi di Indonesia. Indikator ini hanya diukur sampai level Provinsi, sedangkan

Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu merupakan indikator proxy dari Indeks Demokrasi Indonesia Kota Sawahlunto karena Indeks Demokrasi Indonesia hanya diukur sampai level Provinsi. Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu merupakan bagian dari penilaian perkembangan demokrasi di Indonesia. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam Pemilu menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara.

Berikut capaian Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu di Kota Sawahlunto selama tahun 2020-2024 :

Tabel 2.118
Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Di Kota Sawahlunto
Tahun 2020 - 2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu (Memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota)	78,91	-	-	-	83,50
2	Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah	78,62	-	-	-	78,93
3	Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	54,27	-	-	-	79,90

Sumber Data : Badan Kesbangpol 2025

Pada tanggal 14 Februari 2024 dilaksanakan Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dan pada tanggal 27 November 2024 dilaksanakan pemilihan kepala

daerah secara serentak, baik tingkat Provinsi (Gubernur dan Wakil Gubernur) maupun kabupaten/kota (Wali Kota/Bupati dan Wakil Wali Kota/Wakil Bupati). Tingkat Partisipasi Pemilih di Kota Sawahlunto tahun 2024 lebih baik dari tahun 2020.

4. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (Angka Kriminalitas)

Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%) adalah seberapa banyak penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Semakin tinggi persentase yang dihasilkan dari perhitungan yang ada akan menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya, begitu pun sebaliknya.

Angka Kriminalitas merupakan penyesuaian dengan karakteristik kabupaten/kota terhadap indikator kinerja Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%).

Tindak kriminalitas merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum, undang-undang, norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Tindak kriminalitas ini dapat merugikan dan mengancam keselamatan serta jiwa seseorang.

Tabel 2.119
Angka Kriminalitas Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024

Jenis Kriminalitas	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Curat (pencurian dan pemberatan)	19	9	6	11	5
Penggelapan	3	1	3	11	8
KDRT	4	-	1	2	1
Penipuan	3	2	4	3	6
Pengerusakan	2	1	3	1	-
Pencurian Kendaraan Bermotor	8	5	4	3	3
Pembakaran	-	-	-	-	1
Anirat/Penganiayaan Pemberatan	1	1	1	1	-
Perkosaan	-	-	-	-	-
Pembunuhan	-	-	-	-	2
Jumlah kriminal	40	19	22	32	26
Jumlah penduduk	65.138	65.687	66.413	67.760	68.730
Angka kriminalitas	6,14	2,89	3,31	4,72	3,78

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah kriminalitas di Kota Sawahlunto selama tahun 2020-2024 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Untuk mengatasi permasalahan tindak kriminalitas di Kota Sawahlunto dan dalam upaya pembinaan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Sawahlunto bekerjasama dengan Kepolisian Resor Sawahlunto. Hal ini adalah sebagai salah satu bentuk pencegahan guna memberantas tindak kriminalitas dalam upaya menciptakan Kota Sawahlunto yang aman dan jauh dari kejahatan kriminalitas.

5. Indeks Pembangunan Hukum (Persentase Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah)

Indeks Pembangunan Hukum adalah indeks yang mengukur capaian kinerja pembangunan hukum melalui pilar yang merupakan komponen dalam pembangunan hukum Indonesia. Terdapat lima pilar dalam Indeks Pembangunan Hukum, yaitu budaya hukum, materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum serta informasi dan komunikasi hukum. Indeks Pembangunan Hukum belum dihitung di Kota Sawahlunto, untuk itu indikator proxy yang digunakan adalah Persentase Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda).

Tabel 2.120
Penanganan Pelanggaran Perda di Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pelanggaran Perda	210	7767	228	134	155
2	Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda	210	7767	228	134	155
3	Persentase penanganan pelanggaran Perda (%)	100	100	100	100	100

Sumber Data : Satpol PP dan Damkar Kota Sawahlunto Tahun 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa Persentase penanganan pelanggaran Perda di Kota Sawahlunto selama tahun 2020-2024 sudah mencapai 100%. Angka ini menunjukkan semua pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) di Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir dapat diselesaikan dan ditangani, meskipun ada lonjakan pelanggaran Perda yang signifikan pada tahun 2021 pada saat covid 19 melanda.

C. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

1. Persentase Kerjasama Wajib Yang Dilaksanakan

Kerjasama wajib daerah dengan daerah lain merupakan kerjasama antar daerah yang berbatasan untuk urusan Pemerintah yang memiliki eksternalitas lintas daerah, dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama, sedangkan kerjasama daerah dengan pihak ketiga adalah merupakan sebuah usaha bersama antara daerah dengan pihak ketiga yang terdiri dari perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum dan organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Tata cara kerjasama ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020.

Pemerintah Kota Sawahlunto selama tahun 2020-2024 telah merencanakan dan melaksanakan berbagai kerjasama antara pemerintah Kota Sawahlunto dengan pemerintah daerah lain serta dengan pihak ketiga. Berikut capaian Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan selama lima tahun terakhir

Tabel 2.121
Perkembangan Persentase Kerjasama Wajib Yang Dilaksanakan
Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan (%)	100	100	100	100	100

Sumber Data : Bagian Tata Pemerintahan Setdako Kota Sawahlunto 2025

Pada tabel di atas terlihat bahwa kerjasama wajib yang ditargetkan oleh pemerintah Kota Sawahlunto telah terlaksana dengan baik serta mempunyai dampak yang positif bagi pemerintah Kota Sawahlunto dan pihak ketiga serta masyarakat. Kerjasama yang dilaksanakan terkait dengan bidang pendidikan, pariwisata, kesehatan, ekonomi dan layanan publik lainnya.

Pihak dan lembaga yang telah bekerja sama dengan pemerintah Kota Sawahlunto adalah pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pemerintah kabupaten/kota Se-Sumatera Barat, pemerintah Kabupaten Blora, Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat, Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Padjajaran (UNPAD), Universitas Islam Riau (UIR), Universitas Negeri Padang (UNP), Teknik Pengeretaapian Wilayah Sumbar (PT. KAI), Bank Negara Indonesia (BNI), Miko Kamal dan Assciates, Universitas Seni Indonesia Padang Panjang, UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Universitas PGRI Sumatera Barat, PT. Semen Padang, PT. Bukit Asam, Sumber Randai (SR) Production.

2. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan Dan Keamanan

Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi ketangguhan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam bentuk ancaman yang membahayakan integritas, identitas serta perjuangan mewujudkan tujuan perjuangan nasional.

Indeks Ketahanan Nasional terdiri dari 8 gatra, salah satunya adalah gatra Pertahanan Dan Keamanan. Gatra ini merupakan salah satu aspek penting dalam Indeks Ketahanan Nasional (IKN) yang mencakup kemampuan negara dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keamanan warganya.

Berikut capaian Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan Dan Keamanan Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir :

Tabel 2.122
Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan Dan Keamanan
Kota Sawahlunto Dan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan Dan Keamanan Kota Sawahlunto	NA	NA	3,04	3,04	2,97
2	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan Dan Keamanan Provinsi Sumatera Barat	3,08	2,05	3,08	3,08	2,87
3	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan Dan Keamanan Indonesia	3,08	NA	3,02	2,89	3,02

Sumber Data : Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)

Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan Dan Keamanan Kota Sawahlunto mulai dihitung pada tahun 2022, sehingga data tahun 2020-2021 tidak tersedia. Sedangkan capaian Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan Dan Keamanan Kota Sawahlunto pada tahun 2024 mengalami penurunan, meskipun demikian angka ini berada pada kriteria “cukup tangguh”

- D. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah (IKK)
- I. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
1. Urusan Wajib Pendidikan
- Skor Literasi/Numerasi

Literasi dan numerasi adalah kemampuan dasar yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Literasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, dan memahami teks tertulis, sementara numerasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan memanipulasi angka.

Tabel 2.123

Angka Literasi/Numerasi Kota Sawahlunto

Tahun 2020-2024

NO	Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata-Rata Nilai UN SD	7,42	-	-	-	-
2	Rata-Rata Nilai UN SMP	5,55	-	-	-	-
3	Persentase siswa dengan nilai <i>assessment</i> kompetensi (numerasi minimum) SD	-	39,43	45,33	68,80	75,29
4	Persentase siswa dengan nilai <i>assessment</i> kompetensi (numerasi minimum) SMP	-	69,67	70,07	57,52	77,01
5	Persentase siswa dengan nilai <i>assessment</i> kompetensi (Literasi minimum) SD	-	60,90	62,38	83,87	87,26
6	Persentase siswa dengan nilai <i>assessment</i> kompetensi (Literasi minimum) SMP	-	69,67	70,07	80,10	83,51

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto

Mulai tahun 2021 ujian nasional pada tingkat SD dan SMP tidak dilaksanakan lagi, sebagai gantinya digunakan angka literasi/numerasi dengan rentang nilai 1- 100. Selama rentang waktu tahun 2021-2024, capaian angka literasi/numerasi dan SD dan SMP bervariasi. Untuk angka numerasi SD meningkat, sedangkan angka numerasi SMP berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Selanjutnya untuk angka literasi SD dan SMP meningkat.

- Harapan Lama Sekolah
- Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan lamanya waktu sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas.

Tabel 2.124

Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Sawahlunto

Tahun 2020 – 2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,17	13,18	13,42	13,69	13,86

Sumber Data : Berita Resmi Statistik, No. 72/12/13/Th.XXVII, 2 Desember 2024

Angka HLS Kota Sawahlunto mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun capaiannya merupakan yang terendah diantara 7 kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Pada Tahun 2024, Angka HLS Kota Sawahlunto sebesar 13,86, yang

berarti lamanya waktu sekolah bagi anak usia sekolah di Kota Sawahlunto diharapkan mencapai 13,86 tahun atau dapat menyelesaikan D1.

- Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Semakin tingginya angka RLS, semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan (diselesaikan) oleh masyarakat suatu daerah.

Tabel 2.125
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	10,17	10,32	10,43	10,44	10,53

Sumber Data : Berita Resmi Statistik, No. 72/12/13/Th.XXVII, 2 Desember 2024

Angka RLS Kota Sawahlunto mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun capaiannya merupakan yang terendah diantara 7 kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Angka RLS Kota Sawahlunto tahun 2024 sebesar 10,53, bermakna rata-rata masa sekolah yang dialami penduduk Kota Sawahlunto usia 25 tahun ke atas selama 10,53 tahun atau telah menyelesaikan SLTA kelas 1 (kelas X) dan telah menyelesaikan wajib belajar 9 tahun.

2. Urusan Wajib Kesehatan

- Umur Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah rata rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. UHH merupakan salah satu komponen pembentuk IPM. UHH menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat. Semakin baik tingkat kesehatan masyarakat maka kesempatan untuk hidupnya cenderung semakin panjang. Sebaliknya tingkat kesehatan yang buruk akan cenderung memperpendek usia hidup.

Tabel 2.126
Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
Usia Harapan Hidup (UHH)	72,81	73,20	73,50	73,79	74,12

Sumber Data : Berita Resmi Statistik, No. 72/12/13/Th.XXVII, 2 Desember 2024

Usia harapan hidup Kota Sawahlunto pada tahun 2024 sebesar 74,12 tahun. Artinya, rata-rata bayi yang lahir di Kota Kota Sawahlunto pada tahun 2024 memiliki harapan hidup hingga usia 74,12 tahun.

- Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah perhitungan yang digunakan untuk mengetahui status kesehatan keluarga. IKS mengukur kesehatan masyarakat secara menyeluruh, mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan.

Tabel 2.127
Indeks Keluarga Sehat Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Keluarga Sehat Kota Sawahlunto	0,24	0,29	0,29	0,34	0,45

Sumber Data : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto, 2025

Indeks Keluarga Sehat Kota Sawahlunto mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun masih berada pada kategori “Keluarga Tidak Sehat”.

3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

- Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) adalah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur oleh pemerintah.

Tabel 2.128
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)
Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2025

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kota Sawahlunto belum dihitung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto sehingga data belum tersedia.

4. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- Persentase RT dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Persentase rumah tangga (RT) yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau diperlukan untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga dari sektor perumahan.

Tabel 2.129
Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap
Hunian Layak Dan Terjangkau Kota Sawahlunto
Tahun 2020- 2024

NO	Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah yang layak huni dan terjangkau (unit)	13.884	12.793	12,742	13.322	13.569
2	Jumlah rumah (unit)	14.257	14.314	14.371	14.630	14.847
3	Persentase Rumah Tangga (RT) yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau (Rasio Rumah Layak Huni)	97,38	89,37	88,66	91,06	91,39

Sumber Data : DPKP2LH Kota Sawahlunto, 2024

Persentase rumah tangga (RT) yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau di Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir berfluktuasi. Jumlah rumah layak huni dan terjangkau di tahun 2024 bertambah 247 unit ini disebabkan adanya

intervensi dari pemerintah Kota Sawahlunto berupa kegiatan RTLH sebanyak 30 unit dan pembangunan unit rumah baru oleh masyarakat sebanyak 217 unit.

5. Urusan Wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) merupakan alat pengukuran capaian penyelenggaraan urusan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai urusan wajib pelayanan dasar yang terdiri atas sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran, dan sub urusan bencana.

Tabel 2.130
Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas
Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber Data : Kementerian Dalam Negeri 2025

Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas dihitung oleh Kementerian Dalam Negeri setelah daerah mengupload masing-masing unsur komposit Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas pada link yang tersedia. Sampai tahun 2024 data belum tersedia.

6. Urusan Wajib Sosial

- Indeks Kesejahteraan Sosial

Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) atau IKESOS adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan sosial masyarakat suatu wilayah atau negara.

Indeks Kesejahteraan Sosial mencakup tiga dimensi, yaitu : 1). kebutuhan dasar (dengan tujuh variable, yaitu : pangan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, *physical mobility* serta rasa aman); 2). peranan sosial (dengan tiga variabel, yaitu : partisipasi, kohesi sosial dan kelembagaan inklusif); 3). keberdayaan ekonomi (dengan tiga variabel, yaitu : partisipai ekonomi, utilitas/daya guna serta ketahanan ekonomi).

Sasaran cakupan dan batasan sasaran kelompok dalam IKESOS meliputi lansia (individu yang berusia 65+), disabilitas (penyandang disabilitas yang memenuhi kriteria kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, dan korban diskriminasi), serta penduduk (seluruh lapisan masyarakat).

Tabel 2.131
Indeks Kesejahteraan Sosial
Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kesejahteraan Sosial	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber Data : Dinsos, PMD PPA 2025

Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) Kota Sawahlunto tahun 2020-2024 belum dihitung oleh Kementerian Sosial sehingga data belum tersedia. Adapun capaian IKESOS Kota Sawahlunto dan Kota/Kabupaten lainnya di Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 yang disimulasikan oleh Kementerian Sosial sebagai berikut :

Tabel 2.132
Capaian Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS)
Se-Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Kabupaten/Kota	IKESOS Konversi	Peringkat
Kota Padang	58,886	1
Kota Bukittinggi	58,486	2
Kota Payakumbuh	58,342	3
Kota Pariaman	58,131	4
Kota Solok	58,091	5
Kabupaten Dharmasraya	57,692	6
Kabupaten Padang Pariaman	57,170	7
Kota Padang Panjang	57,168	8
Kabupaten Sijunjung	57,121	9
Kabupaten Tanah Datar	56,959	10
Kabupaten Lima Puluh Kota	56,760	11
Kabupaten Solok	56,760	12
Kota Sawahlunto	56,701	13
Kabupaten Agam	56,546	14
Kabupaten Pesisir Selatan	56,420	15
Kabupaten Solok Selatan	56,319	16
Kabupaten Pasaman Barat	56,119	17
Kabupaten Pasaman	55,870	18
Kabupaten Kepulauan Mentawai	55,080	19
Provinsi Sumatera Barat	57,085	

Sumber Data : Kementerian Sosial, 2025

Indeks Kesejahteraan Sosial merupakan indikator baru, yang penghitungannya baru disimulasikan dan disosialisasikan pada tahun 2025 oleh Kementerian Sosial. Dari hasil simulasi, Kota Sawahlunto berada pada posisi ke 13 se-Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dengan perolehan angka 56,701 dengan kategori “Maju”, Perolehan capaian ini, mengindikasikan bahwa Kota Sawahlunto perlu berbenah dan memaksimalkan upaya dalam memajukan kesejahteraan sosial masyarakat baik itu dalam dimensi kebutuhan dasar, peranan sosial serta keberdayaan ekonomi.

II. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

7. Urusan Wajib Tenaga Kerja

- **Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja**
Produktivitas adalah perbandingan antara jumlah output yang dihasilkan dengan jumlah input yang dibutuhkan untuk menghasilkan output tersebut (Husein Umar, dkk). Berdasarkan definisi tersebut maka dianalogikan output daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB ADHK) suatu daerah dan input adalah jumlah tenaga kerja yang ada pada daerah tersebut :

Tabel 2.133
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kota Sawahlunto
Tahun 2020–2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHK (Rp. Miliar)	2760,92	2829,35	2941,27	3072,35	3195,86
Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	-1,27	2,48	3,96	4,46	4,02
Jumlah Tenaga Kerja (Jiwa)	30310	30186	32275	34018	36134
Pertumbuhan Tenaga Kerja (%)	4,10	-0,41	6,92	5,40	6,22
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kota Sawahlunto (Juta/Jiwa)	91,09	93,73	91,13	90,32	88,44

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025, Data Diolah 2025

Produktivitas Tenaga Kerja Kota Sawahlunto tiga tahun terakhir terus menerus mengalami penurunan, hal ini disebabkan peningkatan jumlah tenaga kerja (input) lebih besar dari peningkatan produksi (output), dimana jumlah tenaga kerja meningkat pada kisaran 4,10% - 6,92%, sementara produksi meningkat pada kisaran 2,48% - 4,46%.

8. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kesetaraan gender dalam pembangunan manusia, dengan membandingkan pencapaian laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi dasar : kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

Tabel 2.134
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Sawahlunto
Tahun 2020–2024

Kabupaten/Kota	[UHH SP 2010] Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Kepulauan Mentawai	89,59	89,81	89,91	89,57	90,13
Kab. Pesisir Selatan	95,12	95,41	95,75	95,57	95,83
Kab. Solok	96,18	96,19	96,29	96,17	96,22
Kab. Sijunjung	93,03	93,40	94,16	94,28	94,39
Kab. Tanah Datar	97,57	97,58	97,62	97,73	97,48
Kab. Padang Pariaman	92,69	92,78	93,08	93,32	93,92
Kab. Agam	97,01	96,95	97,00	97,19	97,09
Kab. Lima Puluh Kota	95,03	94,91	94,85	94,77	94,86
Kab. Pasaman	92,45	92,47	92,51	92,7	92,91
Kab. Solok Selatan	95,08	95,14	95,20	95,27	95,53
Kab. Dharmasraya	88,31	88,32	88,56	89,11	89,71
Kab. Pasaman Barat	90,26	90,14	90,17	90,05	90,32
Kota Padang	93,64	93,81	93,85	93,94	94,04
Kota Solok	97,05	97,05	96,67	96,64	96,9
Kota Sawahlunto	95,48	95,73	95,17	95,36	95,73
Kota Padang Panjang	97,70	97,78	98,24	98,19	98,23
Kota Bukittinggi	98,89	98,99	99,36	99,17	98,66
Kota Payakumbuh	98,46	98,6	98,61	98,58	98,93
Kota Pariaman	98,49	98,62	98,64	98,07	98,11
Provinsi Sumatera Barat	94,17	94,34	94,72	94,93	95,25

Sumber Data : Berita Resmi BPS 8 April 2025

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Sawahlunto berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat selama lima tahun terakhir dan lebih tinggi dari IPG Provinsi Sumatera Barat, namun merupakan yang terendah kedua setelah Kota Padang diantara 7 kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

• Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran yang mengukur tingkat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi di pasar tenaga kerja. Semakin besar nilai IKG, semakin besar pula ketimpangan gender di suatu wilayah.

Tabel 2.135
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Sawahlunto
Tahun 2020–2024

Kabupaten/Kota	Indeks Ketimpangan Gender Menurut Kabupaten/Kota				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Kepulauan Mentawai	0,855	0,851	0,85	0,851	0,849
Kab. Pesisir Selatan	0,492	0,505	0,517	0,482	0,468
Kab. Solok	0,449	0,48	0,403	0,423	0,377
Kab. Sijunjung	0,516	0,527	0,501	0,465	0,491
Kab. Tanah Datar	0,387	0,312	0,305	0,336	0,344
Kab. Padang Pariaman	0,778	0,75	0,763	0,751	0,722
Kab. Agam	0,384	0,359	0,239	0,162	0,355
Kab. Lima Puluh Kota	0,441	0,549	0,496	0,492	0,453
Kab. Pasaman	0,525	0,535	0,522	0,527	0,464
Kab. Solok Selatan	0,824	0,804	0,787	0,811	0,805
Kab. Dharmasraya	0,566	0,553	0,528	0,539	0,457
Kab. Pasaman Barat	0,554	0,532	0,519	0,494	0,419
Kota Padang	0,200	0,32	0,171	0,198	0,172
Kota Solok	0,270	0,19	0,18	0,182	0,147
Kota Sawahlunto	0,285	0,184	0,223	0,199	0,270
Kota Padang Panjang	0,153	0,192	0,153	0,135	0,081
Kota Bukittinggi	0,273	0,236	0,156	0,159	0,080
Kota Payakumbuh	0,279	0,325	0,295	0,153	0,175
Kota Pariaman	0,377	0,331	0,286	0,374	0,120
Provinsi Sumatera Barat	0,503	0,455	0,43	0,425	0,381

Sumber Data : Berita Resmi BPS 25 April 2025

Meskipun IKG Kota Sawahlunto lebih rendah dari IKG Provinsi Sumatera Barat, namun merupakan yang tertinggi diantara 7 kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Tingginya IKG menunjukkan bahwa kesetaraan gender di Kota Sawahlunto belum optimal atau ada kesenjangan yang besar antara pencapaian laki-laki dan perempuan, khususnya dalam aspek kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi.

• Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan pencapaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. IPA digunakan untuk menilai sejauh mana hak-hak anak terpenuhi dan sejauh mana anak-anak mendapatkan perlindungan khusus.

Tabel 2.136
Perkembangan Indeks Perlindungan Anak Kota Sawahlunto,
Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
IPA Sawahlunto	na	65,70	67,61	65,47	na
IPA Provinsi Sumatera Barat	67,21	61,98	63,65	62,38	na
IPA Nasional	66,89	61,38	63,30	63,83	na

Sumber Data : SIGA KemenPPPA

IPA Kota Sawahlunto tahun 2021-2023 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Meskipun demikian, IPA Kota Sawahlunto selalu berada di atas IPA Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

9. Urusan Wajib Pangan

- Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Tabel 2.137
Indeks Ketahanan Pangan Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan Pangan	67,36	69,82	73,85	84,38	83,45

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025

Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat yang mengindikasikan ketersediaan pangan yang cukup, baik dari segi jumlah maupun kualitas.

10. Urusan Wajib Pertanahan

- Indeks Tertib Administrasi Pertanahan

Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (TAP) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan dan efektivitas administrasi pertanahan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ini melibatkan berbagai aspek seperti pendaftaran tanah, penerbitan sertifikat, dan penanganan hak adat, dengan tujuan menciptakan kepastian hukum dan keteraturan dalam pengelolaan tanah.

Tabel 2.138
Indeks Tertib Administrasi Pertanahan Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber Data : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup (DKP2LH) Tahun 2025

Indeks Tertib Administrasi Pertanahan Kota Sawahlunto belum dihitung oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto sehingga data belum tersedia.

11. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.

Tabel 2.139

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Sawahlunto

Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,74	62,39	62,89	63,10	60,89

Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2025

IKLH Kota Sawahlunto berkisar antara 60 hingga 63,10 yang berada pada kategori “sedang”. Penurunan IKLH Kota Sawahlunto ini disumbangkan oleh penurunan Indeks Kualitas Air (IKA) yang disebabkan badan air sungai tercemar. Hal ini berdasarkan pemantauan kualitas air tahun 2024 yang menunjukkan bahwa dari 14 titik pemantauan air, hanya 1 titik yang memenuhi baku mutu air, 4 titik pencemaran sedang dan 9 titik pencemaran ringan. Hal ini mencerminkan limbah rumah tangga yang belum terkelola dengan baik.

12.

Urusan Wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota

- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Administrasi Kependudukan adalah pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Pelayanan ini mencakup pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan penerbitan dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran.

Tabel 2.140

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan

Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	80	85,41	85,88	88,39	91,06
Mutu	B	B	B	A	A

Sumber Data : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto 2025

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Administrasi Kependudukan Kota Sawahlunto berkisar antara 80 hingga 91,06 yang sudah berada pada kategori “A”.

13.

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah alat bantu yang digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian dan perkembangan suatu desa melalui analisis dan nilai komposit dari berbagai indikator pembangunan. IDM mencakup aspek ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan/ekologi.

IDM digunakan untuk mengklasifikasikan desa ke dalam lima status, yaitu desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri.

Tabel 2.141

Indeks Desa Membangun Kota Sawahlunto

Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Desa Membangun	0,7004	0,7157	0,7433	0,7542	0,7876
Status	Berkembang	Maju	Maju	Maju	Maju

Sumber Data : Dirjen Pembangunan Desa Dan Perdesaan, Kemendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2021- 2025

Kota Sawahlunto sudah berstatus maju sejak tahun 2021, dan menunggu satu langkah lagi untuk menuju status mandiri.

14.

Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah alat ukur untuk menilai kualitas keluarga, dengan fokus pada ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga.

Tabel 2.142

Indeks Pembangunan Keluarga Kota Sawahlunto,

Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
iBangga Kota Sawahlunto	na	54,05	57,77	64,28	63,88
iBangga Provinsi Sumatera Barat	51,74	53,54	56,12	60,99	61,20
iBangga Nasional	53,57	54,01	56,07	61,43	62,40

Sumber Data : BKKBN 2025

Indeks Pembangunan Keluarga Kota Sawahlunto selama periode 2020-2024 berada pada kriteria cukup baik (berkembang). Hal ini menandakan Indeks Pembangunan Keluarga di Kota Sawahlunto sudah semakin baik walaupun masih berada pada posisi berkembang. Indeks Pembangunan Keluarga Kota Sawahlunto ini berada di atas Indeks Pembangunan Keluarga Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yang juga berada pada kriteria cukup baik (berkembang).

15.

Urusan Wajib Perhubungan

- Rasio Konektivitas

Rasio konektivitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat konektivitas, sering digunakan dalam konteks transportasi atau jaringan. Ini bisa berupa rasio antara jumlah trayek yang melayani suatu wilayah dengan jumlah trayek yang dibutuhkan. Semakin tinggi rasio konektivitas, menunjukkan adanya peningkatan aksesibilitas, kemudahan mobilitas, dan kemungkinan untuk terhubung dengan lebih banyak orang atau wilayah.

Tabel 2.143

Rasio Konektivitas Kota Sawahlunto

Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Konektivitas	0,44	0,56	0,58	0,25	0,23

Sumber Data : Dinas Perhubungan 2025

Indikator Rasio Konektivitas Kota Sawahlunto tahun 2023 dan tahun 2024 mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena tidak ada lagi angkutan penumpang kota (angkot) di Kota Sawahlunto.

16. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

- Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah

Nilai Indeks Transformasi Digital Nasional (TDN) untuk pilar pemerintah adalah bagian penting dalam mengukur kemajuan transformasi digital di Indonesia. Nilai ini menunjukkan tingkat kesiapan dan pelaksanaan tata kelola transformasi digital di pemerintah daerah, membantu pemerintah dalam menyusun perencanaan dan mengidentifikasi area prioritas, dan memberikan rekomendasi untuk mempercepat transformasi digital.

Tabel 2.144
Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah
Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber Data : Dinas Komunikasi Dan informatika Kota Sawahlunto 2025

Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah Kota Sawahlunto belum dihitung oleh Dinas Komunikasi dan informatika Kota Sawahlunto sehingga data belum tersedia dan rencananya akan mulai dihitung pada tahun 2026.

17. Urusan Wajib Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

- Kontribusi UMKM terhadap PDRB

Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah persentase Kontribusi UMKM terhadap PDRB (PDRB yang dihasilkan UMKM : PDRB Total) x 100%.

Tabel 2.145
Kontribusi UMKM Terhadap PDRB Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi UMKM Terhadap PDRB	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber Data : Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kota Sawahlunto 2025

Nilai PDRB yang dihasilkan UMKM belum dapat dihitung, perlu disepakati dengan Badan Pusat Statistik lapangan usaha yang mana saja yang tergolong PDRB UMKM, agar tidak duplikasi dengan indikator lainnya.

18. Urusan Wajib Penanaman Modal

- Persentase Peningkatan Investasi

Persentase peningkatan investasi adalah ukuran perubahan nilai realisasi investasi dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya, hal ini penting untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang meningkat

biasanya mengarah pada peningkatan produksi, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan pendapatan.

Tabel 2.146
Persentase Peningkatan Investasi Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kunci	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Total Investasi PMDN (Rp. Miliar)	200	28,28	45,83	112,59	212,79	252,65
Persentase Peningkatan Investasi	-	- 85,86%	62,06%	145,67%	89,00%	18,73%

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025

Persentase peningkatan investasi di Kota Sawahlunto berfluktuasi dari tahun ke tahun dengan kecenderungan menurun.

19. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga

• Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur dan memantau kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. IPP memberikan gambaran tentang kondisi pembangunan pemuda secara komprehensif, mencakup aspek pembangunan individu, pembangunan penghidupan dan kesejahteraan, serta partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Tabel 2.147
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber Data : Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), 2025

Indeks Pembangunan Pemuda sampai saat ini belum dihitung di Kota Sawahlunto sehingga data belum tersedia.

• Indeks Partisipasi Olahraga

Indeks Partisipasi Olahraga merupakan salah satu indikator dalam *Sport Development Index* (SDI), yang mencerminkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan olahraga. Indeks ini dihitung berdasarkan persentase atau proporsi jumlah individu yang berpartisipasi dalam aktivitas olahraga atau aktivitas fisik secara teratur, seperti setidaknya tiga kali seminggu.

SDI adalah indeks gabungan yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan keolahragaan di suatu wilayah atau negara. Selain partisipasi, SDI juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti sumber daya manusia, ruang terbuka, literasi fisik, kebugaran, perkembangan personal, kesehatan, ekonomi, dan performa.

Tabel 2.148
Indeks Partisipasi Olahraga Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Partisipasi Olahraga	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber Data : Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), 2025

Indeks Partisipasi Olahraga sampai saat ini belum dihitung di Kota Sawahlunto sehingga data belum tersedia.

20. Urusan Wajib Statistik

- Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di tingkat pemerintah pusat dan daerah. IPS mengukur capaian dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dan data statistik sektoral. Nilai IPS mencerminkan bagaimana suatu wilayah atau lembaga menjalankan statistik sektoral, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan.

Tabel 2.149
Indeks Pembangunan Statistik
Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	NA	NA	1,39	1,62	2,26
Prediket	-	-	Kurang	Kurang	Cukup

Sumber Data : Badan Pusat Statistik, Portal RB

Indeks Pembangunan Statistik Kota Sawahlunto masih rendah. Hal ini disebabkan beberapa hal, yaitu : 1).Penerapan interoperabilitas data belum dilakukan oleh seluruh produsen data di Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto; 2). Data yang dihasilkan oleh produsen data belum dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi seperti ketersediaan web service/API/sistem lainnya; 3).Penerapan Indikator Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi, Penyediaan Format Data, dan Konsistensi Statistik belum dilakukan oleh seluruh produsen data di Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto; 4). Belum ada bukti dukung yang memperlihatkan ketepatan waktu diseminasi data sesuai dengan jadwal yang dijanjikan; 5). Bentuk/format data yang didiseminasikan belum memberikan kemudahan kepada pengguna dalam mengakses dan memanfaatkan data statistic; 6). Data yang dihasilkan belum mampu untuk dapat konsisten jika diperbandingkan dengan berbagai sumber data; 7).Penerapan Aspek SDM yang Memadai dan Kapabel Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto masih bernilai kurang; 8).Pada Indikator Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik dan Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto.; 9). Belum adanya analisis jabatan, analisis beban kerja, SDM yang tersertifikasi kompetensi bidang statistic; 10).belum adanya dokumen kebijakan yang mengatur aspek ini; 11). Pemerintah Daerah Kota

Sawahlunto belum menerapkan Pemanfaatan Big Data yang menghasilkan data statistic sebagai data pendukung.

21. Urusan Wajib Persandian

- Indeks SPBE

Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain.

Tabel 2.150
Perkembangan Indeks SPBE Pemerintah Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks SPBE	2,88	2,07	2,84	3,09	3,41
Prediket	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Sumber Data : Laporan Hasil Pemantauan SPBE

Berdasarkan tabel di atas, capaian SPBE Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2020-2024 terus meningkat, namun masih terdapat beberapa kelemahan, yaitu : a). konsep kebijakan internal Siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Pemerintah Kota Sawahlunto belum tersedia atau masih dalam bentuk draft (terdapat SOP yang menggunakan SDLC dalam bentuk file excel); b). Pemerintah Kota Sawahlunto menerapkan kegiatan Manajemen Pengetahuan tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana; c). Pemerintah Kota Sawahlunto belum melaksanakan Audit Keamanan;

22. Urusan Wajib Kebudayaan

- Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan di tingkat nasional dan daerah. IPK tidak mengukur nilai budaya suatu daerah, melainkan mengukur kemajuan pembangunan kebudayaan itu sendiri. IPK disusun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Bappenas, dan BPS.

Tabel 2.151
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber Data : Kemendikbudristek 2025

Indeks Pembangunan Kebudayaan sampai saat ini belum dihitung di Kota Sawahlunto sehingga data belum tersedia.

23. Urusan Wajib Perpustakaan

- Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi (membaca, menulis, dan memahami teks) tertulis masyarakat.

Tabel 2.152
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Sawahlunto	72,13	72,43	74,14	88,33	94,81

Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2024-2025,

IPLM Kota Sawahlunto meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2024 terdapat 6 unsur dari 7 unsur pembangunan literasi masyarakat yang sudah mendapat nilai sempurna (1). Satu unsur pembangunan literasi masyarakat yang belum mendapatkan nilai sempurna adalah unsur pemerataan layanan perpustakaan dengan capaian sebesar 0,6369.

24. Urusan Wajib Kearsipan

- Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah

Pengawasan kearsipan dilaksanakan untuk menilai kinerja penyelenggaraan kearsipan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengukur kualitas pengelolaan arsip elektronik dalam kerangka SPBE melalui Evaluasi Reformasi Birokrasi. Pengawasan kearsipan juga mengukur tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan kearsipan, sehingga ANRI juga melakukan identifikasi permasalahan kinerja yang berpotensi pengenaan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Tabel 2.153
Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan
Pada Lingkup Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Pada Lingkup Pemerintahan Daerah	61,29	NA	35,05	48,05	43,18

Sumber Data : Arsip Nasional Republik Indonesia dalam Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2025

Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto meningkat setiap tahunnya, namun masih tergolong rendah.

III. **Urusan Pilihan**

25. **Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan**

- Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)
 Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi) adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan tukar hasil budidaya perikanan (seperti ikan) terhadap barang/jasa yang dibutuhkan oleh pembudidaya, baik untuk produksi maupun konsumsi rumah tangga. Secara sederhana, NTPi mengukur seberapa banyak barang/jasa yang bisa dibeli pembudidaya dengan hasil budidayanya.
 NTPi dihitung dengan membandingkan indeks harga yang diterima (IT) dengan indeks harga yang dibayar (IB) dan dikalikan 100% dengan rumus :

$$NTPi = (IT : IB) \times 100\%.$$

Tabel 2.154
Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan
Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2025

Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi) sampai saat ini belum dihitung di Kota Sawahlunto sehingga data belum tersedia.

26. **Urusan Pilihan Pariwisata**

- Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum
 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum mencerminkan rasio nilai tambah lapangan usaha Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum terhadap total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum suatu daerah, semakin tinggi rasionya terhadap PDRB daerah tersebut, ceteris paribus.

Tabel 2.155
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum Terhadap PDRB
Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum Terhadap PDRB Kota Sawahlunto	2,06	2,18	2,22	2,22	2,30

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025

Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum terhadap PDRB Kota Sawahlunto meningkat setiap tahunnya, namun perannya terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto sangat rendah. Hal ini tercermin dari kontribusi lapangan usaha Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum terhadap nilai total PDRB yang berada pada posisi ke-12 pada struktur perekonomian Kota Sawahlunto.

27. **Urusan Pilihan Pertanian**

- Nilai Tukar Petani (NTP)
 Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani merupakan rasio Indeks harga yang diterima petani (IT) terhadap Indeks harga yang dibayar petani (IB).

Tabel 2.156

Nilai Tukar Petani

Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Tukar Petani	106,55	116,57	125,43	130,36	151,51

Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2025

Nilai tukar petani sudah lebih dari 100 yang berarti petani mengalami *surplus*, karena nilai jual hasil pertanian yang diproduksi petani *lebih besar* dari nilai yang harus dibayarkan oleh petani atau dengan kata lain petani sudah terpenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangganya maupun kebutuhan untuk proses produksi pertaniannya.

28.

Urusan Pilihan Perdagangan

- Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB mencerminkan rasio nilai tambah sektor Perdagangan terhadap total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor Perdagangan suatu daerah, semakin tinggi rasionya terhadap PDRB daerah tersebut, ceteris paribus.

Tabel 2.157

Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kota Sawahlunto

Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kota Sawahlunto	14,98	14,67	14,93	15,05	15,47

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025

Sektor Perdagangan merupakan lapangan usaha yang paling dominan dalam perekonomian Kota Sawahlunto. Hal ini tercermin dari kontribusi lapangan usaha Perdagangan terhadap nilai total PDRB yang berada pada posisi pertama pada struktur perekonomian Kota Sawahlunto.

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB pada Kota Sawahlunto selama tahun 2020-2024 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat.

29.

Urusan Pilihan Perindustrian

- Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB mencerminkan rasio nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan suatu daerah, semakin tinggi rasionya terhadap PDRB daerah tersebut, ceteris paribus.

Tabel 2.158

Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kota Sawahlunto

Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kota Sawahlunto	10,82	11,22	10,80	10,87	11,23

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025

Industri pengolahan merupakan salah satu lapangan usaha yang dominan dalam perekonomian Kota Sawahlunto. Hal ini tercermin dari kontribusi lapangan

usaha industri pengolahan terhadap nilai total PDRB yang berada pada posisi ketiga terbesar pada struktur perekonomian Kota Sawahlunto.

Kontribusi lapangan usaha Industri pengolahan terhadap PDRB pada Kota Sawahlunto selama tahun 2020-2024 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat.

IV. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

30. Sekretariat Daerah

- Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah alat ukur yang digunakan pemerintah untuk menilai dan memantau kemajuan serta kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di berbagai instansi pemerintah. IRB menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilakukan, dengan tujuan mencapai pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dari KKN, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Indeks RB dikategorikan berdasarkan nilai yang diperoleh, dengan predikat seperti Istimewa, Sangat Baik, Baik, Cukup Baik, Cukup, Buruk, dan Sangat Buruk.

Tabel 2.159
Indeks Reformasi Birokrasi Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Reformasi Birokrasi	52,77	53,21	55,68	64,35	75,04
2	Prediket	CC	CC	CC	B	BB

Sumber Data : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2025

Indeks Reformasi Birokrasi Kota Sawahlunto sudah baik, namun masih perlu perbaikan, diantaranya mempromosikan kanal aduan, menyelesaikan aduan, mempercepat tindak lanjut.

31. Sekretariat DPRD

- Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD

Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD merupakan indikator penting untuk mengukur efektivitas dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD. Pelayanan yang baik dari Sekretariat DPRD dapat mendukung kinerja DPRD dalam menjalankan tugasnya, seperti legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Tabel 2.160
Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan
Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber Data : Sekretariat DPRD

Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto belum dihitung sampai tahun 2024 sehingga datanya belum tersedia.

V. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

32. Perencanaan

- Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas perencanaan pembangunan di tingkat daerah. IPPD mengukur sejauh mana perencanaan pembangunan disusun, diintegrasikan, dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Indeks ini membantu pemerintah daerah mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan lokal.

IPPD mengukur berbagai aspek perencanaan, seperti proses penyusunan rencana, keterlibatan stakeholder, keterpaduan rencana dengan rencana pembangunan nasional, dan evaluasi pelaksanaan rencana.

Tabel 2.161
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber Data : Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2025

Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto belum dihitung sampai tahun 2024 sehingga datanya belum tersedia.

33. Keuangan

- Opini BPK Atas Laporan Keuangan

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan penilaian profesional BPK mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan suatu institusi yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Opini BPK menggambarkan tingkat kedisiplinan keuangan suatu instansi berdasarkan empat kriteria tersebut.

Tabel 2.162
Opini BPK Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber Data : BPKAD Kota Sawahlunto Tahun 2024

Pemerintah Kota Sawahlunto sudah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan selama 9 tahun. Hal ini menyatakan bahwa laporan keuangan Kota Sawahlunto telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAP/SPKN). Atas prestasi tersebut Pemerintah Kota Sawahlunto memperoleh reward dari pemerintah pusat berupa penambahan anggaran.

34. Kepegawaian

- Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya.

Tabel 2.163
Indeks Profesionalitas ASN Kota Sawahlunto
Tahun 2020 - 2024

Indikator Kinerja Kunci	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Profesionalitas ASN	63,00	51,97	62,40	77,52	77,47

Sumber Data : Badan Kepegawaian Negara Kanreg XII Tahun 2022-2025
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2021

Indeks Profesionalitas ASN Kota Sawahlunto meningkat dari tahun ke tahun, namun masih tergolong kategori “sedang”, namun lebih rendah dari Indeks Profesionalitas ASN Provinsi Sumatera Barat yang sudah berada pada kategori tinggi (82,57).

35. Pendidikan dan Pelatihan

- Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi

Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) memiliki empat dimensi, salah satunya adalah Dimensi Kompetensi. Dimensi Kompetensi ini memiliki bobot 40% dalam pengukuran IP ASN. Kompetensi ASN menggambarkan kemampuan individu yang terdiri dari keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan sikap (attitude) yang relevan dengan tugas jabatan.

Tabel 2.164
Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi
Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024

Indikator Kinerja Kunci	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	NA	NA	10,31	26,24	25,90

Sumber Data : Badan Kepegawaian Negara Kanreg XII Tahun 2021-2025

Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi Kota Sawahlunto masih tergolong rendah yang disebabkan sangat sedikitnya kegiatan pengembangan kompetensi bagi ASN.

36. Penelitian dan Pengembangan

- Persentase Kebijakan Berbasis Bukti

Persentase kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) sulit ditentukan secara pasti karena tidak ada data yang terpusat dan terukur tentang jumlah kebijakan yang benar-benar didasarkan pada bukti. Namun, secara umum, pendekatan ini semakin populer dan digunakan dalam pembuatan kebijakan di berbagai bidang, termasuk kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Kebijakan berbasis bukti sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat efektif, efisien, dan didasarkan pada data yang kuat. Pendekatan ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Tabel 2.165
Persentase Kebijakan Berbasis Bukti
Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024

Indikator Kinerja Kunci	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber Data : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2025

Persentase kebijakan berbasis bukti Kota Sawahlunto belum dihitung sampai tahun 2024 sehingga datanya belum tersedia.

37. Pengawasan

- Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penilaian maturitas SPIP menggunakan kerangka yang terdiri dari enam level, yang menggambarkan tingkat kematangan SPIP dalam berbagai aspek.

- Level 0 (belum) ada	: Maksudnya SPIP belum diterapkan atau belum ada dalam organisasi.
- Level 1 (Rintisan)	: SPIP mulai diimplementasikan, namun masih dalam tahap awal dan belum terstruktur
- Level 2 (Berkembang)	: SPIP mulai terstruktur dan diterapkan, namun masih memerlukan pemantauan dan perbaikan
- Level 3 (Terdefinisi):	: SPIP telah terdefinisi dengan baik dan terdokumentasi, serta diterapkan secara konsisten
- Level 4 (Terkelola dan Terukur)	: SPIP telah terkelola dan terukur, serta menunjukkan kinerja yang efektif
- Level 5 (Optimum)	: SPIP telah mencapai tingkat optimal dan merupakan model bagi instansi lain

Tabel 2.166
Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024

Indikator Kinerja Kunci	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,00 Terdefinisi)	3,00 (Terdefinisi)	2,00 (Berkembang)	2,98 (Berkembang)	3,02 (Terdefinisi)

Sumber Data : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2025

Tingkat kematangan SPIP sudah terdefinisi dengan baik, namun penetapan tujuan Pemerintah Kota Sawahlunto belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat sasaran strategis yang belum berorientasi hasil, indikator tidak relevan dan target kinerja yang tidak tepat. Di samping itu sasaran program belum tepat, belum selaras dengan sasaran diatasnya dan tidak tepat, indikator kinerja program, kegiatan, sub kegiatan tidak cukup, tidak spesifik dan relevan, serta target kinerja program, kegiatan,

sub kegiatan yang tidak SMART, tidak proyektif dan tidak memperhatikan capaian tahun sebelumnya.

38. Pemerintahan Umum

- Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia adalah indikator komposit yang menunjukkan perkembangan demokrasi di Indonesia. Indikator ini hanya diukur sampai level Provinsi, sedangkan untuk Kota Sawahlunto indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan demokrasi adalah Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu.

Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu merupakan bagian dari penilaian perkembangan demokrasi di Indonesia. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam Pemilu menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara.

Tabel 2.167
Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Di Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu (Memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota)	78,91	-	-	-	83,50
2	Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah	78,62	-	-	-	78,93
3	Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	54,27	-	-	-	79,90

Sumber Data : Badan Kesbangpol 2025

Pada tahun 2024 dilaksanakan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 dan Pilkada pada tanggal 27 November 2024. Tingkat Partisipasi Pemilih di Kota Sawahlunto tahun 2024 lebih baik dari tahun 2020.

- Indeks Harmoni Indonesia

Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat harmoni dan kerukunan di berbagai wilayah Indonesia, khususnya pada tingkat kabupaten/kota. IHaI memiliki empat dimensi utama: harmoni ekonomi, harmoni sosial, harmoni budaya/kultural, dan harmoni religius.

Tabel 2.168
Indeks Harmoni Indonesia Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024

Indikator Kinerja Kunci	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Harmoni Indonesia	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber Data : Badan Kesbangpol 2025

Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) tahun 2024 untuk Kota Sawahlunto belum tersedia secara resmi. Data IHaI biasanya dirilis setelah proses pengukuran dan analisis selesai, yang biasanya memakan waktu beberapa bulan setelah tahun berjalan. Sosialisasi Pengukuran Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) Tahun 2025 diselenggarakan oleh Humas Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bertempat di Aula Rumah Dinas Walikota Bukittinggi, Jumat, 24 Januari 2025.

2.1.5 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RPD TAHUN 2024

Evaluasi terhadap realisasi kinerja tersebut bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator Kinerja makro merupakan alat ukur untuk mengetahui perkembangan Dari indicator kinerja yang berlaku secara nasional. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan indikator kinerja yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan provinsi, nasional serta Rencana Strategis Kementerian/Lembaga terkait.

A. Perkembangan Capaian Indikator Makro Pembangunan

Untuk mengukur tujuan pembangunan Kota Sawahlunto secara makro, baik itu dari pendapatan masyarakat, kemampuan ekonomi, kemiskinan, pembangunan manusia, pemerataan pendapatan dan pengangguran dapat dari pencapaian Indicator Kinerja Makro. Berikut capaian Indicator Kinerja Makro hingga tahun 2024 dengan tetap memperhatikan arahan dari Provinsi Sumatera Barat

Tabel 2.169
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA MAKRO PEMBANGUNAN
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target Akhir Periode RPD (2026)	Target (Tahun)	Realisasi (Tahun)	Realisasi Capaian Kinerja RPD hingga Tahun n (2024)	Tingkat Capaian (Tahun) (%)	Tingkat Capaian Kinerja RPD sampai tahun n (2024) (%)
				2024	2024		2024	
1	2	3	4	5	8	11=8	12= 8/5x100	13=11/4x100
1	Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (SDGs)	((Nilai PDRB ADHK Tahun n dikurangi Nilai PDRB ADHK tahun n-1)/ Nilai PDRB ADHK tahun n-1) x 100%	4,98	4,48	4,02	4,02	89,73	80,72
2	PDRB Perkapita (Juta Rupiah) (SDGs)	PDRB ADHB/(Penduduk Pertengahan tahun)	77,11	71,6	73,59	73,59	102,78	95,44
3	Gini Ratio	Indeks yang di gunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh yang di keluarkan BPS	0,28	0,289	0,299	0,299	96,54	106,79
4	Tingkat Kemiskinan (%) (SDGs)	(Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan / jumlah penduduk) x 100%	2,17	2,19	2,33	2,33	92,63	92,63
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) (SDGs)	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/Jumlah penduduk angkatan kerja x 100%	4,75	4,92	5,55	5,55	83,16	83,16
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Pengukuran indeks pembangunan dari harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia	75,74	74,74	76,68	76,68	102,60	101,24
7	Angka Usia Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	70,89	70,69	74,12	74,12	104,85	104,56

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target Akhir Periode RPD (2026)	Target (Tahun)	Realisasi (Tahun)	Realisasi Capaian Kinerja hingga Tahun n (2024)	Tingkat Capaian (Tahun) (%)	Tingkat Capaian Kinerja RPD sampai tahun n (2024) (%)
				2024	2024		2024	
1	2	3	4	5	8	11=8	12= 8/5x100	13=11/4x100
8	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLs)	lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	14,01	13,55	13,86	13,86	102,29	98,93
9	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARRLS)	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang)	10,72	10,57	10,53	10,53	99,62	98,23
10	Pengeluaran perkapita (Daya beli masyarakat) (Ribu Rupiah)	Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga (dijadikan pertahun)	11,47	11,15	11,187	11,187	100,33	97,53

Sumber Data : Olahan Barenlitbangda tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, secara keseluruhan capaian indicator makro Kota sawahlunto sangat baik, terlihat 8 dari 10 indikator yang capaiannya di atas 90% kecuali laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka. Tidak tercapainya tartget pertumbuhan ekonomi salah satunya disebabkan efek ketidakpastian ekonomi global yang terjadi secara umum, menurunnya konsumsi rumah tangga hingga faktor lainnya serti inflasi. Sementara untuk tingkat pengangguran terjadi akibat tidak sebandingnya jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia dengan jumlah pencari kerja, selain itu belum relevannya keterampilan yang dimiliki pencari kerja dengan kebutuhan di tempat kerja juga menjadi salah satu factor meningkatnya pengangguran di Kota Sawahlunto.

B. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja mereka untuk ke depannya. Sehingga mereka pun bisa meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Kriteria penyusunan IKU:

1. **Spesifik:** indikator kinerja utama harus dibuat sespesifik mungkin dan juga harus mengacu pada hal yang akan diukur oleh indikator tersebut (dalam hal ini kinerja karyawan dan instansi terkait). Hal tersebut dilakukan agar orang-orang yang hendak menyusun IKU mempunyai persepsi yang sama terkait IKU yang mereka buat.
2. **Measurable:** IKU harus dapat diukur secara objektif, entah itu dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif.

3. **Achievable:** data yang dipakai dalam IKU haruslah dapat dikumpulkan oleh pihak instansi terkait.
4. **Relevant:** IKU yang dibuat harus bisa menggambarkan kinerja sebuah instansi secara akurat dan relevan dengan kondisi riil instansi tersebut.
5. **Timelines:** IKU yang telah disusun harus bisa menggambarkan data berupa perkembangan kinerja suatu instansi dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, sedapat mungkin IKU bisa lebih fleksibel kalau nanti ada sejumlah perubahan di dalamnya.

Pada tahun 2024 rata-rata capaian IKU Kota Sawahlunto adalah 87,69% dengan predikat 'tinggi'. Capaian ini sudah cukup bagus mengingat ini adalah evaluasi tahun pertama dari Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) Kota sawahlunto Tahun 2024-2026. Beberapa indikator IKU belum ada realisasi karena data menunggu perilisan dari BPS. Rincian capaian IKU Kota Sawahlunto secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 2.170
Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Sawahlunto Tahun 2024

Tujuan		Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target Akhir Periode RPD (2026)	Target (Tahun)	Realisasi (Tahun	Realisasi Capaian Kinerja hingga Tahun n (2024)	Tingkat Capaian (Tahun) (%)	Keterangan
					2024	2024		2024	
1	2	3	4	5	6	9	12= 9	13=9/6x100	15
1	Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berkarakter yang dilandasi agama dan budaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Pengukuran indeks pembangunan dari harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia	78,29	76,01	76,68	76,68	100,88	
		Angka Usia Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	70,6	70,4	74,78	74,78	106,22	
		Prevalensi Stunting	(Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu/jumlah anak balita pada waktu yang sama) x 100 %	10,6	14	20	20	57,14	
		Angka Harapan Lama Sekolah (AHLs)	lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	14,75	13,75	13,86	13,86	100,80	
		Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARRLS)	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang)	11,65	11,15	10,53	10,53	94,44	
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender	95,79	95,77	95,73	95,73	99,96	
		Penghargaan kota layak anak (kategori)	Penghargaan KLA diberikan kepada daerah yang mempunyai komitmen tinggi untuk mendukung pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, melalui proses evaluasi yang dilakukan oleh tim dari Kemen PPPA, tim dari Kementerian/Lembaga dan tim independen	KLA	utama	utama	utama	100,00	



Tujuan		Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target Akhir Periode RPD (2026)	Target (Tahun)	Realisasi (Tahun	Realisasi Capaian Kinerja hingga Tahun n (2024)	Tingkat Capaian (Tahun) (%)	Keterangan
					2024	2024		2024	
1	2	3	4	5	6	9	12= 9	13=9/6x100	15
		Indeks Pembangunan Literasi masyarakat	Pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat	74,7	74,5	94,81	94,81	127,26	
		Persentase Pelestarian warisan Budaya (%)	(Jumlah warisan budaya yang dilestarikan/Jumlah warisan budaya) x 100%	78	69	68	68	98,55	
2	Terciptanya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah	jumlah persentase infrastruktur dasar (jalan, air minum, sanitasi) dalam kondisi baik/tiga	86	85	72,13	72,13	84,86	
		Persentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	(Jumlah Persentase kondisi jalan, jembatan, irigasi, gedung pemerintahan dan drainase dalam kondisi baik) / 5	72	70,35	73,07	73,07	103,87	
		Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%) (SDGs)	(Jumlah RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum yang layak/ total jumlah rumah tangga) x 100 %	98,35	97,1	96,21	96,21	99,08	
		Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak (%) (SDGs)	(Jumlah RT yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi yang layak/ total jumlah rumah tangga) x 100 %	88,7	86,5	83,05	83,05	96,01	
		Rasio luas daerah irigasi yang dilayani jaringan irigasi	(luas daerah yang dilayani jaringan irigasi/total luas daerah) x 100%	0,71	0,52	0,59	0,59	113,46	
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKL)	Gambaran indikasi lingkungan hidup dari indeks pencemaran air, pencemaran udara dan tutupan lahan dengan proporsi 30 % IKA, 30 % IKU, 40 % IKTL)	67,87	65,15	60,89	60,89	93,46	



Tujuan		Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target Akhir Periode RPD (2026)	Target (Tahun)	Realisasi (Tahun	Realisasi Capaian Kinerja hingga Tahun n (2024)	Tingkat Capaian (Tahun) (%)	Keterangan
					2024	2024		2024	
1	2	3	4	5	6	9	12= 9	13=9/6x100	15
		Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	perbandingan antara realisasi RTRW dengan rencana peruntukan Ruang	88,32	86,23	50	50	57,98	
		Persentase RTLH (%)	(Jumlah RTLH/Jumlah Rumah) x 100 %	7	7,16	7,16	7,16	100,00	
		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU / jumlah unit rumah x 100 %	87	84	84	84	100,00	
		Persentase tanah pemerintah yang tertib administrasi	Jumlah bidang tanah pemerintah yang bersertifikat/jumlah tanah pemerintah x 100 %	30,6	23,31	5,82	5,82	24,96	
		Indeks Ketahanan daerah	Upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana daerah	0,57	0,55	0,43	0,43	78,18	
		Rasio Konektivitas kota	(IK1 x bobot angkutan jalan) + IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	0,64	0,6	0,23	0,23	38,33	
		Kinerja lalu lintas	(Volume lalu lintas/kapasitas jalan) x 100 %	68	66	66	66	100,00	
3	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi pariwisata dan produk lokal	Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (SDGs)	((Nilai PDRB ADHK Tahun n dikurangi Nilai PDRB ADHK tahun n-1)/ Nilai PDRB ADHK tahun n-1) x 100%	5,12	4,72	4,02	4,02	85,17	
		Gini Ratio	Indeks yang di gunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh yang di keluarkan BPS	0,280	0,289	0,299	0,299	96,54	
		PDRB Perkapita (Juta Rupiah) (SDGs)	PDRB ADHB/(Penduduk Pertengahan tahun)	71,12	66,12	73,59	73,59	111,30	



Tujuan		Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target Akhir Periode RPD (2026)	Target (Tahun)	Realisasi (Tahun	Realisasi Capaian Kinerja hingga Tahun n (2024)	Tingkat Capaian (Tahun) (%)	Keterangan
					2024	2024		2024	
1	2	3	4	5	6	9	12= 9	13=9/6x100	15
		Tingkat Kemiskinan (%) (SDGs)	(Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan / jumlah penduduk) x 100%	2,12	2,14	2,33	2,33	91,12	
		Pengeluaran perkapita (Daya beli masyarakat) (Ribu Rupiah)	Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga (dijadikan pertahun)	12,62	11,78	11,187	11,187	94,97	
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%) (SDGs)	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/ Jumlah penduduk angkatan kerja x 100%	4,75	4,92	5,55	5,55	87,20	
		Persentase Kontribusi sektor Pariwisata pada PDRB (%)	Kontribusi PDRB ADHB sektor Penyediaan akomodasi dan restoran	2,34	2,26	2,26	2,26	100,00	
		Persentase Kontribusi sektor Industri Pengolahan pada PDRB (%)	Kontribusi PDRB ADHB dari sektor industri	12,06	11,5	11,5	11,5	100,00	
		Persentase Kontribusi sektor Perdagangan pada PDRB (%)	Kontribusi PDRB ADHB dari sektor Perdagangan	14,73	14,69	14,94	14,94	101,70	
		Indeks Ketahanan Pangan	Indeks yang digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah. Indeks ini terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan, keterjangkauan/ akses pangan dan pemanfaatan pangan.	70,56	70,16	83,45	83,45	105,26	
		Persentase Kontribusi sektor Pertanian pada PDRB (%)	Kontribusi PDRB ADHB sektor pertanian dan perikanan	9,08	9	9	9	100,00	
		Persentase peningkatan nilai investasi (%)	(jumlah investasi tahun n dikurangi jumlah investasi tahun n-1) / jumlah investasi tahun n-1 x 100%	27,07	26,98	18,73	18,73	69,42	



Tujuan		Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target Akhir Periode RPD (2026)	Target (Tahun)	Realisasi (Tahun	Realisasi Capaian Kinerja hingga Tahun n (2024)	Tingkat Capaian (Tahun) (%)	Keterangan
					2024	2024		2024	
1	2	3	4	5	6	9	12= 9	13=9/6x100	15
		Persentase masyarakat yang mendapatkan perlindungan sosial	Jumlah lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa & penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terfasilitasi / Jumlah total lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa & penyandang masalah kesejahteraan sosial x 100%	100	97	100	100	103,09	
		Persentase partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri	(Jumlah pemuda yang berwirausaha/jumlah pemuda) x 100%	16,2	12,2	2,53	2,53	20,74	
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang melayani dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	Penilaian keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi di suatu Pemerintah Daerah oleh Kemenpan RB	54,2	53,54	74,78	74,78	139,67	
		Indeks Inovasi Daerah	Standar Penilaian Kemendagri atas Inovasi Daerah (Innovation Government Award)	66,01	60,01	72,87	72,87	121,43	
		Indeks kepuasan Masyarakat	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan pelayanan publik	84,84	82,42	84,61	84,61	102,66	
		Nilai SAKIP	Penilaian Kemenpan RB terhadap laporan kinerja pemerintah daerah	63,35	62,19	64	64	102,91	
		IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	penilaian terhadap Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	78	76	70,785	70,785	93,14	
		Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah %)	(Nilai PAD dibagi dengan total pendapatan)x 100%	12,43	11,74	10,21	10,21	86,97	
		Indeks Ketahanan Nasional	kondisi dinamis bangsa indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi segala	2,91	2,89	2,87	2,87	99,31	

Tujuan		Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target Akhir Periode RPD (2026)	Target (Tahun)	Realisasi (Tahun	Realisasi Capaian Kinerja hingga Tahun n (2024)	Tingkat Capaian (Tahun) (%)	Keterangan
					2024	2024		2024	
1	2	3	4	5	6	9	12= 9	13=9/6x100	15
			ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri langsung atau tidak langsung						
		Persentase Penurunan kasus pelanggaran perda (%)	(jumlah kasus Pelanggaran perda tahun (n-1) -jumlah kasus pelanggaran perda tahun n)/ jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n) x 100%	0,02	0,11	3,2	3,2	2909,09	
		Indeks Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penilaian dari Kemenpan RB terhadap penggunaan sistem informasi teknologi oleh Pemerintah daerah	2,93	2,35	3,41	3,41	145,11	
		Indeks Profesionalitas ASN	Ukuran kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya	82	78	78	78	100,00	

1. Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berkarakter yang dilandasi agama dan budaya

Pada tujuan Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berkarakter yang dilandasi agama dan budaya terdapat 9 indikator kinerja dimana 8 indikator diantaranya mencapai target yang telah ditetapkan, 1 indikator yaitu prevalensi stunting tercapai 57,14% dengan predikat rendah. Perlu diperhatikan bahwa penanganan stunting merupakan pekerjaan kolaborasi yang melibatkan beberapa OPD sekaligus sehingga dapat diperoleh hasil yang baik, kedepannya diharapkan komunikasi dan koordinasi semakin bagus sehingga dapat mengintervensi kegiatan dalam rangka penurunan angka stunting.

2. Terciptanya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

Pada tujuan Terciptanya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan terdapat 13 indikator kinerja yang ditetapkan. Dari 13 indikator tersebut, 9 indikator tercapai dan 4 indikator tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai tersebut diantaranya adalah persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, persentas tanah pemerintah yang tertib administrasi, indeks ketahanan daerah dan rasio konektivitas kota. Beberapa factor penyebab diantaranya adalah keterbatasan kondisi APBD dan penurunan jumlah transfer dana dari pemerintah pusat dan provinsi, perlu diketahui bahwa Kota Sawahlunto masih sangat bergantung terhadap alokasi dana dari pemerintah pusat hingga saat ini.

3. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi pariwisata dan produk lokal

Pada tujuan Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi pariwisata dan produk lokal terdapat 15 indikator yang ditetapkan, dimana 13 diantaranya tercapai, dan 2 indikator tidak tercapai yaitu persentase peningkatan investasi dan persentase partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri. Salah satu penyebab kecilnya angka investasi di Kota Sawahlunto adalah karena Kota Sawahlunto bukan merupakan kota industri selain itu kondisi lahan yang sebagian masih dimiliki oleh PTBA dan banyaknya tanah ulayat masyarakat turut menghambat peningkatan investasi di Kota Sawahlunto. Sementara untuk rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan perekonomian di Kota Sawahlunto secara umum disebabkan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung seperti pelatihan-pelatihan untuk peningkatan keterampilan dan ketersediaan jalur pemasaran dan pasar (pembeli, pengguna), selain itu kondisi ekonomi yang kurang stabil juga menjadi salah satu faktor dalam rendahnya partisipasi pemuda ini.

4. **Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang melayani dan inovatif**

Pada tujuan Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang melayani dan inovatif terdapat 10 indikator yang telah ditetapkan, dan hampir seluruhnya tercapai. Untuk indikator persentase penurunan kasus pelanggaran perda bahkan tercapai sangat tinggi, dari 0,11 % target yang ditetapkan tercapai 3,2% penurunan kasus sepanjang tahun 2024, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Sawahlunto secara umum sudah mengarah menuju masyarakat yang tertib dan menjaga trantibum. Kemudian untuk persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah juga tercapai 86,97%, kedepannya diharapkan capaian PAD dapat lebih baik lagi sehingga dapat digunakan dalam kegiatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan indikator kinerja tersebut juga dapat dilihat bahwa tatakelola pemerintahan di Kota sawahlunto secara umum sudah cukup baik di tahun 2024.

2.1.6 CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KEWENANGAN KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2020-2024

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka Standar Pelayanan Minimal (SPM) tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur dan kriteria. SPM merupakan ketentuan mengenai jenis-jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang dikemudian dinyatakan dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pemerintah telah menetapkan SPM urusan pemerintahan wajib yang berkaitan Pelayanan Dasar yang terdiri dari Bidang :

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan Umum
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
- e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- f. Sosial

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Kota Sawahlunto menyusun target pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan sekaligus merumuskan program dan kegiatan dalam rangka pencapaiannya sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Untuk pencapaian target program dan kegiatan SPM dari tahun 2020 sampai tahun 2024 dapat dilihat ada tabel dibawah ini :

Tabel 2.171
CAPAIAN SPM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2020-2024

No	Bidang/ Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan	Target					Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	PENDIDIKAN											97,65
	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi di dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MT (%)	100	100	100	100	100	92,09	100	80	100	97,56
	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (%)	100	100	100	100	100	56,7	50,3	80	100	98,23
	Pendidika n Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi (%)	100	100	100	100	100	93,27	100	80	100	97,15
2	KESEHATAN											87,46
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	56,7	71,7	80	69,03	69,92
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan persalinan (%)	100	100	100	100	100	76,78	79,9	80	77,23	69,72
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	79,68	83,6	80	80,18	74,45
	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	38	74,6	80	88,73	91,82
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak pada usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100	68,36	80	94,24	100
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan Kesehatan (%)	100	100	100	100	100	76,05	49,83	80	78,65	88,1
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah pengunjung yang berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan (%)	100	100	100	100	100	46,66	44,64	80	100	99,34
	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	16,72	7,95	80	45,52	57,53
	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100	100	100	88,06	50,59	80	100	100
	Pelayanan Kesehatan Orang	Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang	100	100	100	100	100	150	100	80	100	100

No	Bidang/ Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan	Target					Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	mendapatkan pelayanan kesehatan (%)										
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB (%)	100	100	100	100	100	13,1	26,03	80	81,14	100
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang yang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV (%)	100	100	100	100	100	100	100	80	100	98,59
3 PEKERJAAN UMUM												100
	Penyediaan Jalan Untuk Melayani Kebutuhan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (SPM) (SDGs) (%)	100	100	100	100	100	85,26	86	80	100	100
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM) (%)	100	100	100	100	100	99,86	90	80	100	100
	Penyediaan Jalan Untuk Melayani Kebutuhan Masyarakat	Panjang jembatan dalam kondisi mantap (%) (SPM)	100	100	100	100	100	92,5	92,23	94	100	100
4 PERUMAHAN RAKYAT												100
		Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	80	100	100
		Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kab/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni (SPM) (%)	100	100	100	100	100	-	100	80	100	100
5 KEAMANAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT												100
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara kab/ kota (SPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Bidang/ Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan	Target					Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
6	SOSIAL											99,67
		Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	80	100	100
		Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	80	100	98,33
		Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (%)	100	100	100	100	100	100	100	80	100	100
		Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti (SPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	80	100	100
		Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/ kota (SPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	80	100	100

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat masih ada beberapa indikator SPM yang belum tercapai, adapun permasalahan yang menyebabkan target belum tercapai diantaranya:

Bidang Urusan Pendidikan

Permasalahan

1. Masih adanya kecendrungan sebagian masyarakat dalam memberikan data yang tidak sesuai dengan kriteria pemenuhan SPM.
2. Belum Optimalnya Sebaran Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3. Masih terbatasnya anggaran daerah untuk pemenuhan SPM Pendidikan.
4. Masih Kurang optimalnya pelaksanaan pemenuhan layanan SPM.

Solusi

1. Melakukan gerakan jemput bola sehingga semua penerima layanan bisa terlayani serta Satu Sumber Data Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar
2. Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
3. Penyusun skala prioritas dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan mengevaluasi Rencana Kegiatan Sekolah.
4. Perlunya pembuatan inovasi untuk pencapaian SPM Bidang pendidikan dan Koordinasi Lintas Sektor dengan pemangku kepentingan.

Bidang Urusan Kesehatan

Permasalahan

1. Masih ada ibu hamil yg tidak memeriksakan kehamilannya mulai usia kehamilan < 12 minggu karena ketidak tauan ibu akan kehamilannya.
2. Karena masih banyak balita yg masih belum lengkap mendapatkan pelayanan kesehatan antara lain imunisasi rutin masih belum lengkap diterima oleh semua balita khususnya imunisasi boster usia 18-24 bln
3. Masih belum semua balita dilakukan pemantauan perkembangan (SDIDTK) lengkap sesuai usianya dan belum semua balita sakit diperiksa dengan manajemen balita sakit (MTBS)
4. Target pelayanan kesehatan pada usia kesehatan dasar tidak bisa tercapai 100%, hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan diantaranya karena adanya jumlah sekolah yang melebihi kapasitas petugas sehingga tidak semua sekolah bisa dilakukan skrining, serta belum optimalnya tim UKS di puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan penjangkauan di sekolah
5. Masih terbatasnya sarana – prasarana untuk mendukung pemeriksaan skrening usia produktif, terutama pada pemeriksaan glukosa darah
6. Belum semua instansi/lembaga/ organisasi/perkumpulan /komunitas dan lainlain mendapatkan sosialisasi dan pelatihan tentang posbindu PTM
7. Kurangnya pencarian aktif oleh pustu dan poskesdes ke masyarakat
8. Kurangnya pemeriksaan kontak pasien TBC oleh tenaga kesehatan
9. Belum semua faskes melaporkan capaian kegiatan testing hiv melalui aplikasi SIHA, penyebab keterbatasan SDM dan sarpras elektronik
10. Penjangkauan pada populasi kunci hiv yang terbatas karena keterbatasan koordinasi lintas sector.

Solusi

1. Melaksanakan kegiatan kelas prakonsepsi agar pemahaman akan kehamilan benar dan mempersiapkan kehamilan yang sehat. Kerjasama Disdalduk KB PP dan kemenag dalam memaksimalkan kegiatan Suscatin dan Binwin. Agar pasangan pengantin tahu bagaimana mempersiapkan kehamilan yg sehat termasuk didalamnya periksa kehamilan ke tenaga kesehatan sedini mungkin serta dengan memaksimalkan kelas ibu hamil.
2. Maksimalikan kegiatan posyandu dalam pelaksanaan kegiatan imunisasi bagi balita yang belum lengkap mendapatkan antigennya.
3. Memaksimalkan pemeriksaan MTBS pada semua balita sakit yang datang ke faskes serta meningkatkan skil bidan, perawat dan dokter puskesmas dalam melakukan pemeriksaan MTB

4. Perencanaan kegiatan penjangkauan secara cermat dan Melibatkan lintas program dalam pelaksanaan kegiatan penjangkauan di sekolah.
5. Peningkatan kapasitas SDM dan unit pelayanan.
6. Koordinasi dengan pengelola program tingkat provinsi untuk bimtek kemampuan komunikatif Petugas dalam menggali faktor resiko Koordinasi untuk refresh materi pelaporan SIHA pada faskes.
7. Koordinasi dengan pengelola program tingkat provinsi untuk bimtek kemampuan komunikatif Petugas dalam menggali faktor resiko dan memantau puskesmas yang belum melakukan pengentrian kedalam Aplikasi SIHA.
8. Koordinasi untuk refresh materi pelaporan SIHA pada faskes serta penguatan koordinasi lintas sektor untuk penjangkauan populasi kunci.

Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Permasalahan Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, masih ada permasalahan baik internal maupun eksternal yang perlu diatasi. Berdasarkan pengamatan maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut:

Internal :

1. Sumber daya aparatur bidang teknis yang masih kurang dan perlu ditingkatkan keahliannya;
2. Belum lengkapnya data base pada masing-masing bidang;
3. Masih kurangnya ketersediaan data dan informasi yang akurat;
4. Masih kurangnya sarana untuk pengujian kualitas hasil pelaksanaan kegiatan;
5. Keterbatasan sumber dana;
6. Perbaikan dan peningkatan penyelenggaraan infrastruktur mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Eksternal:

1. Mempertahankan ketersediaan air baku dampak berkurangnya area terbuka hijau;
2. Ketidaktertarikan sebagian warga untuk mendapat bantuan sarana prasarana pengolahan air limbah domestik.

Solusi Untuk mengatasi permasalahan internal, ada beberapa solusi yang dapat dilaksanakan, antara lain:

1. Peningkatan sumber daya aparatur, baik dari segi kuantitas maupun kualitas;
2. Pembuatan basis data yang terintegrasi dari masing- masing bidang;
3. Penyusunan master plan dan kebijakan umum pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dari semua aspek dan bidang.

Sedangkan untuk mengatasi permasalahan- permasalahan eksternal, solusi yang dapat dilaksanakan antara lain:

1. Peningkatan pengelolaan SPAM dan Sanitasi masyarakat;
2. Bekerja sama dengan dinas terkait mengenai sosialisasi pentingnya pengolahan air limbah domestic.

Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM urusan Perumahan rakyat dan Permukiman di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto yaitu:

1. Dengan kondisi alam Sawahlunto berbukit, dan tingkat bencana tinggi.
2. Rumah terdampak bencana berada diluar SK kawasan bencana.
3. Belum tersedia lahan relokasi program pemerintah, karena kondisi geografis Sawahlunto yang berada pada daerah berkontur.

Adapun solusi untuk penyelesaian masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Bidang perumahan, dan Kawasan Permukiman terlibat aktif dalam tanggap bencana.
2. Perlu pertimbangan RTLH bencana diluar SK Kawasan bencana sehingga dapat diakomodir dalam SPM.
3. Perlu adanya kebijakan untuk penentuan lahan pemerintah untuk relokasi.

Bidang Urusan Trantibum

Permasalahan

1. Sulitnya meminta by name by addres pada saat pelaksanaan Penegakan Perda dan Perkada pada radius 0-50 M di lokasi Penegakan Perda dan Perkada.
2. Terbatasnya anggaran untuk mencapai target program kegiatan dan memenuhi sarana-prasarana dalam rangka penerapan percepatan SPM.
3. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah sehingga dengan mudah mereka melanggarnya.
4. Lemahnya fungsi koordinasi dan sinergi antara dinas/instansi terkait.
5. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana, dikarenakan masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur serta sarana prasarana penanggulangan bencana.
6. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana, dikarenakan masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur serta sarana prasarana penanggulangan bencana

termasuk di dalamnya anggaran, karena dalam PB anggaran termasuk faktor yang sangat penting.

7. Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
8. Jauhnya jarak tempuh daerah rawan bencana dari posko komando bencana.
9. Terbatasnya sarana prasarana penyelamatan korban bencana.
10. Kurangnya Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kota Sawahlunto sehingga menyulitkan pengendalian kebakaran di lokasi di luar WMK.

Solusi

1. Berkoordinasi dengan OPD Disdukcapil untuk meminta data masyarakat yang terkena dampak akibat penegakan perda dan perkara di lokasi penegakan perda dan perkara yang berada pada radius 0 - 50 M
2. Mencoba mengajukan tambahan anggaran dari APBD untuk operasional dan melengkapi sarana prasarana.
3. Memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat yang melanggar Perda, Peraturan Walikota dan Produk Hukum Lainnya agar mereka mematuhi setiap aturan yang ada dan memberikan sanksi kepada pelanggar Perda.
4. Meningkatkan kerjasama yang intensif dengan berbagai pihak guna mengoptimalkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
5. Melakukan penguatan kelembagaan BPBD secara internal melalui koordinasi ke Propinsi maupun pusat, mengikuti pelatihan 11listema PB. Meningkatkan upaya pemenuhan pengadaan sarana prasarana dan dukungan anggaran.
6. Melakukan peningkatan kapasitas Pusdalops PB dan Satgas TRC serta pembentukan forum pengurangan risiko bencana di desa.
7. Meningkatkan fungsi dan peran serta masyarakat dalam menanggulangi bencana sebelum petugas gabungan hadir dilokasi kejadian.
8. Memberikan pemahaman kepada masyarakat di luar WMK untuk mengenal potensi kebakaran dan memberikan pengetahuan tentang tata cara pengendalian dini musibah kebakaran.

Bidang Urusan Sosial

Permasalahan

- 1. Belum maksimalnya jumlah bantuan yang diberikan kepada pemerlu pelayanan sosial.
- 2. Masih adanya Penyandang Disabilitas yang belum tersentuh bantuan, hal ini dikarenakan tidak memiliki identitas kependudukan, belum melakukan sidik jari sehingga memakai identitas yang lama dengan NIK yang belum padan dengan DUKCAPIL.
- 3. Masih adanya lansia yang belum tersentuh oleh bantuan, hal ini di karenakan tidak memiliki indentitas kependudukan,
- 4. Belum melakukan sidik jari sehingga memakai identitas yang lama dengan NIK yang belum padan dengan DUKCAPIL.

Solusi

- 1. Sudah di sampaikan ke Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan tentang belum adanya identitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.
- 2. Walaupun masih adanya keterbatasan Anggaran bukan menjadikan kita tidak melaksanakan kegiatan / melakukan pelayanan Reahabilitasi Sosial yang di syaratkan oleh SPM tetapi kita harus mampu mencari solusi yang terbaik terhadap kendala-kendala terutama masalah anggaran, yakni melalui proposal, pengajuan CSR Perusahaan maupun koordinasi dengan UPTD-UPTD yang ada di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat maupun Kemensos RI.

2.1.7 CAPAIAN SDGs TAHUN 2021 – 2024

Tabel 2.172
CAPAIAN SDGs TAHUN 2021 – 2024

No	Indikator TPB		Target Nasional	Capaian		Kondisi Capaian
				2022	2023	
1	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	2,28	2,27	SS
2	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Meningkat menjadi 95%	NA	NA	NA
3	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal	2,125	27416	SB
4	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Meningkat menjadi 17,12%	24	100	SS
5	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Menurun menjadi 2,8 juta	1,655	1669	SS
6	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 70%	100	100	SS
7	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Meningkat menjadi 63%.	62	92	SB
8	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR)	Meningkat menjadi 65%	72,3	70,5	SS

No	Indikator TPB		Target Nasional	Capaian		Kondisi Capaian
				2022	2023	
		semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.				
9	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	100%	98,34	SS
10	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	85%	92,28	SS
11	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Meningkat menjadi 18,6 juta	41.40%		SS
12	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Meningkat menjadi 94,78%	99,03	97,10	SS
13	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkat menjadi 82,2%	82,94	80,29	SS
14	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Meningkat menjadi 77,4%.	Na	62	NA
15	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Meningkat menjadi 100%	NA	NA	NA
16	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	0,00011		SB
17	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Meningkat menjadi 39 daerah	4		SB
18	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 151 ribu	150		SS
19	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 81,5 ribu	NA	NA	NA
20	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Meningkat menjadi 450	2		SB
21	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Menurun menjadi 118,6	53		SS
22	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun	298 juta		SB
23	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	ada	2		SS
24	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Meningkat	0,01598		SS
25	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Meningkat	52,3		SS
26	2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Menurun	NA	NA	NA
27	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Menurun menjadi 17%	1		
28	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Menurun	NA		NA
29	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Menurun menjadi 8,5 %	NA		NA
30	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Menurun	5,6	4,6	SS

No	Indikator TPB		Target Nasional	Capaian		Kondisi Capaian
				2022	2023	
31	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Menurun menjadi 28%	3,2		SS
32	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Menurun	1,57		SS
33	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Menurun menjadi 28%	8,2	2,0	SS
34	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Meningkat menjadi 50%	91,1		SS
35	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun	NA	88,2	NA
36	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Meningkat	NA	NA	NA
37	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Menurun menjadi 306	12.788	2	SS
38	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Meningkat menjadi 95%	74	77,23	SB
39	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 85 %	73,9	77,23	SB
40	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	18		SS
41	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	11		SS
42	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun menjadi 24	18		SS
43	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Meningkat menjadi 95%	61,7		SS
44	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Menurun menjadi <0,5%	2		SS
45	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Menurun menjadi 245	48		SS
46	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Menurun	1		SS
47	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Meningkat menjadi 300	NA		NA
48	3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Meningkat	48		SS
49	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Menurun	NA		NA
50	3.3.5.(a)	Jumlah provinsi (kecamatan/kelurahan/desa) dengan eliminasi Kusta.	Meningkat menjadi 34 provinsi	NA		NA
51	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota (kecamatan/kelurahan/desa) dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Meningkat menjadi 35.	4		SS
52	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Menurun menjadi 5,4%	NA	NA	NA
53	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Menurun menjadi 24,3%	NA	NA	NA
54	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Menurun	9250,67		SB
55	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Menurun	0		SS
56	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki	Meningkat menjadi 280	37		SS

No	Indikator TPB		Target Nasional	Capaian		Kondisi Capaian
				2022	2023	
		puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.				
57	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Menurun menjadi angka 0,02%	0,04		SS
58	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Menurun	NA		NA
59	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Meningkat menjadi 66%	NA		NA
60	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%	70,46	70,50	SS
61	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Meningkat menjadi 23,5%	NA		NA
62	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurun menjadi 38	NA		NA
63	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Menurun menjadi 2,28	202	2	SS
64	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Menurun menjadi 9,91%	12	12	SB
65	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Meningkat	97,61	98,00	SS
66	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkat menjadi minimal 95%	8.483		SS
67	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Menurun	NA		NA
68	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Menurun	5,34		SS
69	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Meningkat	100		SS
70	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Meningkat	NA		NA
71	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Meningkat	72,22		SS
72	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 84,2%	59,701		SB
73	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 81%	86,667		SS
74	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Meningkat menjadi 114,09%	110,24	106,90	SB
75	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkat menjadi 106,94%	105,42	103,70	SB
76	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 8,8 tahun	-		SS
77	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Meningkat menjadi 77,2%	NA	94,2	NA
78	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Meningkat	NA		NA
79	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat;	Meningkat	397,63		NA

No	Indikator TPB		Target Nasional	Capaian		Kondisi Capaian
				2022	2023	
		dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.				
80	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 96,1%	99,72		SS
81	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Meningkat	99,72		SS
82	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi	Meningkat	300		SB
		dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).				
83	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Meningkat	64,37		SB
84	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	bertambah sebanyak 16	4		SB
85	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	0.01%		S2
86	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Menurun menjadi kurang dari 20,48%	NA		NA
87	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	50,4536		SS
88	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Meningkat menjadi 70%	50,4536		SB
89	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Menurun	NA		NA
90	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Meningkat menjadi 21 tahun	NA		NA
91	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurun menjadi 38 tahun	NA		NA
92	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Meningkat	20	3	SB
93	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Meningkat	NA	NA	NA
94	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Meningkat	NA		NA
95	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Menurun menjadi 9,9%	10,03	12,20	SS
96	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia	Meningkat menjadi 85%	100	71	SS

No	Indikator TPB		Target Nasional	Capaian		Kondisi Capaian
				2022	2023	
		Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.				
97	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Meningkat	NA	NA	NA
98	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Meningkat menjadi 100%	88,66	9,34	SS
99	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Meningkat menjadi 118,6 m3/detik	175		SS
100	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	47,086		SB
101	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Meningkat	NA		NA
102	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Meningkat menjadi 100%	85,1		NA
103	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional)	25		SS
104	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Meningkat	25		SS
105	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Meningkat menjadi 438 kabupaten/kota.	NA		NA
106	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Meningkat	0		SB
107	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota (Kecamatan/kelurahan) yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Meningkat menjadi 409 kabupaten/kota	1		SS
108	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Meningkat	0,701 %		SS
109	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Meningkat	52		SS
110	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	ada	0		BB
111	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	ada	0		SB
112	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	8 WS	8		SS
113	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	10 WS (skala nasional)	10		SS
114	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	ada	0		BB
115	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita.	Meningkat	396		SS
116	8.1.1.(a)	PDRB per kapita.	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	65,73		SS
117	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Meningkat	NA		NA

No	Indikator TPB		Target Nasional	Capaian		Kondisi Capaian
				2022	2023	
118	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Meningkat	NA		NA
119	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	0,51	50%		
120	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Meningkat	NA		NA
121	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	0,25	NA		NA
122	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Meningkat	NA		NA
123	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun	4,99809		SS
124	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	Menurun	8.43%		SS
125	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Meningkat	-		SS
126	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Meningkat menjadi 8%	NA	2,33	NA
127	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)	34		SS
128	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Meningkat	123848		SS
129	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Meningkat	NA	NA	SS
130	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Meningkat	NA	NA	NA
131	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Meningkat	32,37		
132	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Menurun (mendekat)	NA		NA
133	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Meningkat	NA		NA
134	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Meningkat	NA		NA
135	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB	-		SS
136	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Meningkat	27,16		SS
137	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Meningkat	NA		NA
138	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Meningkat	NA		NA
139	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDRB.	Meningkat	NA		NA
140	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Meningkat	NA		NA
141	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Meningkat	-		SS
142	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Meningkat	70,49%		SS
143	10.1.1*	Koefisien Gini.	Menurun menjadi 0,36	0,314	0,308	SS
144	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	228		SS
145	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas.	Menurun	NA		NA
146	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Meningkat menjadi 87	NA		NA
147	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	ada	NA		NA

No	Indikator TPB		Target Nasional	Capaian		Kondisi Capaian
				2022	2023	
148	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta	NA		NA
149	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	3,7 juta rumah tangga	88.66%		SB
150	11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Meningkat menjadi 32%	NA		NA
151	11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Meningkat	NA		NA
152	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Ada	0		SB
153	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	ada	1		SS
154	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	0		SS
155	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Menurun menjadi 30%	101,02		SS
156	11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Meningkat	NA		NA
157	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	ada	2		SS
158	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun	426 juta		SB
159	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Meningkat menjadi 80%	77		SB
160	11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	Meningkat/ada	1		SS
161	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	ada	1		SS
162	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)	NA		NA
163	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	20 ton per hari (skala nasional)	1392,58		SS
164	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Meningkat	0		SB
165	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Meningkat	0		BB
166	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Meningkat	NA		NA
167	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	ada	1		SS
168	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	0		SS
169	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Meningkat	11,6		SS
170	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	5,5 juta ha (skala nasional)	NA		NA
171	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	ada	NA		NA
172	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Meningkat	NA		NA

No	Indikator TPB		Target Nasional	Capaian		Kondisi Capaian
				2022	2023	
173	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Menurun	NA		NA
174	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Menurun	NA		NA
175	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	NA		NA
176	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Meningkat	NA		NA
177	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Menurun	NA		NA
178	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Menurun	NA		NA
179	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Menurun	NA		NA
180	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Meningkat menjadi 4,0	3,92		SB
181	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Meningkat	NA		
182	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65%	WTP	WTP	SS
183	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/ Kota: 50%	CC		SS
184	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Menjadi menjadi 80%	NA	NA	NA
185	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	Meningkatkan menjadi: Kementerian/Lembaga 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/ Kota: 45%	NA		NA
186	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/ Kota: 80%	NA		NA
187	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Meningkat	20		SB
188	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkat	4	3	SS
189	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Meningkat MENJADI 85 %	8.509		SS
190	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Meningkat menjadi 77,4%	NA	100	NA
191	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Meningkat menjadi 85%	98.65%	99,23	SS

No	Indikator TPB		Target Nasional	Capaian		Kondisi Capaian
				2022	2023	
192	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi	Meningkat	NA	NA	NA
		sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.				
193	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	ada	NA	NA	NA
194	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Meningkat	-	-	SS
195	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Di atas 12%	NA	NA	NA
196	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Meningkat	NA	NA	NA
197	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Meningkat menjadi: Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi; Perdesaan (10 Mbps) 49% rumah tangga dan 6% populasi	NA	NA	NA
198	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Meningkat menjadi: Perkotaan 100% populasi; Perdesaan 52% populasi.	NA	NA	NA
199	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Meningkat	79.7%		
200	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	ada	NA	NA	NA
201	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	ada	25	NA	SS
202	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Meningkat	-	NA	SS
203	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Meningkat	-	NA	SS
204	17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Meningkat	-	NA	SS
205	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Meningkat	NA	NA	NA
206	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	ada	ada	ada	SS
207	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Meningkat	-	ada	SS
208	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Meningkat	-	NA	SS

2.2 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengawasi daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Dari uraian di atas dapat dipetik kata kunci dari keuangan daerah adalah hak dan kewajiban. Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah berupa memungut pajak daerah, retribusi daerah atau sumber-sumber penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintahan di daerah. Reformasi keuangan daerah dapat dikatakan merupakan peluang terbesar sekaligus tantangan yang diperoleh pemerintah daerah dan DPRD, untuk menunjukkan kemampuan menggali dan mengelola anggaran daerah tanpa terlalu banyak campur tangan dari pemerintah pusat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan :

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah
- Fungsi APBD antara lain yakni otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- Prinsip-prinsip penganggaran diantaranya terkait dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Dalam penyusunan APBD didasarkan prinsip sebagai berikut :

- Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
- Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
- Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Dalam konteks penyusunan rancangan teknokratik RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 walaupun terjadi perubahan signifikan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, namun masih berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah. Sehingga analisis kinerja keuangan daerah akan disajikan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam bab ini disajikan gambaran kinerja dan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dalam lima tahun terakhir dan kerangka pendanaan proyeksi APBD beserta kebijakan pengelolaan keuangan daerah lima tahun mendatang. Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini.

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi tahun-tahun mendatang guna penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Kemampuan dan kemandirian pemerintah daerah dapat diukur dari pendapatan daerah. Kemampuan fiskal daerah yang baik akan mampu melaksanakan dan merealisasikan program-program pemerintah daerah. Oleh sebab itu Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang strategis dalam pembangunan daerah. Sehingga diperlukan kebijakan yang memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Pada tahun-tahun mendatang kebijakan keuangan daerah difokuskan pada kebijakan yang memperhatikan kapasitas fiskal yang utamanya memfokuskan pada pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk pemenuhan kebijakan belanja wajib, mengikat dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu difokuskan juga pada belanja yang memfokuskan kepada prioritas pembangunan daerah, isu-isu strategis terkait peningkatan ekonomi.

Selanjutnya pembiayaan pembangunan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan berkesinambungan dan tetap. Selain itu pembiayaan pembangunan mengedepankan prinsip akuntabilitas.

2.2.1 Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2019-2024

Analisis terhadap kinerja keuangan tahun anggaran 2019-2024 merupakan acuan bagi Pemerintah Kota Sawahlunto dalam memproyeksikan perencanaan pembangunan daerah di masa mendatang khususnya dalam memproyeksikan keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan tahun sebelumnya dapat diketahui rata-rata pertumbuhan dan kontribusi komponen pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pengukuran kemampuan keuangan daerah dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai indikator.

Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) merupakan indikator menganalisis kemampuan keuangan daerah yang diukur melalui kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah. Hal ini juga terkait dengan kemandirian keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto dalam membiayai pembangunan daerah. Perkembangan DOFD Kota Sawahlunto periode tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.173
Perkembangan Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kota Sawahlunto
Tahun Anggaran 2019-2024

Tahun	Pendapatan Daerah	PAD	DOFD (%)	Pertumbuhan DOFD (%)
2019	638.026.463.488,09	57.170.993.865,09	8,96	
2020	576.857.864.031,56	59.537.385.897,66	10,32	1,36
2021	598.040.864.187,45	51.475.336.271,45	8,61	-1,71
2022	620.647.226.213,62	66.920.994.265,62	10,78	2,18
2023	632.806.852.185,64	59.943.839.179,64	9,47	-1,31
2024	641.838.986.100,93	65.744.558.733,93	10,24	0,77
Rata-rata			9,89	

Sumber : LRA Audited 2019-2023 (2024 unaudited) (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa DOFD Kota Sawahlunto periode 2019-2024 rata-rata sebesar 9,89%. Secara keseluruhan DOFD Kota Sawahlunto menunjukkan DOFD yang masih sangat rendah atau sangat mengandalkan pendapatan dari penerimaan transfer baik transfer dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah lainnya.

Dari tabel diatas juga terlihat derajat desentralisasi fiskal daerah Kota Sawahlunto selama periode Tahun 2019-2024 cenderung menurun dan berfluktuasi. Derajat desentralisasi fiskal Kota Sawahlunto pada tahun 2019-2021 berada pada kategori sangat kurang, sedangkan pada tahun 2022-2024 cenderung meningkat

sehingga berada pada kategori kurang. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan kemampuan Kota Sawahlunto dalam melaksanakan desentralisasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kemampuan dan kemandirian pemerintah daerah dapat diukur dari pendapatan daerah. Kemampuan fiskal daerah yang baik akan mampu melaksanakan dan merealisasikan program-program pemerintah daerah. Oleh sebab itu kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang strategis dalam pembangunan daerah. Sehingga diperlukan kebijakan yang memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Pada tahun 2025-2029 kebijakan keuangan daerah difokuskan pada kebijakan yang memperhatikan kapasitas fiskal yang utamanya memfokuskan pada pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya konkrit yang dapat menggali dan mendiversifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, sehingga Kota Sawahlunto tidak terlalu bergantung pada pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat. Kondisi derajat desentralisasi fiskal Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir menunjukkan hasil yang belum optimal. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto untuk membiayai pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang diharapkan.

A. Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020-2024

Komponen APBD Pemerintah Kota Sawahlunto terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih daerah pada periode anggaran. Sedangkan pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.

Kinerja keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.174
Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto
Tahun Anggaran 2020-2024

Uraian	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
PENDAPATAN	576.857.864.031,56	598.040.864.187,45	620.647.226.213,62	605.314.638.183,64	641.838.986.100,93
PENDAPATAN ASLI DAERAH	59.537.385.897,66	51.475.336.271,45	66.920.994.265,62	59.943.839.179,64	65.744.558.733,93
Pendapatan Pajak Daerah	5.602.920.091,75	5.993.540.247,00	7.434.059.921,40	8.149.995.371,00	9.115.911.011,00
Pendapatan Retribusi Daerah	2.788.116.593,00	2.731.559.922,00	3.543.204.313,00	2.691.622.325,00	35.499.235.523,16
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.026.462.819,00	10.806.423.680,00	13.477.268.009,00	15.663.529.464,00	17.143.203.404,00
Lain-lain PAD yang Sah	39.119.886.393,91	31.943.812.422,45	42.466.462.022,22	33.438.692.019,64	3.986.208.795,77
PENDAPATAN TRANSFER	497.369.022.340,00	538.147.448.116,00	551.073.826.548,00	545.370.799.004,00	575.974.427.367,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	445.561.937.322,00	509.421.068.591,00	516.814.855.288,00	514.078.585.002,00	542.408.265.790,00

Uraian	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Bagi Hasil Pajak	8.109.612.714,00	28.949.393.592,00	36.873.646.167,00	34.188.263.466,00	32.709.006.000,00
Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	6.705.943.539,00				
Dana Alokasi Umum	347.498.276.000,00	341.393.550.000,00	340.799.183.261,00	357.769.014.914,00	396.423.949.217,00
Dana Alokasi Khusus	83.248.105.069,00	71.679.053.089,00	113.999.178.860,00	100.781.993.622,00	77.829.612.573,00
Dana Insentif Daerah	0,00	37.290.036.000,00	5.044.116.000,00		13.892.503.000,00
Dana Desa		30.109.035.910,00	20.098.731.000,00	21.339.313.000,00	21.553.195.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	28.631.236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Desa	28.631.236.000,00				
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	23.175.849.018,00	28.726.379.525,00	34.258.971.260,00	31.292.214.002,00	33.566.161.577,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	23.175.849.018,00	28.726.379.525,00	33.658.971.260,00	27.492.214.002,00	33.566.161.577,00
Bantuan Keuangan			600.000.000,00	3.800.000.000,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	19.951.455.793,90	8.418.079.800,00	2.652.405.400,00	0,00	120.000.000,00
Pendapatan Hibah	8.148.061.693,00	-	-	-	120.000.000,00
Pendapatan Lainnya	300.147.100,90	8.418.079.800,00	2.652.405.400,00		
Bantuan Keuangan	11.503.247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA	476.891.824.080,79	599.185.054.472,27	643.653.414.741,00	607.064.912.961,00	623.136.378.770,99
Belanja Operasi	397.517.138.143,22	444.009.727.121,27	468.731.239.357,00	465.316.924.124,00	483.711.172.548,99
Belanja Pegawai	274.835.588.932,00	240.644.834.014,00	259.237.850.902,00	246.879.933.557,00	275.738.214.701,00
Belanja Barang dan Jasa	115.269.632.648,50	186.235.989.165,00	190.660.034.017,00	189.393.433.222,00	186.955.981.790,99
Belanja Bunga	1.152.516.275,72	796.043.279,27	891.962.272,00	1.122.101.270,00	1.052.126.059,00
Belanja Hibah	3.309.250.287,00	13.936.860.663,00	14.110.242.166,00	24.475.356.075,00	17.587.499.998,00
Belanja Bantuan Sosial	2.950.150.000,00	2.396.000.000,00	3.831.150.000,00	3.446.100.000,00	2.377.350.000,00
Belanja Modal	63.699.147.392,57	85.611.045.938,00	116.514.679.424,00	84.381.971.361,00	73.075.789.709,00
Belanja Modal Tanah	800.006.000,00	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.000.506.074,70	20.880.045.268,00	17.666.803.013,00	12.084.173.858,00	35.246.025.880,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.216.284.417,82	14.804.687.034,00	41.516.117.751,00	35.635.719.133,00	12.043.741.217,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	8.025.081.127,05	49.683.258.936,00	57.231.799.760,00	36.392.598.160,00	24.991.542.821,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	657.269.773,00	243.054.700,00	99.958.900,00	269.480.210,00	794.479.791,00
Belanja Modal Dana BOS	0,00	0,00			
Belanja Modal Dana BLUD	0,00	0,00			
BeLanja Tak Terduga	15.675.538.545,00	2.655.984.000,00	294.991.005,00	836.646.211,00	2.479.496.967,00
BeLanja Tak Terduga	15.675.538.545,00	2.655.984.000,00	294.991.005,00	836.646.211,00	2.479.496.967,00
TRANSFER	67.371.834.124,00	66.908.297.413,00	58.112.504.955,00	56.529.371.265,00	63.869.919.546,00
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	877.460.000,00	885.532.503,00	1.046.900.955,00	954.510.748,00	857.466.546,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	566.650.000,00	558.532.503,00	637.792.686,00	620.462.410,00	622.798.506,00
Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	-	327.000.000,00	409.108.269,00	334.048.338,00	234.668.040,00

Uraian	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Transfer Bagi hasil Pendapatan Lainnya	310.810.000,00	-	-		
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	66.494.374.124,00	66.022.764.910,00	57.065.604.000,00	55.574.860.517,00	63.012.453.000,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	65.909.710.000,00	66.022.764.910,00	57.065.604.000,00	55.574.860.517,00	63.012.453.000,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	584.664.124,00				
Surplus/defisit	32.594.205.826,77	-1.144.190.284,82	-23.006.188.527,38	-1.750.274.777,36	18.702.607.329,94
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	13.393.565.535,47	44.095.564.695,58	38.719.707.744,76	12.116.356.260,00	8.772.197.707,02
Penggunaan SILPA	13.369.052.535,47	44.069.104.695,58	38.719.707.744,76	12.114.946.260,00	8.753.029.707,02
Pinjaman Dalam Negeri	-	-			
Penerimaan Kembali Piutang	24.513.000,00	26.460.000,00		1.410.000,00	19.168.000,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.918.666.666,66	4.231.666.666,00	3.636.666.668,00	1.369.666.668,00	1.166.666.666,00
Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah	752.000.000,00	3.000.000.000,00	2.000.000.000,00		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	1.166.666.666,66	1.166.666.666,00	1.166.666.668,00	1.166.666.668,00	1.166.666.666,00
Pemberian Pinjaman Daerah		65.000.000,00	470.000.000,00	203.000.000,00	0,00
Pembiayaan Netto	11.474.898.868,81	39.863.898.029,58	35.083.041.076,76	10.746.689.592,00	7.605.531.041,02
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	44.069.104.695,58	38.719.707.744,76	12.076.852.549,38	8.996.414.814,64	26.308.138.370,96

Sumber : LRA Kota Sawahlunto Tahun 2024-2024

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pendapatan dan belanja selama 5 tahun terakhir umumnya mengalami peningkatan. Hal yang berbeda terjadi pada tahun anggaran 2023 dimana baik pendapatan maupun belanja mengalami penurunan yang cukup signifikan. Namun pada tahun 2024, jumlah pendapatan dan belanja kembali mengalami kenaikan dikarenakan adanya pelaksanaan pesta demokrasi yakni pemilihan Kepala Daerah dan legislatif . Fluktuasi pendapatan dan belanja ini tentunya berdampak pada besaran surplus/ defisit dan SILPA.

1. Kinerja Pendapatan Daerah

Komponen pendapatan daerah Kota Sawahlunto terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pertumbuhan pendapatan daerah Kota Sawahlunto selama Tahun 2019-2024 dengan rata-rata pertumbuhan realisasi pertahun hanya 0,01%. Hal ini tentunya bukanlah angka yang menggembirakan. Realisasi capaian pendapatan daerah dan tingkat pertumbuhan dan anggaran selama periode Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada berikut ini.

Tabel 2.175
Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto
Tahun Anggaran 2019-2024

Tahun	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Anggaran (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2019	671.749.080.316,00	638.026.463.488,09	94,98		
2020	587.598.325.124,00	576.857.864.031,56	98,17	-12,53	-0,10
2021	598.439.921.262,00	598.040.864.187,45	99,93	1,85	0,04
2022	626.757.178.292,00	620.647.226.213,62	99,03	4,73	0,04
2023	625.185.465.083,00	605.314.638.183,64	96,82	-0,25	-0,02
2024	642.895.237.441,36	641.838.986.100,93	99,84	2,83	0,06

Sumber : LRA audited Kota Sawahlunto (data diolah)

Berdasarkan di atas realisasi pencapaian atas pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yakni sebesar 99,93%, sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 94,98%. Pada tahun anggaran 2024 realisasi mencapai 99,84% dan terdapat pertumbuhan pendapatan sebesar 2,83%. Dari sisi pertumbuhan anggaran atas pendapatan daerah berfluktuasi setiap tahunnya dan cenderung mengalami penurunan namun pada tahun 2024 telah menunjukkan tingkat pertumbuhan yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan keuangan atas pendapatan belum terlalu efektif, sehingga dibutuhkan intensifikasi dan ekstensifikasi atas pendapatan.

Perkembangan realisasi dan pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto tahun 2019 – 2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.176
Perkembangan Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota
Sawahlunto Tahun Anggaran 2019 – 2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024	%
PENDAPATAN	638.026.463.488,09	576.857.864.031,56	598.040.864.187,45	620.647.226.213,62	605.314.638.183,64	641.838.986.100,93	0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	57.170.993.865,09	59.537.385.897,66	51.475.336.271,45	66.920.994.265,62	59.943.839.179,64	65.744.558.733,93	0,05
Pendapatan Pajak Daerah	5.502.589.718,00	5.602.920.091,75	5.993.540.247,00	7.434.059.921,40	8.149.995.371,00	9.115.911.011,00	0,14
Pendapatan Retribusi Daerah	3.625.062.865,00	2.788.116.593,00	2.731.559.922,00	3.543.204.313,00	2.691.622.325,00	35.499.235.523,16	3,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.832.616.199,00	12.026.462.819,00	10.806.423.680,00	13.477.268.009,00	15.663.529.464,00	17.143.203.404,00	0,13
Lain-lain PAD yang Sah	37.210.725.083,09	39.119.886.393,91	31.943.812.422,45	42.466.462.022,22	33.438.692.019,64	3.986.208.795,77	-0,22
PENDAPATAN TRANSFER	571.997.269.623,00	497.369.022.340,00	538.147.448.116,00	551.073.826.548,00	545.370.799.004,00	575.974.427.367,00	0,01
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	495.141.841.033,00	445.561.937.322,00	509.421.068.591,00	516.814.855.288,00	514.078.585.002,00	542.408.265.790,00	0,03
Bagi Hasil Pajak	7.929.496.961,00	8.109.612.714,00	28.949.393.592,00	36.873.646.167,00	34.188.263.466,00	32.709.006.000,00	0,68
Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	17.783.593.665,00	6.705.943.539,00					
Dana Alokasi Umum	390.050.861.000,00	347.498.276.000,00	341.393.550.000,00	340.799.183.261,00	357.769.014.914,00	396.423.949.217,00	0,01
Dana Alokasi Khusus	76.333.533.741,00	83.248.105.069,00	71.679.053.089,00	113.999.178.860,00	100.781.993.622,00	77.829.612.573,00	0,05
Dana Insentif Daerah	3.044.355.666,00	0,00	37.290.036.000,00	5.044.116.000,00		13.892.503.000,00	
Dana Desa			30.109.035.910,00	20.098.731.000,00	21.339.313.000,00	21.553.195.000,00	

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	50.404.370.000,00	28.631.236.000,00	-	-	-		
Dana Penyesuaian	22.193.148.000,00	-	-	-	-		
Dana Alokasi Desa	28.211.222.000,00	28.631.236.000,00					
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	26.451.058.590,00	23.175.849.018,00	28.726.379.525,00	34.258.971.260,00	31.292.214.002,00	33.566.161.577,00	
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	26.451.058.590,00	23.175.849.018,00	28.726.379.525,00	33.658.971.260,00	27.492.214.002,00	33.566.161.577,00	0,03
Bantuan Keuangan				600.000.000,00	3.800.000.000,00		
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.858.200.000,00	19.951.455.793,90	8.418.079.800,00	2.652.405.400,00	-	120.000.000,00	
Pendapatan Hibah	8.858.200.000,00	8.148.061.693,00	-	-	-	120.000.000,00	
Pendapatan Lainnya	-	300.147.100,90	8.418.079.800,00	2.652.405.400,00			
Bantuan Keuangan		11.503.247.000,00	-	-	-		

Sumber : LRA audited Kota Sawahlunto (data diolah)

Perkembangan realisasi pendapatan daerah untuk masing-masing komponen dijelaskan sebagai berikut :

➤ Pendapatan Asli Daerah

Penyelenggaraan otonomi daerah pada prinsipnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Sumber pendapatan daerah harus seimbang dengan urusan pemerintah daerah, dengan mengoptimalkan potensi potensi pendapatan daerah. Pendapatan daerah antara lain diperoleh melalui Pajak dan Retribusi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan rata-rata selama Tahun 2019-2024 sebesar 0,02% dan tingkat realisasi PAD terhadap target yang ditetapkan dalam APBD selama lima tahun terakhir secara rata-rata mencapai 97,37%. Kondisi ini menunjukkan pertumbuhan PAD belum mencapai angka yang maksimal, walaupun secara realisasi menunjukkan perkembangan capaian yang optimal. Sehingga kapasitas fiskal pembangunan masih tinggi ketergantungannya terhadap pemerintah pusat dan provinsi dalam membiayai pembangunan daerah. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dituntut agar dapat meningkatkan PAD melalui penggalan potensi sumber-sumber potensi PAD secara efektif dan transformatif.

Perkembangan realisasi PAD, tingkat capaian, tingkat pertumbuhan anggaran dan tingkat pertumbuhan realisasi Tahun 2019-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.177
Perkembangan Realisasi PAD, Tingkat Capaian, Tingkat Pertumbuhan Anggaran dan Tingkat Pertumbuhan Realisasi Tahun 2019-2024

Tahun	Anggaran	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Anggaran (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2019	59.758.667.807,00	57.170.993.865,09	95,67		
2020	57.525.368.782,00	59.537.385.897,66	103,50	-0,04	0,04
2021	50.495.594.425,00	51.475.336.271,45	101,94	-0,12	-0,14
2022	69.315.857.768,00	66.920.994.265,62	96,54	0,37	0,30
2023	66.783.021.097,00	59.943.839.179,64	89,76	-0,04	-0,10
2024	67.929.260.956,36	65.744.558.733,93	96,78	0,02	0,10
Rata-rata				0,03	0,02

Sumber : LRA Audited 2019-2024 (data diolah)

Ditinjau dari sisi kontribusi komponen PAD terhadap PAD dalam rentang waktu 2019-2024 masih didominasi komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan rata-rata sebesar 55,78% disusul penerimaan pajak daerah sebesar 13,60%, retribusi daerah sebesar 4,49%. Sedangkan yang memberikan kontribusi paling kecil adalah pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 2,59%. Namun pada tahun 2024, retribusi daerah menjadi penyumbang terbesar dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah, hal ini dikarenakan adanya penyesuaian kode rekening pendapatan BLUD RSUD dari lain-lain pendapatan daerah yang sah menjadi retribusi daerah pada retribusi pelayanan kesehatan. Sedangkan untuk pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diperoleh dari deviden Bank Nagari dan BPR.

➤ **Pendapatan Transfer**

Untuk pendapatan transfer, pada penerimaan Dana Alokasi Umum terjadi peningkatan karena adanya kenaikan gaji PNS di tahun 2024 dan adanya penambahan alokasi DAU yang ditentukan peruntukannya. Untuk Dana Alokasi Khusus baik fisik maupun non fisik rata-rata terjadi penurunan. Berikut tabel perbandingan pendapatan transfer pusat ke daerah tahun 2022 – 2024 :

Tabel 2.178
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Uraian	2022	2023	2024
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	525.076.266.264,00	511.145.788.000,00	535.700.109.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	28.544.050.903,00	27.204.767.000,00	32.636.905.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	341.124.424.361,00	356.278.450.000,00	381.865.492.000,00
DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya		276.937.890.000,00	321.981.891.000,00
DAU Penggajian P3K		20.519.466.000,00	17.354.466.000,00
DAU Pendanaan Kelurahan		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
DAU Bidang Pendidikan		11.539.812.000,00	10.068.172.000,00
DAU Bidang Kesehatan		21.707.230.000,00	11.517.148.000,00
DAU Bidang Pekerjaan Umum		23.574.052.000,00	18.943.815.000,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	81.827.919.000,00	54.035.717.000,00	35.173.088.000,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	48.437.025.000,00	53.125.393.000,00	51.481.022.000,00
Dana Insentif Daerah (DID)	5.044.116.000,00	-	13.892.503.000,00
Dana Desa	20.098.731.000,00	20.501.461.000,00	20.651.099.000,00

Sumber : APBD 2022-2024

Perkembangan pendapatan transfer Tahun 2019-2024 cenderung stagnan, hal ini ditandai belum optimalnya tingkat capaian realisasi berada dibawah 100%. Hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan kebijakan pemerintah, terutama terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Perkembangan capaian realisasi pendapatan transfer Kota Sawahlunto Tahun 2019-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.179
Perkembangan Capaian Realisasi Pendapatan Transfer Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2024

Tahun	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Tingkat Capaian (%)
2019	601.357.412.509,00	571.997.269.623,00	95,12
2020	511.288.709.342,00	497.369.022.340,00	97,28
2021	539.205.869.867,00	538.147.448.116,00	99,80
2022	554.692.189.893,00	551.073.826.548,00	99,35
2023	558.402.443.986,00	545.370.799.004,00	97,67
2024	574.845.976.485,00	575.974.427.367,00	100,20
Rata-rata			98,23

Sumber : LKPD Audited Kota Sawahlunto 2019-2024(data diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa baik dari segi anggaran maupun realisasi pendapatan transfer mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Kondisi ini berimplikasi terhadap kapasitas riil keuangan daerah dalam membiayai belanja pembangunan daerah. Pada tahun anggaran 2024, realisasi pendapatan transfer mencapai 100,20% dan hal ini dikarenakan adanya penerimaan transfer TDF dari pemerintah pusat sebesar Rp15M.

- Dana Bagi Hasil

Perkembangan realisasi target dana bagi hasil Kota Sawahlunto Tahun 2019-2024 cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2020 mengalami capaian realisasi yang cukup rendah yakni pada kisaran 62,81% namun mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun-tahun setelahnya. Perkembangan capaian realisasi dana bagi hasil pajak/bukan pajak Kota Sawahlunto Tahun 2019-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.180
Perkembangan Capaian Realisasi Dana Bagi Hasil Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2024

Tahun	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Tingkat Capaian (%)
2019	29.142.131.173,00	25.713.090.626,00	88,23
2020	23.587.308.425,00	14.815.556.253,00	62,81
2021	17.743.485.795,00	28.949.393.592,00	163,16
2022	28.544.050.903,00	36.873.646.167,00	129,18
2023	32.682.958.000,00	34.188.263.466,00	104,61
2024	32.726.936.635,00	32.709.006.000,00	99,95
Rata-rata			91,33

Sumber : LKPD Audited Kota Sawahlunto 2019-2024 (data diolah)

Rata-rata realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil selama 5 (lima) tahun terakhir adalah 91,33%.

- Dana Alokasi Umum

Perkembangan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Sawahlunto Tahun 2019-2024 pada umumnya sesuai dengan target. Disisi lain, pertumbuhan cenderung fluktuatif dan pada tahun 2020 bertumbuh minus sebesar 0,11%. Kecendrungan minusnya pertumbuhan DAU ini sangat dipengaruhi adanya kebijakan Pemerintah dan bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pada tahun anggaran 2024, terdapat penerimaan DAU untuk PPPK yang tidak terealisasi 100%, namun secara keseluruhan realisasi mencapai 103,81% dikarenakan adanya penerimaan dana TDF sebesar Rp15M. Perkembangan capaian realisasi dan pertumbuhan DAU Kota Sawahlunto Tahun 2019-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.181
Perkembangan Capaian Realisasi dan Pertumbuhan Dana Alokasi Umum Kota Sawahlunto Tahun 2019-2024

Tahun	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2019	390.050.861.000,00	390.050.861.000,00	100,00	
2020	349.197.280.000,00	347.498.276.000,00	99,51	-0,11
2021	341.393.550.000,00	341.393.550.000,00	100,00	-0,02
2022	341.124.424.361,00	340.799.183.261,00	99,90	0,00
2023	356.278.450.000,00	357.769.014.914,00	100,42	0,05
2024	381.865.492.000,00	396.423.949.217,00	103,81	0,11
Rata-rata				-0,01

Sumber : LKPD Audited Kota Sawahlunto 2019-2024 (data diolah)

- Dana Alokasi Khusus

Perkembangan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Sawahlunto Tahun 2019-2024 cenderung stagnan. Kondisi ini mencerminkan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari DAK tidak sesuai dengan diharapkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional. Hal ini disebabkan, pada umumnya keterlambatan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dari Kementerian/Lembaga terkait dan terjadinya perubahan kebijakan tahun anggaran berjalan. Disisi lain, pertumbuhan cenderung fluktuatif dan pada tahun 2021 dan 2023 bertambah minus sebesar 0,14% dan 0,12%. Dan pada tahun 2024 mengalami penurunan yang signifikan yakni 0,23%. Kecenderungan minusnya pertumbuhan DAK ini sangat dipengaruhi adanya kebijakan Pemerintah dan bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Perkembangan capaian realisasi dan pertumbuhan DAK Kota Sawahlunto Tahun 2019-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.182
Perkembangan Capaian Realisasi dan Pertumbuhan Dana Alokasi Khusus Kota Sawahlunto Tahun 2019-2024

Tahun	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2019	91.145.220.000,00	76.333.533.741,00	83,75	
2020	87.652.909.750,00	83.248.105.069,00	94,97	0,09
2021	81.487.267.000,00	71.679.053.089,00	87,96	-0,14
2022	130.264.944.000,00	113.999.178.860,00	87,51	0,59

Tahun	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2023	107.161.110.000,00	100.781.993.622,00	94,05	-0,12
2024	86.654.110.000,00	77.829.612.573,00	89,82	-0,23
Rata-rata				0,04

Sumber : LKPD Audited Kota Sawahlunto 2019-2024(data diolah)

- Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi

Tabel 2.183
Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi
Tahun 2019-2024

Tahun	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2019	25.165.008.336,00	26.451.058.590,00	105,11	
2020	22.219.975.167,00	23.175.849.018,00	104,30	-0,12
2021	31.181.768.072,00	28.726.379.525,00	92,13	0,24
2022	29.615.923.629,00	34.258.971.260,00	115,68	0,19
2023	40.940.612.986,00	31.292.214.002,00	76,43	-0,09
2024	38.153.739.850,00	33.566.161.577,00	87,98	0,07
Rata-rata				0,05

Sumber : LKPD Audited Kota Sawahlunto 2019-2024(data diolah)

Untuk pendapatan transfer dari Pemerintah Propinsi, maka dapat dilihat mengalami fluktuasi dan selama 2 tahun terakhir mengalami penurunan.

- Lain-lain pendapatan yang sah

Tabel 2.184
Lain – lain Pendapatan yang Sah
Tahun 2019-2024

Tahun	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2019	10.633.000.000,00	8.858.200.000,00	83,31	
2020	18.784.247.000,00	19.951.455.793,90	106,21	1,25
2021	8.738.456.970,00	8.418.079.800,00	96,33	-0,58
2022	2.749.130.631,00	2.652.405.400,00	96,48	-0,68
2023	0,00	0,00	0,00	-1,00
2024	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	
Rata-rata				-0,17

Sumber : LKPD Audited Kota Sawahlunto 2019-2024 (data diolah)

Untuk lain-lain pendapatan yang sah, mengalami penurunan setiap tahunnya. Untuk tahun anggaran 2023, Kota Sawahlunto tidak ada anggaran dan realisasi untuk pendapatan lain-lain. Pada tahun anggaran 2024, terdapat anggaran dan realisasi hibah dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Nagari yang diperuntukkan untuk pengadaan sarana dan prasarana sekolah pada Dinas Pendidikan.

2. Kinerja Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Maka evaluasi realisasi belanja daerah sangat penting dalam melihat perkembangan kinerja pembangunan sesuai dengan perencanaan dan kebijakan daerah Kota Sawahlunto selama periode 2019-2024.

Belanja Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Sedangkan, Urusan Pemerintahan Pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah.

Untuk belanja daerah dialokasikan untuk 1) Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial; 2) Belanja Modal (BM) yang terdiri dari BM Tanah, BM Peralatan dan Mesin, BM Gedung dan Bangunan, BM Jalan, BM Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya; 3) Belanja Tak Terduga; 4) Belanja Transfer yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Perkembangan kinerja realisasi belanja daerah Tahun 2019-2024 cenderung cukup optimal karena capaiannya rata-rata sebesar 91,25% dan diikuti rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 0,03%. Perkembangan capaian realisasi dan pertumbuhan serta realisasi belanja daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.185
Perkembangan Capaian Realisasi, Pertumbuhan Anggaran dan Tingkat Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019-2024

Tahun	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
		(Rp Juta)		
2019	627.701.487.157,00	551.743.879.687,01	87,90	
2020	540.228.136.333,65	476.891.824.080,79	88,28	-0,14
2021	650.538.248.327,00	599.185.054.472,27	92,11	0,26
2022	682.809.902.738,00	643.653.414.741,00	94,27	0,07
2023	669.237.924.585,00	607.064.912.961,00	90,71	-0,06
2024	661.367.728.186,00	623.136.378.770,99	94,22	0,03
Rata-rata			91,25	0,03

Sumber : LKPD Audited Kota Sawahlunto 2019-2024 (data diolah)

Sedangkan pertumbuhan komponen belanja daerah Kota Sawahlunto periode 2019-2024 untuk pelayanan dasar belum menunjukkan peningkatan yang signifikan karena belanja modal bertumbuh secara rata-rata sebesar 0,11%. Sementara itu, pertumbuhan belanja operasi yang paling tinggi terdapat pada komponen belanja hibah yakni bertumbuh sebesar 0,99% dan diikuti oleh belanja barang dan jasa sebesar

0,16%. Tingginya belanja hibah pada tahun anggaran 2023 dan 2024 dikarenakan adanya hibah ke KPU dan TNI/Polri untuk pelaksanaan Pilkada serentak.

Lebih tingginya rata-rata pertumbuhan komponen belanja hibah dan belanja barang dan jasa dibandingkan dengan komponen belanja modal mencerminkan belum proporsionalnya alokasi belanja daerah terhadap pencapaian sasaran RPJMD Tahun 2019-2024.

Tabel 2.186
Perkembangan Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Komponen Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2019-2024

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
BELANJA	551.743.879.687,01	476.891.824.080,79	599.185.054.472,27	589.240.216.141,00	607.064.912.961,00	623.136.378.770,99	
Belanja Operasi	457.292.466.687,51	397.517.138.143,22	444.009.727.121,27	468.731.239.357,00	465.316.924.124,00	483.711.172.548,99	84,89
Belanja Pegawai	232.810.851.029,00	274.835.588.932,00	240.644.834.014,00	259.237.850.902,00	246.879.933.557,00	275.738.214.701,00	53,06
Belanja Barang dan Jasa	214.487.904.967,00	115.269.632.648,50	186.235.989.165,00	190.660.034.017,00	189.393.433.222,00	186.955.981.790,99	31,20
Belanja Bunga	1.251.297.942,51	1.152.516.275,72	796.043.279,27	891.962.272,00	1.122.101.270,00	1.052.126.059,00	0,59
Belanja Hibah	5.185.275.249,00	3.309.250.287,00	13.936.860.663,00	14.110.242.166,00	24.475.356.075,00	17.587.499.998,00	0,04
Belanja Bantuan Sosial	3.557.137.500,00	2.950.150.000,00	2.396.000.000,00	3.831.150.000,00	3.446.100.000,00	2.377.350.000,00	0,01
Belanja Modal	94.384.258.018,50	63.699.147.392,57	85.611.045.938,00	116.514.679.424,00	84.381.971.361,00	73.075.789.709,00	13,90
Belanja Modal Tanah	577.625.000,00	800.006.000,00	-	-	-		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.959.464.883,50	29.000.506.074,70	20.880.045.268,00	17.666.803.013,00	12.084.173.858,00	35.246.025.880,00	4,89
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.886.728.863,00	25.216.284.417,82	14.804.687.034,00	41.516.117.751,00	35.635.719.133,00	12.043.741.217,00	5,87
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	52.411.798.670,00	8.025.081.127,05	49.683.258.936,00	57.231.799.760,00	36.392.598.160,00	24.991.542.821,00	5,99
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	548.640.602,00	657.269.773,00	243.054.700,00	99.958.900,00	269.480.210,00	794.479.791,00	1,10
Belanja Modal Dana BOS	0,00	0,00	0,00				
Belanja Modal Dana BLUD	0,00	0,00	0,00				
Belanja Tak Terduga	67.154.981,00	15.675.538.545,00	2.655.984.000,00	294.991.005,00	836.646.211,00	2.479.496.967,00	0,14
Belanja Tak Terduga	67.154.981,00	15.675.538.545,00	2.655.984.000,00	294.991.005,00	836.646.211,00	2.479.496.967,00	0,14
TRANSFER	70.728.943.435,00	67.371.834.124,00	66.908.297.413,00	3.699.306.355,00	56.529.371.265,00	63.869.919.546,00	9,31
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	1.006.666.600,00	877.460.000,00	885.532.503,00	1.046.900.955,00	954.510.748,00	857.466.546,00	0,16
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	597.333.800,00	566.650.000,00	558.532.503,00	637.792.686,00	620.462.410,00	622.798.506,00	
Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	409.332.800,00	-	327.000.000,00	409.108.269,00	334.048.338,00	234.668.040,00	
Transfer Bagi hasil Pendapatan Lainnya		310.810.000,00	-	-			
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	69.722.276.835,00	66.494.374.124,00	66.022.764.910,00	2.652.405.400,00	55.574.860.517,00	63.012.453.000,00	9,15
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	69.171.227.892,00	65.909.710.000,00	66.022.764.910,00	2.652.405.400,00	55.574.860.517,00	63.012.453.000,00	
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	551.048.943,00	584.664.124,00					
Surplus/defisit	15.553.640.366,08	32.594.205.826,77	-1.144.190.284,82	-23.006.188.527,38	-1.750.274.777,36	18.702.607.329,94	

Sumber : LRA Audited 2019-2024 (data diolah)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa belanja pegawai merupakan belanja terbesar, hal ini dikarenakan kenaikan gaji dan tunjangan ASN serta penambahan jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebanyak 396 orang pada tahun 2024 dan 411 orang pada tahun 2023. Sedangkan untuk belanja barang dan jasa mengalami penurunan dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran.

3. Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan pemerintah Kota Sawahlunto terdiri dari :

- 1) Penerimaan pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.
- 2) Pengeluaran pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang;dan
- 3) Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran berikutnya, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan Anggaran.

Memanfaatkan pembiayaan daerah secara signifikan merupakan fokus kebijakan dalam proses pembangunan daerah, kecuali pemanfaatan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) tahun sebelumnya yang di gunakan untuk proses pembiayaan anggaran tahun anggaran selanjutnya. Rata-rata pertumbuhan SiLPA Tahun 2019-2024 tercapai 0,27%, sehingga berimplikasi terhadap pencapaian sasaran pembangunan. Cukup tingginya SiLPA tahun 2019–2023, hal ini disebabkan karena disamping adanya kebijakan penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien, juga terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Hal ini menjadi salah satu hambatan bagi SKPD dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan. Sedangkan rata-rata pertumbuhan sisa lebih pembiayaan anggaran berkorelasi dengan rata-rata pertumbuhan SiLPA. Perkembangan realisasi dan pertumbuhan pembiayaan daerah tahun 2019-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.187
Perkembangan Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2019-2024

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
PEMBIAYAAN							
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	12.937.426.797,11	13.393.565.535,47	44.095.564.695,58	38.719.707.744,76	12.116.356.260,00	8.772.197.707,02	
Penggunaan SILPA	4.848.420.336,05	13.369.052.535,47	44.069.104.695,58	38.719.707.744,76	12.114.946.260,00	8.753.029.707,02	0,37
Pinjaman Dalam Negeri	8.008.445.961,06	-	-				

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Penerimaan Kembali Piutang	80.560.500,00	24.513.000,00	26.460.000,00	-	1.410.000,00	19.168.000,00	- 0,23
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.122.014.627,72	1.918.666.666,66	4.231.666.666,00	3.636.666.668,00	1.369.666.668,00	1.166.666.666,00	0,11
Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah	5.946.902.000,00	752.000.000,00	3.000.000.000,00	2.000.000.000,00			0,41
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	9.175.112.627,72	1.166.666.666,66	1.166.666.666,00	1.166.666.668,00	1.166.666.668,00	1.166.666.666,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah			65.000.000,00	470.000.000,00	203.000.000,00		
Pembiayaan Netto	2.184.587.830,61	11.474.898.868,81	39.863.898.029,58	35.083.041.076,76	10.746.689.592,00	7.605.531.041,02	0,42
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	13.369.052.535,47	44.069.104.695,58	38.719.707.744,76	12.076.852.549,38	8.996.414.814,64	7.605.531.041,02	- 0,27

Sumber : LKPD Audited Kota Sawahlunto 2019-2024 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa dalam periode 2019-2024 Pemerintah Kota Sawahlunto mengalami defisit anggaran, namun dapat ditutupi oleh pembiayaan neto yang ada. Hal ini menunjukkan kondisi keuangan daerah selama lima tahun terakhir cenderung kurang optimal dalam memenuhi fiskal pembangunan. Sehingga berdampak terhadap pencapaian kinerja pembangunan daerah yang tidak dapat berjalan secara maksimal.

4. Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan atau kekayaan daerah pada akhir periode tertentu. Neraca daerah terdiri dari gambaran aset atau kekayaan daerah, kewajiban daerah, dan ekuitas atau modal daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah pada periode tertentu. Neraca daerah memberikan informasi penting kepada semua stakeholder terutama kepada manajemen Pemerintah Daerah, pihak legislatif maupun para kreditur/pemberi pinjaman serta masyarakat luas lainnya tentang jumlah aset atau hak yang harus diterima, kewajiban yang harus dibayar serta ekuitas yang dimiliki Pemerintah Daerah pada tanggal tertentu.

Elemen utama neraca Pemerintah Daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas. Setiap elemen utama neraca kemudian dijabarkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci. Perkembangan Neraca tersebut disusun berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini sesuai dengan Amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32, bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Perkembangan Neraca Daerah Kota Sawahlunto dan rata-rata pertumbuhannya Tahun Anggaran 2019-2024 menunjukkan kondisi relatif baik. Hal ini ditandai rendahnya rata-rata pertumbuhan aset sebesar 0,07 % dan rata-rata pertumbuhan ekuitas sebesar 0,07%. Rendahnya pertumbuhan aset disebabkan karena cukup tingginya pertumbuhan penyusutan aset tetap dan penyisihan investasi dana bergulir serta selama beberapa tahun terakhir realisasi belanja modal mengalami penurunan dikarenakan kondisi keuangan daerah. Kondisi ini mencerminkan relatif banyaknya jumlah aset tetap yang tidak bernilai ekonomis, sehingga membebankan terhadap kondisi keuangan daerah.

Perkembangan dan rata-rata pertumbuhan neraca Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2019-2024 dan rata-rata pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.188
Perkembangan dan Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Kota Sawahlunto
Tahun Anggaran 2019-2024

Uraian	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024	Pertumbuh an Rata-Rata (%)
ASET							
Aset Lancar	37.219.485.368,40	52.885.940.110,43	54.786.319.119,00	36.160.347.569,89	49.783.489.159,54	43.653.344.948,32	0,07
Investasi Jangka Panjang	101.115.725.996,06	102.267.209.148,56	104.963.129.655,56	104.370.563.330,81	103.892.572.695,94	103.284.082.189,94	0,004
Aset Tetap	610.763.954.775,30	802.873.919.535,35	809.890.893.290,38	825.021.532.206,20	831.245.506.526,73	864.749.808.339,58	0,08
Dana Cadangan							
Aset Lainnya	20.607.403.558,45	20.360.559.832,45	23.824.772.987,25	31.920.474.024,45	61.287.939.483,93	53.167.631.875,93	0,26
JUMLAH ASET	769.706.569.698,21	978.387.628.626,79	993.465.115.052,19	997.472.917.131,35	1.046.209.507.866,14	1.064.854.867.353,77	0,07
KEWAJIBAN DAN EKUITAS							
KEWAJIBAN							
Kewajiban Jangka Pendek	9.600.519.502,67	6.535.863.729,71	11.590.811.435,33	10.159.629.182,66	15.790.330.467,52	12.197.048.852,03	0,13
Kewajiban Jangka Panjang	19.424.375.712,52	17.105.192.770,14	9.333.333.111,03	8.166.666.441,03	6.999.999.773,00	5.833.333.109,03	-0,20
JUMLAH KEWAJIBAN	29.024.895.215,19	23.641.056.499,85	20.924.144.546,36	18.326.295.623,69	22.790.330.240,52	18.030.381.961,06	-0,08
EKUITAS							
SILPA							
Pendapatan yang ditangguhkan							
Cadangan Piutang							
Cadangan Persediaan							
Dana Untuk Pembayaran Utang Jk Pendek							
EDL Bukan Silpa							
Ekuitas Dana Investasi							
JUMLAH EKUITAS	740.681.674.483,02	954.746.572.126,94	972.540.970.505,83	979.146.621.507,66	1.023.419.177.625,62	1.046.824.485.392,71	0,07
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	769.706.569.698,21	978.387.628.626,79	993.465.115.052,19	997.472.917.131,35	1.046.209.507.866,14	1.064.854.867.353,77	0,07

Sumber : LKPD Audited Kota Sawahlunto 2019-2024(data diolah)

Berdasarkan neraca daerah di atas, maka dilakukan analisis terhadap neraca daerah untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Sedangkan rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang. Analisis

rasio likuiditas dianalisis menggunakan analisis rasio lancar dan rasio cepat dihitung dengan membandingkan antara asset lancar dengan kewajiban lancar. Sedangkan rasio cepat dihitung dengan membandingkan antara aset lancar dikurangi persediaan dengan kewajiban lancar.

Hasil perhitungan menunjukkan perkembangan kurang baik karena kedua rasio masih diatas 1, sedangkan analisis rasio solvabilitas yang bertujuan untuk melihat dan menganalisis kemampuan asset dalam memenuhi kewajiban entitas dimasa mendatang dan untuk melihat dan menganalisis komposisi sumber pendanaan entitas dan memenuhi kewajiban entitas dimasa yang akan datang . Hasil analisis rasio total hutang terhadap total aset dan Rasio Total hutang terhadap modal menunjukkan dibawah 1 per 100, yang menggambarkan bahwa asset mampu untuk memenuhi kewajiban dimasa mendatang.

Tabel 2.189
Perkembangan Rasio Keuangan Kota Sawahlunto
Tahun Anggaran 2019-2024 (%)

Uraian		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Likuiditas	Rasio Lancar	3,88	8,09	4,73	3,56	3,15	3,58
	Rasio Quick	3,67	7,98	4,43	3,24	3,05	3,05
Rasio Solvabilitas	Rasio total hutang terhadap total asset	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Rasio Total hutang terhadap modal	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Sumber : LKPD Audited Kota Sawahlunto 2019-2024 (data diolah)

B. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2019-2024

Dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, Pendapatan daerah dan besarnya sangat menentukan kemampuan daerah dalam melaksanakan program-program pembangunannya. Pendapatan daerah dirumuskan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat Pendapatan daerah diupayakan selalu meningkat seiring pertumbuhan indikator kondisi perekonomian daerah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Peningkatan pendapatan daerah dilakukan baik dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan baik dari potensi daerah sendiri maupun dari pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi.

Kebijakan pendapatan daerah adalah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah dan retribusi daerah menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut obyek pendapatan mencakup: a). Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, b). Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menurut obyek pendapatan yang terdiri

dari: a). Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, b). Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, c). Jasa Giro, d). Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, e). Pendapatan Bunga, f). Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, g). Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, h). Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan i). Pendapatan dari Pengembalian, j). Pendapatan BLUD, k). Pendapatan Denda atas Pelanggaran Daerah.

Permasalahan utama pendapatan daerah Kota Sawahlunto tahun 2019-2024 adalah :

1. Tingginya tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Sawahlunto terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Propinsi. Kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan hanya berkisar 8-11%. Pendapatan Kota Sawahlunto sangat bergantung pada penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.
2. Kebijakan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi dan stabilitas nasional menyebabkan adanya penyesuaian dan perubahan pada postur APBN yang berdampak pada penyaluran dana transfer dan dana desa. Ditambah dengan aturan pengelolaan keuangan yang bersifat dinamis dan mengalami perubahan aturan, misalnya kebijakan restrukturisasi anggaran.
3. Hak-hak pemerintah daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil belum optimal karena kurang akuratnya alokasi untuk pemerintah daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
4. Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah sebagai salah satu sumber penerimaan PAD. Berdasarkan data laporan keuangan selama beberapa tahun terakhir ini, maka dapat dilihat bahwa kontribusi retribusi pemakaian kekayaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sangat kecil. Perlu dilakukan kajian dan inventarisasi terhadap pengoptimalan pemanfaatan barang milik daerah demi peningkatan pendapatan. Masih banyaknya potensi pendapatan yang belum tergali serta aset barang milik daerah yang bersifat *idle* mengakibatkan kerugian bagi Kota Sawahlunto.
5. Belum optimalnya kinerja keuangan beberapa unit usaha daerah sehingga kontribusi terhadap PAD masih rendah. Pada Kota Sawahlunto, beberapa unit usaha belum memberikan kontribusi pendapatan terhadap pendapatan daerah. Penerimaan hanya diperoleh dari Bank Nagari berupa dividen atas penyertaan modal pada bank tersebut

Dari analisa permasalahan yang ada di atas maka kebijakan pendapatan daerah Kota Sawahlunto tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi, perbaikan administrasi perpajakan dan peningkatan kerja sama dengan *stakeholder*. Dengan adanya Undang- Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, maka Kota

- Sawahlunto perlu melakukan penyederhanaan sistem perpajakan dan retribusi sesuai amanat UU tersebut.
2. Peningkatan pelayanan retribusi daerah melalui pengembangan aplikasi sistem pemungutan secara elektronik dan *push android* yang menyajikan tagihan secara *real time* dan dukungan transaksi non tunai.
 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan untuk masyarakat dan lingkungan secara tepat dan kondusif melalui pelatihan, pelayanan yang mudah dan berkualitas serta edukasi dan hubungan masyarakat yang efektif.
 4. Peningkatan sarana dan prasarana yang secara langsung mendukung peningkatan pendapatan daerah.
 5. Peningkatan kualitas dan intensitas koordinasi serta kerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
 6. Penegakkan *law enforcement* berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya.
 7. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kawasan-kawasan tertentu secara bertahap, dengan cara menggunakan Peta Zona Nilai Tanah tahun terbaru sebagai pedoman untuk perhitungan Nilai Pasar dan Transaksi Jual Beli Tanah dan Bangunan.

Dari tahun 2018 -2019 realisasi pendapatan mengalami kenaikan, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan seiring dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang berdampak pada penurunan kegiatan ekonomi nasional dan daerah. Sehingga baik jumlah pendapatan asli daerah maupun pendapatan transfer mengalami penurunan. Hal ini berlanjut pada tahun anggaran 2021 dimana aktivitas masyarakat dan perekonomian masih dibatasi dengan kebijakan Perlakuan Pembatasan Kegiatan Perkantoran (PPKM) akibat masih belum melandainya pandemi covid-19. Hal ini tampak nyata pada pendapatan retribusi daerah akibat lumpuhnya beberapa kegiatan perekonomian.

Sedangkan pada tahun 2022, maka tampak terjadi peningkatan realisasi pendapatan daerah seiring dengan makin membaiknya tingkat perekonomian daerah yakni menjadi Rp. 620.582.717.802,53 atau terdapat peningkatan sebesar 3,77% dibandingkan tahun 2021. Sedangkan jika dilihat dari derajat otonomi fiskal daerah, maka diketahui bahwa Kota Sawahlunto berada pada tingkat yang sangat kurang, artinya sangat mengandalkan penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat dan provinsi. Sedangkan jumlah PAD yang dihasilkan sangat minim, sehingga Kota Sawahlunto dikategorikan sangat tidak mandiri dalam penyediaan anggaran.

1. Kebijakan Pengelolaan Belanja

Belanja Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Sedangkan, Urusan Pemerintahan Pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah.

Untuk belanja daerah dialokasikan untuk 1) Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial; 2) Belanja Modal (BM) yang terdiri dari BM Tanah, BM Peralatan dan Mesin, BM Gedung dan Bangunan, BM Jalan, BM Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya; 3) Belanja Tak Terduga; 4) Belanja Transfer yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan Belanja Daerah yang telah diambil oleh Pemerintah Kota Sawahlunto sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.
2. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.
3. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya.
4. Pemenuhan *mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - Alokasi anggaran pendidikan secara konsisten dan berkesinambungan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Pendidikan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan.
 - Alokasi anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan secara konsisten dan berkesinambungan serta memadai untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian SPM bidang kesehatan.
 - Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

5. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas.
6. Belanja daerah mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan untuk meningkatkan kemampuan pendapatan daerah.
7. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja baik dalam konteks daerah, perangkat daerah maupun program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
8. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Belanja daerah yang berasal dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menegaskan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

2. Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan pemerintah Kota Sawahlunto terdiri dari :

- a. Penerimaan pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.
- b. Pengeluaran pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang; dan
- c. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai sumber penerimaan

pada APBD Tahun Anggaran berikutnya, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan Anggaran.

Sementara itu, disisi kebijakan pembiayaan daerah Tahun 2019-2024, dibagi atas dua yaitu, penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Kebijakan dalam rangka penerimaan pembiayaan

- Melakukan efektivitas penggunaan dana sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang diprioritaskan untuk membiayai kegiatan lanjutan serta membiayai utang belanja tahun sebelumnya serta sekaligus dalam menutup defisit anggaran.
- Melakukan pencairan atas dana cadangan yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto
- Melakukan pemungutan dan penagihan atas piutang daerah.

Kebijakan dalam rangka pengeluaran pembiayaan

- Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Pemerintah Kota Sawahlunto untuk pembangunan pasar sesuai dengan perjanjian dengan International Bank For Reconstruct & Development Nomor : SLA-1240/DSMI/2011 tanggal 11 April 2011 selama 20 tahun hingga Tahun 2030.
- Pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat, yang pengelolaannya melalui UPTD Dana Bergulir pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Pemberian pinjaman kepada masyarakat ini diarahkan untuk meningkatkan dan menunjang pertumbuhan perekonomian daerah melalui fasilitasi permodalan bagi koperasi/UKM dan masyarakat.

3. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran belanja tidak langsung selama lima tahun terakhir tetap didominasi oleh komponen belanja operasi dengan rata-rata penggunaan sebesar 84,89%. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan PNS dan pensiunan PNS serta adanya penerimaan CPNS dan PPPK yang mengakibatkan meningkatnya belanja pegawai. Selain itu, proporsi realisasi belanja operasi lima tahun terakhir didominasi komponen belanja barang dan jasa yang ditandai dengan rata-rata penggunaan sebesar 31,20%. Sedangkan proporsi penggunaan belanja modal cenderung stagnan dari tahun ke tahun ditandai penggunaan rata-rata sebesar 13,90% dikarenakan adanya pembatasan belanja modal karena kondisi keuangan daerah. Kondisi ini mencerminkan penggunaan anggaran belum proporsional terhadap alokasi anggaran belanja daerah dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Perkembangan proporsi realisasi komponen belanja operasional dan belanja lainnya dari Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2019-2024, dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.190
Perkembangan Proporsi Realisasi Anggaran Belanja Kota Sawahlunto
Tahun Anggaran 2019-2024

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024	rata-rata
BELANJA	551.743.87 9.687,01	476.891.82 4.080,79	599.185.05 4.472,27	589.240.21 6.141,00	607.064.91 2.961,00	623.136.37 8.770,99	
Belanja Operasi	457.292.46 6.687,51	397.517.13 8.143,22	444.009.72 7.121,27	468.731.23 9.357,00	465.316.92 4.124,00	483.711.17 2.548,99	84,89
Belanja Pegawai	232.810.851 .029,00	274.835.588 .932,00	240.644.834 .014,00	259.237.850 .902,00	246.879.933 .557,00	275.738.214 .701,00	53,06
Belanja Barang dan Jasa	214.487.904 .967,00	115.269.632 .648,50	186.235.989 .165,00	190.660.034 .017,00	189.393.433 .222,00	186.955.981 .790,99	31,20
Belanja Bunga	1.251.297.9 42,51	1.152.516.2 75,72	796.043.279 ,27	891.962.272 ,00	1.122.101.2 70,00	1.052.126.0 59,00	0,59
Belanja Hibah	5.185.275.2 49,00	3.309.250.2 87,00	13.936.860. 663,00	14.110.242. 166,00	24.475.356. 075,00	17.587.499. 998,00	0,04
Belanja Bantuan Sosial	3.557.137.5 00,00	2.950.150.0 00,00	2.396.000.0 00,00	3.831.150.0 00,00	3.446.100.0 00,00	2.377.350.0 00,00	0,01
Belanja Modal	94.384.258 .018,50	63.699.147 .392,57	85.611.045 .938,00	116.514.67 9.424,00	84.381.971 .361,00	73.075.789 .709,00	13,90
Belanja Modal Tanah	577.625.000 ,00	800.006.000 ,00	-	-	-		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.959.464. 883,50	29.000.506. 074,70	20.880.045. 268,00	17.666.803. 013,00	12.084.173. 858,00	35.246.025. 880,00	4,89
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.886.728. 863,00	25.216.284. 417,82	14.804.687. 034,00	41.516.117. 751,00	35.635.719. 133,00	12.043.741. 217,00	5,87
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	52.411.798. 670,00	8.025.081.1 27,05	49.683.258. 936,00	57.231.799. 760,00	36.392.598. 160,00	24.991.542. 821,00	5,99
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	548.640.602 ,00	657.269.773 ,00	243.054.700 ,00	99.958.900, 00	269.480.210 ,00	794.479.791 ,00	1,10
Belanja Modal Dana BOS	0,00	0,00	0,00				
Belanja Modal Dana BLUD	0,00	0,00	0,00				
BeLanja Tak Terduga	67.154.981 ,00	15.675.538 .545,00	2.655.984. 000,00	294.991.00 5,00	836.646.21 1,00	2.479.496. 967,00	0,14
BeLanja Tak Terduga	67.154.981, 00	15.675.538. 545,00	2.655.984.0 00,00	294.991.005 ,00	836.646.211 ,00	2.479.496.9 67,00	0,14
TRANSFER	70.728.943 .435,00	67.371.834 .124,00	66.908.297 .413,00	3.699.306. 355,00	56.529.371 .265,00	63.869.919 .546,00	9,31
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	1.006.666. 600,00	877.460.00 0,00	885.532.50 3,00	1.046.900. 955,00	954.510.74 8,00	857.466.54 6,00	0,16
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	597.333.800 ,00	566.650.000 ,00	558.532.503 ,00	637.792.686 ,00	620.462.410 ,00	622.798.506 ,00	
Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	409.332.800 ,00	-	327.000.000 ,00	409.108.269 ,00	334.048.338 ,00	234.668.040 ,00	
Transfer Bagi hasil Pendapatan Lainnya		310.810.000 ,00	-	-			
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	69.722.276 .835,00	66.494.374 .124,00	66.022.764 .910,00	2.652.405. 400,00	55.574.860 .517,00	63.012.453 .000,00	9,15
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	69.171.227. 892,00	65.909.710. 000,00	66.022.764. 910,00	2.652.405.4 00,00	55.574.860. 517,00	63.012.453. 000,00	

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024	rata-rata
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	551.048.943,00	584.664.124,00					
Surplus/defisit	15.553.640,366,08	32.594.205,826,77	1.144.190,284,82	23.006.188,527,38	1.750.274,777,36	18.702.607,329,94	

Sumber : LKPD Audited Kota Sawahlunto 2019-2024(data diolah)

Disisi lain, penggunaan realisasi anggaran dialokasi kepada pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkembangan penggunaan realisasi anggaran tersebut, selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dan cenderung menurun seiring dengan kebijakan daerah.

Tabel 2.191
Perkembangan Realisasi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Belanja Tidak Langsung	301.032.488.864,00	310.525.453.292,00	308.137.884.755,00	317.844.102.390,00	304.025.662.586,00
Belanja Gaji dan Tunjangan	137.033.482.750,00	152.924.607.521,00	149.657.542.690,00	159.063.442.114,00	147.836.399.396,00
Tambahan Penghasilan PNS	87.962.530.425,00	83.675.937.049,00	82.883.452.739,00	91.358.314.594,00	89.817.988.977,00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	216.867.030,00	225.252.250,00	192.202.663,00	196.717.448,00	246.872.380,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	132.816.281,00	123.803.140,00	90.303.142,00	115.985.264,00	450.193.617,00
Gaji dan Tunjangan DPRD / KDH / WKDH	4.406.800.000,00	5.619.355.084,00	7.821.421.984,00	8.412.473.891,00	8.640.936.235,00
Belanja Bagi Hasil Pajak DaerahKepada Kabupaten/Kota	70.728.943.435,00	67.371.834.124,00	66.908.297.413,00	58.112.504.955,00	56.529.371.265,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	551.048.943,00	584.664.124,00	584.664.124,00	584.664.124,00	503.900.716,00
Pengeluaran Pembiayaan	10.426.410.570,23	2.319.182.942,38	2.058.628.940,00	2.058.628.940,00	2.288.767.938,00
Pembayaran pokok utang dan bunga	10.426.410.570,23	2.319.182.942,38	2.058.628.940,00	2.058.628.940,00	2.288.767.938,00
Total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat (a+b)	311.458.899.434,23	312.844.636.234,38	310.196.513.695,00	319.902.731.330,00	306.314.430.524,00

Sumber : LKPD Audited Kota Sawahlunto 2019-2023(data diolah)

4. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, penerimaan pinjaman, obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah anggaran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Perkembangan dan rata-rata pertumbuhan defisit riil anggaran Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2019-2024, terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.192
Perkembangan dan Rata-rata Pertumbuhan Defisit Riil Anggaran Kota
Sawahlunto Tahun Anggaran 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertum- buhan (%)
Pendapatan	638.026.463.488,0 9	576.857.864.031,5 6	598.040.864.187,4 5	620.647.226.213,6 2	605.314.638.183,6 4	641.838.986.100,9 3	-0,02
Belanja	551.743.879.687,0 1	476.891.824.080,7 9	599.185.054.472,2 7	589.240.216.141,0 0	607.064.912.961,0 0	623.136.378.770,9 9	0,03
Pengeluara n pembiayaa n	15.122.014.627,72	1.918.666.666,66	4.231.666.666,00	3.636.666.668,00	1.369.666.668,00	1.166.666.666,00	-0,62
Defisit / surplus riil	71.160.569.173,36	98.047.373.284,11	-5.375.856.950,82	27.770.343.404,62	-3.119.941.445,36	17.535.940.663,94	-1,11

Sumber : LKPD Audited Kota Sawahlunto 2019-2024(data diolah)

Sedangkan untuk realisasi SILPA Kota Sawahlunto selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.193
SILPA KOTA SAWAHLUNTO TA 2019-2024

No	Uraian	SILPA
1	Tahun Anggaran 2019	13.369.052.535,47
2	Tahun Anggaran 2020	44.069.104.695,58
3	Tahun Anggaran 2021	38.719.707.744,76
4	Tahun Anggaran 2022	12.076.852.549,38
5	Tahun Anggaran 2023	8.996.414.814,64
6	Tahun Anggaran 2024	26.308.138.370,96

Sumber : LKPD Audited Kota Sawahlunto 2019-2024 (data diolah)

Silpa Kota Sawahlunto selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi namun menunjukkan kecenderungan menurun.

Kerangka Pendanaan Tahun 2025-2030

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan program unggulan Kepala Daerah. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Kebijakan pendanaan merupakan salah satu bagian penting dari proses perencanaan keuangan suatu daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengklasifikan Pendapatan Daerah terbagi atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah, yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ;
2. Pendapatan Transfer, merupakan pendapatan yang terdiri dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (Bukan Pajak), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat, dan/atau Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan struktur belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 mengalami perubahan dibandingkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Struktur belanja daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 terdiri dari :

1. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
2. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
3. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

2.2.2 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029

Dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 ini, kebijakan perencanaan pendapatan berbeda dari tahun sebelumnya karena dengan berlakunya ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terjadi beberapa perubahan yang cukup mendasar dalam pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah. Selain mempedomani adanya perubahan ketentuan perundang-undangan dalam penyusunan kebijakan pendapatan daerah, kinerja keuangan tahun sebelumnya juga perlu menjadi perhatian. Berikut kebijakan pendapatan daerah Kota Sawahlunto untuk lima tahun mendatang adalah :

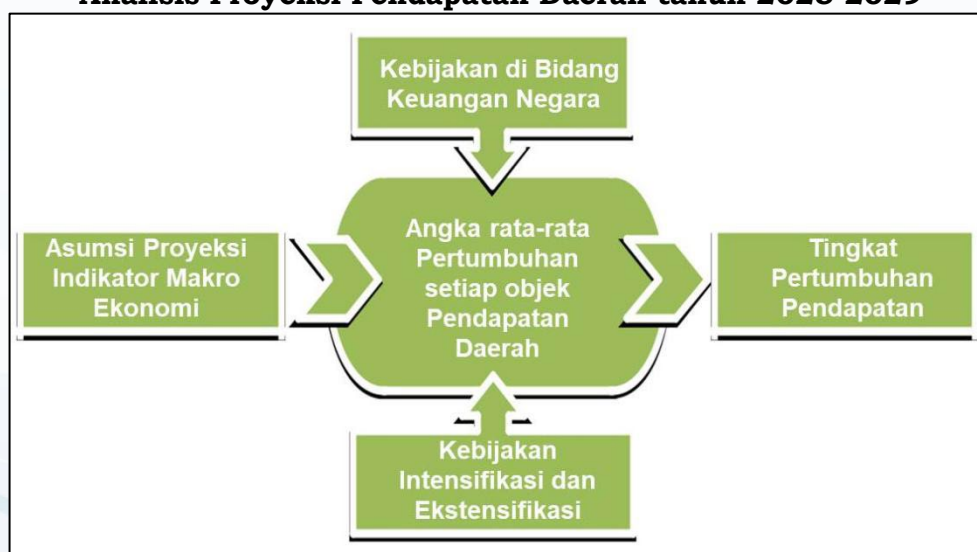
A. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Akan Diproyeksikan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting di dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi-potensi penerimaan daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan. Guna mengetahui pertumbuhan keuangan daerah diperlukan suatu analisis pengelolaan keuangan daerah masa lalu sebagai dasar di dalam penentuan proyeksi penerimaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi tahun-tahun mendatang,. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dengan pendapatan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Proyeksi pendapatan merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktor-faktor penghitungnya atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan. Sehingga proyeksi pendapatan daerah harus didapat nilai perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi. Dalam melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu dilakukan analisis mengenai pendapatan daerah yang dilakukan dengan kerangka pemikiran, sebagaimana disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 2.4
Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2025-2029



Sumber: PMDN Nomor 86 Tahun 2017

Dalam memproyeksikan pendapatan tahun 2025 digunakan format penyajian sesuai dengan PP Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Proyeksi pendapatan daerah dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan

dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

- a) Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu.
- b) Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/ laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain).
- c) Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
- d) Kebijakan dibidang keuangan negara dan daerah.

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penyelenggaraan otonomi daerah pada prinsipnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Sumber pendapatan daerah harus seimbang dengan urusan pemerintah daerah, dengan mengoptimalkan potensi potensi pendapatan daerah. Pendapatan daerah antara lain diperoleh melalui Pajak dan Retribusi.

Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terjadi beberapa perubahan dalam pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian juga terdapat jenis pajak baru bagi daerah yakni opsen pajak atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi.

Selain ini juga terdapat restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber perpajakan daerah yang baru dan penyederhanaan jenis retribusi. Restrukturisasi pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Hal ini bertujuan antara lain untuk :

- a. Untuk menyelaraskan objek pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;
- b. Menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;
- c. Memudahkan pemantauan pemungutan pajak terintegrasi oleh pemerintah daerah; dan
- d. Mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang tersebut mengamanatkan penyederhanaan retribusi yang dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan

retribusi perizinan tertentu. Jumlah atas jenis objek retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan antara lain :

- a. Agar retribusi yang akan dipungut pemerintah daerah dapat dipungut dengan efektif dengan biaya pemungutan yang lebih rendah.
- b. Mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban pemerintah daerah.

Dari uraian di atas maka disusunlah beberapa kebijakan pendapatan daerah terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah :

1. Peningkatan Pengelolaan Pajak Daerah
Pemerintah Kota Sawahlunto melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang kewajiban pajak serta meningkatkan sistem pemungutan pajak untuk meminimalkan kebocoran dan peningkatan kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat.
2. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Menggali potensi sumber daya alam dan sektor ekonomi lokal, seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan serta peningkatan layanan publik yang sifatnya berbayar sebagai salah satu upaya dalam peningkatan penerimaan bagi Pemerintah Kota Sawahlunto yang bersumber dari retribusi.
3. Pengembangan Infrastruktur
Membangun dan memperbaiki infrastruktur dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, transportasi, dan fasilitas umum serta meningkatkan aksesibilitas daerah untuk menarik investor dan wisatawan.
4. Kerjasama dan Kemitraan
Menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk investasi dalam proyek-proyek pembangunan dan juga menggali potensi kerja sama dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain untuk berbagi sumber daya dan pengetahuan.
5. Inovasi dan Digitalisasi sebagai bentuk Pemasaran Potensi Daerah
Menerapkan teknologi informasi untuk mempermudah proses administrasi, termasuk perpajakan dan perizinan serta membangun atau menyiapkan platform digital untuk mempromosikan keunggulan daerah dan potensi daerah serta mengikuti pameran dan kegiatan promosi yang bertujuan untuk menarik investor.
6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Menyediakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal serta mendorong kewirausahaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
7. Pengawasan dan Akuntabilitas
Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk membangun kepercayaan masyarakat dan menerapkan sistem audit yang

efektif untuk memastikan penggunaan dana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

2) Pendapatan Transfer

Untuk pendapatan transfer, pada penerimaan Dana Alokasi Umum terjadi peningkatan karena adanya kenaikan gaji PNS di tahun 2024 dan adanya penambahan alokasi DAU yang ditentukan peruntukannya. Untuk Dana Alokasi Khusus baik fisik maupun non fisik rata-rata terjadi penurunan.

Dari uraian di atas maka disusunlah beberapa kebijakan terkait dengan pendapatan transfer :

1. Mengupayakan peningkatan penerimaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai sumber penerimaan untuk membiayai belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat seperti gaji pegawai dan kebutuhan lainnya dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat.
2. Mengupayakan peningkatan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai sumber penerimaan kegiatan yang bersifat khusus dalam membangun Kota Sawahlunto sesuai dengan karakteristik dan kepentingan Kota Sawahlunto dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat.
3. Mengupayakan peningkatan Dana Insentif Fiskal Daerah untuk menambah sumber pendapatan dan penerimaan daerah dengan mengupayakan pencapaian indikator kinerja yang digunakan dalam penilaian.
4. Mengupayakan peningkatan dana BOS dan dana sertifikasi bagi tenaga pendidik sebagai upaya menjamin ketersediaan sumber-sumber dana DAK Non Fisik.
5. Mengupayakan peningkatan penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari pemerintah pusat dan provinsi untuk menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan Kota Sawahlunto.
6. Mengupayakan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi Sumatera Barat dan pihak ketiga lainnya.

Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) sumber yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Dalam proyeksi pendapatan daerah Kota Sawahlunto tahun 2025-2029 ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan angka rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah dan data keuangan APBD Tahun 2024 serta identifikasi potensi pajak dan retribusi daerah. Hal ini dilakukan agar proyeksi pendapatan daerah Kota Sawahlunto tidak terpaut jauh dengan pendanaan indikatif tahun yang terdekat.

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto pada tahun 2025-2029 direncanakan bersumber dari sumber-sumber sebagai berikut :

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- d. Lain-lain PAD yang sah.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Transfer Pemerintah Pusat, terdiri dari:

A. Dana Perimbangan :

- (1) Dana Bagi Hasil (DBH)
- (2) Dana Alokasi Umum (DAU)
- (3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
- (4) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

B. Dana Desa (DD)

Merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan desa.

C. Insentif Fiskal

Insentif fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar.

2. Transfer Antar Daerah

a. Pendapatan Bagi Hasil

Merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), pajak air permukaan dan pajak rokok dialokasikan sesuai Peraturan Gubernur tentang Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi .

b. Bantuan Keuangan

Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus yang diterima dari pemerintah propinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD Pemerintah Kota Sawahlunto sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

Berlandaskan kebijakan pendapatan daerah tersebut, sehingga proyeksi pendapatan Kota Sawahlunto Tahun 2025-2030 dengan mempertimbangkan analisis pendapatan daerah yang terukur, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.194
Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2025-2030

Kode Rekening	URAIAN	APBD 2025	PROYEKSI 2026	PROYEKSI 2027	PROYEKSI 2028	PROYEKSI 2029	PROYEKSI 2030
1	2	3	4	5	6	7	6
	PENDAPATAN DAERAH	580.022.893.950,00	579.534.759.608,88	599.657.825.455,41	636.561.873.899,68	638.314.519.157,55	707.583.817.336,90
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	75.593.282.944,00	77.105.148.602,88	99.228.214.449,41	137.632.262.893,68	140.384.908.151,55	209.654.206.330,90
4.1.01	Pajak Daerah	15.576.717.548,00	15.888.251.898,96	19.860.314.873,70	26.811.425.079,50	27.347.653.581,08	35.551.949.655,41
4.1.02	Retribusi Daerah	34.992.938.253,00	35.692.797.018,06	42.831.356.421,67	57.822.331.169,26	58.978.777.792,64	85.519.227.799,33
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.153.003.674,00	17.496.063.747,48	24.494.489.246,47	36.741.733.869,71	37.476.568.547,10	63.710.166.530,07
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.870.623.469,00	8.028.035.938,38	12.042.053.907,57	16.256.772.775,22	16.581.908.230,72	24.872.862.346,09
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	75.593.282.944,00	77.105.148.602,88	99.228.214.449,41	137.632.262.893,68	140.384.908.151,55	209.654.206.330,90
	PENDAPATAN TRANSFER	504.429.611.006,00	502.429.611.006,00	500.429.611.006,00	498.929.611.006,00	497.929.611.006,00	497.929.611.006,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	464.352.719.000,00	464.352.719.000,00	463.352.719.000,00	461.852.719.000,00	460.852.719.000,00	460.852.719.000,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	26.231.545.000,00	26.231.545.000,00	26.231.545.000,00	24.731.545.000,00	23.731.545.000,00	23.731.545.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	382.035.642.000,00	382.035.642.000,00	382.035.642.000,00	382.035.642.000,00	382.035.642.000,00	382.035.642.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	6.355.359.000,00	6.355.359.000,00	6.355.359.000,00	6.355.359.000,00	6.355.359.000,00	6.355.359.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	49.730.173.000,00	49.730.173.000,00	48.730.173.000,00	48.730.173.000,00	48.730.173.000,00	48.730.173.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	464.352.719.000,00	464.352.719.000,00	463.352.719.000,00	461.852.719.000,00	460.852.719.000,00	460.852.719.000,00
4.2.01.02	Dana Insentif Fiskal	8.752.114.000,00	6.752.114.000,00	5.752.114.000,00	5.752.114.000,00	5.752.114.000,00	5.752.114.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	21.612.927.000,00	21.612.927.000,00	21.612.927.000,00	21.612.927.000,00	21.612.927.000,00	21.612.927.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	30.365.041.000,00	28.365.041.000,00	27.365.041.000,00	27.365.041.000,00	27.365.041.000,00	27.365.041.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	9.711.851.006,00	9.711.851.006,00	9.711.851.006,00	9.711.851.006,00	9.711.851.006,00	9.711.851.006,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	9.711.851.006,00	9.711.851.006,00	9.711.851.006,00	9.711.851.006,00	9.711.851.006,00	9.711.851.006,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan						
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	9.711.851.006,00	9.711.851.006,00	9.711.851.006,00	9.711.851.006,00	9.711.851.006,00	9.711.851.006,00
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	504.429.611.006,00	502.429.611.006,00	500.429.611.006,00	498.929.611.006,00	497.929.611.006,00	497.929.611.006,00
	JUMLAH PENDAPATAN	580.022.893.950,00	579.534.759.608,88	599.657.825.455,41	636.561.873.899,68	638.314.519.157,55	707.583.817.336,90

Sumber : Data APBD Efisiensi (diolah)

Berdasarkan tabel diatas, dapat digambarkan bahwa jumlah pendapatan transfer diproyeksikan minimal sama atau lebih rendah dari angka pendapatan setelah efisiensi anggaran. Angka ini merupakan angka yang pesimis dikarenakan adanya kebijakan presiden terkait efisiensi belanja melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 ,KMK 29 tahun 2025 tentang Perubahan Rincian TKD Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ. Hal in berdampak pada pengurangan pendapatan DAK dan DAU Pekerjaan Umum, pengurangan belanja perjalanan dinas, kegiatan seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, seminar dan belanja rutin lainnya. Untuk belanja juga ditargetkan mengalami penurunan yang selaras dengan penurunan pendapatan. Namun Pendapatan Asli Daerah ditargetkan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dengan adanya pengurangan TKDD, maka daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan PAD dengan melakukan berbagai terobosan.

B. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dipergunakan sebagai wujud urusan publik baik urusan wajib dan urusan pilihan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, pengeluaran daerah yang dialokasikan secara tepat yang diperlukan oleh masyarakat akan memunculkan perkembangan yang positif dalam upaya peningkatan bagi kesejahteraan rakyat.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan, serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, efisien, efektif, akuntabel, berorientasi pada kinerja dan dapat bermanfaat banyak bagi masyarakat, serta dapat memberikan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah.

Beberapa kebijakan yang telah diambil untuk penggunaan alokasi belanja yaitu sebagai berikut :

1. Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.
2. Keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran
3. Konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horizontal
4. Anggaran yang disusun harus fokus pada program prioritas yang telah ditentukan dan bermanfaat besar bagi rakyat
5. Prinsip pelaksanaan kegiatan menjadi money follow program
6. Program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi SKPD dan bermanfaat banyak bagi masyarakat
7. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran dalam mengalokasikan anggaran
8. Penetapan tolak ukur dan target kinerja pada setiap kegiatan yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
9. Memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan belanja sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan belanja adalah :

1. Perencanaan Anggaran yang Tepat

Memastikan bahwa belanja daerah disusun berdasarkan prioritas kebutuhan seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan program pemberdayaan masyarakat melalui analisis kebutuhan yang lebih baik yang dapat memastikan kebutuhan anggarannya sehingga tepat sasaran.

2. Anggaran Berbasis Kinerja

Penerapan anggaran berbasis kinerja memungkinkan pemerintah daerah untuk mengevaluasi hasil dan dampak dari setiap kegiatan atau program yang dibiayai, sehingga dapat meningkatkan efektivitas belanja.

3. Penguatan Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah Kota Sawahlunto perlu memperkuat pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran atau pemborosan antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk memonitor jalannya program secara *real-time* serta mengoptimalkan peran Inspektorat Daerah dengan melibatkan lembaga audit eksternal seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk melakukan audit secara rutin guna memastikan bahwa belanja daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel.

4. *E-Government* dan *E-Procurement*

Penguatan implementasi platform *e-government* dan *e-procurement* untuk pengadaan barang/jasa dapat mengurangi potensi korupsi, meningkatkan transparansi, dan memastikan bahwa proses pengadaan melalui platform *e-government* dan *e-procurement* lebih efektif dan efisien.

5. *Monitoring* dan Evaluasi Program

Melakukan *monitoring* dan evaluasi guna mengetahui apakah program, kegiatan dan sub kegiatan yang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan output yang direncanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang selanjutnya akan digunakan untuk perbaikan anggaran serta program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan hal tersebut, beberapa kebijakan belanja daerah Kota Sawahlunto terdiri atas :

1. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

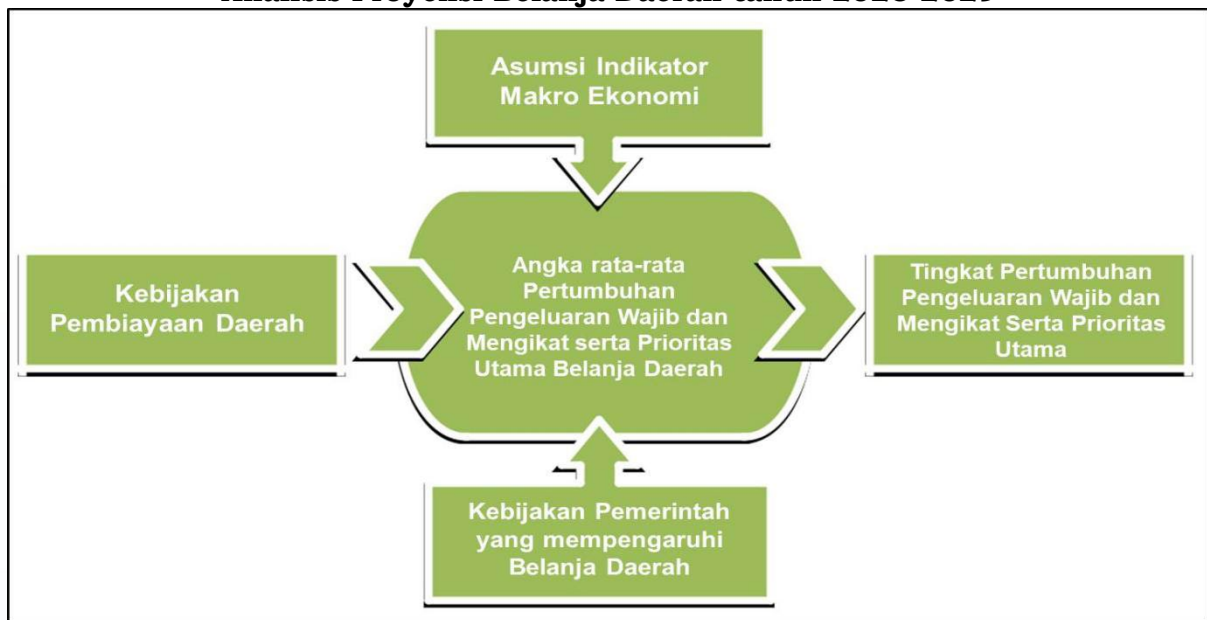
a. Belanja pegawai

- Pemerintah daerah berkomitmen tetap berupaya dalam mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja.

- Penganggaran gaji dan tunjangan memperhitungkan rencana kenaikan gaji dan tunjangan, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Mengalokasi penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan, jaminan kerja dan jaminan kematian.
- b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan termasuk barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan guna pencapaian RPD pada SKPD terkait.
 - c. Belanja Bunga digunakan untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman.
 - d. Belanja Subsidi digunakan untuk subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintah wajib dan pilihan kecuali ditentukan lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Hibah dianggarkan sebesar harga beli/ bangun ditambah seluruh belanja terkait langsung.
 - f. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk pemberian bantuan berupa uang/ barang untuk yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
2. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
 3. Belanja tidak terduga (BTT) merupakan pengeluaran anggaran untuk keperluan darurat termasuk mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 4. Belanja transfer merupakan pengeluaran kepada daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah.
 5. Hal-hal lain yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan APBD antara sebagai berikut :
 - a. Pemenuhan *Mandatory Spending*
 - b. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Analisis mengenai belanja daerah, didasarkan pada kondisi perekonomian yang digambarkan melalui serangkaian asumsi indikator makro ekonomi, juga mengacu pada kebijakan pemerintah, serta mempertimbangkan kebijakan pembiayaan daerah, yang kemudian diformulasikan sehingga diperoleh angka rata-rata pertumbuhan pengeluaran wajib, dan mengikat, serta prioritas utama. Dari rata-rata tersebut, akan diperoleh tingkat pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama, yang digunakan sebagai gambaran dasar untuk memperhitungkan bagian dari belanja daerah yang harus dipenuhi di masa yang akan datang, sebagaimana gambar berikut ini.

Gambar 2.5
Analisis Proyeksi Belanja Daerah tahun 2025-2029



Sumber: PMDN Nomor 86 Tahun 2017

Proyeksi belanja daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja operasi daerah. Dalam menentukan proyeksi belanja daerah dilakukan berdasarkan pendekatan yang berbeda untuk setiap jenis belanja.

Sedangkan kebijakan belanja daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan belanja wajib mengikat, belanja prioritas dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah serta belanja pendukung lainnya dengan arah kebijakan, sebagai berikut :

1. Mengupayakan atau membelanjakan sumber daya daerah yang lebih efisien, efektif, dan optimal dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kota Sawahlunto;
2. Penganggaran belanja operasi diprioritaskan untuk menunjang pelayanan dasar masyarakat;
3. Mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
4. Pemanfaatan belanja daerah mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional dan daerah setiap tahunnya sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Sawahlunto;

5. Mengefisienkan pengeluaran belanja yang bersifat umum dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah; dan
6. Melakukan analisis mengenai kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan pertimbangan manfaat yang akan didapatkan bagi masyarakat.

Proyeksi belanja Kota Sawahlunto tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.195
Proyeksi Belanja Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2025-2030

Kode Rekening	URAIAN	APBD 2025	PROYEKSI 2026	PROYEKSI 2027	PROYEKSI 2028	PROYEKSI 2029	PROYEKSI 2030
5	BELANJA DAERAH	601.314.487.571,00	577.868.092.939,88	597.991.158.786,41	634.895.207.230,68	636.647.852.488,55	705.917.150.667,90
5.1	BELANJA OPERASI	506.645.368.257,00	435.265.897.070,20	282.616.069.397,86	308.447.172.810,63	310.559.171.986,90	337.918.901.106,71
5.1.01	Belanja Pegawai	309.202.775.681,00	293.659.642.878,84	184.090.284.344,47	195.421.387.757,24	196.569.629.082,98	215.188.235.713,62
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.097.832.618,00	137.133.122.601,36	94.875.785.053,39	95.375.785.053,39	96.839.542.903,92	119.080.665.393,09
5.1.03	Belanja Bunga	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	8.184.759.958,00	1.823.131.590,00	1.500.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	1.000.000.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.010.000.000,00	1.500.000.000,00	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	506.645.368.257,00	435.265.897.070,20	282.616.069.397,86	308.447.172.810,63	310.559.171.986,90	337.918.901.106,71
5.2	BELANJA MODAL	25.025.329.284,00	75.525.835.869,68	248.298.729.388,56	259.371.674.420,05	260.512.320.501,65	301.421.889.561,19
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.128.218.840,00	7.270.783.216,80	22.332.424.924,38	32.555.415.840,29	33.203.299.140,60	34.566.687.772,92
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.281.800.000,00	51.307.436.000,00	106.619.634.090,49	106.276.121.502,34	108.001.643.932,38	145.161.676.811,03
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.945.692.630,00	16.264.606.482,60	118.650.000.000,00	119.836.500.000,00	118.589.667.609,70	120.961.460.961,89
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	669.617.814,00	683.010.170,28	696.670.373,69	703.637.077,42	717.709.818,97	732.064.015,35
	JUMLAH BELANJA MODAL	25.025.329.284,00	75.525.835.869,68	248.298.729.388,56	259.371.674.420,05	260.512.320.501,65	301.421.889.561,19
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.067.430.030,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.067.430.030,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	4.067.430.030,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	65.576.360.000,00	64.576.360.000,00	64.576.360.000,00	64.576.360.000,00	64.576.360.000,00	64.576.360.000,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.557.720.000,00	1.557.720.000,00	1.557.720.000,00	1.557.720.000,00	1.557.720.000,00	1.557.720.000,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	346.734.000,00	346.734.000,00	346.734.000,00	346.734.000,00	346.734.000,00	346.734.000,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	63.671.906.000,00	62.671.906.000,00	62.671.906.000,00	62.671.906.000,00	62.671.906.000,00	62.671.906.000,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	65.576.360.000,00	64.576.360.000,00	64.576.360.000,00	64.576.360.000,00	64.576.360.000,00	64.576.360.000,00
	JUMLAH BELANJA	601.314.487.571,00	577.868.092.939,88	597.991.158.786,41	634.895.207.230,68	636.647.852.488,55	705.917.150.667,90
	SURPLUS/DEFISIT	(21.291.593.621,00)	1.666.666.669,00	1.666.666.669,00	1.666.666.669,00	1.666.666.669,00	1.666.666.669,00

Sumber : Data APBD Efisiensi (diolah)

Proyeksi belanja daerah untuk 5 tahun kedepan dapat dilihat pada tabel diatas dimana jumlah pendapatan akan disesuaikan dengan jumlah belanja sehingga tidak terjadi defisit. Kota Sawahlunto harus berada pada posisi surplus dikarenakan adanya kewajiban Kota Sawahlunto untuk membayar hutang dan pemberian pinjaman dana bergulir. Kemudian pada tahun anggaran 2028 dan 2029 dialokasikan anggaran pelaksanaan pemilihan umum pada belanja hibah. Proyeksi belanja diatas juga untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah yang diamanatkan dalam Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yakni:

- a. Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD pada penyusunan proyeksi keuangan daerah Tahun 2027 sampai dengan Tahun 2030.

Untuk kewajiban pemenuhan belanja pegawai untuk periode 2026-2030 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.196
Belanja Pegawai Kota Sawahlunto
Tahun 2026-2030

No	Uraian	2026	2027	2028	2029	2030
1	Belanja Pegawai	267.111.605.878,84	157.542.247.344,47	168.873.350.757,24	170.021.592.082,98	188.640.198.713,62
2	Belanja Tunjangan Guru	26.548.037.000,00	26.548.037.000,00	26.548.037.000,00	26.548.037.000,00	26.548.037.000,00
	Total Belanja Daerah	577.868.092.939,88	597.991.158.786,41	634.895.207.230,68	636.647.852.488,55	705.917.150.667,90
	Rasio Belanja Pegawai	50,82	30,78	30,78	30,88	30,48

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa persentase belanja pegawai Kota Sawahlunto mulai tahun anggaran 2027 telah sesuai dengan ketentuan dimana batas maksimal belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling banyak adalah 30%.

- b. Pasal 147 ayat (1) dan (3) bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa, yang ditempatkan pada Belanja Modal pada penyusunan proyeksi keuangan daerah Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030.

Tabel 2.197
Proyeksi Pemenuhan Belanja Infrastruktur 2026-2030

No	Uraian	2026	2027	2028	2029	2030
1	Belanja Barang dan Jasa yang mendukung infrastruktur publik	21.500.000.000,00	21.500.000.000,00	21.500.000.000,00	21.500.000.000,00	21.500.000.000,00
2	Belanja Modal	75.525.835.869,68	248.298.729.388,56	259.371.674.420,05	260.512.320.501,65	301.421.889.561,19
3	Belanja Hibah yang mendukung Infrastruktur publik					
4	Total Belanja Infrastruktur publik	97.025.835.869,68	269.798.729.388,56	280.871.674.420,05	282.012.320.501,65	322.921.889.561,19
	Total Belanja Daerah	577.868.092.939,88	597.991.158.786,41	634.895.207.230,68	636.647.852.488,55	705.917.150.667,90
	Rasio Belanja	17%	45%	44%	44%	46%

Sumber : Data APBD Efisiensi (diolah)

Kewajiban daerah dalam pemenuhan belanja infrastruktur sebesar minimal 40%, maka berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase belanja infrastruktur Kota Sawahlunto telah berada diatas 40% atau telah memenuhi ketentuan peraturan. Hal ini tentunya berdampak pada alokasi belanja yang lain dan harus dilakukan penyesuaian terhadap belanja barang dan jasa, hibah, dan bantuan sosial.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan daerah dapat dikelompokkan atas 2 komponen, yaitu: (a) Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah: dan (b) Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah.

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan daerah yang mengakibatkan menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah diberi kewajiban untuk membayar kembali. Kebijakan ini dilakukan untuk menutup defisit ataupun untuk memanfaatkan surplus anggaran.

Komponen penerimaan pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLpa) sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Penerimaan, Penerimaan Piutang Daerah.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Pemerintah Kota Sawahlunto untuk pembangunan pasar sesuai dengan perjanjian dengan International Bank For Reconstruct & Development Nomor : SLA-1240/DSMI/2011 tanggal 11 April 2011 selama 20 tahun hingga Tahun 2030.
2. Pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat, yang pengelolaannya melalui UPTD Dana Bergulir pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Pemberian pinjaman kepada masyarakat ini diarahkan untuk meningkatkan dan menunjang pertumbuhan perekonomian daerah melalui fasilitasi permodalan bagi koperasi/ UKM dan masyarakat.

Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja daerah, maka perhitungan proyeksi pembiayaan daerah tahun 2025-2030, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.198
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2025-2030

Kode Rekening	URAIAN	APBD 2025	PROYEKSI 2026	PROYEKSI 2027	PROYEKSI 2028	PROYEKSI 2029	PROYEKSI 2030
6	PEMBIAYAAN DAERAH	21.291.593.621,00	(1.666.666.669,00)	(1.666.666.669,00)	(1.666.666.669,00)	(1.666.666.669,00)	(1.666.666.669,00)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	22.958.260.290,00	-	-	-	-	-
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	22.958.260.290,00	-	-	-	-	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	22.958.260.290,00	-	-	-	-	-

Kode Rekening	URAIAN	APBD 2025	PROYEKSI 2026	PROYEKSI 2027	PROYEKSI 2028	PROYEKSI 2029	PROYEKSI 2030
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.666.666.669,00	1.666.666.669,00	1.666.666.669,00	1.666.666.669,00	1.666.666.669,00	1.666.666.669,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah						-
6.2.03.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	1.166.666.669,00	1.166.666.669,00	1.166.666.669,00	1.166.666.669,00	1.166.666.669,00	1.166.666.669,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.666.666.669,00	1.666.666.669,00	1.666.666.669,00	1.666.666.669,00	1.666.666.669,00	1.666.666.669,00
	PEMBIAYAAN NETTO	21.291.593.621,00	(1.666.666.669,00)	(1.666.666.669,00)	(1.666.666.669,00)	(1.666.666.669,00)	(1.666.666.669,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,00)

Sumber : Data APBD Efisiensi (diolah)

Berdasarkan tabel diatas, dapat tergambar bahwa surplus digunakan untuk pembayaran hutang. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran (SiLPA) merupakan komponen yang dominan mempengaruhi Pembiayaan Bersih. SiLPA timbul disebabkan beberapa faktor, diantaranya; 1) sisa dana DAK dan Hibah yang belum terserap akibat adanya perubahan kebijakan pemerintah, 2) hutang pada pihak ketiga yang belum dibayarkan pada akhir tahun anggaran dan 3) efektivitas dan efisiensi belanja pembangunan.

D. Perhitungan Kerangka Pendanaan Tahun 2025-2030

Perhitungan kerangka pendanaan ini bertujuan untuk melihat kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaan. Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah tahun 2025-2030 terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.199
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2025- 2030

Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Pendapatan	580.022.893.950,00	579.534.759.608,88	599.657.825.455,41	636.561.873.899,68	638.314.519.157,55	707.583.817.336,90
2. Pencairan dana cadangan						
3. Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	22.958.260.290,00	-	-	-	-	-
Total Penerimaan	602.981.154.240,00	579.534.759.608,88	599.657.825.455,41	636.561.873.899,68	638.314.519.157,55	707.583.817.336,90
Dikurangi :						
4. Belanja pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama	402.821.131.634,00	437.778.505.417,52	500.982.040.402,03	523.386.088.846,29	525.674.976.253,63	585.203.151.943,81
5. Pengeluaran pembiayaan	1.666.666.669,00	1.666.666.669,00	1.666.666.669,00	1.666.666.669,00	1.666.666.669,00	1.666.666.668,00
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan daerah	198.493.355.937,00	140.089.587.522,36	97.009.118.384,39	111.509.118.384,39	110.972.876.234,93	120.713.998.725,09

Sumber : Data APBD Efisiensi (diolah)

Berdasarkan tabel diatas, tergambar bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah diproyeksikan berfluktuasi disesuaikan dengan pemenuhan visi dan misi kepala daerah. Namun mulai tahun 2027 maka pengeluaran wajib harus mengakomodir kebijakan pemenuhan belanja infrastruktur sehingga jumlah belanja wajib mengalami peningkatan. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Sawahlunto masih sangat tergantung kepada TKDD dari Pemerintah. Sedangkan kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka

pencapaian efektifitas program. Sedangkan proyeksi belanja wajib dan mengikat Pemerintah Kota Sawahlunto untuk lima tahun mendatang adalah :

Tabel 2.200
Proyeksi dan Arah Belanja Wajib dan Mengikat Kota Sawahlunto
Tahun 2025-2030

Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Belanja Tidak Langsung	400.504.464.965,00	435.461.838.748,52	498.665.373.733,03	521.069.422.177,29	523.358.309.584,63	582.886.485.274,81
Belanja Gaji dan Tunjangan	204.655.980.604,00	189.112.847.801,84	99.543.489.267,47	110.874.592.680,24	112.022.834.005,98	130.641.440.636,62
Tambahan Penghasilan PNS	96.475.727.697,00	96.475.727.697,00	76.475.727.697,00	76.475.727.697,00	76.475.727.697,00	76.475.727.697,00
Gaji dan Tunjangan DPRD / KDH / WKDH	8.071.067.380,00	8.071.067.380,00	8.071.067.380,00	8.071.067.380,00	8.071.067.380,00	8.071.067.380,00
Belanja Bagi Hasil Pajak DaerahKepada Kabupaten/Kota	65.576.360.000,00	65.576.360.000,00	65.576.360.000,00	65.576.360.000,00	65.576.360.000,00	65.576.360.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00
Belanja modal	25.025.329.284,00	75.525.835.869,68	248.298.729.388,56	259.371.674.420,05	260.512.320.501,65	301.421.889.561,19
Pengeluaran Pembiayaan	2.316.666.669,00	2.316.666.669,00	2.316.666.669,00	2.316.666.669,00	2.316.666.669,00	2.316.666.669,00
Pembayaran pokok utang dan bunga	2.316.666.669,00	2.316.666.669,00	2.316.666.669,00	2.316.666.669,00	2.316.666.669,00	2.316.666.669,00
Total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat (a+b)	402.821.131.634,00	437.778.505.417,52	500.982.040.402,03	523.386.088.846,29	525.674.976.253,63	585.203.151.943,81

Sumber : Data APBD Efisiensi (diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mulai tahun 2027, yang menjadi belanja wajib disamping pemenuhan belanja pegawai adalah peningkatan belanja infrastruktur.

Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

- Prioritas I

:

dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar
- Prioritas II

:

dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi RPJMD dengan fokus mendukung kedaulatan pangan, pengembangan pariwisata, perdagangan dan UMKM, pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, perlindungan sosial dan reformasi birokrasi.
- Prioritas III

:

dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya

Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.201
Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kota Sawahlunto Tahun 2025-2030

Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah	198.493.355.937,00	140.089.587.522,36	97.009.118.384,39	111.509.118.384,39	110.972.876.234,93	120.713.998.725,09
Penggunaan :						
Prioritas I	119.096.013.562,20	84.053.752.513,42	58.205.471.030,63	66.905.471.030,63	66.583.725.740,96	72.428.399.235,05
Prioritas II	79.397.342.374,80	56.035.835.008,94	38.803.647.353,76	44.603.647.353,76	44.389.150.493,97	48.285.599.490,04
Prioritas III						

Sumber : Data APBD Efisiensi (diolah)

E. Strategi Pencapaian Target Pendapatan

“Menjadikan Sawahlunto sebagai Kota Warisan Dunia yang Mandiri Secara Fiskal dan Tangguh secara Ekonomi”

Sawahlunto sebagai kota tambang bersejarah yang telah diakui UNESCO sebagai Warisan Dunia kini tengah memasuki babak penting dalam pembangunan daerahnya. Tak hanya sebagai kota wisata berbasis sejarah dan budaya, Sawahlunto juga ditantang untuk menjadi entitas fiskal yang otonom, adaptif terhadap perubahan, dan berdaya saing di tengah gejolak global.

Selama ini, komposisi pendapatan daerah Kota Sawahlunto masih sangat bergantung pada dana transfer pusat, dengan rasio PAD yang relatif rendah terhadap total pendapatan daerah. Ketergantungan ini melemahkan kapasitas pemerintah kota dalam menyusun kebijakan pembangunan secara fleksibel dan inovatif. Maka, strategi fiskal yang disusun harus bersifat holistik, tidak hanya menaikkan angka PAD, tetapi juga membangun sistem, sumber daya, dan kemitraan yang membuat pendapatan tersebut berkelanjutan, adil, dan berdampak luas.

Tujuan Strategi

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara konsisten dan progresif.
2. Mengurangi ketergantungan fiskal terhadap dana transfer dari pusat.
3. Mengelola dan mengoptimalkan aset fisik dan tak berwujud milik daerah secara produktif.
4. Membangun mekanisme pembiayaan alternatif (KPBU, CSR, diaspora, dana global) untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
5. Menjadikan pengelolaan sampah sebagai sumber nilai ekonomi melalui prinsip ekonomi sirkular.
6. Memperkuat tata kelola fiskal yang akuntabel, partisipatif, dan transparan.

Strategi dalam peningkatan pendapatan Kota Sawahlunto adalah :

- a. Pemerintah Daerah harus memiliki target kemandirian fiskal di atas 50 persen sebagai pijakan penting bagi keberlanjutan pembangunan daerah, maka perlu disusun secara komprehensif peta jalan kemandirian fiskal dengan fokus pada peningkatan PAD dari pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan sah.
- b. Reformasi kebijakan fiskal daerah perlu dilakukan dengan memperbaiki basis data perpajakan, melakukan intensifikasi penagihan, meningkatkan transparansi pelayanan, serta mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi melalui kanal digital yang terintegrasi
- c. Optimalisasi sumber PAD mencakup pembaruan data potensi pajak dan retribusi, pemanfaatan teknologi dalam monitoring pendapatan, dan mendorong setiap

OPD untuk menciptakan inovasi pelayanan publik berbayar yang sesuai dengan prinsip keadilan dan keterjangkauan.

- d. Pemanfaatan teknologi digital untuk memperbaiki pelayanan perpajakan akan menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, program literasi pajak untuk masyarakat dan pelaku usaha juga akan diperkuat agar kesadaran membayar pajak tumbuh secara alami tanpa tekanan administratif.
- e. Membangun dan mengembangkan ekosistem pembayaran digital yang terintegrasi melalui QRIS, ewallet, dan aplikasi mobile banking. Semua jenis pajak dan retribusi harus bisa dibayarkan melalui berbagai kanal digital untuk meningkatkan kenyamanan dan partisipasi masyarakat
- f. Melakukan implementasi dashboard monitoring pendapatan secara real time yang akan mempercepat deteksi terhadap potensi penyimpangan dan memudahkan pengambilan keputusan berbasis data. Transparansi ini sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah
- g. Membangun analisis data besar (big data analytics) untuk mengidentifikasi potensi pajak yang belum tergali. Tax intelligence berbasis data ini akan memungkinkan Pemerintah Daerah untuk menargetkan sektor-sektor yang memiliki potensi pajak tinggi namun masih belum dimaksimalkan. Dengan menggunakan alat analisis data dan model prediksi, pengelolaan pajak daerah akan menjadi lebih tepat sasaran, efisien, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi yang terus berubah.
- h. Performance-Based Revenue Targeting per OPD yakni setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam pengelolaan PAD memiliki key performance indicators (KPI) berbasis target pendapatan yang jelas dan terukur. Penerapan sistem penilaian kinerja yang berbasis pada pencapaian target PAD akan memastikan setiap OPD memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, sistem ini akan memudahkan Pemerintah Daerah untuk memantau, mengevaluasi, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak.
- i. Optimalisasi Pajak Daerah Kendaraan Bermotor, dengan:
 1. Meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor, yang saat ini hanya sekitar 50- 60%. Ini dapat dicapai dengan menggunakan sistem digital untuk mempermudah pembayaran dan pengawasan.
 2. Program edukasi kepada wajib pajak mengenai manfaat pembayaran pajak dan dampaknya terhadap pembangunan daerah.

3. Mengintegrasikan data kendaraan dengan sistem Samsat Online untuk mempermudah identifikasi kendaraan yang belum bayar pajak, serta meningkatkan efisiensi penagihan
- j. Meningkatkan sumber Pendapatan Lain, Terutama Aset, melalui memaksimalkan pengelolaan aset daerah yang belum optimal, seperti tanah dan bangunan milik daerah yang dapat disewakan atau dijadikan objek kerjasama dengan pihak ketiga
- k. Melakukan audit aset secara berkala untuk mengidentifikasi potensi aset yang dapat dikelola lebih produktif dan menguntungkan.
- l. Mengembangkan kerjasama dengan pihak swasta dalam bentuk public-private partnership (PPP) untuk mengelola aset daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
- m. Melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga, melalui :
 1. Mendorong kerjasama antara pemerintah daerah dengan sektor swasta dalam pengelolaan proyek besar yang dapat menghasilkan pendapatan baru, baik dalam bentuk pembangunan bersama maupun kerjasama untuk pengelolaan layanan publik.
 2. Menjalin kemitraan dengan lembaga internasional yang memiliki keahlian dalam pembiayaan pembangunan daerah atau program keberlanjutan.

Sesuai tema RPJPN 2025-2045 yang diberikan ke Provinsi Sumatera Barat adalah pengembangan pariwisata kelas dunia, ini menjadi peluang bagi Kota Sawahlunto dalam mewujudkan visi daerah Kota Sawahlunto tahun 2025-2045 yaitu untuk menjadikan kota wisata yang berkelas dunia. Ini diharapkan kedepannya akan meningkatkan kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri sehingga berdampak bagi perekonomian Kota Sawahlunto dengan mendorong pengembangan ekonomi kreatif masyarakat. Untuk jangka panjang akan menjadi daya tarik bagi akademisi kelas nasional maupun internasional untuk kegiatan riset maupun edukasi.

Dalam menghadapi peluang serta tantangan pada tahun-tahun mendatang tentu membuat daerah semakin optimis untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi secara konsisten dan membangun kerjasama dari seluruh komponen daerah. Pemerintah Pusat mengambil kebijakan pemulihan ekonomi yang holistik sedangkan Pemerintah Provinsi dan daerah membuat kebijakan yang teknis dan aplikatif. Pelaksanaan kebijakan tersebut harus didukung oleh semua pihak yang terlibat, baik itu di pusat, provinsi dan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi di daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Di samping itu, kebijakan APBD dapat disinergikan untuk mendorong

percepatan pemulihan ekonomi di daerah. Di samping itu, masyarakat dan pelaku usaha termasuk UMKM juga mempunyai peran yang strategis dalam mempercepat peningkatan ekonomi. Pemerintah telah memberikan kemudahan/stimulus fiskal dan moneter, seyogyanya disambut dengan positif oleh pelaku usaha Kota Sawahlunto dengan menggerakkan usahanya secara baik. Berikut adalah strategi Pemulihan ekonomi Kota Sawahlunto untuk tahun 2025-2029 :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan pada sektor-sektor yang terkait langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Sektor pelayanan yang akan ditingkatkan adalah Kemudahan dalam pelayanan perizinan.

Selain peningkatan kualitas pelayanan perizinan untuk jangka panjang, Pemerintah Kota Sawahlunto juga berkomitmen untuk tetap memberikan kemudahan-kemudahan terhadap pelayanan perizinan khususnya bagi sektor UMKM dan IKM. Kemudahan ini berupa pemangkasan birokrasi perizinan, penerbitan IMB dan lainnya. Pendirian Mall Pelayanan Publik yang sudah beroperasi serta memfasilitasi lebih dari 20 vendor pelayanan, mulai dari Pemerintah Daerah, Perbankan, Instansi Vertikal, dan pelayanan umum dapat memberikan kemudahan dan dampak positif bagi masyarakat Kota Sawahlunto.

Keberadaan mall Pelayanan publik yang telah diresmikan oleh Menteri PAN RB RI pada tahun 2022, diharapkan meningkatkan jumlah investasi di Kota sawahlunto. Kemudahan-kemudahan perizinan, ketersediaan bahan baku yang berkualitas, serta penyediaan iklim investasi yang kondusif juga diharapkan akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi. Hal lain yang menjadi perhatian adalah perlunya optimalisasi potensi dan pengelolaan pendapatan asli daerah.

- b. Dukungan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat

Selain memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh izin usaha, juga diupayakan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada pada masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya. Beberapa upaya tersebut antara lain :

1. Meningkatkan kualitas kegiatan-kegiatan pelatihan dan peningkatan keterampilan masyarakat.

Keterbatasan keterampilan masyarakat untuk berusaha merupakan salah satu permasalahan yang harus diselesaikan untuk menciptakan wirausahawan baru. Dinas PMPTSP dan Naker, Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan dan Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto telah berupaya secara ekstra untuk mengatasi ini. Pembekalan tenaga kerja atau pun pengangguran dengan keterampilan wirausaha yang tepat

guna akan membantu mereka untuk membuka usaha sendiri. Hal ini tentunya harus direncanakan dengan baik sampai kepada tahap membuka usaha dan pemasarannya.

2. Memberikan bantuan bibit ternak dan bibit tanaman

Sebagai sektor yang terbukti mampu bertahan ditengah pandemi Covid 19 ini, serta menjadi sektor yang masih dominan terhadap pembentukan perekonomian daerah, kebijakan-kebijakan daerah pada sektor pertanian ini tentunya akan lebih diprioritaskan. Pada tahun 2025-2030, pemberian bantuan bibit ternak dan koordinasi penyediaan bibit tanaman kepada masyarakat tetap akan dilanjutkan. Penyiapan calon penerima bantuan sampai kepada pelatihan bagi penerima bantuan tentunya harus menjadi perhatian utama, agar bantuan-bantuan disektor ini mampu menjadi solusi recovery ekonomi.

Dengan proyeksi jumlah penduduk yang bertambah disetiap tahunnya, ini menjadi tantangan yang luar biasa dalam ketersediaan pangan di Kota Sawahlunto untuk 20 tahun yang akan datang Estimasi konsumsi beras untuk Kota Sawahlunto di tahun 2025 sudah mengalami krisis pangan(beras) dengan asumsi konsumsi beras defisit sebesar (746,48 ton). Ini sangat perlu menjadi perhatian pemerintah dalam mencapai pemerataan ekonomi. Peningkatan produksi dan perbaikan/pengawasan jalur distribusi pangan menjadi langkah dalam menyikapi krisis pangan.

3. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pendampingan bagi masyarakat penerima bantuan.

Permasalahan lain yang dihadapi dalam peningkatan pendapatan masyarakat adalah keberlanjutan dari usaha masyarakat yang menerima bantuan program pemerintah. Dibutuhkan suatu reformasi birokrasi terhadap sistem pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan aktivitas masyarakat yang diberikan bantuan tersebut. Masyarakat yang terbiasa dengan upaya cepat saji, tidak akan memahami keberlanjutan dari suatu usahanya dimasa yang akan datang. Disinilah peran pemerintah melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk memastikannya.

c. Mengoptimalkan pengelolaan Dana Desa dan APBD untuk meningkatkan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemulihan ekonomi daerah ini harus mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang ada. Salah satu solusi sumber daya pembiayaan yang akan dioptimalkan adalah Alokasi dana desa. APBDes ditargetkan untuk mengalokasikan anggaran minimal 10% untuk pemberdayaan masyarakat

di Desanya. Kegiatan yang disarankan terfokus pada sektor riil yang langsung berdampak pada ekonomi masyarakat, pelaksanaan kegiatan ini tidak lepas dari rencana koordinasi yang matang dengan OPD Teknis di Kota Sawahlunto. Selain itu, juga dibutuhkan kebijakan yang jelas agar pelaksanaan program dan kegiatan ini betul-betul tepat sasaran dan mampu menyelesaikan permasalahan perekonomian ditengah-tengah masyarakat.

d. Peningkatan kualitas dan pengelolaan Objek wisata

Pembenahan dan penambahan objek wisata merupakan prioritas untuk dilaksanakan secara bertahap pada tahun 2025. Sektor wisata Kota Sawahlunto menjadi salah satu lokasi prioritas (Lokpri) Pemerintah Pusat dalam mengalokasikan anggaran ke daerah melalui Dana ALokasi Khusus (DAK) dengan tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP). Hal ini menjadi keuntungan yang sangat besar bagi Kota Sawahlunto untuk dapat memaksimalkan potensi tersebut dalam pembangunan Kota.

Kawasan Kandi sebagai locus pengembangan, dapat menjadi salah satu destinasi wisata baru yang mampu meningkatkan ekonomi Kota Sawahlunto. Meningkatnya Kunjungan wisatawan ke Kota Sawahlunto tentunya akan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya pelaku pariwisata. Dibutuhkan inovasi dan peningkatan kualitas pengelolaan pada objek wisata agar mampu bersaing dengan daerah lainnya. Kota Sawahlunto harus mampu mengoptimalkan status Warisan Budaya Dunia UNESCO pada WTBOS dan status Geopark Nasional Sawahlunto dalam menarik wisatawan.

e. Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan

Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Masyarakat Berbasis industri Kreatif yang Menunjang Kepariwisata, merupakan suatu upaya Pemerintah daerah dalam memanfaatkan kunjungan wisatawan ke Kota Sawahlunto. Hal ini juga sejalan dengan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, karena produk yang dihasilkan adalah produk yang berpangsa pasar wisata.

Selain itu, peningkatan kualitas dan daya saing produk unggulan juga akan diprioritaskan. Dengan telah adanya sentra Industri Kecil Menengah (IKM), diharapkan daya saing produk-produk industri unggulan Kota Sawahlunto dapat ditingkatkan. Hal ini diharapkan juga akan mendukung pengembangan sektor pariwisata yang ada. Selain itu, peningkatan aktivitas industri ini juga harus mampu diiringi dan mendukung peningkatan nilai tambah untuk sektor pertanian dan peternakan. Sektor pertanian dan peternakan juga akan menjadi perhatian karena sektor pertanian ini

merupakan sektor yang dominan mempengaruhi ekonomi masyarakat di Kota Sawahlunto.

Keberhasilan suatu pembangunan daerah tidak lepas dari kolaborasi dan partisipasi efektif dari banyak *stakeholders*. Oleh karena itu kolaborasi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan daerah disertai partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi kunci tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Sawahlunto telah dan akan dilakukan kerjasama serta kolaborasi efektif dalam mencapai tujuan pembangunan. Salah satunya melalui pemanfaatan dan pengaktifan anggaran APBN, APBD Provinsi Sumatera Barat, APBD Kota Sawahlunto dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan serta sumber pendanaan lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat.

2.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.3.1 Permasalahan Pembangunan

2.3.1.1 Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi

Masalah	Rincian Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya ekosistem usaha untuk UMKM, industri, dan perdagangan berkelanjutan	Belum optimalnya penataan pasar dan fungsi pasar sebagai pusat perdagangan	Kurangnya sarana dan prasarana pasar
		Belum optimalnya penataan pasar
		Persaingan antara pasar modern dan pasar tradisional
		Belum optimalnya pembinaan dan pelatihan terhadap pedagang untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan
		Belum berkembangnya pasar online dan ekspor untuk produk unggulan daerah
		Belum optimalnya Penataan pedagang kaki lima dan peningkatan sarana dan prasarana pedagang kaki lima
		Kurangnya tempat pemasaran-pemasaran produk unggulan di Kawasan strategis
	Menurunnya daya saing industri	Belum optimalnya fasilitasi kepada industri kecil dan menengah
		Belum optimalnya Pembinaan terhadap IKM unggulan dapat memiliki akses pasar pada e-commerce platform

Masalah	Rincian Masalah	Akar Masalah
		Belum berkembangnya klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi
		Belum optimalnya operasional sentra-sentra IKM yang susah ada
		Belum berkembangnya klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi
	Belum maksimalkan potensi koperasi	Masih rendahnya kapasitas pelaku usaha koperasi
		Masih kurangnya wirausaha masyarakat melalui Koperasi
		Masih kurangnya kemampuan wirausaha masyarakat melalui Koperasi
		Belum optimalnya Pembinaan penguatan kelembagaan koperasi, termasuk penyusunan anggaran dasar, manajemen, dan tata kelola
Masih rendahnya investasi yang mendorong pertumbuhan usaha dan produktivitas tenaga kerja daerah	Masih rendahnya investasi daerah	Belum optimalnya pengelolaan Aset Daerah yang menjadi peluang investasi
		Masih kurangnya penguatan Kapasitas dan Daya Saing Perusahaan Daerah
		Belum optimalnya promosi peluang investasi Kota Sawahlunto dengan kemitraan dengan perusahaan daerah dan swasta
		Belum optimalnya efisiensi dan Kemudahan Perizinan
	produktivitas tenaga kerja belum optimal	Belum optimalnya Kemitraan Strategis antara Perusahaan Daerah dan Investor dalam rangka

Masalah	Rincian Masalah	Akar Masalah
		pengembangan sektor-sektor potensial seperti pariwisata, energi terbarukan, pertambangan ramah lingkungan, dan ekonomi kreatif.
		Belum optimalnya kompetensi calon tenaga kerja melalui pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan dunia industri, dunia usaha, dan pasar kerja lokal maupun nasional
		Masih kurangnya pelatihan untuk disabilitas
		Belum optimalnya fungsi Balai Latihan
		Kerja Kota Sawahlunto
Masih rendahnya kemandirian desa dalam pengelolaan potensi lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa	Belum semua desa yang dapat mempercepat pembangunannya	Menurunnya semangat gotong royong dalam percepatan pembangunan kota
		Pengelolaan Sumber Daya/potensi daerah yang Kurang Optimal
		Keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas
		Keterbatasan akses infrastruktur
		Masih terbatasnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa
		Masih terbatasnya akses terhadap informasi, komunikasi
Belum optimalnya produktivitas dan cadangan pangan pertanian dan perikanan	Keterbatasan ketersediaan dan aksesibilitas pangan	Masih kurangnya Diversifikasi produk pangan lokal bernilai tambah
		Belum Optimalnya Lumbung Pangan Masyarakat

Masalah	Rincian Masalah	Akar Masalah
		dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
		Belum kuatnya jejaring antarwilayah dan kerja sama antarprovinsi dalam perdagangan pangan
		Belum optimalnya Pemantauan fluktuasi harga komoditi pangan
		Masih kurangnya ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal
		Belum optimalnya dukungan agroindustri skala mikro: pengolahan pangan, produk olahan hortikultura, pertanian dan perkebunan
	Belum berkembangnya sektor pertanian berbasis kawasan dan komoditas bernilai ekonomi tinggi	Belum adanya daerah kawasan komoditi khusus bernilai ekonomi tinggi
		Belum adanya Pemetaan komoditi unggulan daerah
	Belum optimalnya Peningkatan produksi/produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian serta kelautan dan perikanan	Belum optimalnya Peningkatan produksi/produktivitas Peningkatan varietas tanaman dan bibit di Kebun Buah Kandi yang mencirikan kekhasan di Kota Sawahlunto
		Masih kurangnya sarana dan prasarana Kebun Buah Kandi sebagai destinasi wisata dan eduwisata
		Belum optimalnya Peremajaan kembali tanaman perkebunan dan hortikultura terutama tanaman lokal di Kota Sawahlunto
		Belum optimalnya Pendampingan penyusunan RDKK dan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi

Masalah	Rincian Masalah	Akar Masalah
		Belum adanya Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS), Perangkat Uji Tanah Kering (PUTK), fasilitasi saprodi
		Belum adanya Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS), Perangkat Pemetaan kesesuaian lahan berdasarkan potensi dan kesesuaiannya untuk ditanami tanaman tertentu
		Belum optimalnya operasionalisasi Rumah Potong Hewan (RPH) Air Dingin sebagai standar RPH bersertifikasi halal dalam rangka mendukung sertifikasi halal produk-produk olahan daging
		Belum optimalnya Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Usaha Tani
		Belum optimalnya Peningkatan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis
		Belum optimalnya Pencegahan dan vaksinasi hewan liar
	Belum optimalnya Pengembangan teknologi budidaya perikanan	Belum optimalnya Peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian
		Belum optimalnya Peningkatan budidaya perikanan

2.3.1.2 Belum Optimalnya Pengelolaan Tata Pemerintahan yang Berbasis IT

Masalah	Rincian Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan digital yang terintegrasi dan responsif dalam mendukung transparansi	Belum optimalnya Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Masih kurangnya penyediaan akses internet gratis bagi masyarakat di ruang publik seperti taman, objek wisata, terminal, dan tempat ibadah
		Masih kurangnya layanan perluasan infrastruktur komunikasi untuk mengatasi daerah blank spot di Sawahlunto
		Masih kurangnya Pemanfaatan TIK untuk meningkatkan partisipasi masyarakat
		Masih kurangnya bangunan daerah sulit signal harus diperbaiki kualitas signal nya atau dengan pengadaan Tower
		Belu adanya satu Server dan pengadaan Command Centre
		Belum optimalnya infrastruktur TIK seperti jaringan internet, fasilitas telekomunikasi, dan perangkat keras pendukung
		Masih kurangnya pengembangan industri digital, startup, dan e-commerce melalui berbagai program dan layanan
		Masih kurangnya pemanfaatan TIK untuk mempromosikan potensi pariwisata dan produk lokal ke seluruh dunia
		Masih kurangnya infrastruktur digital yang

Masalah	Rincian Masalah	Akar Masalah
		berkualitas dan berkelanjutan setiap ASN harus dilengkapi dengan PC
	Masih kurangnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Belum optimalnya penerapan dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
		Masih kurangnya jaminan keamanan informasi dan pembatasan akses bagi pengguna internet di ruang publik khususnya terhadap konten-konten yang tidak sesuai
		Masih kurangnya Pengamanan infrastruktur TIK
		Belum optimalnya Edukasi Keamanan SPBE, Satu Server dan pengadaan Command Centre, Layanan Kesehata Digital yang Optimal Keamanan Cyber Pemerintahan
		Belum optimalnya pengintegrasian data, pelaporan dan penilaian atas kinerja aparatur pelaksana yang akuntabel.
	Masih kurangnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional	Belum optimalnya koordinasi dalam Forum data
		Belum optimalnya fungsi wali data
Belum optimalnya pelayanan pubik yang efektif dan efisien	Belum optimalnya digitalisasi layanan publik yang terintegrasi dan terpadu	Belum optimalnya peningkatan kualitas dan ketersediaan data dan informasi kependudukan

2.3.1.3 Belum Optimalnya Pengelolaan Infrastruktur Penunjang untuk kesejahteraan Masyarakat

Masalah	Rincian Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh bencana	Belum optimalnya peningkatan pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas	Peningkatan kualitas dokumen lingkungan dan laporan pengawasan lingkungan hidup
		Belum optimalnya pelestarian lingkungan dengan meningkatkan pengelolaan sampah dengan sistem yang lebih baik
	Belum optimalnya pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	Belum optimalnya kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana yang meliputi pemetaan risiko bencana, perencanaan penanggulangan bencana, peningkatan sistem peringatan dini dan infrastruktur kesiapsiagaan
		Belum optimalnya tata kelola kesiapsiagaan terhadap bencana yang meliputi kemampuan tanggap darurat antar berbagai pihak, kepedulian dan kesiapsiagaan masyarakat, sinkronisasi dokumen perencanaan daerah (RTRW, RPJPD, dan RPJMD) dengan Rencana Penanggulangan Bencana, serta sinkronisasi data kebencanaan daerah dengan data nasional (BNPB) dan K/L terkait.
	Masih kurangnya sarana prasarana kebakaran	Masih kurangnya kualitas SDM Petugas Kebakaran
		Masih kurangnya sarana prasarana kebakaran
Keterbatasan Aksesibilitas/Konektivitas Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas	Belum optimalnya kelestarian dan pendayagunaan sumber daya air	Belum optimalnya Peningkatan potensi-potensi sumber daya air : Pembangunan Embung Lurah Bomben Desa Kolok Nan Tuo Kota Sawahlunto,

Masalah	Rincian Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya Normalisasi/ Restorasi Sungai Kali Hitam Kota Sawahlunto untuk mencegah terjadinya banjir
	Belum optimalnya Akses Air Minum Perpipaan	Belum optimalnya Pengembangan SPAM Perkotaan Sawahlunto
	Masih kurangnya Infrastruktur Sanitasi	Masih kurangnya akses masyarakat terhadap sanitasi layak
	Belum optimalnya Kualitas drainase perkotaan, infrastruktur permukiman, bangunan gedung	Belum optimalnya sistem drainase perkotaan
		Belum optimalnya penataan gedung-gedung perkantoran
	Belum optimalnya Pemantapan kondisi infrastruktur terutama jalan dan jembatan	Belum optimalnya Peningkatan kualitas Jalan Kota
		Belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas untuk pengembangan wilayah
	Belum optimalnya Pembangunan kawasan perumahan yang memenuhi standar hunian layak dan ramah lingkungan	Belum adanya Mapping digitalisasi RTRW
		Belum adanya Pembangunan Rumah Murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan Milenial di kawasan perkotaan
		Masih kurangnya Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) di kawasan Kota Lama
	Keterbatasan Percepatan status lahan untuk pembangunan	Keterbatasan Penyelesaian status tanah pemerintah,

Masalah	Rincian Masalah	Akar Masalah
	Keterbatasan kapasitas dan kualitas transportasi darat	Belum optimalnya Pengelolaan penerangan Jalan umum
		Masih kurangnya Perlengkapan Jalan (Warning Light, Guard Rail, Cermin Tikungan (Safety Mirror), Rambu Standar, RPPJ (Wisata), Zona Selamat Sekolah (ZOSS), Marka Jalan)

2.3.1.4 Belum optimalnya ketahanan sosial budaya dan agama untuk menciptakan masyarakat yang harmonis

Masalah	Rincian Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya ketahanan Sosial kehidupan beragama yang menjunjung nilai toleransi, kerukunan dan moderasi beragama	Belum optimalnya Penerapan Nilai-nilai Agama dan Pancasila dalam kehidupan masyarakat	Belum optimalnya Penguatan kolaboratif lintas sektor dalam mewujudkan desa BERSINAR (Bersih Narkoba)
		Belum optimalnya peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam meningkatkan kerukunan intra antar umat beragama
		Belum optimalnya pembekalan bagi aparaturnya dan masyarakat terkait Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan penyakit masyarakat lainnya
		Belum optimalnya Pemberdayaan remaja dan anak melalui forum generasi muda untuk pencegahan kenakalan remaja dan pembentukan karakter
	Masih kurangnya rasa aman dan nyaman	Belum optimalnya Penguatan koordinasi,

Masalah	Rincian Masalah	Akar Masalah
	masyarakat	kelembagaan, dan peran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan mencegah penyakit masyarakat
		Belum optimalnya peran forum-forum strategis daerah: Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam memediasi isu-isu sensitif seperti intoleransi, diskriminasi dan konflik sosial
	Memperluas tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam meningkatkan jumlah objek pemajuan kebudayaan	Belum optimalnya pelestarian tradisi lokal, kearifan budaya, dan nilai-nilai keagamaan yang menjadi identitas Sawa
		Belum optimalnya Pembinaan untuk pengkaderan ninik mamak
		Belum optimalnya perkembangan komunitas seni tradisional dan modern melalui pendampingan, pelatihan, dan fasilitasi ruang kreatif
		Masih kurangnya kemitraan antara seniman, UMKM lokal, dan investor (termasuk BUMN/BUMD) untuk komersialisasi budaya
		Masih kurangnya kelompok-kelompok seni yang produktif dengan program yang berkualitas Melahirkan Komunitas yang baru, berkompeten Studi Banding dan Evaluasi yang berkelanjutan sesuai peningkatan kompetensi seni dan mengemas

Masalah	Rincian Masalah	Akar Masalah
		hal yang estetik untuk Kota Sawahlunto dan Pelatihan Kurator Seni, Bimtek Pelatih Kesenian
		Masih kurangnya kualitas seni pertunjukan (teater, musik, tari).Event event berkesinambungan yang menghidupi warga kota, Pasar Seni
		Belum adanya rumah seni dengan pemenuhan sarana dan prasarana penunjangnya.Kampung Seni Rumah Seni atau pemberdayaan Museum Seni yang lebih aktif dalam menampung aspirasi warga yang sangat menyukai seni dan berprofesi di bid kesenian
		Belum optimalnya Pemberdayaan lembaga adat, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan sebagai mitra pendidikan karakter dan pelestarian budaya
	Belum optimalnya pelestarian warisan budaya dan kearifan lokal	Belum optimalnya pelestarian tradisi lokal, kearifan budaya, dan nilai-nilai keagamaan yang menjadi identitas Sawahlunto
		Belum optimalnya upaya inventarisasi, konservasi, dan revitalisasi bangunan serta kawasan cagar budaya
		Keterbatasan Mendorong kerja sama antara pemerintah, lembaga adat, perguruan tinggi, BPCB, serta sumber dana multilateral/BUMN untuk mendukung pengelolaan, penelitian, dan pemeliharaan warisan budaya
		Belum optimalnya penataan ulang ruang museum

2.3.1.5 Belum optimalnya fungsi ekonomi sektor pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat

Masalah	Rincian Masalah	Akar Masalah
Masih kurangnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah	Belum optimalnya peningkatan keunggulan daya tarik dan promosi wisata	Belum optimalnya Penataan sarana prasarana pendukung kepariwisataan dengan Infrastruktur yang Futuristik, Instagramable
		Masih kurangnya destinasi wisata baru di Kota Sawahlunto dengan memperhatikan keberdayagunaan, tingkat daya saing, dan dampaknya terhadap pertumbuhan perekonomian
		Belum optimalnya fungsi Geopark nasional di Kota Sawahlunto
		Keterbatasan Pengembangan kawasan terpadu kandi di sawahlunto
		Keterbatasan pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan, penginapan, fasilitas rekreasi dan fasilitas umum lainnya di destinasi pariwisata
		Belum optimalnya Pengembangan potensi wisata dan destinasi wisata unggulan di Sawahlunto yang mendukung status sebagai Warisan Dunia UNESCO Tambang Batubara Ombilin dan Geopark Nasional Sawahlunto
		Belum optimalnya Penyelenggaraan multi event yang berkualitas
		Masih kurangnya kemitraan pariwisata antar

Masalah	Rincian Masalah	Akar Masalah
		daerah
		Keterbatasan sistem manajemen kepariwisataan yang efektif dan efisien (Top Management Tourism)
		Belum optimalnya branding destinasi dan produk wisata
		Belum optimalnya kualitas layanan pariwisata
		Belum optimalnya promosi dan pemasaran, termasuk pemanfaatan kanal digital dan kolaborasi multi-stakeholder
		Keterbatasan TIK untuk mempromosikan potensi pariwisata dan produk lokal ke seluruh dunia
	Keterbatasan Pelaku ekonomi kreatif yang berkualitas	Belum optimalnya peran swasta dan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata dan penyediaan sarana pendukung pariwisata
		Belum optimalnya Ekonomi Kreatif untuk meningkatkan nilai tambah dan keterlibatan masyarakat lokal
		Keterbatasan kapasitas SDM pariwisata melalui pelatihan

2.3.1.6 Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia

Masalah	Rincian Masalah	Akar Masalah
Belum terciptanya pendidikan yang berkualitas	Belum optimalnya penyelenggaraan Pendidikan yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau	Belum optimalnya pemenuhan SPM pendidikan
		Belum optimalnya perluasan akses pendidikan dengan Perda Pendidikan Terbaru
		Belum optimalnya pembangunan sarana dan prasarana Utulitas Sekolah
		Belum meratanya akses pendidikan
		Penyelenggaraan pendidikan belum optimal
	Belum optimalnya Penguatan pendidikan berkarakter melalui kurikulum muatan lokal	Keterbatasan Pembangunan pendidikan berkarakter dengan satuan ukur yang terstandarisasi
Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat	Keterbatasan kualitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan	Belum optimalnya pelayanan dasar publik pemenuhan standar pelayanal minimal
		Keterbatasan kapasitas sumber daya tenaga kesehatan
		Keterbatasan Kualitas sarana, prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan
	Belum optimalnya Pencegahan Stunting melalui penerapan pola hidup sehat dan pemenuhan gizi ibu	Belum optimalnya kualitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan
		Belum optimalnya kolaboratif penurunan stunting dengan seluruh pemangku kepentingan



Masalah	Rincian Masalah	Akar Masalah
Keterbatasan terciptanya Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Belum optimalnya Pengendalian Fertilitas dan Mortalitas	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam rangka menjadikan keluarga sejahtera
		Belum optimalnya program KB dan keluarga sejahtera untuk ketahanan keluarga dan perlindungan perempuan dan anak
		Masih kurangnya edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan perkawinan dini
	Belum optimalnya ketahanan keluarga, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Belum optimalnya Pemberdayaan perempuan.UMKM Wanita/PKK
		Masih kurangnya peran perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga
		Masih kurangnya Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandangdisabilitas, dan orang lanjut usia
		Masih kurangnya PUG dan peran perempuan dalam pembangunan daerah
	Belum optimalnya kesejahteraan sosial	Belum optimalnya pemberian jaminan dan dukungan kepada masyarakat, terutama yang rentan, dalam menghadapi risiko dan kemiskinan
		Belum optimalnya pendampingan dan fasilitas pada penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus lainnya
Belum optimalnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga	Masih kurangnya sarana prasarana generasi muda (milenial & gen z) untuk berkarya melalui	Masih kurangnya pelatihan dan event pemuda

Masalah	Rincian Masalah	Akar Masalah
	kelembagaan pemuda	
		Masih kurangnya Sinergi antara Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan sekolah, perguruan tinggi, komunitas pemuda, swasta, dan BUMN/BUMD untuk pengembangan sumber daya, fasilitas, pendanaan, dan event pemuda
	Belum optimalnya pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga	Masih kurangnya kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi luar negeri yang berkualitas
		Masih kurangnya sarana dan prasarana olahraga indoor beberapa cabor unggulan dan pemfungsian kembali sarana dan prasarana olahraga masyarakat
		Masih kurangnya dukungan pelaksanaan turnamen dan event olahraga berkelanjutan untuk pengembangan prestasi atlet sampai ke tingkat nasional/internasional
		Masih kurangnya rehabilitasi, dan pembangunan sarana/prasarana olahraga di pusat kota, kecamatan, dan desa
		Masih kurangnya aksesibilitas bagi masyarakat dalam mendukung gaya hidup sehat, dan prestasi olahraga amatir serta profesional
		Masih kurangnya pembinaan olahraga melalui kompetisi tingkat daerah (POPDA), kejuaraan lokal, dan program peningkatan prestasi atlet muda
		Masih kurangnya pelatihan atlet berprestasi,

Masalah	Rincian Masalah	Akar Masalah
		kompetisi olahraga lokal,
		Masih kurangnya penyelenggaraan event olahraga daerah (sepak bola, voli, futsal, atletik) sebagai ajang rekreasi dan promosi daerah
		Masih kurangnya Sinergi antara Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan induk olahraga (KONI), sekolah, perguruan tinggi, swasta, dan BUMN/BUMD untuk pengembangan sumber daya, fasilitas, pendanaan, dan event olahraga

2.3.1.7 Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik

Masalah	Rincian Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kinerja Perencanaan, Akuntabilitas dan Pengawasan yang berkualitas	Belum optimalnya kinerja Akuntabilitas	Belum optimalnya kualitas kematangan organisasi pemerintah daerah
		Belum optimalnya daya saing daerah melalui koordinasi forum CSR
		Belum optimalnya penerapan sistem akuntabilitas kinerja
	Belum optimalnya kinerja Perencanaan	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan menjunjung tinggi kebudayaan dan kearifan lokal
		Masih kurangnya kapasitas SDM Perencana
	Belum optimalnya peran pengawasan internal dan eksternal	Masih rendahnya pembangunan melalui penerapan manajemen risiko

Masalah	Rincian Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya penerapan maturitas SPIP
	Masih kurangnya kualitas penelitian dan inovasi daerah	Masih kurangnya kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan Riset, Inovasi dan teknologi
		Belum optimalnya kuantitas dan kualitas inovasi perangkat daerah untuk Indeks Inovasi Daerah
	Belum optimalnya kerjasama pembangunan	Belum optimalnya sinergitas antara Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi tertetapan. MOU dengan Pemprov dan Proposal Pusat
		Belum optimalnya Peran Perantau (diaspora sawahlunto) dalam pembangunan kota
Belum optimalnya profesionalitas ASN	Belum optimalnya Penerapan sistem meritokrasi dalam pengelolaan dan pendayagunaan ASN	Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur pelaksana
		Masih kurangnya sarana/prasaran untuk mendukung sistem meritokrasi
Belum optimalnya tata kelola arsip dan literasi masyarakat	Belum optimalnya tata kelola karsipan	Belum optimalnya pelayanan Pengelolaan Arsip untuk perangkat daerah, desa/kelurahan dan arsip masyarakat dalam mewujudkan kampung sadar arsip
	Belum optimalnya literasi masyarakat	Belum optimalnya pembinaan perpustakaan yang ada didesa/kel, masjid dan TBM

Masalah	Rincian Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas Pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah	Belum optimalnya melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan prinsip anggaran berimbang
		Belum optimalnya Pemenuhan Kebutuhan Belanja untuk Urusan Wajib Secara Prioritas
		Belum optimalnya Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran
		kapasitas SDM dan kelembagaan keuangan daerah
	Belum optimalnya pengelolaan aset fisik dan tak berwujud milik daerah secara produktif.	Belum optimalnya Pengelolaan Aset dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
	Belum optimalnya Pajak dan Retribusi Daerah melalui Pengembangan Sumber daya alam dan infrastruktur serta Ekonomi Digital	Belum optimalnya Pendataan ulang aset-aset daerah yang menjadi sumber pendapatan dan yang tidak layak pakai
		Belum optimalnya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
		Belum optimalnya Pemutakhiran data wajib pajak dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung sistem pengelolaan PAD yang lebih akurat dan efisien
		Belum optimalnya Kapasitas dan Kualitas Manajemen Pendapatan Daerah
		Belum optimalnya profesionalisme pengelolaan BUMD
		Belum optimalnya inovasi daerah dalam menciptakan potensi pendapatan baru

2.3.2 Isu Strategis

2.3.2.1 Isu Strategis Global

Isu strategis global pada tahun 2025 mencakup berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Beberapa isu penting yang diperkirakan akan mendominasi agenda global adalah: ketidakpastian ekonomi global, persaingan antar kekuatan besar, perubahan iklim, disinformasi, dan keamanan siber. Selain itu, isu-isu seperti konflik di berbagai wilayah, termasuk Israel-Palestina dan Laut China Selatan, juga diperkirakan akan terus menjadi perhatian. Berikut adalah beberapa isu strategis global yang perlu diperhatikan pada tahun 2025:

1. Ketidakpastian Ekonomi Global
 - Perang dagang AS-Tiongkok berlanjut dan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi global
 - Perlambatan ekonomi di negara-negara maju dapat memengaruhi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
 - Fluktuasi harga pangan dan minyak dunia menjadi tantangan bagi stabilitas ekonomi global.
2. Geopolitik dan Persaingan Kekuatan
 - Persaingan antara kekuatan besar seperti AS dan Tiongkok, serta blok BRICS, dapat memicu ketegangan geopolitik.
 - Konflik di berbagai wilayah, seperti Israel-Palestina dan Laut China Selatan, berpotensi memperburuk situasi global.
 - Multilateralisme menghadapi tantangan karena meningkatnya persaingan antar negara.
3. Perubahan Iklim dan Lingkungan
 - Peningkatan suhu global dan cuaca ekstrem menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan masyarakat.
 - Transisi energi menjadi isu penting untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
 - Indonesia memiliki potensi sumber daya untuk kendaraan listrik dan berupaya mempercepat transisi energi ramah lingkungan.
4. Keamanan Siber dan Disinformasi
 - Ancaman serangan siber terhadap infrastruktur kritis menjadi perhatian utama.
 - Penyebaran disinformasi dan berita palsu di platform media sosial semakin canggih dan sulit dideteksi.
 - Perlu upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengatasi penyebaran disinformasi dan meningkatkan literasi media.
5. Isu Sosial Budaya
 - Kelangkaan air dan eksistensi bahasa di Indonesia menjadi isu penting yang perlu diperhatikan.
 - Perdagangan orang, korupsi, dan narkoba lintas negara menjadi tantangan global yang perlu ditangani.

- Literasi digital dan disinformasi juga menjadi perhatian dalam konteks sosial budaya.
- 6. Keamanan dan Konflik
 - Terorisme, perang siber, dan masalah pengungsi menjadi isu keamanan global yang kompleks
 - Konflik perbatasan wilayah dan isu imigran ilegal juga menjadi perhatian.
- 7. Pembangunan Berkelanjutan
 - Indonesia memiliki target penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
 - Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional sangat penting.
 - Pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah yang belum merata menjadi tantangan.
- 8. Kesehatan
 - Perawatan kesehatan menjadi isu yang semakin penting bagi masyarakat global.
 - Indonesia perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan aksesibilitasnya.

2.3.2.2 Isu Strategis Nasional

1. Kebijakan Ekonomi Nasional dan Proteksionisme

Ekonomi Global Kebijakan Ekonomi Nasional dan Proteksionisme Ekonomi Global Beberapa dekade terakhir, Indonesia menganut kebijakan perekonomian yang terbuka. Hal ini memiliki resiko terhadap daya tahan terhadap kebijakan proteksionisme global. Pada saat terjadi gangguan pada pasar global, hal ini memberikan pengaruh terhadap lemahnya ekspor Indonesia, secara simultan juga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional dan memiliki resiko terhadap lapangan pekerjaan nasional. Indonesia juga mengalami gangguan dalam hal aliran investasi asing. Investor lebih memilih negara yang mempunyai kebijakan ekonomi yang stabil daripada pasar yang terdampak perang dagang global. Rendahnya investasi asing masuk ke Indonesia memberikan dampak melambatnya pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor manufaktur.

Proteksionisme perdagangan global juga memberikan imbas terhadap sektor keuangan Indonesia. Melemahnya nilai tukar rupiah memberikan imbas terjadinya inflasi yang tinggi. Harga produk impor menjadi mahal. Sehingga masyarakat menghadapi penurunan daya beli semakin besar. Instrumen moneter dapat dilakukan dalam meredam inflasi dan mencapai stabilitas nilai tukar rupiah. Salah satu langkahnya adalah menaikkan suku bunga oleh Bank Indonesia. Hal ini memberikan pengaruh negatif terhadap kinerja sektor riil nasional yang berujung penurunan perekonomian nasional. Terjadinya pelemahan nilai tukar Rupiah di awal tahun 2025 ini, memperlihatkan adanya tekanan yang kuat terhadap perekonomian nasional. Secara ekonomi dalam menghadapi situasi ini, investor membutuhkan kepastian

pasar keuangan nasional. Disamping itu, perencanaan dan kebijakan fiskal pemerintah yang dipublikasi ke publik dibutuhkan lebih transparan, akurabel dan timetable. Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian nasional. Jika hal tersebut tidak terjadi dengan baik memberikan respon negative terhadap perekonomian nasional baik dari pelaku ekonomi dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini akan memberikan dampak terhadap terjadinya capital flight dan menjadikan resiko mahal biaya intervensi dengan menguras cadangan devisa.

Kedepan, Indonesia harus mampu mengurangi ketergantungan kepada modal asing dengan cara memperkuat industri dalam negeri dan diversifikasi ekspor. Ketergantungan modal asing yang dimaksud adalah investasi asing jangka pendek yang rentan terhadap guncangan eksternal. Secara nasional, pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan investasi yang stabil dan nyaman terutama bagi investor domestik. Kebijakan fiskal perlu dilakukan dengan pengurangan terhadap pengeluaran terhadap barang strategis. Pemerintah harus dapat meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri dalam usaha melakukan substitusi impor. Hal ini dapat memperkuat nilai tukar Rupiah guna mendorong peningkatan investasi nasional, perlu membangun kepastian pasar dimana pemerintah harus meluncurkan strategi yang jelas dalam menghadapi tekanan perekonomian global. Saat ini investor terus memonitor perkembangan dan situasi ekonomi nasional terutama dalam menjaga nilai tukar dan arus modal asing.

Pemerintah harus memperkuat produksi dalam negeri agar ketergantungan impor bisa ditanggulangi. Sementara itu, perlu peningkatan daya saing ekspor nasional sebagai faktor utama untuk tidak mengandalkan komoditas mentah tetapi mengembangkan industri bernilai tambah tinggi. Transparansi dalam kebijakan dan informasi yang dibutuhkan publik dan investor sangat diperlukan untuk menghindari sentiment negative pasar. Pemerintah harus memiliki strategi yang tepat dan terukur guna mengembalikan kepercayaan masyarakat. Tidak mesti pemerintah selalu mengandalkan Bank Indonesia untuk mempertahankan nilai tukar Rupiah. Namun kebijakan moneter perlu diimbangi secara efektif dengan kebijakan fiskal nasional.

2. Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara

Awal tahun 2025, yang menjadi sorotan publik adalah defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pemerintah terlihat meyakini bahwa target defisit APBN terhadap PDB tidak melampaui 2.54%. Namun perkembangan yang terjadi saat ini adalah melemahnya penerimaan pajak. Terlihat kecenderungan bahwa penurunan penerimaan pajak salah satunya disebabkan oleh rendahnya pendapatan yang berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri. Kebijakan pembatalan menaikkan tarif PPN 11% menjadi 12% memberikan dampak pendapatan negara dari pajak konsumsi tidak mengalami peningkatan sesuai harapan. Selanjutnya juga terjadi penurunan pendapatan dari Pajak Penghasilan (PPh) badan secara drastis. Hal ini dapat diartikan bahwa kinerja korporasi nasional terlihat melemah. Jika situasi ini

tidak ditanggulangi dengan baik dapat untuk mencapai target penerimaan APBN nantinya.

Sementara pada sisi belanja negara terlihat kecenderungan yang terjadi adalah mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh belanja non-kementerian dan lembaga (non- K/L) memperlihatkan kenaikan yang sangat drastis. Indikasi yang terlihat pada bagian ini adalah alokasi yang besar untuk subsidi dan pembayaran bunga hutang. Transfer keuangan pusat ke daerah juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan K/L. Jika hal ini terus berlanjut, dapat memberikan resiko defisit terhadap APBN. Meskipun saat ini pemerintah dapat menganggap bahwa defisit saat ini masih dalam batas aman. Dimana pemerintah memiliki ruang kebijakan fiskal untuk memotong belanja dengan agresif. Tetapi disisi pendapat memperlihatkan kecenderungan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Pemerintah perlu menemukan langkah-langkah alternatif untuk menutup kesenjangan tersebut dimana salah satu instrumennya adalah penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Pemerintah harus mampu mengurangi beban hutang negara dalam menutup deficit anggaran. Jika hal ini tidak dilakukan maka biaya pembayaran bunga terus meningkat. Investor akan mencermati hal ini sebagai sebuah resiko fiskal yang makin meningkat dan dapat mengancam stabilitas perekonomian nasional.

Pemerintahan Presiden Prabowo baru saja meluncurkan kebijakan untuk memberikan katalisator terhadap pertumbuhan ekonomi nasional berupa pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Pemerintah menyatakan bahwa badan ini mengelola kekayaan negara terpisah dari APBN untuk mengoptimasi investasi sektor strategis.

3. Danantara sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi

Isu strategis nasional yang perlu dicermati provinsi Sumatera Barat adalah diluncurkannya Badan pengelola Investasi (BPI) Danantara. Beberapa harapan yang juga perlu dicermati Provinsi Sumatera Barat adalah menjadikan lembaga ini sebagai katalis kebutuhan investasi yang mampu menggerakkan perekonomian daerah. Lembaga ini dinyatakan pengelolaannya dilakukan secara terpisah dari APBN yang bertujuan untuk mengoptimalkan investasi strategis di Provinsi Sumatera Barat. Keberadaan lembaga ini bertujuan untuk penguatan infrastruktur, ketahanan pangan, hilirisasi industri dan pengembangan energi terbarukan.

Pemerintah menyatakan bahwa Danantara ini mengacu kepada berbagai model *Sovereign Wealth Fund* (SWF) yang telah dikembangkan dan sukses di beberapa negara diantaranya Singapura, dan Norwegia. Model yang dikembangkan ini diharapkan mampu menarik investasi asing, mengelola aset negara yang lebih efisien dan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui berbagai proyek strategis nasional. Danantara ini merupakan model konsolidasi dari beberapa BUMN yang juga termasuk Bank Himbara dimana tujuannya adalah untuk menciptakan sinergi antara sektor keuangan dan sektor ril nasional.

Isu yang perlu dicermati adalah kehadiran Danantara terhadap stabilitas perbankan nasional dimana 3 perbankan nasional yang ada di dalamnya merupakan tulang punggung dari sistem keuangan nasional. Ketiga perbankan ini memiliki andil besar terhadap pembiayaan UMKM dan pengelolaan dana pihak ketiga nasional. Jika Danantara tidak dikelola secara baik dan profesional akan mengalami tekanan terhadap perekonomian nasional dan melemahkan daya saing perbankan nasional dalam jangka Panjang.

4. Koperasi Desa Merah – Putih

Pemerintah berencana mengalokan pendanaan nasional untuk masing-masing desa di Indonesia melalui Koperasi Desa Merah – Putih dengan jumlah pendanaan yang lebih besar dari KUR BRI pada tahun 2024. Pendanaan ini mengubah konsep dan ekosistem pembiayaan mikro dan dapat mempengaruhi perbankan secara keseluruhan dalam jangka panjang. Dalam pengelolaan dana secara efektif dengan kepemilikan koperasi di desa untuk mendapatkan modal usaha. Hal ini akan memberikan pengaruh terhadap permintaan kredit mikro ke perbankan yang akan mengalami penurunan. Perbankan harus melakukan pengalihan fokus dan strategi dalam model pembiayaan wholesale lending kepada koperasi desa. Seandainya koperasi tidak mampu melakukan pengelolaan pendanaan dengan baik, masyarakat akan kembali ke perbankan untuk melakukan pinjaman usaha. Perbankan diharapkan cepat beradaptasi terhadap digitalisasi pelayanan, meningkatkan penjaminan berbasis teknologi dan memperkuat pengawasan terhadap koperasi penerima kredit. Perubahan ini akan menggeser dominasi perbankan nasional maupun perbankan daerah dalam pembiayaan mikro dalam masyarakat dan menciptakan ekonomi yang berbasis koperasi. Apabila perbankan tidak segera melakukan adjustment secara cepat maka koperasi desa akan menjadi pemain utama dalam perekonomian mikro masyarakat yang dapat mengubah peta industri perbankan nasional dan daerah di Indonesia.

2.3.2.3 Isu Strategis Regional

Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto mengalami perlambatan belakangan ini disebabkan sebagian produksi lapangan usaha dominan mengalami perlambatan dan terdapat satu lapangan usaha yang mengalami kontraksi (pertumbuhan minus) beberapa tahun terakhir ini. Di samping itu, produktivitas tenaga kerja Kota Sawahlunto juga mengalami penurunan beberapa tahun terakhir. PDRB per kapita Kota Sawahlunto tergolong tinggi namun pengeluaran per kapitanya rendah, hal ini mengindikasikan masyarakat Kota Sawahlunto melakukan konsumsi (terutama non-makanan) di luar Kota Sawahlunto sehingga perekonomian di Kota Sawahlunto tidak berkembang.

Gini Rasio Kota Sawahlunto tergolong tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini mengindikasikan tingginya perbedaan pengeluaran/pendapatan antara golongan masyarakat berpendapatan tinggi dan berpendapatan rendah di Kota Sawahlunto (tingginya konsentrasi kekayaan pada sekelompok kecil masyarakat). Namun untuk Tingkat pengangguran terbuka rata-rata Kota Sawahlunto masih di atas angka ideal ($< 5\%$). Tingginya tingkat pengangguran terbuka Kota Sawahlunto disebabkan kurangnya kesempatan kerja, rendahnya kualitas tenaga kerja dan kompetensi tenaga kerja, rendahnya minat kewirausahaan dan kurangnya minat pencari kerja Kota Sawahlunto untuk bekerja di luar daerah dan luar negeri.

Dengan angka kemiskinan terendah di Nasional, sehingga penurunan angka kemiskinan di Kota Sawahlunto cenderung melambat dan sulit untuk ditekan karena potensi kemiskinan sebagian besar berada pada kelompok lansia dan disabilitas yang memerlukan perlindungan sosial.

2.3.2.4 Isu Strategis Daerah

1. Pertumbuhan sektor perekonomian yang berwawasan lingkungan

Peningkatan kualitas dan daya saing produk unggulan juga akan diprioritaskan melalui pengembangan sentra Industri Kecil Menengah (IKM) yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian dan peternakan yang menjadi salah satu sektor dominan dalam perekonomian masyarakat sekaligus mendukung pengembangan sektor pariwisata Kota Sawahlunto. Keberadaan mall Pelayanan publik yang telah diresmikan oleh Menteri PAN RB RI pada tahun 2022 diharapkan mampu meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Kota Sawahlunto dengan adanya kemudahan perizinan, ketersediaan bahan baku yang berkualitas, serta penyediaan iklim investasi yang kondusif. Hal lain yang menjadi perhatian adalah perlunya optimalisasi potensi dan pengelolaan pendapatan asli daerah. Proyeksi jumlah penduduk yang bertambah setiap tahunnya menjadi tantangan yang luar biasa dalam ketersediaan pangan di Kota Sawahlunto untuk 20 tahun yang akan datang. Diestimasi konsumsi beras di Kota Sawahlunto pada tahun 2025 meningkat dan terjadi krisis pangan (defisit beras) sebesar 746,48 ton.

2. Penguatan Smart Governance berbasis IT

Penguatan smart governance berbasis IT adalah upaya untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Hal ini melibatkan transformasi digital dalam berbagai aspek pemerintahan, termasuk pelayanan publik, manajemen internal, dan pengambilan keputusan. Penguatan smart governance berbasis IT merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien, efektif, dan transparan. Dengan mengatasi tantangan yang ada, pemerintah dapat memanfaatkan potensi TIK secara optimal untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

3. Penguatan Infrastruktur penunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat

Infrastruktur Kota Sawahlunto memiliki peranan penting dalam peningkatan ekonomi dan daya saing daerah, terutama untuk mendukung potensi wisata sejarah dunia UNESCO Ombilin Coal Meaning Heritage of Sawahlunto (OCMHS) dan Geopark Nasional Sawahlunto yang dicanangkan menjadi wisata unggulan dan memberikan multiplier effect dalam pertumbuhan ekonomi. Di samping itu masih terdapat gap antara kebutuhan dan ketersediaan infrastruktur secara kuantitas maupun kualitas. Perlu pemenuhan, peningkatan dan pemeliharaan yang optimal pada infrastruktur tersebut, hingga dapat menjadi penopang yang kuat dalam penggerak kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat di Kota Sawahlunto.

Konektivitas jalan antar daerah baik didalam maupun diluar kota belum memadai, seperti daerah perbatasan menuju Kabupaten Tanah Datar belum memadai untuk dilalui kendaraan berat, kondisi rusak dengan volume jalan yang kecil serta sarana dan prasarana jalan belum lengkap. Aksesibilitas dari dan menuju Kota Sawahlunto dapat mempengaruhi alur produksi dan distribusi barang jasa, kelancaran transportasi, biaya logistik, hingga kunjungan wisata.

Di samping infrastruktur jalan, saat ini Kota Sawahlunto memiliki sumber air baku dari 5 aliran Sungai dan 5 danau untuk memenuhi kebutuhan debit air, namun keterbatasan sarana prasarana menjadi penghambat dalam pemanfaatan sumber air yang lebih besar untuk pemenuhan air bersih dan air minum. Disamping itu, pemenuhan sanitasi layak belum optimal, pengelolaan limbah Kota Sawahlunto masih secara mandiri di setiap rumah tangga dan belum terpadu dalam skala besar. Pemenuhan sistem drainase masih di bawah 50% karena pemeliharaan yang sangat minim setiap tahunnya. Sedangkan infrastruktur urusan perumahan kawasan permukiman juga belum optimalnya. Setiap tahunnya telah dilaksanakan kegiatan seperti penanganan RTLH, Kawasan kumuh, PSU perumahan permukiman, namun kegiatan tersebut masih perlu dioptimalkan baik dari segi mekanisme pengajuan lokasi, besaran anggaran yang dibutuhkan serta stakeholder terkait.

Penyediaan sarana dan prasarana kota yang pengembangannya tidak secara komprehensif berdasarkan kajian dampak lingkungan yang ditimbulkan, memberikan pengaruh pada kualitas air, udara, ketersediaan lahan dan sampah yang ditimbulkan. Oleh sebab itu, perlu analisis dan kajian mendalam pada aplikasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Untuk pemenuhan infrastruktur, Kota Sawahlunto dihadapkan dengan peluang dan tantangan eksternal baik di tingkat provinsi maupun nasional. Infrastruktur air minum, sanitasi, dan perumahan kawasan permukiman merupakan pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014. Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga dengan air minum dan sanitasi aman juga didukung pengembangannya dalam RPJPN 2025-2045, dalam arah kebijakan Agenda Kewilayahan dan Sarana Prasarana untuk wilayah Sumatera. Sektor irigasi menjadi pendukung rencana pengembangan Provinsi Sumatera Barat menjadi Kawasan ketahanan pangan yang sudah ditetapkan dalam arah kebijakan RPJPN 2025 – 2045.

4. Penguatan nilai-nilai keagamaan dan Pelestarian budaya melalui Pengembangan komunitas seni demi mendukung terwujudnya kota wisata yang estetik dan memiliki fungsi ekonomi dan mensejahterakan

Pengembangan komunitas seni dapat menjadi jembatan untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dan melestarikan budaya, yang pada akhirnya mendukung terwujudnya kota wisata yang estetik, memiliki fungsi ekonomi, dan mensejahterakan. Dengan kata lain, seni bisa menjadi alat untuk menjaga identitas budaya sekaligus menciptakan daya tarik wisata yang berkelanjutan. Seni tradisional seringkali memiliki akar kuat dalam nilai-nilai keagamaan. Pengembangan komunitas seni dapat menjadi wadah untuk menghidupkan kembali dan memperkuat nilai-nilai tersebut melalui berbagai pertunjukan, karya seni, dan kegiatan keagamaan yang terintegrasi.

Komunitas seni berperan penting dalam menjaga keberlangsungan budaya lokal. Melalui latihan, pertunjukan, dan edukasi, seni tradisional dapat terus hidup dan diwariskan kepada generasi muda. Komunitas seni yang berkembang dapat menciptakan lapangan kerja dan peluang ekonomi baru, seperti pariwisata berbasis budaya, kerajinan tangan, dan penjualan produk seni. Dengan adanya peningkatan pendapatan dan lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat di sekitar komunitas seni juga akan meningkat. Selain itu, rasa memiliki dan kebanggaan terhadap budaya lokal akan semakin kuat. Dengan demikian, pengembangan komunitas seni yang terencana dan berkelanjutan dapat menjadi kunci untuk mewujudkan kota wisata yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga memiliki nilai-nilai budaya yang kuat dan memberikan manfaat ekonomi serta kesejahteraan bagi masyarakat.

5. Fungsi ekonomi sektor pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi potensi kepariwisataan

Keberhasilan Kota Sawahlunto mendapatkan predikat dan Status Wisata Sejarah Dunia (OCMHS) Tahun 2019 dan Geopark Nasional Tahun 2018 belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kunjungan wisatawan ke Kota Sawahlunto sekaligus terhadap perekonomian masyarakat Kota Sawahlunto. Merujuk pada desain pembangunan jangka panjang 2025-2045 Provinsi Sumatera yang bertemakan “Mandala Pengembangan Agrikultur Bernilai Tinggi, Ekonomi Hijau, dan Pariwisata Kelas Dunia, yang Bersendi Kearifan Budaya Lokal”, hal ini membuka peluang bagi Kota Sawahlunto untuk mewujudkan visi daerah Tahun 2025-2045 menjadi kota wisata yang berkelas dunia dan menjadi daya tarik bagi akademisi tingkat Nasional dan Internasional dalam kegiatan edukasi dan riset.

6. Kota Sawahlunto menuju kota sehat dan destinasi pendidikan utama yang berkarakter di Sumatera Barat

Peningkatan kualitas pendidikan harus menjadi salah satu isu strategis utama pemerintah Pusat sampai Daerah. Mengingat di tahun 2045 Indonesia akan memperoleh bonus demografi, maka harus dipersiapkan dari sekarang generasi yang berakhlak, tangguh, mandiri, berkualitas dan punya daya saing. Pendidikan yang berkualitas dan merata masuk dalam Misi 1 RPJPN 2025-2045. Faktor penting yang harus ditingkatkan untuk mencapai pendidikan berkualitas adalah dengan menciptakan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan berkuantitas, menyediakan sarana dan prasarana sekolah yang berkualitas dan berkuantitas, mendorong dan menumbuhkan minat/bakat siswa untuk senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan, meningkatkan peran orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam mengawal proses tumbuh kembang pendidikan anak dan mengantisipasi kuatnya arus informasi melalui media sosial yang dapat membawa efek positif maupun negatif bagi perkembangan pola pikir, sikap dan adab siswa/guru/tenaga pendidik.

Selain pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan juga menjadi salah satu isu strategis utama pemerintah Pusat sampai Daerah. Pada tahun 2030 Indonesia akan mencapai puncak bonus demografi, dimana 68,3 % penduduk berusia produktif sehingga dapat menjadi peluang untuk meraih Indonesia emas tahun 2045. Urusan kesehatan masuk dalam Misi 1 RPJPN 2025-2045 yaitu membangun manusia Indonesia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul dan berdaya saing. Untuk mewujudkan Indonesia sehat diwujudkan melalui membangun sistem kesehatan yang tangguh dan responsif serta memastikan penduduk berusia panjang dan hidup sehat. Upaya transformasi kesehatan adalah melalui penguatan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berkualitas dan berkuantitas, menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas dan berkuantitas, jaminan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan untuk penurunan stunting.

Pada Tahun 2024, sebanyak 3120 individu masuk dalam masyarakat Perlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang didominasi oleh fakir miskin dan lansia terlantar. Di sisi lain, kemiskinan menuju 0% merupakan salah satu indikator sasaran visi dari Indonesia Emas 2045. Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan pemberian bantuan sosial yang terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi dan penggunaan data terfragmentasi secara sistematis sehingga kesalahan sasaran tidak terjadi. Pembangunan sumber daya manusia tidak terlepas dari isu kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mengingat jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang dilaporkan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Namun kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan belum bisa menjadi representasi dari kasus yang sebenarnya terjadi di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan sebagian besar masyarakat masih tabu membahas permasalahan KDRT.

7. Pelaksanaan tata kelola Pemerintah Daerah yang berdaya saing tinggi atas pengukuran indeks kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian dan lembaga lain

Pelaksanaan tata kelola Pemerintah Daerah yang berdaya saing tinggi, berfokus pada pengukuran indeks kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian dan lembaga lain, membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Hal ini melibatkan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta memastikan bahwa kinerja Pemda selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Integritas pemberi layanan tata kelola pemerintahan masih rentan praktik korupsi. Disamping itu belum ada unit kerja/perangkat daerah yang memperoleh prediket menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KOTA SAWAHLUNTO 2025-2045

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (PJPD) Kota Sawahlunto Tahun 2025–2045 merupakan gambaran arah pembangunan kota selama 20 tahun ke depan yang disusun untuk mewujudkan visi jangka panjang daerah secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan. Dokumen ini menjadi landasan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setiap periode lima tahunan, serta menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah.

3.1.1 Visi dan Sasaran Visi RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2045

Visi Pembangunan Jangka Panjang Kota Sawahlunto Tahun 2025-2045 mencerminkan upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 maka ditetapkan Visi Kota Sawahlunto Tahun 2025-2045 adalah ;

“SAWAHLUNTO KOTA WISATA TAMBANG BERBUDAYA KELAS DUNIA YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN”

Dengan kata kunci sebagai berikut:

1. Kelas Dunia

Pada Tahun 2045, Status warisan dunia *Ombilin Coal Mining Heritage Of Sawahlunto* (OCMHS) dan *Geopark* Nasional menjadi keunggulan pariwisata Kota Sawahlunto sampai tingkat dunia yang mampu meningkatkan daya saing daerah dalam Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan kelembagaan pemerintahan yang akuntabel

2. Maju

Pada Tahun 2045, masyarakat Kota Sawahlunto telah maju berdaya saing dan inovatif dalam perekonomian melalui keunggulan pariwisata dan meningkatnya ekonomi kreatif serta produktif dalam menjaga ketahanan pangan dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2045.

3. Berkelanjutan

Pada Tahun 2045 terwujudnya pembangunan infrastruktur yang mendukung keunggulan pariwisata sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, ketangguhan masyarakat dan infrastruktur terhadap kebencanaan dan krisis iklim.

Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025-2045 merupakan cetak biru pembangunan yang berorientasi pada keadilan, kemandirian, dan kelestarian lingkungan. Melalui sasaran-sasaran strategis berikut, Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto beserta seluruh pemangku kepentingan berupaya menciptakan fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel, demi terwujudnya masyarakat yang unggul, berdaya saing, dan berketahanan di masa depan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 3.1
Sasaran Visi RPJPD Tahun 2025-2045

VISI	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN		
			2025	2030	2045
SAWAHLUNTO KOTA WISATA TAMBANG BERBUDAYA KELAS DUNIA YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN	1. Peningkatan Pendapatan per kapita	1. PDRB per kapita ADHB (Rp Juta)	73,78	179,83	424,21
		2. Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	11,00	11,85	14,39
	2. Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan berkurang	3. Tingkat Kemiskinan (%)	1,73-1,96	1,22-1,43	0,01-0,16
		4. Rasio gini (Indeks)	0,285	0,267	0,219
		5. Pertumbuhan Ekonomi	5,44	5,71	5,03
	3. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	6. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,15	3,20	4,50
	4. Peningkatan Daya saing sumber daya manusia	7. Indeks Pembangunan Manusia	76,55	79,47	89,05
		8. Tingkat produktivitas tenaga kerja	93,842	98,311	111,72
	5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,91	72,07	78,87

Sumber: Perda No.1 Tahun 2025, RPJPD Tahun 2025-2045

3.1.2 Misi RPJPD Kota Sawahlunto

Berdasarkan kepada visi jangka panjang daerah, maka untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan yang merupakan upaya utama pembangunan yaitu :

1. Mewujudkan Transformasi Sosial untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkarakter dan berdaya saing

Dengan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul dan berdaya saing. Transformasi sumber daya manusia ini menjadi modal penting dalam meningkatkan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan gender dan sosial.

2. Transformasi ekonomi yang inklusif dalam mewujudkan Wisata Sejarah Dunia (OCMHS) dan Geopark Nasional

Transformasi ekonomi yang inklusif dengan meningkatkan kinerja perekonomian melalui keunggulan pariwisata (OCMHS dan Geopark Nasional), perluasan kesempatan kerja dan investasi, Ekonomi kreatif dan UMKM lokal serta ketahanan pangan yang secara merata sehingga dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif

Tata Kelola Pemerintah yang memegang prinsip *good governance* dan *good government*. Tata kelola pemerintahan yang mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif melalui inovasi digitalisasi layanan publik yang terintegrasi dan adaptif untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat dan mudah terjangkau.

4. Memantapkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah

Merupakan suatu upaya yang penting untuk memperkuat posisi dan kemampuan suatu daerah dalam menghadapi persaingan di tingkat lokal, nasional, maupun global dengan mendukung asas pembangunan berkelanjutan

5. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Merupakan tujuan yang sangat penting untuk keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat dengan penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam kehidupan masyarakat, serta peningkatan upaya pelestarian lingkungan hidup dan ekosistem alami.

6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Adil dan Merata

Merupakan pembangunan wilayah secara merata dan berkeadilan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, dilengkapi dengan transformasi supremasi hukum, stabilitas ekonomi dan kepemimpinan, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.

7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Membangun sarana dan prasarana yang berkualitas sesuai dengan penataan ruang, mengutamakan pemenuhan pelayanan dasar, sarana dan prasarana yang mendukung keunggulan pariwisata (OCMHS dan *Geopark Nasional*) dengan terintegrasi dan berkelanjutan dan memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi

8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan Daerah

Perwujudan pembangunan yang berkesinambungan diperlukan mitigasi risiko yang efektif dalam upaya pencapaian target yang akan dicapai melalui penerapan manajemen risiko terhadap pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan secara tepat dan terukur. Sehingga pencapaian target kinerja pembangunan daerah dapat diwujudkan secara efektif dengan deviasi capaiannya cukup kecil terhadap target. Disamping itu, pembiayaan pembangunan yang integratif menjadi landasan utama untuk mewujudkan pembangunan berkesinambungan. Sehingga terwujudnya kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas pada tahun 2045

3.1.3 Arah dan Sasaran Pembangunan RPJPD Kota Sawahlunto

Arah dan sasaran pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045 dibagi dengan 4 tahapan RPJMD dengan penekanan sebagai berikut:

1. Tahap ke-1 Tahun 2025 - 2029: *Perkuatan Fondasi Transformasi*

Pada Tahapan ini merupakan perkuatan dalam membangun fondasi transformasi selama 5 tahun pertama. Tahap pertama ini dilakukan dengan penguatan landasan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta penguatan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah. Tahapan penguatan landasan transformasi ini didukung implementasi pembangunan kewilayahan yang merata dengan pemenuhan sarana prasarana, serta penguatan pembiayaan pembangunan.

2. Tahap ke-2 Tahun 2030 - 2034: *Akselerasi Transformasi*

Periode kedua dari pembangunan jangka panjang daerah Kota Sawahlunto diarahkan pada kebijakan “Akselerasi Transformasi”. Tahap kedua ini dilakukan dengan akselerasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan akselerasi ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta penguatan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah. Tahapan akselerasi transformasi ini didukung implementasi pembangunan kewilayahan yang merata dengan pemenuhan sarana prasarana, serta penguatan pembiayaan pembangunan

3. Tahap ke-3 Tahun 2035 - 2039: *Ekspansi Global*

Periode ketiga dari pembangunan jangka panjang daerah Kota Sawahlunto diarahkan pada kebijakan “Pemantapan Transformasi”. Tahap ketiga ini dilakukan dengan pemantapan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan pemantapan ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta pemantapan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah. Tahapan pemantapan transformasi ini didukung implementasi pembangunan kewilayahan yang merata dengan pemenuhan sarana prasarana, serta pemantapan pembiayaan pembangunan.

4. Tahap ke-4 Tahun 2040 - 2045 : **Perwujudan Indonesia Emas**

Periode keempat dari pembangunan jangka panjang daerah Kota Sawahlunto diarahkan pada kebijakan “Perwujudan Kota Sawahlunto dalam menyongsong Indonesia Emas 2045”. Tahap keempat ini dilakukan dengan perwujudan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan perwujudan ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta stabilitas keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah. Tahapan perwujudan transformasi ini didukung implementasi pembangunan kewilayahan yang semakin merata dengan pemenuhan sarana prasarana, serta pembiayaan pembangunan yang semakin menguat.

Sedangkan sasaran pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai tahap I Pelaksanaan RPJPD Kota Sawahlunto 2025-2045 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Sasaran Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029
Tahap I Pelaksanaan RPJPD Kota Sawahlunto

NO	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
			2025	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kesehatan untuk Semua	Usia Harapan Hidup (tahun)	74,44	76,08
		Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	0	0
		Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	17,7	12,9
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage) (%)	45	88
		Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate) (%)	95	95
		Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	100	100
2	Pendidikan Berkualitas yang Merata	Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasiona		
		- Literasi Membaca	54,5	60,71
		- Numerasi	16,25	30,87
		Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional		
		- Literasi Membaca	54,47	59,72
		- Numerasi	33,92	42,57
		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	10,65	11,19
		Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,45	14,84
		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	16,89	16,68
		Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	74,18	76,57
3	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Tingkat Kemiskinan (%)	1,73-1,96	1,22-1,43
		Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	39,74	51,16
		Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)	55,2	57,7
4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Rasio PDRB Industri Pengolahan	11	11,85
		Rasio PDRB Akomodasi Mamin	2,33	2,5
		Jumlah Tamu Asing Hotel Berbintang (ribu orang)	233	269
		Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi (%)	6,205	6,866
		Proporsi jumlah UKM non pertanian	19,2	19,69
		Proporsi jumlah IKM	4	4,39
		Rasio Kewirausahaan	3,65	4,75
		Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	1,673	2,128
		ROA BUMD	0	1,01
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,96	4,91
		Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	52,55	62,62
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	60,49	63,72
		Indek Inovasi Daerah	73,21	80,53
5	Penerapan Ekonomi Hijau	Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan(%)	8,86	9,08
		Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Juta/orang)	50,881	58,881
6	Transformasi Digital	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	53,8	60,35
7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional	Persentase stabilitas harga dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	72,09	83,72
		Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	23,69	23,73
		Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	13,08	13,38
8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Proporsi kontribusi PDRB Kota	1,59	1,68
		Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	89,2	92,4
		Persentase Desa Mandiri (%)	9,44%	13,44%
9	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Indeks Reformasi Hukum	72,15	77,3
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,09	3,57
		Indeks Pelayanan Publik	3,85	4
		Survey penilaian integritas (SPI) KPK (Nilai)	77,25	82,95

NO	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
			2025	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Indeks Persepsi Anti Korupsi	-	-
10	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, Dan Demokrasi Substansial	Pelanggaran Peraturan Daerah	200	190
		Angka Kriminalitas	4,44	4,16
		Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilu	83,01	86,03
11	Stabilitas Ekonomi Makro	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,5	0,68
		Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	2,99	16,49
		Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Kabupaten/Kota (Rupiah)	831.886	1.665.535
		Total Kredit/PDRB	13,13	16,66
		Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)	3,46	3,61
12	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	Persentase Kerjasama yang Terlaksana	100	100
		Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	3,06	3,1
13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Persentase pelestarian cagar budaya	-	-
		Kampung Moderasi Beragama	4	14
14	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Keluarga	65,4	69,4
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,22-0,21	0,20-0,19
		Indeks Perlindungan Khusus Anak	79,66	82,16
15	Lingkungan Hidup Berkualitas	Indeks tutupan lahan	60,54	60,81
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,91	72,97
		RT dengan Akses Sanitasi Aman	11	33,94
		Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	20,66	37,98
		Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	73,46	78,96
16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Konsumsi listrik per kapita	1237	1820
		Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	7,81	5,94
		Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,149	0,161
		Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan	50	62,5
17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	120,2	13,88-107,56
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,91	72,97

Sumber: Perda No.1 Tahun 2025, RPJPD Tahun 2025-2045

3.2 PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2025-2029

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode lima tahun yang menjadi penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045. RPJMN 2025–2029 merupakan RPJMN pertama dalam kerangka RPJPN baru dan memiliki posisi yang sangat strategis sebagai fondasi awal menuju Visi Indonesia Emas 2045.

3.2.1 Visi RPJMN Tahun 2025-2029

Visi Presiden 2025–2029 berdasarkan peraturan presiden Nomor 12 Tahun 2025 adalah **“BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045”**. Visi ini menjadi dasar penyusunan RPJMN 2025–2029 dan merupakan bagian dari upaya mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara maju, berdaulat, adil, dan makmur pada tahun 2045, tepat 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia.

Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita. Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor.

3.2.2 Misi RPJMN Tahun 2025-2029

Misi RPJMN Tahun 2025–2029 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Misi ini dikenal juga sebagai Asta Cita, yakni delapan arah kebijakan utama pembangunan nasional yang merupakan turunan dari visi Presiden :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, yang berfokus pada upaya simultan yang ditujukan untuk memperkokoh ideologi pancasila, penguatan demokrasi, dan penegakan hak asasi manusia.
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, yang bertujuan untuk mengawal keberhasilan proses pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi, yang bertujuan untuk mengawal keberhasilan proses melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas, yang bertujuan untuk mengawal keberhasilan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri, yang bertujuan untuk membangun fondasi industrialisasi yang terintegrasi domestik dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi di dalam negeri yang berdaya saing global sehingga menjadi pengungkit perekonomian.
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan, yang ditujukan untuk pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga berdampak pada pengentasan kemiskinan.
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan, yang dilaksanakan melalui reformasi politik; reformasi hukum; reformasi tata kelola pemerintahan; dan pemberantasan narkoba, judi, dan penyelundupan; serta penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Negara.
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur, yang diarahkan untuk memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

3.2.3 Sasaran Pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029

Representasi keberhasilan pembangunan nasional tahun 2025-2029 tergambar pada pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagai berikut;

1. Meningkatkan pendapatan per kapita menuju setara negara maju
 - a) Laju pertumbuhan ekonomi menuju 8% di tahun 2029
 - b) GNI per kapita meningkat jadi 8.000 USD di tahun 2029
 - c) Distribusi PDRB Maritim meningkat menjadi 9,1% di tahun 2029
 - d) PDB Manufaktur meningkat menjadi 21,9% di tahun 2029

2. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat
 - a) Global Power Index menjadi peringkat 29 di tahun 2029
3. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang
 - a) Tingkat Kemiskinan turun menjadi 4,5-5% di tahun 2029 serta kemiskinan ekstrem kurang dari 0,5% di tahun 2026
 - b) Rasio Gini turun menjadi 0,372 - 0,375 di tahun 2029
 - c) Kontribusi PDRB KTI meningkat menjadi 22,4% di tahun 2029
4. Daya Saing Sumber Daya Manusia meningkat
 - a) Indeks Modal Manusia menjadi 0,59 tahun 2029
5. Emisi Gas Rumah Kaca menurun menuju *net zero emission*
 - a) Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca menjadi 45,17 tahun 2029
 - b) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat menjadi 77,20 tahun 2029

3.3 PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029

3.3.1 Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 visi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat adalah **“SUMATERA BARAT MADANI YANG MAJU DAN BERKEADILAN”** Visi ini memuat tiga kata kunci utama yang menjadi dasar pijakan arah pembangunan lima tahun ke depan, yaitu Madani, Maju, dan Berkeadilan. Ketiga kata ini memiliki makna strategis dan nilai filosofis yang kuat sebagai refleksi dari identitas, potensi, dan harapan masyarakat Sumatera Barat di masa depan.

1. MADANI

Dalam konteks pembangunan, “madani” mencerminkan masyarakat berperadaban tinggi, menjunjung nilai-nilai etika, moral, dan spiritual, serta menjaga harmoni sosial, hidup dalam keteraturan, menghargai hak dan kewajiban, dan mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat. Selain itu, madani juga mencerminkan bahwa masyarakat hidup dengan berbasiskan pada kearifan lokal, yakni masyarakat yang memelihara adat dan budaya Minangkabau yang berlandaskan filosofi “Adaik Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK)”. Madani juga menunjukkan kondisi masyarakat yang maju secara sosial dan spiritual, tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata tetapi juga keseimbangan nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan. Dengan demikian, Sumatera Barat Madani adalah daerah yang menjadikan nilai-nilai keagamaan dan adat sebagai fondasi kehidupan sosial dan pemerintahan yang adil, beretika, dan bermartabat.

2. MAJU

Kata maju dalam visi ini dimaknai sebagai kondisi pembangunan daerah yang berdaya saing tinggi, baik dalam skala nasional maupun internasional melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, teknologi, inovasi, dan infrastruktur. Maju juga menunjukkan konsep pembangunan yang berkelanjutan dimana pembangunan ekonomi dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sosial budaya masyarakat. Maju juga mencerminkan modern namun tetap berakar pada nilai tradisional, yang berarti tidak meninggalkan identitas lokal dalam proses pembangunan. Sehingga kemajuan pembangunan diharapkan mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta kapasitas daya saing daerah di berbagai bidang strategis.

3. BERKEADILAN

Keadilan dalam konteks pembangunan tidak hanya bermakna persamaan formal, tetapi juga keadilan substantif yang mencakup terjadinya Pemerataan hasil pembangunan antar wilayah, antar kelompok sosial, dan antar sektor, sehingga tidak ada daerah atau kelompok masyarakat yang tertinggal, terjadinya Kesempatan yang setara dalam mengakses pelayanan dasar, seperti

pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur serta terwujudnya Pemberdayaan kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat untuk terlibat aktif dalam pembangunan. Berkeadilan juga mencerminkan semangat inklusivitas dan keberpihakan terhadap kelompok marjinal, serta pengambilan kebijakan berbasis data dan prinsip no one left behind.

3.3.2 Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Dalam rangka menjabarkan visi tersebut ke dalam arah kebijakan yang lebih aplikatif dan sistematis, disusunlah 8 (delapan) misi pembangunan yaitu ;

Misi 1. Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas

Bertujuan untuk mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing, diperlukan perbaikan menyeluruh terhadap akses dan kualitas pendidikan serta layanan Kesehatan, yang difokuskan pada pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan di semua jenjang, penguatan layanan kesehatan dasar dan rujukan yang merata dan terjangkau serta percepatan penurunan stunting dan angka kematian ibu.

Misi 2. Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan

Terkait dengan Provinsi Sumatera Barat yang memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan, namun masih menghadapi tantangan produktivitas, keberlanjutan, dan ketahanan pangan. Transformasi sektor pertanian melalui inovasi, digitalisasi, dan modernisasi alat produksi, dan pengembangan kawasan sentra produksi pangan, hilirisasi hasil pertanian serta peningkatan pengelolaan SDA yang ramah lingkungan dan lestari berbasis ekonomi hijau dan biru harus dipercepat untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Misi 3. Nagari/Desa sebagai basis Kemajuan

Menekankan bahwa pembangunan berbasis nagari/desa menjadi hal penting untuk pemerataan kesejahteraan. Kemandirian ekonomi lokal harus diperkuat melalui pemanfaatan potensi daerah, perbaikan infrastruktur dasar, serta penguatan kapasitas kelembagaan nagari dan desa. Dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nagari, lebih ditekankan kepada digitalisasi di nagari dengan memperkuat aktivitas ekonomi saat ini. Secara natural pertumbuhan daerah akan bertumpu pada pusat-pusat kegiatan yang berada di kawasan perkotaan. Share ekonomi perkotaan diprediksi akan meningkat dari 38% menjadi 40% di tahun 2030 mendatang. Dengan adanya potensi ekonomi di kawasan perdesaan, maka yang perlu dibangun adalah urban-rural linkage yang baik dan saling mendukung satu sama lain.

Misi 4. Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat

Bertujuan untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai simpul ekonomi di pesisir barat Sumatera, sehingga perlu dilakukan penguatan sektor industri, perdagangan, dan investasi. Ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan dorongan terhadap UKM harus ditingkatkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kompetitif.

Misi 5. Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana

Menekankan bahwa Pembangunan infrastruktur harus menjawab tantangan keberlanjutan dan ketangguhan terhadap bencana. Diperlukan investasi infrastruktur yang merata dan responsif terhadap risiko bencana serta integrasi TIK untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi Pembangunan

Misi 6. Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama,

Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas

Menekan pada penguatan jati diri masyarakat Sumatera Barat yang religius dan berbudaya menjadi fondasi pembangunan. Pelestarian nilai-nilai adat, budaya, dan penguatan keluarga berkualitas penting untuk mewujudkan masyarakat harmonis dan berkarakter.

Misi 7. Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UKM

Bertujuan untuk mendorong Pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masa depan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penguatan branding destinasi, pengembangan SDM pariwisata, dan fasilitasi pelaku kreatif menjadi prioritas untuk meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap PDRB daerah.

Misi 8. Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif

Bertujuan untuk terbentuknya Pemerintahan yang bersih dan layanan publik yang efisien merupakan pondasi pembangunan daerah. Reformasi birokrasi berbasis digital, perbaikan pelayanan, dan optimalisasi PAD akan memperkuat kapasitas fiskal dan kepercayaan publik

3.3.3 Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung visi Sumatera Barat dijabarkan dalam sasaran visi sebagai berikut;

1. Peningkatan pendapatan per kapita
 - a) Meningkatkan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dari 58,3 di tahun 2025 menjadi 142,65 di tahun 2030 (dalam Rp Juta);
 - b) Meningkatkan Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) dari 25,19 tahun 2025 menjadi 36,41 di tahun 2030;
 - c) Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektor Industri dari 8,53% di tahun 2025 menjadi 9,38% di tahun 2030
2. Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan
 - a) Menurunkan tingkat kemiskinan dari 4,50%-5,10% di tahun 2025 menjadi 3,39%- 3,96% di tahun 2030;
 - b) Menurunkan Rasio Gini dari 0,274 di tahun 2025 menjadi 0,266 di tahun 2030
 - c) Meningkatkan Kontribusi PDRB Provinsi dari 1,49% menjadi tahun 2025 menjadi 1,51% di tahun 2030
 - d) Meningkatkan Kontribusi PDRB Kab.Kep Mentawai terhadap PDRB Provinsi dari 1,94% di tahun 2025 menjadi 2,00% di tahun 2030.
 - e) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dari 5,40% di tahun 2025 menjadi 5,90% di tahun 2030
3. Peningkatan daya saing daerah
 - a) Meningkatkan indeks daya saing daerah 3,58 di tahun 2025 menjadi 3,94 di tahun 2030
4. Peningkatan daya saing sumber daya manusia
 - a) Meningkatkan Indeks Modal Manusia dari 0,58 di tahun 2025 menjadi 0,63 di tahun 2030
5. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca menuju *zero emission*
 - a) Penurunan Intensitas Emisi GRK dari 52,62 di tahun 2025 menjadi 62,27 di tahun 2030
 - b) Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah dari 77,95 di tahun 2025 menjadi 79,00 di tahun 2030

3.4 VISI DAN MISI RPJMD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025-2029

3.4.1 Visi RPJMD Tahun 2025-2029

Pembangunan Kota Sawahlunto lima tahun kedepan merupakan penjabaran dari Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yang mencerminkan upaya untuk terwujudnya visi RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2045 yaitu "Sawahlunto Kota Wisata Tambang Berbudaya Kelas Dunia yang Maju dan Berkelanjutan". Berdasarkan arah pembangunan jangka panjang Kota Sawahlunto, kondisi daerah, permasalahan, tantangan pembangunan yang harus dihadapi dan isu-isu strategis yang ada, maka rumusan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sawahlunto untuk tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

**"Sawahlunto Kota Wisata Yang Estetik, Futuristik,
Hidup Dan Menghidupi"**

Dengan penjelasan kata kunci yang menunjukkan arah pembangunan Kota Sawahlunto yaitu : Estetik, Futuristik dan Hidup dan Menghidupi adalah sebagai berikut:

1. Estetik

Pada tahun 2030, tranformasi Sawahlunto kota Wisata dengan segala tatanan keindahannya dapat dirasakan keberadaannya dan menunjukkan kesiapannya menuju kota pariwisata kelas dunia 2045, dimana telah terjadi transformasi atas tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik dan pelayanan umum pemerintahan. Transformasi atas hal tersebut dapat diketahui dari peningkatan atas indeks penilaian terhitung dari lembaga resmi pemerintah Republik Indonesia, sehingga visi estetik dapat dirasakan kemanfaatannya dan terukur kinerjanya dengan penilaian ditetapkan.

2. Futuristik

Pada Tahun 2030, telah terbentuk sebuah pola pengembangan program-program kerja yang berbasiskan data (primer dan sekunder) yang dianalisis dan disusun oleh aparatur pelaksana yang telah melalui proses maksimalisasi peningkatan kemampuan personal (melalui diklat dan tinjauan langsung ke Pemerintah Daerah sasaran yang kualitasnya jauh lebih baik) dan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan dengan komitmen yang kuat, terintegrasi dan berkelanjutan, dimana dilaksanakan dalam kondisi telah terjadi penguatan landasan transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola, ketahanan sosial budaya, pembangunan kewilayahan yang merata dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang merata dan berkeadilan. Dengan stabilitas ekonomi makro daerah yang telah terbentuk di Kota Sawahlunto, maka pada tahun 2030 masyarakat di Kota Sawahlunto telah dinyatakan siap untuk menyongsong dan mensukseskan tahapan pembentukan kota wisata kelas dunia yang maju dan berkelanjutan 2045.

3. Hidup Menghidupi

Pada tahun 2030, telah terwujud sebuah tatanan kota wisata yang telah tertata dengan keindahan berdaya guna, terukur pelaksanaan kinerjanya, kesiapan setiap SDM Aparatur pelaksana pendukung atas perencanaan program dan konsistensinya terhadap penganggarannya, sehingga tercipta sebuah pola tatanan kehidupan dunia kepariwisataan di Kota Sawahlunto yang mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Sawahlunto yang berkeadilan.

Berdasarkan penjelasan kata kunci dalam visi tersebut, maka pencapaian visi dapat diukur dengan 5 (lima) sasaran visi sebagai berikut :

Tabel 3.3
Sasaran Visi RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029

NO	SASARAN VISI / INDIKATOR	RPJMD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025-2029					
		TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Peningkatan Pendapatan per kapita						
	PDRB per kapita ADHB (Rp. Juta)	73,78	94,99	116,2	137,41	158,62	179,83
	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	11,44	11,522	11,604	11,686	11,768	11,85
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan						
	Tingkat Kemiskinan (%)	1,73 - 1,96	1,63 - 1,85	1,53 - 1,75	1,42 - 1,64	1,32 - 1,54	1,22 - 1,43
	Gini Ratio (Indeks)	0,285	0,281	0,279	0,276	0,274	0,267
	Pertumbuhan Ekonomi	5,44	5,494	5,548	5,602	5,656	5,71
3	Peningkatan Daya Saing Daerah						
	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,15	3,16	3,17	3,18	3,19	3,20
4	Peningkatan Daya saing sumber daya manusia						
	Indeks Pembangunan Manusia	76,55	77,134	77,718	78,302	78,886	79,47
	Tingkat produktivitas tenaga kerja	93,84	94,74	95,63	96,5	97,42	98,31
5	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup						
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,91	72,122	72,334	72,546	72,758	72,97

3.4.2 Misi RPJMD Tahun 2025-2029

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kota Sawahlunto, Adapun rumusan misi dari Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Misi RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029

PERNYATAAN VISI	MISI
SAWAHLUNTO KOTA WISATA YANG ESTETIK, FUTURISTIK, HIDUP DAN MENGHIDUPI	1. Meningkatkan pertumbuhan sektor perekonomian yang berwawasan lingkungan
	2. Mewujudkan Smart Governance berbasis IT
	3. Penguatan Infrastruktur penunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat
	4. Peningkatan nilai-nilai keagamaan dan Pelestarian budaya melalui Pengembangan komunitas seni demi mendukung terwujudnya kota wisata yang estetik dan memiliki fungsi ekonomi dan mensejahterakan
	5. Meningkatkan fungsi ekonomi sektor pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi potensi kepariwisataan
	6. Kota Sawahlunto menuju kota sehat dan destinasi pendidikan utama yang berkarakter di Sumatera Barat
	7. Pelaksanaan tata kelola Pemerintah Daerah yang berdaya saing tinggi atas pengukuran indeks kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian dan lembaga lainnya

Uraian masiung-masing misi pembangunan jangka menengah Kota Sawahlunto sebagai berikut :

1. Meningkatkan pertumbuhan sektor perekonomian yang berwawasan lingkungan

Meningkatkan pertumbuhan sektor perekonomian melalui kemandirian desa dan ekonomi kerakyatan untuk memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan daya saing ekonomi dengan meningkatkan produktivitas pertanian, ketahanan pangan, hilirisasi industri, aktivitas perdagangan dan meningkatkan kinerja investasi daerah.

2. Mewujudkan smart governance berbasis IT

Mewujudkan smart governance berbasis IT adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Konsep ini berfokus pada penggunaan data dan teknologi digital untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, pelayanan publik yang lebih efektif, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

3. Penguatan Infrastruktur penunjang terwujudnya kesejahteraan Masyarakat

Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang vital bagi kehidupan masyarakat, seperti jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, dan sarana prasaran lainnya, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup, pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan. Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan melalui penguatan infrastruktur pelayanan dasar dan konektivitas wilayah dalam memperkuat fondasi ekonomi.

4. Peningkatan nilai-nilai keagamaan dan Pelestarian budaya melalui Pengembangan komunitas seni demi mendukung terwujudnya kota wisata yang estetik dan memiliki fungsi ekonomi dan mensejahterakan

Memperkuat pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama serta menjadikan seni budaya sebagai daya tarik wisata serta memberdayakan masyarakat melalui komunitas seni.

5. Meningkatkan fungsi ekonomi sektor pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi potensi kepariwisataan

mengoptimalkan potensi pariwisata (OCMHS dan Geopark Nasional) dan ekonomi kreatif sebagai sumber pendapatan daerah yang berkelanjutan dengan pendekatan berbasis infrastruktur, digitalisasi, keberlanjutan lingkungan, serta dukungan pelaku usaha lokal sehingga pertumbuhan sektor wisata yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga melestarikan budaya dan alam.

6. Kota Sawahlunto menuju kota sehat dan destinasi pendidikan utama yang berkarakter di Sumatera Barat

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk menuju kota sehat dan meningkatkan sarana/parasarana pendidikan, kompetensi tenaga pendidik serta kualitas proses belajar dan mengajar untuk pendidikan yang berkarakter.

7. Pelaksanaan tata kelola Pemerintah Daerah yang berdaya saing tinggi atas pengukuran indeks kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian dan lembaga lainnya

Tata Kelola Pemerintah yang memegang prinsip *good governance* dan *good government*. Tata kelola pemerintahan yang mencerminkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

3.4.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024-2030

Perumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kota Sawahlunto, secara teknokratik dengan menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2045, tujuan dan sasaran pembangunan daerah sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah serta menjadi acuan dalam perumusan tujuan dan sasaran rencana strategis perangkat daerah.

Tujuan diturunkan dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 tahun. Tujuan dapat mencakup beberapa prioritas pembangunan untuk mendukung Asta Cita atau Misi RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.

Sasaran diturunkan dari tujuan yang merupakan rangkaian kerja berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program perangkat daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 3.5
Penjabaran Visi Misi Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						Kondisi Akhir RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
MISI 1: MENINGKATKAN PERTUMBUHAN SEKTOR PEREKONOMIAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Terwujudnya pertumbuhan perekonomian yang berwawasan lingkungan		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,63	5,84	6,89	7,01	7,29	5,87	5,87	
			PDRB per kapita ADHB (Rp. Juta) (Rp. Juta Per Tahun)	80,61	89,48	99,53	110,71	123,5	136,45	136,45	
			Tingkat Kemiskinan ((%))	1,98	1,92	1,87	1,81	1,76	1,71	1,71	
			Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) (%)	23,69	23,7	23,71	23,71	23,72	23,73	23,73	
			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,61	4,66	4,35	4,31	4,2	4,09	4,09	
			Rasio Gini (Indeks)	0,297	0,296	0,295	0,294	0,293	0,291	0,291	
			Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi (Angka)	1,52	1,52	1,52	1,53	1,54	1,54	1,54	
	Terciptanya Ekosistem Usaha yang mendukung pertumbuhan UMKM, Industri dan perdagangan secara berkelanjutan		Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	8,82	9,0325	9,245	9,4575	9,67	11,85	11,85	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
			Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB (%)	1,673	1,715	1,757	1,799	1,841	2,128	2,128	
			Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) (%)	7,61	8,048	8,486	8,924	9,362	13,38	13,38	
	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan usaha dan peningkatan produktivitas tenaga kerja daerah		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)	93,84	94,74	95,63	96,50	97,42	98,31	98,31	Dinas Penanaman Modal PTSP Naker
			Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) (%)	52,96	54,16	55,36	56,56	57,76	62,62	62,62	
			Persentase peningkatan Investasi (%) (Persentase)	8,83	9,03	9,23	9,43	9,63	9,83	9,83	
	Meningkatnya kemandirian desa dalam pengelolaan potensi lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa		Indeks Desa (Rata-rata indeks desa) (Indeks)	78,72	79,02	79,32	79,62	79,92	80,22	80,22	Dinas Sosial PMDesPPA
	Terwujudnya ketahanan pangan dengan meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan		Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan (%) (%)	8,86	8,90	8,95	8,99	9,04	9,08	9,08	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan
			Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishme	7,81	7,33	6,85	6,36	5,39	4,91	4,91	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						Kondisi Akhir RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			nt) (%) (%)								
			Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Juta/orang) (Rp Juta/Orang/Bulan)	50,881	52,481	54,081	55,681	57,281	58,881	58,881	
MISI 2: MEWUJUDKAN SMART GOVERNANCE BERBASIS IT	Terwujudnya Smart Governance berbasis IT		Indeks Masyarakat Digital Indonesia (*)	53,80	55,11	56,42	57,73	59,04	60,35	60,35	
		Terselenggaranya pemerintahan digital yang terintegrasi dan responsif dalam mendukung transparansi	Indeks Pemerintah Digital (Angka)	-	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,1	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien	Indeks Pelayanan Publik (*)	3,19	3,20	3,21	3,22	3,22	4,00	4,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
MISI 3: PENGUATAN INFRASTRUKTUR PENUNJANG TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Terwujudnya infrastruktur yang inklusif, tangguh bencana dan berkelanjutan		Indeks Kinerja Infrastruktur (Indeks)	68,24	70,58	72,92	75,25	77,59	79,93	79,93	
			Indeks Risiko Bencana (IRBI) (Angka)	103.52-	103.51 - 102.24	111.65- 110.38	110.37-109.1	109.09- 107.82	107.81- 106.54	107.81- 106.54	
		Meningkatnya pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	71,91	72,12	72,33	72,55	72,76	72,97	72,97	Dinas Kawasan Permukiman Perumahan LH
			Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	64,43	64,45	64,50	64,55	64,60	64,65	64,65	
			Indeks Ketahanan Daerah (Angka)	0,45	0,47	0,49	0,51	0,53	0,55	0,55	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas	Indeks Layanan Infrastruktur Dasar (Indeks)	51,25	53,16	55,09	57,03	59,44	62,71	62,71	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Kawasan Permukiman Perumahan LH
			Indek Konektivitas Darat (Indeks)	53,65	55,34	57,13	59,12	61,21	63,58	63,58	Dinas Perhubungan
			Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (Indeks)	47,79	49,90	52,01	54,12	56,23	58,34	58,34	Dinas Kawasan Permukiman Perumahan LH
MISI 4: PENINGKATAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN DAN PELESTARIAN BUDAYA MELALUI PENGEMBANGAN KOMUNITAS SENI DEMI Mendukung Terwujudnya Kota Wisata yang Estetik dan	Terwujudnya ketahanan sosial budaya dan agama untuk menciptakan masyarakat yang harmonis		Indeks Ketahanan Nasional (Indeks)	3,06	3,07	3,08	3,09	3,10	3,11	3,11	
		Meningkatnya ketahanan sosial kehidupan beragama yang menjunjung nilai toleransi, kerukunan dan moderasi beragama	Indeks Harmoni Indonesia (Indeks)	3,20	3,50	3,70	4,20	4,30	4,50	4,50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Angka Kriminalitas (*)	0,025	0,024	0,022	0,021	0,019	0,018	0,018	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
			Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan (*)	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	14,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Meningkatnya komunitas seni dalam	Persentase pemajuan kebudayaan yang dilaksanakan (%)	74,00	76,80	78,77	80,76	83,43	85,49	85,49	Dinas Kebudayaan



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						Kondisi Akhir RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
MEMILIKI FUNGSI EKONOMI DAN MENSEJAHTERAKAN		pelestarian cagar budaya dan adat istiadat									
MISI 5: MENINGKATKAN FUNGSI EKONOMI SEKTOR PARIWISATA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI OPTIMALISASI POTENSI KEPARIWISATAAN	Peningkatan fungsi ekonomi sektor pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat		Rasio PDRB Akomodasi Mamin (%)	2,33	2,35	2,37	2,39	2,41	2,50	2,50	
		Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah	PAD sektor Pariwisata (Angka)	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,20	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
		Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung perekonomian daerah	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Ekonomi Kreatif daerah (%) (%)	6,205	6,195	6,185	6,165	6,155	6,866	6,866	
Misi 6: KOTA SAWAHLUNTO MENUJU KOTA SEHAT DAN DESTINASI PENDIDIKAN UTAMA YANG BERKARAKTER DI SUMATERA BARAT	Terwujudnya SDM yang berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	76,55	77,13	77,72	78,30	78,89	79,47	79,47	
		Meningkatnya kualitas pendidikan	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca (Angka)	82,83	82,90	83,00	83,10	83,20	83,25	83,25	Dinas Pendidikan
			Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi (Angka)	79,67	79,70	79,85	79,90	79,91	79,92	79,92	
			Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	10,65	10,78	10,90	11,02	11,13	11,25	11,25	
			Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,10	14,32	14,53	14,76	14,97	15,19	15,19	
			Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi ((%))	14,00	14,12	14,24	14,36	14,47	14,58	14,58	
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	74,43	74,75	75,07	75,39	75,71	76,03	76,03	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
			Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) (%)	17,70	16,45	15,20	13,95	12,70	12,90	12,90	
			Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	100	100	100	100	100	100	100	
		Terciptanya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Keluarga (*)	65,40	66,20	67,00	67,80	68,60	69,40	69,40	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,270	0,270	0,269	0,269	0,268	0,268	0,268	Dinas Sosial PMDesPPA
			Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	65,67	65,77	65,87	65,97	66,07	66,17	66,17	
			Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	95,83	95,93	96,03	96,13	96,23	96,33	96,33	
			Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	56,70	57,30	57,90	58,50	59,10	59,70	59,70	
		Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga	Persentase peningkatan partisipasi pemuda berwirausaha (%)	0,36	0,43	0,50	0,70	0,80	1,00	1,00	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
			Persentase peningkatan prestasi Olahraga (%)	0,25	0,30	1,20	1,70	1,90	2,05	2,05	
MISI 7: PELAKSANAAN TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH YANG BERDAYA SAING TINGGI ATAS	Terwujudnya Kinerja Pemerintah Daerah yang berdaya saing		Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	76,35	77,56	78,17	79,01	80,47	82,72	82,72	
			Indeks Inovasi Daerah (Angka)	73,21	74,67	76,14	77,60	79,07	80,53	80,53	
		Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Akuntabilitas dan Pengawasan yang	Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah ()	3,15	3,16	3,17	3,18	3,19	3,20	3,20	Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
			Nilai AKIP Instansi Pemerintah (Nilai)	65,23	68,17	70,11	71,02	72,03	73,20	73,20	Sekretariat



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						Kondisi Akhir RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
PENGUKURAN INDEKS KINERJA YANG DITETAPKAN OLEH KEMENTERIAN DAN LEMBAGA LAINNYA		berkualitas									Daerah, , Barenlitbangda, Inspektorat
			Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	3,20	3,25	3,30	3,35	3,40	3,45	3,45	
		Terwujudnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	78,72	81,00	84,00	87,00	90,00	90,00	90,00	Badan Kepegawaian SDM
		Meningkatnya tata kelola arsip dan literasi masyarakat	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah (Indeks)	50,56	50,60	50,65	50,70	50,75	60,00	60,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Indeks pembangunan literasi masyarakat (Indeks)	94,83	94,85	94,90	94,95	94,98	95,00	95,00	
		Meningkatnya kualitas Pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) (Indeks)	70,85	71	72	73	74	75	75	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

3.4.4 Keterkaitan Antara Visi Misi RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2045

Untuk mencapai visi RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2045 yaitu **“Sawahlunto Kota Wisata Tambang Berbudaya Kelas Dunia yang Maju dan Berkelanjutan”** yang menjadikan keunggulan pariwisata Kota Sawahlunto sampai tingkat dunia sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dalam perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan dalam RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 yang merupakan tahap I dari RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2045 dengan visi menjadikan Sawahlunto kota wisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tahap I RPJPD ini mempersiapkan kota Sawahlunto menjadi Kota Wisata Tambang Berbudaya Kelas Dunia. Keselarasan antara dokumen ini dengan mengakomodir indikator-indikator sasaran visi RPJPD Kota Sawahlunto tahun 2025-2045 dalam RPJMD Kota Sawahlunto tahun 2025-2029, seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Penyelarasan Sasaran Visi RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2045 dengan Sasaran Visi RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029

No	RPJPD Kota Sawahlunto tahun 2025-2045			RPJMD Kota Sawahlunto tahun 2025-2029						
	Sasaran Visi /Indikator	Target		Sasaran Visi /Indikator	Target					
		2025	2030		2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Peningkatan Pendapatan per kapita			Peningkatan Pendapatan per kapita						
	PDRB per kapita ADHB (Rp Juta)	73,78	179,83	PDRB per kapita ADHB (Rp Juta)	80,61	89,48	99,53	110,71	123,5	136,45
	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	11,44	14,8	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	8,82	9,0325	9,245	9,4575	9,67	11,85
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan			Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan						
	Tingkat Kemiskinan (%)	1,73-1,96	1,22-1,43	Tingkat Kemiskinan (%)	1,98	1,92	1,87	1,81	1,76	1,71
	Rasio gini (Indeks)	0,285	0,267	Rasio gini (Indeks)	0,297	0,296	0,295	0,294	0,293	0,291
	Pertumbuhan Ekonomi	5,44	5,71	Pertumbuhan Ekonomi	4,63	5,84	6,89	7,01	7,29	5,87
3	Peningkatan Daya Saing Daerah			Peningkatan Daya Saing Daerah						
	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,15	3,20	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,15	3,16	3,17	3,18	3,19	3,2
4	Peningkatan Daya saing sumber daya manusia			Peningkatan Daya saing sumber daya manusia						
	Indeks Pembangunan Manusia	76,55	79,47	Indeks Pembangunan Manusia	77,45	78,11	78,79	79,46	80,13	80,81
	Tingkat produktivitas tenaga kerja	93.842	98.311	Tingkat produktivitas tenaga kerja	93,84	94,74	95,63	96,5	97,42	98,31
5	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup						
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,91	72,97	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,91	72,122	72,334	72,546	72,758	72,97

Dalam rangka menjabarkan visi tersebut ke dalam arah kebijakan yang lebih aplikatif dan sistematis, disusunlah 8 (delapan) misi pembangunan. Misi ini menjadi penjabaran operasional dari visi, yang menggambarkan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah untuk menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan daerah, sekaligus menangkap peluang dan potensi strategis yang dimiliki Kota Sawahlunto

Penyelarasan Misi RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2045, menunjukkan hubungan yang bersifat hierarkis, di mana RPJMD menjadi langkah operasional untuk mencapai visi jangka panjang RPJPD. Untuk keterkaitan misi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Penyelarasan Misi RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 dengan
Misi RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2045

MISI RPJMD TAHUN 2025-2029		RPJPD TAHUN 2025-2045
1	Meningkatkan pertumbuhan sektor perekonomian yang berwawasan lingkungan	Misi 2. Transformasi ekonomi yang inklusif dalam mewujudkan Wisata Sejarah Dunia (OCMHS) dan Geopark Nasional
2	Mewujudkan Smart Governance berbasis IT	Misi 3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif
3	Penguatan Infrastruktur penunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat	Misi 7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan berkelanjutan
4	Peningkatan nilai-nilai keagamaan dan Pelestarian budaya melalui Pengembangan komunitas seni demi mendukung terwujudnya kota wisata yang estetik dan memiliki fungsi ekonomi dan mensejahterakan	Misi 1. Mewujudkan Transformasi Sosial untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkarakter dan berdaya saing
		Misi 5. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
5	Meningkatkan fungsi ekonomi sektor pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi potensi kepariwisataan	Misi 2. Transformasi ekonomi yang inklusif dalam mewujudkan Wisata Sejarah Dunia (OCMHS) dan Geopark Nasional
6	Kota Sawahlunto menuju kota sehat dan destinasi pendidikan utama yang berkarakter di Sumatera Barat	Misi 1. Mewujudkan Transformasi Sosial untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkarakter dan berdaya saing
7	Pelaksanaan tata kelola Pemerintah Daerah yang berdaya saing tinggi atas pengukuran indeks kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian dan lembaga lainnya	Misi 3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif
		Misi 8. Mewujudkan Kesisambungan Pembangunan Daerah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Misi RPJMD Kota Sawahlunto tahun 2025-2025 telah selaras dengan 8 Misi RPJPD Kota Sawahlunto tahun 2025-2045. dimana diharapkan pada Tahap I RPJPD dapat menjadi kan fondasi Transformasi

3.4.5 Keterkaitan Antara Visi Misi RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 dengan Visi Misi RPJMN

Keterkaitan antara Visi Misi RPJMD dengan Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat dan Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) seperti tabel dibawah ini :

Tabel 3.8
Penyelarasan Visi RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 dengan
RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan RPJMD Kota Sawahlunto
Tahun 2025-2029

Visi RPJMD Kota Sawahlunto	Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat	Visi RPJMN
Sawahlunto Kota Wisata yang Estetik, Futuristik, Hidup dan Menghidupi	Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045

Dari tabel diatas terlihat adanya keselarasan antara masing-masing visi, yaitu: Visi RPJMN Tahun 2025-2029, dengan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045, kondisi yang diharapkan adalah mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan, yang diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan. Dalam RPJMD Kota Sawahlunto tahun 2025-2029, dengan pencapaian menjadikan Sawahlunto kota wisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga diharapkan penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan pada tahun 2030, penyelarasan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.9
Penyelarasan Sasaran Visi RPJMN Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kota
Sawahlunto Tahun 2025-2029

No	RPJMN tahun 2025-2029				RPJMD Kota Sawahlunto tahun 2025-2029					
	Sasaran Visi / Indikator	Target		Sasaran Visi / Indikator	Target					
		2025	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan pendapatan perkapita menuju setara negara maju			Peningkatan Pendapatan per kapita						
	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,3	8							
	GNI per kapita meningkat (USD)	5410	8000	PDRB per kapita ADHB (Rp Juta)	80,61	89,48	99,53	110,71	123,5	136,45
	Kontribusi PDBMaritim meningkat(%)	8,1	9,1							
	Kontribusi PDB Manufaktur meningkat (%)	20,8	21,9	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	8,82	9,0325	9,245	9,4575	9,67	11,85
2	Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang			Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan						
	Tingkat Kemiskinan (%)	08-Jul	4.5-5	Tingkat Kemiskinan (%)	1,98	1,92	1,87	1,81	1,76	1,71
	Rasio gini (Indeks)	0.378-0.382	0.372-0.375	Rasio gini (Indeks)	0,297	0,296	0,295	0,294	0,293	0,291
	Kontribusi PDRB KTI meningkat	21,4	22,4	Pertumbuhan Ekonomi	4,63	5,84	6,89	7,01	7,29	5,87
3	Kepemimpinan dan Pengaruh di osnia Internasion.l Meningkat			Peningkatan Daya Saing Daerah						
	Global Power Indeks meningkat (peringkat)	33,00	29,00	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,15	3,16	3,17	3,18	3,19	3,20
4	Peningkatan Daya saing sumber daya manusia			Peningkatan Daya saing sumber daya manusia						
	Indeks Modal Manusia (IMM) meningkat	0,56	0,59	Indeks Pembangunan Manusia	77,45	78,11	78,79	79,46	80,13	80,81
				Tingkat produktivitas tenaga kerja	93,84	94,74	95,63	96,5	97,42	98,31
5	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup						
	Penurunan intensitas emisi GRK	35,53	45,17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,91	72,122	72,334	72,546	72,758	72,97
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,49	77,2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,91	72,122	72,334	72,546	72,758	72,97

Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bertekad untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang bermartabat, berdaya saing, dan harmonis dalam balutan nilai-nilai lokal dan keagamaan yang kuat. RPJMD Kota Sawahlunto tahun 2025-2029, dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan penguatan landasan transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola, ketahanan sosial budaya, pembangunan kewilayahan yang merata dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang merata dan berkeadilan sehingga tercipta sebuah pola tatanan kehidupan dunia kepariwisataan di Kota Sawahlunto yang mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, penyelarasan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.10
Penyelarasan Sasaran Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029
dengan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029

No	RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029				RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029					
	Sasaran Visi /Indikator	Target		Sasaran Visi /Indikator	Target					
		2025	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Peningkatan Pendapatan per kapita			Peningkatan Pendapatan per kapita						
	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Rp Juta)	58,32	142,65	PDRB per kapita ADHB (Rp Juta)	80,61	89,48	99,53	110,71	123,5	136,45
	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEL)	25,19	36,41							
	Kontribusi PDRB Sektor Industri (%)	8,53	9,38	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	11,44	11,522	11,604	11,686	11,768	11,85
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan			Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan						
	Tingkat Kemiskinan (%)	4.50-5.10	3.39-3.96	Tingkat Kemiskinan (%)	1,98	1,92	1,87	1,81	1,76	1,71
	Rasio gini (Indeks)	0,274	0,266	Rasio gini (Indeks)	0,297	0,296	0,295	0,294	0,293	0,291
	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,49	1,51							
	Kontribusi PDRB Kab.Kep Mentawai terhadap PDRB Provinsi (%)	1,94	2,00							
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,40	5,90	Pertumbuhan Ekonomi	4,27	6,71	7,08	6,97	6,97	5,77
3	Peningkatan daya saing daerah			Peningkatan Daya Saing Daerah						
	Indeks Daya Saing Daerah	3,58	3,94	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,15	3,16	3,17	3,18	3,19	3,20
4	Peningkatan Daya saing sumber daya manusia			Peningkatan Daya saing sumber daya manusia						
	Indeks Modal Manusia	0,58	0,63	Indeks Pembangunan Manusia	65,40	66,20	67,00	67,80	68,60	69,40
				Tingkat produktivitas tenaga kerja	93,84	94,74	95,63	96,5	97,42	98,31
5	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca menuju zero emission			Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup						
	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	52,62	62,27	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,91	72,122	72,334	72,546	72,758	72,97
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,95	79,00	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,91	72,122	72,334	72,546	72,758	72,97

Penyelarasan Misi RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025- 2029 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.11
Penyelarasan Misi RPJMD Kota Sawahlunto dengan , RPJMD
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dan RPJMN

RPJMD Kota Sawahlunto	RPJMD Provinsi Sumatera Barat	RPJMN
1. Meningkatkan pertumbuhan sektor perekonomian yang berwawasan lingkungan	Lumbung pangan nasional dan ekonomi berkelanjutan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air ekonomi syariah. ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
	Membangun kehidupan beradat dan berbudaya berbasis agama, kearifan lokal melalui dukungan keluarga yang berkualitas	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan Alam dan budaya, sena peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
	Sumatera Barat pusat perdagangan dan bisnis Sumatera Bagian Barat	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
	Nagari/desa sebagai basis kemajuan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk penumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
2. Mewujudkan smart governance berbasis IT	Tata kelola pemerintahan bersih dan pelayanan publik yang efektif	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
		Memperkokoh ideologi Pancasila,demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
3. Penguatan Infrastruktur penunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat	Pendidikan merata, kesehatan berkualitas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, sena pmguatan peran perempuan. pemuda (generasi milenial dan qenerasi Z), dan penyandang disabilitas
	Membangun infrastruktur berkeadilan dan siap tanggap bencana	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. Peningkatan nilai-nilai keagamaan dan Pelestarian budaya melalui Pengembangan komunitas seni demi mendukung terwujudnya kota wisata yang estetik dan memiliki fungsi ekonomi dan mensejahterakan	Tingkatkan daya saing pariwisata dan akselerasi ekonomi kreatif untuk UMKM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi
5. Meningkatkan fungsi ekonomi sektor pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi potensi kepariwisataan	Tingkatkan daya saing pariwisata dan akselerasi ekonomi kreatif untuk UMKM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi
6. Kota Sawahlunto menuju kota sehat dan destinasi pendidikan utama yang berkarakter di Sumatera Barat	Pendidikan merata, kesehatan berkualitas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, sena pmguatan peran perempuan. pemuda (generasi milenial dan qenerasi Z), dan penyandang disabilitas
7. Pelaksanaan tata kelola Pemerintah Daerah yang berdaya saing tinggi atas pengukuran indeks kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian dan lembaga lainnya	Tata kelola pemerintahan bersih dan pelayanan publik yang efektif	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
		Memperkokoh ideologi Pancasila,demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)

3.5 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.5.1 Strategi, Arah Kebijakan Menurut Tujuan dan Sasaran

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran rencana pembangunan jangka menengah daerah. Dengan Pendekatan komprehensif tersebut strategi dapat digunakan sebagai instrument untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program pembangunan. Adapun Strategi menurut Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut ;

Tabel 3.12

Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029
VISI: SAWAHLUNTO KOTA WISATA YANG ESTETIK, FUTURISTIK, HIDUP DAN MENGHIDUPI

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
MISI 1. MENINGKATKAN PERTUMBUHAN SEKTOR PEREKONOMIAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN					
1	Terwujudnya pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan	1	Terciptanya Ekosistem Usaha yang mendukung pertumbuhan UMKM, Industri dan perdagangan secara berkelanjutan	1	Meningkatkan penataan pasar dan mengoptimalkan fungsi pasar sebagai pusat perdagangan
				2	Meningkatkan daya saing industri
				3	Memaksimalkan potensi koperasi
		2	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan usaha dan peningkatan produktivitas tenaga kerja daerah	1	Meningkatkan investasi daerah
				2	Penguatan Pelatihan kerja serta peningkatan produktivitas tenaga kerja
		3	Meningkatnya kemandirian desa dalam pengelolaan potensi lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa	1	Mempercepat pembangunan desa
				2	Pembentukan Pusat Kreatifitas Desa (<i>Creative Hub</i>) sebagai inovasi dan wirausaha
				3	Meningkatkan kesejahteraan sosial
		4	Terwujudnya ketahanan pangan dengan meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan	4	Memberikan pendampingan dan fasilitas pada penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus lainnya
				1	Meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas pangan, stabilitas pasokan, serta pemanfaatan sumber daya yang efisien.
				2	Pengembangan sektor pertanian berbasis kawasan dan komoditas bernilai ekonomi tinggi
				3	Peningkatan produksi/ produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian serta kelautan dan perikanan
		4	Pengembangan teknologi budidaya perikanan		
MISI 2. MEWUJUDKAN SMART GOVERNANCE BERBASIS IT					
2	Terwujudnya smart governance berbasis IT	1	Terselenggaranya pemerintahan digital yang terintegrasi dan responsif dalam mendukung transparansi	1	Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
				2	Memperkuat keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah
				3	Penguatan kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)
		2	Terwujudnya pelayanan pubik yang efektif dan efisien	1	Peningkatan digitalisasi layanan publik yang terintegrasi dan terpadu
MISI 3. PENGUATAN INFRASTRUKTUR PENUNJANG TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
3	Terwujudnya infrastruktur yang inklusif, tangguh	1	Meningkatnya pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh	1	Peningkatan pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
bencana dan berkelanjutan		bencana	2	Percepatan pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	
			3	Penguatan sarana prasarana kebakaran	
	2	Meningkatnya Aksesibilitas/Konektivitas Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas	1	Meningkatkan kelestarian dan pendayagunaan sumber daya air	
			2	Pemerataan Akses Air Minum Perpipaan	
			3	Penguatan Infrastruktur Sanitasi	
			4	Peningkatan Kualitas drainase perkotaan , infrastruktur permukiman, bangunan gedung	
			5	Pemantapan kondisi infrastruktur terutama jalan dan jembatan	
			6	Pembangunan kawasan perumahan yang memenuhi standar hunian layak dan ramah lingkungan	
			7	Percepatan status lahan untuk pembangunan	
			8	Peningkatan kapasitas dan kualitas transportasi darat	
MISI 4. PENINGKATAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN DAN PELESTARIAN BUDAYA MELALUI PENGEMBANGAN KOMUNITAS SENI DEMI MENDUKUNG TERWUJUDNYA KOTA WISATA YANG ESTETIK DAN MEMILIKI FUNGSI EKONOMI DAN MENSEJAHTERAKAN					
4	Terwujudnya ketahanan sosial budaya dan agama untuk menciptakan masyarakat yang harmonis	1	Meningkatnya ketahanan Sosial kehidupan beragama yang menjunjung nilai toleransi, kerukunan dan moderasi beragama	1	Meningkatkan Penerapan Nilai-nilai Agama dan Pancasila dalam kehidupan masyarakat
				2	Meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat
		2	Meningkatnya komunitas seni dalam pelestarian cagar budaya dan adat istiadat	1	Memperluas tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam meningkatkan jumlah objek pemajuan kebudayaan
				2	Melestarikan warisan budaya dan kearifan lokal
MISI 5 OPTIMALISASI POTENSI KEPARIWISATAAN					
5	Peningkatan fungsi ekonomi sektor pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat	1	Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah	1	Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata
		2	Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung perekonomian daerah	1	Peningkatan Pelaku ekonomi kreatif yang berkualitas
MISI 6 KOTA SAWAHLUNTO MENUJU KOTA SEHAT DAN DESTINASI PENDIDIKAN UTAMA YANG BERKARAKTER DI SUMATERA BARAT					
6	Terwujudnya SDM yang berdaya saing	1	Terciptanya pendidikan yang berkualitas	1	Menyelenggarakan Pendidikan yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau
				2	Penguatan pendidikan berkarakater melalui kurikulum muatan lokal
		2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Meningkatkan kualitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan
				2	Pencegahan Stunting melalui penerapan pola hidup sehat dan pemenuhan gizi ibu
		3	Terciptanya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	1	Pengendalian Fertilitas dan Mortalitas
				2	Meningkatkan ketahanan keluarga, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		4	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga	1	Memberikan sarana prasarana generasi muda (milenial & gen z) untuk berkarya melalui kelembagaan pemuda
				2	Meningkatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga
MISI 7. PELAKSANAAN TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH YANG BERDAYA SAING TINGGI ATAS PENGUKURAN INDEKS KINERJA YANG DITETAPKAN OLEH KEMENTERIAN DAN LEMBAGA LAINNYA					
7	Terwujudnya Kinerja Pemerintah Daerah yang berdaya saing	1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Akuntabilitas dan Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih.	1	Meningkatkan penerapan reformasi birokrasi
				2	Meningkatkan kerjasama pembangunan
		2	Terwujudnya profesionalitas ASN	1	Penerapan sistem meritokrasi dalam pengelolaan dan pendayagunaan ASN

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
		3	Meningkatnya tata kelola arsip dan literasi masyarakat	1	Penguatan tata kelola karsipan
		4	Meningkatnya kualitas Pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah	2	Penguatan literasi masyarakat
				1	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah
				2	Peningkatan kualitas penelitian dan inovasi daerah
				3	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
				4	Mengelola dan mengoptimalkan aset fisik dan tak berwujud milik daerah secara produktif.
				5	Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah melalui Pengembangan Sumber daya alam dan infrastruktur serta Ekonomi Digital
				6	penguatan peran pengawasan internal dan eksternal

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikiran/kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan sasaran RPJMD. Adapun Strategi dan arah kebijakan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :



Tabel 3.13
Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN				
	TAHUN 1 (2026)	TAHUN 2 (2027)	TAHUN 3 (2028)	TAHUN 4 (2029)	TAHUN 5 (2030)
Misi 1. Meningkatkan pertumbuhan sektor perekonomian yang berwawasan lingkungan					
Tujuan 1. Terwujudnya pertumbuhan perekonomian yang berwawasan lingkungan					
1 Terciptanya Ekosistem Usaha yang mendukung pertumbuhan UMKM, Industri dan perdagangan secara berkelanjutan	Penyediaan pusat cenderamata dan oleh-oleh khas Sawahlunto yang lengkap dan mudah diakses wisatawan	Penyediaan pusat cenderamata dan oleh-oleh khas Sawahlunto yang lengkap dan mudah diakses wisatawan	Optimalisasi pusat cenderamata dan oleh-oleh khas Sawahlunto yang lengkap dan mudah diakses wisatawan	Optimalisasi pusat cenderamata dan oleh-oleh khas Sawahlunto yang lengkap dan mudah diakses wisatawan	Pemeliharaan pusat cenderamata dan oleh-oleh khas Sawahlunto yang lengkap dan mudah diakses wisatawan
	Revitalisasi Pasar Sawahlunto melalui kerjasama dengan investor	Revitalisasi Pasar Sawahlunto melalui kerjasama dengan investor	Pengembangan Pasar Sawahlunto melalui kerjasama dengan investor	Optimalisasi pemanfaatan Pasar Sawahlunto	Pemeliharaan Pasar Sawahlunto
	Revitalisasi / pembangunan pasar wisata terintegrasi (RPJMN)	Revitalisasi / pembangunan pasar wisata terintegrasi (RPJMN)	Optimalisasi pasar wisata terintegrasi (RPJMN)	Pemeliharaan pasar wisata terintegrasi (RPJMN)	Pemeliharaan pasar wisata terintegrasi (RPJMN)
	Pendataan dalam rangka Penataan pasar tradisional dan pengoptimalan fungsi pasar sebagai pusat perdagangan	Penataan pasar tradisional dan pengoptimalan fungsi pasar sebagai pusat perdagangan	Digitalisasi dan transparansi pengelolaan pasar tradisional sebagai pusat perdagangan	Pengembangan konektivitas pasar tradisional dengan sentra produksi	Pemeliharaan pasar tradisional dan pengoptimalan fungsi pasar sebagai pusat perdagangan
	Pendataan pedagang kaki lima dan peningkatan sarana dan prasarana pedagang kaki lima	Penataan pedagang kaki lima dan peningkatan sarana dan prasarana pedagang kaki lima	Optimalisasi sarana dan prasarana dalam pemanfaatan pedagang kaki lima	Optimalisasi sarana dan prasarana dalam pemanfaatan pedagang kaki lima	Optimalisasi sarana dan prasarana dalam pemanfaatan pedagang kaki lima
	Pendataan UKM dalam Mendorong pengembangan pasar online dan ekspor produk unggulan daerah	Digitalisasi pengembangan pasar online dan ekspor produk unggulan daerah	Digitalisasi pengembangan pasar online dan ekspor produk unggulan daerah	Digitalisasi pengembangan pasar online dan ekspor produk unggulan daerah	Optimalisasi Digitalisasi pengembangan pasar online dan ekspor produk unggulan daerah
	Penataan kawasan Rest Area di Kebun Jeruk dan Muaro Kalaban (Kecamatan Silungkang) sebagai kawasan perdagangan	Penataan kawasan Rest Area di Kebun Jeruk dan Muaro Kalaban (Kecamatan Silungkang) sebagai kawasan perdagangan	Optimalisasi kawasan Rest Area di Kebun Jeruk dan Muaro Kalaban (Kecamatan Silungkang) sebagai kawasan perdagangan	Pemeliharaan kawasan Rest Area di Kebun Jeruk dan Muaro Kalaban (Kecamatan Silungkang) sebagai kawasan perdagangan	Pemeliharaan kawasan Rest Area di Kebun Jeruk dan Muaro Kalaban (Kecamatan Silungkang) sebagai kawasan perdagangan
	Operasionalisasi sentra IKM Tenun di Silungkang sebagai pusat pelatihan tenun	Operasionalisasi sentra IKM Tenun di Silungkang sebagai pusat pelatihan tenun	Operasionalisasi sentra IKM Tenun di Silungkang sebagai pusat pelatihan tenun	Operasionalisasi sentra IKM Tenun di Silungkang sebagai pusat pelatihan tenun	Operasionalisasi sentra IKM Tenun di Silungkang sebagai pusat pelatihan tenun
	Optimalisasi fungsi UPTD tekstil di Muaro Kalaban	Optimalisasi fungsi UPTD tekstil di Muaro Kalaban	Optimalisasi fungsi UPTD tekstil di Muaro Kalaban	Pengembangan dan Digitalisasi UPTD tekstil di Muaro Kalaban	Pengembangan dan Digitalisasi UPTD tekstil di Muaro Kalaban
	Pendataan IKM dalam rangka membangkitkan daya saing ekonomi	Meningkatkan kapasitas produksi dan SDM IKM untuk meningkatkan daya saing ekonomi	Meningkatkan kapasitas produksi dan SDM IKM untuk meningkatkan daya saing ekonomi	Membangkitkan daya saing ekonomi melalui dukungan dan fasilitasi kepada industri kecil dan menengah	Membangkitkan daya saing ekonomi melalui dukungan dan fasilitasi kepada industri kecil dan menengah
	Operasionalisasi sentra IKM pengolahan	Operasionalisasi sentra IKM pengolahan	Operasionalisasi sentra IKM pengolahan	Operasionalisasi sentra IKM pengolahan	Operasionalisasi sentra IKM pengolahan
	Pembinaan terhadap IKM unggulan dapat memiliki akses pasar pada e-commerce platform	Pembinaan terhadap IKM unggulan dapat memiliki akses pasar pada e-commerce platform	Pembinaan terhadap IKM unggulan dapat memiliki akses pasar pada e-commerce platform	Pembinaan terhadap IKM unggulan dapat memiliki akses pasar pada e-commerce platform	Pembinaan terhadap IKM unggulan dapat memiliki akses pasar pada e-commerce platform
	Pendataan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi	Pengembangan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi	Pengembangan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi	Digitalisasi klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi	Optimalisasi Digitalisasi klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi
	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Kopdes Merah Putih.	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Kopdes Merah Putih.	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Kopdes Merah Putih.	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Kopdes Merah Putih.	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Kopdes Merah Putih.
	Peningkatan kapasitas pelaku usaha koperasi melalui pelatihan dan bimbingan teknis	Peningkatan kapasitas pelaku usaha koperasi melalui pelatihan dan bimbingan teknis	Peningkatan kapasitas pelaku usaha koperasi melalui pelatihan dan bimbingan teknis	Peningkatan kapasitas pelaku usaha koperasi melalui pelatihan dan bimbingan teknis	Peningkatan kapasitas pelaku usaha koperasi melalui pelatihan dan bimbingan teknis



SASARAN	ARAH KEBIJAKAN				
	TAHUN 1 (2026)	TAHUN 2 (2027)	TAHUN 3 (2028)	TAHUN 4 (2029)	TAHUN 5 (2030)
	Peningkatan kemampuan wirausaha masyarakat melalui Koperasi Pengembangan Koperasi Merah Putih yang fokus pada sektor produksi/jasa potensial di masing-masing desa/kelurahan Pembinaan penguatan kelembagaan koperasi, termasuk penyusunan anggaran dasar, manajemen, dan tata kelola.	Peningkatan kemampuan wirausaha masyarakat melalui Koperasi Pengembangan Koperasi Merah Putih yang fokus pada sektor produksi/jasa potensial di masing-masing desa/kelurahan Pembinaan penguatan kelembagaan koperasi, termasuk penyusunan anggaran dasar, manajemen, dan tata kelola.	Peningkatan kemampuan wirausaha masyarakat melalui Koperasi Pengembangan Koperasi Merah Putih yang fokus pada sektor produksi/jasa potensial di masing-masing desa/kelurahan Pembinaan penguatan kelembagaan koperasi, termasuk penyusunan anggaran dasar, manajemen, dan tata kelola.	Peningkatan kemampuan wirausaha masyarakat melalui Koperasi Pengembangan Koperasi Merah Putih yang fokus pada sektor produksi/jasa potensial di masing-masing desa/kelurahan Pembinaan penguatan kelembagaan koperasi, termasuk penyusunan anggaran dasar, manajemen, dan tata kelola.	Peningkatan kemampuan wirausaha masyarakat melalui Koperasi Pengembangan Koperasi Merah Putih yang fokus pada sektor produksi/jasa potensial di masing-masing desa/kelurahan Pembinaan penguatan kelembagaan koperasi, termasuk penyusunan anggaran dasar, manajemen, dan tata kelola.
2 Meningkatkan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan usaha dan peningkatan produktivitas tenaga kerja	Pendataan Aset Daerah yang produktif Melakukan pemutakhiran data potensi investasi daerah secara berkala Menetapkan kebijakan pemberian insentif, kemudahan, dan fasilitas penanaman modal sesuai potensi unggulan daerah. Fasilitasi percepatan pengelolaan perizinan Meningkatkan transparansi dan ketersediaan informasi investasi untuk menarik investor Mendorong Kemitraan Strategis antara Perusahaan Daerah dan Investor dalam rangka pengembangan sektor-sektor potensial seperti pariwisata, energi terbarukan, pertambangan ramah lingkungan, dan ekonomi kreatif. Menetapkan kebijakan pemberian insentif, kemudahan, dan fasilitas penanaman modal sesuai potensi unggulan daerah. Melaksanakan evaluasi berkala untuk mengukur dampak investasi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan PAD, dan kesejahteraan masyarakat Memperkuat kapasitas lembaga daerah (DPMPSTP) dalam pelayanan perizinan, fasilitasi investasi, dan promosi potensi daerah Menyusun strategi promosi investasi daerah yang fokus pada sektor unggulan sesuai potensi lokal Mengintegrasikan promosi peluang investasi Kota Sawahlunto dengan kemitraan dengan perusahaan daerah dan swasta	Optimalisasi Aset Daerah melalui Skema Investasi BUMD Melakukan pemutakhiran data potensi investasi daerah secara berkala optimalisasi kebijakan pemberian insentif, kemudahan, dan fasilitas penanaman modal sesuai potensi unggulan daerah. Peningkatan Efisiensi dan Kemudahan Perizinan Meningkatkan transparansi dan ketersediaan informasi investasi untuk menarik investor Mendorong Kemitraan Strategis antara Perusahaan Daerah dan Investor dalam rangka pengembangan sektor-sektor potensial seperti pariwisata, energi terbarukan, pertambangan ramah lingkungan, dan ekonomi kreatif. optimalisasi pelaksanaan kebijakan pemberian insentif, kemudahan, dan fasilitas penanaman modal sesuai potensi unggulan daerah. Meningkatkan evaluasi berkala untuk mengukur dampak investasi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan PAD, dan kesejahteraan masyarakat Meningkatkan kapasitas lembaga daerah (DPMPSTP) dalam pelayanan perizinan, fasilitasi investasi, dan promosi potensi daerah optimalisasi strategi promosi investasi daerah yang fokus pada sektor unggulan sesuai potensi lokal Mengintegrasikan promosi peluang investasi Kota Sawahlunto dengan kemitraan dengan perusahaan daerah dan swasta	Optimalisasi Aset Daerah melalui Skema Investasi BUMD Menyusun Peta Potensi Investasi (PIR) berbasis digital yang terintegrasi dengan sistem nasional (Nasional Single Window For Investment (NSWI)/Sistem OSS). optimalisasi kebijakan pemberian insentif, kemudahan, dan fasilitas penanaman modal sesuai potensi unggulan daerah. Peningkatan Efisiensi dan Kemudahan Perizinan Meningkatkan transparansi dan ketersediaan informasi investasi untuk menarik investor Mendorong Kemitraan Strategis antara Perusahaan Daerah dan Investor dalam rangka pengembangan sektor-sektor potensial seperti pariwisata, energi terbarukan, pertambangan ramah lingkungan, dan ekonomi kreatif. optimalisasi pelaksanaan kebijakan pemberian insentif, kemudahan, dan fasilitas penanaman modal sesuai potensi unggulan daerah. Meningkatkan evaluasi berkala untuk mengukur dampak investasi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan PAD, dan kesejahteraan masyarakat Meningkatkan kapasitas lembaga daerah (DPMPSTP) dalam pelayanan perizinan, fasilitasi investasi, dan promosi potensi daerah optimalisasi strategi promosi investasi daerah yang fokus pada sektor unggulan sesuai potensi lokal Mengintegrasikan promosi peluang investasi Kota Sawahlunto dengan kemitraan dengan perusahaan daerah dan swasta	Optimalisasi Aset Daerah melalui Skema Investasi BUMD Menyusun Peta Potensi Investasi (PIR) berbasis digital yang terintegrasi dengan sistem nasional (Nasional Single Window For Investment (NSWI)/Sistem OSS). optimalisasi kebijakan pemberian insentif, kemudahan, dan fasilitas penanaman modal sesuai potensi unggulan daerah. Peningkatan Efisiensi dan Kemudahan Perizinan Meningkatkan transparansi dan ketersediaan informasi investasi untuk menarik investor Mendorong Kemitraan Strategis antara Perusahaan Daerah dan Investor dalam rangka pengembangan sektor-sektor potensial seperti pariwisata, energi terbarukan, pertambangan ramah lingkungan, dan ekonomi kreatif. optimalisasi pelaksanaan kebijakan pemberian insentif, kemudahan, dan fasilitas penanaman modal sesuai potensi unggulan daerah. Meningkatkan evaluasi berkala untuk mengukur dampak investasi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan PAD, dan kesejahteraan masyarakat Meningkatkan kapasitas lembaga daerah (DPMPSTP) dalam pelayanan perizinan, fasilitasi investasi, dan promosi potensi daerah optimalisasi strategi promosi investasi daerah yang fokus pada sektor unggulan sesuai potensi lokal Mengintegrasikan promosi peluang investasi Kota Sawahlunto dengan kemitraan dengan perusahaan daerah dan swasta	Optimalisasi Aset Daerah melalui Skema Investasi BUMD Menyusun Peta Potensi Investasi (PIR) berbasis digital yang terintegrasi dengan sistem nasional (Nasional Single Window For Investment (NSWI)/Sistem OSS). optimalisasi kebijakan pemberian insentif, kemudahan, dan fasilitas penanaman modal sesuai potensi unggulan daerah. Peningkatan Efisiensi dan Kemudahan Perizinan Meningkatkan transparansi dan ketersediaan informasi investasi untuk menarik investor Mendorong Kemitraan Strategis antara Perusahaan Daerah dan Investor dalam rangka pengembangan sektor-sektor potensial seperti pariwisata, energi terbarukan, pertambangan ramah lingkungan, dan ekonomi kreatif. optimalisasi pelaksanaan kebijakan pemberian insentif, kemudahan, dan fasilitas penanaman modal sesuai potensi unggulan daerah. Meningkatkan evaluasi berkala untuk mengukur dampak investasi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan PAD, dan kesejahteraan masyarakat Meningkatkan kapasitas lembaga daerah (DPMPSTP) dalam pelayanan perizinan, fasilitasi investasi, dan promosi potensi daerah optimalisasi strategi promosi investasi daerah yang fokus pada sektor unggulan sesuai potensi lokal Mengintegrasikan promosi peluang investasi Kota Sawahlunto dengan kemitraan dengan perusahaan daerah dan swasta



SASARAN	ARAH KEBIJAKAN				
	TAHUN 1 (2026)	TAHUN 2 (2027)	TAHUN 3 (2028)	TAHUN 4 (2029)	TAHUN 5 (2030)
	Melaksanakan promosi investasi secara langsung melalui pameran, forum bisnis, misi dagang, dan business matching	Mengoptimalkan promosi investasi secara langsung melalui pameran, forum bisnis, misi dagang, dan business matching	Mengoptimalkan promosi investasi secara langsung melalui pameran, forum bisnis, misi dagang, dan business matching	Mengoptimalkan promosi investasi secara langsung melalui pameran, forum bisnis, misi dagang, dan business matching	Mengoptimalkan promosi investasi secara langsung melalui pameran, forum bisnis, misi dagang, dan business matching
	Mendorong koordinasi lintas sektor (BUMD, asosiasi usaha, lembaga pendidikan) untuk mendukung keberhasilan promosi investasi.	Memperkuat koordinasi lintas sektor (BUMD, asosiasi usaha, lembaga pendidikan) untuk mendukung keberhasilan promosi investasi.	Meningkatkan koordinasi lintas sektor (BUMD, asosiasi usaha, lembaga pendidikan) untuk mendukung keberhasilan promosi investasi.	Meningkatkan koordinasi lintas sektor (BUMD, asosiasi usaha, lembaga pendidikan) untuk mendukung keberhasilan promosi investasi.	Meningkatkan koordinasi lintas sektor (BUMD, asosiasi usaha, lembaga pendidikan) untuk mendukung keberhasilan promosi investasi.
	Memperkuat teknologi digital untuk promosi (website investasi, media sosial, platform OSS/NSWI).	Optimalisasi penggunaan teknologi digital untuk promosi (website investasi, media sosial, platform OSS/NSWI).	Mengembangkan sistem informasi investasi daerah yang terintegrasi dengan nasional untuk mempermudah akses calon investor	Optimalisasi penggunaan sistem informasi investasi daerah yang terintegrasi dengan nasional untuk mempermudah akses calon investor	Optimalisasi penggunaan sistem informasi investasi daerah yang terintegrasi dengan nasional untuk mempermudah akses calon investor
	Memperkuat layanan OSS-RBA (Online Single Submission – Risk Based Approach) agar terintegrasi penuh dengan sistem perizinan pusat dan daerah	Mengoptimalkan layanan OSS-RBA (Online Single Submission – Risk Based Approach) agar terintegrasi penuh dengan sistem perizinan pusat dan daerah	Mengoptimalkan layanan OSS-RBA (Online Single Submission – Risk Based Approach) agar terintegrasi penuh dengan sistem perizinan pusat dan daerah	Mengoptimalkan layanan OSS-RBA (Online Single Submission – Risk Based Approach) agar terintegrasi penuh dengan sistem perizinan pusat dan daerah	Mengoptimalkan layanan OSS-RBA (Online Single Submission – Risk Based Approach) agar terintegrasi penuh dengan sistem perizinan pusat dan daerah
	Penguatan infrastruktur digital untuk mendukung integrasi sistem data penanaman modal dengan OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach).	Optimalisasi infrastruktur digital untuk mendukung integrasi sistem data penanaman modal dengan OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach).	Optimalisasi infrastruktur digital untuk mendukung integrasi sistem data penanaman modal dengan OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach).	Optimalisasi infrastruktur digital untuk mendukung integrasi sistem data penanaman modal dengan OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach).	Optimalisasi infrastruktur digital untuk mendukung integrasi sistem data penanaman modal dengan OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach).
	penguatan kelembagaan dan basis data ketenagakerjaan (pemetaan angkatan kerja, potensi sektor unggulan)	Optimalisasi kelembagaan dan basis data ketenagakerjaan (pemetaan angkatan kerja, potensi sektor unggulan)	Menyusun dokumen rencana tenaga kerja daerah	optimalisasi pemanfaatan dokumen rencana tenaga kerja daerah	optimalisasi pemanfaatan dokumen rencana tenaga kerja daerah
	Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja melalui pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan dunia industri, dunia usaha, dan pasar kerja lokal maupun nasional	Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja melalui pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan dunia industri, dunia usaha, dan pasar kerja lokal maupun nasional	Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja melalui pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan dunia industri, dunia usaha, dan pasar kerja lokal maupun nasional	Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja melalui pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan dunia industri, dunia usaha, dan pasar kerja lokal maupun nasional	Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja melalui pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan dunia industri, dunia usaha, dan pasar kerja lokal maupun nasional
	Menyusun kurikulum pelatihan yang adaptif mengikuti perkembangan teknologi dan tren permintaan tenaga kerja	Sosialisasi dan penerapan kurikulum pelatihan yang adaptif mengikuti perkembangan teknologi dan tren permintaan tenaga kerja	Evaluasi dan Pengembangan kurikulum pelatihan yang adaptif mengikuti perkembangan teknologi dan tren permintaan tenaga kerja	Evaluasi dan Pengembangan kurikulum pelatihan yang adaptif mengikuti perkembangan teknologi dan tren permintaan tenaga kerja	Evaluasi dan Pengembangan kurikulum pelatihan yang adaptif mengikuti perkembangan teknologi dan tren permintaan tenaga kerja
	Memberikan pelatihan untuk disabilitas	Meningkatkan pelatihan untuk disabilitas	Meningkatkan pelatihan untuk disabilitas	Meningkatkan pelatihan untuk disabilitas	Meningkatkan pelatihan dan bantuan teknis untuk disabilitas
	Pengembangan Balai Latihan Kerja Kota Sawahlunto	Optimalisasi Balai Latihan Kerja Kota Sawahlunto	Peningkatan Balai Latihan Kerja Kota Sawahlunto	Peningkatan Balai Latihan Kerja Kota Sawahlunto	Peningkatan Balai Latihan Kerja Kota Sawahlunto
	peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja	peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja	peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja	peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja	peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja
	Penguatan motivasi angkatan kerja untuk mengikuti pelatihan kerja berbasis kompetensi	Meningkatkan motivasi angkatan kerja untuk mengikuti pelatihan kerja berbasis kompetensi	Meningkatkan motivasi angkatan kerja untuk mengikuti pelatihan kerja berbasis kompetensi	Meningkatkan motivasi angkatan kerja untuk mengikuti pelatihan kerja berbasis kompetensi	Meningkatkan motivasi angkatan kerja untuk mengikuti pelatihan kerja berbasis kompetensi
	Penyebarnya luasan informasi pelatihan tenaga kerja yang diselenggarakan di BLK secara digitalisasi	Meningkatkan penyebar luasan informasi pelatihan tenaga kerja yang diselenggarakan di BLK secara digitalisasi	Meningkatkan penyebar luasan informasi pelatihan tenaga kerja yang diselenggarakan di BLK secara digitalisasi	Meningkatkan penyebar luasan informasi pelatihan tenaga kerja yang diselenggarakan di BLK secara digitalisasi	Meningkatkan penyebar luasan informasi pelatihan tenaga kerja yang diselenggarakan di BLK secara digitalisasi
	Mengembangkan program pelatihan kerja khusus bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses kerja yang layak	Menguatkan program pelatihan kerja khusus bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses kerja yang layak	Optimalisasi program pelatihan kerja khusus bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses kerja yang layak	Optimalisasi program pelatihan kerja khusus bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses kerja yang layak	Optimalisasi program pelatihan kerja khusus bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses kerja yang layak



SASARAN		ARAH KEBIJAKAN				
		TAHUN 1 (2026)	TAHUN 2 (2027)	TAHUN 3 (2028)	TAHUN 4 (2029)	TAHUN 5 (2030)
		Pelaksanaan Job fair	Penguatan pelaksanaan Job fair	optimalisasi pelaksanaan Job fair	optimalisasi pelaksanaan Job fair	optimalisasi pelaksanaan Job fair
		menyediakan bursa kerja online yang terintegrasi dengan sistem nasional ketenagakerjaan	penguatan bursa kerja online yang terintegrasi dengan sistem nasional ketenagakerjaan	optimalisasi bursa kerja online yang terintegrasi dengan sistem nasional ketenagakerjaan	optimalisasi bursa kerja online yang terintegrasi dengan sistem nasional ketenagakerjaan	optimalisasi bursa kerja online yang terintegrasi dengan sistem nasional ketenagakerjaan
		Mendorong skema kemitraan dengan BUMN, BUMD, swasta koperasi dalam menciptakan lapangan kerja baru	Menguatkan skema kemitraan dengan BUMN, BUMD, swasta koperasi dalam menciptakan lapangan kerja baru	Meningkatkan skema kemitraan dengan BUMN, BUMD, swasta koperasi dalam menciptakan lapangan kerja baru	Optimalisasi skema kemitraan dengan BUMN, BUMD, swasta koperasi dalam menciptakan lapangan kerja baru	Optimalisasi skema kemitraan dengan BUMN, BUMD, swasta koperasi dalam menciptakan lapangan kerja baru
		Mengadakan kerjasama strategis dengan perusahaan, asosiasi industri, dan lembaga pendidikan dalam membuka akses kerja	Menguatkan kerjasama strategis dengan perusahaan, asosiasi industri, dan lembaga pendidikan dalam membuka akses kerja	Meningkatkan kerjasama strategis dengan perusahaan, asosiasi industri, dan lembaga pendidikan dalam membuka akses kerja	Meningkatkan kerjasama strategis dengan perusahaan, asosiasi industri, dan lembaga pendidikan dalam membuka akses kerja	Meningkatkan kerjasama strategis dengan perusahaan, asosiasi industri, dan lembaga pendidikan dalam membuka akses kerja
		Mendorong peningkatan jumlah perusahaan yang memiliki PKB sebagai bentuk kemitraan yang sehat antara pekerja dan pengusaha.	Meningkatkan jumlah perusahaan yang memiliki PKB sebagai bentuk kemitraan yang sehat antara pekerja dan pengusaha.	Meningkatkan jumlah perusahaan yang memiliki PKB sebagai bentuk kemitraan yang sehat antara pekerja dan pengusaha.	Meningkatkan jumlah perusahaan yang memiliki PKB sebagai bentuk kemitraan yang sehat antara pekerja dan pengusaha.	Meningkatkan jumlah perusahaan yang memiliki PKB sebagai bentuk kemitraan yang sehat antara pekerja dan pengusaha.
		Memperluas cakupan kepesertaan pekerja formal dan informal dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.	Memperluas cakupan kepesertaan pekerja formal dan informal dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.	Memperluas cakupan kepesertaan pekerja formal dan informal dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.	Memperluas cakupan kepesertaan pekerja formal dan informal dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.	Memperluas cakupan kepesertaan pekerja formal dan informal dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
		Mendorong peran lembaga kerja sama bipartit di perusahaan dan tripartite dalam membangun komunikasi sosial yang efektif.	Memperkuat peran lembaga kerja sama bipartit di perusahaan dan tripartite dalam membangun komunikasi sosial yang efektif.	Meningkatkan peran lembaga kerja sama bipartit di perusahaan dan tripartite dalam membangun komunikasi sosial yang efektif.	Meoptimalkan peran lembaga kerja sama bipartit di perusahaan dan tripartite dalam membangun komunikasi sosial yang efektif.	Meoptimalkan peran lembaga kerja sama bipartit di perusahaan dan tripartite dalam membangun komunikasi sosial yang efektif.
3	Meningkatnya kemandirian desa dalam pengelolaan potensi lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa	Membangkitkan kembali semangat gotong royong dalam percepatan pembangunan kota	Membangkitkan kembali semangat gotong royong dalam percepatan pembangunan kota	Meningkatkan semangat gotong royong untuk percepatan pembangunan kota	Meningkatkan semangat gotong royong untuk percepatan pembangunan kota	Mengembangkan semangat gotong royong untuk percepatan pembangunan kota
		Memberikan pelatihan kerja ke desa/kelurahan dalam menciptakan entrepreneur muda	Memberikan pelatihan kerja ke desa/kelurahan dalam menciptakan entrepreneur muda	Memberikan pelatihan kerja ke desa/kelurahan dalam menciptakan entrepreneur muda	Memberikan pelatihan kerja ke desa/kelurahan dalam menciptakan entrepreneur muda	Memberikan pelatihan kerja ke desa/kelurahan dalam menciptakan entrepreneur muda
		Penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat dalam pembangunan	Meoptimalkan kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat dalam pembangunan	Meoptimalkan kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat dalam pembangunan	Meoptimalkan kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat dalam pembangunan
		mendorong kemandirian ekonomi desa melalui BUMDes dengan pemanfaatan potensi desa melalui berbagai usaha	menguatkan kemandirian ekonomi desa melalui BUMDes dengan pemanfaatan potensi desa melalui berbagai usaha	meningkatkan kemandirian ekonomi desa melalui BUMDes dengan pemanfaatan potensi desa melalui berbagai usaha	meningkatkan kemandirian ekonomi desa melalui BUMDes dengan pemanfaatan potensi desa melalui berbagai usaha	meningkatkan kemandirian ekonomi desa melalui BUMDes dengan pemanfaatan potensi desa melalui berbagai usaha
		Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Penguatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
		identifikasi menyeluruh terhadap potensi ekonomi dan sumber daya alam yang dimiliki desa	Kembangkan inovasi yang berbasis pada potensi dan keunikan sumber daya lokal, seperti melalui konsep "one village one product".	Kembangkan inovasi yang berbasis pada potensi dan keunikan sumber daya lokal, seperti melalui konsep "one village one product".	optimalisasi untuk "one village one product".	optimalisasi untuk "one village one product".
		Partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan produk untuk membangun ekonomi daerahnya sendiri.	meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan produk untuk membangun ekonomi daerahnya sendiri.	meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan produk untuk membangun ekonomi daerahnya sendiri.	meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan produk untuk membangun ekonomi daerahnya sendiri.	optimalisasi partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan produk untuk membangun ekonomi daerahnya sendiri.
4	Terwujudnya ketahanan pangan dengan meningkatkan produktivitas pertanian	Pemetaan agroindustri skala mikro yang cocok di Kota Sawahlunto: pengolahan pangan, produk olahan hortikultura, pertanian dan	Fasilitasi pengembangan agroindustri skala mikro yang cocok di Kota Sawahlunto: pengolahan pangan, produk olahan hortikultura, pertanian dan perkebunan	Fasilitasi pengembangan agroindustri skala mikro yang cocok di Kota Sawahlunto: pengolahan pangan, produk olahan hortikultura, pertanian	Fasilitasi pengembangan dan peningkatan agroindustri skala mikro yang cocok di Kota Sawahlunto: pengolahan pangan,	Fasilitasi pengembangan dan peningkatan agroindustri skala mikro yang cocok di Kota Sawahlunto: pengolahan pangan, produk olahan



SASARAN	ARAH KEBIJAKAN				
	TAHUN 1 (2026)	TAHUN 2 (2027)	TAHUN 3 (2028)	TAHUN 4 (2029)	TAHUN 5 (2030)
dan perikanan	perkebunan		dan perkebunan	produk olahan hortikultura, pertanian dan perkebunan	hortikultura, pertanian dan perkebunan
	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
	Diversifikasi produk pangan lokal bernilai tambah	Diversifikasi produk pangan lokal bernilai tambah	Diversifikasi produk pangan lokal bernilai tambah	Diversifikasi produk pangan lokal bernilai tambah	Diversifikasi produk pangan lokal bernilai tambah
	Optimalisasi Lumbung Pangan Masyarakat dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.	Optimalisasi Lumbung Pangan Masyarakat dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.	Optimalisasi Lumbung Pangan Masyarakat dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.	Optimalisasi Lumbung Pangan Masyarakat dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.	Optimalisasi Lumbung Pangan Masyarakat dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
	Penguatan jejaring antarwilayah dan kerja sama antarprovinsi dalam perdagangan pangan	Penguatan jejaring antarwilayah dan kerja sama antarprovinsi dalam perdagangan pangan	Penguatan jejaring antarwilayah dan kerja sama antarprovinsi dalam perdagangan pangan	Penguatan jejaring antarwilayah dan kerja sama antarprovinsi dalam perdagangan pangan	Penguatan jejaring antarwilayah dan kerja sama antarprovinsi dalam perdagangan pangan
	Pemantauan fluktuasi harga komoditi pangan (inflasi)	Pemantauan fluktuasi harga komoditi pangan (inflasi)	Pemantauan fluktuasi harga komoditi pangan (inflasi)	Pemantauan fluktuasi harga komoditi pangan (inflasi)	Pemantauan fluktuasi harga komoditi pangan (inflasi)
	Penetapan daerah kawasan komoditi khusus bernilai ekonomi tinggi	Penetapan daerah kawasan komoditi khusus bernilai ekonomi tinggi	Penetapan daerah kawasan komoditi khusus bernilai ekonomi tinggi	Penetapan daerah kawasan komoditi khusus bernilai ekonomi tinggi	Penetapan daerah kawasan komoditi khusus bernilai ekonomi tinggi
	Pemetaan komoditi pertanian unggulan daerah	Pemetaan komoditi pertanian unggulan daerah	optimalisasi terhadap komoditi pertanian unggulan daerah	optimalisasi terhadap komoditi pertanian unggulan daerah	optimalisasi terhadap komoditi pertanian unggulan daerah
	Peningkatan varietas tanaman dan bibit di Kebun Buah Kandi yang mencirikan kekhasan di Kota Sawahlunto	Peningkatan varietas tanaman dan bibit di Kebun Buah Kandi yang mencirikan kekhasan di Kota Sawahlunto	Peningkatan varietas tanaman dan bibit di Kebun Buah Kandi yang mencirikan kekhasan di Kota Sawahlunto	Peningkatan varietas tanaman dan bibit di Kebun Buah Kandi yang mencirikan kekhasan di Kota Sawahlunto	Peningkatan varietas tanaman dan bibit di Kebun Buah Kandi yang mencirikan kekhasan di Kota Sawahlunto
	Peningkatan sarana dan prasarana Kebun Buah Kandi sebagai destinasi wisata dan eduwisata	Peningkatan sarana dan prasarana Kebun Buah Kandi sebagai destinasi wisata dan eduwisata	Peningkatan sarana dan prasarana Kebun Buah Kandi sebagai destinasi wisata dan eduwisata	Peningkatan sarana dan prasarana Kebun Buah Kandi sebagai destinasi wisata dan eduwisata	Peningkatan sarana dan prasarana Kebun Buah Kandi sebagai destinasi wisata dan eduwisata
	Peremajaan kembali tanaman perkebunan dan hortikultura terutama tanaman lokal di Kota Sawahlunto	Peremajaan kembali tanaman perkebunan dan hortikultura terutama tanaman lokal di Kota Sawahlunto	Peremajaan kembali tanaman perkebunan dan hortikultura terutama tanaman lokal di Kota Sawahlunto	Peremajaan kembali tanaman perkebunan dan hortikultura terutama tanaman lokal di Kota Sawahlunto	Peremajaan kembali tanaman perkebunan dan hortikultura terutama tanaman lokal di Kota Sawahlunto
	Pendampingan penyusunan RDKK dan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi	Pendampingan penyusunan RDKK dan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi	Pendampingan penyusunan RDKK dan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi	Pendampingan penyusunan RDKK dan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi	Pendampingan penyusunan RDKK dan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi
	Peningkatan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.	Peningkatan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.	Peningkatan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.	Peningkatan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.	Peningkatan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.
	Pengelolaan penggunaan brigade Alsintan	Meningkatkan pengelolaan penggunaan brigade Alsintan	Meningkatkan pengelolaan penggunaan brigade Alsintan	optimalisasi pengelolaan penggunaan brigade Alsintan	optimalisasi pengelolaan penggunaan brigade Alsintan
	Pengadaan Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS), Perangkat Uji Tanah Kering (PUTK), fasilitasi saprodi	Pengadaan Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS), Perangkat Uji Tanah Kering (PUTK), fasilitasi saprodi	Pengadaan Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS), Perangkat Uji Tanah Kering (PUTK), fasilitasi saprodi	Optimalisasi penggunaan Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS), Perangkat Uji Tanah Kering (PUTK), fasilitasi saprodi	Optimalisasi penggunaan Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS), Perangkat Uji Tanah Kering (PUTK), fasilitasi saprodi
	Pemetaan kesesuaian lahan berdasarkan potensi dan kesesuaiannya untuk ditanami tanaman tertentu	Pemetaan kesesuaian lahan berdasarkan potensi dan kesesuaiannya untuk ditanami tanaman tertentu	optimalisasi penggunaan lahan sesuai potensi dan ditanami tanaman	optimalisasi penggunaan lahan sesuai potensi dan ditanami tanaman	optimalisasi penggunaan lahan sesuai potensi dan ditanami tanaman
	Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) Air Dingin	Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) Air Dingin	Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) Air Dingin	Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) Air Dingin	Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) Air Dingin
	Pembangunan/ Rehabilitasi Puskesmas	Pembangunan/ Rehabilitasi Puskesmas	Pembangunan/ Rehabilitasi Puskesmas	Pembangunan/ Rehabilitasi Puskesmas	Pembangunan/ Rehabilitasi Puskesmas



SASARAN		ARAH KEBIJAKAN				
		TAHUN 1 (2026)	TAHUN 2 (2027)	TAHUN 3 (2028)	TAHUN 4 (2029)	TAHUN 5 (2030)
	Operasionalisasi Rumah Potong Hewan (RPH) Air Dingin sebagai standar RPH bersertifikasi halal dalam rangka mendukung sertifikasi halal produk-produk olahan daging	Operasionalisasi Rumah Potong Hewan (RPH) Air Dingin sebagai standar RPH bersertifikasi halal dalam rangka mendukung sertifikasi halal produk-produk olahan daging	Operasionalisasi Rumah Potong Hewan (RPH) Air Dingin sebagai standar RPH bersertifikasi halal dalam rangka mendukung sertifikasi halal produk-produk olahan daging	Operasionalisasi Rumah Potong Hewan (RPH) Air Dingin sebagai standar RPH bersertifikasi halal dalam rangka mendukung sertifikasi halal produk-produk olahan daging	Operasionalisasi Rumah Potong Hewan (RPH) Air Dingin sebagai standar RPH bersertifikasi halal dalam rangka mendukung sertifikasi halal produk-produk olahan daging	Operasionalisasi Rumah Potong Hewan (RPH) Air Dingin sebagai standar RPH bersertifikasi halal dalam rangka mendukung sertifikasi halal produk-produk olahan daging
	peningkatan kualitas pelayanan kesehatan hewan,	peningkatan kualitas pelayanan kesehatan hewan,	peningkatan kualitas pelayanan kesehatan hewan,	peningkatan kualitas pelayanan kesehatan hewan,	peningkatan kualitas pelayanan kesehatan hewan,	peningkatan kualitas pelayanan kesehatan hewan,
	Pencegahan dan vaksinasi hewan liar	Pencegahan dan vaksinasi hewan liar	Pencegahan dan vaksinasi hewan liar	Pencegahan dan vaksinasi hewan liar	Pencegahan dan vaksinasi hewan liar	Pencegahan dan vaksinasi hewan liar
	Pengendalian penyakit hewan	Pengendalian penyakit hewan	Pengendalian penyakit hewan	Pengendalian penyakit hewan	Pengendalian penyakit hewan	Pengendalian penyakit hewan
	Pembangunan / Rehabilitasi Jaringan irigasi	Pembangunan / Rehabilitasi Jaringan irigasi	Pembangunan / Rehabilitasi Jaringan irigasi	Pembangunan / Rehabilitasi Jaringan irigasi	Pembangunan / Rehabilitasi Jaringan irigasi	Pembangunan / Rehabilitasi Jaringan irigasi
	Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Usaha Tani
	Peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian	Peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian	Peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian	Peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian	Peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian	Peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian
	Peningkatan budidaya perikanan	Peningkatan budidaya perikanan	Peningkatan budidaya perikanan	Peningkatan budidaya perikanan	Peningkatan budidaya perikanan	Peningkatan budidaya perikanan
	sosialisasi gemar makan ikan kepada masyarakat	sosialisasi gemar makan ikan kepada masyarakat	meningkatkan kemauan masyarakat untuk gemar makan ikan	meningkatkan kemauan masyarakat untuk gemar makan ikan	meningkatkan kemauan masyarakat untuk gemar makan ikan	meningkatkan kemauan masyarakat untuk gemar makan ikan
Misi 2. Mewujudkan Smart Governance berbasis IT						
Tujuan 2. Terwujudnya smart governance berbasis IT						
1	Terselenggaranya pemerintahan digital yang terintegrasi dan responsif dalam mendukung transparansi	Meningkatkan penyediaan akses internet gratis bagi masyarakat di ruang publik seperti taman, objek wisata, terminal, dan tempat ibadah	Meningkatkan penyediaan akses internet gratis bagi masyarakat di ruang publik seperti taman, objek wisata, terminal, dan tempat ibadah	Meningkatkan penyediaan akses internet gratis bagi masyarakat di ruang publik seperti taman, objek wisata, terminal, dan tempat ibadah	Meningkatkan penyediaan akses internet gratis bagi masyarakat di ruang publik seperti taman, objek wisata, terminal, dan tempat ibadah	Meningkatkan penyediaan akses internet gratis bagi masyarakat di ruang publik seperti taman, objek wisata, terminal, dan tempat ibadah
	Meningkatkan layanan perluasan infrastruktur komunikasi untuk mengatasi daerah blank spot di Sawahlunto	Meningkatkan layanan perluasan infrastruktur komunikasi untuk mengatasi daerah blank spot di Sawahlunto	Meningkatkan layanan perluasan infrastruktur komunikasi untuk mengatasi daerah blank spot di Sawahlunto	Meningkatkan layanan perluasan infrastruktur komunikasi untuk mengatasi daerah blank spot di Sawahlunto	Meningkatkan layanan perluasan infrastruktur komunikasi untuk mengatasi daerah blank spot di Sawahlunto	Meningkatkan layanan perluasan infrastruktur komunikasi untuk mengatasi daerah blank spot di Sawahlunto
	Pemanfaatan TIK untuk meningkatkan partisipasi masyarakat	Pemanfaatan TIK untuk meningkatkan partisipasi masyarakat	Pemanfaatan TIK untuk meningkatkan partisipasi masyarakat	Pemanfaatan TIK untuk meningkatkan partisipasi masyarakat	Pemanfaatan TIK untuk meningkatkan partisipasi masyarakat	Pemanfaatan TIK untuk meningkatkan partisipasi masyarakat
	Membangun daerah sulit signal harus diperbaiki kualitas signal nya atau dengan pengadaan Tower	Membangun daerah sulit signal harus diperbaiki kualitas signal nya atau dengan pengadaan Tower	Membangun daerah sulit signal harus diperbaiki kualitas signal nya atau dengan pengadaan Tower	Membangun daerah sulit signal harus diperbaiki kualitas signal nya atau dengan pengadaan Tower	Membangun daerah sulit signal harus diperbaiki kualitas signal nya atau dengan pengadaan Tower	Membangun daerah sulit signal harus diperbaiki kualitas signal nya atau dengan pengadaan Tower
	pembangunan dan pengelolaan comand center (pusat data pemerintahan daerah)	pembangunan dan pengelolaan comand center (pusat data pemerintahan daerah)	pembangunan dan pengelolaan comand center (pusat data pemerintahan daerah)	pembangunan dan pengelolaan comand center (pusat data pemerintahan daerah)	pembangunan dan pengelolaan comand center (pusat data pemerintahan daerah)	pembangunan dan pengelolaan comand center (pusat data pemerintahan daerah)
	Membangun dan meningkatkan infrastruktur TIK seperti jaringan internet, fasilitas telekomunikasi, dan perangkat keras pendukung	Membangun dan meningkatkan infrastruktur TIK seperti jaringan internet, fasilitas telekomunikasi, dan perangkat keras pendukung	Membangun dan meningkatkan infrastruktur TIK seperti jaringan internet, fasilitas telekomunikasi, dan perangkat keras pendukung	Membangun dan meningkatkan infrastruktur TIK seperti jaringan internet, fasilitas telekomunikasi, dan perangkat keras pendukung	Membangun dan meningkatkan infrastruktur TIK seperti jaringan internet, fasilitas telekomunikasi, dan perangkat keras pendukung	Membangun dan meningkatkan infrastruktur TIK seperti jaringan internet, fasilitas telekomunikasi, dan perangkat keras pendukung
	Mendukung pengembangan industri digital, startup, dan e-commerce melalui berbagai program dan layanan	Mendukung pengembangan industri digital, startup, dan e-commerce melalui berbagai program dan layanan	Mendukung pengembangan industri digital, startup, dan e-commerce melalui berbagai program dan layanan	Mendukung pengembangan industri digital, startup, dan e-commerce melalui berbagai program dan layanan	Mendukung pengembangan industri digital, startup, dan e-commerce melalui berbagai program dan layanan	Mendukung pengembangan industri digital, startup, dan e-commerce melalui berbagai program dan layanan
	Memanfaatkan TIK untuk mempromosikan potensi pariwisata dan produk lokal ke seluruh dunia	Memanfaatkan TIK untuk mempromosikan potensi pariwisata dan produk lokal ke seluruh dunia	Memanfaatkan TIK untuk mempromosikan potensi pariwisata dan produk lokal ke seluruh dunia	Memanfaatkan TIK untuk mempromosikan potensi pariwisata dan produk lokal ke seluruh dunia	Memanfaatkan TIK untuk mempromosikan potensi pariwisata dan produk lokal ke seluruh dunia	Memanfaatkan TIK untuk mempromosikan potensi pariwisata dan produk lokal ke seluruh dunia
	Menyediakan informasi publik melalui portal online, media sosial, dan	Menyediakan informasi publik melalui portal online, media sosial, dan saluran komunikasi	Menyediakan informasi publik melalui portal online, media sosial, dan	Menyediakan informasi publik melalui portal online, media sosial, dan	Menyediakan informasi publik melalui portal online, media sosial, dan	Menyediakan informasi publik melalui portal online, media sosial, dan



SASARAN		ARAH KEBIJAKAN				
		TAHUN 1 (2026)	TAHUN 2 (2027)	TAHUN 3 (2028)	TAHUN 4 (2029)	TAHUN 5 (2030)
		saluran komunikasi lainnya	lainnya	saluran komunikasi lainnya	dan saluran komunikasi lainnya	saluran komunikasi lainnya
		Membangun infrastruktur digital yang berkualitas dan berkelanjutan setiap ASN harus dilengkapi dengan PC	Membangun infrastruktur digital yang berkualitas dan berkelanjutan setiap ASN harus dilengkapi dengan PC	Membangun infrastruktur digital yang berkualitas dan berkelanjutan setiap ASN harus dilengkapi dengan PC	Membangun infrastruktur digital yang berkualitas dan berkelanjutan setiap ASN harus dilengkapi dengan PC	Membangun infrastruktur digital yang berkualitas dan berkelanjutan setiap ASN harus dilengkapi dengan PC
		Mengoptimalkan penerapan dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Mengoptimalkan penerapan dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Mengoptimalkan penerapan dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Mengoptimalkan penerapan dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Mengoptimalkan penerapan dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
		Menjamin keamanan informasi dan pembatasan akses bagi pengguna internet di ruang publik khususnya terhadap konten-konten yang tidak sesuai.	Menjamin keamanan informasi dan pembatasan akses bagi pengguna internet di ruang publik khususnya terhadap konten-konten yang tidak sesuai.	Menjamin keamanan informasi dan pembatasan akses bagi pengguna internet di ruang publik khususnya terhadap konten-konten yang tidak sesuai.	Menjamin keamanan informasi dan pembatasan akses bagi pengguna internet di ruang publik khususnya terhadap konten-konten yang tidak sesuai.	Menjamin keamanan informasi dan pembatasan akses bagi pengguna internet di ruang publik khususnya terhadap konten-konten yang tidak sesuai.
		Melatih dan mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang keamanan siber dan IT.	Melatih dan mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang keamanan siber dan IT.	Melatih dan mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang keamanan siber dan IT.	Melatih dan mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang keamanan siber dan IT.	Melatih dan mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang keamanan siber dan IT.
		Pengamanan infrastruktur TIK	Pengamanan infrastruktur TIK	Pengamanan infrastruktur TIK	Pengamanan infrastruktur TIK	Pengamanan infrastruktur TIK
		Mengoptimalkan Edukasi Keamanan SPBE, Satu Server dan pengadaan Command Centre, Layanan Kesehata Digital yang Optimal Keamanan Cyber Pemerintahan	Mengoptimalkan Edukasi Keamanan SPBE, Satu Server dan pengadaan Command Centre, Layanan Kesehata Digital yang Optimal Keamanan Cyber Pemerintahan	Mengoptimalkan Edukasi Keamanan SPBE, Satu Server dan pengadaan Command Centre, Layanan Kesehata Digital yang Optimal Keamanan Cyber Pemerintahan	Mengoptimalkan Edukasi Keamanan SPBE, Satu Server dan pengadaan Command Centre, Layanan Kesehata Digital yang Optimal Keamanan Cyber Pemerintahan	Mengoptimalkan Edukasi Keamanan SPBE, Satu Server dan pengadaan Command Centre, Layanan Kesehata Digital yang Optimal Keamanan Cyber Pemerintahan
		Mengoptimalkan pengintegrasian data, pelaporan dan penilaian atas kinerja aparatur pelaksana yang akuntabel.	Mengoptimalkan pengintegrasian data, pelaporan dan penilaian atas kinerja aparatur pelaksana yang akuntabel.	Mengoptimalkan pengintegrasian data, pelaporan dan penilaian atas kinerja aparatur pelaksana yang akuntabel.	Mengoptimalkan pengintegrasian data, pelaporan dan penilaian atas kinerja aparatur pelaksana yang akuntabel.	Mengoptimalkan pengintegrasian data, pelaporan dan penilaian atas kinerja aparatur pelaksana yang akuntabel.
		meningkatkan koordinasi dalam Forum data Penguatan fungsi wali data	meningkatkan koordinasi dalam Forum data Penguatan fungsi wali data	meningkatkan koordinasi dalam Forum data Penguatan fungsi wali data	meningkatkan koordinasi dalam Forum data Penguatan fungsi wali data	meningkatkan koordinasi dalam Forum data Penguatan fungsi wali data
2	Terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien	meningkatkan kualitas dan sarana parasarana pelayanan administrasi kependudukan	meningkatkan kualitas dan sarana parasarana pelayanan administrasi kependudukan	meningkatkan kualitas dan sarana parasarana pelayanan administrasi kependudukan	meningkatkan kualitas dan sarana parasarana pelayanan administrasi kependudukan	meningkatkan kualitas dan sarana parasarana pelayanan administrasi kependudukan
		Meningkatkan kualitas dan ketersediaan data dan informasi kependudukan	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan data dan informasi kependudukan	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan data dan informasi kependudukan	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan data dan informasi kependudukan	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan data dan informasi kependudukan
		Pengembangan Sistem dan Inovasi Pelayanan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.	Pengembangan Sistem dan Inovasi Pelayanan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.	Pengembangan Sistem dan Inovasi Pelayanan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.	Pengembangan Sistem dan Inovasi Pelayanan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.	Pengembangan Sistem dan Inovasi Pelayanan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.
		memastikan keakuratan data dan ketunggalan NIK, serta menyediakan data yang akurat dan mutakhir untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional dan daerah	memastikan keakuratan data dan ketunggalan NIK, serta menyediakan data yang akurat dan mutakhir untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional dan daerah	memastikan keakuratan data dan ketunggalan NIK, serta menyediakan data yang akurat dan mutakhir untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional dan daerah	memastikan keakuratan data dan ketunggalan NIK, serta menyediakan data yang akurat dan mutakhir untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional dan daerah	memastikan keakuratan data dan ketunggalan NIK, serta menyediakan data yang akurat dan mutakhir untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional dan daerah
Misi 3. Penguatan Infrastruktur penunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat						
Tujuan 3. Terwujudnya infrastruktur yang inklusif, tangguh bencana dan berkelanjutan						
1	Meningkatnya pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh bencana	Penyusunan Dokumen RPPLH	Penyusunan Dokumen KLHS Perubahan RPJMD		Penyusunan Dokumen KLHS Dokumen RPJMD	
		Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup



SASARAN	ARAH KEBIJAKAN				
	TAHUN 1 (2026)	TAHUN 2 (2027)	TAHUN 3 (2028)	TAHUN 4 (2029)	TAHUN 5 (2030)
	ketersediaan dan kualitas data hasil pemantauan lingkungan hidup	ketersediaan dan kualitas data hasil pemantauan lingkungan hidup	ketersediaan dan kualitas data hasil pemantauan lingkungan hidup	ketersediaan dan kualitas data hasil pemantauan lingkungan hidup	ketersediaan dan kualitas data hasil pemantauan lingkungan hidup
	Sertifikasi labor lingkungan hidup	Peningkatan kapasitas tenaga Labor lingkungan hidup	Peningkatan kapasitas tenaga Labor lingkungan hidup	Peningkatan kapasitas tenaga Labor lingkungan hidup	Peningkatan kapasitas tenaga Labor lingkungan hidup
	Peningkatan sarana dan prasarana labor lingkungan hidup	Peningkatan sarana dan prasarana labor lingkungan hidup	Peningkatan sarana dan prasarana labor lingkungan hidup	Peningkatan sarana dan prasarana labor lingkungan hidup	Peningkatan sarana dan prasarana labor lingkungan hidup
		peningkatan pendapatan labor lingkungan hidup	peningkatan pendapatan labor lingkungan hidup	peningkatan pendapatan labor lingkungan hidup	peningkatan pendapatan labor lingkungan hidup
	meningkatkan ruang terbuka hijau	meningkatkan ruang terbuka hijau	meningkatkan ruang terbuka hijau	meningkatkan ruang terbuka hijau	meningkatkan ruang terbuka hijau
	meningkatkan kebersihan/kerapian/keindahan taman-taman kota	meningkatkan kebersihan/kerapian/keindahan taman-taman kota	meningkatkan kebersihan/kerapian/keindahan taman-taman kota	meningkatkan kebersihan/kerapian/keindahan taman-taman kota	meningkatkan kebersihan/kerapian/keindahan taman-taman kota
	Meningkatkan pengawasan dan pengelolaan limbah B3	Meningkatkan pengawasan dan pengelolaan limbah B3	Meningkatkan pengawasan dan pengelolaan limbah B3	Meningkatkan pengawasan dan pengelolaan limbah B3	Meningkatkan pengawasan dan pengelolaan limbah B3
	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
	pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap keberadaan MHA,	pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap keberadaan MHA,	pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap keberadaan MHA,	pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap keberadaan MHA,	pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap keberadaan MHA,
	pembinaan dan peningkatan kapasitas penyuluhan lingkungan hidup	pembinaan dan peningkatan kapasitas penyuluhan lingkungan hidup	pembinaan dan peningkatan kapasitas penyuluhan lingkungan hidup	pembinaan dan peningkatan kapasitas penyuluhan lingkungan hidup	pembinaan dan peningkatan kapasitas penyuluhan lingkungan hidup
	pemenuhan indikator-indikator penilaian lingkungan hidup	pemenuhan indikator-indikator penilaian lingkungan hidup	pemenuhan indikator-indikator penilaian lingkungan hidup	pemenuhan indikator-indikator penilaian lingkungan hidup	pemenuhan indikator-indikator penilaian lingkungan hidup
	penyelesaian permasalahan2 lingkungan hidup	penyelesaian permasalahan2 lingkungan hidup	penyelesaian permasalahan2 lingkungan hidup	penyelesaian permasalahan2 lingkungan hidup	penyelesaian permasalahan2 lingkungan hidup
	meningkatkan pengelolaan sampah dari rumah tangga	meningkatkan pengelolaan sampah dari rumah tangga	meningkatkan pengelolaan sampah dari rumah tangga	meningkatkan pengelolaan sampah dari rumah tangga	meningkatkan pengelolaan sampah dari rumah tangga
			pembangunan dan rehabilitasi TPA yang ramah lingkungan	pembangunan dan rehabilitasi TPA yang ramah lingkungan	
	Meningkatkan sarana dan prasarana persampahan	Meningkatkan sarana dan prasarana persampahan	Meningkatkan sarana dan prasarana persampahan	Meningkatkan sarana dan prasarana persampahan	Meningkatkan sarana dan prasarana persampahan
	Pengembangan PTPS 3 R, Bank sampah dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	Pengembangan PTPS 3 R, Bank sampah dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	Pengembangan PTPS 3 R, Bank sampah dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	Pengembangan PTPS 3 R, Bank sampah dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	Pengembangan PTPS 3 R, Bank sampah dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat
	Meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana yang meliputi pemetaan risiko bencana, perencanaan penanggulangan bencana, peningkatan sistem peringatan dini dan infrastruktur kesiapsiagaan	Meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana yang meliputi pemetaan risiko bencana, perencanaan penanggulangan bencana, peningkatan sistem peringatan dini dan infrastruktur kesiapsiagaan	Meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana yang meliputi pemetaan risiko bencana, perencanaan penanggulangan bencana, peningkatan sistem peringatan dini dan infrastruktur kesiapsiagaan	Meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana yang meliputi pemetaan risiko bencana, perencanaan penanggulangan bencana, peningkatan sistem peringatan dini dan infrastruktur kesiapsiagaan	Meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana yang meliputi pemetaan risiko bencana, perencanaan penanggulangan bencana, peningkatan sistem peringatan dini dan infrastruktur kesiapsiagaan
	Memperkuat tata kelola kesiapsiagaan terhadap bencana yang meliputi kemampuan tanggap darurat antar berbagai pihak, kepedulian dan kesiapsiagaan masyarakat, sinkronisasi dokumen perencanaan daerah (RTRW, RPJPD, dan RPJMD) dengan Rencana Penanggulangan	Memperkuat tata kelola kesiapsiagaan terhadap bencana yang meliputi kemampuan tanggap darurat antar berbagai pihak, kepedulian dan kesiapsiagaan masyarakat, sinkronisasi dokumen perencanaan daerah (RTRW, RPJPD, dan RPJMD) dengan Rencana Penanggulangan	Memperkuat tata kelola kesiapsiagaan terhadap bencana yang meliputi kemampuan tanggap darurat antar berbagai pihak, kepedulian dan kesiapsiagaan masyarakat, sinkronisasi dokumen perencanaan daerah (RTRW, RPJPD, dan RPJMD) dengan Rencana Penanggulangan	Memperkuat tata kelola kesiapsiagaan terhadap bencana yang meliputi kemampuan tanggap darurat antar berbagai pihak, kepedulian dan kesiapsiagaan masyarakat, sinkronisasi dokumen perencanaan daerah (RTRW, RPJPD, dan RPJMD) dengan Rencana	Memperkuat tata kelola kesiapsiagaan terhadap bencana yang meliputi kemampuan tanggap darurat antar berbagai pihak, kepedulian dan kesiapsiagaan masyarakat, sinkronisasi dokumen perencanaan daerah (RTRW, RPJPD, dan RPJMD) dengan Rencana Penanggulangan



SASARAN		ARAH KEBIJAKAN				
		TAHUN 1 (2026)	TAHUN 2 (2027)	TAHUN 3 (2028)	TAHUN 4 (2029)	TAHUN 5 (2030)
2	Meningkatnya Aksesibilitas/Konektivitas Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas	Bencana, serta sinkronisasi data kebencanaan daerah dengan data nasional (BNPB) dan K/L terkait.	nasional (BNPB) dan K/L terkait.	Bencana, serta sinkronisasi data kebencanaan daerah dengan data nasional (BNPB) dan K/L terkait.	Penanggulangan Bencana, serta sinkronisasi data kebencanaan daerah dengan data nasional (BNPB) dan K/L terkait.	Bencana, serta sinkronisasi data kebencanaan daerah dengan data nasional (BNPB) dan K/L terkait.
		penyusunan dokumen kebencanaan dan pengadaan sarana prasarana keselamatan	penyusunan dokumen kebencanaan dan pengadaan sarana prasarana keselamatan	penyusunan dokumen kebencanaan dan pengadaan sarana prasarana keselamatan	penyusunan dokumen kebencanaan dan pengadaan sarana prasarana keselamatan	penyusunan dokumen kebencanaan dan pengadaan sarana prasarana keselamatan
		pembangunan gedung PUSDALOPS	pembangunan gedung PUSDALOPS	Optimalisasi penggunaan gedung PUSDALOPS	Optimalisasi penggunaan gedung PUSDALOPS	Optimalisasi penggunaan gedung PUSDALOPS
		Peningkatan potensi-potensi sumber daya air : Pembangunan Embung Lurah Bomben Desa Kolok Nan Tuo Kota Sawahlunto,	Peningkatan potensi-potensi sumber daya air : Pembangunan Embung Lurah Bomben Desa Kolok Nan Tuo Kota Sawahlunto,	Peningkatan potensi-potensi sumber daya air : Pembangunan Embung Lurah Bomben Desa Kolok Nan Tuo Kota Sawahlunto,	Peningkatan potensi-potensi sumber daya air : Pembangunan Embung Lurah Bomben Desa Kolok Nan Tuo Kota Sawahlunto,	Peningkatan potensi-potensi sumber daya air : Pembangunan Embung Lurah Bomben Desa Kolok Nan Tuo Kota Sawahlunto,
		Normalisasi/ Restorasi Sungai Kali Hitam Kota Sawahlunto untuk mencegah terjadinya banjir	Normalisasi/ Restorasi Sungai Kali Hitam Kota Sawahlunto untuk mencegah terjadinya banjir	Normalisasi/ Restorasi Sungai Kali Hitam Kota Sawahlunto untuk mencegah terjadinya banjir	Normalisasi/ Restorasi Sungai Kali Hitam Kota Sawahlunto untuk mencegah terjadinya banjir	Normalisasi/ Restorasi Sungai Kali Hitam Kota Sawahlunto untuk mencegah terjadinya banjir
		Pengembangan SPAM Perkotaan Sawahlunto (RPJMN)	Pengembangan SPAM Perkotaan Sawahlunto (RPJMN)	Pengembangan SPAM Perkotaan Sawahlunto (RPJMN)	Pengembangan SPAM Perkotaan Sawahlunto (RPJMN)	Pengembangan SPAM Perkotaan Sawahlunto (RPJMN)
		Peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi layak	Peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi layak	Peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi layak	Peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi layak	Peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi layak
		Peningkatan sistem drainase perkotaan	Peningkatan sistem drainase perkotaan	Peningkatan sistem drainase perkotaan	Peningkatan sistem drainase perkotaan	Peningkatan sistem drainase perkotaan
		Peningkatan penataan gedung-gedung perkantoran	Peningkatan penataan gedung-gedung perkantoran	Peningkatan penataan gedung-gedung perkantoran	Peningkatan penataan gedung-gedung perkantoran	Peningkatan penataan gedung-gedung perkantoran
		Peningkatan kualitas Jalan Kota	Peningkatan kualitas Jalan Kota	Peningkatan kualitas Jalan Kota	Peningkatan kualitas Jalan Kota	Peningkatan kualitas Jalan Kota
		Pembangunan jalan Muaro Kalaban - Pondok Kapua	Pembangunan jalan Muaro Kalaban - Pondok Kapua	Pembangunan jalan Muaro Kalaban - Pondok Kapua	Pembangunan jalan Muaro Kalaban - Pondok Kapua	Pembangunan jalan Muaro Kalaban - Pondok Kapua
		Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas untuk pengembangan wilayah dengan Kab. Solok dengan Peningkatan Jalan Ruas Jalan Talawi - Rawang (Segmen SMK 1 Talawi - Batas Kab. Solok)	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas untuk pengembangan wilayah dengan Kab. Solok dengan Peningkatan Jalan Ruas Jalan Talawi - Rawang (Segmen SMK 1 Talawi - Batas Kab. Solok)	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas untuk pengembangan wilayah dengan Kab. Solok dengan Peningkatan Jalan Ruas Jalan Talawi - Rawang (Segmen SMK 1 Talawi - Batas Kab. Solok)	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas untuk pengembangan wilayah dengan Kab. Solok dengan Peningkatan Jalan Ruas Jalan Talawi - Rawang (Segmen SMK 1 Talawi - Batas Kab. Solok)	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas untuk pengembangan wilayah dengan Kab. Solok dengan Peningkatan Jalan Ruas Jalan Talawi - Rawang (Segmen SMK 1 Talawi - Batas Kab. Solok)
		Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah dengan Kab. Tanah Datar untuk mendukung pariwisata dengan 1. Peningkatan Jalan Ruas Jalan Guguk Cino - Sawahlunto (Segmen Simp. Bank Mandiri - Batas Kab. Tanah Datar)	Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah dengan Kab. Tanah Datar untuk mendukung pariwisata dengan 1. Peningkatan Jalan Ruas Jalan Guguk Cino - Sawahlunto (Segmen Simp. Bank Mandiri - Batas Kab. Tanah Datar)	Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah dengan Kab. Tanah Datar untuk mendukung pariwisata dengan 1. Peningkatan Jalan Ruas Jalan Guguk Cino - Sawahlunto (Segmen Simp. Bank Mandiri - Batas Kab. Tanah Datar)	Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah dengan Kab. Tanah Datar untuk mendukung pariwisata dengan 1. Peningkatan Jalan Ruas Jalan Guguk Cino - Sawahlunto (Segmen Simp. Bank Mandiri - Batas Kab. Tanah Datar)	Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah dengan Kab. Tanah Datar untuk mendukung pariwisata dengan 1. Peningkatan Jalan Ruas Jalan Guguk Cino - Sawahlunto (Segmen Simp. Bank Mandiri - Batas Kab. Tanah Datar)
		Peningkatan kualitas penataan ruang melalui Mapping digitalisasi RTRW	Peningkatan kualitas penataan ruang melalui Mapping digitalisasi RTRW	Peningkatan kualitas penataan ruang melalui Mapping digitalisasi RTRW	Peningkatan kualitas penataan ruang melalui Mapping digitalisasi RTRW	Peningkatan kualitas penataan ruang melalui Mapping digitalisasi RTRW
			Normalisasi Batang Lunto	Normalisasi Batang Lunto		
		Optimalisasi Embung Sumpahan	Optimalisasi Embung Sumpahan	Optimalisasi Embung Sumpahan	Optimalisasi Embung Sumpahan	Optimalisasi Embung Sumpahan
			Bendungan Sawah Pampuan		Bendungan sawah patai	
		Optimalisasi jaringan Irigasi	Optimalisasi jaringan Irigasi	Optimalisasi jaringan Irigasi	Optimalisasi jaringan Irigasi	Optimalisasi jaringan Irigasi
		Pengembangan SPAM Perkotaan Sawahlunto (RPJMN)	Pengembangan SPAM Perkotaan Sawahlunto (RPJMN)	Pengembangan SPAM Perkotaan Sawahlunto (RPJMN)	Pengembangan SPAM Perkotaan Sawahlunto (RPJMN)	Pengembangan SPAM Perkotaan Sawahlunto (RPJMN)
		Optimalisasi SPAM Perkotaan	Optimalisasi SPAM Perkotaan	Optimalisasi SPAM Perkotaan	Optimalisasi SPAM Perkotaan	Optimalisasi SPAM Perkotaan



SASARAN	ARAH KEBIJAKAN				
	TAHUN 1 (2026)	TAHUN 2 (2027)	TAHUN 3 (2028)	TAHUN 4 (2029)	TAHUN 5 (2030)
	Sawahlunto (RPJMN)	Sawahlunto (RPJMN)	Sawahlunto (RPJMN)	Sawahlunto (RPJMN)	Sawahlunto (RPJMN)
	Penyusunan Perencanaan Pembangunan IPLT	Pembangunan IPLT	Pembangunan IPLT	Pemeliharaan IPLT	Pemeliharaan IPLT
	Pembangunan Tankiseptik individu	Pembangunan Tankiseptik individu	Pembangunan Tankiseptik individu	Pembangunan Tankiseptik individu	Pembangunan Tankiseptik individu
	Peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi aman	Peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi aman	Peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi aman	Peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi aman	Peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi aman
	Peningkatan sistem drainase Perkotaan	Peningkatan sistem drainase Perkotaan	Peningkatan sistem drainase Perkotaan	Peningkatan sistem drainase Perkotaan	Peningkatan sistem drainase Perkotaan
		Peningkatan drainase kawasan SILO	Penataan drainase dari Puncak Polan sampai ke Kota Lama	Penataan drainase dari Puncak Polan sampai ke Kota Lama	
	Pembangunan Gedung Perkantoran Pemerintah	Pembangunan Gedung Perkantoran Pemerintah	Pembangunan Gedung Perkantoran Pemerintah	Pembangunan Gedung Perkantoran Pemerintah	Pembangunan Gedung Perkantoran Pemerintah
	Optimalisasi Bangunan, Drainase dan jalan lingkungan	Optimalisasi Bangunan, Drainase dan jalan lingkungan	Optimalisasi Bangunan, Drainase dan jalan lingkungan	Optimalisasi Bangunan, Drainase dan jalan lingkungan	Optimalisasi Bangunan, Drainase dan jalan lingkungan
	Pembangunan Bangunan, Drainase dan jalan lingkungan	Pembangunan Bangunan, Drainase dan jalan lingkungan	Pembangunan Bangunan, Drainase dan jalan lingkungan	Pembangunan Bangunan, Drainase dan jalan lingkungan	Pembangunan Bangunan, Drainase dan jalan lingkungan
	Pembangunan jalan Muaro Kalaban - Pondok Kapua	Pembangunan jalan Muaro Kalaban -Pondok Kapua	Pembangunan jalan Muaro Kalaban - Pondok Kapua	Pembangunan jalan Muaro Kalaban - Pondok Kapua	Pembangunan jalan Muaro Kalaban - Pondok Kapua
	Guguak bungo simarambang	Guguak bungo simarambang			
	Peningkatan jalan puskesmas Silungkang- sungai cancang silungkang- taratak bancah	Peningkatan jalan puskesmas Silungkang- sungai cancang silungkang- taratak bancah	Peningkatan jalan puskesmas Silungkang- sungai cancang silungkang- taratak bancah	Peningkatan jalan puskesmas Silungkang- sungai cancang silungkang- taratak bancah	Peningkatan jalan puskesmas Silungkang- sungai cancang silungkang- taratak bancah
	Peningkatan jalan muaro kalaban - taratak bancah	Peningkatan jalan muaro kalaban -taratak bancah	Peningkatan jalan muaro kalaban - taratak bancah	Peningkatan jalan muaro kalaban - taratak bancah	Peningkatan jalan muaro kalaban - taratak bancah
	Peningkatan jalan pasar guguak - kelumindai	Peningkatan jalan pasar guguak - kelumindai	Peningkatan jalan pasar guguak - kelumindai	Peningkatan jalan pasar guguak - kelumindai	Peningkatan jalan pasar guguak - kelumindai
			Peningkatan jalan sungai durian medan bapaneh	Peningkatan jalan lubuak pinang - kalimato	Peningkatan Jalan sijantang-tigo tanjung, tigo tanjung - datar mansiang
			Peningkatan jalan simpang kubang - Lunto		
		Peningkatan jalan pasar baru- kelok cendol, simpang sapan - pasar baru	Peningkatan jalan pasar baru- kelok cendol, simpang sapan - pasar baru		
	Pembinaan bagi tenaga jasa konstruksi	Pembinaan bagi tenaga jasa konstruksi	Pembinaan bagi tenaga jasa konstruksi	Pembinaan bagi tenaga jasa konstruksi	Pembinaan bagi tenaga jasa konstruksi
	Penyusunan PERDA RTRW	Penyusunan PERDA RTRW	Penyusunan PERDA RDTR	Penyusunan PERDA RDTR	
	Peningkatan kualitas penataan ruang melalui Mapping digitalisasi RTRW	Peningkatan kualitas penataan ruang melalui Mapping digitalisasi RTRW	Peningkatan kualitas penataan ruang melalui Mapping digitalisasi RTRW	Peningkatan kualitas penataan ruang melalui Mapping digitalisasi RTRW	Peningkatan kualitas penataan ruang melalui Mapping digitalisasi RTRW
	Pembangunan Rumah Murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan Milenial di kawasan perkotaan (RPJMN)	Pembangunan Rumah Murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan Milenial di kawasan perkotaan (RPJMN)	Pembangunan Rumah Murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan Milenial di kawasan perkotaan (RPJMN)	Pembangunan Rumah Murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan Milenial di kawasan perkotaan (RPJMN)	Pembangunan Rumah Murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan Milenial di kawasan perkotaan (RPJMN)
	Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) di kawasan Kota Lama	Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) di kawasan Kota Lama	Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) di kawasan Kota Lama	Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) di kawasan Kota Lama	Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) di kawasan Kota Lama
	Pembangunan/Rehabilitasi rumah yang korban bencana	Pembangunan/Rehabilitasi rumah yang korban bencana	Pembangunan/Rehabilitasi rumah yang korban bencana	Pembangunan/Rehabilitasi rumah yang korban bencana	Pembangunan/Rehabilitasi rumah yang korban bencana
	Peningkatan kualitas kawasan kumuh sesuai SK Walikota yaitu Kolok	Peningkatan kualitas kawasan kumuh sesuai SK Walikota yaitu Kolok mudiak dan kolok	Peningkatan kualitas kawasan kumuh sesuai SK Walikota yaitu Kolok	Peningkatan kualitas kawasan kumuh sesuai SK Walikota yaitu	Peningkatan kualitas kawasan kumuh sesuai SK Walikota yaitu



SASARAN		ARAH KEBIJAKAN				
		TAHUN 1 (2026)	TAHUN 2 (2027)	TAHUN 3 (2028)	TAHUN 4 (2029)	TAHUN 5 (2030)
		mudiak dan kolok nan tuo	nan tuo	mudiak dan kolok nan tuo	Kolok mudiak dan kolok nan tuo	Kolok mudiak dan kolok nan tuo
		Peningkatan kualitas kawasan rawan kumuh	Peningkatan kualitas kawasan rawan kumuh	Peningkatan kualitas kawasan rawan kumuh	Peningkatan kualitas kawasan rawan kumuh	Peningkatan kualitas kawasan rawan kumuh
		Koordinasi penyerahan PSU perumahan ke pemerintah daerah	Koordinasi penyerahan PSU perumahan ke pemerintah daerah	Koordinasi penyerahan PSU perumahan ke pemerintah daerah	Koordinasi penyerahan PSU perumahan ke pemerintah daerah	Koordinasi penyerahan PSU perumahan ke pemerintah daerah
		Penerbitan perwako PSU Perumahan	Penerbitan perwako PSU Perumahan	Penerbitan perwako PSU Perumahan	Penerbitan perwako PSU Perumahan	Penerbitan perwako PSU Perumahan
		Peningkatan kualitas sarana dan prasarana fasilitas Perumahan	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana fasilitas Perumahan	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana fasilitas Perumahan	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana fasilitas Perumahan	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana fasilitas Perumahan
		Penyelesaian status tanah pemerintah,	Penyelesaian status tanah pemerintah,	Penyelesaian status tanah pemerintah,	Penyelesaian status tanah pemerintah,	Penyelesaian status tanah pemerintah,
		pembentukan tim satuan tugas penyelesaian konflik agraria daerah	pembentukan tim satuan tugas penyelesaian konflik agraria daerah			
		peningkatan koordinasi tim satuan tugas dalam penyelesaian konflik agraria daerah	peningkatan koordinasi tim satuan tugas dalam penyelesaian konflik agraria daerah	peningkatan koordinasi tim satuan tugas dalam penyelesaian konflik agraria daerah	peningkatan koordinasi tim satuan tugas dalam penyelesaian konflik agraria daerah	peningkatan koordinasi tim satuan tugas dalam penyelesaian konflik agraria daerah
		inventarisasi dan identifikasi status tanah kota sawahlunto	inventarisasi dan identifikasi status tanah kota sawahlunto	inventarisasi dan identifikasi status tanah kota sawahlunto	inventarisasi dan identifikasi status tanah kota sawahlunto	inventarisasi dan identifikasi status tanah kota sawahlunto
		inventarisasi dan identifikasi tanah kelebihan maksimum dan tanah absente	inventarisasi dan identifikasi tanah kelebihan maksimum dan tanah absente	inventarisasi dan identifikasi tanah kelebihan maksimum dan tanah absente	inventarisasi dan identifikasi tanah kelebihan maksimum dan tanah absente	inventarisasi dan identifikasi tanah kelebihan maksimum dan tanah absente
		Penutupan sertifikat tanah 393 hektar	Penutupan sertifikat tanah 393 hektar	Penutupan sertifikat tanah 393 hektar	Penutupan sertifikat tanah 393 hektar	Penutupan sertifikat tanah 393 hektar
		Pengadaan penerangan Jalan umum	Peningkatan penerangan Jalan umum	Pengelolaan penerangan Jalan umum	Pengelolaan penerangan Jalan umum	Pengelolaan penerangan Jalan umum
		Pengadaan Perlengkapan Jalan (Warning Light, Guard Rail, Cermin Tikungan (Safety Mirror), Rambu Standar, RPPJ (Wisata), Zona Selamat Sekolah (ZOSS), Marka Jalan)	Peningkatan Perlengkapan Jalan (Warning Light, Guard Rail, Cermin Tikungan (Safety Mirror), Rambu Standar, RPPJ (Wisata), Zona Selamat Sekolah (ZOSS), Marka Jalan)	Peningkatan Perlengkapan Jalan (Warning Light, Guard Rail, Cermin Tikungan (Safety Mirror), Rambu Standar, RPPJ (Wisata), Zona Selamat Sekolah (ZOSS), Marka Jalan)	Peningkatan Perlengkapan Jalan (Warning Light, Guard Rail, Cermin Tikungan (Safety Mirror), Rambu Standar, RPPJ (Wisata), Zona Selamat Sekolah (ZOSS), Marka Jalan)	Peningkatan Perlengkapan Jalan (Warning Light, Guard Rail, Cermin Tikungan (Safety Mirror), Rambu Standar, RPPJ (Wisata), Zona Selamat Sekolah (ZOSS), Marka Jalan)
		penerapan standar dan prosedur keselamatan yang lebih ketat untuk lalu lintas dan angkutan jalan.	Meningkatkan penerapan standar dan prosedur keselamatan yang lebih ketat untuk lalu lintas dan angkutan jalan.	Meningkatkan penerapan standar dan prosedur keselamatan yang lebih ketat untuk lalu lintas dan angkutan jalan.	Meningkatkan penerapan standar dan prosedur keselamatan yang lebih ketat untuk lalu lintas dan angkutan jalan.	Meningkatkan penerapan standar dan prosedur keselamatan yang lebih ketat untuk lalu lintas dan angkutan jalan.
		Koordinasi ke KAI dan balai perkeretapihan terkait dengan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kelancaran operasional, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat	Koordinasi ke KAI dan balai perkeretapihan terkait dengan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kelancaran operasional, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat	Koordinasi ke KAI dan balai perkeretapihan terkait dengan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kelancaran operasional, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat	Koordinasi ke KAI dan balai perkeretapihan terkait dengan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kelancaran operasional, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat	Koordinasi ke KAI dan balai perkeretapihan terkait dengan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kelancaran operasional, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat
Misi 4. Peningkatan nilai-nilai keagamaan dan Pelestarian budaya melalui Pengembangan komunitas seni demi mendukung terwujudnya kota wisata yang estetik dan memiliki fungsi ekonomi dan mensejahterakan						
Tujuan 4. Terwujudnya ketahanan sosial budaya dan agama untuk menciptakan masyarakat yang harmonis						
1	Meningkatnya ketahanan Sosial kehidupan beragama yang menjunjung nilai toleransi, kerukunan dan moderasi beragama	Penguatan kolaboratif lintas sektor dalam mewujudkan desa BERSINAR (Bersih Narkoba)	Penguatan kolaboratif lintas sektor dalam mewujudkan desa BERSINAR (Bersih Narkoba)	Meningkatkan kolaboratif lintas sektor dalam mewujudkan desa BERSINAR (Bersih Narkoba)	Meningkatkan kolaboratif lintas sektor dalam mewujudkan desa BERSINAR (Bersih Narkoba)	Meningkatkan kolaboratif lintas sektor dalam mewujudkan desa BERSINAR (Bersih Narkoba)
		Membina kerukunan antarsuku, agama, ras, dan golongan lainnya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.	Membina kerukunan antarsuku, agama, ras, dan golongan lainnya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.	Meningkatkan pembinaan kerukunan antarsuku, agama, ras, dan golongan lainnya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.	Meningkatkan pembinaan kerukunan antarsuku, agama, ras, dan golongan lainnya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.	Meningkatkan pembinaan kerukunan antarsuku, agama, ras, dan golongan lainnya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
		Mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan	Mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan politik dan sosial	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan



SASARAN	ARAH KEBIJAKAN				
	TAHUN 1 (2026)	TAHUN 2 (2027)	TAHUN 3 (2028)	TAHUN 4 (2029)	TAHUN 5 (2030)
	politik dan sosial untuk menciptakan iklim demokrasi yang sehat.	untuk menciptakan iklim demokrasi yang sehat.	politik dan sosial untuk menciptakan iklim demokrasi yang sehat.	kehidupan politik dan sosial untuk menciptakan iklim demokrasi yang sehat.	politik dan sosial untuk menciptakan iklim demokrasi yang sehat.
	Meningkatkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam meningkatkan kerukunan intra antar umat beragama	Meningkatkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam meningkatkan kerukunan intra antar umat beragama	Meningkatkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam meningkatkan kerukunan intra antar umat beragama	Meningkatkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam meningkatkan kerukunan intra antar umat beragama	Meningkatkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam meningkatkan kerukunan intra antar umat beragama
	Melaksanakan pembekalan bagi aparaturnya dan masyarakat terkait Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan penyakit masyarakat lainnya	Melaksanakan pembekalan bagi aparaturnya dan masyarakat terkait Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan penyakit masyarakat lainnya	Meningkatkan pembekalan bagi aparaturnya dan masyarakat terkait Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan penyakit masyarakat lainnya	Meningkatkan pembekalan bagi aparaturnya dan masyarakat terkait Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan penyakit masyarakat lainnya	Meningkatkan pembekalan bagi aparaturnya dan masyarakat terkait Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan penyakit masyarakat lainnya
	Pemberdayaan remaja dan anak melalui forum generasi muda untuk pencegahan kenakalan remaja dan pembentukan karakter	Pemberdayaan remaja dan anak melalui forum generasi muda untuk pencegahan kenakalan remaja dan pembentukan karakter	Meningkatkan Pemberdayaan remaja dan anak melalui forum generasi muda untuk pencegahan kenakalan remaja dan pembentukan karakter	Meningkatkan Pemberdayaan remaja dan anak melalui forum generasi muda untuk pencegahan kenakalan remaja dan pembentukan karakter	Meningkatkan Pemberdayaan remaja dan anak melalui forum generasi muda untuk pencegahan kenakalan remaja dan pembentukan karakter
	Penguatan koordinasi, kelembagaan, dan peran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan mencegah penyakit masyarakat	Penguatan koordinasi, kelembagaan, dan peran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan mencegah penyakit masyarakat	Penguatan koordinasi, kelembagaan, dan peran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan mencegah penyakit masyarakat	Penguatan koordinasi, kelembagaan, dan peran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan mencegah penyakit masyarakat	Penguatan koordinasi, kelembagaan, dan peran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan mencegah penyakit masyarakat
	Menguatkan peran forum-forum strategis daerah: Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam memediasi isu-isu sensitif seperti intoleransi, diskriminasi dan konflik sosial	Menguatkan peran forum-forum strategis daerah: Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam memediasi isu-isu sensitif seperti intoleransi, diskriminasi dan konflik sosial	Menguatkan peran forum-forum strategis daerah: Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam memediasi isu-isu sensitif seperti intoleransi, diskriminasi dan konflik sosial	Menguatkan peran forum-forum strategis daerah: Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam memediasi isu-isu sensitif seperti intoleransi, diskriminasi dan konflik sosial	Menguatkan peran forum-forum strategis daerah: Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam memediasi isu-isu sensitif seperti intoleransi, diskriminasi dan konflik sosial
	menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah guna menciptakan kondisi yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.	menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah guna menciptakan kondisi yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.	menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah guna menciptakan kondisi yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.	menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah guna menciptakan kondisi yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.	menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah guna menciptakan kondisi yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
	menjaga keamanan dan ketertiban di ruang publik, serta mencegah terjadinya gangguan ketenteraman yang dapat meresahkan masyarakat	meningkatkan keamanan dan ketertiban di ruang publik, serta mencegah terjadinya gangguan ketenteraman yang dapat meresahkan masyarakat	meningkatkan keamanan dan ketertiban di ruang publik, serta mencegah terjadinya gangguan ketenteraman yang dapat meresahkan masyarakat	meningkatkan keamanan dan ketertiban di ruang publik, serta mencegah terjadinya gangguan ketenteraman yang dapat meresahkan masyarakat	meningkatkan keamanan dan ketertiban di ruang publik, serta mencegah terjadinya gangguan ketenteraman yang dapat meresahkan masyarakat
	memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang mungkin timbul.	meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang mungkin timbul.	meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang mungkin timbul.	meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang mungkin timbul.	meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang mungkin timbul.
	Meningkatkan kemampuan dan keahlian petugas pemadam kebakaran serta meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran.	Meningkatkan kemampuan dan keahlian petugas pemadam kebakaran serta meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran.	Meningkatkan kemampuan dan keahlian petugas pemadam kebakaran serta meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran.	Meningkatkan kemampuan dan keahlian petugas pemadam kebakaran serta meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran.	Meningkatkan kemampuan dan keahlian petugas pemadam kebakaran serta meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran.
	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana dan prasarana proteksi kebakaran untuk memastikan kesiapan menghadapi risiko kebakaran.	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana dan prasarana proteksi kebakaran untuk memastikan kesiapan menghadapi risiko kebakaran.	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana dan prasarana proteksi kebakaran untuk memastikan kesiapan menghadapi risiko kebakaran.	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana dan prasarana proteksi kebakaran untuk memastikan kesiapan menghadapi risiko kebakaran.	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana dan prasarana proteksi kebakaran untuk memastikan kesiapan menghadapi risiko kebakaran.



SASARAN	ARAH KEBIJAKAN				
	TAHUN 1 (2026)	TAHUN 2 (2027)	TAHUN 3 (2028)	TAHUN 4 (2029)	TAHUN 5 (2030)
2 Meningkatkan komunitas seni dalam pelestarian cagar budaya dan adat istiadat	Melestarikan tradisi lokal, kearifan budaya, dan nilai-nilai keagamaan yang menjadi identitas Sawahlunto	Melestarikan tradisi lokal, kearifan budaya, dan nilai-nilai keagamaan yang menjadi identitas Sawahlunto	Meningkatkan pelestarian tradisi lokal, kearifan budaya, dan nilai-nilai keagamaan yang menjadi identitas Sawahlunto	Meningkatkan pelestarian tradisi lokal, kearifan budaya, dan nilai-nilai keagamaan yang menjadi identitas Sawahlunto	Meningkatkan pelestarian tradisi lokal, kearifan budaya, dan nilai-nilai keagamaan yang menjadi identitas Sawahlunto
	Pembinaan untuk pengkaderan ninik mamak	Pembinaan untuk pengkaderan ninik mamak	Meningkatkan Pembinaan untuk pengkaderan ninik mamak	Meningkatkan Pembinaan untuk pengkaderan ninik mamak	Meningkatkan Pembinaan untuk pengkaderan ninik mamak
	Menumbuhkembangkan komunitas seni tradisional dan modern melalui pendampingan, pelatihan, dan fasilitasi ruang kreatif	Menumbuhkembangkan komunitas seni tradisional dan modern melalui pendampingan, pelatihan, dan fasilitasi ruang kreatif	Menumbuhkembangkan komunitas seni tradisional dan modern melalui pendampingan, pelatihan, dan fasilitasi ruang kreatif	Menumbuhkembangkan komunitas seni tradisional dan modern melalui pendampingan, pelatihan, dan fasilitasi ruang kreatif	Menumbuhkembangkan komunitas seni tradisional dan modern melalui pendampingan, pelatihan, dan fasilitasi ruang kreatif
	Mendukung dan memfasilitasi kalender acara budaya seperti festival, pameran seni, pentas kesenian sebagai sarana ekspresi lokal dan daya tarik wisata	Mendukung dan memfasilitasi kalender acara budaya seperti festival, pameran seni, pentas kesenian sebagai sarana ekspresi lokal dan daya tarik wisata	Mendukung dan memfasilitasi kalender acara budaya seperti festival, pameran seni, pentas kesenian sebagai sarana ekspresi lokal dan daya tarik wisata	Mendukung dan memfasilitasi kalender acara budaya seperti festival, pameran seni, pentas kesenian sebagai sarana ekspresi lokal dan daya tarik wisata	Mendukung dan memfasilitasi kalender acara budaya seperti festival, pameran seni, pentas kesenian sebagai sarana ekspresi lokal dan daya tarik wisata
	Mendorong kemitraan antara seniman, UMKM lokal, dan investor (termasuk BUMN/BUMD) untuk komersialisasi budaya	Mendorong kemitraan antara seniman, UMKM lokal, dan investor (termasuk BUMN/BUMD) untuk komersialisasi budaya	Meningkatkan kemitraan antara seniman, UMKM lokal, dan investor (termasuk BUMN/BUMD) untuk komersialisasi budaya	Meningkatkan kemitraan antara seniman, UMKM lokal, dan investor (termasuk BUMN/BUMD) untuk komersialisasi budaya	Meningkatkan kemitraan antara seniman, UMKM lokal, dan investor (termasuk BUMN/BUMD) untuk komersialisasi budaya
	Pembentukan kelompok-kelompok seni yang produktif dengan program yang berkualitas Melahirkan Komunitas yang baru, berkompeten Studi Banding dan Evaluasi yang berkelanjutan sesuai peningkatan kompetensi seni dan mengemas hal yang estetik untuk Kota Sawahlunto dan Pelatihan Kurator Seni, Bimtek Pelatih Kesenian	Pembentukan kelompok-kelompok seni yang produktif dengan program yang berkualitas Melahirkan Komunitas yang baru, berkompeten Studi Banding dan Evaluasi yang berkelanjutan sesuai peningkatan kompetensi seni dan mengemas hal yang estetik untuk Kota Sawahlunto dan Pelatihan Kurator Seni, Bimtek Pelatih Kesenian	pengembangan kelompok-kelompok seni yang produktif dengan program yang berkualitas Melahirkan Komunitas yang baru, berkompeten Studi Banding dan Evaluasi yang berkelanjutan sesuai peningkatan kompetensi seni dan mengemas hal yang estetik untuk Kota Sawahlunto dan Pelatihan Kurator Seni, Bimtek Pelatih Kesenian	pengembangan kelompok-kelompok seni yang produktif dengan program yang berkualitas Melahirkan Komunitas yang baru, berkompeten Studi Banding dan Evaluasi yang berkelanjutan sesuai peningkatan kompetensi seni dan mengemas hal yang estetik untuk Kota Sawahlunto dan Pelatihan Kurator Seni, Bimtek Pelatih Kesenian	pengembangan kelompok-kelompok seni yang produktif dengan program yang berkualitas Melahirkan Komunitas yang baru, berkompeten Studi Banding dan Evaluasi yang berkelanjutan sesuai peningkatan kompetensi seni dan mengemas hal yang estetik untuk Kota Sawahlunto dan Pelatihan Kurator Seni, Bimtek Pelatih Kesenian
	Peningkatan kualitas seni pertunjukan (teater, musik, tari).Event event berkesinambungan yang menghidupi warga kota, Pasar Seni.	Peningkatan kualitas seni pertunjukan (teater, musik, tari).Event event berkesinambungan yang menghidupi warga kota, Pasar Seni.	Peningkatan kualitas seni pertunjukan (teater, musik, tari).Event event berkesinambungan yang menghidupi warga kota, Pasar Seni.	Peningkatan kualitas seni pertunjukan (teater, musik, tari).Event event berkesinambungan yang menghidupi warga kota, Pasar Seni.	Peningkatan kualitas seni pertunjukan (teater, musik, tari).Event event berkesinambungan yang menghidupi warga kota, Pasar Seni.
	Terbentuknya rumah seni dengan pemenuhan sarana dan prasarana penunjangnya.Kampung Seni Rumah Seni atau pemberdayaan Museum Seni yang lebih aktif dalam menampung aspirasi warga yang sangat menyukai seni dan berprofesi di bid kesenian	Terbentuknya rumah seni dengan pemenuhan sarana dan prasarana penunjangnya.Kampung Seni Rumah Seni atau pemberdayaan Museum Seni yang lebih aktif dalam menampung aspirasi warga yang sangat menyukai seni dan berprofesi di bid kesenian	meoptimalkan rumah seni dengan pemenuhan sarana dan prasarana penunjangnya.Kampung Seni Rumah Seni atau pemberdayaan Museum Seni yang lebih aktif dalam menampung aspirasi warga yang sangat menyukai seni dan berprofesi di bid kesenian	meoptimalkan rumah seni dengan pemenuhan sarana dan prasarana penunjangnya.Kampung Seni Rumah Seni atau pemberdayaan Museum Seni yang lebih aktif dalam menampung aspirasi warga yang sangat menyukai seni dan berprofesi di bid kesenian	meoptimalkan rumah seni dengan pemenuhan sarana dan prasarana penunjangnya.Kampung Seni Rumah Seni atau pemberdayaan Museum Seni yang lebih aktif dalam menampung aspirasi warga yang sangat menyukai seni dan berprofesi di bid kesenian
	Pemberdayaan lembaga adat, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan sebagai mitra pendidikan karakter dan pelestarian budaya	Pemberdayaan lembaga adat, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan sebagai mitra pendidikan karakter dan pelestarian budaya	Meningkatkan Pemberdayaan lembaga adat, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan sebagai mitra pendidikan karakter dan pelestarian budaya	Meningkatkan Pemberdayaan lembaga adat, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan sebagai mitra pendidikan karakter dan pelestarian budaya	Meningkatkan Pemberdayaan lembaga adat, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan sebagai mitra pendidikan karakter dan pelestarian budaya
	Melestarikan tradisi lokal, kearifan budaya, dan nilai-nilai keagamaan yang menjadi identitas Sawahlunto	Melestarikan tradisi lokal, kearifan budaya, dan nilai-nilai keagamaan yang menjadi identitas Sawahlunto	Meningkatkan pelestarian tradisi lokal, kearifan budaya, dan nilai-nilai keagamaan yang menjadi identitas Sawahlunto	Meningkatkan pelestarian tradisi lokal, kearifan budaya, dan nilai-nilai keagamaan yang menjadi identitas Sawahlunto	Meningkatkan pelestarian tradisi lokal, kearifan budaya, dan nilai-nilai keagamaan yang menjadi identitas Sawahlunto
	Meningkatkan upaya inventarisasi, konservasi, dan revitalisasi bangunan	Meningkatkan upaya inventarisasi, konservasi, dan revitalisasi bangunan	Meningkatkan upaya inventarisasi, konservasi, dan revitalisasi bangunan	Meningkatkan upaya inventarisasi, konservasi, dan revitalisasi bangunan	Meningkatkan upaya inventarisasi, konservasi, dan revitalisasi bangunan



SASARAN		ARAH KEBIJAKAN				
		TAHUN 1 (2026)	TAHUN 2 (2027)	TAHUN 3 (2028)	TAHUN 4 (2029)	TAHUN 5 (2030)
		serta kawasan cagar budaya	budaya	serta kawasan cagar budaya	bangunan serta kawasan cagar budaya	serta kawasan cagar budaya
		mempertahankan dan mengelola nilai universalnya yang luar biasa sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO	mempertahankan dan mengelola nilai universalnya yang luar biasa sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO	mempertahankan dan mengelola nilai universalnya yang luar biasa sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO	mempertahankan dan mengelola nilai universalnya yang luar biasa sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO	mempertahankan dan mengelola nilai universalnya yang luar biasa sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO
		Mendorong kerja sama antara pemerintah, lembaga adat, perguruan tinggi, BPCB, serta sumber dana multilateral/BUMN untuk mendukung pengelolaan, penelitian, dan pemeliharaan warisan budaya	Mendorong kerja sama antara pemerintah, lembaga adat, perguruan tinggi, BPCB, serta sumber dana multilateral/BUMN untuk mendukung pengelolaan, penelitian, dan pemeliharaan warisan budaya	Meningkatkan kerja sama antara pemerintah, lembaga adat, perguruan tinggi, BPCB, serta sumber dana multilateral/BUMN untuk mendukung pengelolaan, penelitian, dan pemeliharaan warisan budaya	Meningkatkan kerja sama antara pemerintah, lembaga adat, perguruan tinggi, BPCB, serta sumber dana multilateral/BUMN untuk mendukung pengelolaan, penelitian, dan pemeliharaan warisan budaya	Meningkatkan kerja sama antara pemerintah, lembaga adat, perguruan tinggi, BPCB, serta sumber dana multilateral/BUMN untuk mendukung pengelolaan, penelitian, dan pemeliharaan warisan budaya
		Menjaga pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di Kota Sawahlunto	Menjaga pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di Kota Sawahlunto	Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di Kota Sawahlunto	Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di Kota Sawahlunto	Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di Kota Sawahlunto
		pengembangan pariwisata yang memanfaatkan warisan budaya	pengembangan pariwisata yang memanfaatkan warisan budaya	pengembangan pariwisata yang memanfaatkan warisan budaya	pengembangan pariwisata yang memanfaatkan warisan budaya	pengembangan pariwisata yang memanfaatkan warisan budaya
		pengelolaan museum secara optimal	Meningkatkan pengelolaan museum secara optimal	Meningkatkan pengelolaan museum secara optimal	Meningkatkan pengelolaan museum secara optimal	Meningkatkan pengelolaan museum secara optimal
		Melaksanakan penataan ulang ruang museum	Melaksanakan penataan ulang ruang museum	Melaksanakan penataan ulang ruang museum	Melaksanakan penataan ulang ruang museum	Melaksanakan penataan ulang ruang museum
Misi 5. Meningkatkan Fungsi Ekonomi Sektor Pariwisata untuk Kesejahteraan Masyarakat melalui Optimalisasi Potensi Kepariwisataan						
Tujuan 5 Peningkatan fungsi ekonomi sektor pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat						
1	Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah	Penataan sarana prasarana pendukung kepariwisataan dengan Infrastruktur yang Futuristik, Instagramable	Penataan sarana prasarana pendukung kepariwisataan dengan Infrastruktur yang Futuristik, Instagramable	Penataan sarana prasarana pendukung kepariwisataan dengan Infrastruktur yang Futuristik, Instagramable	Penataan sarana prasarana pendukung kepariwisataan dengan Infrastruktur yang Futuristik, Instagramable	Penataan sarana prasarana pendukung kepariwisataan dengan Infrastruktur yang Futuristik, Instagramable
		Pembangunan destinasi wisata baru di Kota Sawahlunto dengan memperhatikan keberdayagunaan, tingkat daya saing, dan dampaknya terhadap pertumbuhan perekonomian	Pembangunan destinasi wisata baru di Kota Sawahlunto dengan memperhatikan keberdayagunaan, tingkat daya saing, dan dampaknya terhadap pertumbuhan perekonomian	Pembangunan destinasi wisata baru di Kota Sawahlunto dengan memperhatikan keberdayagunaan, tingkat daya saing, dan dampaknya terhadap pertumbuhan perekonomian	Pembangunan destinasi wisata baru di Kota Sawahlunto dengan memperhatikan keberdayagunaan, tingkat daya saing, dan dampaknya terhadap pertumbuhan perekonomian	Pembangunan destinasi wisata baru di Kota Sawahlunto dengan memperhatikan keberdayagunaan, tingkat daya saing, dan dampaknya terhadap pertumbuhan perekonomian
		Mengoptimalkan fungsi Geopark nasional di Kota Sawahlunto	Mengoptimalkan fungsi Geopark nasional di Kota Sawahlunto	Mengoptimalkan fungsi Geopark nasional di Kota Sawahlunto	Mengoptimalkan fungsi Geopark nasional di Kota Sawahlunto	Mengoptimalkan fungsi Geopark nasional di Kota Sawahlunto
		Pengembangan kawasan terpadu kandih di sawahlunto (RPJMN)	Pengembangan kawasan terpadu kandih di sawahlunto (RPJMN)	Pengembangan kawasan terpadu kandih di sawahlunto (RPJMN)	Pengembangan kawasan terpadu kandih di sawahlunto (RPJMN)	Pengembangan kawasan terpadu kandih di sawahlunto (RPJMN)
		Meningkatkan daya tarik dan keunggulan pariwisata seperti pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan, penginapan, fasilitas rekreasi dan fasilitas umum lainnya di destinasi pariwisata	Meningkatkan daya tarik dan keunggulan pariwisata seperti pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan, penginapan, fasilitas rekreasi dan fasilitas umum lainnya di destinasi pariwisata	Meningkatkan daya tarik dan keunggulan pariwisata seperti pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan, penginapan, fasilitas rekreasi dan fasilitas umum lainnya di destinasi pariwisata	Meningkatkan daya tarik dan keunggulan pariwisata seperti pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan, penginapan, fasilitas rekreasi dan fasilitas umum lainnya di destinasi pariwisata	Meningkatkan daya tarik dan keunggulan pariwisata seperti pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan, penginapan, fasilitas rekreasi dan fasilitas umum lainnya di destinasi pariwisata
		Pengembangan potensi wisata dan destinasi wisata unggulan di Sawahlunto yang mendukung status sebagai Warisan Dunia UNESCO Tambang Batubara Ombilin dan Geopark Nasional Sawahlunto	Pengembangan potensi wisata dan destinasi wisata unggulan di Sawahlunto yang mendukung status sebagai Warisan Dunia UNESCO Tambang Batubara Ombilin dan Geopark Nasional Sawahlunto	Pengembangan potensi wisata dan destinasi wisata unggulan di Sawahlunto yang mendukung status sebagai Warisan Dunia UNESCO Tambang Batubara Ombilin dan Geopark Nasional Sawahlunto	Pengembangan potensi wisata dan destinasi wisata unggulan di Sawahlunto yang mendukung status sebagai Warisan Dunia UNESCO Tambang Batubara Ombilin dan Geopark Nasional Sawahlunto	Pengembangan potensi wisata dan destinasi wisata unggulan di Sawahlunto yang mendukung status sebagai Warisan Dunia UNESCO Tambang Batubara Ombilin dan Geopark Nasional Sawahlunto



SASARAN		ARAH KEBIJAKAN				
		TAHUN 1 (2026)	TAHUN 2 (2027)	TAHUN 3 (2028)	TAHUN 4 (2029)	TAHUN 5 (2030)
		Penyelenggaraan multi event yang berkualitas yang mampu memacu tumbuh kembangnya elektabilitas dunia kepariwisataan Kota Sawahlunto seperti Multi Event Tourism, Event SISSCA melibatkan International Event yang optimal	Penyelenggaraan multi event yang berkualitas yang mampu memacu tumbuh kembangnya elektabilitas dunia kepariwisataan Kota Sawahlunto seperti Multi Event Tourism, Event SISSCA melibatkan International Event yang optimal	Penyelenggaraan multi event yang berkualitas yang mampu memacu tumbuh kembangnya elektabilitas dunia kepariwisataan Kota Sawahlunto seperti Multi Event Tourism, Event SISSCA melibatkan International Event yang optimal	Penyelenggaraan multi event yang berkualitas yang mampu memacu tumbuh kembangnya elektabilitas dunia kepariwisataan Kota Sawahlunto seperti Multi Event Tourism, Event SISSCA melibatkan International Event yang optimal	Penyelenggaraan multi event yang berkualitas yang mampu memacu tumbuh kembangnya elektabilitas dunia kepariwisataan Kota Sawahlunto seperti Multi Event Tourism, Event SISSCA melibatkan International Event yang optimal
		Membangun kemitraan pariwisata antar daerah	Membangun kemitraan pariwisata antar daerah	Membangun kemitraan pariwisata antar daerah	Membangun kemitraan pariwisata antar daerah	Membangun kemitraan pariwisata antar daerah
		Membangun sistem manajemen kepariwisataan yang efektif dan efisien (Top Management Tourism)	Membangun sistem manajemen kepariwisataan yang efektif dan efisien (Top Management Tourism)	Membangun sistem manajemen kepariwisataan yang efektif dan efisien (Top Management Tourism)	Membangun sistem manajemen kepariwisataan yang efektif dan efisien (Top Management Tourism)	Membangun sistem manajemen kepariwisataan yang efektif dan efisien (Top Management Tourism)
		Penguatan branding destinasi dan produk wisata dengan Branding ulang destinasi yang ada	Penguatan branding destinasi dan produk wisata dengan Branding ulang destinasi yang ada	Penguatan branding destinasi dan produk wisata dengan Branding ulang destinasi yang ada	Penguatan branding destinasi dan produk wisata dengan Branding ulang destinasi yang ada	Penguatan branding destinasi dan produk wisata dengan Branding ulang destinasi yang ada
		Peningkatan kualitas layanan pariwisata. (Service Excellent Pariwisata, SOP Pelayanan Kepariwisata)	Peningkatan kualitas layanan pariwisata. (Service Excellent Pariwisata, SOP Pelayanan Kepariwisata)	Peningkatan kualitas layanan pariwisata. (Service Excellent Pariwisata, SOP Pelayanan Kepariwisata)	Peningkatan kualitas layanan pariwisata. (Service Excellent Pariwisata, SOP Pelayanan Kepariwisata)	Peningkatan kualitas layanan pariwisata. (Service Excellent Pariwisata, SOP Pelayanan Kepariwisata)
		Mendukung penerapan pariwisata halal mencakup penyediaan makanan halal, fasilitas ibadah, akomodasi ramah muslim, dan lingkungan yang bebas dari alkohol atau produk non-halal	Mendukung penerapan pariwisata halal mencakup penyediaan makanan halal, fasilitas ibadah, akomodasi ramah muslim, dan lingkungan yang bebas dari alkohol atau produk non-halal	Mendukung penerapan pariwisata halal mencakup penyediaan makanan halal, fasilitas ibadah, akomodasi ramah muslim, dan lingkungan yang bebas dari alkohol atau produk non-halal	Mendukung penerapan pariwisata halal mencakup penyediaan makanan halal, fasilitas ibadah, akomodasi ramah muslim, dan lingkungan yang bebas dari alkohol atau produk non-halal	Mendukung penerapan pariwisata halal mencakup penyediaan makanan halal, fasilitas ibadah, akomodasi ramah muslim, dan lingkungan yang bebas dari alkohol atau produk non-halal
		Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penyelenggaraan Event Kreatif (festival seni, musik, olahraga)	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penyelenggaraan Event Kreatif (festival seni, musik, olahraga)	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penyelenggaraan Event Kreatif (festival seni, musik, olahraga)	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penyelenggaraan Event Kreatif (festival seni, musik, olahraga)	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penyelenggaraan Event Kreatif (festival seni, musik, olahraga)
		Meningkatkan kunjungan wisatawan dengan penyediaan sarana MICE (Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions)	Meningkatkan kunjungan wisatawan dengan penyediaan sarana MICE (Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions)	Meningkatkan kunjungan wisatawan dengan penyediaan sarana MICE (Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions)	Meningkatkan kunjungan wisatawan dengan penyediaan sarana MICE (Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions)	Meningkatkan kunjungan wisatawan dengan penyediaan sarana MICE (Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions)
		Memperluas promosi dan pemasaran, termasuk pemanfaatan kanal digital dan kolaborasi multi-stakeholder	Memperluas promosi dan pemasaran, termasuk pemanfaatan kanal digital dan kolaborasi multi-stakeholder	Memperluas promosi dan pemasaran, termasuk pemanfaatan kanal digital dan kolaborasi multi-stakeholder	Memperluas promosi dan pemasaran, termasuk pemanfaatan kanal digital dan kolaborasi multi-stakeholder	Memperluas promosi dan pemasaran, termasuk pemanfaatan kanal digital dan kolaborasi multi-stakeholder
2	Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung perekonomian daerah	Memanfaatkan TIK untuk mempromosikan potensi pariwisata dan produk lokal ke seluruh dunia	Memanfaatkan TIK untuk mempromosikan potensi pariwisata dan produk lokal ke seluruh dunia	Memanfaatkan TIK untuk mempromosikan potensi pariwisata dan produk lokal ke seluruh dunia	Memanfaatkan TIK untuk mempromosikan potensi pariwisata dan produk lokal ke seluruh dunia	Memanfaatkan TIK untuk mempromosikan potensi pariwisata dan produk lokal ke seluruh dunia
		Mendorong peran swasta dan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata dan penyediaan sarana pendukung pariwisata seperti akomodasi, restoran, transportasi, biro travel, kuliner, pusat oleh-oleh dan cinderamata.	Mendorong peran swasta dan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata dan penyediaan sarana pendukung pariwisata seperti akomodasi, restoran, transportasi, biro travel, kuliner, pusat oleh-oleh dan cinderamata.	Mendorong peran swasta dan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata dan penyediaan sarana pendukung pariwisata seperti akomodasi, restoran, transportasi, biro travel, kuliner, pusat oleh-oleh dan cinderamata.	Mendorong peran swasta dan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata dan penyediaan sarana pendukung pariwisata seperti akomodasi, restoran, transportasi, biro travel, kuliner, pusat oleh-oleh dan cinderamata.	Mendorong peran swasta dan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata dan penyediaan sarana pendukung pariwisata seperti akomodasi, restoran, transportasi, biro travel, kuliner, pusat oleh-oleh dan cinderamata.
		Mendukung penyelenggaraan event kreatif yang diinisiasi oleh kelompok/komunitas, BUMN/BUMD, swasta dan lain sebagainya	Mendukung penyelenggaraan event kreatif yang diinisiasi oleh kelompok/komunitas, BUMN/BUMD, swasta dan lain sebagainya	Mendukung penyelenggaraan event kreatif yang diinisiasi oleh kelompok/komunitas, BUMN/BUMD, swasta dan lain sebagainya	Mendukung penyelenggaraan event kreatif yang diinisiasi oleh kelompok/komunitas, BUMN/BUMD, swasta dan lain sebagainya	Mendukung penyelenggaraan event kreatif yang diinisiasi oleh kelompok/komunitas, BUMN/BUMD, swasta dan lain sebagainya



SASARAN		ARAH KEBIJAKAN				
		TAHUN 1 (2026)	TAHUN 2 (2027)	TAHUN 3 (2028)	TAHUN 4 (2029)	TAHUN 5 (2030)
		Penguatan Ekonomi Kreatif untuk meningkatkan nilai tambah dan keterlibatan masyarakat lokal	Penguatan Ekonomi Kreatif untuk meningkatkan nilai tambah dan keterlibatan masyarakat lokal	Penguatan Ekonomi Kreatif untuk meningkatkan nilai tambah dan keterlibatan masyarakat lokal	Penguatan Ekonomi Kreatif untuk meningkatkan nilai tambah dan keterlibatan masyarakat lokal	Penguatan Ekonomi Kreatif untuk meningkatkan nilai tambah dan keterlibatan masyarakat lokal
		Memberikan perlindungan kekayaan intelektual (KI) dan fasilitasi akses terhadap sumber daya hukum bagi pelaku ekonomi kreatif.	Memberikan perlindungan kekayaan intelektual (KI) dan fasilitasi akses terhadap sumber daya hukum bagi pelaku ekonomi kreatif.	Memberikan perlindungan kekayaan intelektual (KI) dan fasilitasi akses terhadap sumber daya hukum bagi pelaku ekonomi kreatif.	Memberikan perlindungan kekayaan intelektual (KI) dan fasilitasi akses terhadap sumber daya hukum bagi pelaku ekonomi kreatif.	Memberikan perlindungan kekayaan intelektual (KI) dan fasilitasi akses terhadap sumber daya hukum bagi pelaku ekonomi kreatif.
		Mempermudah akses ke pasar melalui promosi produk dan jasa kreatif.	Mempermudah akses ke pasar melalui promosi produk dan jasa kreatif.	Mempermudah akses ke pasar melalui promosi produk dan jasa kreatif.	Mempermudah akses ke pasar melalui promosi produk dan jasa kreatif.	Mempermudah akses ke pasar melalui promosi produk dan jasa kreatif.
		Peningkatan kapasitas SDM pariwisata melalui pelatihan	Peningkatan kapasitas SDM pariwisata melalui pelatihan	Peningkatan kapasitas SDM pariwisata melalui pelatihan	Peningkatan kapasitas SDM pariwisata melalui pelatihan	Peningkatan kapasitas SDM pariwisata melalui pelatihan
Misi 6. Kota Sawahlunto menuju kota sehat dan destinasi pendidikan utama yang berkarakter di Sumatera Barat						
Tujuan 6. Terwujudnya SDM yang berdaya saing						
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Penerapan pembelajaran interaktif dan vokatif serta individual yaitu PISA (Program International Student Assessment) - Program Penilaian Siswa Internasional, Computational Thinking Era.	Penerapan pembelajaran interaktif dan vokatif serta individual yaitu PISA (Program International Student Assessment) - Program Penilaian Siswa Internasional, Computational Thinking Era.	Meningkatkan Penerapan pembelajaran interaktif dan vokatif serta individual yaitu PISA (Program International Student Assessment) - Program Penilaian Siswa Internasional, Computational Thinking Era.	Meningkatkan Penerapan pembelajaran interaktif dan vokatif serta individual yaitu PISA (Program International Student Assessment) - Program Penilaian Siswa Internasional, Computational Thinking Era.	Meningkatkan Penerapan pembelajaran interaktif dan vokatif serta individual yaitu PISA (Program International Student Assessment) - Program Penilaian Siswa Internasional, Computational Thinking Era.
		Mengoptimalkan pemenuhan SPM pendidikan	Mengoptimalkan pemenuhan SPM pendidikan	Mengoptimalkan pemenuhan SPM pendidikan	Mengoptimalkan pemenuhan SPM pendidikan	Mengoptimalkan pemenuhan SPM pendidikan
		Pelaksanaan kompetisi pendidikan yang berkelanjutan yang memberikan kontribusi atas bergairahnya dunia pendidikan dan memberikan multiplier effect, terutama dalam pembentukan kota wisata pendidikan seperti Kompetisi melibatkan Antar Provinsi dan capaian rekor MURI.	Pelaksanaan kompetisi pendidikan yang berkelanjutan yang memberikan kontribusi atas bergairahnya dunia pendidikan dan memberikan multiplier effect, terutama dalam pembentukan kota wisata pendidikan seperti Kompetisi melibatkan Antar Provinsi dan capaian rekor MURI.	Pelaksanaan kompetisi pendidikan yang berkelanjutan yang memberikan kontribusi atas bergairahnya dunia pendidikan dan memberikan multiplier effect, terutama dalam pembentukan kota wisata pendidikan seperti Kompetisi melibatkan Antar Provinsi dan capaian rekor MURI.	Pelaksanaan kompetisi pendidikan yang berkelanjutan yang memberikan kontribusi atas bergairahnya dunia pendidikan dan memberikan multiplier effect, terutama dalam pembentukan kota wisata pendidikan seperti Kompetisi melibatkan Antar Provinsi dan capaian rekor MURI.	Pelaksanaan kompetisi pendidikan yang berkelanjutan yang memberikan kontribusi atas bergairahnya dunia pendidikan dan memberikan multiplier effect, terutama dalam pembentukan kota wisata pendidikan seperti Kompetisi melibatkan Antar Provinsi dan capaian rekor MURI.
		Perluasan akses pendidikan dengan Perda Pendidikan Terbaru	Perluasan akses pendidikan dengan Perda Pendidikan Terbaru	Perluasan akses pendidikan dengan Perda Pendidikan Terbaru	Perluasan akses pendidikan dengan Perda Pendidikan Terbaru	Perluasan akses pendidikan dengan Perda Pendidikan Terbaru
		Bantuan beasiswa bagi siswa yang tidak mampu	Bantuan beasiswa bagi siswa yang tidak mampu	Bantuan beasiswa bagi siswa yang tidak mampu	Bantuan beasiswa bagi siswa yang tidak mampu	Bantuan beasiswa bagi siswa yang tidak mampu
		mengadakan kelengkapan sekolah bagi peserta didik (SD dan SMP) bagi siswa yang tidak mampu	mengadakan kelengkapan sekolah bagi peserta didik (SD dan SMP) bagi siswa yang tidak mampu	mengadakan kelengkapan sekolah bagi peserta didik (SD dan SMP) bagi siswa yang tidak mampu	mengadakan kelengkapan sekolah bagi peserta didik (SD dan SMP) bagi siswa yang tidak mampu	mengadakan kelengkapan sekolah bagi peserta didik (SD dan SMP) bagi siswa yang tidak mampu
		pemberian transportasi dan kelengkapan sekolah untuk sekolah Non Formal	pemberian transportasi dan kelengkapan sekolah untuk sekolah Non Formal	pemberian transportasi dan kelengkapan sekolah untuk sekolah Non Formal	pemberian transportasi dan kelengkapan sekolah untuk sekolah Non Formal	pemberian transportasi dan kelengkapan sekolah untuk sekolah Non Formal
		pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
		Penjaminan keamanan pendidik dan tenaga kependidikan	Penjaminan keamanan pendidik dan tenaga kependidikan	Penjaminan keamanan pendidik dan tenaga kependidikan	Penjaminan keamanan pendidik dan tenaga kependidikan	Penjaminan keamanan pendidik dan tenaga kependidikan
		Peningkatan kompetensi guru sebagai pengajar dengan TOT	Peningkatan kompetensi guru sebagai pengajar dengan TOT	Peningkatan kompetensi guru sebagai pengajar dengan TOT	Peningkatan kompetensi guru sebagai pengajar dengan TOT	Peningkatan kompetensi guru sebagai pengajar dengan TOT
		Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Utulitas Sekolah	Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Utulitas Sekolah	Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Utulitas Sekolah	Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Utulitas Sekolah	Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Utulitas Sekolah
		Pembangunan pendidikan berkarakter dengan satuan ukur yang	Pembangunan pendidikan berkarakter dengan satuan ukur yang terstandarisasi seperti	Pembangunan pendidikan berkarakter dengan satuan ukur yang	Pembangunan pendidikan berkarakter dengan satuan ukur yang	Pembangunan pendidikan berkarakter dengan satuan ukur yang



SASARAN	ARAH KEBIJAKAN				
	TAHUN 1 (2026)	TAHUN 2 (2027)	TAHUN 3 (2028)	TAHUN 4 (2029)	TAHUN 5 (2030)
	terstandarisasi seperti Pendidikan Tauhid , Indikator Kuantitatif Karakter	Pendidikan Tauhid , Indikator Kuantitatif Karakter	terstandarisasi seperti Pendidikan Tauhid , Indikator Kuantitatif Karakter	yang terstandarisasi seperti Pendidikan Tauhid , Indikator Kuantitatif Karakter	terstandarisasi seperti Pendidikan Tauhid , Indikator Kuantitatif Karakter
	Mendukung optimalisasi peran tokoh agama dan adat dalam kegiatan Pendidikan	Mendukung optimalisasi peran tokoh agama dan adat dalam kegiatan Pendidikan	Mendukung optimalisasi peran tokoh agama dan adat dalam kegiatan Pendidikan	Mendukung optimalisasi peran tokoh agama dan adat dalam kegiatan Pendidikan	Mendukung optimalisasi peran tokoh agama dan adat dalam kegiatan Pendidikan
	sinergitas dengan semua stake holders terkait dengan tata kelola pendidikan dengan Muatan Lokal Agama dan Budaya , serapan ajar dari semua profesi pakar, Reward /Beasiswa	sinergitas dengan semua stake holders terkait dengan tata kelola pendidikan dengan Muatan Lokal Agama dan Budaya , serapan ajar dari semua profesi pakar, Reward /Beasiswa	sinergitas dengan semua stake holders terkait dengan tata kelola pendidikan dengan Muatan Lokal Agama dan Budaya , serapan ajar dari semua profesi pakar, Reward /Beasiswa	sinergitas dengan semua stake holders terkait dengan tata kelola pendidikan dengan Muatan Lokal Agama dan Budaya , serapan ajar dari semua profesi pakar, Reward /Beasiswa	sinergitas dengan semua stake holders terkait dengan tata kelola pendidikan dengan Muatan Lokal Agama dan Budaya , serapan ajar dari semua profesi pakar, Reward /Beasiswa
	Menggiatkan Kurikulum Anti Narkoba (IKAN) ke sekolah2	Menggiatkan Kurikulum Anti Narkoba (IKAN) ke sekolah2	Menggiatkan Kurikulum Anti Narkoba (IKAN) ke sekolah2	Menggiatkan Kurikulum Anti Narkoba (IKAN) ke sekolah2	Menggiatkan Kurikulum Anti Narkoba (IKAN) ke sekolah2
	Percepatan peraturan daerah tentang muatan lokal untuk mendukung pendidikan/sekolah berkarakter	Percepatan peraturan daerah tentang muatan lokal untuk mendukung pendidikan/sekolah berkarakter	Percepatan peraturan daerah tentang muatan lokal untuk mendukung pendidikan/sekolah berkarakter	Percepatan peraturan daerah tentang muatan lokal untuk mendukung pendidikan/sekolah berkarakter	Percepatan peraturan daerah tentang muatan lokal untuk mendukung pendidikan/sekolah berkarakter
	Peningkatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam kehidupan masyarakat seperti Muatan Lokal diajar oleh Niniak mamak atau tigo tungku sajarangan, Pembangunan Sekretariat MUI,LKAAM, Kaderisasi).	Peningkatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam kehidupan masyarakat seperti Muatan Lokal diajar oleh Niniak mamak atau tigo tungku sajarangan, Pembangunan Sekretariat MUI,LKAAM, Kaderisasi).	Peningkatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam kehidupan masyarakat seperti Muatan Lokal diajar oleh Niniak mamak atau tigo tungku sajarangan, Pembangunan Sekretariat MUI,LKAAM, Kaderisasi).	Peningkatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam kehidupan masyarakat seperti Muatan Lokal diajar oleh Niniak mamak atau tigo tungku sajarangan, Pembangunan Sekretariat MUI,LKAAM, Kaderisasi).	Peningkatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam kehidupan masyarakat seperti Muatan Lokal diajar oleh Niniak mamak atau tigo tungku sajarangan, Pembangunan Sekretariat MUI,LKAAM, Kaderisasi).
	Fasilitasi status dan perizinan sekolah dan institusi pendidikan	Fasilitasi status dan perizinan sekolah dan institusi pendidikan	Fasilitasi status dan perizinan sekolah dan institusi pendidikan	Fasilitasi status dan perizinan sekolah dan institusi pendidikan	Fasilitasi status dan perizinan sekolah dan institusi pendidikan
	Pengendalian, pembinaan dan pengawasan institusi pendidikan	Pengendalian, pembinaan dan pengawasan institusi pendidikan	Pengendalian, pembinaan dan pengawasan institusi pendidikan	Pengendalian, pembinaan dan pengawasan institusi pendidikan	Pengendalian, pembinaan dan pengawasan institusi pendidikan
	Meningkatkan kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Meningkatkan kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Meningkatkan kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Meningkatkan kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Meningkatkan kualitas dan distribusi institusi pendidikan
	terlestarinya bahasa dan sastra daerah	terlestarinya bahasa dan sastra daerah	terlestarinya bahasa dan sastra daerah	terlestarinya bahasa dan sastra daerah	terlestarinya bahasa dan sastra daerah
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat				
	Terpenuhinya pelayanan dasar publik atas program stunting dan imunisasi serta pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM)	Terpenuhinya pelayanan dasar publik atas program stunting dan imunisasi serta pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM)	Terpenuhinya pelayanan dasar publik atas program stunting dan imunisasi serta pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM)	Terpenuhinya pelayanan dasar publik atas program stunting dan imunisasi serta pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM)	Terpenuhinya pelayanan dasar publik atas program stunting dan imunisasi serta pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM)
	Peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan nasional
	Peningkatan kapasitas sumberdaya tenaga kesehatan	Peningkatan kapasitas sumberdaya tenaga kesehatan	Peningkatan kapasitas sumberdaya tenaga kesehatan	Peningkatan kapasitas sumberdaya tenaga kesehatan	Peningkatan kapasitas sumberdaya tenaga kesehatan
	Peningkatan Kualitas Obat	Peningkatan Kualitas Obat	Peningkatan Kualitas Obat	Peningkatan Kualitas Obat	Peningkatan Kualitas Obat
	Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu dan anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Sawahlunto (PHTC)	Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu dan anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Sawahlunto (PHTC)	Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu dan anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Sawahlunto (PHTC)	Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu dan anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Sawahlunto (PHTC)	Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu dan anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Sawahlunto (PHTC)
	Peningkatan kualitas layanan kesehatan.Tata Kelola Manajemen RSUD, Dokter Spesialis dan standar layanan optimal.	Peningkatan kualitas layanan kesehatan.Tata Kelola Manajemen RSUD, Dokter Spesialis dan standar layanan optimal.	Peningkatan kualitas layanan kesehatan.Tata Kelola Manajemen RSUD, Dokter Spesialis dan standar layanan optimal.	Peningkatan kualitas layanan kesehatan.Tata Kelola Manajemen RSUD, Dokter Spesialis dan standar layanan optimal.	Peningkatan kualitas layanan kesehatan.Tata Kelola Manajemen RSUD, Dokter Spesialis dan standar layanan optimal.
	Menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata untuk seluruh masyarakat.Fasilitas	Menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata untuk seluruh masyarakat.Fasilitas Puskesmas	Menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata untuk seluruh masyarakat.Fasilitas	Menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata untuk seluruh masyarakat.Fasilitas	Menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata untuk seluruh masyarakat.Fasilitas



SASARAN		ARAH KEBIJAKAN				
		TAHUN 1 (2026)	TAHUN 2 (2027)	TAHUN 3 (2028)	TAHUN 4 (2029)	TAHUN 5 (2030)
		Puskesmas		Puskesmas	Puskesmas	Puskesmas
		Peningkatan kualitas layanan kesehatan.Tata Kelola Manajemen RSUD, Dokter Spesialis, Kualitas Obat dan standar layanan optimal.	Peningkatan kualitas layanan kesehatan.Tata Kelola Manajemen RSUD, Dokter Spesialis, Kualitas Obat dan standar layanan optimal.	Peningkatan kualitas layanan kesehatan.Tata Kelola Manajemen RSUD, Dokter Spesialis, Kualitas Obat dan standar layanan optimal.	Peningkatan kualitas layanan kesehatan.Tata Kelola Manajemen RSUD, Dokter Spesialis, Kualitas Obat dan standar layanan optimal.	Peningkatan kualitas layanan kesehatan.Tata Kelola Manajemen RSUD, Dokter Spesialis, Kualitas Obat dan standar layanan optimal.
		Peningkatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian Infeksi	Peningkatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian Infeksi	Peningkatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian Infeksi	Peningkatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian Infeksi	Peningkatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian Infeksi
		Peningkatan peran serta komunitas, Mitra, organinsasi profesi, multi sektor, dunia pendidikan dalam eliminasi TBC	Peningkatan peran serta komunitas, Mitra, organinsasi profesi, multi sektor, dunia pendidikan dalam eliminasi TBC	Peningkatan peran serta komunitas, Mitra, organinsasi profesi, multi sektor, dunia pendidikan dalam eliminasi TBC	Peningkatan peran serta komunitas, Mitra, organinsasi profesi, multi sektor, dunia pendidikan dalam eliminasi TBC	Peningkatan peran serta komunitas, Mitra, organinsasi profesi, multi sektor, dunia pendidikan dalam eliminasi TBC
		Peningkatan Kualitas sarana, prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan	Peningkatan Kualitas sarana, prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan	Peningkatan Kualitas sarana, prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan	Peningkatan Kualitas sarana, prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan	Peningkatan Kualitas sarana, prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan
		Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat
		Pemberdayaan Masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas	Pemberdayaan Masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas	Pemberdayaan Masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas	Pemberdayaan Masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas	Pemberdayaan Masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas
		Peningkatan upaya promotif, preventif dan pembudayaan prilaku hidup sehat	Peningkatan upaya promotif, preventif dan pembudayaan prilaku hidup sehat	Peningkatan upaya promotif, preventif dan pembudayaan prilaku hidup sehat	Peningkatan upaya promotif, preventif dan pembudayaan prilaku hidup sehat	Peningkatan upaya promotif, preventif dan pembudayaan prilaku hidup sehat
		Peningkatan kolaboratif penurunan stunting dengan seluruh pemangku kepentingan	Peningkatan kolaboratif penurunan stunting dengan seluruh pemangku kepentingan	Peningkatan kolaboratif penurunan stunting dengan seluruh pemangku kepentingan	Peningkatan kolaboratif penurunan stunting dengan seluruh pemangku kepentingan	Peningkatan kolaboratif penurunan stunting dengan seluruh pemangku kepentingan
		Peningkatan kolaboratif penurunan stunting dengan seluruh pemangku kepentingan	Peningkatan kolaboratif penurunan stunting dengan seluruh pemangku kepentingan	Peningkatan kolaboratif penurunan stunting dengan seluruh pemangku kepentingan	Peningkatan kolaboratif penurunan stunting dengan seluruh pemangku kepentingan	Peningkatan kolaboratif penurunan stunting dengan seluruh pemangku kepentingan
3	Terciptanya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka menjadikan keluargas sejahtera	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka menjadikan keluargas sejahtera	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka menjadikan keluargas sejahtera	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka menjadikan keluargas sejahtera	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka menjadikan keluargas sejahtera
		Penguatan program KB dan keluarga sejahtera untuk ketahanan keluarga dan perlindungan perempuan dan anak	Penguatan program KB dan keluarga sejahtera untuk ketahanan keluarga dan perlindungan perempuan dan anak	Penguatan program KB dan keluarga sejahtera untuk ketahanan keluarga dan perlindungan perempuan dan anak	Penguatan program KB dan keluarga sejahtera untuk ketahanan keluarga dan perlindungan perempuan dan anak	Penguatan program KB dan keluarga sejahtera untuk ketahanan keluarga dan perlindungan perempuan dan anak
		Peningkatan edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan perkawinan dini	Peningkatan edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan perkawinan dini	Peningkatan edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan perkawinan dini	Peningkatan edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan perkawinan dini	Peningkatan edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan perkawinan dini
		Pemberdayaan perempuan.UMKM Wanita/PKK	Pemberdayaan perempuan.UMKM Wanita/PKK	Pemberdayaan perempuan.UMKM Wanita/PKK	Pemberdayaan perempuan.UMKM Wanita/PKK	Pemberdayaan perempuan.UMKM Wanita/PKK
		Penguatan peran perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga	Penguatan peran perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga	Penguatan peran perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga	Penguatan peran perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga	Penguatan peran perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga
		Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandangdisabilitas, dan orang lanjut usia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandangdisabilitas, dan orang lanjut usia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandangdisabilitas, dan orang lanjut usia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandangdisabilitas, dan orang lanjut usia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandangdisabilitas, dan orang lanjut usia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.
		Optimalisasi SPM bidang sosial	Optimalisasi SPM bidang sosial	Optimalisasi SPM bidang sosial	Optimalisasi SPM bidang sosial	Optimalisasi SPM bidang sosial



SASARAN		ARAH KEBIJAKAN				
		TAHUN 1 (2026)	TAHUN 2 (2027)	TAHUN 3 (2028)	TAHUN 4 (2029)	TAHUN 5 (2030)
		meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan.	meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan.	meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan.	meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan.	meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan.
		Melindungi kelompok rentan dan korban bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial.	Melindungi kelompok rentan dan korban bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial.	Melindungi kelompok rentan dan korban bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial.	Melindungi kelompok rentan dan korban bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial.	Melindungi kelompok rentan dan korban bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial.
		identifikasi dan verifikasi penerima bantuan sosial (data DTKS)	identifikasi dan verifikasi penerima bantuan sosial (data DTKS)	identifikasi dan verifikasi penerima bantuan sosial (data DTKS)	identifikasi dan verifikasi penerima bantuan sosial (data DTKS)	identifikasi dan verifikasi penerima bantuan sosial (data DTKS)
		Meningkatnya ketahanan dan kualitas keluarga dalam mendukung kesejahteraan gender, Pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Meningkatnya ketahanan dan kualitas keluarga dalam mendukung kesejahteraan gender, Pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Meningkatnya ketahanan dan kualitas keluarga dalam mendukung kesejahteraan gender, Pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Meningkatnya ketahanan dan kualitas keluarga dalam mendukung kesejahteraan gender, Pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Meningkatnya ketahanan dan kualitas keluarga dalam mendukung kesejahteraan gender, Pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak
		Penguatan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan daerah	Penguatan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan daerah	Penguatan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan daerah	Penguatan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan daerah	Penguatan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan daerah
		Peningkatan kelas kemandirian ABK	Peningkatan kelas kemandirian ABK	Peningkatan kelas kemandirian ABK	Peningkatan kelas kemandirian ABK	Peningkatan kelas kemandirian ABK
		Pencegahan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap anak, serta pemenuhan hak dan perlindungan tumbuh kembang anak.	Pencegahan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap anak, serta pemenuhan hak dan perlindungan tumbuh kembang anak.	Pencegahan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap anak, serta pemenuhan hak dan perlindungan tumbuh kembang anak.	Pencegahan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap anak, serta pemenuhan hak dan perlindungan tumbuh kembang anak.	Pencegahan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap anak, serta pemenuhan hak dan perlindungan tumbuh kembang anak.
		Peningkatan dan penyebarluasan data terpilah terkait perempuan dan anak untuk mendukung penyusunan dan evaluasi kebijakan.	Peningkatan dan penyebarluasan data terpilah terkait perempuan dan anak untuk mendukung penyusunan dan evaluasi kebijakan.	Peningkatan dan penyebarluasan data terpilah terkait perempuan dan anak untuk mendukung penyusunan dan evaluasi kebijakan.	Peningkatan dan penyebarluasan data terpilah terkait perempuan dan anak untuk mendukung penyusunan dan evaluasi kebijakan.	Peningkatan dan penyebarluasan data terpilah terkait perempuan dan anak untuk mendukung penyusunan dan evaluasi kebijakan.
4	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga	Mendorong program pelatihan dan event pemuda	Mendorong program pelatihan dan event pemuda	Mendorong program pelatihan dan event pemuda	Mendorong program pelatihan dan event pemuda	Mendorong program pelatihan dan event pemuda
		Sinergi antara Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan sekolah, perguruan tinggi, komunitas pemuda, swasta, dan BUMN/BUMD untuk pengembangan sumber daya, fasilitas, pendanaan, dan event pemuda	Sinergi antara Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan sekolah, perguruan tinggi, komunitas pemuda, swasta, dan BUMN/BUMD untuk pengembangan sumber daya, fasilitas, pendanaan, dan event pemuda	Sinergi antara Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan sekolah, perguruan tinggi, komunitas pemuda, swasta, dan BUMN/BUMD untuk pengembangan sumber daya, fasilitas, pendanaan, dan event pemuda	Sinergi antara Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan sekolah, perguruan tinggi, komunitas pemuda, swasta, dan BUMN/BUMD untuk pengembangan sumber daya, fasilitas, pendanaan, dan event pemuda	Sinergi antara Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan sekolah, perguruan tinggi, komunitas pemuda, swasta, dan BUMN/BUMD untuk pengembangan sumber daya, fasilitas, pendanaan, dan event pemuda
		Mendorong pemuda untuk berwirausaha dan menjadi pencipta lapangan kerja	Mendorong pemuda untuk berwirausaha dan menjadi pencipta lapangan kerja	Mendorong pemuda untuk berwirausaha dan menjadi pencipta lapangan kerja	Mendorong pemuda untuk berwirausaha dan menjadi pencipta lapangan kerja	Mendorong pemuda untuk berwirausaha dan menjadi pencipta lapangan kerja
		Membangun kemitraan dan jejaring kerja dengan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk mendukung pembangunan pemuda.	Membangun kemitraan dan jejaring kerja dengan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk mendukung pembangunan pemuda.	Membangun kemitraan dan jejaring kerja dengan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk mendukung pembangunan pemuda.	Membangun kemitraan dan jejaring kerja dengan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk mendukung pembangunan pemuda.	Membangun kemitraan dan jejaring kerja dengan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk mendukung pembangunan pemuda.
		Meningkatkan kualitas pemuda melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan kerja agar mampu bersaing dan berdaya.	Meningkatkan kualitas pemuda melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan kerja agar mampu bersaing dan berdaya.	Meningkatkan kualitas pemuda melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan kerja agar mampu bersaing dan berdaya.	Meningkatkan kualitas pemuda melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan kerja agar mampu bersaing dan berdaya.	Meningkatkan kualitas pemuda melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan kerja agar mampu bersaing dan berdaya.
		Mewujudkan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi luar negeri yang berkualitas dan memberikan kesempatan kepada 8 (delapan) orang siswa sekolah menengah atas yang memenuhi standarisasi tertinggi	Mewujudkan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi luar negeri yang berkualitas dan memberikan kesempatan kepada 8 (delapan) orang siswa sekolah menengah atas yang memenuhi standarisasi tertinggi	Mewujudkan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi luar negeri yang berkualitas dan memberikan kesempatan kepada 8 (delapan) orang siswa sekolah menengah atas yang memenuhi standarisasi tertinggi	Mewujudkan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi luar negeri yang berkualitas dan memberikan kesempatan kepada 8 (delapan) orang siswa sekolah menengah atas yang memenuhi standarisasi tertinggi	Mewujudkan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi luar negeri yang berkualitas dan memberikan kesempatan kepada 8 (delapan) orang siswa sekolah menengah atas yang memenuhi standarisasi tertinggi



SASARAN		ARAH KEBIJAKAN				
		TAHUN 1 (2026)	TAHUN 2 (2027)	TAHUN 3 (2028)	TAHUN 4 (2029)	TAHUN 5 (2030)
		setiap tahunnya dengan dukungan pembiayaan APBD dan pembiayaan lainnya yang sah seperti Kuliah seperti di Al Azhar dll dan mengabdikan di kampung halaman.	dan pembiayaan lainnya yang sah seperti Kuliah seperti di Al Azhar dll dan mengabdikan di kampung halaman.	setiap tahunnya dengan dukungan pembiayaan APBD dan pembiayaan lainnya yang sah seperti Kuliah seperti di Al Azhar dll dan mengabdikan di kampung halaman.	standarisasi tertinggi setiap tahunnya dengan dukungan pembiayaan APBD dan pembiayaan lainnya yang sah seperti Kuliah seperti di Al Azhar dll dan mengabdikan di kampung halaman.	setiap tahunnya dengan dukungan pembiayaan APBD dan pembiayaan lainnya yang sah seperti Kuliah seperti di Al Azhar dll dan mengabdikan di kampung halaman.
		Penyediaan sarana dan prasarana olahraga indoor beberapa cabor unggulan dan pemfungsian kembali sarana dan prasarana olahraga masyarakat	Penyediaan sarana dan prasarana olahraga indoor beberapa cabor unggulan dan pemfungsian kembali sarana dan prasarana olahraga masyarakat	Penyediaan sarana dan prasarana olahraga indoor beberapa cabor unggulan dan pemfungsian kembali sarana dan prasarana olahraga masyarakat	Penyediaan sarana dan prasarana olahraga indoor beberapa cabor unggulan dan pemfungsian kembali sarana dan prasarana olahraga masyarakat	Penyediaan sarana dan prasarana olahraga indoor beberapa cabor unggulan dan pemfungsian kembali sarana dan prasarana olahraga masyarakat
		Mendukung pelaksanaan turnamen untuk pengembangan prestasi atlet sampai ke tingkat nasional/internasional	Mendukung pelaksanaan turnamen dan event olahraga berkelanjutan untuk pengembangan prestasi atlet sampai ke tingkat nasional/internasional	Mendukung pelaksanaan turnamen dan event olahraga berkelanjutan untuk pengembangan prestasi atlet sampai ke tingkat nasional/internasional	Mendukung pelaksanaan turnamen dan event olahraga berkelanjutan untuk pengembangan prestasi atlet sampai ke tingkat nasional/internasional	Mendukung pelaksanaan turnamen dan event olahraga berkelanjutan untuk pengembangan prestasi atlet sampai ke tingkat nasional/internasional
		Peningkatan, rehabilitasi, dan pembangunan sarana/prasarana olahraga di pusat kota, kecamatan, dan desa	Peningkatan, rehabilitasi, dan pembangunan sarana/prasarana olahraga di pusat kota, kecamatan, dan desa	Peningkatan, rehabilitasi, dan pembangunan sarana/prasarana olahraga di pusat kota, kecamatan, dan desa	Peningkatan, rehabilitasi, dan pembangunan sarana/prasarana olahraga di pusat kota, kecamatan, dan desa	Peningkatan, rehabilitasi, dan pembangunan sarana/prasarana olahraga di pusat kota, kecamatan, dan desa
		Penyediaan aksesibilitas bagi masyarakat dalam mendukung gaya hidup sehat, dan prestasi olahraga amatir serta profesional	Penyediaan aksesibilitas bagi masyarakat dalam mendukung gaya hidup sehat, dan prestasi olahraga amatir serta profesional	Penyediaan aksesibilitas bagi masyarakat dalam mendukung gaya hidup sehat, dan prestasi olahraga amatir serta profesional	Penyediaan aksesibilitas bagi masyarakat dalam mendukung gaya hidup sehat, dan prestasi olahraga amatir serta profesional	Penyediaan aksesibilitas bagi masyarakat dalam mendukung gaya hidup sehat, dan prestasi olahraga amatir serta profesional
		Penguatan pembinaan olahraga melalui kompetisi tingkat daerah (POPDA), kejuaraan lokal, dan program peningkatan prestasi atlet muda	Penguatan pembinaan olahraga melalui kompetisi tingkat daerah (POPDA), kejuaraan lokal, dan program peningkatan prestasi atlet muda	Penguatan pembinaan olahraga melalui kompetisi tingkat daerah (POPDA), kejuaraan lokal, dan program peningkatan prestasi atlet muda	Penguatan pembinaan olahraga melalui kompetisi tingkat daerah (POPDA), kejuaraan lokal, dan program peningkatan prestasi atlet muda	Penguatan pembinaan olahraga melalui kompetisi tingkat daerah (POPDA), kejuaraan lokal, dan program peningkatan prestasi atlet muda
		Mendorong program pelatihan atlet berprestasi, kompetisi olahraga lokal,	Mendorong program pelatihan atlet berprestasi, kompetisi olahraga lokal,	Mendorong program pelatihan atlet berprestasi, kompetisi olahraga lokal,	Mendorong program pelatihan atlet berprestasi, kompetisi olahraga lokal,	Mendorong program pelatihan atlet berprestasi, kompetisi olahraga lokal,
		Penyelenggaraan event olahraga daerah (sepak bola, voli, futsal, atletik) sebagai ajang rekreasi dan promosi daerah	Penyelenggaraan event olahraga daerah (sepak bola, voli, futsal, atletik) sebagai ajang rekreasi dan promosi daerah	Penyelenggaraan event olahraga daerah (sepak bola, voli, futsal, atletik) sebagai ajang rekreasi dan promosi daerah	Penyelenggaraan event olahraga daerah (sepak bola, voli, futsal, atletik) sebagai ajang rekreasi dan promosi daerah	Penyelenggaraan event olahraga daerah (sepak bola, voli, futsal, atletik) sebagai ajang rekreasi dan promosi daerah
		Sinergi antara Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan induk olahraga (KONI), sekolah, perguruan tinggi, swasta, dan BUMN/BUMD untuk pengembangan sumber daya, fasilitas, pendanaan, dan event olahraga	Sinergi antara Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan induk olahraga (KONI), sekolah, perguruan tinggi, swasta, dan BUMN/BUMD untuk pengembangan sumber daya, fasilitas, pendanaan, dan event olahraga	Sinergi antara Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan induk olahraga (KONI), sekolah, perguruan tinggi, swasta, dan BUMN/BUMD untuk pengembangan sumber daya, fasilitas, pendanaan, dan event olahraga	Sinergi antara Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan induk olahraga (KONI), sekolah, perguruan tinggi, swasta, dan BUMN/BUMD untuk pengembangan sumber daya, fasilitas, pendanaan, dan event olahraga	Sinergi antara Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan induk olahraga (KONI), sekolah, perguruan tinggi, swasta, dan BUMN/BUMD untuk pengembangan sumber daya, fasilitas, pendanaan, dan event olahraga
Misi 7. Pelaksanaan tata kelola Pemerintah Daerah yang berdaya saing tinggi atas pengukuran indeks kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian dan Lembaga lainnya						
Tujuan 7. Terwujudnya Kinerja Pemerintah Daerah yang berdaya saing						
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Akuntabilitas dan Pengawasan yang berkualitas.	Meningkatkan kualitas fasilitasi produk hukum yang dihasilkan	Meningkatkan kualitas fasilitasi produk hukum yang dihasilkan	Meningkatkan kualitas fasilitasi produk hukum yang dihasilkan	Meningkatkan kualitas fasilitasi produk hukum yang dihasilkan	Meningkatkan kualitas fasilitasi produk hukum yang dihasilkan
		Meningkatkan kualitas kematangan organisasi pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas kematangan organisasi pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas kematangan organisasi pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas kematangan organisasi pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas kematangan organisasi pemerintah daerah
		Support System Penilaian Kinerja Walikota,	Support System Penilaian Kinerja Walikota,	Support System Penilaian Kinerja Walikota,	Support System Penilaian Kinerja Walikota,	Support System Penilaian Kinerja Walikota,
		Komitmen penuh atas pembangunan di bidang keagamaan Fasilitas honor	Komitmen penuh atas pembangunan di bidang keagamaan Fasilitas honor Guru Tahfidz dan	Komitmen penuh atas pembangunan di bidang keagamaan Fasilitas honor	Komitmen penuh atas pembangunan di bidang keagamaan Fasilitas honor	Komitmen penuh atas pembangunan di bidang keagamaan Fasilitas honor



SASARAN	ARAH KEBIJAKAN				
	TAHUN 1 (2026)	TAHUN 2 (2027)	TAHUN 3 (2028)	TAHUN 4 (2029)	TAHUN 5 (2030)
	Guru Tahfidz dan Ketersediaan lahan TPU	Ketersediaan lahan TPU	Guru Tahfidz dan Ketersediaan lahan TPU	Guru Tahfidz dan Ketersediaan lahan TPU	Guru Tahfidz dan Ketersediaan lahan TPU
	Mengoptimalkan fungsi rumah Tahfidz untuk meningkatkan pemahaman nilai-nilai agama	Mengoptimalkan fungsi rumah Tahfidz untuk meningkatkan pemahaman nilai-nilai agama	Mengoptimalkan fungsi rumah Tahfidz untuk meningkatkan pemahaman nilai-nilai agama	Mengoptimalkan fungsi rumah Tahfidz untuk meningkatkan pemahaman nilai-nilai agama	Mengoptimalkan fungsi rumah Tahfidz untuk meningkatkan pemahaman nilai-nilai agama
	Mengoptimalkan fungsi mesjid/musala untuk sebagai tempat ibadah, sosial dan pemberdayaan umat	Mengoptimalkan fungsi mesjid/musala untuk sebagai tempat ibadah, sosial dan pemberdayaan umat	Mengoptimalkan fungsi mesjid/musala untuk sebagai tempat ibadah, sosial dan pemberdayaan umat	Mengoptimalkan fungsi mesjid/musala untuk sebagai tempat ibadah, sosial dan pemberdayaan umat	Mengoptimalkan fungsi mesjid/musala untuk sebagai tempat ibadah, sosial dan pemberdayaan umat
	melakukan pembinaan dan evaluasi rumah tahfiz dan TPA serta stadarisasinya	melakukan pembinaan dan evaluasi rumah tahfiz dan TPA serta stadarisasinya	melakukan pembinaan dan evaluasi rumah tahfiz dan TPA serta stadarisasinya	melakukan pembinaan dan evaluasi rumah tahfiz dan TPA serta stadarisasinya	melakukan pembinaan dan evaluasi rumah tahfiz dan TPA serta stadarisasinya
	Meningkatkan daya saing daerah melalui koordinasi forum CSR	Meningkatkan daya saing daerah melalui koordinasi forum CSR	Meningkatkan daya saing daerah melalui koordinasi forum CSR	Meningkatkan daya saing daerah melalui koordinasi forum CSR	Meningkatkan daya saing daerah melalui koordinasi forum CSR
	Meningkatkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM dan industri lokal	Meningkatkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM dan industri lokal	Meningkatkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM dan industri lokal	Meningkatkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM dan industri lokal	Meningkatkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM dan industri lokal
	Penyaluran dana CSR yang berdasarkan sektor prioritas mendukung tujuan pembangunan daerah	Penyaluran dana CSR yang berdasarkan sektor prioritas mendukung tujuan pembangunan daerah	Penyaluran dana CSR yang berdasarkan sektor prioritas mendukung tujuan pembangunan daerah	Penyaluran dana CSR yang berdasarkan sektor prioritas mendukung tujuan pembangunan daerah	Penyaluran dana CSR yang berdasarkan sektor prioritas mendukung tujuan pembangunan daerah
	percepatan pembentukan forum CSR dalam meningkatkan partisipasi BUMN, BUMD, perusahaan Swasta dalam pembangunan Kota	percepatan pembentukan forum CSR dalam meningkatkan partisipasi BUMN, BUMD, perusahaan Swasta dalam pembangunan Kota	percepatan pembentukan forum CSR dalam meningkatkan partisipasi BUMN, BUMD, perusahaan Swasta dalam pembangunan Kota	percepatan pembentukan forum CSR dalam meningkatkan partisipasi BUMN, BUMD, perusahaan Swasta dalam pembangunan Kota	percepatan pembentukan forum CSR dalam meningkatkan partisipasi BUMN, BUMD, perusahaan Swasta dalam pembangunan Kota
	Pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.	Pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.	Pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.	Pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.	Pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.
	Meningkatkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM dan industri lokal	Meningkatkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM dan industri lokal	Meningkatkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM dan industri lokal	Meningkatkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM dan industri lokal	Meningkatkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM dan industri lokal
	Penguatan sinergitas antara Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi ditetapkan. MOU dengan Pemprov dan Proposal Pusat	Penguatan sinergitas antara Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi ditetapkan. MOU dengan Pemprov dan Proposal Pusat	Penguatan sinergitas antara Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi ditetapkan. MOU dengan Pemprov dan Proposal Pusat	Penguatan sinergitas antara Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi ditetapkan. MOU dengan Pemprov dan Proposal Pusat	Penguatan sinergitas antara Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi ditetapkan. MOU dengan Pemprov dan Proposal Pusat
	Meningkatkan Peran Perantau (diaspora sawahlunto) dalam pembangunan kota	Meningkatkan Peran Perantau (diaspora sawahlunto) dalam pembangunan kota	Meningkatkan Peran Perantau (diaspora sawahlunto) dalam pembangunan kota	Meningkatkan Peran Perantau (diaspora sawahlunto) dalam pembangunan kota	Meningkatkan Peran Perantau (diaspora sawahlunto) dalam pembangunan kota
	Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan menjunjung tinggi kebudayaan dan kearifan lokal	Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan menjunjung tinggi kebudayaan dan kearifan lokal	Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan menjunjung tinggi kebudayaan dan kearifan lokal	Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan menjunjung tinggi kebudayaan dan kearifan lokal	Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan menjunjung tinggi kebudayaan dan kearifan lokal
	Musrenbang Digital dilengkapi Core Values ERA BARU	Musrenbang Digital dilengkapi Core Values ERA BARU	Musrenbang Digital dilengkapi Core Values ERA BARU	Musrenbang Digital dilengkapi Core Values ERA BARU	Musrenbang Digital dilengkapi Core Values ERA BARU
	Perencanaan digitalisasi partisipatif personal yang terintegrasi.	Perencanaan digitalisasi partisipatif personal yang terintegrasi.	Perencanaan digitalisasi partisipatif personal yang terintegrasi.	Perencanaan digitalisasi partisipatif personal yang terintegrasi.	Perencanaan digitalisasi partisipatif personal yang terintegrasi.
	peningkatan kapasitas SDM Perencana	peningkatan kapasitas SDM Perencana	peningkatan kapasitas SDM Perencana	peningkatan kapasitas SDM Perencana	peningkatan kapasitas SDM Perencana



SASARAN	ARAH KEBIJAKAN				
	TAHUN 1 (2026)	TAHUN 2 (2027)	TAHUN 3 (2028)	TAHUN 4 (2029)	TAHUN 5 (2030)
	meningkatkan konsistensi dan keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.	meningkatkan konsistensi dan keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.	meningkatkan konsistensi dan keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.	meningkatkan konsistensi dan keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.	meningkatkan konsistensi dan keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
	menjaga sinkronisasi perencanaan pembangunan pusat dan daerah	menjaga sinkronisasi perencanaan pembangunan pusat dan daerah	menjaga sinkronisasi perencanaan pembangunan pusat dan daerah	menjaga sinkronisasi perencanaan pembangunan pusat dan daerah	menjaga sinkronisasi perencanaan pembangunan pusat dan daerah
	penguatan koordinasi dan partisipasi dalam Musrenbang untuk memastikan program pembangunan daerah efektif, efisien, dan akuntabel demi mencapai tujuan pembangunan nasional	penguatan koordinasi dan partisipasi dalam Musrenbang untuk memastikan program pembangunan daerah efektif, efisien, dan akuntabel demi mencapai tujuan pembangunan nasional	penguatan koordinasi dan partisipasi dalam Musrenbang untuk memastikan program pembangunan daerah efektif, efisien, dan akuntabel demi mencapai tujuan pembangunan nasional	penguatan koordinasi dan partisipasi dalam Musrenbang untuk memastikan program pembangunan daerah efektif, efisien, dan akuntabel demi mencapai tujuan pembangunan nasional	penguatan koordinasi dan partisipasi dalam Musrenbang untuk memastikan program pembangunan daerah efektif, efisien, dan akuntabel demi mencapai tujuan pembangunan nasional
	Perencanaan pembangunan wilayah yang adil dan merata demi terwujudnya kesinambungan pembangunan daerah Master Plan, air dan jalan dan penerangan	Perencanaan pembangunan wilayah yang adil dan merata demi terwujudnya kesinambungan pembangunan daerah Master Plan, air dan jalan dan penerangan	Perencanaan pembangunan wilayah yang adil dan merata demi terwujudnya kesinambungan pembangunan daerah Master Plan, air dan jalan dan penerangan	Perencanaan pembangunan wilayah yang adil dan merata demi terwujudnya kesinambungan pembangunan daerah Master Plan, air dan jalan dan penerangan	Perencanaan pembangunan wilayah yang adil dan merata demi terwujudnya kesinambungan pembangunan daerah Master Plan, air dan jalan dan penerangan
	Peningkatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan Riset, Inovasi dan teknologi	Peningkatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan Riset, Inovasi dan teknologi	Peningkatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan Riset, Inovasi dan teknologi	Peningkatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan Riset, Inovasi dan teknologi	Peningkatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan Riset, Inovasi dan teknologi
	Meningkatkan kuantitas dan kualitas inovasi perangkat daerah untuk Indeks Inovasi Daerah	Meningkatkan kuantitas dan kualitas inovasi perangkat daerah untuk Indeks Inovasi Daerah	Meningkatkan kuantitas dan kualitas inovasi perangkat daerah untuk Indeks Inovasi Daerah	Meningkatkan kuantitas dan kualitas inovasi perangkat daerah untuk Indeks Inovasi Daerah	Meningkatkan kuantitas dan kualitas inovasi perangkat daerah untuk Indeks Inovasi Daerah
	Dashboard Monitoring Kinerja Pemerintahan dan Support System Penilaian Kinerja Walikota, Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBBM).	Dashboard Monitoring Kinerja Pemerintahan dan Support System Penilaian Kinerja Walikota, Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBBM).	Dashboard Monitoring Kinerja Pemerintahan dan Support System Penilaian Kinerja Walikota, Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBBM).	Dashboard Monitoring Kinerja Pemerintahan dan Support System Penilaian Kinerja Walikota, Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBBM).	Dashboard Monitoring Kinerja Pemerintahan dan Support System Penilaian Kinerja Walikota, Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBBM).
	memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan efektif, efisien, dan berpedoman pada pertimbangan aturan yang berlaku	memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan efektif, efisien, dan berpedoman pada pertimbangan aturan yang berlaku	memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan efektif, efisien, dan berpedoman pada pertimbangan aturan yang berlaku	memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan efektif, efisien, dan berpedoman pada pertimbangan aturan yang berlaku	memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan efektif, efisien, dan berpedoman pada pertimbangan aturan yang berlaku
	peningkatan kualitas pengawasan internal, fokus pada area berisiko tinggi seperti kinerja dan keuangan, pencegahan korupsi, dan penerapan sistem deteksi, cegah dan respon untuk mendukung reformasi birokrasi dan good governance.	peningkatan kualitas pengawasan internal, fokus pada area berisiko tinggi seperti kinerja dan keuangan, pencegahan korupsi, dan penerapan sistem deteksi, cegah dan respon untuk mendukung reformasi birokrasi dan good governance.	peningkatan kualitas pengawasan internal, fokus pada area berisiko tinggi seperti kinerja dan keuangan, pencegahan korupsi, dan penerapan sistem deteksi, cegah dan respon untuk mendukung reformasi birokrasi dan good governance.	peningkatan kualitas pengawasan internal, fokus pada area berisiko tinggi seperti kinerja dan keuangan, pencegahan korupsi, dan penerapan sistem deteksi, cegah dan respon untuk mendukung reformasi birokrasi dan good governance.	peningkatan kualitas pengawasan internal, fokus pada area berisiko tinggi seperti kinerja dan keuangan, pencegahan korupsi, dan penerapan sistem deteksi, cegah dan respon untuk mendukung reformasi birokrasi dan good governance.
	Memberikan fasilitasi dan pembinaan terhadap Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terintegrasi (SPIP) dan Manajemen Resiko di lingkungan pemerintah daerah.	Memberikan fasilitasi dan pembinaan terhadap Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terintegrasi (SPIP) dan Manajemen Resiko di lingkungan pemerintah daerah.	Memberikan fasilitasi dan pembinaan terhadap Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terintegrasi (SPIP) dan Manajemen Resiko di lingkungan pemerintah daerah.	Memberikan fasilitasi dan pembinaan terhadap Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terintegrasi (SPIP) dan Manajemen Resiko di lingkungan pemerintah daerah.	Memberikan fasilitasi dan pembinaan terhadap Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terintegrasi (SPIP) dan Manajemen Resiko di lingkungan pemerintah daerah.
	Melakukan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan terhadap kinerja, keuangan dan Pengawasan Dengan Tu7juan Tertentu (PDTT) perangkat	Melakukan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan terhadap kinerja, keuangan dan Pengawasan Dengan Tu7juan Tertentu (PDTT) perangkat daerah.	Melakukan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan terhadap kinerja, keuangan dan Pengawasan Dengan Tu7juan Tertentu (PDTT) perangkat	Melakukan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan terhadap kinerja, keuangan dan Pengawasan Dengan Tu7juan Tertentu (PDTT) perangkat	Melakukan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan terhadap kinerja, keuangan dan Pengawasan Dengan Tu7juan Tertentu (PDTT) perangkat



SASARAN		ARAH KEBIJAKAN				
		TAHUN 1 (2026)	TAHUN 2 (2027)	TAHUN 3 (2028)	TAHUN 4 (2029)	TAHUN 5 (2030)
		daerah.		daerah.	daerah.	daerah.
2	Terwujudnya profesionalitas ASN	Penguatan kualitas sumber daya manusia aparatur pelaksana. Core Values Sawahlunto Maju Penyusunan standar kompetensi manajerial dan teknis yang jelas untuk menjadi acuan bagi instansi dalam mengembangkan ASN. Penguatan Penerapan sistem merit Mendorong ASN memiliki orientasi pada pelayanan publik, bekerja dengan disiplin, tanggung jawab, serta kemampuan kolaborasi penguatan sistem manajemen ASN yang terpadu (melalui pendidikan, pelatihan, dan Standar Kompetensi) Menjaga ASN untuk tidak berpihak pada kepentingan politik atau pribadi dalam menjalankan tugas dan pelayanan publik. Memastikan ASN bekerja dengan jujur, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).	Penguatan kualitas sumber daya manusia aparatur pelaksana. Core Values Sawahlunto Maju Penyusunan standar kompetensi manajerial dan teknis yang jelas untuk menjadi acuan bagi instansi dalam mengembangkan ASN. Penguatan Penerapan sistem merit Mendorong ASN memiliki orientasi pada pelayanan publik, bekerja dengan disiplin, tanggung jawab, serta kemampuan kolaborasi penguatan sistem manajemen ASN yang terpadu (melalui pendidikan, pelatihan, dan Standar Kompetensi) Menjaga ASN untuk tidak berpihak pada kepentingan politik atau pribadi dalam menjalankan tugas dan pelayanan publik. Penguatan ASN bekerja dengan jujur, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).	Penguatan kualitas sumber daya manusia aparatur pelaksana. Core Values Sawahlunto Maju meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial ASN, sehingga sesuai dengan kebutuhan jabatan dan dinamika masyarakat. Penerapan sistem merit Meningkatkan ASN memiliki orientasi pada pelayanan publik, bekerja dengan disiplin, tanggung jawab, serta kemampuan kolaborasi pengembangan sistem manajemen ASN yang terpadu (melalui pendidikan, pelatihan, dan Standar Kompetensi) Menjaga ASN untuk tidak berpihak pada kepentingan politik atau pribadi dalam menjalankan tugas dan pelayanan publik. Meoptimalkan ASN bekerja dengan jujur, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).	Penguatan kualitas sumber daya manusia aparatur pelaksana. Core Values Sawahlunto Maju meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial ASN, sehingga sesuai dengan kebutuhan jabatan dan dinamika masyarakat. optimalisasi sistem merit Meningkatkan ASN memiliki orientasi pada pelayanan publik, bekerja dengan disiplin, tanggung jawab, serta kemampuan kolaborasi pengembangan sistem manajemen ASN yang terpadu (melalui pendidikan, pelatihan, dan Standar Kompetensi) Menjaga ASN untuk tidak berpihak pada kepentingan politik atau pribadi dalam menjalankan tugas dan pelayanan publik. Meoptimalkan ASN bekerja dengan jujur, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).	Penguatan kualitas sumber daya manusia aparatur pelaksana. Core Values Sawahlunto Maju meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial ASN, sehingga sesuai dengan kebutuhan jabatan dan dinamika masyarakat. optimalisasi sistem merit Meningkatkan ASN memiliki orientasi pada pelayanan publik, bekerja dengan disiplin, tanggung jawab, serta kemampuan kolaborasi pengembangan sistem manajemen ASN yang terpadu (melalui pendidikan, pelatihan, dan Standar Kompetensi) Menjaga ASN untuk tidak berpihak pada kepentingan politik atau pribadi dalam menjalankan tugas dan pelayanan publik. Meoptimalkan ASN bekerja dengan jujur, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
3	Meningkatnya tata kelola arsip dan literasi masyarakat	Meningkatkan Pengelolaan Arsip untuk perangkat daerah dan desa/kelurahan. Optimalisasi input data arsip dan informasi arsip digital (JIKN) Peningkatan akses dan pemanfaatan arsip secara digital. Mengoptimalkan pembinaan perpustakaan yang ada didesa/kel, masjid dan TBM peningkatan minat baca dan kecakapan literasi masyarakat melalui program dan kegiatan yang inovatif dan inklusif. pengarusutamaan dan pelestarian naskah Nusantara dalam kebijakan untuk memelihara dan mengembangkan koleksi naskah kuno Pengembangan koleksi perpustakaan berbasis kearifan local	Peningkatan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan arsip pada perangkat daerah dan desa/kelurahan. Peningkatan akses dan pemanfaatan arsip secara digital. Peningkatan akses dan pemanfaatan arsip secara digital. Pengintegrasian Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan aplikasi Srikandi untuk mendukung pemerintahan digital. peningkatan minat baca dan kecakapan literasi masyarakat melalui program dan kegiatan yang inovatif dan inklusif. pengarusutamaan dan pelestarian naskah Nusantara dalam kebijakan untuk memelihara dan mengembangkan koleksi naskah kuno Pengembangan koleksi perpustakaan berbasis kearifan local	Optimalisasi penerapan aplikasi Srikandi pada seluruh perangkat daerah dan desa/kelurahan. Pemanfaatan arsip digital untuk layanan informasi arsip kepada masyarakat Peningkatan akses dan pemanfaatan arsip secara digital. Pengintegrasian Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan aplikasi Srikandi untuk mendukung pemerintahan digital. peningkatan minat baca dan kecakapan literasi masyarakat melalui program dan kegiatan yang inovatif dan inklusif. pengarusutamaan dan pelestarian naskah Nusantara dalam kebijakan untuk memelihara dan mengembangkan koleksi naskah kuno Pengembangan koleksi perpustakaan berbasis kearifan local	Pemantapan pengelolaan arsip digital melalui penerapan penuh aplikasi Srikandi yang terintegrasi dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada perangkat daerah dan desa/kelurahan. Evaluasi dan pemantauan implementasi arsip digital. Peningkatan akses dan pemanfaatan arsip secara digital. Pengintegrasian Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan aplikasi Srikandi untuk mendukung pemerintahan digital. peningkatan minat baca dan kecakapan literasi masyarakat melalui program dan kegiatan yang inovatif dan inklusif. pengarusutamaan dan pelestarian naskah Nusantara dalam kebijakan untuk memelihara dan mengembangkan koleksi naskah kuno Pengembangan koleksi perpustakaan berbasis kearifan local	Terwujudnya tata kelola arsip yang modern, digital, dan berkelanjutan sebagai basis smart governance daerah. Terwujudnya layanan kearsipan digital berbasis JIKN yang transparan, inklusif, dan mendukung smart governance daerah Peningkatan akses dan pemanfaatan arsip secara digital. Pengintegrasian Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan aplikasi Srikandi untuk mendukung pemerintahan digital. peningkatan minat baca dan kecakapan literasi masyarakat melalui program dan kegiatan yang inovatif dan inklusif. pengarusutamaan dan pelestarian naskah Nusantara dalam kebijakan untuk memelihara dan mengembangkan koleksi naskah kuno Pengembangan koleksi perpustakaan berbasis kearifan local



SASARAN	ARAH KEBIJAKAN				
	TAHUN 1 (2026)	TAHUN 2 (2027)	TAHUN 3 (2028)	TAHUN 4 (2029)	TAHUN 5 (2030)
4 Meningkatkan kualitas Pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah	Menyusun dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan prinsip anggaran berimbang	Menyusun dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan prinsip anggaran berimbang	Menyusun dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan prinsip anggaran berimbang	Menyusun dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan prinsip anggaran berimbang	Menyusun dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan prinsip anggaran berimbang
	Pemenuhan Kebutuhan Belanja untuk Urusan Wajib Secara Prioritas	Pemenuhan Kebutuhan Belanja untuk Urusan Wajib Secara Prioritas	Pemenuhan Kebutuhan Belanja untuk Urusan Wajib Secara Prioritas	Pemenuhan Kebutuhan Belanja untuk Urusan Wajib Secara Prioritas	Pemenuhan Kebutuhan Belanja untuk Urusan Wajib Secara Prioritas
	Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran	Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran	Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran	Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran	Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran
	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan Blended Finance	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan Blended Finance	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan Blended Finance	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan Blended Finance	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan Blended Finance
	Peningkatan transparansi dan partisipasi publik melalui publikasi laporan keuangan yang mudah diakses masyarakat.	Peningkatan transparansi dan partisipasi publik melalui publikasi laporan keuangan yang mudah diakses masyarakat.	Peningkatan transparansi dan partisipasi publik melalui publikasi laporan keuangan yang mudah diakses masyarakat.	Peningkatan transparansi dan partisipasi publik melalui publikasi laporan keuangan yang mudah diakses masyarakat.	Peningkatan transparansi dan partisipasi publik melalui publikasi laporan keuangan yang mudah diakses masyarakat.
	Implementasi penuh akuntansi berbasis akrual dan standar akuntansi pemerintah terbaru	Implementasi penuh akuntansi berbasis akrual dan standar akuntansi pemerintah terbaru	Implementasi penuh akuntansi berbasis akrual dan standar akuntansi pemerintah terbaru	Implementasi penuh akuntansi berbasis akrual dan standar akuntansi pemerintah terbaru	Implementasi penuh akuntansi berbasis akrual dan standar akuntansi pemerintah terbaru
	Digitalisasi penuh siklus pengelolaan keuangan daerah (perencanaan, penganggaran, kas, akuntansi, dan pelaporan).	Digitalisasi penuh siklus pengelolaan keuangan daerah (perencanaan, penganggaran, kas, akuntansi, dan pelaporan).	Digitalisasi penuh siklus pengelolaan keuangan daerah (perencanaan, penganggaran, kas, akuntansi, dan pelaporan).	Digitalisasi penuh siklus pengelolaan keuangan daerah (perencanaan, penganggaran, kas, akuntansi, dan pelaporan).	Digitalisasi penuh siklus pengelolaan keuangan daerah (perencanaan, penganggaran, kas, akuntansi, dan pelaporan).
	Optimalisasi perencanaan anggaran berbasis kinerja dan penganggaran terpadu (integrated budgeting).	Optimalisasi perencanaan anggaran berbasis kinerja dan penganggaran terpadu (integrated budgeting).	Optimalisasi perencanaan anggaran berbasis kinerja dan penganggaran terpadu (integrated budgeting).	Optimalisasi perencanaan anggaran berbasis kinerja dan penganggaran terpadu (integrated budgeting).	Optimalisasi perencanaan anggaran berbasis kinerja dan penganggaran terpadu (integrated budgeting).
	Optimalisasi Pengelolaan Aset dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Optimalisasi Pengelolaan Aset dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Optimalisasi Pengelolaan Aset dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Optimalisasi Pengelolaan Aset dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Optimalisasi Pengelolaan Aset dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
	Pendataan ulang aset-aset daerah yang menjadi sumber pendapatan dan yang tidak layak pakai	Pendataan ulang aset-aset daerah yang menjadi sumber pendapatan dan yang tidak layak pakai	Pendataan ulang aset-aset daerah yang menjadi sumber pendapatan dan yang tidak layak pakai	Pendataan ulang aset-aset daerah yang menjadi sumber pendapatan dan yang tidak layak pakai	Pendataan ulang aset-aset daerah yang menjadi sumber pendapatan dan yang tidak layak pakai
	Penertiban penggunaan aset untuk memastikan status hukum dan kepemilikan jelas	Penertiban penggunaan aset untuk memastikan status hukum dan kepemilikan jelas	Penertiban penggunaan aset untuk memastikan status hukum dan kepemilikan jelas	Penertiban penggunaan aset untuk memastikan status hukum dan kepemilikan jelas	Penertiban penggunaan aset untuk memastikan status hukum dan kepemilikan jelas
	Optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk peningkatan PAD	Optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk peningkatan PAD	Optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk peningkatan PAD	Optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk peningkatan PAD	Optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk peningkatan PAD
	Ekstensifikasi dan Intensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Ekstensifikasi dan Intensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Ekstensifikasi dan Intensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Ekstensifikasi dan Intensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Ekstensifikasi dan Intensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
	Pemutakhiran data wajib pajak dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung sistem pengelolaan PAD yang lebih akurat dan efisien	Pemutakhiran data wajib pajak dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung sistem pengelolaan PAD yang lebih akurat dan efisien	Pemutakhiran data wajib pajak dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung sistem pengelolaan PAD yang lebih akurat dan efisien	Pemutakhiran data wajib pajak dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung sistem pengelolaan PAD yang lebih akurat dan efisien	Pemutakhiran data wajib pajak dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung sistem pengelolaan PAD yang lebih akurat dan efisien
	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Manajemen Pendapatan Daerah	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Manajemen Pendapatan Daerah	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Manajemen Pendapatan Daerah	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Manajemen Pendapatan Daerah	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Manajemen Pendapatan Daerah
	Peningkatan profesionalisme pengelolaan BUMD	Peningkatan profesionalisme pengelolaan BUMD	Peningkatan profesionalisme pengelolaan BUMD	Peningkatan profesionalisme pengelolaan BUMD	Peningkatan profesionalisme pengelolaan BUMD
	Mendorong inovasi daerah dalam menciptakan potensi pendapatan baru	Mendorong inovasi daerah dalam menciptakan potensi pendapatan baru	Mendorong inovasi daerah dalam menciptakan potensi pendapatan baru	Mendorong inovasi daerah dalam menciptakan potensi pendapatan baru	Mendorong inovasi daerah dalam menciptakan potensi pendapatan baru
	Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Kebocoran PAD	Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Kebocoran PAD	Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Kebocoran PAD	Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Kebocoran PAD	Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Kebocoran PAD
	Peningkatan Kontribusi BUMD	Peningkatan Kontribusi BUMD terhadap	Peningkatan Kontribusi BUMD	Peningkatan Kontribusi BUMD	Peningkatan Kontribusi BUMD



SASARAN	ARAH KEBIJAKAN				
	TAHUN 1 (2026)	TAHUN 2 (2027)	TAHUN 3 (2028)	TAHUN 4 (2029)	TAHUN 5 (2030)
	terhadap Pendapatan Daerah secara Bertahap	Pendapatan Daerah secara Bertahap	terhadap Pendapatan Daerah secara Bertahap	terhadap Pendapatan Daerah secara Bertahap	terhadap Pendapatan Daerah secara Bertahap
	Pendataan ulang aset-aset daerah yang menjadi sumber pendapatan dan yang tidak layak pakai	Pendataan ulang aset-aset daerah yang menjadi sumber pendapatan dan yang tidak layak pakai	Pendataan ulang aset-aset daerah yang menjadi sumber pendapatan dan yang tidak layak pakai	Pendataan ulang aset-aset daerah yang menjadi sumber pendapatan dan yang tidak layak pakai	Pendataan ulang aset-aset daerah yang menjadi sumber pendapatan dan yang tidak layak pakai
	Pemutakhiran dan integrasi basis data wajib pajak & objek pajak berbasis NIK, NIB, dan data sectoral	Pemutakhiran dan integrasi basis data wajib pajak & objek pajak berbasis NIK, NIB, dan data sectoral	Pemutakhiran dan integrasi basis data wajib pajak & objek pajak berbasis NIK, NIB, dan data sectoral	Pemutakhiran dan integrasi basis data wajib pajak & objek pajak berbasis NIK, NIB, dan data sectoral	Pemutakhiran dan integrasi basis data wajib pajak & objek pajak berbasis NIK, NIB, dan data sectoral
	Penerapan sistem informasi pajak dan retribusi berbasis digital (online payment & e-billing).	Penerapan sistem informasi pajak dan retribusi berbasis digital (online payment & e-billing).	Penerapan sistem informasi pajak dan retribusi berbasis digital (online payment & e-billing).	Penerapan sistem informasi pajak dan retribusi berbasis digital (online payment & e-billing).	Penerapan sistem informasi pajak dan retribusi berbasis digital (online payment & e-billing).
	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPB dan Blended Finance	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPB dan Blended Finance	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPB dan Blended Finance	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPB dan Blended Finance	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPB dan Blended Finance
	Menggali potensi sektor unggulan daerah (pariwisata, industri kreatif, pertanian, perikanan, dll.) untuk menciptakan pendapatan baru	Menggali potensi sektor unggulan daerah (pariwisata, industri kreatif, pertanian, perikanan, dll.) untuk menciptakan pendapatan baru	Menggali potensi sektor unggulan daerah (pariwisata, industri kreatif, pertanian, perikanan, dll.) untuk menciptakan pendapatan baru	Menggali potensi sektor unggulan daerah (pariwisata, industri kreatif, pertanian, perikanan, dll.) untuk menciptakan pendapatan baru	Menggali potensi sektor unggulan daerah (pariwisata, industri kreatif, pertanian, perikanan, dll.) untuk menciptakan pendapatan baru
	Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang.	Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang.	Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang.	Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang.	Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang.



3.5.2 Program Prioritas Tahun 2025-2029

Program Prioritas Pemerintah Daerah adalah Program Unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 yang merupakan pendukung terhadap pencapaian Visi dan Misi :





Tabel 3.14
Program Prioritas Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2025-2029

MISI/TUJUAN/SASARAN /BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
MISI 1: MENINGKATKAN PERTUMBUHAN SEKTOR PEREKONOMIAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN														
Tujuan 1.1: Terwujudnya pertumbuhan perekonomian yang berwawasan lingkungan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,02	4,63	5,84		6,89		7,01		7,29		5,87		
	PDRB per kapita ADHB (RpJuta)	73,59	80,61	89,48		99,53		110,71		123,5		136,45		
	Tingkat Kemiskinan	2,33	1,98	1,92		1,87		1,81		1,76		1,71		
	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	24,01	23,69	23,7		23,71		23,71		23,72		23,73		
	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,55	5,30	5,06		4,83		4,61		4,40		4,20		
	Rasio Gini (Indeks)	0,299	0,297	0,296		0,295		0,294		0,293		0,291		
	Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi	1,54	1,52	1,52		1,52		1,53		1,54		1,54		
Sasaran 1.1.1: Terciptanya Ekosistem Usaha yang mendukung pertumbuhan UMKM, Industri dan perdagangan secara berkelanjutan	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	11,23	8,82	9,0325		9,245		9,4575		9,67		11,85		
	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	1,49	1,673	1,715		1,757		1,799		1,841		2,128		
	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	14,3	7,61	8,048		8,486		8,924		9,362		13,38		
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					349.260.086		289.770.639		294.028.234		295.319.066		299.155.851	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%)	7,25	9	10	349.260.086	11	289.770.639	12	294.028.234	13	295.319.066	14	299.155.851	2.17.3.30.3.31.0 1.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					281.280.062		244.378.646		269.002.193		273.097.672		284.095.908	
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)	54	54	56	281.280.062	58	244.378.646	60	269.002.193	62	273.097.672	64	284.095.908	2.17.3.30.3.31.0 1.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIA



MISI/TUJUAN/SASARAN /BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														N DAN PERDAGANGAN
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					238.152.056		274.378.646		223.752.741		259.646.507		276.143.862	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (%)	67	69	70	238.152.056	73	274.378.646	75	223.752.741	78	259.646.507	80	276.143.862	2.17.3.30.3.31.0 1.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					304.088.053		248.221.849		252.151.864		247.133.021		256.481.522	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (%)	0	10	10	304.088.053	20	248.221.849	30	252.151.864	40	247.133.021	50	256.481.522	2.17.3.30.3.31.0 1.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					850.326.310		993.042.797		928.228.870		998.070.612		1.288.305.4 20	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (%)	21	21	22	850.326.310	23	993.042.797	24	928.228.870	25	998.070.612	26	1.288.305.4 20	2.17.3.30.3.31.0 1.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN
	Proporsi jumlah UKM non pertanian (*)	19,1	19,1	19,3		19,4		19,49		19,59		19,69		
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					462.856.090		452.849.037		459.553.179		450.991.624		466.939.067	



MISI/TUJUAN/SASARAN /BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (%)	10	11	12	462.856.090	13	452.849.037	14	459.553.179	15	450.991.624	16	466.939.067	2.17.3.30.3.31.0
	Rasio Kewirausahaan (%)	3,56	3,96	4,09		4,23		4,36		4,49		4,75		1.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					906.400.312		959.082.555		1.074.013.1 56		1.038.586.0 30		1.196.623.4 02	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien,merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	14,29	14,29	28,57	906.400.312	28,57	959.082.555	42,86	1.074.013.1 56	42,86	1.038.586.0 30	42,86	1.196.623.4 02	2.17.3.30.3.31.0 1.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					552.904.190		592.887.398		571.258.222		519.700.454		819.226.791	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (%)	69,76	72,09	74,42	552.904.190	76,74	592.887.398	79,07	571.258.222	81,40	519.700.454	83,72	819.226.791	2.17.3.30.3.31.0 1.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					861.080.296		959.082.555		918.763.704		968.409.283		980.719.311	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	800.000. 000	800.000. 000	800.000. 000	861.080.296	900.000. 000	959.082.555	900.000. 000	918.763.704	1.000.000 .000	968.409.283	1.000.000 .000	980.719.311	2.17.3.30.3.31.0 1.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIA N DAN



MISI/TUJUAN/SASARAN /BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														PERDAGANGAN
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					249.260.086		252.849.037		272.978.344		276.956.275		308.360.646	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	100	100	100	249.260.086	100	252.849.037	100	272.978.344	100	276.956.275	100	308.360.646	2.17.3.30.3.31.0 1.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN
3.30.07 - PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					271.920.094		248.757.293		267.505.482		269.293.015		644.335.678	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (%)	80	82	84	271.920.094	87	248.757.293	90	267.505.482	93	269.293.015	95	644.335.678	2.17.3.30.3.31.0 1.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					892.804.307		867.533.766		899.486.018		878.470.683		943.491.529	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri (%)	50	53	55	892.804.307	58	867.533.766	60	899.486.018	62	878.470.683	64	943.491.529	2.17.3.30.3.31.0 1.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN
	Proporsi jumlah IKM (*)	3,92	4	4,08		4,16		4,23		4,31		4,39		



MISI/TUJUAN/SASARAN /BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					168.128.006		226.156.797		235.800.439		243.274.418		355.228.772	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Persentase pertumbuhan informasi industri (%)	10	15	18	168.128.006	25	226.156.797	32	235.800.439	40	243.274.418	45	355.228.772	2.17.3.30.3.31.0 1.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN
sasaran 1.1.2: Meningkatnya iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan usaha dan peningkatan produktivitas tenaga kerja daerah	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	88,44	93,84	94,74		95,63		96,50		97,42		98,31		
	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	52,25	52,96	54,16		55,36		56,56		57,76		62,62		
	Persentase Peningkatan Investasi (%)	18,73	8,83	9,03		9,23		9,43		9,63		9,83		
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					335.368.115		235.411.173		250.603.070		242.336.740		266.939.067	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (%)	549,24	100	100	335.368.115	100	235.411.173	100	250.603.070	100	242.336.740	100	266.939.067	2.18.2.07.0.00.0 1.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					334.147.246		230.783.985		236.041.666		233.285.207		243.594.808	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (%)	30,88	37	45	334.147.246	46	230.783.985	47	236.041.666	48	233.285.207	49	243.594.808	2.18.2.07.0.00.0 1.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA



MISI/TUJUAN/SASARAN /BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					328.768.037		330.783.985		341.101.973		381.752.555		320.915.090	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (%)	99,82	100	100	328.768.037	100	330.783.985	100	341.101.973	100	381.752.555	100	320.915.090	2.18.2.07.0.00.0 1.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					240.344.066		286.585.152		295.112.390		192.138.415		204.346.458	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (%)	100	100	100	240.344.066	100	286.585.152	100	295.112.390	100	192.138.415	100	204.346.458	2.18.2.07.0.00.0 1.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					212.964.337		222.294.550		246.088.778		255.281.123		289.910.701	
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (%)	100	100	100	212.964.337	100	222.294.550	100	246.088.778	100	255.281.123	100	289.910.701	2.18.2.07.0.00.0 1.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					90.640.031		104.627.188		125.301.535		129.823.254		138.071.931	
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	100	100	100	90.640.031	100	104.627.188	100	125.301.535	100	129.823.254	100	138.071.931	2.18.2.07.0.00.0 1.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN



MISI/TUJUAN/SASARAN /BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					725.120.250		984.703.909		995.010.963		952.037.194		1.104.575.4 48	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Lulusan Pelatihan Yang Bekerja (%)	26,78	27	27,28	725.120.250	27,78	984.703.909	29,78	995.010.963	33	952.037.194	35	1.104.575.4 48	2.18.2.07.0.00.0 1.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					421.476.145		549.292.736		716.008.770		739.523.707		972.358.664	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (%)	43,32	44	45	421.476.145	47	549.292.736	50	716.008.770	55	739.523.707	65	972.358.664	2.18.2.07.0.00.0 1.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%) (%)	-	55,2	55,7		56,2		56,7		57,2		57,7		
	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) (%)	-	74,18	74,66		75,14		75,61		76,09		76,57		
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					422.382.183		583.462.879		608.056.468		658.239.991		644.335.678	
Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	91	91	91,2	422.382.183	91,48	583.462.879	91,66	608.056.468	91,85	658.239.991	92	644.335.678	2.18.2.07.0.00.0 1.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Sasaran 1.1.3: Meningkatnya kemandirian desa dalam pengelolaan potensi lokal guna mendorong	Indeks Desa (rata-rata indeks desa)	-	78,72	79,02		79,32		79,62		79,92		80,22		



MISI/TUJUAN/SASARAN /BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
pertumbuhan ekonomi masyarakat desa														
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					67.980.023		107.189.323		118.451.206		125.037.113		101.075.557	
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (%)	100	100	100	67.980.023	100	107.189.323	100	118.451.206	100	125.037.113	100	101.075.557	1.06.2.13.2.08.0 1.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					195.320.016		147.954.128		153.649.260		157.598.250		167.383.705	
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (%)	100	100	100	195.320.016	100	147.954.128	100	153.649.260	100	157.598.250	100	167.383.705	1.06.2.13.2.08.0 1.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					434.480.218		471.357.789		558.074.286		506.375.503		643.371.867	
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	100	100	100	434.480.218	100	471.357.789	100	558.074.286	100	506.375.503	100	643.371.867	1.06.2.13.2.08.0 1.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



MISI/TUJUAN/SASARAN /BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					353.200.156		399.541.278		441.481.633		475.982.502		573.837.048	
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	100	100	100	353.200.156	100	399.541.278	100	441.481.633	100	475.982.502	100	573.837.048	1.06.2.13.2.08.0 1.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)	0	0	50		50		60		60		70		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.579.274.9 42,54		4.120.173.8 04,02		4.240.888.6 52,78		4.252.397.1 74,32		5.035.219.2 84,95	
Meningkatnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Talawi)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	0	0	0	139.785.144 ,21	0	225.018.791 ,26	0	227.534.281 ,81	0	233.760.813 ,4	0	275.003.054 ,74	7.01.0.00.0.00.0 4.0000 - KECAMATAN TALAWI
Meningkatnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Barangin)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	50.450.175, 54	100	95.397.134, 28	100	97.822.859, 25	100	135.177.146 ,47	100	116.588.055 ,48	7.01.0.00.0.00.0 1.0000 - KECAMATAN BARANGIN
Meningkatnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Lembah Segar)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	101.622.949 ,76	100	163.243.383 ,2	100	170.950.268 ,79	100	166.153.739 ,03	100	199.505.244 ,6	7.01.0.00.0.00.0 2.0000 - KECAMATAN LEMBAH SEGAR
Meningkatnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Silungkang)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	153.769.889 ,48	100	239.143.747 ,6	100	242.758.727 ,07	100	249.219.181 ,52	100	292.081.544 ,68	7.01.0.00.0.00.0 3.0000 - KECAMATAN SILUNGKANG
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Durian 1)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	234.277.014 ,65	100	360.859.078 ,49	100	372.948.394 ,94	100	369.924.573 ,32	100	441.018.051 ,31	7.01.0.00.0.00.0 1.0001 - KELURAHAN DURIAN 1



MISI/TUJUAN/SASARAN /BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Durian 2)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	270.262.205,59	100	397.205.057,79	100	412.123.549,27	100	409.701.653,16	100	485.437.698,76	7.01.0.00.0.00.0 1.0002 - KELURAHAN DURIAN 2
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Lubang Panjang)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	236.021.044,87	100	362.620.594,03	100	374.847.027,34	100	371.852.378,53	100	443.170.859,66	7.01.0.00.0.00.0 1.0003 - KELURAHAN LUBANG PANJANG
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Saringan)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	323.412.446,71	100	450.888.183,24	100	469.985.376,16	100	468.452.525,3	100	551.045.657,65	7.01.0.00.0.00.0 1.0004 - KELURAHAN SARINGAN
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Air Dingin)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	170.324.310,03	100	296.265.183,14	100	303.326.502,59	100	299.232.943,45	100	362.075.673,26	7.01.0.00.0.00.0 2.0001 - KELURAHAN AIR DINGIN
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Aur Mulyo)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	176.255.818,14	100	302.256.160,33	100	309.783.817,84	100	305.789.475,61	100	369.397.449,19	7.01.0.00.0.00.0 2.0002 - KELURAHAN AUR MULYO
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Kubang Sirakuk Utara)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	170.324.310,03	100	296.265.183,14	100	303.326.502,59	100	299.232.943,45	100	362.075.673,26	7.01.0.00.0.00.0 2.0003 - KELURAHAN KUBANG SIRAKUK UTARA
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	180.893.273,94	100	306.940.112,02	100	314.832.368,83	100	310.915.596,98	100	375.121.863,59	7.01.0.00.0.00.0 2.0004 - KELURAHAN KUBANG SIRAKUK SELATAN
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Pasar)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	201.552.051,37	100	327.806.014,1	100	337.322.475,5	100	333.751.263,24	100	400.622.787,35	7.01.0.00.0.00.0 2.0005 - KELURAHAN PASAR
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Tanah Lapang)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	170.324.308,22	100	296.265.181,4	100	303.326.500,8	100	299.232.940,86	100	362.075.671,42	7.01.0.00.0.00.0 2.0006 - KELURAHAN TANAH LAPANG



MISI/TUJUAN/SASARAN /BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					109.323.862 ,9		101.304.454 ,6		135.338.612 ,86		137.297.355 ,29		43.016.770, 36	
Terselenggaranya Pemerintahan Desa Dengan Baik(Talawi)	Persentase Terselenggaranya Pemerintahan Desa Dengan Baik (%)	0	0	0	34.064.003, 12	0	31.590.825, 55	0	40.740.131, 56	0	41.251.348, 65	0	12.886.713, 56	7.01.0.00.0.00.0 4.0000 - KECAMATAN TALAWI
Terselenggaranya Pemerintahan Desa Dengan Baik(Barangin)	Persentase Terselenggaranya Pemerintahan Desa Dengan Baik (%)	100	100	100	19.532.001, 56	100	18.231.359, 39	100	26.265.076, 74	100	26.923.906, 86	100	8.284.315,8 6	7.01.0.00.0.00.0 1.0000 - KECAMATAN BARANGIN
Terselenggaranya Pemerintahan Desa Dengan Baik(Lembah Segar)	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik (%)	100	100	100	20.710.321, 97	100	19.364.820, 59	100	27.428.590, 99	100	28.049.041, 73	100	9.480.939,2 7	7.01.0.00.0.00.0 2.0000 - KECAMATAN LEMBAH SEGAR
Terselenggaranya Pemerintahan Desa Dengan Baik(Silungkang)	Persentase Terselenggaranya Pemerintahan Desa Dengan Baik (%)	100	100	100	35.017.536, 25	100	32.117.449, 07	100	40.904.813, 57	100	41.073.058, 05	100	12.364.801, 67	7.01.0.00.0.00.0 3.0000 - KECAMATAN SILUNGKANG
Sasaran 1.1.4: Terwujudnya ketahanan pangan dengan meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan	Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan(%)	8,76	8,86	8,9		8,95		8,99		9,04		9,08		
	Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	8,19	7,81	7,33		6,85		6,36		5,39		4,91		
	Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Juta/orang)	50,21	50,881	52,481		54,081		55,681		57,281		58,881		
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					159.064.003		213.078.398		213.425.164		215.146.046		316.108.392	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Ketersedian cadangan pangan (%)	101,89	100	100	159.064.003	100	213.078.398	100	213.425.164	100	215.146.046	100	316.108.392	2.09.3.27.3.25.0 1.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN



MISI/TUJUAN/SASARAN /BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					134.443.212		147.082.235		183.976.151		195.203.719		201.252.749	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	91,1	91,2	91,2	134.443.212	91,25	147.082.235	91,3	183.976.151	91,35	195.203.719	91,4	201.252.749	2.09.3.27.3.25.0 1.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					100.305.217		102.313.594		105.490.680		155.391.255		160.751.650	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Penduduk Rawan Pangan yang ditangani (%)	2,7	2,7	2,7	100.305.217	5,4	102.313.594	8,1	105.490.680	10,8	155.391.255	13,5	160.751.650	2.09.3.27.3.25.0 1.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					77.645.210		78.249.341		79.356.360		78.734.213		80.928.113	
Menigkatnya pengawasan dan mutu dan kemandan pangan	Persentase Tingkat Keamanan Produk Pangan Segar yang aman dari Cemaran Mikroba, Bahan kimia /Berbahaya dan Residu Pestisida (%)	96,3	96,3	96,5	77.645.210	96,7	78.249.341	96,8	79.356.360	96,9	78.734.213	97	80.928.113	2.09.3.27.3.25.0 1.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					871.957.100		874.508.912		941.999.039		945.546.031		1.049.346.6 76	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Jumlah Produksi Padi (Ton)	18.006,2 5	18.010	18.065	871.957.100	18.095	874.508.912	18.115	941.999.039	18.145	945.546.031	18.170	1.049.346.6 76	2.09.3.27.3.25.0 1.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Jumlah Produksi Kopi Robusta (Ton)	38,43	40,1	42,85		47,55		52,3		57,53		64,33		
	Jumlah Produksi Kakao (Ton)	592,7	592,7	596,32		598,16		600,01		601,87		603,74		
	Jumlah produksi daging sapi (Ton)	413,07	413,07	413,47		413,87		414,27		414,67		415,7		
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN					866.971.898		1.367.128.5 88		1.230.297.4 20		1.224.990.4 87		1.462.641.9 90	



MISI/TUJUAN/SASARAN /BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PRASARANA PERTANIAN														
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase Sawah yang Diairi (%)	2,2	2,5	2,5	866.971.898	2,5	1.367.128.588	2,5	1.230.297.420	2,5	1.224.990.487	2,5	1.462.641.990	2.09.3.27.3.25.0 1.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					147.742.548		224.948.454		246.713.267		272.628.833		317.565.441	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	-	2,5	2,5	147.742.548	2,75	224.948.454	3	246.713.267	3,25	272.628.833	3,5	317.565.441	2.09.3.27.3.25.0 1.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					40.788.014		141.850.875		144.750.548		143.274.418		146.023.977	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%)	5,24	5,5	6,13	40.788.014	6,51	141.850.875	6,9	144.750.548	7,28	143.274.418	7,66	146.023.977	2.09.3.27.3.25.0 1.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					172.216.059		183.097.579		196.902.412		199.062.322		211.710.294	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase Penyuluh yang Naik Jenjang jabatan (%)	5	5	5	172.216.059	5	183.097.579	5	196.902.412	5	199.062.322	5	211.710.294	2.09.3.27.3.25.0 1.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					127.044.027		193.996.244		216.592.653		236.278.322		289.030.576	



MISI/TUJUAN/SASARAN /BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produktifitas perikanan budidaya (Kg)	5,16	5,16	5,17	127.044.027	5,18	193.996.244	5,19	216.592.653	5,2	236.278.322	5,21	289.030.576	2.09.3.27.3.25.0 1.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					163.448.022		121.032.526		142.650.767		104.911.627		169.035.966	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	44,73	44,74	44,76	163.448.022	44,77	121.032.526	44,78	142.650.767	44,79	104.911.627	44,8	169.035.966	2.09.3.27.3.25.0 1.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
MISI 2: MEWUJUDKAN SMART GOVERNANCE BERBASIS IT														
Tujuan 2.1: Terwujudnya smart governance berbasis IT	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	43,04	53,8	55,11		56,42		57,73		59,04		60,35		
Sasaran 2.1.1: Terselenggaranya pemerintahan digital yang terintegrasi dan responsif dalam mendukung transparansi	Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	-	-	1.7		1.8		1.9		2		2.1		
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					622.188.206		539.265.964		591.485.470		592.015.615		667.019.883	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei) (%)	0	77	78	622.188.206	79	539.265.964	81	591.485.470	83	592.015.615	85	667.019.883	2.16.2.21.2.20.0 1.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					1.905.114.106		1.562.562.937		1.407.579.491		1.414.712.519		2.460.185.872	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi	Indeks Domain Manajemen SPBE (Nilai) (Nilai)	2,27	2,27	2,3	1.905.114.1	2,33	1.562.562.9	2,36	1.407.579.4	2,39	1.414.712.5	2,42	2.460.185.8	2.16.2.21.2.20.0 1.0000 - DINAS



MISI/TUJUAN/SASARAN /BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	100	100	100	06	100	37	100	91	100	19	100	72	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					266.824.997		268.061.216		270.826.480		247.133.021		388.698.306	
Tercapainya kolaborasi integrasi,dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN	Persentase Data Sektoral Yang Memenuhi Standar Data dan Dapat Diakses Secara Online (%)	70	75	80	266.824.997	85	268.061.216	90	270.826.480	95	247.133.021	100	388.698.306	2.16.2.21.2.20.0 1.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					265.059.012		213.346.120		225.301.535		229.823.254		247.276.726	
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (%)	49,4	60	65	265.059.012	70	213.346.120	75	225.301.535	80	229.823.254	85	247.276.726	2.16.2.21.2.20.0 1.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sasaran 2.1.2: Terwujudnya pelayanan pubik yang efektif dan efisien	Indeks Pelayanan Publik	3,18	3,19	3,20		3,21		3,22		3,22		4,00		
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					293.821.684		255.306.032		256.868.914		303.613.316		350.518.609	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase terselenggaranya pendaftaran penduduk (%)	95,91	100	100	293.821.684	100	255.306.032	100	256.868.914	100	303.613.316	100	350.518.609	2.12.5.04.0.00.0 1.0000 - DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					196.951.536		229.872.293		236.206.688		258.680.111		267.010.911	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase terselenggaranya pencatatan sipil (%)	35,47	100	100	196.951.536	100	229.872.293	100	236.206.688	100	258.680.111	100	267.010.911	2.12.5.04.0.00.0 1.0000 - DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL



MISI/TUJUAN/SASARAN /BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					111.058.084		212.182.964		213.563.891		214.046.876		216.295.249	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (%)	100	100	100	111.058.084	100	212.182.964	100	213.563.891	100	214.046.876	100	216.295.249	2.12.5.04.0.00.0 1.0000 - DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					518.595.416 ,61		814.315.509 ,56		864.757.498 ,21		865.440.792 ,49		947.430.991 ,66	
Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Talawi)	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	8.376.803,7 4	100	11.334.612, 02	100	12.530.153, 48	100	12.982.325, 37	100	14.727.672, 65	7.01.0.00.0.00.0 4.0000 - KECAMATAN TALAWI
Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Barangin)	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	6.755.797,4 3	100	9.348.596,1 8	100	10.076.292, 08	100	10.231.113, 57	100	11.425.234, 14	7.01.0.00.0.00.0 1.0000 - KECAMATAN BARANGIN
Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Lembah Segar)	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	11.949.471, 21	100	14.594.341, 81	100	15.730.367, 21	100	15.972.063, 16	100	12.313.359, 75	7.01.0.00.0.00.0 2.0000 - KECAMATAN LEMBAH SEGAR
Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Silungkang)	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	11.315.045, 38	100	14.168.265, 02	100	15.438.939, 11	100	15.795.162, 53	100	17.719.231, 15	7.01.0.00.0.00.0 3.0000 - KECAMATAN SILUNGKANG
Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Kelurahan Durian 1)	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	27.413.681, 05	100	56.979.284, 68	100	61.414.559, 48	100	62.358.192, 13	100	69.636.305, 96	7.01.0.00.0.00.0 1.0001 - KELURAHAN DURIAN 1
Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	44.532.667, 96	100	74.269.907, 49	100	80.051.086, 36	100	81.281.068, 61	100	90.767.758, 45	7.01.0.00.0.00.0 1.0002 - KELURAHAN



MISI/TUJUAN/SASARAN /BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksana Dengan Baik (Kelurahan Durian 2)														DURIAN 2
Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Kelurahan Lubang Panjang)	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	38.520.007, 11	100	68.196.963, 61	100	73.505.423, 68	100	74.634.832, 04	100	83.345.809, 5	7.01.0.00.0.00.0 1.0003 - KELURAHAN LUBANG PANJANG
Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Kelurahan Saringan)	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	44.209.527, 19	100	73.943.526, 46	100	79.699.299, 62	100	80.923.877, 23	100	90.368.877, 85	7.01.0.00.0.00.0 1.0004 - KELURAHAN SARINGAN
Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Kelurahan Air Dingin)	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	61.640.031, 19	100	87.189.323, 21	100	89.501.096, 31	100	86.548.835, 8	100	92.047.954, 03	7.01.0.00.0.00.0 2.0001 - KELURAHAN AIR DINGIN
Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Kelurahan Aur Mulyo)	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	45.602.157, 79	100	75.350.433, 43	100	81.215.382, 85	100	82.463.253, 87	100	92.087.923, 1	7.01.0.00.0.00.0 2.0002 - KELURAHAN AUR MULYO
Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Kelurahan Kubang Sirakuk Utara)	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	61.640.031, 19	100	87.189.323, 21	100	89.501.096, 31	100	86.548.835, 8	100	92.047.954, 03	7.01.0.00.0.00.0 2.0003 - KELURAHAN KUBANG SIRAKUK UTARA
Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan)	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	46.487.061, 91	100	76.243.895, 56	100	82.178.730, 59	100	83.441.403, 71	100	93.180.236, 84	7.01.0.00.0.00.0 2.0004 - KELURAHAN KUBANG SIRAKUK SELATAN
Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Kelurahan Pasar)	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	48.513.102, 27	100	78.317.713, 67	100	84.413.974, 82	100	85.710.992, 87	100	95.714.720, 18	7.01.0.00.0.00.0 2.0005 - KELURAHAN PASAR



MISI/TUJUAN/SASARAN /BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Kelurahan Tanah Lapang)	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	61.640.031,19	100	87.189.323,21	100	89.501.096,31	100	86.548.835,8	100	92.047.954,03	7.01.0.00.0.00.0 2.0006 - KELURAHAN TANAH LAPANG
MISI 3 : PENGUATAN INFRASTRUKTUR PENUNJANG TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT														
Tujuan 3.1: Terwujudnya infrastruktur yang inklusif, tangguh bencana dan berkelanjutan	Indeks Kinerja Infrastruktur	69,18	70,13	71,33		72,52		73,32		74,92		76,12		
	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	114,22	103,52	103,51-102,24		111,65-110,38		110,37-109,1		109,09-107,82		107,81-106,54		
Sasaran 3.1.1: Meningkatkan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	60,89	71,91	72,122		72,334		72,546		72,758		72,97		
	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	64,4	64,43	64,45		64,5		64,55		64,6		64,65		
	Indeks Ketahanan Daerah	0,43	0,45	0,47		0,49		0,51		0,53		0,55		
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					181.280.062		217.973.308		223.752.741		216.372.090		230.119.885	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRF	Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	100	181.280.062	100	217.973.308	100	223.752.741	100	216.372.090	100	230.119.885	1.04.2.10.2.11.0 1.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					552.904.190		387.189.323		307.401.316		329.823.254		306.481.522	
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Nilai Indeks Udara Model EU (Indeks)	0,22	0,22	0,21	22.660.008	0,2	146.156.797	0,19	106.850.329	0,18	110.292.093	0,18	106.819.182	1.04.2.10.2.11.0 1.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase badan air yang memenuhi baku mutu (%)	7,14	7,14	14,29		21,43		28,57		35,71		42,86		
	Tutupan Lahan (Hektar)	0,19	0,19	0,21		0,22		0,24		0,26		0,28		



MISI/TUJUAN/SASARAN /BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data hasil pemantauan lingkungan sebagai dasar pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Persentase sampel uji kualitas lingkungan yang dianalisis tepat waktu (%)	100	100	100	530.244.182	100	241.032.526	100	200.550.987	100	219.531.161	100	199.662.340	1.04.2.10.2.11.0 1.0002 - UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					634.480.218		697.514.586		705.509.867		722.213.940		920.479.540	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (%)	16,5	16,5	17,17	634.480.218	17,84	697.514.586	18,51	705.509.867	19,18	722.213.940	19,88	920.479.540	1.04.2.10.2.11.0 1.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					63.448.022		169.751.459		170.550.987		182.221.394		192.047.954	
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (%)	100	100	100	63.448.022	100	169.751.459	100	170.550.987	100	182.221.394	100	192.047.954	1.04.2.10.2.11.0 1.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



MISI/TUJUAN/SASARAN /BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					57.192.009		54.875.729		60.275.493		63.274.418		60.626.375	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	78,26	78,26	80	57.192.009	82	54.875.729	85	60.275.493	87	63.274.418	90	60.626.375	1.04.2.10.2.11.0 1.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					77.192.009		64.875.729		74.750.548		71.929.301		79.831.170	
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	-	-	30	77.192.009	40	64.875.729	50	74.750.548	60	71.929.301	65	79.831.170	1.04.2.10.2.11.0 1.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					72.512.025		74.110.925		80.550.987		82.221.394		92.047.954	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (%)	77	79	80	72.512.025	82	74.110.925	84	80.550.987	86	82.221.394	88	92.047.954	1.04.2.10.2.11.0 1.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN



MISI/TUJUAN/SASARAN /BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
hidup														PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					77.192.009		56.156.797		61.325.384		60.292.093		66.819.182	
Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (%)	100	100	100	77.192.009	100	56.156.797	100	61.325.384	100	60.292.093	100	66.819.182	1.04.2.10.2.11.0 1.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					1.268.960.437		1.307.839.848		1.432.017.541		1.457.879.044		1.840.959.081	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) (%)	73,02	73,46	74,56	1.268.960.437	75,66	1.307.839.848	76,76	1.432.017.541	77,86	1.457.879.044	78,96	1.840.959.081	1.04.2.10.2.11.0 1.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					815.760.281		984.703.909		905.509.867		978.939.522		1.028.431.586	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (%)	100	100	100	453.200.156	100	535.946.616	100	497.505.482	100	532.744.179	100	560.239.770	1.05.0.00.0.00.0 2.0000 - BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana (%)	100	100	100	271.920.094	100	311.567.970	100	293.503.289	100	309.646.507	100	326.143.862	1.05.0.00.0.00.0 2.0000 - BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH



MISI/TUJUAN/SASARAN /BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (%)	100	100	100	90.640.031	100	137.189.323	100	114.501.096	100	136.548.836	100	142.047.954	1.05.0.00.0.00.0 2.0000 - BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					181.280.062		375.033.489		424.470.830		459.038.637		435.025.288	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (%)	100	100	100	181.280.062	100	375.033.489	100	424.470.830	100	459.038.637	100	435.025.288	1.06.2.13.2.08.0 1.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkatkan kesiapsiagaannya (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		
Sasaran 3.1.2: Meningkatkan Aksesibilitas dan Konektivitas Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas	Indeks Layanan Infrastruktur Dasar	50,20	51,25	53,16		55,09		57,03		59,44		62,71		
	Indek Konektivitas darat	51,91	53,65	55,34		57,13		59,12		61,21		63,58		
	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	47.79	47.79	49.90		52.01		54.12		56.23		58.34		
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					2.812.800.624		2.530.975.787		3.769.024.119		3.490.623.223		3.209.150.897	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (%)	0	20	20,66	2.812.800.624	22,03	2.530.975.787	23,41	3.769.024.119	24,79	3.490.623.223	26,17	3.209.150.897	1.03.2.15.2.10.0 1.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (%)	44,11	45	45,32		46,74		47,7		48,91		51,03		1.03.2.15.2.10.0 1.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Kapasitas Air Baku (m3/detik) (m3/detik)	0,11	0,149	0,151		0,154		0,156		0,159		0,161		1.03.2.15.2.10.0 1.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN



MISI/TUJUAN/SASARAN /BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														PENATAAN RUANG
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					1.178.320.4 06		1.220.650.5 25		1.842.516.4 45		1.884.781.3 73		2.564.815.2 19	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%) (%)	49,67	50	52,5	1.178.320.4 06	55	1.220.650.5 25	57,5	1.842.516.4 45	60	1.884.781.3 73	62,5	2.564.815.2 19	1.03.2.15.2.10.0 1.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					1.106.400.3 12		1.071.893.2 32		1.184.512.0 59		1.125.134.8 65		1.380.719.3 11	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ((%))	8,19	15,95	18,9	1.106.400.3 12	21,9	1.071.893.2 32	24,91	1.184.512.0 59	27,91	1.125.134.8 65	32,91	1.380.719.3 11	1.03.2.15.2.10.0 1.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					2.266.000.7 80		2.266.922.4 04		2.416.529.6 00		2.423.367.4 02		2.969.390.6 67	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (%)	46,22	46,95	47,45	2.266.000.7 80	48,81	2.266.922.4 04	49,38	2.416.529.6 00	50,62	2.423.367.4 02	52	2.969.390.6 67	1.03.2.15.2.10.0 1.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					2.719.200.9 36		3.290.058.3 43		3.583.037.2 75		3.115.758.0 89		3.497.822.2 53	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%)	91,01	91,63	92,13	2.719.200.9 36	93,25	3.290.058.3 43	94,37	3.583.037.2 75	95,49	3.115.758.0 89	96,61	3.497.822.2 53	1.03.2.15.2.10.0 1.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



MISI/TUJUAN/SASARAN /BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					2.266.000.7 80		2.266.922.4 04		2.416.529.6 00		2.423.367.4 02		2.461.438.6 21	
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (%)	80,13	80,71	81,71	2.266.000.7 80	82,9	2.266.922.4 04	83,6	2.416.529.6 00	84,8	2.423.367.4 02	87	2.461.438.6 21	1.03.2.15.2.10.0 1.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					7.438.401.8 72		9.103.252.6 25		11.055.098. 668		10.654.883. 580		12.345.754. 484	
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	55,62	55,92	57,47	7.438.401.8 72	59,02	9.103.252.6 25	60,57	11.055.098. 668	62,12	10.654.883. 580	63,67	12.345.754. 484	1.03.2.15.2.10.0 1.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					235.960.047		339.502.917		352.151.864		305.787.904		374.891.113	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (%)	27,1	28	29	235.960.047	30	339.502.917	32	352.151.864	33	305.787.904	35	374.891.113	1.03.2.15.2.10.0 1.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					581.280.062		578.126.750		628.919.953		599.062.322		484.095.908	
Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Persentase pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang (RTRW / RDTR) (%)	75	77	80	581.280.062	83	578.126.750	85	628.919.953	88	599.062.322	90	484.095.908	1.03.2.15.2.10.0 1.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					567.092.126		566.195.157		689.329.769		589.469.761		528.022.986	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	16,67	33,33	50	289.437.665	66,67	283.533.525	83,33	338.399.808	91,67	282.185.299	100	243.760.943	1.04.2.10.2.11.0 1.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN



MISI/TUJUAN/SASARAN /BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
akibat program pemerintah														PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Meningkatkan akses hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa)	Persentase hunian rusunawa yang dihuni MBR (%)	70	82	83	277.654.461	84	282.661.632	85	350.929.961	86	307.284.462	87	284.262.043	1.04.2.10.2.11.0 1.0001 - UPTD RUSUNAWA
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					1.006.400.312		1.015.487.894		1.048.711.621		926.072.543		994.117.904	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	0	10	20	1.006.400.312	40	1.015.487.894	60	1.048.711.621	80	926.072.543	100	994.117.904	1.04.2.10.2.11.0 1.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					290.344.066		201.816.511		305.852.522		307.717.206		430.119.885	
Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Luas kawasan permukiman rawan kumuh yang ditangani (%)	-	20	35	290.344.066	50	201.816.511	70	305.852.522	90	307.717.206	100	430.119.885	1.04.2.10.2.11.0 1.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					1.830.928.630		1.778.662.194		1.843.722.584		1.800.215.785		1.933.007.035	



MISI/TUJUAN/SASARAN /BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Konsumsi Listrik per Kapita (Kwh/Kapita)	1.237	1.237	1.353	1.830.928.6	1.469	1.778.662.1	1.585	1.843.722.5	1.707	1.800.215.7	1.820	1.933.007.0	1.04.2.10.2.11.0 1.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (%)	84	85	86	30	87	94	88	84	89	85	90	35	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					81.928.857		52.313.594		62.650.767		69.239.069		73.638.363	
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Terelesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (%)	-	-	100	81.928.857	100	52.313.594	100	62.650.767	100	69.239.069	100	73.638.363	1.04.2.10.2.11.0 1.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					0		770.870.100		851.002.100		796.672.680		1.270.648.211	
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (%)	-	-	-	0	100	770.870.100	100	851.002.100	100	796.672.680	100	1.270.648.211	1.04.2.10.2.11.0 1.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					80.817.611		82.313.594		82.650.767		89.239.069		82.843.159	



MISI/TUJUAN/SASARAN /BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (Ha)	1	1	1	80.817.611	1	82.313.594	1	82.650.767	1	89.239.069	1	82.843.159	1.04.2.10.2.11.0 1.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.10.07 - PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT					60.331.999		111.032.526		111.600.877		107.893.952		192.047.954	
Meningkatnya tata kelola tanah ulayat	Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan (%)	-	-	14,29	60.331.999	29,18	111.032.526	43,77	111.600.877	55,41	107.893.952	70	192.047.954	1.04.2.10.2.11.0 1.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG					77.192.009		60.516.263		65.800.439		68.946.976		106.023.977	
Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola (%)	0	30	30	77.192.009	35	60.516.263	40	65.800.439	45	68.946.976	50	106.023.977	1.04.2.10.2.11.0 1.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					44.052.020		101.023.132		123.011.056		135.011.021		202.119.054	
Meningkatnya tertib pertanahan dar kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase bidang tanah yang sudah terdaftar / bersertifikat (%)	-	12,84	12,84	44.052.020	13,34	101.023.132	13,84	123.011.056	14,34	135.011.021	14,84	202.119.054	1.04.2.10.2.11.0 1.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN



MISI/TUJUAN/SASARAN /BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														HIDUP
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					1.223.640.4 21		1.438.623.8 33		1.545.271.3 78		1.547.348.8 06		1.663.126.9 20	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (%)	14,28	16,5	20,5	1.223.640.4 21	24,7	1.438.623.8 33	30,5	1.545.271.3 78	36	1.547.348.8 06	42,5	1.663.126.9 20	2.15.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.15.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN					135.960.047		150.973.308		163.253.837		189.469.761		206.263.747	
Jumlah Perjalanan Kereta Api Wisata	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani (%)	70	70	60	135.960.047	70	150.973.308	80	163.253.837	90	189.469.761	100	206.263.747	2.15.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
MISI 4 : PENINGKATAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN DAN PELESTARIAN BUDAYA MELALUI PENGEMBANGAN KOMUNITAS SENI DEMI MENDUKUNG TERWUJUDNYA KOTA WISATA YANG ESTETIK DAN MEMILIKI FUNGSI EKONOMI DAN MENSEJAHTERAKAN														
Tujuan 4.1: Terwujudnya ketahanan sosial budaya dan agama untuk menciptakan masyarakat yang harmonis	Indeks Ketahanan Nasional	-	3,06	3,07		3,08		3,09		3,1		3,11		
Sasaran 4.1.1: Meningkatnya ketahanan Sosial kehidupan beragama yang menjunjung nilai toleransi, kerukunan dan moderasi beragama	Indeks Harmoni Indonesia	-	3,2	3,5		3,7		4,2		4,3		4,5		
	Angka Kriminalitas	0,037	0,025	0,024		0,022		0,021		0,019		0,018		
	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	-	4,00	6,00		8,00		10,00		12,00		14,00		
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					139.359.048		151.599.564		171.394.599		209.937.919		192.950.922	
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	100	100	27.192.009	100	30.952.210	100	42.513.021	100	45.099.162	100	36.819.182	1.05.0.00.0.00.0 1.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN



MISI/TUJUAN/SASARAN /BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	100	100	100	22.660.008	100	25.436.613	100	24.165.296	100	43.454.734	100	24.852.948	1.05.0.00.0.00.0 1.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (%)	100	100	100	48.719.017	100	54.929.274	100	62.650.767	100	74.407.838	100	85.254.815	1.05.0.00.0.00.0 1.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	0	0	35	40.788.014	50	40.281.467	65	42.065.515	80	46.976.185	95	46.023.977	1.05.0.00.0.00.0 1.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					222.068.076		226.256.293		252.393.092		259.213.764		277.984.821	
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (%)	100	100	100	9.064.003	100	8.718.932	100	8.950.110	100	8.654.884	100	9.204.795	1.05.0.00.0.00.0 1.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%)	100	100	100	213.004.073	100	217.537.361	100	243.442.982	100	250.558.880	100	268.780.026	1.05.0.00.0.00.0 1.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					106.512.209,12		106.767.122,22		128.774.602,47		129.080.408,83		52.262.807,89	
Meningkatnya Persentase wilayah dalam kondisi	Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (%)	100	100	100	15.997.040,	100	16.046.271,	100	21.163.514,	100	21.211.683,	100	3.880.719,3	7.01.0.00.0.00.0 4.0000 -



MISI/TUJUAN/SASARAN /BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
aman dan tertib (Talawi)					34		88		25		7		1	KECAMATAN TALAWI
Meningkatnya Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (Barangin)	Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (%)	100	100	100	34.064.003,12	100	34.590.825,55	100	40.740.131,56	100	41.251.348,65	100	20.386.713,56	7.01.0.00.0.00.0 1.0000 - KECAMATAN BARANGIN
Meningkatnya Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (Lembah Segar)	Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (%)	100	100	100	36.239.363,87	100	35.898.665,4	100	41.277.138,14	100	40.991.702,15	100	19.282.138,12	7.01.0.00.0.00.0 2.0000 - KECAMATAN LEMBAH SEGAR
Meningkatnya Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (Silungkang)	Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (%)	100	100	100	20.211.801,79	100	20.231.359,39	100	25.593.818,52	100	25.625.674,33	100	8.713.236,9	7.01.0.00.0.00.0 3.0000 - KECAMATAN SILUNGKANG
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					987.680.374		435.946.616		492.256.030		476.018.597		552.287.724	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	0	0	100	987.680.374	100	435.946.616	100	492.256.030	100	476.018.597	100	552.287.724	8.01.1.05.0.00.0 1.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					509.800.234		653.919.924		671.258.222		649.116.269		690.359.655	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (%)	100	100	100	509.800.234	100	653.919.924	100	671.258.222	100	649.116.269	100	690.359.655	8.01.1.05.0.00.0 1.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					145.320.016		143.594.662		153.700.658		160.584.185		150.626.375	



MISI/TUJUAN/SASARAN /BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (%)	100	-	100	145.320.016	70	143.594.662	75	153.700.658	80	160.584.185	85	150.626.375	8.01.1.05.0.00.0 1.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					110.640.031		115.908.256		128.451.206		123.858.603		110.457.545	
Meningkatnya ketahanan ekonomi sosial,dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (%)	100	100	100	110.640.031	100	115.908.256	100	128.451.206	100	123.858.603	100	110.457.545	8.01.1.05.0.00.0 1.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					353.200.156		435.946.616		492.256.030		476.018.597		552.287.724	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (%)	100	100	100	353.200.156	100	435.946.616	100	492.256.030	100	476.018.597	100	552.287.724	8.01.1.05.0.00.0 1.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sasaran 4.1.2: Meningkatnya komunitas seni dalam pelestarian cagar budaya dan adat istiadat	Persentase Pemajuan Kebudayaan yang dilaksanakan	68,52	74	76,8		78,77		80,76		83,43		85,49		
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					372.216.059		373.942.700		382.482.421		370.363.082		412.581.241	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (%)	51,28	60	64,1	372.216.059	67,95	373.942.700	69,23	382.482.421	71,79	370.363.082	73,08	412.581.241	2.22.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS KEBUDAYAAN



MISI/TUJUAN/SASARAN /BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					467.684.058		469.365.260		472.548.674		485.353.528		406.986.997	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (%)	57,14	59	62,5	467.684.058	64,29	469.365.260	66,07	472.548.674	67,86	485.353.528	69,64	406.986.997	2.22.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS KEBUDAYAAN
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					208.620.055		283.097.579		225.542.763		261.723.679		334.023.616	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (%)	100	100	100	208.620.055	100	283.097.579	100	225.542.763	100	261.723.679	100	334.023.616	2.22.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS KEBUDAYAAN
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					345.320.016		345.774.395		1.049.337.479		1.050.095.548		1.755.942.432	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (%)	63,92	65	67	345.320.016	70	345.774.395	74	1.049.337.479	78	1.050.095.548	82	1.755.942.432	2.22.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS KEBUDAYAAN
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					2.263.399.429		2.211.981.378		2.282.578.543		2.219.287.532		2.373.560.298	
Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (%)	28.676	31.000	34.000	2.263.399.429	35.000	2.211.981.378	35.000	2.282.578.543	36.000	2.219.287.532	37.000	2.373.560.298	2.22.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS KEBUDAYAAN
MISI 5 : MENINGKATKAN FUNGSI EKONOMI SEKTOR PARIWISATA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI OPTIMALISASI POTENSI KEPARIWISATAAN														
Tujuan 5.1: Peningkatan fungsi ekonomi sektor pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat	Rasio PDRB Akomodasi Mamin	2,30	2,33	2,35		2,37		2,39		2,41		2,50		
Sasaran 5.1.1: Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian	PAD sektor Pariwisata (%)	3,1	3,2	3,4		3,6		3,8		4		4,2		
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					8.140.946.662		11.325.813.569		14.613.684.783		14.591.351.149		15.059.793.517	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah Tamu Asing Hotel Berbintang (ribu orang) (Orang)	0,041	0,1	0,128	8.140.946.662	0,158	11.325.813.569	0,183	14.613.684.783	0,213	14.591.351.149	0,269	15.059.793.517	3.26.2.19.0.00.0 1.0000 - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN



MISI/TUJUAN/SASARAN /BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														OLAHRAGA
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					1.025.120.250		641.109.247		687.609.648		487.594.406		1.865.250.768	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata		0	0	10	1.025.120.250	20	641.109.247	30	687.609.648	40	487.594.406	50	1.865.250.768	3.26.2.19.0.00.0 1.0000 - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sasaran 5.1.2: Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung perekonomian daerah	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Ekonomi Kreatif daerah (%)	4,59	6,205	6,195		6,185		6,165		6,155		6,866		
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					425.379.209		529.644.370		539.380.482		448.467.348		657.990.211	
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (%)	0	0	21,92	425.379.209	28,77	529.644.370	35,62	539.380.482	42,47	448.467.348	49,32	657.990.211	3.26.2.19.0.00.0 1.0000 - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					354.384.019		556.673.060		562.650.767		464.911.627		673.638.363	
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (%)	0	0	48	354.384.019	55	556.673.060	62	562.650.767	68	464.911.627	75	673.638.363	3.26.2.19.0.00.0 1.0000 - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
MISI 6: KOTA SAWAHLUNTO MENUJU KOTA SEHAT DAN DESTINASI PENDIDIKAN UTAMA YANG BERKARAKTER DI SUMATERA BARAT														
Tujuan 6.1: Terwujudnya SDM yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	76,68	77,45	78,11		78,79		79,46		80,13		80,81		



MISI/TUJUAN/SASARAN /BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Sasaran 6.1.1: Meningkatnya kualitas pendidikan	Persentase Satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional													
	- Literasi Membaca	82,73	82,83	82,9		83		83,1		83,2		83,25		
	- Numerasi	79,57	79,67	79,7		79,85		79,9		79,91		79,92		
	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	10,53	10,65	10,78		10,9		11,02		11,13		11,25		
	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,86	14,1	14,32		14,53		14,76		14,97		15,19		
	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	15,19	14	14,12		14,24		14,36		14,47		14,58		
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					9.266.923.800		31.360.390.455		41.646.172.769		42.562.317.458		49.988.359.751	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	67,35	69,39	69,59	9.266.923.800	69,79	31.360.390.455	69,99	41.646.172.769	70,19	42.562.317.458	70,39	49.988.359.751	1.01.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS PENDIDIKAN
	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	51,28	60,16	60,31		60,46		60,61		60,76		60,91		
	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	73,78	74,72	74,92		75,12		75,32		75,52		75,72		
	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	64,6	65,01	65,16		65,31		65,46		65,61		65,76		
	Anak putus sekolah yang melanjutkan pendidikan ke pendidikan non formal (%)	70	71	72		72,5		73		73,5		73,75		
	Lulusan SD yang hafal alqur'an juz 30 (%)	32	33	34		35		36		37		38		
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					250.000.000		230.516.263		231.325.384		234.619.534		136.819.182	
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (%)	17,48	17,58	18,58	250.000.000	20	230.516.263	20	231.325.384	25	234.619.534	25	136.819.182	1.01.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS PENDIDIKAN
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					217.832.041		202.065.052		229.776.590		229.823.254		138.071.931	



MISI/TUJUAN/SASARAN /BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (%)	90	92	94	217.832.041	96	202.065.052	96	229.776.590	98	229.823.254	100	138.071.931	1.01.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS PENDIDIKAN
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					118.128.006		117.437.865		117.900.219		117.309.767		108.409.591	
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (%)	100	100	100	118.128.006	100	117.437.865	100	117.900.219	100	117.309.767	100	108.409.591	1.01.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS PENDIDIKAN
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					109.064.003		108.718.932		108.950.110		112.982.325		113.807.193	
Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (%)	0	10	10	109.064.003	15	108.718.932	16	108.950.110	16	112.982.325	18	113.807.193	1.01.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS PENDIDIKAN
Sasaran 6.1.2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (tahun)	74,12	74,43	74,75		75,07		75,39		75,71		76,03		
	Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13	17,3	16,05		14,8		13,55		12,3		11,05		
	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	99,66	100	100		100		100		100		100		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					28.807.608.571		28.668.672.027		30.447.445.469		30.426.187.128		32.740.351.429	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	94	95	95	14.270.754.528	95	13.919.022.418	95	14.802.217.250	95	14.501.926.985	95	14.912.288.313	1.02.2.14.0.00.0 1.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	268	134	134		134		134		134		0		
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (UPTD RSUD)	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	94	95	95	13.867.924.772	95	14.041.840.503	95	14.845.994.351	95	15.074.102.546	95	16.833.470.949	1.02.2.14.0.00.0 1.0001 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	268	134	134		134		134		134		0		
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (UPTD INSTALASI FARMASI	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	94	95	95	668.929.271	95	707.809.106	95	799.233.868	95	850.157.597	95	994.592.167	1.02.2.14.0.00.0 1.0008 - UPTD INSTALASI FARMASI KOTA



MISI/TUJUAN/SASARAN /BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KOTA)	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	268	134	134		134		134		134		0		1.02.2.14.0.00.0 1.0008 - UPTD INSTALASI FARMASI KOTA
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					1.531.009.5 71		1.555.731.5 88		2.753.998.7 99		2.795.664.7 79		2.821.269.4 19	
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (%)	0	0	35	307.436.192	36	312.371.135	37	605.474.917	38	614.128.902	39	635.116.374	1.02.2.14.0.00.0 1.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan (UPTD RSUD)	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (%)	0	0	35	1.223.573.3 79	36	1.243.360.4 53	37	2.148.523.8 82	38	2.181.535.8 77	39	2.186.153.0 45	1.02.2.14.0.00.0 1.0001 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					146.758.233		95.330.626		100.289.894		109.450.752		113.129.181	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (%)	0	0	55	146.758.233	56	95.330.626	57	100.289.894	58	109.450.752	59	113.129.181	1.02.2.14.0.00.0 1.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					216.944.143		265.659.714		278.554.687		281.298.174		202.458.324	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%)	0	0	65	216.944.143	66	265.659.714	67	278.554.687	68	281.298.174	69	202.458.324	1.02.2.14.0.00.0 1.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sasaran 6.1.3:	Indeks Pembangunan Keluarga	63,88	65,40	66,20		67,00		67,80		68,60		69,40		



MISI/TUJUAN/SASARAN /BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terciptanya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	(iBangga)													
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,27	0,27	0,27		0,269		0,269		0,268		0,268		
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	65,47	67,52	67,706		67,892		68,078		68,264		68,45		
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,73	95,83	95,93		96,03		96,13		96,23		96,33		
	Indeks Kesejahteraan Sosial	-	56,70	57,30		57,90		58,50		59,10		59,70		
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					176.600.078		209.770.639		270.740.816		287.991.251		336.918.524	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (%)	8,49	8,49	8,5	176.600.078	8,51	209.770.639	8,52	270.740.816	8,53	287.991.251	8,54	336.918.524	1.06.2.13.2.08.0 1.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					117.832.041		115.089.907		120.826.480		121.168.370		231.628.574	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	117.832.041	100	115.089.907	100	120.826.480	100	121.168.370	100	231.628.574	1.06.2.13.2.08.0 1.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					244.432.119		364.451.371		411.526.041		437.746.702		512.116.156	



MISI/TUJUAN/SASARAN /BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesejahteraan gender, Pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (%)	100	100	100	244.432.119	100	364.451.371	100	411.526.041	100	437.746.702	100	512.116.156	1.06.2.13.2.08.0 1.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					156.108.030		191.112.843		202.881.510		209.436.675		328.029.039	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	persentase desa/kelurahan ramah anak (%)	100	100	100	156.108.030	100	191.112.843	100	202.881.510	100	209.436.675	100	328.029.039	1.06.2.13.2.08.0 1.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					157.289.481		272.243.786		307.408.385		326.995.119		382.548.818	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	157.289.481	100	272.243.786	100	307.408.385	100	326.995.119	100	382.548.818	1.06.2.13.2.08.0 1.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					272.656.757		845.364.660		954.556.902		915.377.142		1.187.881.13	
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti rehabilitasi sosial (%)	100	100	100	272.656.757	100	845.364.660	100	954.556.902	100	915.377.142	100	1.187.881.13	1.06.2.13.2.08.0 1.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN



MISI/TUJUAN/SASARAN /BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		N MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkatkan kompetensinya dalam pelayanan sosial (%)	76	76	76		81		87		93		100		
	persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					0		47.954.128		54.148.163		57.598.250		67.383.705	
Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korbna tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (%)	0	0	0	0	100	47.954.128	100	54.148.163	100	57.598.250	100	67.383.705	1.06.2.13.2.08.0 1.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					589.559.034		1.028.801.117		1.309.803.368		1.313.682.164		1.422.777.031	
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	71	71	75	589.559.034	85	1.028.801.117	95	1.309.803.368	100	1.313.682.164	100	1.422.777.031	1.06.2.13.2.08.0 1.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	100	100	100		100		100		100				
	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	60	60	66		73		80		88		97		
	persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang	0	45	51		56		61		67		74		



MISI/TUJUAN/SASARAN /BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)													
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					171.595.404		394.955.513		400.304.204		439.927.815		506.149.724	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (%)	100	100	100	171.595.404	100	394.955.513	100	400.304.204	100	439.927.815	100	506.149.724	1.06.2.13.2.08.0 1.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (%)	50	50	54		56		58		60		62		
	persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%)	2,6	2,6	2,7		2,97		3,2		3,5		3,8		
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					181.280.062		375.033.489		424.470.830		459.038.637		435.025.288	
Meningkatnya perlindungan sosiaal korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (%)	100	100	100	181.280.062	100	375.033.489	100	424.470.830	100	459.038.637	100	435.025.288	1.06.2.13.2.08.0 1.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkatkan kesiapsiagaannya (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					116.108.974		111.688.651		114.650.009		110.868.193		117.912.509	
Terkendalnya pertambahan jumlah penduduk	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	75,1	80,4	83,8	116.108.974	86	111.688.651	87,4	114.650.009	88,3	110.868.193	88,9	117.912.509	1.02.2.14.0.00.0 1.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri (%)	100	100	100		100		100		100		100		



MISI/TUJUAN/SASARAN /BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					227.249.811		295.756.028		316.855.026		389.910.453		540.099.585	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (%)	15,2	15	14,8	227.249.811	14,6	295.756.028	14,4	316.855.026	14,2	389.910.453	14,1	540.099.585	1.02.2.14.0.00.0 1.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	82	82,3	82,6		82,9		83,20		83,5		83,8		
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					364.912.182		643.405.713		557.813.793		539.413.888		573.687.033	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	56,9	57,7	58,5	364.912.182	59,3	643.405.713	60,1	557.813.793	60,8	539.413.888	61,5	573.687.033	1.02.2.14.0.00.0 1.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	90,2	91,1	91,8		92,5		93,1		93,7		94,3		
Sasaran 6.1.4: Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga	Persentase peningkatan partisipasi pemuda berwirausaha	-	0,36	0,43		0,50		0,70		0,80		1,00		
	Persentase peningkatan prestasi Olahraga	-	0,25	0,30		1,20		1,70		1,90		2,05		
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					1.042.360.3 59		1.102.944.9 39		1.145.407.7 55		1.124.759.7 55		1.549.825.2 09	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase Peningkatan kapasitas daya saing Kepemudaan (%)	0	0	0,62	1.042.360.3 59	0,65	1.102.944.9 39	0,67	1.145.407.7 55	0,69	1.124.759.7 55	1	1.549.825.2 09	3.26.2.19.0.00.0 1.0000 - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					2.989.641.2 01		3.692.467.8 38		3.669.408.5 72		3.435.065.2 67		3.488.545.2 66	
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet yang berdaya saing (%)	0	0	14,7	2.989.641.2 01	15	3.692.467.8 38	16	3.669.408.5 72	17	3.435.065.2 67	18	3.488.545.2 66	3.26.2.19.0.00.0 1.0000 - DINAS PARIWISATA,



MISI/TUJUAN/SASARAN /BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					453.200.156		379.541.278		391.481.633		375.982.502		373.837.048	
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Persentase peningkatan kapasitas anggota kepramukaan (%)	0	0	17	453.200.156	19	379.541.278	21	391.481.633	23	375.982.502	25	373.837.048	3.26.2.19.0.00.0 1.0000 - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
MISI 7 : PELAKSANAAN TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH YANG BERDAYA SAING TINGGI ATAS PENGUKURAN INDEKS KINERJA YANG DITETAPKAN OLEH KEMENTERIAN DAN LEMBAGA LAINNYA														
Tujuan 7.1: Terwujudnya Kinerja Pemerintah Daerah yang berdaya saing	Indeks Reformasi Birokrasi	75,04	76,35	77,56		78,17		79,01		80,47		82,72		
	Indeks inovasi daerah	72,87	73,21	74,67		76,14		77,6		79,07		80,53		
Sasaran 7.1.1: Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Akuntabilitas dan Pengawasan yang berkualitas	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	-	3,15	3,16		3,17		3,18		3,19		3,2		
	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	-	100	100		100		100		100		100		
	Nilai AKIP Instansi Pemerintah	64	65,23	68,17		70,11		71,02		72,03		73,2		
	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,016	3,2	3,25		3,3		3,35		3,4		3,45		
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					9.496.794.9 67		9.225.771.7 61		9.364.241.2 33		9.340.422.9 54		9.032.356.8 75	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (%)	-	70	75	9.496.794.9 67	80	9.225.771.7 61	85	9.364.241.2 33	88	9.340.422.9 54	95	9.032.356.8 75	4.01.2.16.2.20.0 1.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan (*)	-	70	75		80		85		88		95		
	Indeks Reformasi Hukum (*)	97,5	72	73,18		74,21		75,24		76,27		77,3		
	Indeks Zakat Nasional (IZN) (Poin)	0,61	0,64	0,67		0,7		0,73		0,76		0,79		
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					651.415.176		362.241.688		375.564.775		387.665.802		416.420.187	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (%)	-	65	70	651.415.176	75	362.241.688	80	375.564.775	85	387.665.802	91	416.420.187	4.01.2.16.2.20.0 1.0000 - SEKRETARIAT



MISI/TUJUAN/SASARAN /BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
pembangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (%)	-	70	75		80		85		90		94		DAERAH
	Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)	4,75	4,78	4,8		4,82		4,83		4,85		4,87		
	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) (Indeks)	82	84	88		90		92		94		94		
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					349.523.172		351.061.656		378.624.588		375.329.260		669.188.626	
Meningkatnya kualitas perencanaan	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (%)	100	100	100	349.523.172	100	351.061.656	100	378.624.588	100	375.329.260	100	669.188.626	5.01.5.05.0.00.0 1.0000 - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (%)	100	100	100		100		100		100		100		
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					379.702.861,79		317.929.538,98		463.718.475,31		438.874.786,81		451.393.064,53	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	100	100	100	117.593.253,32	100	105.829.857,05	100	154.871.162,09	100	146.355.905,65	100	150.093.708,52	5.01.5.05.0.00.0 1.0000 - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	100	100	100	136.815.951,69	100	105.797.248,38	100	155.318.667,57	100	146.192.184,76	100	151.014.188,06	5.01.5.05.0.00.0 1.0000 - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (%)	100	100	100	125.293.656,78	100	106.302.433,55	100	153.528.645,65	100	146.326.696,4	100	150.285.167,95	5.01.5.05.0.00.0 1.0000 - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA



MISI/TUJUAN/SASARAN /BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														N DAERAH
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					177.044.027		157.598.498		158.451.206		199.531.161		115.059.943	
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (%)	-	-	100	177.044.027	100	157.598.498	100	158.451.206	100	199.531.161	100	115.059.943	5.01.5.05.0.00.0 1.0000 - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan					0		0		0		0		0	PENGEMBANGA N DAERAH
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah					0		0		0		0		0	
Meningkatnya fasilitasi pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah					0		0		0		0		0	
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					245.320.016		266.263.886		276.970.943		177.028.464		187.445.556	
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (%)	0	0	0	245.320.016	87	266.263.886	88	276.970.943	88	177.028.464	89	187.445.556	5.01.5.05.0.00.0 1.0000 - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH



MISI/TUJUAN/SASARAN /BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.385.175.2 31		8.152.379.9 03		8.450.472.6 93		8.136.002.0 87		8.690.810.9 10	
Meningkatnya Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	7.385.175.2 31	100	8.152.379.9 03	100	8.450.472.6 93	100	8.136.002.0 87	100	8.690.810.9 10	6.01.0.00.0.00.0 1.0000 - INSPEKTORAT
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					500.732.265		548.596.133		581.660.458		579.315.315		534.580.288	
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (%)	76	77	78	500.732.265	79	548.596.133	80	581.660.458	81	579.315.315	82	534.580.288	6.01.0.00.0.00.0 1.0000 - INSPEKTORAT
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					215.305.163		207.541.585		223.932.335		227.416.322		255.484.074	
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan asistensi	Level Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (PK APIP) (Level)	3	3	3,1	215.305.163	3,2	207.541.585	3,3	223.932.335	3,4	227.416.322	3,5	255.484.074	6.01.0.00.0.00.0 1.0000 - INSPEKTORAT
Sasaran 7.1.2: Terwujudnya profesionalitas ASN	Indeks Profesional ASN	-	78,72	81		84		87		90		90		
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					1.063.855.2 30		1.473.932.1 52,11		1.580.259.2 32,49		1.596.322.2 11,98		1.773.896.5 95,68	
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (%)	100	100	100	57.986.001, 71	100	113.497.611 ,62	100	116.506.933 ,36	100	112.663.865 ,14	100	119.822.273 ,56	5.03.5.04.0.00.0 1.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	75,97	76,72	77	886.434.111 ,41	77,5	1.127.627.4 94,92	78	1.215.402.1 61,8	79	1.234.076.7 74,92	80	1.378.111.5 94,74	5.03.5.04.0.00.0 1.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN



MISI/TUJUAN/SASARAN /BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (%)	-	68	70	89.027.657,61	71	180.735.402,01	72	194.897.845,09	73	197.892.443,46	75	220.989.388,03	5.03.5.04.0.00.0 1.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (%)	99	100	100	30.407.459,27	100	52.071.643,56	100	53.452.292,24	100	51.689.128,46	100	54.973.339,35	5.03.5.04.0.00.0 1.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					579.800.234		553.919.924		571.258.222		592.390.686		674.455.563	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					579.800.234		553.919.924		571.258.222		592.390.686		674.455.563	
Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (%)	-	-	80	0	80	0	80	0	80	0	80	0	5.03.5.04.0.00.0 1.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (%)	-	-	85	579.800.234	85	553.919.924	85	571.258.222	85	592.390.686	85	674.455.563	5.03.5.04.0.00.0 1.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
Sasaran 7.1.3: Meningkatnya tata kelola arsip dan literasi masyarakat	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkungan Pemerintahan Daerah	43,18	50,58	50,60		50,65		50,70		50,75		60,00		
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	94,81	94,83	94,85		94,9		94,95		94,98		95		



MISI/TUJUAN/SASARAN /BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					519.321.956		620.337.025		757.626.293		728.893.473		1.080.140.085	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (%)	67,45	67,5	67,75	519.321.956	67,9	620.337.025	68	757.626.293	68,3	728.893.473	68,5	1.080.140.085	2.23.2.24.0.00.0 1.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					20.991.282		21.334.612		22.530.153		22.982.325		24.727.673	
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase naskah kuno milik daerah yang dilestarikan dan didaftarkan (%)	0	16,67	33,33	20.991.282	50,00	21.334.612	66,67	22.530.153	83,33	22.982.325	100,00	24.727.673	2.23.2.24.0.00.0 1.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					38.975.213		61.032.526		67.125.822		73.566.510		82.843.159	
Meningkatnya tata kelola arsir dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (%)	79	79	79,05	38.975.213	79,1	61.032.526	79,15	67.125.822	79,2	73.566.510	79,25	82.843.159	2.23.2.24.0.00.0 1.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					22.236.404		26.156.797		31.325.384		34.619.534		41.421.579	
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (%)	40	40	40,05	22.236.404	40,1	26.156.797	40,15	31.325.384	40,2	34.619.534	40,25	41.421.579	2.23.2.24.0.00.0 1.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Sasaran 7.1.4: Meningkatnya kualitas Pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	70,785	70,85	71		72		73		74		75		
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					64.322.684.179		61.910.846.073		61.990.690.886		61.530.526.620		65.480.235.682	
Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	10	10	10	758.978.229	40	748.978.229	40	748.978.229	40	748.978.229	40	748.978.229	5.02.0.00.0.00.0 2.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (%)	47	47	47		30		30		30		30		
Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Penurunan SILPA (%)	4,5	4,5	4,5	63.503.868.325	4	61.102.868.325	3,5	61.182.713.138	3	60.724.548.872	3	64.674.257.934	5.02.0.00.0.00.0 2.0000 - BADAN PENGELOLAAN
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan	100	100	100		100		100		100		100		



MISI/TUJUAN/SASARAN /BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Dasar (%)													KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (%)	100	100	100	59.837.625	100	58.999.519	100	58.999.519	100	56.999.519	100	56.999.519	5.02.0.00.0.00.0 2.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					318.883.357		309.810.753		321.205.453		313.716.354		336.985.676	
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)	3	3	3	318.883.357	3	309.810.753	3	321.205.453	3	313.716.354	3	336.985.676	5.02.0.00.0.00.0 2.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					474.349.125		460.853.340		577.803.361		566.663.045		501.276.899	
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	10,24	11,03	11,6	375.121.895	12	361.626.110	12,62	408.626.110	13,09	397.485.794	13,62	380.099.648	5.02.0.00.0.00.0 2.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (%)	25	50	75	52.434.730	100	52.434.730	100	96.384.751	100	96.384.751	100	71.384.751	5.02.0.00.0.00.0 2.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan (%)	100	100	100	46.792.500	100	46.792.500	100	72.792.500	100	72.792.500	100	49.792.500	5.02.0.00.0.00.0 2.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

3.5.3 Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Terhadap Fokus Prioritas RPJMN Tahun 2025-2029

Arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam RPJMN 2025-2029 difokuskan pada tiga sasaran utama: penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Ini sejalan dengan visi "Asta Cita" yang menekankan pada penguatan ideologi Pancasila, pembangunan SDM unggul, reformasi politik dan hukum, serta pemerataan ekonomi. Adapun uraian masing-masing sasaran utama adalah sebagai berikut:

A. Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah untuk Penurunan Tingkat Kemiskinan Kota Sawahlunto dengan Baseline dan target kinerja Tahun 2026-2030

Arah kebijakan dan program pembangunan daerah untuk penurunan tingkat kemiskinan mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan), perbaikan infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program-program ini harus terpadu dan melibatkan berbagai pihak untuk mencapai hasil yang optimal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 3.15
Arah kebijakan, Program Prioritas dan Target Kinerja dan pagu indikatif Pembangunan Daerah terhadap Penurunan Kemiskinan Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					9.266.923.800		31.360.390.455		41.646.172.769		42.562.317.458		49.988.359.751	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	67,35	69,39	69,59	9.266.923.800	69,79	31.360.390.455	69,99	41.646.172.769	70,19	42.562.317.458	70,39	49.988.359.751	1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN
	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	51,28	60,16	60,31		60,46		60,61		60,76		60,91		
	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	73,78	74,72	74,92		2		75,32		75,52		75,72		
	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	64,6	65,01	65,16		65,31		65,46		65,61		65,76		
	Anak putus sekolah yang melanjutkan pendidikan ke pendidikan non formal (%)	70	71	72		72,5		73		73,5		73,75		
	Lulusan SD yang hafal alqur'an juz 30 (%)	32	33	34		35		36		37		38		
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					250.000.000		230.516.263		231.325.384		234.619.534		136.819.182	
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (%)	17,48	17,58	18,58	250.000.000	20	230.516.263	20	231.325.384	25	234.619.534	25	136.819.182	1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA					217.832.041		202.065.052		229.776.590		229.823.254		138.071.931	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KEPENDIDIKAN														
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (%)	90	92	94	217.832.041	96	202.065.052	96	229.776.590	98	229.823.254	100	138.071.931	1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					28.807.608.571		28.668.672.027		30.447.445.469		30.426.187.128		32.740.351.429	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	94	95	95	14.270.754.528	95	13.919.022.418	95	14.802.217.250	95	14.501.926.985	95	14.912.288.313	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	268	134	134				134				134		
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (UPTD RSUD)	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	94	95	95	13.867.924.772	95	14.041.840.503	95	14.845.994.351	95	15.074.102.546	95	16.833.470.949	1.02.2.14.0.00.01.0001 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	268	134	134				134				134		
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (UPTD INSTALASI FARMASI KOTA)	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	94	95	95	668.929.271	95	707.809.106	95	799.233.868	95	850.157.597	95	994.592.167	1.02.2.14.0.00.01.0008 - UPTD INSTALASI FARMASI KOTA
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	268	134	134				134				134		
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					1.531.009.571		1.555.731.588		2.753.998.799		2.795.664.779		2.821.269.419	
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (%)	0	0	35	307.436.192	36	312.371.135	37	605.474.917	38	614.128.902	39	635.116.374	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan (UPTD RSUD)	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	0	0	35	1.223.573.379	36	1.243.360.453	37	2.148.523.882	38	2.181.535.877	39	2.186.153.045	1.02.2.14.0.00.01.0001 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(%)													
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					146.758.233		95.330.626		100.289.894		109.450.752		113.129.181	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (%)	0	0	55	146.758.233	56	95.330.626	57	100.289.894	58	109.450.752	59	113.129.181	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					216.944.143		265.659.714		278.554.687		281.298.174		202.458.324	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%)	0	0	65	216.944.143	66	265.659.714	67	278.554.687	68	281.298.174	69	202.458.324	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					2.812.800.624		2.530.975.787		3.769.024.119		3.490.623.223		3.209.150.897	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatkan akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (%)	0	20	20,66	2.812.800.624	22,03	2.530.975.787	23,41	3.769.024.119	24,79	3.490.623.223	26,17	3.209.150.897	1.03.2.15.2.10.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (%)	44,11	45	45,32		46,74		47,7		48,91		51,03		
	Kapasitas Air Baku (m3/detik) (m3/detik)	0,11	0,149	0,151		0,154		0,156		0,159		0,161		
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					1.178.320.406		1.220.650.525		1.842.516.445		1.884.781.373		2.564.815.219	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%) (%)	49,67	50	52,5	1.178.320.406	55	1.220.650.525	57,5	1.842.516.445	60	1.884.781.373	62,5	2.564.815.219	1.03.2.15.2.10.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN					1.106.400.312		1.071.893.232		1.184.512.059		1.125.134.865		1.380.719.311	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH														
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ((%))	8,19	15,95	18,9	1.106.400.312	21,9	1.071.893.232	24,91	1.184.512.059	27,91	1.125.134.865	32,91	1.380.719.311	1.03.2.15.2.10.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					7.438.401.872		9.103.252.625		11.055.098.668		10.654.883.580		12.345.754.484	
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	55,62	55,92	57,47	7.438.401.872	59,02	9.103.252.625	60,57	11.055.098.668	62,12	10.654.883.580	63,67	12.345.754.484	1.03.2.15.2.10.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					567.092.126		566.195.157		689.329.769		589.469.761		528.022.986	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	16,67	33,33	50	289.437.665	66,67	283.533.525	83,33	338.399.808	91,67	282.185.299	100	243.760.943	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Meningkatkan akses hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa)	Persentase hunian rusunawa yang dihuni MBR (%)	70	82	83	277.654.461	84	282.661.632	85	350.929.961	86	307.284.462	87	284.262.043	1.04.2.10.2.11.01.0001 - UPTD RUSUNAWA
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					1.006.400.312		1.015.487.894		1.048.711.621		926.072.543		994.117.904	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	0	10	20	1.006.400.312	40	1.015.487.894	60	1.048.711.621	80	926.072.543	100	994.117.904	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					290.344.066		201.816.511		305.852.522		307.717.206		430.119.885	
Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Luas kawasan permukiman rawan kumuh yang ditangani (%)	-	20	35	290.344.066	50	201.816.511	70	305.852.522	90	307.717.206	100	430.119.885	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN,



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					1.830.928.630		1.778.662.194		1.843.722.584		1.800.215.785		1.933.007.035	
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Konsumsi Listrik per Kapita (Kwh/Kapita)	1.237	1.237	1.353	1.830.928.630	1.469	1.778.662.194	1.585	1.843.722.584	1.707	1.800.215.785	1.820	1.933.007.035	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (%)	84	85	86		87		88		89		90		
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					815.760.281		984.703.909		905.509.867		978.939.522		1.028.431.586	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (%)	100	100	100	453.200.156	100	535.946.616	100	497.505.482	100	532.744.179	100	560.239.770	1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana (%)	100	100	100	271.920.094	100	311.567.970	100	293.503.289	100	309.646.507	100	326.143.862	1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (%)	100	100	100	90.640.031	100	137.189.323	100	114.501.096	100	136.548.836	100	142.047.954	1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					222.068.076		226.256.293		252.393.092		259.213.764		277.984.821	
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (%)	100	100	100	9.064.003	100	8.718.932	100	8.950.110	100	8.654.884	100	9.204.795	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%)	100	100	100	213.004.073	100	217.537.361	100	243.442.982	100	250.558.880	100	268.780.026	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.06.02 - PROGRAM					272.656.757		845.364.660		954.556.902		915.377.142		1.187.881.113	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PEMBERDAYAAN SOSIAL														
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti rehabilitasi sosial (%)	100	100	100	272.656.757	100	845.364.660	100	954.556.902	100	915.377.142	100	1.187.881.113	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkatkan kompetensinya dalam pelayanan sosial (%)	76	76	76		81		87		93		100		
	persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					589.559.034		1.028.801.117		1.309.803.368		1.313.682.164		1.422.777.031	
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	71	71	75	589.559.034	85	1.028.801.117	95	1.309.803.368	100	1.313.682.164	100	1.422.777.031	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	100	100	100		100		100		100				
	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	60	60	66		73		80		88		97		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(%)													
	persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	0	45	51		56		61		67		74		
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					171.595.404		394.955.513		400.304.204		439.927.815		506.149.724	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (%)	100	100	100	171.595.404	100	394.955.513	100	400.304.204	100	439.927.815	100	506.149.724	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (%)	50	50	54		56		58		60		62		
	persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%)	2,6	2,6	2,7		2,97		3,2		3,5		3,8		
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					181.280.062		375.033.489		424.470.830		459.038.637		435.025.288	
Meningkatnya perlindungan sosiaal korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (%)	100	100	100	181.280.062	100	375.033.489	100	424.470.830	100	459.038.637	100	435.025.288	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang	100	100	100		100		100		100		100		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
				2026		2027		2028		2029		2030						
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU					
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
	meningkatkan kesiapsiagaannya (%)																	
	persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial (%)	100	100	100				100				100				100		
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					90.640.031		104.627.188		125.301.535		129.823.254		138.071.931					
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	100	100	100	90.640.031	100	104.627.188	100	125.301.535	100	129.823.254	100	138.071.931	2.18.2.07.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA				
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					725.120.250		984.703.909		995.010.963		952.037.194		1.104.575.448					
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Lulusan Pelatihan Yang Bekerja (%)	26,78	27	27,28	725.120.250	27,78	984.703.909	29,78	995.010.963	33	952.037.194	35	1.104.575.448	2.18.2.07.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA				
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					421.476.145		549.292.736		716.008.770		739.523.707		972.358.664					
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (%)	43,32	44	45	421.476.145	47	549.292.736	50	716.008.770	55	739.523.707	65	972.358.664	2.18.2.07.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA				
	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%) (%)	-	55,2	55,7				56,2				56,7				57,2		57,7
	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) (%)	-	74,18	74,66				75,14				75,61				76,09		76,57
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					422.382.183		583.462.879		608.056.468		658.239.991		644.335.678					
Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS	91	91	91,2	422.382.183	91,48	583.462.879	91,66	608.056.468	91,85	658.239.991	92	644.335.678	2.18.2.07.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)													
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					176.600.078		209.770.639		270.740.816		287.991.251		336.918.524	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (%)	8,49	8,49	8,5	176.600.078	8,51	209.770.639	8,52	270.740.816	8,53	287.991.251	8,54	336.918.524	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					117.832.041		115.089.907		120.826.480		121.168.370		231.628.574	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	117.832.041	100	115.089.907	100	120.826.480	100	121.168.370	100	231.628.574	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					244.432.119		364.451.371		411.526.041		437.746.702		512.116.156	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesejahteraan gender, Pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (%)	100	100	100	244.432.119	100	364.451.371	100	411.526.041	100	437.746.702	100	512.116.156	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					156.108.030		191.112.843		202.881.510		209.436.675		328.029.039	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	persentase desa/kelurahan ramah anak (%)	100	100	100	156.108.030	100	191.112.843	100	202.881.510	100	209.436.675	100	328.029.039	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					157.289.481		272.243.786		307.408.385		326.995.119		382.548.818	
Meningkatnya	Persentase Anak	100	100	100	157.289.481	100	272.243.786	100	307.408.385	100	326.995.119	100	382.548.818	1.06.2.13.2.08.01.0000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
pengecahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)													- DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					159.064.003		213.078.398		213.425.164		215.146.046		316.108.392	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Ketersedian cadangan pangan (%)	101,89	100	100	159.064.003	100	213.078.398	100	213.425.164	100	215.146.046	100	316.108.392	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					134.443.212		147.082.235		183.976.151		195.203.719		201.252.749	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	91,1	91,2	91,2	134.443.212	91,25	147.082.235	91,3	183.976.151	91,35	195.203.719	91,4	201.252.749	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					100.305.217		102.313.594		105.490.680		155.391.255		160.751.650	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Penduduk Rawan Pangan yang ditangani (%)	2,7	2,7	2,7	100.305.217	5,4	102.313.594	8,1	105.490.680	10,8	155.391.255	13,5	160.751.650	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					77.645.210		78.249.341		79.356.360		78.734.213		80.928.113	
Menigkatnya pengawasan dan mutu dan kemandirian pangan	Persentase Tingkat Keamanan Produk Pangan Segar yang aman dari Cemaran Mikroba, Bahan kimia /Berbahaya dan Residu Pestisida (%)	96,3	96,3	96,5	77.645.210	96,7	78.249.341	96,8	79.356.360	96,9	78.734.213	97	80.928.113	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN					293.821.684		255.306.032		256.868.914		303.613.316		350.518.609	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENDUDUK														
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase terselenggaranya pendaftaran penduduk (%)	95,91	100	100	293.821.684	100	255.306.032	100	256.868.914	100	303.613.316	100	350.518.609	2.12.5.04.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					196.951.536		229.872.293		236.206.688		258.680.111		267.010.911	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase terselenggaranya pencatatan sipil (%)	35,47	100	100	196.951.536	100	229.872.293	100	236.206.688	100	258.680.111	100	267.010.911	2.12.5.04.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					111.058.084		212.182.964		213.563.891		214.046.876		216.295.249	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (%)	100	100	100	111.058.084	100	212.182.964	100	213.563.891	100	214.046.876	100	216.295.249	2.12.5.04.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					353.200.156		399.541.278		441.481.633		475.982.502		573.837.048	
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat dalam pembangunan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	100	100	100	353.200.156	100	399.541.278	100	441.481.633	100	475.982.502	100	573.837.048	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)	0	0	50		50		60		60		70		
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					116.108.974		111.688.651		114.650.009		110.868.193		117.912.509	
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	75,1	80,4	83,8	116.108.974	86	111.688.651	87,4	114.650.009	88,3	110.868.193	88,9	117.912.509	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri (%)	100	100	100		100		100		100		100		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					227.249.811		295.756.028		316.855.026		389.910.453		540.099.585	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (%)	15,2	15	14,8	227.249.811	14,6	295.756.028	14,4	316.855.026	14,2	389.910.453	14,1	540.099.585	
	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	82	82,3	82,6		82,9		83.20`		83,5		83,8		
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					364.912.182		643.405.713		557.813.793		539.413.888		573.687.033	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	56,9	57,7	58,5	364.912.182	59,3	643.405.713	60,1	557.813.793	60,8	539.413.888	61,5	573.687.033	
	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	90,2	91,1	91,8		92,5		93,1		93,7		94,3		
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					622.188.206		539.265.964		591.485.470		592.015.615		667.019.883	2.16.2.21.2.20.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei) (%)	0	77	78	622.188.206	79	539.265.964	81	591.485.470	83	592.015.615	85	667.019.883	
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					1.905.114.106		1.562.562.937		1.407.579.491		1.414.712.519		2.460.185.872	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks Domain Manajemen SPBE (Nilai) (Nilai)	2,27	2,27	2,3	1.905.114.106	2,33	1.562.562.937	2,36	1.407.579.491	2,39	1.414.712.519	2,42	2.460.185.872	2.16.2.21.2.20.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	100	100	100		100		100		100		100		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN Pemeriksaan KOPERASI					349.260.086		289.770.639		294.028.234		295.319.066		299.155.851	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%)	7,25	9	10	349.260.086	11	289.770.639	12	294.028.234	13	295.319.066	14	299.155.851	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					281.280.062		244.378.646		269.002.193		273.097.672		284.095.908	
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)	54	54	56	281.280.062	58	244.378.646	60	269.002.193	62	273.097.672	64	284.095.908	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					238.152.056		274.378.646		223.752.741		259.646.507		276.143.862	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (%)	67	69	70	238.152.056	73	274.378.646	75	223.752.741	78	259.646.507	80	276.143.862	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					304.088.053		248.221.849		252.151.864		247.133.021		256.481.522	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (%)	0	10	10	304.088.053	20	248.221.849	30	252.151.864	40	247.133.021	50	256.481.522	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					850.326.310		993.042.797		928.228.870		998.070.612		1.288.305.420	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (%)	21	21	22	850.326.310	23	993.042.797	24	928.228.870	25	998.070.612	26	1.288.305.420	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,
	Proporsi jumlah UKM non pertanian	19,1	19,1	19,3		19,4		19,49		19,59		19,69		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(*)													PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					462.856.090		452.849.037		459.553.179		450.991.624		466.939.067	
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (%)	10	11	12	462.856.090	13	452.849.037	14	459.553.179	15	450.991.624	16	466.939.067	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Rasio Kewirausahaan (%)	3,56	3,96	4,09		4,23		4,36		4,49		4,75		
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					1.042.360.359		1.102.944.939		1.145.407.755		1.124.759.755		1.549.825.209	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase Peningkatan kapasitas daya saing Kepemudaan (%)	0	0	0,62	1.042.360.359	0,65	1.102.944.939	0,67	1.145.407.755	0,69	1.124.759.755	1	1.549.825.209	3.26.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					266.824.997		268.061.216		270.826.480		247.133.021		388.698.306	
Tercapainya kolaborasi integrasi,dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN	Persentase Data Sektoral Yang Memenuhi Standar Data dan Dapat Diakses Secara Online (%)	70	75	80	266.824.997	85	268.061.216	90	270.826.480	95	247.133.021	100	388.698.306	2.16.2.21.2.20.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					265.059.012		213.346.120		225.301.535		229.823.254		247.276.726	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					265.059.012		213.346.120		225.301.535		229.823.254		247.276.726	
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (%)	49,4	60	65	265.059.012	70	213.346.120	75	225.301.535	80	229.823.254	85	247.276.726	2.16.2.21.2.20.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					372.216.059		373.942.700		382.482.421		370.363.082		412.581.241	
Meningkatnya peran serta masvarakat	Tingkat Partisipasi Masvarakat	51,28	60	64,1	372.216.059	67,95	373.942.700	69,23	382.482.421	71,79	370.363.082	73,08	412.581.241	2.22.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
dalam pengembangan kebudayaan	Terhadap Pengembangan Kebudayaan (%)													
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					467.684.058		469.365.260		472.548.674		485.353.528		406.986.997	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (%)	57,14	59	62,5	467.684.058	64,29	469.365.260	66,07	472.548.674	67,86	485.353.528	69,64	406.986.997	2.22.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					519.321.956		620.337.025		757.626.293		728.893.473		1.080.140.085	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran mambaca masyarakat (%)	67,45	67,5	67,75	519.321.956	67,9	620.337.025	68	757.626.293	68,3	728.893.473	68,5	1.080.140.085	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					127.044.027		193.996.244		216.592.653		236.278.322		289.030.576	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produktifitas perikanan budidaya (Kg)	5,16	5,16	5,17	127.044.027	5,18	193.996.244	5,19	216.592.653	5,2	236.278.322	5,21	289.030.576	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					163.448.022		121.032.526		142.650.767		104.911.627		169.035.966	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi lkan (Kg/ KAP/TH)	44,73	44,74	44,76	163.448.022	44,77	121.032.526	44,78	142.650.767	44,79	104.911.627	44,8	169.035.966	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					8.140.946.662		11.325.813.569		14.613.684.783		14.591.351.149		15.059.793.517	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah Tamu Asing Hotel Berbintang (ribu orang) (Orang)	0,041	0,1	0,128	8.140.946.662	0,158	11.325.813.569	0,183	14.613.684.783	0,213	14.591.351.149	0,269	15.059.793.517	3.26.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					1.025.120.250		641.109.247		687.609.648		487.594.406		1.865.250.768	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata		0	0	10	1.025.120.250	20	641.109.247	30	687.609.648	40	487.594.406	50	1.865.250.768	3.26.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					425.379.209		529.644.370		539.380.482		448.467.348		657.990.211	
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (%)	0	0	21,92	425.379.209	28,77	529.644.370	35,62	539.380.482	42,47	448.467.348	49,32	657.990.211	3.26.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					354.384.019		556.673.060		562.650.767		464.911.627		673.638.363	
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (%)	0	0	48	354.384.019	55	556.673.060	62	562.650.767	68	464.911.627	75	673.638.363	3.26.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					871.957.100		874.508.912		941.999.039		945.546.031		1.049.346.676	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Jumlah Produksi Padi (Ton)	18.006,25	18.010	18.065	871.957.100	18.095	874.508.912	18.115	941.999.039	18.145	945.546.031	18.170	1.049.346.676	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Jumlah Produksi Kopi Robusta (Ton)	38,43	40,1	42,85		47,55		52,3		57,53		64,33		
	Jumlah Produksi Kakao (Ton)	592,7	592,7	596,32		598,16		600,01		601,87		603,74		
	Jumlah produksi daging sapi (Ton)	413,07	413,07	413,47		413,87		414,27		414,67		415,7		
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					866.971.898		1.367.128.588		1.230.297.420		1.224.990.487		1.462.641.990	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase Sawah yang Diairi (%)	2,2	2,5	2,5	866.971.898	2,5	1.367.128.588	2,5	1.230.297.420	2,5	1.224.990.487	2,5	1.462.641.990	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					147.742.548		224.948.454		246.713.267		272.628.833		317.565.441	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	-	2,5	2,5	147.742.548	2,75	224.948.454	3	246.713.267	3,25	272.628.833	3,5	317.565.441	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					40.788.014		141.850.875		144.750.548		143.274.418		146.023.977	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%)	5,24	5,5	6,13	40.788.014	6,51	141.850.875	6,9	144.750.548	7,28	143.274.418	7,66	146.023.977	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					172.216.059		183.097.579		196.902.412		199.062.322		211.710.294	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase Penyuluh yang Naik Jenjang jabatan (%)	5	5	5	172.216.059	5	183.097.579	5	196.902.412	5	199.062.322	5	211.710.294	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					906.400.312		959.082.555		1.074.013.156		1.038.586.030		1.196.623.402	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien,merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	14,29	14,29	28,57	906.400.312	28,57	959.082.555	42,86	1.074.013.156	42,86	1.038.586.030	42,86	1.196.623.402	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					552.904.190		592.887.398		571.258.222		519.700.454		819.226.791	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (%)	69,76	72,09	74,42	552.904.190	76,74	592.887.398	79,07	571.258.222	81,40	519.700.454	83,72	819.226.791	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					861.080.296		959.082.555		918.763.704		968.409.283		980.719.311	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	800.000.000	800.000.000	800.000.000	861.080.296	900.000.000	959.082.555	900.000.000	918.763.704	1.000.000.000	968.409.283	1.000.000.000	980.719.311	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					249.260.086		252.849.037		272.978.344		276.956.275		308.360.646	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	100	100	100	249.260.086	100	252.849.037	100	272.978.344	100	276.956.275	100	308.360.646	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.07 - PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					271.920.094		248.757.293		267.505.482		269.293.015		644.335.678	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (%)	80	82	84	271.920.094	87	248.757.293	90	267.505.482	93	269.293.015	95	644.335.678	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					892.804.307		867.533.766		899.486.018		878.470.683		943.491.529	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri (%)	50	53	55	892.804.307	58	867.533.766	60	899.486.018	62	878.470.683	64	943.491.529	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Proporsi jumlah IKM (*)	3,92	4	4,08		4,16		4,23		4,31		4,39		
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					9.496.794.967		9.225.771.761		9.364.241.233		9.340.422.954		9.032.356.875	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (%)	-	70	75	9.496.794.967	80	9.225.771.761	85	9.364.241.233	88	9.340.422.954	95	9.032.356.875	4.01.2.16.2.20.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan (*)	-	70	75		80		85		88		95		
	Indeks Reformasi Hukum (*)	97,5	72	73,18		74,21		75,24		76,27		77,3		
	Indeks Zakat	0,61	0,64	0,67		0,7		0,73		0,76		0,79		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Nasional (IZN) (Poin)													
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					651.415.176		362.241.688		375.564.775		387.665.802		416.420.187	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (%)	-	65	70	651.415.176	75	362.241.688	80	375.564.775	85	387.665.802	91	416.420.187	4.01.2.16.2.20.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (%)	-	70	75		80		85		90		94		
	Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)	4,75	4,78	4,8		4,82		4,83		4,85		4,87		
	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) (Indeks)	82	84	88		90		92		94		94		
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					349.523.172		351.061.656		378.624.588		375.329.260		669.188.626	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (%)	100	100	100	349.523.172	100	351.061.656	100	378.624.588	100	375.329.260	100	669.188.626	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPd (%)	100	100	100		100		100		100		100		
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					379.702.861,79		317.929.538,98		463.718.475,31		438.874.786,81		451.393.064,53	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	100	100	100	117.593.253,32	100	105.829.857,05	100	154.871.162,09	100	146.355.905,65	100	150.093.708,52	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan	100	100	100	136.815.951,69	100	105.797.248,38	100	155.318.667,57	100	146.192.184,76	100	151.014.188,06	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kewilayahan (%)													
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (%)	100	100	100	125.293.656,78	100	106.302.433,55	100	153.528.645,65	100	146.326.696,4	100	150.285.167,95	
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					64.322.684.179		61.910.846.073		61.990.690.886		61.530.526.620		65.480.235.682	
Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	10	10	10	758.978.229	40	748.978.229	40	748.978.229	40	748.978.229	40	748.978.229	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (%)	47	47	47		30		30		30		30		
Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Penurunan SILPA (%)	4,5	4,5	4,5	63.503.868.325	4	61.102.868.325	3,5	61.182.713.138	3	60.724.548.872	3	64.674.257.934	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)	100	100	100		100		100		100		100		
Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (%)	100	100	100	59.837.625	100	58.999.519	100	58.999.519	100	56.999.519	100	56.999.519	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					318.883.357		309.810.753		321.205.453		313.716.354		336.985.676	
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)	3	3	3	318.883.357	3	309.810.753	3	321.205.453	3	313.716.354	3	336.985.676	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					474.349.125		460.853.340		577.803.361		566.663.045		501.276.899	
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	10,24	11,03	11,6	375.121.895	12	361.626.110	12,62	408.626.110	13,09	397.485.794	13,62	380.099.648	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (%)	25	50	75	52.434.730	100	52.434.730	100	96.384.751	100	96.384.751	100	71.384.751	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan (%)	100	100	100	46.792.500	100	46.792.500	100	72.792.500	100	72.792.500	100	49.792.500	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.579.274.942,5		4.120.173.804,0		4.240.888.652,78		4.252.397.174,32		5.035.219.284,95	
Meningkatnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Talawi)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	0	0	0	139.785.144,21	0	225.018.791,26	0	227.534.281,81	0	233.760.813,4	0	275.003.054,74	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN TALAWI
Meningkatnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Barangin)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	50.450.175,54	100	95.397.134,28	100	97.822.859,25	100	135.177.146,47	100	116.588.055,48	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN BARANGIN
Meningkatnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Lembah Segar)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	101.622.949,76	100	163.243.383,2	100	170.950.268,79	100	166.153.739,03	100	199.505.244,6	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN LEMBAH SEGAR
Meningkatnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Silungkang)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	153.769.889,48	100	239.143.747,6	100	242.758.727,07	100	249.219.181,52	100	292.081.544,68	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN SILUNGKANG
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Durian 1)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	234.277.014,65	100	360.859.078,49	100	372.948.394,94	100	369.924.573,32	100	441.018.051,31	7.01.0.00.0.00.01.0001 - KELURAHAN DURIAN 1
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Durian 2)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	270.262.205,59	100	397.205.057,79	100	412.123.549,27	100	409.701.653,16	100	485.437.698,76	7.01.0.00.0.00.01.0002 - KELURAHAN DURIAN 2
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Lubang Panjang)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	236.021.044,87	100	362.620.594,03	100	374.847.027,34	100	371.852.378,53	100	443.170.859,66	7.01.0.00.0.00.01.0003 - KELURAHAN LUBANG PANJANG



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Saringan)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	323.412.446,71	100	450.888.183,24	100	469.985.376,16	100	468.452.525,3	100	551.045.657,65	7.01.0.00.0.00.01.0004 - KELURAHAN SARINGAN
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Air Dingin)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	170.324.310,03	100	296.265.183,14	100	303.326.502,59	100	299.232.943,45	100	362.075.673,26	7.01.0.00.0.00.02.0001 - KELURAHAN AIR DINGIN
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Aur Mulyo)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	176.255.818,14	100	302.256.160,33	100	309.783.817,84	100	305.789.475,61	100	369.397.449,19	7.01.0.00.0.00.02.0002 - KELURAHAN AUR MULYO
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Kubang Sirakuk Utara)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	170.324.310,03	100	296.265.183,14	100	303.326.502,59	100	299.232.943,45	100	362.075.673,26	7.01.0.00.0.00.02.0003 - KELURAHAN KUBANG SIRAKUK UTARA
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	180.893.273,94	100	306.940.112,02	100	314.832.368,83	100	310.915.596,98	100	375.121.863,59	7.01.0.00.0.00.02.0004 - KELURAHAN KUBANG SIRAKUK SELATAN
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Pasar)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	201.552.051,37	100	327.806.014,1	100	337.322.475,5	100	333.751.263,24	100	400.622.787,35	7.01.0.00.0.00.02.0005 - KELURAHAN PASAR
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Tanah Lapang)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	170.324.308,22	100	296.265.181,4	100	303.326.500,8	100	299.232.940,86	100	362.075.671,42	7.01.0.00.0.00.02.0006 - KELURAHAN TANAH LAPANG
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					987.680.374		435.946.616		492.256.030		476.018.597		552.287.724	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	0	0	100	987.680.374	100	435.946.616	100	492.256.030	100	476.018.597	100	552.287.724	8.01.1.05.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					509.800.234		653.919.924		671.258.222		649.116.269		690.359.655	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (%)	100	100	100	509.800.234	100	653.919.924	100	671.258.222	100	649.116.269	100	690.359.655	8.01.1.05.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					145.320.016		143.594.662		153.700.658		160.584.185		150.626.375	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (%)	100	-	100	145.320.016	70	143.594.662	75	153.700.658	80	160.584.185	85	150.626.375	8.01.1.05.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					110.640.031		115.908.256		128.451.206		123.858.603		110.457.545	
Meningkatnya ketahanan ekonomi sosial,dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang	100	100	100	110.640.031	100	115.908.256	100	128.451.206	100	123.858.603	100	110.457.545	8.01.1.05.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Dilaksanakan (%)													
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					353.200.156		435.946.616		492.256.030		476.018.597		552.287.724	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (%)	100	100	100	353.200.156	100	435.946.616	100	492.256.030	100	476.018.597	100	552.287.724	8.01.1.05.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

B. Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah untuk Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Manusia Kota Sawahlunto dengan Baseline dan target kinerja Tahun 2026-2030

Arah kebijakan dan program pembangunan daerah untuk peningkatan kualitas dan daya saing manusia, dengan baseline dan target kinerja tahun 2026-2030, perlu difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Adapun uraian program dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :



Tabel 3.16

Arah kebijakan, Program Prioritas dan Target Kinerja dan pagu indikatif Pembangunan Daerah terhadap Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Manusia Kota Sawahlunto Tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					9.266.923.800		31.360.390.455		41.646.172.769		42.562.317.458		49.988.359.751	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	67,35	69,39	69,59	9.266.923.800	69,79	31.360.390.455	69,99	41.646.172.769	70,19	42.562.317.458	70,39	49.988.359.751	1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN
	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	51,28	60,16	60,31		60,46		60,61		60,76		60,91		
	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	73,78	74,72	74,92		75,12		75,32		75,52		75,72		
	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	64,6	65,01	65,16		65,31		65,46		65,61		65,76		
	Anak putus sekolah yang melanjutkan pendidikan ke pendidikan non formal (%)	70	71	72		72,5		73		73,5		73,75		
	Lulusan SD yang hafal alqur'an juz 30 (%)	32	33	34		35		36		37		38		
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					250.000.000		230.516.263		231.325.384		234.619.534		136.819.182	
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (%)	17,48	17,58	18,58	250.000.000	20	230.516.263	20	231.325.384	25	234.619.534	25	136.819.182	1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					217.832.041		202.065.052		229.776.590		229.823.254		138.071.931	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (%)	90	92	94	217.832.041	96	202.065.052	96	229.776.590	98	229.823.254	100	138.071.931	1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					118.128.006		117.437.865		117.900.219		117.309.767		108.409.591	
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan	100	100	100	118.128.006	100	117.437.865	100	117.900.219	100	117.309.767	100	108.409.591	1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
pendidikan	yang Diterbitkan/ Diperbarui (%)													
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					109.064.003		108.718.932		108.950.110		112.982.325		113.807.193	
Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (%)	0	10	10	109.064.003	15	108.718.932	16	108.950.110	16	112.982.325	18	113.807.193	1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					28.807.608.571		28.668.672.027		30.447.445.469		30.426.187.128		32.740.351.429	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	94	95	95	14.270.754.528	95	13.919.022.418	95	14.802.217.250	95	14.501.926.985	95	14.912.288.313	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	268	134	134				134				134		
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (UPTD RSUD)	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	94	95	95	13.867.924.772	95	14.041.840.503	95	14.845.994.351	95	15.074.102.546	95	16.833.470.949	1.02.2.14.0.00.01.0001 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	268	134	134				134				134		
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (UPTD INSTALASI FARMASI KOTA)	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	94	95	95	668.929.271	95	707.809.106	95	799.233.868	95	850.157.597	95	994.592.167	1.02.2.14.0.00.01.0008 - UPTD INSTALASI FARMASI KOTA
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	268	134	134				134				134		
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					1.531.009.571		1.555.731.588		2.753.998.799		2.795.664.779		2.821.269.419	
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (%)	0	0	35	307.436.192	36	312.371.135	37	605.474.917	38	614.128.902	39	635.116.374	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan (UPTD RSUD)	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (%)	0	0	35	1.223.573.379	36	1.243.360.453	37	2.148.523.882	38	2.181.535.877	39	2.186.153.045	1.02.2.14.0.00.01.0001 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					146.758.233		95.330.626		100.289.894		109.450.752		113.129.181	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (%)	0	0	55	146.758.233	56	95.330.626	57	100.289.894	58	109.450.752	59	113.129.181	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					216.944.143		265.659.714		278.554.687		281.298.174		202.458.324	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%)	0	0	65	216.944.143	66	265.659.714	67	278.554.687	68	281.298.174	69	202.458.324	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					235.960.047		339.502.917		352.151.864		305.787.904		374.891.113	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (%)	27,1	28	29	235.960.047	30	339.502.917	32	352.151.864	33	305.787.904	35	374.891.113	1.03.2.15.2.10.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					139.359.048		151.599.564		171.394.599		209.937.919		192.950.922	
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	100	100	27.192.009	100	30.952.210	100	42.513.021	100	45.099.162	100	36.819.182	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	100	100	100	22.660.008	100	25.436.613	100	24.165.296	100	43.454.734	100	24.852.948	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (%)	100	100	100	48.719.017	100	54.929.274	100	62.650.767	100	74.407.838	100	85.254.815	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	0	0	35	40.788.014	50	40.281.467	65	42.065.515	80	46.976.185	95	46.023.977	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					272.656.757		845.364.660		954.556.902		915.377.142		1.187.881.113	
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti rehabilitasi sosial (%)	100	100	100	272.656.757	100	845.364.660	100	954.556.902	100	915.377.142	100	1.187.881.113	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga	100	100	100		100		100		100		100		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (%)													
	persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkatkan kompetensinya dalam pelayanan sosial (%)	76	76	76		81		87		93		100		
	persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					589.559.034		1.028.801.117		1.309.803.368		1.313.682.164		1.422.777.031	
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	71	71	75	589.559.034	85	1.028.801.117	95	1.309.803.368	100	1.313.682.164	100	1.422.777.031	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	60	60	66		73		80		88		97		
	persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	0	45	51		56		61		67		74		
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					171.595.404		394.955.513		400.304.204		439.927.815		506.149.724	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (%)	100	100	100	171.595.404	100	394.955.513	100	400.304.204	100	439.927.815	100	506.149.724	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase Penerima Manfaat yang	50	50	54		56		58		60		62		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Meningkat Kemandirian Ekonomi (%)													
	persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%)	2,6	2,6	2,7		2,97		3,2		3,5		3,8		
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					181.280.062		375.033.489		424.470.830		459.038.637		435.025.288	
Meningkatnya perlindungan sosiaal korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (%)	100	100	100	181.280.062	100	375.033.489	100	424.470.830	100	459.038.637	100	435.025.288	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkatkan kesiapsiagaannya (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					90.640.031		104.627.188		125.301.535		129.823.254		138.071.931	
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	100	100	100	90.640.031	100	104.627.188	100	125.301.535	100	129.823.254	100	138.071.931	2.18.2.07.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					725.120.250		984.703.909		995.010.963		952.037.194		1.104.575.448	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Lulusan Pelatihan Yang Bekerja (%)	26,78	27	27,28	725.120.250	27,78	984.703.909	29,78	995.010.963	33	952.037.194	35	1.104.575.448	2.18.2.07.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					421.476.145		549.292.736		716.008.770		739.523.707		972.358.664	
Meningkatnya	Persentase Tenaga	43,32	44	45	421.476.145	47	549.292.736	50	716.008.770	55	739.523.707	65	972.358.664	2.18.2.07.0.00.01.0000 -



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
penempatan tenaga kerja	Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (%)													DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA		
	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%) (%)	-	55,2	55,7				56,2				56,7				57,2
	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) (%)	-	74,18	74,66				75,14				75,61				76,09
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					422.382.183		583.462.879		608.056.468		658.239.991		644.335.678			
Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	91	91	91,2	422.382.183	91,48	583.462.879	91,66	608.056.468	91,85	658.239.991	92	644.335.678	2.18.2.07.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA		
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					176.600.078		209.770.639		270.740.816		287.991.251		336.918.524			
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (%)	8,49	8,49	8,5	176.600.078	8,51	209.770.639	8,52	270.740.816	8,53	287.991.251	8,54	336.918.524	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					117.832.041		115.089.907		120.826.480		121.168.370		231.628.574			
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	117.832.041	100	115.089.907	100	120.826.480	100	121.168.370	100	231.628.574	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					244.432.119		364.451.371		411.526.041		437.746.702		512.116.156			
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesejahteraan gender, Pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (%)	100	100	100	244.432.119	100	364.451.371	100	411.526.041	100	437.746.702	100	512.116.156	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					77.192.009		64.875.729		74.750.548		71.929.301		79.831.170	
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	-	-	30	77.192.009	40	64.875.729	50	74.750.548	60	71.929.301	65	79.831.170	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					77.192.009		80.516.263		85.800.439		88.946.976		86.023.977	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	0	0	30	77.192.009	40	80.516.263	50	85.800.439	60	88.946.976	70	86.023.977	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					434.480.218		471.357.789		558.074.286		506.375.503		643.371.867	
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	100	100	100	434.480.218	100	471.357.789	100	558.074.286	100	506.375.503	100	643.371.867	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					353.200.156		399.541.278		441.481.633		475.982.502		573.837.048	
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat dalam pembangunan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	100	100	100	353.200.156	100	399.541.278	100	441.481.633	100	475.982.502	100	573.837.048	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masvarakat	0	0	50				50				60		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Hukum Adat (%)													
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					116.108.974		111.688.651		114.650.009		110.868.193		117.912.509	
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	75,1	80,4	83,8	116.108.974	86	111.688.651	87,4	114.650.009	88,3	110.868.193	88,9	117.912.509	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri (%)	100	100	100		100		100		100		100		
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					364.912.182		643.405.713		557.813.793		539.413.888		573.687.033	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	56,9	57,7	58,5	364.912.182	59,3	643.405.713	60,1	557.813.793	60,8	539.413.888	61,5	573.687.033	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	90,2	91,1	91,8		92,5		93,1		93,7		94,3		
Meningkatnya Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	8.191.419.344	100	8.666.653.143	100	9.786.178.232	100	10.409.797.766	100	12.178.426.224	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					10.814.120.415		10.999.066.782		11.151.552.453		10.965.626.104		11.850.675.690	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.328.157.758		8.496.425.168		8.724.835.372		8.441.367.602		8.979.554.060	
Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	8.328.157.758	100	8.496.425.168	100	8.724.835.372	100	8.441.367.602	100	8.979.554.060	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOOPERASIAN					238.152.056		274.378.646		223.752.741		259.646.507		276.143.862	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (%)	67	69	70	238.152.056	73	274.378.646	75	223.752.741	78	259.646.507	80	276.143.862	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.07 - PROGRAM					850.326.310		993.042.797		928.228.870		998.070.612		1.288.305.420	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)														
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (%)	21	21	22	850.326.310	23	993.042.797	24	928.228.870	25	998.070.612	26	1.288.305.420	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Proporsi jumlah UKM non pertanian (*)	19,1	19,1	19,3		19,4		19,49		19,59		19,69		
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					462.856.090		452.849.037		459.553.179		450.991.624		466.939.067	
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (%)	10	11	12	462.856.090	13	452.849.037	14	459.553.179	15	450.991.624	16	466.939.067	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Rasio Kewirausahaan (%)	3,56	3,96	4,09		4,23		4,36		4,49		4,75		
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					1.042.360.359		1.102.944.939		1.145.407.755		1.124.759.755		1.549.825.209	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase Peningkatan kapasitas daya saing Kepemudaan (%)	0	0	0,62	1.042.360.359	0,65	1.102.944.939	0,67	1.145.407.755	0,69	1.124.759.755	1	1.549.825.209	3.26.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					2.989.641.201		3.692.467.838		3.669.408.572		3.435.065.267		3.488.545.266	
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet yang berdaya saing (%)	0	0	14,7	2.989.641.201	15	3.692.467.838	16	3.669.408.572	17	3.435.065.267	18	3.488.545.266	3.26.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					453.200.156		379.541.278		391.481.633		375.982.502		373.837.048	
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Persentase peningkatan kapasitas anggota kepramukaan (%)	0	0	17	453.200.156	19	379.541.278	21	391.481.633	23	375.982.502	25	373.837.048	3.26.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					519.321.956		620.337.025		757.626.293		728.893.473		1.080.140.085	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran mambaca masyarakat (%)	67,45	67,5	67,75	519.321.956	67,9	620.337.025	68	757.626.293	68,3	728.893.473	68,5	1.080.140.085	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF					425.379.209		529.644.370		539.380.482		448.467.348		657.990.211	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL														
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (%)	0	0	21,92	425.379.209	28,77	529.644.370	35,62	539.380.482	42,47	448.467.348	49,32	657.990.211	3.26.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					354.384.019		556.673.060		562.650.767		464.911.627		673.638.363	
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (%)	0	0	48	354.384.019	55	556.673.060	62	562.650.767	68	464.911.627	75	673.638.363	3.26.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					172.216.059		183.097.579		196.902.412		199.062.322		211.710.294	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase Penyuluh yang Naik Jenjang jabatan (%)	5	5	5	172.216.059	5	183.097.579	5	196.902.412	5	199.062.322	5	211.710.294	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					1.063.855.230		1.473.932.152,11		1.580.259.232,49		1.596.322.211,98		1.773.896.595,68	
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (%)	100	100	100	57.986.001,71	100	113.497.611,62	100	116.506.933,36	100	112.663.865,14	100	119.822.273,56	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	75,97	76,72	77	886.434.111,41	77,5	1.127.627.494,92	78	1.215.402.161,8	79	1.234.076.774,92	80	1.378.111.594,74	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (%)	-	68	70	89.027.657,61	71	180.735.402,01	72	194.897.845,09	73	197.892.443,46	75	220.989.388,03	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (%)	99	100	100	30.407.459,27	100	52.071.643,56	100	53.452.292,24	100	51.689.128,46	100	54.973.339,35	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					579.800.234		553.919.924		571.258.222		592.390.686		674.455.563	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA					579.800.234		553.919.924		571.258.222		592.390.686		674.455.563	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
MANUSIA														
Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (%)	-	-	80	0	80	0	80	0	80	0	80	0	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (%)	-	-	85	579.800.234	85	553.919.924	85	571.258.222	85	592.390.686	85	674.455.563	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.579.274.942,54		4.120.173.804,02		4.240.888.652,78		4.252.397.174,32		5.035.219.284,95	
Meningkatnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Talawi)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	0	0	0	139.785.144,21	0	225.018.791,26	0	227.534.281,81	0	233.760.813,4	0	275.003.054,74	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN TALAWI
Meningkatnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Barangin)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	50.450.175,54	100	95.397.134,28	100	97.822.859,25	100	135.177.146,47	100	116.588.055,48	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN BARANGIN
Meningkatnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Lembah Segar)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	101.622.949,76	100	163.243.383,2	100	170.950.268,79	100	166.153.739,03	100	199.505.244,6	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN LEMBAH SEGAR
Meningkatnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Silungkang)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	153.769.889,48	100	239.143.747,6	100	242.758.727,07	100	249.219.181,52	100	292.081.544,68	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN SILUNGKANG
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Durian 1)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	234.277.014,65	100	360.859.078,49	100	372.948.394,94	100	369.924.573,32	100	441.018.051,31	7.01.0.00.0.00.01.0001 - KELURAHAN DURIAN 1
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Durian 2)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	270.262.205,59	100	397.205.057,79	100	412.123.549,27	100	409.701.653,16	100	485.437.698,76	7.01.0.00.0.00.01.0002 - KELURAHAN DURIAN 2
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Lubang Panjang)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	236.021.044,87	100	362.620.594,03	100	374.847.027,34	100	371.852.378,53	100	443.170.859,66	7.01.0.00.0.00.01.0003 - KELURAHAN LUBANG PANJANG
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Saringan)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	323.412.446,71	100	450.888.183,24	100	469.985.376,16	100	468.452.525,3	100	551.045.657,65	7.01.0.00.0.00.01.0004 - KELURAHAN SARINGAN
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Air Dingin)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	170.324.310,03	100	296.265.183,14	100	303.326.502,59	100	299.232.943,45	100	362.075.673,26	7.01.0.00.0.00.02.0001 - KELURAHAN AIR DINGIN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Aur Mulyo)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	176.255.818,14	100	302.256.160,33	100	309.783.817,84	100	305.789.475,61	100	369.397.449,19	7.01.0.00.0.00.02.0002 - KELURAHAN AUR MULYO
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Kubang Sirakuk Utara)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	170.324.310,03	100	296.265.183,14	100	303.326.502,59	100	299.232.943,45	100	362.075.673,26	7.01.0.00.0.00.02.0003 - KELURAHAN KUBANG SIRAKUK UTARA
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	180.893.273,94	100	306.940.112,02	100	314.832.368,83	100	310.915.596,98	100	375.121.863,59	7.01.0.00.0.00.02.0004 - KELURAHAN KUBANG SIRAKUK SELATAN
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Pasar)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	201.552.051,37	100	327.806.014,1	100	337.322.475,5	100	333.751.263,24	100	400.622.787,35	7.01.0.00.0.00.02.0005 - KELURAHAN PASAR
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Tanah Lapang)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	170.324.308,22	100	296.265.181,4	100	303.326.500,8	100	299.232.940,86	100	362.075.671,42	7.01.0.00.0.00.02.0006 - KELURAHAN TANAH LAPANG
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					987.680.374		435.946.616		492.256.030		476.018.597		552.287.724	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	0	0	100	987.680.374	100	435.946.616	100	492.256.030	100	476.018.597	100	552.287.724	8.01.1.05.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (%)	100	100	100	509.800.234	100	653.919.924	100	671.258.222	100	649.116.269	100	690.359.655	8.01.1.05.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					145.320.016		143.594.662		153.700.658		160.584.185		150.626.375	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (%)	100	-	100	145.320.016	70	143.594.662	75	153.700.658	80	160.584.185	85	150.626.375	8.01.1.05.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

C. Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Kota Sawahlunto dengan Baseline dan target kinerja Tahun 2026-2030

Arah kebijakan dan program pembangunan daerah Kota Sawahlunto untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan tahun 2026-2030 akan fokus pada diversifikasi ekonomi, pengembangan pariwisata berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Uraian masing-masing program pendukung dapat dijelaskan sebagai berikut :



Tabel 3.17

Arah kebijakan, Program Prioritas dan Target Kinerja dan pagu indikatif Pembangunan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Kota Sawahlunto Tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					2.812.800.624		2.530.975.787		3.769.024.119		3.490.623.223		3.209.150.897	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (%)	0	20	20,66	2.812.800.624	22,03	2.530.975.787	23,41	3.769.024.119	24,79	3.490.623.223	26,17	3.209.150.897	1.03.2.15.2.10.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (%)	44,11	45	45,32		46,74		47,7		48,91		51,03		1.03.2.15.2.10.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Kapasitas Air Baku (m3/detik) (m3/detik)	0,11	0,149	0,151		0,154		0,156		0,159		0,161		1.03.2.15.2.10.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					1.178.320.406		1.220.650.525		1.842.516.445		1.884.781.373		2.564.815.219	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%) (%)	49,67	50	52,5	1.178.320.406	55	1.220.650.525	57,5	1.842.516.445	60	1.884.781.373	62,5	2.564.815.219	1.03.2.15.2.10.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					7.438.401.872		9.103.252.625		11.055.098.668		10.654.883.580		12.345.754.484	
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	55,62	55,92	57,47	7.438.401.872	59,02	9.103.252.625	60,57	11.055.098.668	62,12	10.654.883.580	63,67	12.345.754.484	1.03.2.15.2.10.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					581.280.062		578.126.750		628.919.953		599.062.322		484.095.908	
Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Persentase pembangunan sesuai dengan rencana tata	75	77	80	581.280.062	83	578.126.750	85	628.919.953	88	599.062.322	90	484.095.908	1.03.2.15.2.10.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	ruang (RTRW / RDTR) (%)													
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					567.092.126		566.195.157		689.329.769		589.469.761		528.022.986	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	16,67	33,33	50	289.437.665	66,67	283.533.525	83,33	338.399.808	91,67	282.185.299	100	243.760.943	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Meningkatkan akses hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa)	Persentase hunian rusunawa yang dihuni MBR (%)	70	82	83	277.654.461	84	282.661.632	85	350.929.961	86	307.284.462	87	284.262.043	1.04.2.10.2.11.01.0001 - UPTD RUSUNAWA
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					1.006.400.312		1.015.487.894		1.048.711.621		926.072.543		994.117.904	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	0	10	20	1.006.400.312	40	1.015.487.894	60	1.048.711.621	80	926.072.543	100	994.117.904	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					290.344.066		201.816.511		305.852.522		307.717.206		430.119.885	
Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Luas kawasan permukiman rawan kumuh yang ditangani (%)	-	20	35	290.344.066	50	201.816.511	70	305.852.522	90	307.717.206	100	430.119.885	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					1.830.928.630		1.778.662.194		1.843.722.584		1.800.215.785		1.933.007.035	
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Konsumsi Listrik per Kapita (Kwh/Kapita)	1.237	1.237	1.353	1.830.928.630	1.469	1.778.662.194	1.585	1.843.722.584	1.707	1.800.215.785	1.820	1.933.007.035	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN
	Persentase Permukiman yang	84	85	86		87		88		89		90		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (%)													LINGKUNGAN HIDUP
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					139.359.048		151.599.564		171.394.599		209.937.919		192.950.922	
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	100	100	27.192.009	100	30.952.210	100	42.513.021	100	45.099.162	100	36.819.182	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	100	100	100	22.660.008	100	25.436.613	100	24.165.296	100	43.454.734	100	24.852.948	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (%)	100	100	100	48.719.017	100	54.929.274	100	62.650.767	100	74.407.838	100	85.254.815	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	0	0	35	40.788.014	50	40.281.467	65	42.065.515	80	46.976.185	95	46.023.977	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					90.640.031		104.627.188		125.301.535		129.823.254		138.071.931	
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	100	100	100	90.640.031	100	104.627.188	100	125.301.535	100	129.823.254	100	138.071.931	2.18.2.07.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					725.120.250		984.703.909		995.010.963		952.037.194		1.104.575.448	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Lulusan Pelatihan Yang Bekerja (%)	26,78	27	27,28	725.120.250	27,78	984.703.909	29,78	995.010.963	33	952.037.194	35	1.104.575.448	2.18.2.07.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					421.476.145		549.292.736		716.008.770		739.523.707		972.358.664	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (%)	43,32	44	45	421.476.145	47	549.292.736	50	716.008.770	55	739.523.707	65	972.358.664	2.18.2.07.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%) (%)	-	55,2	55,7		56,2		56,7		57,2		57,7		
	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) (%)	-	74,18	74,66		75,14		75,61		76,09		76,57		
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					422.382.183		583.462.879		608.056.468		658.239.991		644.335.678	
Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	91	91	91,2	422.382.183	91,48	583.462.879	91,66	608.056.468	91,85	658.239.991	92	644.335.678	2.18.2.07.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					176.600.078		209.770.639		270.740.816		287.991.251		336.918.524	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (%)	8,49	8,49	8,5	176.600.078	8,51	209.770.639	8,52	270.740.816	8,53	287.991.251	8,54	336.918.524	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					159.064.003		213.078.398		213.425.164		215.146.046		316.108.392	
Meningkatnya	Persentase	101,89	100	100	159.064.003	100	213.078.398	100	213.425.164	100	215.146.046	100	316.108.392	2.09.3.27.3.25.01.0000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Ketersediaan cadangan pangan (%)													- DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					134.443.212		147.082.235		183.976.151		195.203.719		201.252.749	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	91,1	91,2	91,2	134.443.212	91,25	147.082.235	91,3	183.976.151	91,35	195.203.719	91,4	201.252.749	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					100.305.217		102.313.594		105.490.680		155.391.255		160.751.650	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Penduduk Rawan Pangan yang ditangani (%)	2,7	2,7	2,7	100.305.217	5,4	102.313.594	8,1	105.490.680	10,8	155.391.255	13,5	160.751.650	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					77.645.210		78.249.341		79.356.360		78.734.213		80.928.113	
Meningkatnya pengawasan dan mutu dan kemandirian pangan	Persentase Tingkat Keamanan Produk Pangan Segar yang aman dari Cemaran Mikroba, Bahan kimia /Berbahaya dan Residu Pestisida (%)	96,3	96,3	96,5	77.645.210	96,7	78.249.341	96,8	79.356.360	96,9	78.734.213	97	80.928.113	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					81.928.857		52.313.594		62.650.767		69.239.069		73.638.363	
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Terelesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (%)	-	-	100	81.928.857	100	52.313.594	100	62.650.767	100	69.239.069	100	73.638.363	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK					0		770.870.100		851.002.100		796.672.680		1.270.648.211	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PEMBANGUNAN														
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (%)	-	-	-	0	100	770.870.100	100	851.002.100	100	796.672.680	100	1.270.648.211	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					80.817.611		82.313.594		82.650.767		89.239.069		82.843.159	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Direistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (Ha)	1	1	1	80.817.611	1	82.313.594	1	82.650.767	1	89.239.069	1	82.843.159	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.10.07 - PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT					60.331.999		111.032.526		111.600.877		107.893.952		192.047.954	
Meningkatnya tata kelola tanah ulayat	Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan (%)	-	-	14,29	60.331.999	29,18	111.032.526	43,77	111.600.877	55,41	107.893.952	70	192.047.954	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG					77.192.009		60.516.263		65.800.439		68.946.976		106.023.977	
Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola (%)	0	30	30	77.192.009	35	60.516.263	40	65.800.439	45	68.946.976	50	106.023.977	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					44.052.020		101.023.132		123.011.056		135.011.021		202.119.054	
Meningkatnya tertib pertanahan dar kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase bidang tanah yang sudah terdaftar / bersertifikat (%)	-	12,84	12,84	44.052.020	13,34	101.023.132	13,84	123.011.056	14,34	135.011.021	14,84	202.119.054	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					181.280.062		217.973.308		223.752.741		216.372.090		230.119.885	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRF	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	100	181.280.062	100	217.973.308	100	223.752.741	100	216.372.090	100	230.119.885	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					552.904.190		387.189.323		307.401.316		329.823.254		306.481.522	
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Nilai Indeks Udara Model EU (Indeks)	0,22	0,22	0,21	22.660.008	0,2	146.156.797	0,19	106.850.329	0,18	110.292.093	0,18	106.819.182	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase badan air yang memenuhi baku mutu (%)	7,14	7,14	14,29		21,43		28,57		35,71		42,86		
	Tutupan Lahan (Hektar)	0,19	0,19	0,21		0,22		0,24		0,26		0,28		
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data hasil pemantauan lingkungan sebagai dasar pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Persentase sampel uji kualitas lingkungan yang dianalisis tepat waktu (%)	100	100	100	530.244.182	100	241.032.526	100	200.550.987	100	219.531.161	100	199.662.340	1.04.2.10.2.11.01.0002 - UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					63.448.022		169.751.459		170.550.987		182.221.394		192.047.954	
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (%)	100	100	100	63.448.022	100	169.751.459	100	170.550.987	100	182.221.394	100	192.047.954	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					1.268.960.437		1.307.839.848		1.432.017.541		1.457.879.044		1.840.959.081	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya tata kelola persampahan	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) (%)	73,02	73,46	74,56	1.268.960.437	75,66	1.307.839.848	76,76	1.432.017.541	77,86	1.457.879.044	78,96	1.840.959.081	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					1.223.640.421		1.438.623.833		1.545.271.378		1.547.348.806		1.663.126.920	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (%)	14,28	16,5	20,5	1.223.640.421	24,7	1.438.623.833	30,5	1.545.271.378	36	1.547.348.806	42,5	1.663.126.920	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.15.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN					135.960.047		150.973.308		163.253.837		189.469.761		206.263.747	
Jumlah Perjalanan Kereta Api Wisata	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani (%)	70	70	60	135.960.047	70	150.973.308	80	163.253.837	90	189.469.761	100	206.263.747	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					622.188.206		539.265.964		591.485.470		592.015.615		667.019.883	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei) (%)	0	77	78	622.188.206	79	539.265.964	81	591.485.470	83	592.015.615	85	667.019.883	2.16.2.21.2.20.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					1.905.114.106		1.562.562.937		1.407.579.491		1.414.712.519		2.460.185.872	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks Domain Manajemen SPBE (Nilai) (Nilai)	2,27	2,27	2,3	1.905.114.106	2,33	1.562.562.937	2,36	1.407.579.491	2,39	1.414.712.519	2,42	2.460.185.872	2.16.2.21.2.20.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh	100	100	100		100		100		100		100		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Dinas Kominfo (%)													
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOOPERASI					349.260.086		289.770.639		294.028.234		295.319.066		299.155.851	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%)	7,25	9	10	349.260.086	11	289.770.639	12	294.028.234	13	295.319.066	14	299.155.851	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOOPERASI					281.280.062		244.378.646		269.002.193		273.097.672		284.095.908	
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)	54	54	56	281.280.062	58	244.378.646	60	269.002.193	62	273.097.672	64	284.095.908	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					238.152.056		274.378.646		223.752.741		259.646.507		276.143.862	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (%)	67	69	70	238.152.056	73	274.378.646	75	223.752.741	78	259.646.507	80	276.143.862	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOOPERASI					304.088.053		248.221.849		252.151.864		247.133.021		256.481.522	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (%)	0	10	10	304.088.053	20	248.221.849	30	252.151.864	40	247.133.021	50	256.481.522	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					850.326.310		993.042.797		928.228.870		998.070.612		1.288.305.420	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (%)	21	21	22	850.326.310	23	993.042.797	24	928.228.870	25	998.070.612	26	1.288.305.420	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Proporsi jumlah UKM non pertanian (*)	19,1	19,1	19,3		19,4		19,49		19,59		19,69		
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					462.856.090		452.849.037		459.553.179		450.991.624		466.939.067	
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (%)	10	11	12	462.856.090	13	452.849.037	14	459.553.179	15	450.991.624	16	466.939.067	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Rasio Kewirausahaan (%)	3,56	3,96	4,09		4,23		4,36		4,49		4,75		
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					335.368.115		235.411.173		250.603.070		242.336.740		266.939.067	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (%)	549,24	100	100	335.368.115	100	235.411.173	100	250.603.070	100	242.336.740	100	266.939.067	2.18.2.07.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					334.147.246		230.783.985		236.041.666		233.285.207		243.594.808	
Meningkatnya jangkauan promos penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (%)	30,88	37	45	334.147.246	46	230.783.985	47	236.041.666	48	233.285.207	49	243.594.808	2.18.2.07.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					328.768.037		330.783.985		341.101.973		381.752.555		320.915.090	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (%)	99,82	100	100	328.768.037	100	330.783.985	100	341.101.973	100	381.752.555	100	320.915.090	2.18.2.07.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					240.344.066		286.585.152		295.112.390		192.138.415		204.346.458	
Terkendalnya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha	100	100	100	240.344.066	100	286.585.152	100	295.112.390	100	192.138.415	100	204.346.458	2.18.2.07.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	dalam Membuka Usaha (%)													
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					212.964.337		222.294.550		246.088.778		255.281.123		289.910.701	
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (%)	100	100	100	212.964.337	100	222.294.550	100	246.088.778	100	255.281.123	100	289.910.701	2.18.2.07.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	4.445.031.724	100	4.455.589.698	100	4.770.371.933	100	4.815.887.887	100	5.352.345.303	2.22.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					372.216.059		373.942.700		382.482.421		370.363.082		412.581.241	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (%)	51,28	60	64,1	372.216.059	67,95	373.942.700	69,23	382.482.421	71,79	370.363.082	73,08	412.581.241	2.22.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					467.684.058		469.365.260		472.548.674		485.353.528		406.986.997	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (%)	57,14	59	62,5	467.684.058	64,29	469.365.260	66,07	472.548.674	67,86	485.353.528	69,64	406.986.997	2.22.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					208.620.055		283.097.579		225.542.763		261.723.679		334.023.616	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (%)	100	100	100	208.620.055	100	283.097.579	100	225.542.763	100	261.723.679	100	334.023.616	2.22.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN					345.320.016		345.774.395		1.049.337.479		1.050.095.548		1.755.942.432	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
CAGAR BUDAYA														
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (%)	63,92	65	67	345.320.016	70	345.774.395	74	1.049.337.479	78	1.050.095.548	82	1.755.942.432	2.22.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					2.263.399.429		2.211.981.378		2.282.578.543		2.219.287.532		2.373.560.298	
Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (%)	28.676	31.000	34.000	2.263.399.429	35.000	2.211.981.378	35.000	2.282.578.543	36.000	2.219.287.532	37.000	2.373.560.298	2.22.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					127.044.027		193.996.244		216.592.653		236.278.322		289.030.576	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produktifitas perikanan budidaya (Kg)	5,16	5,16	5,17	127.044.027	5,18	193.996.244	5,19	216.592.653	5,2	236.278.322	5,21	289.030.576	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					163.448.022		121.032.526		142.650.767		104.911.627		169.035.966	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	44,73	44,74	44,76	163.448.022	44,77	121.032.526	44,78	142.650.767	44,79	104.911.627	44,8	169.035.966	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					8.140.946.662		11.325.813.569		14.613.684.783		14.591.351.149		15.059.793.517	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah Tamu Asing Hotel Berbintang (ribu orang) (Orang)	0,041	0,1	0,128	8.140.946.662	0,158	11.325.813.569	0,183	14.613.684.783	0,213	14.591.351.149	0,269	15.059.793.517	3.26.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					1.025.120.250		641.109.247		687.609.648		487.594.406		1.865.250.768	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata		0	0	10	1.025.120.250	20	641.109.247	30	687.609.648	40	487.594.406	50	1.865.250.768	3.26.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					425.379.209		529.644.370		539.380.482		448.467.348		657.990.211	
Meningkatnya	Persentase Pelaku	0	0	21,92	425.379.209	28,77	529.644.370	35,62	539.380.482	42,47	448.467.348	49,32	657.990.211	3.26.2.19.0.00.01.0000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
kualitas ekosistem kreatif	Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (%)													- DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					354.384.019		556.673.060		562.650.767		464.911.627		673.638.363	
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (%)	0	0	48	354.384.019	55	556.673.060	62	562.650.767	68	464.911.627	75	673.638.363	3.26.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					871.957.100		874.508.912		941.999.039		945.546.031		1.049.346.676	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Jumlah Produksi Padi (Ton)	18.006,25	18.010	18.065	871.957.100	18.095	874.508.912	18.115	941.999.039	18.145	945.546.031	18.170	1.049.346.676	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Jumlah Produksi Kopi Robusta (Ton)	38,43	40,1	42,85		47,55		52,3		57,53		64,33		
	Jumlah Produksi Kakao (Ton)	592,7	592,7	596,32		598,16		600,01		601,87		603,74		
	Jumlah produksi daging sapi (Ton)	413,07	413,07	413,47		413,87		414,27		414,67		415,7		
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					866.971.898		1.367.128.588		1.230.297.420		1.224.990.487		1.462.641.990	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase Sawah yang Diairi (%)	2,2	2,5	2,5	866.971.898	2,5	1.367.128.588	2,5	1.230.297.420	2,5	1.224.990.487	2,5	1.462.641.990	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					147.742.548		224.948.454		246.713.267		272.628.833		317.565.441	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	-	2,5	2,5	147.742.548	2,75	224.948.454	3	246.713.267	3,25	272.628.833	3,5	317.565.441	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA					40.788.014		141.850.875		144.750.548		143.274.418		146.023.977	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PERTANIAN														
Meningkatnya pengendalian dan penanggulungan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%)	5,24	5,5	6,13	40.788.014	6,51	141.850.875	6,9	144.750.548	7,28	143.274.418	7,66	146.023.977	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					172.216.059		183.097.579		196.902.412		199.062.322		211.710.294	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase Penyuluh yang Naik Jenjang jabatan (%)	5	5	5	172.216.059	5	183.097.579	5	196.902.412	5	199.062.322	5	211.710.294	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					2.841.564.978		3.012.658.838		3.104.518.908		3.072.945.057		3.949.265.828	
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					906.400.312		959.082.555		1.074.013.156		1.038.586.030		1.196.623.402	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien,merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	14,29	14,29	28,57	906.400.312	28,57	959.082.555	42,86	1.074.013.156	42,86	1.038.586.030	42,86	1.196.623.402	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					552.904.190		592.887.398		571.258.222		519.700.454		819.226.791	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (%)	69,76	72,09	74,42	552.904.190	76,74	592.887.398	79,07	571.258.222	81,40	519.700.454	83,72	819.226.791	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					861.080.296		959.082.555		918.763.704		968.409.283		980.719.311	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	800.000.000	800.000.000	800.000.000	861.080.296	900.000.000	959.082.555	900.000.000	918.763.704	1.000.000.000	968.409.283	1.000.000.000	980.719.311	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					249.260.086		252.849.037		272.978.344		276.956.275		308.360.646	
Meningkatnya tertib	Persentase	100	100	100	249.260.086	100	252.849.037	100	272.978.344	100	276.956.275	100	308.360.646	2.17.3.30.3.31.01.0000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
niaga dan mutu produk	penanganan pengaduan konsumen (%)													- DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					271.920.094		248.757.293		267.505.482		269.293.015		644.335.678	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (%)	80	82	84	271.920.094	87	248.757.293	90	267.505.482	93	269.293.015	95	644.335.678	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					892.804.307		867.533.766		899.486.018		878.470.683		943.491.529	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri (%)	50	53	55	892.804.307	58	867.533.766	60	899.486.018	62	878.470.683	64	943.491.529	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Proporsi jumlah IKM (*)	3,92	4	4,08		4,16		4,23		4,31		4,39		
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					168.128.006		226.156.797		235.800.439		243.274.418		355.228.772	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Persentase pertumbuhan informasi industri (%)	10	15	18	168.128.006	25	226.156.797	32	235.800.439	40	243.274.418	45	355.228.772	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					651.415.176		362.241.688		375.564.775		387.665.802		416.420.187	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (%)	-	65	70	651.415.176	75	362.241.688	80	375.564.775	85	387.665.802	91	416.420.187	4.01.2.16.2.20.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (%)	-	70	75		80		85		90		94		
	Indeks Akses	4.75	4.78	4.8		4.82		4.83		4.85		4.87		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Keuangan Daerah (Indeks)													
	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) (Indeks)	82	84	88		90		92		94		94		
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					349.523.172		351.061.656		378.624.588		375.329.260		669.188.626	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (%)	100	100	100	349.523.172	100	351.061.656	100	378.624.588	100	375.329.260	100	669.188.626	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (%)	100	100	100		100		100		100		100		
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					379.702.861,79		317.929.538,98		463.718.475,31		438.874.786,81		451.393.064,53	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	100	100	100	117.593.253,32	100	105.829.857,05	100	154.871.162,09	100	146.355.905,65	100	150.093.708,52	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	100	100	100	136.815.951,69	100	105.797.248,38	100	155.318.667,57	100	146.192.184,76	100	151.014.188,06	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (%)	100	100	100	125.293.656,78	100	106.302.433,55	100	153.528.645,65	100	146.326.696,4	100	150.285.167,95	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.02 - KEUANGAN					73.770.134.272		71.089.505.179		71.606.936.984		70.924.895.648		75.463.997.119	
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					64.322.684.179		61.910.846.073		61.990.690.886		61.530.526.620		65.480.235.682	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	10	10	10	758.978.229	40	748.978.229	40	748.978.229	40	748.978.229	40	748.978.229	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (%)	47	47	47		30		30		30		30		
Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Penurunan SILPA (%)	4,5	4,5	4,5	63.503.868.325	4	61.102.868.325	3,5	61.182.713.138	3	60.724.548.872	3	64.674.257.934	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)	100	100	100		100		100		100		100		
Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (%)	100	100	100	59.837.625	100	58.999.519	100	58.999.519	100	56.999.519	100	56.999.519	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					318.883.357		309.810.753		321.205.453		313.716.354		336.985.676	
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)	3	3	3	318.883.357	3	309.810.753	3	321.205.453	3	313.716.354	3	336.985.676	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					474.349.125		460.853.340		577.803.361		566.663.045		501.276.899	
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	10,24	11,03	11,6	375.121.895	12	361.626.110	12,62	408.626.110	13,09	397.485.794	13,62	380.099.648	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (%)	25	50	75	52.434.730	100	52.434.730	100	96.384.751	100	96.384.751	100	71.384.751	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Cakupan Pembinaan Dan	100	100	100	46.792.500	100	46.792.500	100	72.792.500	100	72.792.500	100	49.792.500	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
dan Pelaporan	Pengawasan Pengelolaan Pendapatan (%)													PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					245.320.016		266.263.886		276.970.943		177.028.464		187.445.556	
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (%)	0	0	0	245.320.016	87	266.263.886	88	276.970.943	88	177.028.464	89	187.445.556	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					500.732.265		548.596.133		581.660.458		579.315.315		534.580.288	
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindakanjnt Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (%)	76	77	78	500.732.265	79	548.596.133	80	581.660.458	81	579.315.315	82	534.580.288	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					215.305.163		207.541.585		223.932.335		227.416.322		255.484.074	
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan asistensi	Level Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (PK APIP) (Level)	3	3	3,1	215.305.163	3,2	207.541.585	3,3	223.932.335	3,4	227.416.322	3,5	255.484.074	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.579.274.942,54		4.120.173.804,02		4.240.888.652,78		4.252.397.174,32		5.035.219.284,95	
Meningkatnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Talawi)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	0	0	0	139.785.144,21	0	225.018.791,26	0	227.534.281,81	0	233.760.813,4	0	275.003.054,74	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN TALAWI
Meningkatnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Barangin)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	50.450.175,54	100	95.397.134,28	100	97.822.859,25	100	135.177.146,47	100	116.588.055,48	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN BARANGIN
Meningkatnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Lembah Segar)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	101.622.949,76	100	163.243.383,2	100	170.950.268,79	100	166.153.739,03	100	199.505.244,6	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN LEMBAH SEGAR
Meningkatnya	Persentase	100	100	100	153.769.889,48	100	239.143.747,6	100	242.758.727,07	100	249.219.181,52	100	292.081.544,68	7.01.0.00.0.00.03.0000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Silungkang)	Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)													- KECAMATAN SILUNGKANG
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Durian 1)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	234.277.014,65	100	360.859.078,49	100	372.948.394,94	100	369.924.573,32	100	441.018.051,31	7.01.0.00.0.00.01.0001 - KELURAHAN DURIAN 1
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Durian 2)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	270.262.205,59	100	397.205.057,79	100	412.123.549,27	100	409.701.653,16	100	485.437.698,76	7.01.0.00.0.00.01.0002 - KELURAHAN DURIAN 2
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Lubang Panjang)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	236.021.044,87	100	362.620.594,03	100	374.847.027,34	100	371.852.378,53	100	443.170.859,66	7.01.0.00.0.00.01.0003 - KELURAHAN LUBANG PANJANG
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Saringan)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	323.412.446,71	100	450.888.183,24	100	469.985.376,16	100	468.452.525,3	100	551.045.657,65	7.01.0.00.0.00.01.0004 - KELURAHAN SARINGAN
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Air Dingin)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	170.324.310,03	100	296.265.183,14	100	303.326.502,59	100	299.232.943,45	100	362.075.673,26	7.01.0.00.0.00.02.0001 - KELURAHAN AIR DINGIN
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Aur Mulyo)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	176.255.818,14	100	302.256.160,33	100	309.783.817,84	100	305.789.475,61	100	369.397.449,19	7.01.0.00.0.00.02.0002 - KELURAHAN AUR MULYO
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Kubang Sirakuk Utara)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	170.324.310,03	100	296.265.183,14	100	303.326.502,59	100	299.232.943,45	100	362.075.673,26	7.01.0.00.0.00.02.0003 - KELURAHAN KUBANG SIRAKUK UTARA
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	180.893.273,94	100	306.940.112,02	100	314.832.368,83	100	310.915.596,98	100	375.121.863,59	7.01.0.00.0.00.02.0004 - KELURAHAN KUBANG SIRAKUK SELATAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kubang Sirakuk Selatan)														
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Pasar)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	201.552.051,37	100	327.806.014,1	100	337.322.475,5	100	333.751.263,24	100	400.622.787,35	7.01.0.00.0.00.02.0005 - KELURAHAN PASAR
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Tanah Lapang)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	170.324.308,22	100	296.265.181,4	100	303.326.500,8	100	299.232.940,86	100	362.075.671,42	7.01.0.00.0.00.02.0006 - KELURAHAN TANAH LAPANG
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					110.640.031		115.908.256		128.451.206		123.858.603		110.457.545	
Meningkatnya ketahanan ekonomi sosial,dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (%)	100	100	100	110.640.031	100	115.908.256	100	128.451.206	100	123.858.603	100	110.457.545	8.01.1.05.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					353.200.156		435.946.616		492.256.030		476.018.597		552.287.724	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (%)	100	100	100	353.200.156	100	435.946.616	100	492.256.030	100	476.018.597	100	552.287.724	8.01.1.05.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



D. Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah untuk Program Penanggulangan Stunting Kota Sawahlunto dengan Baseline dan target kinerja Tahun 2026-2030

Arah kebijakan dan program pembangunan daerah Kota Sawahlunto untuk penanggulangan stunting tahun 2026-2030 akan fokus pada program pembangunan daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan, dengan mengedepankan pendekatan lintas sektor. Upaya yang dilakukan mencakup peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, penyediaan gizi seimbang melalui intervensi spesifik dan sensitif, penguatan ketahanan pangan keluarga, peningkatan kualitas sanitasi dan air bersih, serta optimalisasi pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Uraian masing-masing program pendukung dapat dijelaskan sebagai berikut :



Tabel 3.18

Arah kebijakan, Program Prioritas dan Target Kinerja dan pagu indikatif Pembangunan Daerah terhadap Penanggulangan Stunting Kota Sawahlunto Tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					9.266.923.800		31.360.390.455		41.646.172.769		42.562.317.458		49.988.359.751	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	67,35	69,39	69,59	9.266.923.800	69,79	31.360.390.455	69,99	41.646.172.769	70,19	42.562.317.458	70,39	49.988.359.751	1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN
	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	51,28	60,16	60,31		60,46		60,61		60,76		60,91		
	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	73,78	74,72	74,92		2		75,32		75,52		75,72		
	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	64,6	65,01	65,16		65,31		65,46		65,61		65,76		
	Anak putus sekolah yang melanjutkan pendidikan ke pendidikan non formal (%)	70	71	72		72,5		73		73,5		73,75		
	Lulusan SD yang hafal alqur'an juz 30 (%)	32	33	34		35		36		37		38		
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					250.000.000		230.516.263		231.325.384		234.619.534		136.819.182	
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (%)	17,48	17,58	18,58	250.000.000	20	230.516.263	20	231.325.384	25	234.619.534	25	136.819.182	1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN
1.01.04 - PROGRAM					217.832.041		202.065.052		229.776.590		229.823.254		138.071.931	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN														
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (%)	90	92	94	217.832.041	96	202.065.052	96	229.776.590	98	229.823.254	100	138.071.931	1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					28.807.608.571		28.668.672.027		30.447.445.469		30.426.187.128		32.740.351.429	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	94	95	95	14.270.754.528	95	13.919.022.418	95	14.802.217.250	95	14.501.926.985	95	14.912.288.313	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	268	134	134		134		134		134		0		
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (UPTD RSUD)	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	94	95	95	13.867.924.772	95	14.041.840.503	95	14.845.994.351	95	15.074.102.546	95	16.833.470.949	1.02.2.14.0.00.01.0001 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	268	134	134		134		134		134		0		
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (UPTD INSTALASI FARMASI KOTA)	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	94	95	95	668.929.271	95	707.809.106	95	799.233.868	95	850.157.597	95	994.592.167	1.02.2.14.0.00.01.0008 - UPTD INSTALASI FARMASI KOTA
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	268	134	134		134		134		134		0		1.02.2.14.0.00.01.0008 - UPTD INSTALASI FARMASI KOTA
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					1.531.009.571		1.555.731.588		2.753.998.799		2.795.664.779		2.821.269.419	
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	0	0	35	307.436.192	36	312.371.135	37	605.474.917	38	614.128.902	39	635.116.374	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(%)													KELUARGA BERENCANA
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan (UPTD RSUD)	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (%)	0	0	35	1.223.573.379	36	1.243.360.453	37	2.148.523.882	38	2.181.535.877	39	2.186.153.045	1.02.2.14.0.00.01.0001 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					146.758.233		95.330.626		100.289.894		109.450.752		113.129.181	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (%)	0	0	55	146.758.233	56	95.330.626	57	100.289.894	58	109.450.752	59	113.129.181	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					216.944.143		265.659.714		278.554.687		281.298.174		202.458.324	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%)	0	0	65	216.944.143	66	265.659.714	67	278.554.687	68	281.298.174	69	202.458.324	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					2.812.800.624		2.530.975.787		3.769.024.119		3.490.623.223		3.209.150.897	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (%)	0	20	20,66	2.812.800.624	22,03	2.530.975.787	23,41	3.769.024.119	24,79	3.490.623.223	26,17	3.209.150.897	1.03.2.15.2.10.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (%)	44,11	45	45,32		46,74		47,7		48,91		51,03		1.03.2.15.2.10.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Kapasitas Air Baku (m3/detik) (m3/detik)	0,11	0,149	0,151		0,154		0,156		0,159		0,161		1.03.2.15.2.10.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR					1.178.320.406		1.220.650.525		1.842.516.445		1.884.781.373		2.564.815.219	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
MINUM														
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%) (%)	49,67	50	52,5	1.178.320.406	55	1.220.650.525	57,5	1.842.516.445	60	1.884.781.373	62,5	2.564.815.219	1.03.2.15.2.10.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					1.106.400.312		1.071.893.232		1.184.512.059		1.125.134.865		1.380.719.311	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ((%))	8,19	15,95	18,9	1.106.400.312	21,9	1.071.893.232	24,91	1.184.512.059	27,91	1.125.134.865	32,91	1.380.719.311	1.03.2.15.2.10.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					7.438.401.872		9.103.252.625		11.055.098.668		10.654.883.580		12.345.754.484	
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	55,62	55,92	57,47	7.438.401.872	59,02	9.103.252.625	60,57	11.055.098.668	62,12	10.654.883.580	63,67	12.345.754.484	1.03.2.15.2.10.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					567.092.126		566.195.157		689.329.769		589.469.761		528.022.986	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	16,67	33,33	50	289.437.665	66,67	283.533.525	83,33	338.399.808	91,67	282.185.299	100	243.760.943	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Meningkatkan akses hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa)	Persentase hunian rusunawa yang dihuni MBR (%)	70	82	83	277.654.461	84	282.661.632	85	350.929.961	86	307.284.462	87	284.262.043	1.04.2.10.2.11.01.0001 - UPTD RUSUNAWA
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					1.006.400.312		1.015.487.894		1.048.711.621		926.072.543		994.117.904	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	0	10	20	1.006.400.312	40	1.015.487.894	60	1.048.711.621	80	926.072.543	100	994.117.904	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN					290.344.066		201.816.511		305.852.522		307.717.206		430.119.885	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PERMUKIMAN KUMUH														
Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Luas kawasan permukiman rawan kumuh yang ditangani (%)	-	20	35	290.344.066	50	201.816.511	70	305.852.522	90	307.717.206	100	430.119.885	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					1.830.928.630		1.778.662.194		1.843.722.584		1.800.215.785		1.933.007.035	
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Konsumsi Listrik per Kapita (Kwh/Kapita)	1.237	1.237	1.353	1.830.928.630	1.469	1.778.662.194	1.585	1.843.722.584	1.707	1.800.215.785	1.820	1.933.007.035	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (%)	84	85	86		87		88		89		90		
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					139.359.048		151.599.564		171.394.599		209.937.919		192.950.922	
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	100	100	27.192.009	100	30.952.210	100	42.513.021	100	45.099.162	100	36.819.182	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	100	100	100	22.660.008	100	25.436.613	100	24.165.296	100	43.454.734	100	24.852.948	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (%)	100	100	100	48.719.017	100	54.929.274	100	62.650.767	100	74.407.838	100	85.254.815	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	0	0	35	40.788.014	50	40.281.467	65	42.065.515	80	46.976.185	95	46.023.977	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					815.760.281		984.703.909		905.509.867		978.939.522		1.028.431.586	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (%)	100	100	100	453.200.156	100	535.946.616	100	497.505.482	100	532.744.179	100	560.239.770	1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana (%)	100	100	100	271.920.094	100	311.567.970	100	293.503.289	100	309.646.507	100	326.143.862	1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (%)	100	100	100	90.640.031	100	137.189.323	100	114.501.096	100	136.548.836	100	142.047.954	1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					222.068.076		226.256.293		252.393.092		259.213.764		277.984.821	
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (%)	100	100	100	9.064.003	100	8.718.932	100	8.950.110	100	8.654.884	100	9.204.795	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%)	100	100	100	213.004.073	100	217.537.361	100	243.442.982	100	250.558.880	100	268.780.026	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					272.656.757		845.364.660		954.556.902		915.377.142		1.187.881.113	
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti rehabilitasi sosial (%)	100	100	100	272.656.757	100	845.364.660	100	954.556.902	100	915.377.142	100	1.187.881.113	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang	100	100	100		100		100		100				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Melaksanakan Penanganan Korban Bencana pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (%)													
	persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkatkan kompetensinya dalam pelayanan sosial (%)	76	76	76		81		87		93		100		
	persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					589.559.034		1.028.801.117		1.309.803.368		1.313.682.164		1.422.777.031	
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	71	71	75	589.559.034	85	1.028.801.117	95	1.309.803.368	100	1.313.682.164	100	1.422.777.031	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	60	60	66		73		80		88		97		
	persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang	0	45	51		56		61		67		74		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)													
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					171.595.404		394.955.513		400.304.204		439.927.815		506.149.724	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (%)	100	100	100	171.595.404	100	394.955.513	100	400.304.204	100	439.927.815	100	506.149.724	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (%)	50	50	54		56		58		60		62		
	persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%)	2,6	2,6	2,7		2,97		3,2		3,5		3,8		
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					181.280.062		375.033.489		424.470.830		459.038.637		435.025.288	
Meningkatnya perlindungan sosiaal korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (%)	100	100	100	181.280.062	100	375.033.489	100	424.470.830	100	459.038.637	100	435.025.288	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkatkan kesiapsiagaannya (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	persentase	100	100	100		100		100		100		100		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial (%)													
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					176.600.078		209.770.639		270.740.816		287.991.251		336.918.524	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (%)	8,49	8,49	8,5	176.600.078	8,51	209.770.639	8,52	270.740.816	8,53	287.991.251	8,54	336.918.524	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					117.832.041		115.089.907		120.826.480		121.168.370		231.628.574	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	117.832.041	100	115.089.907	100	120.826.480	100	121.168.370	100	231.628.574	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					244.432.119		364.451.371		411.526.041		437.746.702		512.116.156	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesejahteraan gender, Pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (%)	100	100	100	244.432.119	100	364.451.371	100	411.526.041	100	437.746.702	100	512.116.156	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					156.108.030		191.112.843		202.881.510		209.436.675		328.029.039	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	persentase desa/kelurahan ramah anak (%)	100	100	100	156.108.030	100	191.112.843	100	202.881.510	100	209.436.675	100	328.029.039	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					157.289.481		272.243.786		307.408.385		326.995.119		382.548.818	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	157.289.481	100	272.243.786	100	307.408.385	100	326.995.119	100	382.548.818	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					159.064.003		213.078.398		213.425.164		215.146.046		316.108.392	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Ketersedian cadangan pangan (%)	101,89	100	100	159.064.003	100	213.078.398	100	213.425.164	100	215.146.046	100	316.108.392	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					134.443.212		147.082.235		183.976.151		195.203.719		201.252.749	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	91,1	91,2	91,2	134.443.212	91,25	147.082.235	91,3	183.976.151	91,35	195.203.719	91,4	201.252.749	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					100.305.217		102.313.594		105.490.680		155.391.255		160.751.650	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Penduduk Rawan Pangan yang ditangani (%)	2,7	2,7	2,7	100.305.217	5,4	102.313.594	8,1	105.490.680	10,8	155.391.255	13,5	160.751.650	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					77.645.210		78.249.341		79.356.360		78.734.213		80.928.113	
Menigkatnya pengawasan dan mutu dan kemanan pangan	Persentase Tingkat Keamanan Produk Pangan Segar yang aman dari Cemaran Mikroba, Bahan kimia /Berbahaya dan Residu	96,3	96,3	96,5	77.645.210	96,7	78.249.341	96,8	79.356.360	96,9	78.734.213	97	80.928.113	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pestisida (%)													
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					293.821.684		255.306.032		256.868.914		303.613.316		350.518.609	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase terselenggaranya pendaftaran penduduk (%)	95,91	100	100	293.821.684	100	255.306.032	100	256.868.914	100	303.613.316	100	350.518.609	2.12.5.04.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					196.951.536		229.872.293		236.206.688		258.680.111		267.010.911	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase terselenggaranya pencatatan sipil (%)	35,47	100	100	196.951.536	100	229.872.293	100	236.206.688	100	258.680.111	100	267.010.911	2.12.5.04.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					111.058.084		212.182.964		213.563.891		214.046.876		216.295.249	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (%)	100	100	100	111.058.084	100	212.182.964	100	213.563.891	100	214.046.876	100	216.295.249	2.12.5.04.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					353.200.156		399.541.278		441.481.633		475.982.502		573.837.048	
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	100	100	100	353.200.156	100	399.541.278	100	441.481.633	100	475.982.502	100	573.837.048	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)	0	0	50		50		60		60		70		
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					116.108.974		111.688.651		114.650.009		110.868.193		117.912.509	
Terkendalnya pertambahan jumlah penduduk	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	75,1	80,4	83,8	116.108.974	86	111.688.651	87,4	114.650.009	88,3	110.868.193	88,9	117.912.509	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(IPBK) (Indeks)					100		100		100		100		KELUARGA BERENCANA
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri (%)	100	100	100										
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					227.249.811		295.756.028		316.855.026		389.910.453		540.099.585	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pmbinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (%)	15,2	15	14,8	227.249.811	14,6	295.756.028	14,4	316.855.026	14,2	389.910.453	14,1	540.099.585	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	82	82,3	82,6		82,9		83.20`		83,5		83,8		
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					364.912.182		643.405.713		557.813.793		539.413.888		573.687.033	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	56,9	57,7	58,5	364.912.182	59,3	643.405.713	60,1	557.813.793	60,8	539.413.888	61,5	573.687.033	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	90,2	91,1	91,8		92,5		93,1		93,7		94,3		
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					622.188.206		539.265.964		591.485.470		592.015.615		667.019.883	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei) (%)	0	77	78	622.188.206	79	539.265.964	81	591.485.470	83	592.015.615	85	667.019.883	2.16.2.21.2.20.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					1.905.114.106		1.562.562.937		1.407.579.491		1.414.712.519		2.460.185.872	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks Domain Manajemen SPBE (Nilai) (Nilai)	2,27	2,27	2,3	1.905.114.106	2,33	1.562.562.937	2,36	1.407.579.491	2,39	1.414.712.519	2,42	2.460.185.872	2.16.2.21.2.20.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	100	100	100		100		100		100		100		
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					850.326.310		993.042.797		928.228.870		998.070.612		1.288.305.420	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (%)	21	21	22	850.326.310	23	993.042.797	24	928.228.870	25	998.070.612	26	1.288.305.420	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Proporsi jumlah UKM non pertanian (*)	19,1	19,1	19,3		19,4		19,49		19,59		19,69		
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					462.856.090		452.849.037		459.553.179		450.991.624		466.939.067	
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (%)	10	11	12	462.856.090	13	452.849.037	14	459.553.179	15	450.991.624	16	466.939.067	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Rasio Kewirausahaan (%)	3,56	3,96	4,09		4,23		4,36		4,49		4,75		
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					266.824.997		268.061.216		270.826.480		247.133.021		388.698.306	
Tercapainya kolaborasi integrasi,dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase Data Sektoral Yang Memenuhi Standar Data dan Dapat Diakses Secara Online (%)	70	75	80	266.824.997	85	268.061.216	90	270.826.480	95	247.133.021	100	388.698.306	2.16.2.21.2.20.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					127.044.027		193.996.244		216.592.653		236.278.322		289.030.576	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produktifitas perikanan budidaya (Kg)	5,16	5,16	5,17	127.044.027	5,18	193.996.244	5,19	216.592.653	5,2	236.278.322	5,21	289.030.576	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.25.06 - PROGRAM					163.448.022		121.032.526		142.650.767		104.911.627		169.035.966	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN														
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	44,73	44,74	44,76	163.448.022	44,77	121.032.526	44,78	142.650.767	44,79	104.911.627	44,8	169.035.966	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					871.957.100		874.508.912		941.999.039		945.546.031		1.049.346.676	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Jumlah Produksi Padi (Ton)	18.006,25	18.010	18.065	871.957.100	18.095	874.508.912	18.115	941.999.039	18.145	945.546.031	18.170	1.049.346.676	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Jumlah Produksi Kopi Robusta (Ton)	38,43	40,1	42,85		47,55		52,3		57,53		64,33		
	Jumlah Produksi Kakao (Ton)	592,7	592,7	596,32		598,16		600,01		601,87		603,74		
	Jumlah produksi daging sapi (Ton)	413,07	413,07	413,47		413,87		414,27		414,67		415,7		
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					866.971.898		1.367.128.588		1.230.297.420		1.224.990.487		1.462.641.990	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase Sawah yang Diairi (%)	2,2	2,5	2,5	866.971.898	2,5	1.367.128.588	2,5	1.230.297.420	2,5	1.224.990.487	2,5	1.462.641.990	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					147.742.548		224.948.454		246.713.267		272.628.833		317.565.441	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	-	2,5	2,5	147.742.548	2,75	224.948.454	3	246.713.267	3,25	272.628.833	3,5	317.565.441	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					40.788.014		141.850.875		144.750.548		143.274.418		146.023.977	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%)	5,24	5,5	6,13	40.788.014	6,51	141.850.875	6,9	144.750.548	7,28	143.274.418	7,66	146.023.977	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN					172.216.059		183.097.579		196.902.412		199.062.322		211.710.294	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PERTANIAN														
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase Penyuluh yang Naik Jenjang jabatan (%)	5	5	5	172.216.059	5	183.097.579	5	196.902.412	5	199.062.322	5	211.710.294	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					906.400.312		959.082.555		1.074.013.156		1.038.586.030		1.196.623.402	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien,merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	14,29	14,29	28,57	906.400.312	28,57	959.082.555	42,86	1.074.013.156	42,86	1.038.586.030	42,86	1.196.623.402	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					552.904.190		592.887.398		571.258.222		519.700.454		819.226.791	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (%)	69,76	72,09	74,42	552.904.190	76,74	592.887.398	79,07	571.258.222	81,40	519.700.454	83,72	819.226.791	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					861.080.296		959.082.555		918.763.704		968.409.283		980.719.311	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	800.000.000	800.000.000	800.000.000	861.080.296	900.000.000	959.082.555	900.000.000	918.763.704	1.000.000.000	968.409.283	1.000.000.000	980.719.311	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					249.260.086		252.849.037		272.978.344		276.956.275		308.360.646	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	100	100	100	249.260.086	100	252.849.037	100	272.978.344	100	276.956.275	100	308.360.646	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					9.496.794.967		9.225.771.761		9.364.241.233		9.340.422.954		9.032.356.875	
Meningkatnya	Efektivitas	-	70	75	9.496.794.967	80	9.225.771.761	85	9.364.241.233	88	9.340.422.954	95	9.032.356.875	4.01.2.16.2.20.01.0000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
kualitas kebijakan pengelolaan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (%)													- SEKRETARIAT DAERAH
	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan (*)	-	70	75		80		85		88		95		
	Indeks Reformasi Hukum (*)	97,5	72	73,18		74,21		75,24		76,27		77,3		
	Indeks Zakat Nasional (IZN) (Poin)	0,61	0,64	0,67		0,7		0,73		0,76		0,79		
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					651.415.176		362.241.688		375.564.775		387.665.802		416.420.187	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (%)	-	65	70	651.415.176	75	362.241.688	80	375.564.775	85	387.665.802	91	416.420.187	4.01.2.16.2.20.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (%)	-	70	75		80		85		90		94		
	Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)	4,75	4,78	4,8		4,82		4,83		4,85		4,87		
	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) (Indeks)	82	84	88		90		92		94		94		
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					349.523.172		351.061.656		378.624.588		375.329.260		669.188.626	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (%)	100	100	100	349.523.172	100	351.061.656	100	378.624.588	100	375.329.260	100	669.188.626	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (%)	100	100	100		100		100		100		100		
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN					379.702.861,79		317.929.538,98		463.718.475,31		438.874.786,81		451.393.064,53	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAERAH														
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	100	100	100	117.593.253,32	100	105.829.857,05	100	154.871.162,09	100	146.355.905,65	100	150.093.708,52	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	100	100	100	136.815.951,69	100	105.797.248,38	100	155.318.667,57	100	146.192.184,76	100	151.014.188,06	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (%)	100	100	100	125.293.656,78	100	106.302.433,55	100	153.528.645,65	100	146.326.696,4	100	150.285.167,95	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					64.322.684.179		61.910.846.073		61.990.690.886		61.530.526.620		65.480.235.682	
Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	10	10	10	758.978.229	40	748.978.229	40	748.978.229	40	748.978.229	40	748.978.229	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (%)	47	47	47		30		30		30		30		
Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Penurunan SILPA (%)	4,5	4,5	4,5	63.503.868.325	4	61.102.868.325	3,5	61.182.713.138	3	60.724.548.872	3	64.674.257.934	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)	100	100	100		100		100		100		100		
Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (%)	100	100	100	59.837.625	100	58.999.519	100	58.999.519	100	56.999.519	100	56.999.519	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														DAERAH
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					474.349.125		460.853.340		577.803.361		566.663.045		501.276.899	
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	10,24	11,03	11,6	375.121.895	12	361.626.110	12,62	408.626.110	13,09	397.485.794	13,62	380.099.648	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (%)	25	50	75	52.434.730	100	52.434.730	100	96.384.751	100	96.384.751	100	71.384.751	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan (%)	100	100	100	46.792.500	100	46.792.500	100	72.792.500	100	72.792.500	100	49.792.500	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					500.732.265		548.596.133		581.660.458		579.315.315		534.580.288	
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindakanj Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (%)	76	77	78	500.732.265	79	548.596.133	80	581.660.458	81	579.315.315	82	534.580.288	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					215.305.163		207.541.585		223.932.335		227.416.322		255.484.074	
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan asistensi	Level Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (PK APIP) (Level)	3	3	3,1	215.305.163	3,2	207.541.585	3,3	223.932.335	3,4	227.416.322	3,5	255.484.074	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.579.274.942,54		4.120.173.804,02		4.240.888.652,78		4.252.397.174,32		5.035.219.284,95	
Meningkatnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Talawi)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	0	0	0	139.785.144,21	0	225.018.791,26	0	227.534.281,81	0	233.760.813,4	0	275.003.054,74	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN TALAWI
Meningkatnya	Persentase	100	100	100	50.450.175.54	100	95.397.134.28	100	97.822.859.25	100	135.177.146.47	100	116.588.055,48	7.01.0.00.0.00.01.0000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Barangin)	Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)													- KECAMATAN BARANGIN
Meningkatnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Lembah Segar)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	101.622.949,76	100	163.243.383,2	100	170.950.268,79	100	166.153.739,03	100	199.505.244,6	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN LEMBAH SEGAR
Meningkatnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Silungkang)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	153.769.889,48	100	239.143.747,6	100	242.758.727,07	100	249.219.181,52	100	292.081.544,68	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN SILUNGKANG
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Durian 1)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	234.277.014,65	100	360.859.078,49	100	372.948.394,94	100	369.924.573,32	100	441.018.051,31	7.01.0.00.0.00.01.0001 - KELURAHAN DURIAN 1
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Durian 2)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	270.262.205,59	100	397.205.057,79	100	412.123.549,27	100	409.701.653,16	100	485.437.698,76	7.01.0.00.0.00.01.0002 - KELURAHAN DURIAN 2
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Lubang Panjang)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	236.021.044,87	100	362.620.594,03	100	374.847.027,34	100	371.852.378,53	100	443.170.859,66	7.01.0.00.0.00.01.0003 - KELURAHAN LUBANG PANJANG
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Saringan)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	323.412.446,71	100	450.888.183,24	100	469.985.376,16	100	468.452.525,3	100	551.045.657,65	7.01.0.00.0.00.01.0004 - KELURAHAN SARINGAN
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Air Dingin)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	170.324.310,03	100	296.265.183,14	100	303.326.502,59	100	299.232.943,45	100	362.075.673,26	7.01.0.00.0.00.02.0001 - KELURAHAN AIR DINGIN
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Aur Mulyo)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	176.255.818,14	100	302.256.160,33	100	309.783.817,84	100	305.789.475,61	100	369.397.449,19	7.01.0.00.0.00.02.0002 - KELURAHAN AUR MULYO
Meningkatnya kegiatan pemberdavaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Kumbang Sirakuk)	Persentase Lembaga Kemasarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	170.324.310,03	100	296.265.183,14	100	303.326.502,59	100	299.232.943,45	100	362.075.673,26	7.01.0.00.0.00.02.0003 - KELURAHAN KUBANG SIRAKUK

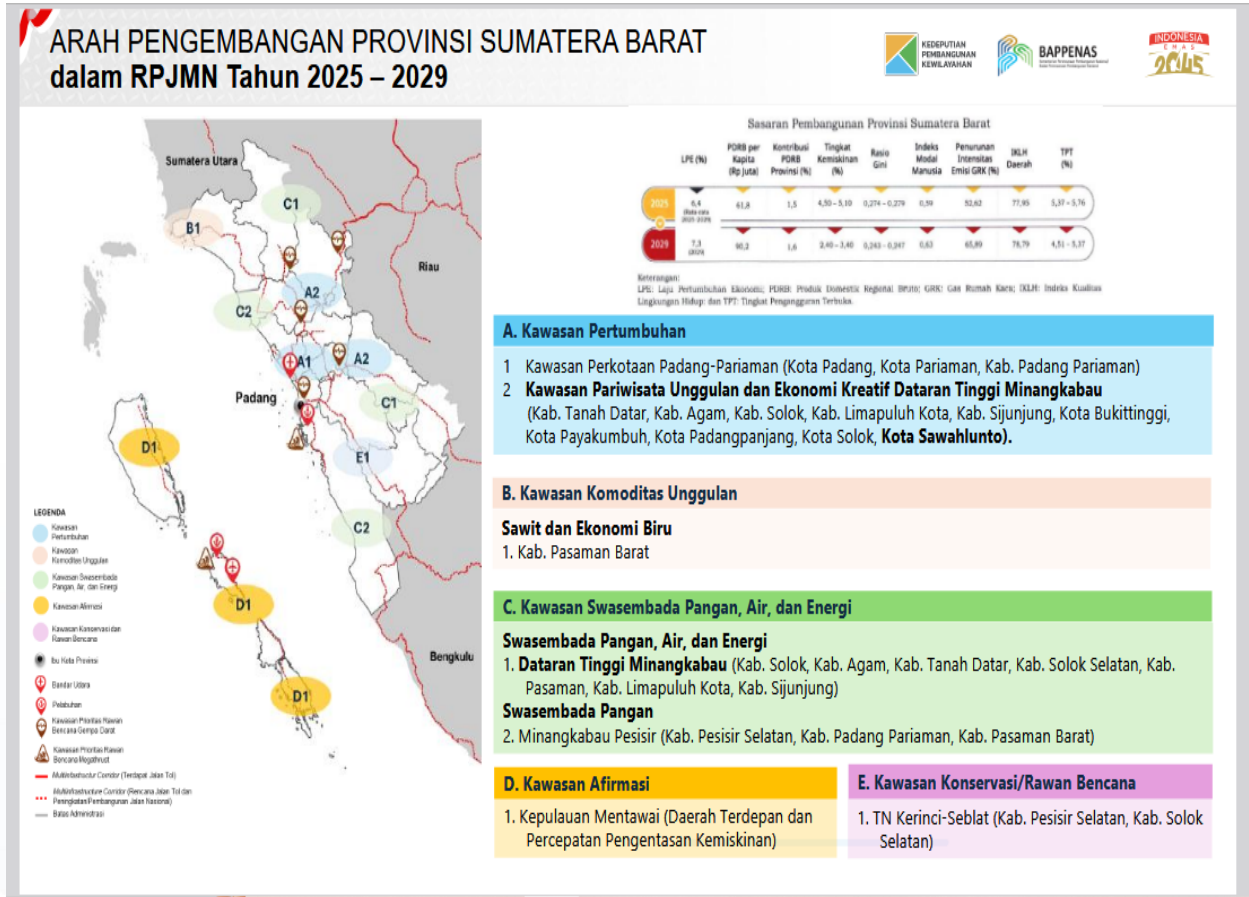


BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
masyarakat kelurahan (Kelurahan Kubang Sirakuk Utara)	Yang Aktif (%)													UTARA
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	180.893.273,94	100	306.940.112,02	100	314.832.368,83	100	310.915.596,98	100	375.121.863,59	7.01.0.00.0.00.02.0004 - KELURAHAN KUBANG SIRAKUK SELATAN
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Pasar)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	201.552.051,37	100	327.806.014,1	100	337.322.475,5	100	333.751.263,24	100	400.622.787,35	7.01.0.00.0.00.02.0005 - KELURAHAN PASAR
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Tanah Lapang)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	170.324.308,22	100	296.265.181,4	100	303.326.500,8	100	299.232.940,86	100	362.075.671,42	7.01.0.00.0.00.02.0006 - KELURAHAN TANAH LAPANG

3.5.4 Arah Pembangunan Wilayah Provinsi Sumatera Barat RPJMN Tahun 2025-2029

Arah pembangunan kewilayahan Provinsi Sumatera Barat yang dalam terdapat dalam RPJMN Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada pada gambar berikut ini;

Gambar 3.1
Arah Pembangunan Wilayah Provinsi Sumatera Barat RPJMN Tahun 2025-2029



Sumber; Perpres RI No. 12/2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029, 2025

Berdasarkan gambar diatas, terlihat arah pembangunan kewilayahan Provinsi Sumatera Barat difokuskan pada; 1) kawasan pertumbuhan, 2) kawasan komoditas unggulan, 3) kawasan swasembada pangan, air, dan energi, 4) kawasan afirmasi Kepulauan Mentawai dan 5) kawasan konservasi/rawan bencana. Lokasi prioritas dan highlight indikasi intervensi fokus pembangunan kewilayahan Provinsi Sumatera Barat, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.19
Lokasi Prioritas dan Highlight Indikasi Intervensi Pembangunan Wilayah Provinsi Sumatera Barat RPJMN Tahun 2025-2029

NO	FOKUS/LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
A.	KAWASAN PERTUMBUHAN NASIONAL	
1.	Kawasan Perkotaan Padang-Pariaman - Kota Padang - Kota Pariaman - Kab. Padang Pariaman	a. Pengembangan dari penataan kawasan perkotaan Padang-Pariaman, antara lain, melalui: - Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu - Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau - Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/ peLatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakeiaan - Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan b. Pengembangan koridor industri rintisan Padang-Pariaman (sektor industri prioritas: hilirisasi kelapa, hilirisasi kelapa sawit, industri makanan, dan minuman, dan industri transportasi laut dan

NO	FOKUS/LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		galangan kapal)
		c. Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/ pengembangan/peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah
		d. Pengembangan pelabuhan perikanan PPS Bungus
		e. Pembangunan SPAM Regional Padang-Padang Pariaman-Pariaman
		f. Pembangunan TPST Regional Padang-Padang Pariaman-Pariaman
		g. Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Padang (PHTC)
		h. Preservasi jalan nras Padang-Maideh Painan-Tapan
		i. ketangguhan terhadap banjir di kawaasan perkotaan Padang-Pariaman
2.	Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Dataran Tinggi Minangkabau: Kab. Sijunjung Kab. Tanah Datar Kab. Solok Kab. Limapuluh Kota Kab. Agam Kota Sawahlunto Kota Solok Kota Bukittinggi Kota Padang Panjang Kota Payakumbuh	a. Pengembangan kawasan pariwisata budaya Kampung Adat Sijunjung
		b. Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Bukittinggi, Padang Panjang dan Solok-Sawahlunto, antara lain melalui: • Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi darn masalah perkotaan secara terpadu. • Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau. • Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/ pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan • Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan
		c. Preservasi jalan ruas Padang-Arosuka-Solok, Solok-Padang Aro,Solok-Sawahlunto-Muaro Sijunjung-Pulau Punjung-Muaro Bungo.
		d. Preservasi jalan Muaro Sijunjung-Teluk Kuantan, Padangpanjang-Batusangkar, Bukittinggi-Danau Maninjau Lubukbasung - Padang- sawah-Simpang Ampek, Bukittinggi-Lubuksikaping
		e. Pembangunan sabo dam sebagai upaya mitigasi bencana alam gunung api, terutama pada Kab. Agam, Kab. Padang Pariaman, dan Kab. Tanah Datar
		f. Peningkatan 6A pariwisata, Urban Rehewal, dan pembangunan pasar wisata terintegrasi pusat seni dan kebudayaan di Bukittinggi, Sawahlunto, Solok, Batusangkar, Payakumbuh dan Padang Panjang
		g. Pengembangan kawasan terpadu Kandi di Sawahlunto
		h. Pengembangan kawasan pariwisata sejarah PDRI di Kototinggi
		i. Revitalisasi situs purbakala Gua Lida Ajer
		j. Penataan waterfront danau Singkarak, Maninjau, Diatas dan Dibawah
		k. Pembangunan Jalan Tol Padang-Bukittinggi-Pekanbaru
		l. Pembangunan Fly Ouer Sitinjau Lauik
		m. Peningkatan jalur KA Kayutanam-Padang Panjang
		n. Pengembangan kota agropolitan Bukittinggi dan Solok
		o. Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi

NO	FOKUS/LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Dr. Achrnad Mochtar di Bukittinggi dan RSUD Sawahlunto (PHTC) p. Pembangunan TPST Regional Bukittinggi-Agam-Padang Panjang q. Pengembangan SPAM Regional Bukittinggi-Agam-Padang Panjang r. Pengembangan SPAM perkotaan Sotok dan SPAM Perkotaan Sawahlunto s. Peningkatan ketangguhan terhadap banjir di Kawasan Perkotaan Bukittinggi t. Kawasan Perdesaan Prioritas Kab. Agam
B.	KAWASAN KOMODITAS UNGGULAN	
1.	Kawasan Komoditas Unggulan Sawit dan Ekonomi Biru Kab. Pasaman Barat	a. Pengembangan pelabuhan perikanan PPI Airbangis b. Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan pesisir di Pasaman Barat c. Pengelolaan dari pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap d. Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya e. Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat f. Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan g. Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan h. Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan i. Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit) j. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit) k. Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit) l. Pembangunan dan pengelolaa! tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit m. Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri darl silvopastura
C.	KAWASAN SWASEMBADA PANGAN, AIR, DAN ENERGI :	
1.	Dataran Tinggi Minangkabau - Kab. Siiunjung - Kab. Tanah Datar - Kab. Solok - Kab. Limapuluh Kota - Kab. Agam - Kab. Solok Selatan - Kab. Pasaman	a. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan Pernerintah Daerah b. Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) c. Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) d. Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura e. Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura f. Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain; melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan Pertanian; optimisasi dan revitalisasi lahan pertanian; darn peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik g. Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan

NO	FOKUS/LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani: peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pasca panen
		h. Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dari pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen Poktan/Gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan koperasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama
		i. Pengembangan Kawasan Transmigrasi Muara Takung-Kamang Baru (Kab. Sijunjung)
		j. Pengembangan pusat/laboratorium riset prrtanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian
		k. Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada cathment area WS Indragiri, WS Akuaman, WS Selaut-Tarusan, WS Masang-Pasaman
		l. Pembangunan infrasruktur pemantauat kualitas air di sungai dan danau, terutama pada Danau Singkarak, Maninjau, Diatas, dan Dibawah
		m. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D.I Batang Sinamar, D.I Batang Antokan, dan D.I Panti Rao
		n. Revitalisasi Danau Singkarak, Maninjau, Diatas, dan Dibawah
		o. Pembangunan infrastruktur PLTP Muaralaboh
		p. Pembangunan infrastruktur PLTA Masang II
		q. Pembangunan PLTS Apung Danau Singkarak
		r. Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 275 kV Payakumbuh-Perawang
2.	Kawasan Swasembada Pangan Minangkabau Pesisir	a. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan Pernerintah Daerah b. Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) c. Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) d. Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura e. Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura f. Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain; melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan Pertanian; optimatisasi dan revitalisasi lahan pertanian; darn peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik g. Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain

NO	FOKUS/LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani: peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pasca panen h. Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dari pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen Poktan/Gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan koperasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asulansi usaha tani; peningkatan infastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama i. Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian i. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D.I Batang Anai, D.I Batang Bayang dan D.I Batang Tonga j. Pengembangan kawasan transmigrasi Lunang Silaut (Kab. Pesisir Selatan)
D.	KAWASAN AFIRMASI (DAERAH TERDEPAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN) :	
1.	Kab. Kepulauan Mentawai	a. Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastmktur distribusi dan listrik perdesaan, serta rumah layak huni), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pargan b. Peningkatan ketahanan bencana c. Pembangunan jalan Trans Mentawai d. Pengembangan rintisan PSDKU (Proglam Studi Di Luar Kampus Utama) dengan program studi sesuai keunggulan dan kebutuhan wilayah e. Pemberdayaan aktivitas ekonomi high value unggulan: perkebunan {kelapa dan sagu), hasil hutan dan agroforestri, dan perikanan f. Peningkatan tipe RS dari tipe D ke tipe C, dan pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi g. Peningkatan 6A Pariwisata di Sipora dan Siberut h. Pembangunan rumah murah bersanitasi bailk bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasai perkotaan Tuapejat (PHTC) i. Pengembangan SPAM Perkotaan Tuapejat j. Percepatan transformasi digital pada kawasan afirmasi: perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dan perluasan layanan penyiaran digital k. Pelaksanaan bantuan sosial adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasai kemiskinan
E.	KAWASAN KONSERVASI/RAWAN BENCANA :	
1.	- TN Kerinci-Seblat - Kab. Pesisir Selatan - Kab. Solok Selatan	a. Perlindungan, pemulihan, pengelolasn ekosistem dan area bemilai keanekaragaman hayati tinggi b. Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan

NO	FOKUS/LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
	- Kab. Siiunjung - Kab. Solok - Kab. Kepulauan Mentawai	c. Pemantaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi d. Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keahanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik e. Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri f. Penguatan pengelolaan hutan lestari g. Peningkatan fungsi sosial kawassn hutan h. Perlindungan dan pengamanan hutan i. Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi j. Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana k. Indikasi daerah prioritas intervensi Program Malan Bergizi Gratis, BantuanPangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC

Sumber; Perpres RI No. 12/2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029, 2025

3.5.5 Strategis Pembangunan Kota Sawahlunto RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2030

Dalam rangka mewujudkan Kota Sawahlunto sebagai kota wisata skala nasional yang berbasis kegiatan kepariwisataan, pertambangan, pertanian dan industri kecil dengan didukung oleh sumber daya manusia, infrastruktur yang handal dan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan serta berbasis mitigasi bencana, maka yang menjadi *Core Bussiness* Kota Sawahlunto adalah :

- Pengembangan Pariwisata berbasis budaya, tambang, dan rekreasi;
- Pertambangan;
- Perkebunan rakyat yang akan dikembangkan menjadi Agrobisnis dan
- Kegiatan Industri kecil dan kerajinan.

Strategi pembangunan Kota Sawahlunto :

- Pengembangan pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan sebagai satu kesatuan sistem secara terpadu, berhirarki, dan saling berhubungan untuk mendukung fungsi-fungsi kegiatan kota, meliputi :
 - Menetapkan Kecamatan Barangin sebagai Pusat Pelayanan Kota.
 - Menetapkan Sub Pusat Pelayanan Kota terletak di Desa Muaro Kalaban Kec. Silungkang, dan Kelurahan Kolok Nan Tuo Kec. Talawi.
 - Menetapkan Pusat Lingkungan di setiap pusat kelurahan dan pusat desa.
 - Mengembangkan sub-sub pusat kota sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat-pusat pelayanan Kecamatan.
- Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah, yang meliputi: sistem jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan infrastruktur perkotaan, meliputi :
 - Meningkatkan aksesibilitas Kota Sawahlunto dengan Kota sekitar, antar sub-sub pusat pelayanan kota melalui pengembangan sistem jaringan jalan, pengembangan sistem terminal dan pengembangan dan pemanfaatan jalur kereta api;
 - Mengembangkan potensi sumber-sumber daya air dan pelestarian sumber daya air permukaan dan air tanah yang ada;
 - Mengembangkan sistem jaringan drainase kota secara terpadu untuk seluruh wilayah kota dalam rangka penanggulangan erosi dan banjir serta peningkatan penyehatan lingkungan permukiman kota dilakukan dengan membangun dan memelihara saluran drainase baik saluran primer, sekunder maupun tersier terutama di sekitar kawasan pusat kota dan sub pusat kota;
 - Mengembangkan sistem jaringan pengolahan limbah kota dalam rangka peningkatan penyehatan lingkungan permukiman kota dilakukan dengan melayani pengolahan limbah rumah tangga di kawasan permukiman dengan tingkat kepadatan rendah dan sedang dengan onsite system dan Kawasan kepadatan tinggi dengan *offsite system* atau minimal dengan *onsite system* komunal;

- Mengembangkan dan meningkatkan sistem persampahan kota secara terpadu untuk seluruh wilayah kota dalam rangka peningkatan penyehatan lingkungan permukiman kota;
 - Mengembangkan sistem pelayanan energi, listrik, telekomunikasi dan informasi melalui diversifikasi teknologi dan sumber perluasan jaringan pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan.
- 3) Pelestarian, perlindungan, rehabilitasi, pengelolaan dan pengendalian Kawasan lindung untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan, meliputi :
- Menetapkan batas-batas kawasan lindung;
 - Melestarikan hutan, taman-taman kota, dan sempadan- sempadan sungai dan mata air;
 - Melakukan konservasi didaerah rawan bencana longsor di Lembah Segar dan Kecamatan Silingkang dengan reboisasi, konservasi tanah dan air, serta upaya-upaya rehabilitasi.
 - Mengelola hutan lindung, sempadan- sempadan sungai, mata air dan taman-taman kota.
 - Mengendalikan kawasan lindung dari kegiatan alih fungsi.
- 4) Pelestarian dan perlindungan kawasan cagar budaya (*Heritage*) meliputi :
- Melestarikan kawasan inti yang telah ditetapkan oleh UNESCO.
 - Memberikan insentif bangunan tua, bangunan bernilai sejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi, serta potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah.
 - Meningkatkan fungsi bangunan tua, bangunan bernilai sejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi, serta potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah sebagai objek wisata budaya.
- 5) Pengembangan kegiatan budidaya secara seimbang dan serasi sesuai potensi dan daya dukung wilayah, dengan menekankan pada pengembangan wisata berbasis pada sektor/subsektor unggulan yaitu industri kecil, pariwisata, perdagangan/jasa, perkebunan, dan kehutanan, meliputi :
- Mengembangkan kegiatan industri kecil untuk mendukung pengembangan kegiatan pariwisata;
 - Mengembangkan potensi pariwisata alam, buatan dan khusus;
 - Mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa;
 - Mengembangkan perkebunan rakyat yang berorientasi pada agrowisata;
 - Mengembangkan kawasan hutan untuk mendukung kegiatan pariwisata.
- 6) Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi :
- Mengoptimalkan ruang bagi kegiatan budidaya sesuai daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup;
 - Mengendalikan intensitas kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk mengurangi potensi terjadinya kerugian akibat bencana;
 - Mitigasi bencana dengan membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi ejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
 - Mengatur penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana.
 - Menetapkan ketentuan-ketentuan peraturan zonasi pada masing-masing kawasan budidaya sesuai dengan karakteristiknya. Untuk empertahankan ketersediaan sumber air;
 - Mengendalikan pemanfaatan di kawasan budidaya melalui mekanisme perizinan;
 - Memberikan insentif bagi kegiatan yang sesuai dengan fungsi dan disinsentif bagi kegiatan yang mengakibatkan gangguan bagi fungsi utamanya.
 - Mengembangkan kegiatan budidaya yang aman, nyaman dan berkelanjutan.
- 7) Pengembangan kawasan permukiman yang layak huni meliputi :
- Mencadangkan dan meningkatkan persediaan lahan kota bagi pengembangan kawasan perumahan.
 - Mengembangkan kawasan siap bangun (Kasiba) dan lingkungan siap bangun (Lisiba) untuk perumahan.
 - Meningkatkan prasarana permukiman yang berkualitas.

- 8)

Pengembangan kawasan pusat pemerintahan yang melayani, representative dan berwawasan lingkungan meliputi :

 - Menyediakan lahan untuk pengembangan kawasan pusat pemerintahan Kota Sawahlunto di Kolok.
 - Mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur untuk mendukung pengembangan pusat pemerintahan secara bertahap.
 - Membangun prasarana dan sarana untuk menunjang kawasan pusat pemerintahan di Kolok.
- 9)

Pengembangan fasilitas pelayanan umum yang memadai sesuai dengan tingkat perkembangan kota meliputi :

 - Mencadangkan dan meningkatkan persediaan lahan kota bagi pengembangan fasilitas pelayanan umum yang dikelola pemerintah melalui penyerahan sebagian dari setiap kawasan yang dikembangkan oleh pengembang kepada Pemerintah Kota untuk dijadikan areal pelayanan umum;
 - Mengembangkan dan membangun fasilitas umum sesuai dengan kebutuhan pelayanan di setiap sub pusat kota dan di pusat lingkungan.
- 10)

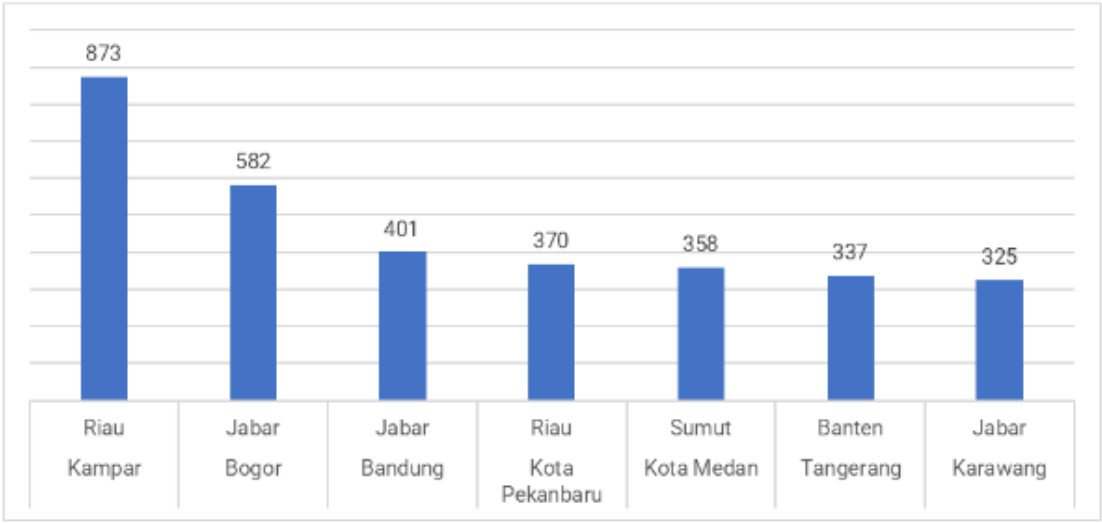
Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya meliputi :

 - Menetapkan kawasan budidaya dan memanfaatkan sumberdaya alam di ruang darat dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis melalui mekanisme perijinan yang tepat untuk mewujudkan keseimbangan pengembangan kota;
 - Mengembangkan kegiatan budidaya untuk menarik investasi dan menunjang pengembangan sumberdaya manusia, lingkungan, aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kota Sawahlunto perlu mengembangkan ekonominya sektor tersier atau jasa mulai dari sektor akomodasi dan makan minum dan sektor jasa keuangan. Sedangkan secara spasial ekonomi Kota Sawahlunto lebih lokal dengan daerah tujuan utama Kota Padang, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok. Daerah tujuan lain di luar Provinsi Sumatera Barat diantaranya berinteraksi dengan Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru di Provinsi Riau dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat.

Gambar 3.2

Daerah Tujuan Ekspor Utama Kota Sawahlunto



Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Selain itu beberapa kebijakan yang perlu didorong adalah: Pengembangan ekosistem dan destinasi kepariwisataan holistik 6A guna mewujudkan *quality* dan *sustainable tourism*, termasuk melalui urban *renewal*, revitalisasi/pengembangan Kawasan prioritas, serta pengembangan MICE *economy*; dan Pengembangan ekosistem holistik dan infrastruktur pendukung *high value economy* dan industri.

3.5.6 Arah Pembangunan Penataan Ruang Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029

Penentuan tujuan penataan ruang dalam Dokumen Revisi RTRW 2025-2045, berdasarkan pada hasil analisis visi dan misi pembangunan wilayah, *core bussiness* dan isu strategis Kota Sawahlunto. Dari ketiga unsur tersebut maka tujuan penataan ruang yaitu:

“Mewujudkan Kota Wisata Skala Nasional Yang Berbasis Kegiatan Kepariwisataan, Pertambangan, Pertanian Dan Industri Kecil Dengan Di Dukung Oleh Sumber Daya Manusia, Infrastruktur Yang Handal Dan Pemanfaatan Ruang Yang Berwawasan Lingkungan Serta Berbasis Mitigasi Bencana”

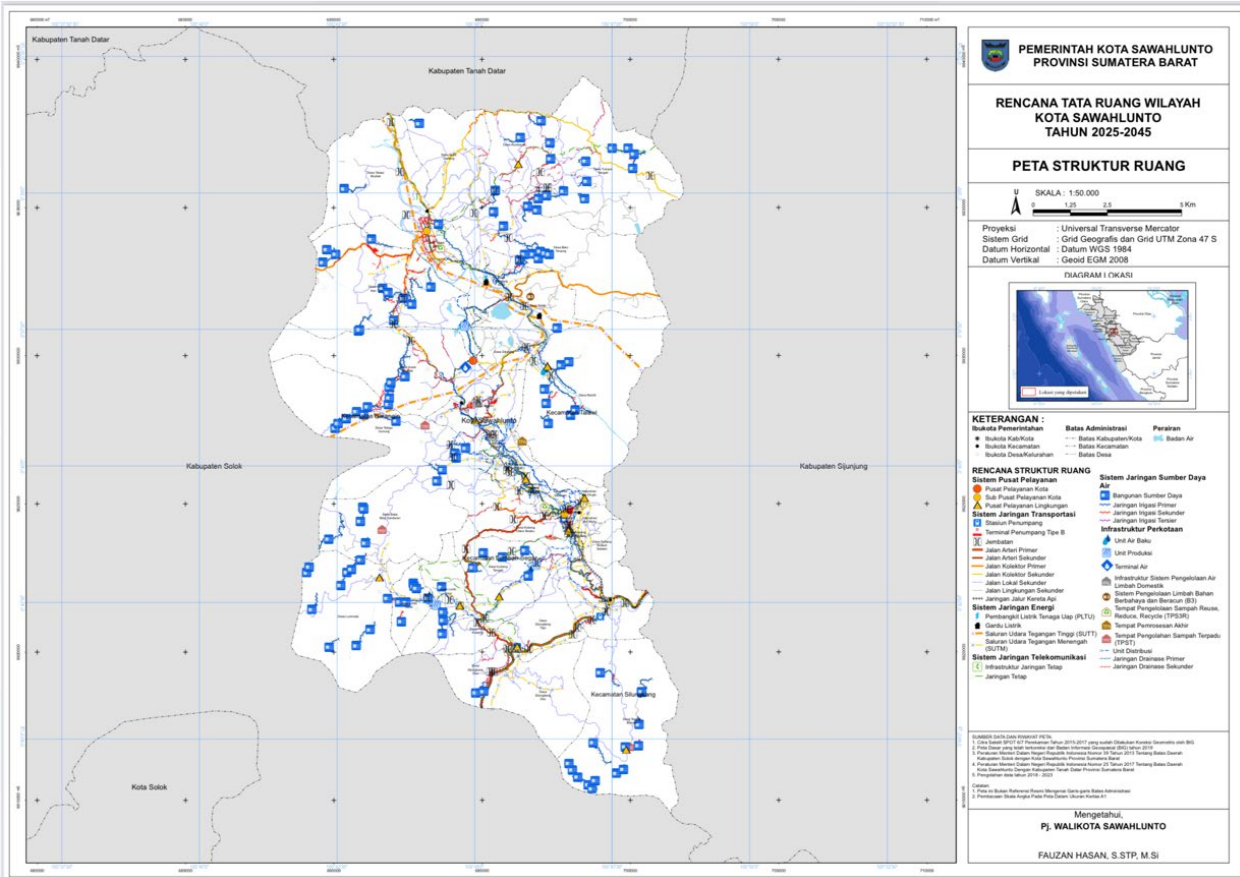
A. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Kebijakan Penataan Ruang Kota Sawahlunto, terdiri dari kebijakan pengembangan struktur ruang dan pola ruang, dengan uraian sebagai berikut:

1. Struktur Ruang

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat, dengan hubungan fungsional yang bersifat hirarkis. Oleh sebab itu dalam penataan ruang kota harus menentukan pusat pelayanan yang menjadi penyedia fungsi bagi daerah disekitarnya sehingga terbentuk hubungan hierarkis antar wilayah dalam suatu kota.

Gambar 3.3
Peta Rencana Struktur Ruang Kota Sawahlunto 2025-2045



Sumber Data : Rancangan Revisi RTRW Kota Sawahlunto 2025-2045

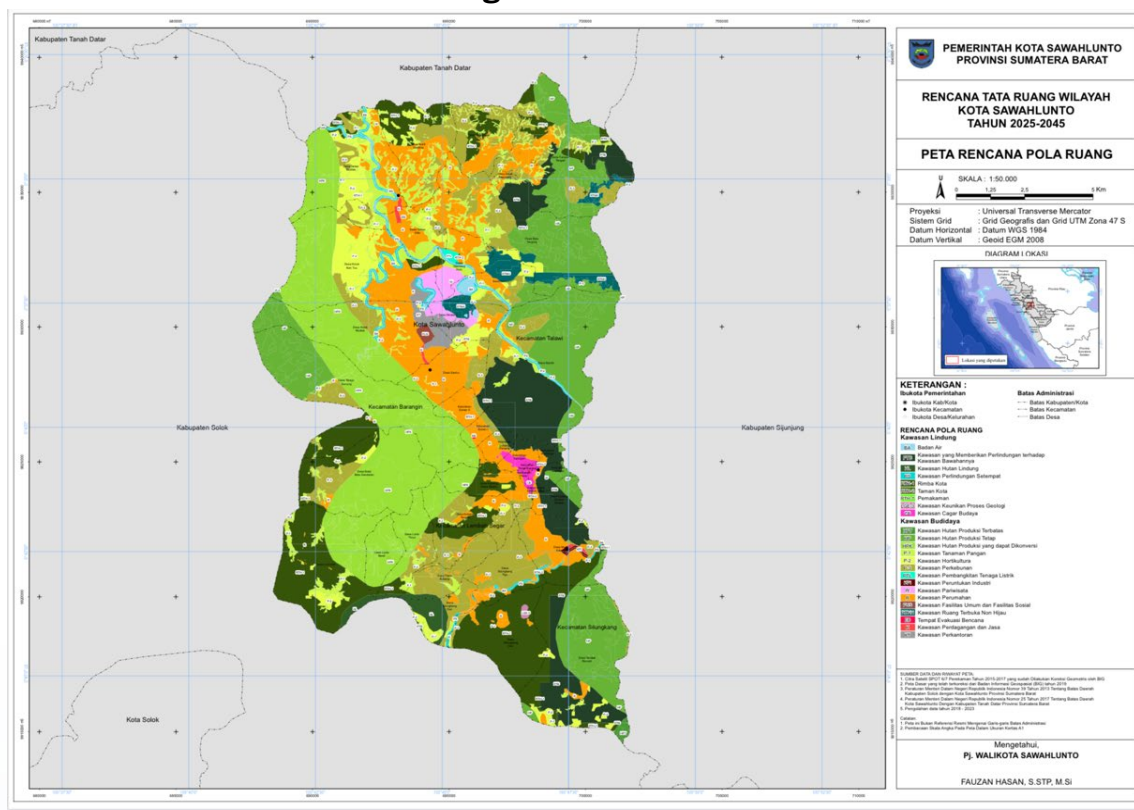
Tabel 3.20
Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan Rencana Struktur Ruang
Kota Sawahlunto 2025-2045

KEBIJAKAN	STRATEGI
Pengembangan pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan sebagai satu kesatuan sistem secara terpadu, berhirarki, dan saling berhubungan untuk mendukung fungsi-fungsi kegiatan kota	1. Menetapkan Pusat Pelayanan Kota untuk masa mendatang di Kawasan Kandi 2. Menetapkan Sub Pusat Kota di Muaro Kalaban dan Kolok Nan Tuo. 3. Menetapkan Pusat Lingkungan di setiap pusat kelurahan dan pusat desa
Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah, yang meliputi : sistem jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air.	1. Pengembangan sistem jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas melalui pengembangan sistem jaringan jalan, pengembangan sistem terminal dan pengembangan dan pemanfaatan jalur kereta api. 2. Peningkatan kapasitas dan mengembangkan sistem pelayanan energi, listrik, telekomunikasi dan informasi melalui diversifikasi teknologi dan sumber, perluasan jaringan pelayanan, dan peningkatan kualitas pelayanan. 3. peningkatan sistem telekomunikasi dan informasi melalui diversifikasi teknologi dan sumber, dilakukan dengan meningkatkan jaringan telekomunikasi dengan menambah dan membangun sentral-sentral telepon baru dan membangun BTS/menara bersama 4. Pengembangan sistem jaringan sumber daya air bagi penyediaan air bersih perkotaan melalui pengembangan potensi sumber-sumber daya air dan pelestarian sumber daya air permukaan dan air tanah yang ada 5. Pengembangan sistem jaringan drainase kota, secara terpadu untuk seluruh wilayah kota dalam rangka penanggulangan erosi dan banjir serta peningkatan penyehatan lingkungan permukiman kota. 6. Pengembangan sistem jaringan pengolahan air limbah kota dalam rangka peningkatan penyehatan lingkungan permukiman kota. 7. Pengembangan sistem persampahan kota secara terpadu untuk seluruh wilayah kota dalam rangka peningkatan penyehatan lingkungan permukiman

Sumber Data: Rancangan Revisi RTRW Kota Sawahlunto 2025-2045

2. Pola Ruang

Pola Ruang adalah distribusi atau pengaturan peruntukan ruang dalam suatu wilayah, yang terdiri dari kawasan lindung (untuk pelestarian lingkungan) dan kawasan budidaya (untuk aktivitas manusia).



KEBIJAKAN	STRATEGI
berbasis pada sektor/subsektor unggulan yaitu pertambangan, pariwisata, perkebunan, kehutanan, industri kecil dan perdagangan/jasa	5. Pengembangan Perkebunan Rakyat Berorientasi pada Agrobisnis dan Agrowisata
Pengelolaan kawasan kehutanan, pertanian dan perkebunan agar dapat berfungsi sebagai resapan air dan ruang terbuka hijau kota.	1. Menetapkan batas-batas kawasan hutan 2. Merehabilitasi dan mengelola hutan produksi dengan penanaman yang memiliki ekonomi tinggi dan memiliki kemampuan meresapkan air dan mencegah bencana longsor. 3. Mengelola hutan dengan melibatkan masyarakat (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat/PHBM)
Pengembangan Kawasan Permukiman yang Layak Huni	1. Mencadangkan dan meningkatkan persediaan lahan kota bagi pengembangan kawasan perumahan 2. Mengembangkan kawasan siap bangun (Kasiba) dan lingkungan siap bangun(Lisiba) untuk perumahan 3. Meningkatkan prasarana permukiman yang berkualitas
Pengembangan kawasan pusat pemerintahan yang melayani, representative dan berwawasan lingkungan	1. Menyediakan lahan untuk pengembangan kawasan pusat pemerintahan Kota Sawahlunto di Kawasan Kandi. 2. Menetapkan kawasan pusat pemerintahan di Kawasan Kandi sebagai kawasan strategis kota 3. Mengembangkan infrastruktur untuk mendukung pengembangan pusat pemerintahan secara bertahap 4. Membangun prasarana dan sarana perkantoran di Kawasan Kandi
Pengembangan fasilitas pelayanan umum yang memadai sesuai dengan tingkat Perkembangan kota	1. Mencadangkan dan meningkatkan persediaan lahan kota bagi pengembangan fasilitas pelayanan umum yang dikelola pemerintah melalui penyerahan sebagian dari setiap kawasan yang dikembangkan oleh pengembang kepada Pemerintah Kota untuk dijadikan areal pelayanan umum. 2. Mengembangkan dan membangun fasilitas umum sesuai dengan kebutuhan pelayanan di setiap sub pusat kota dan di pusat lingkungan
Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya	1. Menetapkan kawasan budidaya dan memanfaatkan sumberdaya alam di ruang darat dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi secara sinergis melalui mekanisme perijinan yang tepat untuk mewujudkan keseimbangan pengembangan wilayah; 2. Mengembangkan kegiatan budidaya untuk menarik investasi dan menunjang pengembangan sumberdaya manusia, lingkungan, aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya serta ilmu pengetahuan dan teknologi
Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan	1. Menetapkan ketentuan-ketentuan peraturan zonasi pada masing-masing kawasan budidaya sesuai dengan karakteristiknya; 2. Mitigasi bencana dengan membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana; 3. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara kompak di kawasan perkotaan; 4. Membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan tangkapan air untuk mempertahankan ketersediaan sumber air; 5. Mengendalikan pemanfaatan di kawasan budidaya melalui mekanisme perizinan; 6. Memberikan insentif bagi kegiatan yang sesuai dengan fungsi dan disinsentif bagi kegiatan yang mengakibatkan gangguan bagi fungsi utamanya; dan 7. Melakukan penertiban bagi kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai fungsi.

Sumber Data: Rancangan Revisi RTRW Kota Sawahlunto 2025-2045

3.5.7 Strategi dan Arah Kebijakan Pengelolaan Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto

Visi dari Rencana Pengelolaan ini adalah Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto (WTBOS) akan dilindungi dan dilestarikan sebagai bukti luar biasa dari teknologi perintis tingkat dunia yang secara sistemik menghubungkan tambang batubara, fasilitas kereta api dan pelabuhan, yang bersama-sama membentuk ansambel (kesatuan) teknologi yang ideal untuk ekstraksi dan distribusi batubara yang merupakan sumber daya energi penting di abad ke-19 dan awal abad ke-20. Atribut atribut dan objek-objek signifikan dari kesatuan teknologi yang terdiri dari tiga bagian yang inovatif ini didukung oleh sistem yang handal terkait pengorganisasian tenaga kerja. Atribut-atribut dan objek-objek tersebut, akan ditafsirkan dan harus dapat diakses oleh generasi sekarang dan mendatang sehingga semua orang dapat memahami kejeniusan dan keunikan dari pencapaian bersejarah di wilayah geografis terpencil Sumatera Barat ini serta maknanya bagi perkembangan teknologi pertambangan di seluruh dunia.

Pelestarian WTBOS harus mendukung pembangunan yang berkelanjutan dalam bidang sosial dan ekonomi, serta memperkuat jati diri bersama yang kohesif dari komunitas keturunan dan pewaris WTBOS yang dalam sejarahnya berasal dari beragam kelompok sosial. Hal ini dapat dicapai melalui konservasi bangunan bangunan warisan bersejarah, pengembangan usaha-usaha budaya yang terkait dengan WTBOS, promosi dan edukasi untuk menciptakan pengalaman pengunjung yang baik, yang seluruhnya berlandaskan pada komunikasi agar tercipta pemahaman yang otentik dan komprehensif tentang terobosan teknologi inovatif untuk eksploitasi batubara di WTBOS.

Strategi 1 : Mendokumentasikan dan Melestarikan Sejarah Sosial Sawahlunto

Konsep : Mengenali dan memaknai Sawahlunto beragam Sejarah Sosial.

Kegiatan :

- Pengumpulan sejarah lisan Saawahlunto.
- Meneliti, mendigitalkan, dan memanfaatkan arsip untuk interpretasi
- Mengumpulkan dan memanfaatkan arsip komunitas untuk interpretasi
- Pengembangan pendidikan.

Strategi 2 : Mengembangkan Interpretasi Digital

Konsep : Menggunakan teknologi digital untuk melibatkan pengunjung.

Kegiatan :

- Pengembangan situs web dan aplikasi telepon selular.
- Pengembangan aplikasi seluler.
- Pengembangan database dan katalog online.
- Pengembangan media sosial professional.

Strategi 3 : Sawahlunto sebagai kota bersejarah yang ramah pejalan kaki (Sawahlunto Walkable Heritage City)

Konsep : Meningkatkan akses dan kenyamanan pejalan kaki, mengembangkan signage & menghubungkan situs.

Kegiatan :

- Meningkatkan kualitas infrastruktur untuk masyarakat local dan pengunjung
- Adaptive reuse untuk Gedung Pusat Kebudayaan (GPK) Sawahlunto sebagai pusat pengunjung
- Mengembangkan interpretasi dan penunjuk jalan baru untuk Kawasan Kota Tua Sawahlunto
- Mengembangkantur dan jalur warisan budaya
- Seni public dan industri kreatif

Strategi 4 : Jalur Sejarah Tambang Ombilin (Ombilin Mining Heritage Track)

Konsep : Mengembangkan interpretasi di situs di luar kota & dukung akses pengunjung.

Kegiatan :

- Pengembangan PLTU Salak sebagai pusat interpretasi
- Pengembangan Museum Orang Rantai dan area penjara
- Pengembangan Gedung Kompres sebagai pusat interpretasi warisan untuk Situs Tambang Sungai Durian
- Peningkatan kualitas transportasi dan akses

Strategi 5 : Susur Jalur Kereta Api Sawahlunto (Sawahlunto Heritage Railway Experience)

Konsep : Maksimalkan potensi warisan perkeretaapian dan menciptakan keterkaitan dengan Silungkang.

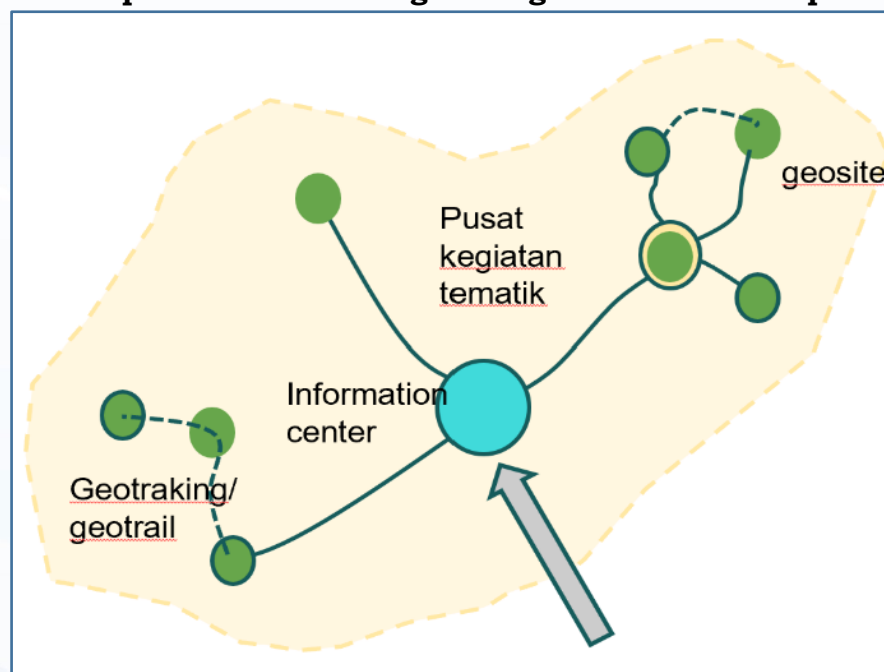
Kegiatan

- Pengembangan website Mak Hitam, peningkatan pelayanan dan promosi.
- Pengembangan Interpretasi 'hub' di Muara Kalaban.
- Peningkatan Koridor Jalur rel kereta api dari Sawahlunto ke Silungkang.

3.5.8 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Geosite Potensial Geopark Sawahlunto 2025–2029

Kawasan Geopark dikembangkan dengan pendekatan penklasteran keunikan geoheritage yang diikat oleh fasilitas pelayanan geopark berupa *information center* dan pusat kegiatan tematik pada setiap zona. Pada setiap zona dan antar zona dirancang jalur kegiatan geoedukasi dan geowisata yang menghubungkan geosite.

Gambar 3.5
Konsep Lokasi Pusat Pengembangan Informasi Geopark



Sumber: Rencana Induk Pengembangan Geopark Nasional Sawahlunto 2023-2032

Kawasan Geopark Sawahlunto yang memiliki 22 geosite, 14 cultural diversity site and buildings serta kekayaan biodiversity dibagi atas tiga zona :

1. Zona cultural diversity dan geodukasi Sawahlunto Minning Old Town

Kota Tambang Sawahlunto merupakan warisan geologi dan budaya yang unik di dunia. Zona pada kawasan pusat kota dan sekitarnya ini menjadi tempat representasi geodukasi dan wisata tambang. Geosite yang penting yaitu Museum Lubang tambang Soero, Lubang Sawah Luwung, dan Sawahlunto dan aset budaya berupa bangunan yang terkait dengan kegiatan tambang (Taman silo, Museum Kereta Api, Gedung Pusat Kebudayaan, Gedung PT. BA dan Musem Goedang Ransoem).

Bekas area tambang yang direklamasi menjadi area wisata di Kawasan Kandi bisa menjadi objek geodukasi tentang penanganan pasca tambang bagi siswa sekolah.

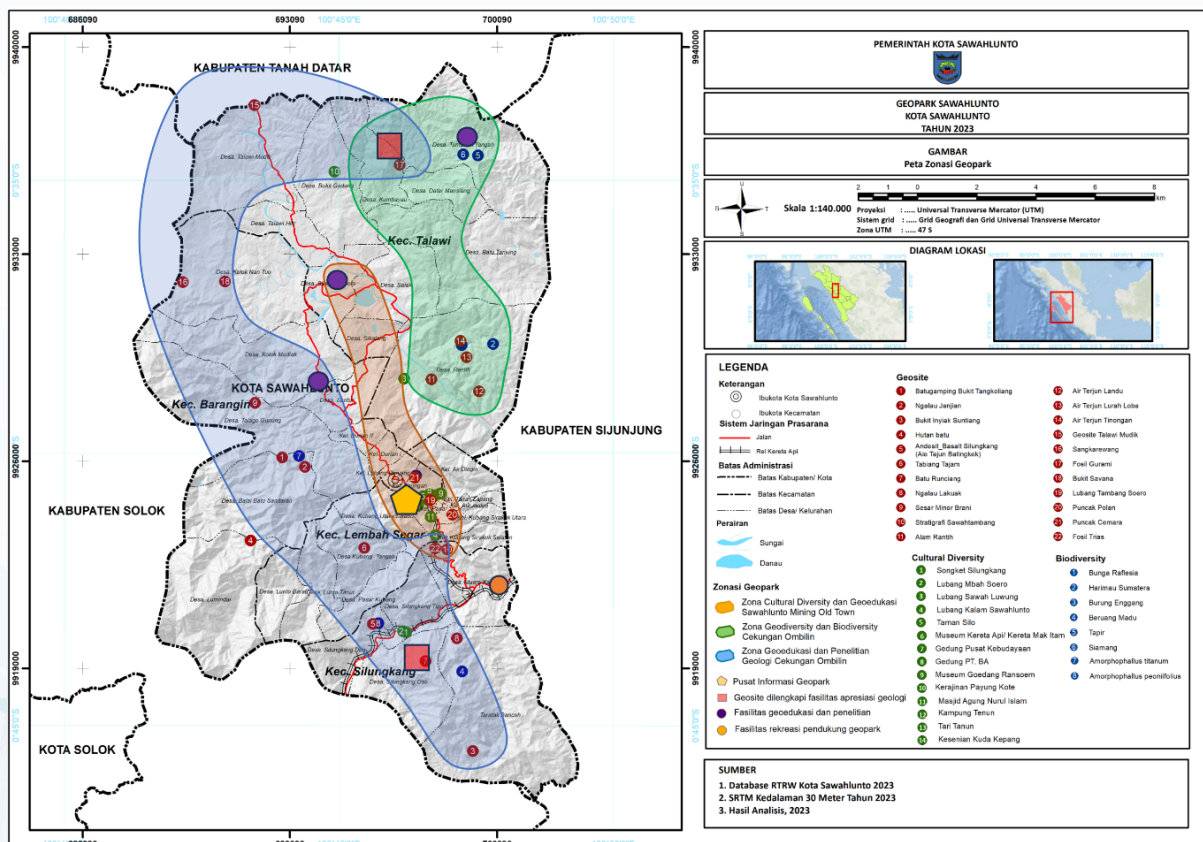
2. Zona geodiversity dan biodiversity cekungan ombilin

Zona ini menceritakan tentang proses geologi pembentukan cekungan ombilin yang menghasilkan berbagai tampilan keindahan alam. Fosil gurami di Desa Tumpuak Tengah serta Kawasan bentang alam Hutan Rantih dan beberapa air terjun disekitarnya menjadi situs dan objek penting di kawasan ini. Di kawasan ini juga terdapat kekayaan fauna seperti harimau sumatera, beruang madu, tapir dan siamang. Pada zona ini dirancang jalur tracking penjelajahan hutan menghubungkan objek wisata.

3. Zona geodukasi dan penelitian geologi cekungan ombilin

Pada kawasan ini terdapat beragam geosite yang bisa menjadi objek geodukasi dan penelitian geologi yang mengungkapkan proses geologi cekungan ombilin. Zona ini memanjang pada sisi barat kota dari arah utara ke arah selatan.

Gambar 3.6
Peta Sebaran Geopark Kota Sawahlunto



1. Geosite Batu Runcing

Arah pengembangan geosite Batu Runcing dalam 5 tahun ke depan Adalah menjadi ikon wisata geologi unggulan di Sawahlunto dengan daya tarik visual kekhasan fosil batu yang didukung oleh fasilitas penunjang pariwisata yang memadai. Sasaran dari pengembangan objek ini Adalah kelompok wisatawan nusantara baik lokal maupun regional dan mancanegara yang mampu mendatangkan efek *multiplier* bagi peningkatan ekonomi masyarakat dan pengembangan wilayah disekitarnya.

Strategi Pengembangan :

- Konservasi formasi batuan unik sebagai warisan geologi bernilai tinggi.
- Penyediaan jalur interpretasi geologi dengan panel informasi edukatif.
- Pengembangan spot wisata fotografi dan edukasi geowisata berbasis *outdoor activity*.
- Penyediaan sarana dan prasarana wisata serta fasilitas penunjang pariwisata di sekitar Kawasan.

2. Geosite Fosil Ikan Air Tawar Tumpuk Tengah

Arah pengembangan geosite Fosil Ikan Air Tawar di Tumpuk Tengah ditekankan kepada wisata minat khusus, yaitu sebagai sarana penelitian dan pengabdian masyarakat (sarana Pendidikan) yang bersinergi dengan masyarakat lokal sebagai pelaku dan pengelola objek dan mampu memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat lokal. Tujuan pengembangan Adalah menjadikan geosite ini sebagai pusat pembelajaran geologi purba yang unik di Sumatera Barat.

Strategi Pengembangan:

- Penelitian lebih lanjut dan konservasi fosil ikan air tawar sebagai bukti sejarah evolusi geologi Sawahlunto.
- Pembangunan pusat interpretasi kecil (mini museum) untuk edukasi publik.
- Pengembangan paket wisata edukasi sekolah/universitas berbasis fosil.
- Penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang memadai.

3. Geosite Lubang Tambang Suro di Air Dingin

Dampak yang dituju dalam pengembangan geosite Lobang Tambang Suro adalah menguatkan identitas Sawahlunto sebagai “kota tambang bersejarah warisan budaya UNESCO”.

Strategi Pengembangan:

- Revitalisasi lubang tambang sebagai wisata heritage dengan pendekatan edukatif
- Narasi interpretasi yang mengaitkan geologi dengan sejarah sosial budaya masyarakat tambang.
- Peningkatan standar keselamatan dan infrastruktur akses pengunjung.
- Memberikan pengalaman dan pengetahuan yang mendalam tentang aktivitas pertambangan bawah tanah dan kehidupan sosial budaya yang mengikuti perjalanan sejarah tambang tersebut.

4. Geosite Puncak Cemara

Untuk memperkuat pengelolaan dan meningkatkan nilai dari Geosite Puncak Cemara, berikut arah kebijakan dan strategi yang bisa menjadi prioritas;

Strategi Pengembangan:

- Pengembangan sebagai salah satu destinasi geowisata unggulan dengan menonjolkan bentang alam geologi Pusat Kota Sawahlunto.
- Penyediaan fasilitas trekking, area bermain, fasilitas umum, dan jalur interpretasi geologi.

- Fasilitasi kegiatan dan atraksi yang dapat meningkatkan kunjungan dan daya Tarik objek.

5. Geosite Lahan Bekas Tambang Kandi (Kebun Buah Kandi)

Rencana pengembangan Kebun Buah Kandi diharapkan menjadi contoh sukses pemanfaatan lahan pascatambang untuk ekonomi berkelanjutan.

Strategi Pengembangan:

- Rehabilitasi kawasan bekas tambang menjadi ruang hijau produktif dengan konsep agro-eduwisata.
- Pengembangan kebun buah dan eduwisata pertanian berwawasan lingkungan.
- Edukasi tentang transformasi lahan pascatambang melalui program wisata edukatif.

6. Geosite Hutan Batu di Desa BBS dan Lumindai

Upaya Menjadikan Hutan Batu BBS dan Lumindai sebagai geosite edukatif, konservatif, dan berdaya ekonomi lokal yang dikelola berkelanjutan dalam koridor Geopark Sawahlunto untuk melindungi warisan geologi, memperkuat ekonomi desa, dan menarik wisatawan edukatif serta alam.

Strategi Pengembangan:

- Konservasi kawasan hutan batu sebagai keunikan geologi bernilai tinggi.
- Pembangunan jalur interpretasi geologi serta wisata minat khusus (geotrek, penelitian lapangan).
- Pemberdayaan masyarakat desa untuk mengelola homestay, kuliner lokal, dan jasa pemandu wisata.

Dalam periode lima tahun ke depan, arah kebijakan pengembangan Geopark Sawahlunto diarahkan pada penguatan fungsi geopark sebagai pusat konservasi, edukasi, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pengembangan wilayah difokuskan pada:

1. **Konservasi dan Revitalisasi Geosite Potensial** untuk menjaga kelestarian nilai geologi dan lingkungan.
2. **Integrasi geosite dengan pengembangan wilayah** agar menjadi simpul pertumbuhan ekonomi lokal berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif.
3. **Pengembangan Infrastruktur ramah lingkungan** berupa akses jalan, fasilitas wisata, serta pusat informasi geologi di tiap geosite utama.
4. Penciptaan **rantai nilai ekonomi** dari sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM lokal yang berorientasi pada keberlanjutan.
5. **Peningkatan Kapasitas Masyarakat Lokal** sebagai aktor utama dalam pelestarian sekaligus pemanfaatan geopark.
6. **Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan** dengan melibatkan pemerintah, akademisi, komunitas, dan swasta dalam konservasi serta promosi geopark ke level nasional dan global.

Dengan strategi tersebut, Geopark Sawahlunto diharapkan tidak hanya menjadi simbol konservasi warisan geologi dan sejarah tambang, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan wilayah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing internasional.

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Program Perangkat Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah bagian penting dari perencanaan pembangunan daerah. Program ini dirancang untuk mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah. Dalam RPJMD, program-program ini mencakup berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan lingkungan, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

Penyusunan program Perangkat Daerah dilakukan dengan ketentuan :

1. Mengacu visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD
2. Mampu mengatasi permasalahan serta isu strategis daerah
3. Memperhatikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
4. Sebagai operasionalisasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Gambaran program Perangkat Daerah Kota Sawahlunto beserta indikasi alokasi anggaran belanja langsung program disajikan pada tabel berikut:



Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					89.460.584.464		90.148.117.997		94.527.111.179		94.106.019.079		101.796.590.156	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					79.498.636.614		58.128.989.430		52.192.986.107		50.848.966.741		51.311.122.508	
Tercapainya penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	79.498.636.614	100	58.128.989.430	100	52.192.986.107	100	50.848.966.741	100	51.311.122.508	1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					9.266.923.800		31.360.390.455		41.646.172.769		42.562.317.458		49.988.359.751	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	67,35	69,39	69,59	9.266.923.800	69,79	31.360.390.455	69,99	41.646.172.769	70,19	42.562.317.458	70,39	49.988.359.751	1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN
	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	51,28	60,16	60,31		60,46		60,61		60,76		60,91		
	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	73,78	74,72	74,92		75,12		75,32		75,52		75,72		
	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	64,6	65,01	65,16		65,31		65,46		65,61		65,76		
	Anak putus sekolah yang melanjutkan pendidikan ke pendidikan non formal (%)	70	71	72		72,5		73		73,5		73,75		
	Lulusan SD yang hafal alqur'an juz 30 (%)	32	33	34		35		36		37		38		
	1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM							250.000.000				230.516.263		
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (%)	17,48	17,58	18,58	250.000.000	20	230.516.263	20	231.325.384	25	234.619.534	25	136.819.182	1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					217.832.041		202.065.052		229.776.590		229.823.254		138.071.931	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat	90	92	94	217.832.041	96	202.065.052	96	229.776.590	98	229.823.254	100	138.071.931	1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
tenaga pendidikan	Pendidik (%)													
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					118.128.006		117.437.865		117.900.219		117.309.767		108.409.591	
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (%)	100	100	100	118.128.006	100	117.437.865	100	117.900.219	100	117.309.767	100	108.409.591	1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					109.064.003		108.718.932		108.950.110		112.982.325		113.807.193	
Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra(%)	0	10	10	109.064.003	15	108.718.932	16	108.950.110	16	112.982.325	18	113.807.193	1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					146.999.083.766		146.825.904.202		158.645.734.504		160.374.416.372		177.184.000.081	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					116.296.763.248		116.240.510.247		125.065.445.655		126.761.815.539		141.306.791.728	
Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	42.560.796.543	100	28.537.930.529	100	29.107.803.056	100	29.436.531.609	100	29.889.141.411	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (UPTD RSUD)	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	68.925.771.855	100	82.844.157.790	100	90.721.040.493	100	92.008.221.614	100	105.480.009.002	1.02.2.14.0.00.01.0001 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (UPTD Puskesmas Kolok)	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	460.290.019	100	464.904.893	100	501.093.149	100	508.792.428	100	568.175.951	1.02.2.14.0.00.01.0002 - UPTD PUSKESMAS KOLOK
Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (UPTD Puskesmas Sungai Durian)	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	816.429.204	100	824.614.734	100	888.802.849	100	902.459.274	100	1.007.789.482	1.02.2.14.0.00.01.0003 - UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN
Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (UPTD Puskesmas Silungkang)	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	893.932.776	100	902.895.358	100	973.176.847	100	988.129.675	100	1.103.458.872	1.02.2.14.0.00.01.0004 - UPTD PUSKESMAS SILUNGKANG
Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (UPTD Talawi)	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	1.642.901.324	100	1.659.373.075	100	1.788.538.884	100	1.816.019.723	100	2.027.975.805	1.02.2.14.0.00.01.0005 - UPTD PUSKESMAS TALAWI
Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintahan	Persentase ketercapaian penunjang urusan	100	100	100	633.192.224	100	639.540.617	100	689.322.540	100	699.913.957	100	781.604.160	1.02.2.14.0.00.01.0006 - UPTD PUSKESMAS KAMPUNG TELENG



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
daerah kabupaten/kota (UPTD Kampung Teleng)	pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)													
Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (UPTD Lunto)	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	363.449.303	100	367.093.251	100	395.667.837	100	401.747.259	100	448.637.045	1.02.2.14.0.00.01.0007 UPTD PUSKESMAS LUNTO
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					28.807.608.571		28.668.672.027		30.447.445.469		30.426.187.128		32.740.351.429	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	94	95	95	14.270.754.528	95	13.919.022.418	95	14.802.217.250	95	14.501.926.985	95	14.912.288.313	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	268	134	134		134		134		134		0		
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (UPTD RSUD)	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	94	95	95	13.867.924.772	95	14.041.840.503	95	14.845.994.351	95	15.074.102.546	95	16.833.470.949	1.02.2.14.0.00.01.0001 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	268	134	134		134		134		134		0		
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (UPTD INSTALASI FARMASI KOTA)	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	94	95	95	668.929.271	95	707.809.106	95	799.233.868	95	850.157.597	95	994.592.167	1.02.2.14.0.00.01.0008 - UPTD INSTALASI FARMASI KOTA
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	268	134	134		134		134		134		0		1.02.2.14.0.00.01.0008 - UPTD INSTALASI FARMASI KOTA
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					1.531.009.571		1.555.731.588		2.753.998.799		2.795.664.779		2.821.269.419	
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (%)	0	0	35	307.436.192	36	312.371.135	37	605.474.917	38	614.128.902	39	635.116.374	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan (UPTD RSUD)	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (%)	0	0	35	1.223.573.379	36	1.243.360.453	37	2.148.523.882	38	2.181.535.877	39	2.186.153.045	1.02.2.14.0.00.01.0001 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					146.758.233		95.330.626		100.289.894		109.450.752		113.129.181	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (%)	0	0	55	146.758.233	56	95.330.626	57	100.289.894	58	109.450.752	59	113.129.181	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					216.944.143		265.659.714		278.554.687		281.298.174		202.458.324	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%)	0	0	65	216.944.143	66	265.659.714	67	278.554.687	68	281.298.174	69	202.458.324	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					32.696.525.600		37.852.282.352		39.188.428.887		38.007.087.007		42.505.741.238	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.092.159.781		15.183.977.365		11.940.109.304		11.984.320.847		13.217.662.765	
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	10.517.389.040	100	10.606.537.896	100	11.215.150.424	100	11.270.292.952	100	12.453.664.747	1.03.2.15.2.10.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota (UPTD Alat Berat)	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	1.574.770.741	100	4.577.439.469	100	724.958.880	100	714.027.895	100	763.998.018	1.03.2.15.2.10.01.0001 - UPTD ALAT BERAT
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					2.812.800.624		2.530.975.787		3.769.024.119		3.490.623.223		3.209.150.897	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (%)	0	20	20,66	2.812.800.624	22,03	2.530.975.787	23,41	3.769.024.119	24,79	3.490.623.223	26,17	3.209.150.897	1.03.2.15.2.10.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (%)	44,11	45	45,32		46,74		47,7		48,91		51,03		1.03.2.15.2.10.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Kapasitas Air Baku (m3/detik) (m3/detik)	0,11	0,149	0,151		0,154		0,156		0,159		0,161		1.03.2.15.2.10.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					1.178.320.406		1.220.650.525		1.842.516.445		1.884.781.373		2.564.815.219	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%) (%)	49,67	50	52,5	1.178.320.406	55	1.220.650.525	57,5	1.842.516.445	60	1.884.781.373	62,5	2.564.815.219	1.03.2.15.2.10.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					1.106.400.312		1.071.893.232		1.184.512.059		1.125.134.865		1.380.719.311	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ((%))	8,19	15,95	18,9	1.106.400.312	21,9	1.071.893.232	24,91	1.184.512.059	27,91	1.125.134.865	32,91	1.380.719.311	1.03.2.15.2.10.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					2.266.000.780		2.266.922.404		2.416.529.600		2.423.367.402		2.969.390.667	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (%)	46,22	46,95	47,45	2.266.000.780	48,81	2.266.922.404	49,38	2.416.529.600	50,62	2.423.367.402	52	2.969.390.667	1.03.2.15.2.10.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					2.719.200.936		3.290.058.343		3.583.037.275		3.115.758.089		3.497.822.253	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%)	91,01	91,63	92,13	2.719.200.936	93,25	3.290.058.343	94,37	3.583.037.275	95,49	3.115.758.089	96,61	3.497.822.253	1.03.2.15.2.10.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					2.266.000.780		2.266.922.404		2.416.529.600		2.423.367.402		2.461.438.621	
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (%)	80,13	80,71	81,71	2.266.000.780	82,9	2.266.922.404	83,6	2.416.529.600	84,8	2.423.367.402	87	2.461.438.621	1.03.2.15.2.10.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					7.438.401.872		9.103.252.625		11.055.098.668		10.654.883.580		12.345.754.484	
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	55,62	55,92	57,47	7.438.401.872	59,02	9.103.252.625	60,57	11.055.098.668	62,12	10.654.883.580	63,67	12.345.754.484	1.03.2.15.2.10.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					235.960.047		339.502.917		352.151.864		305.787.904		374.891.113	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (%)	27,1	28	29	235.960.047	30	339.502.917	32	352.151.864	33	305.787.904	35	374.891.113	1.03.2.15.2.10.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					581.280.062		578.126.750		628.919.953		599.062.322		484.095.908	
Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Persentase pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang (RTRW / RDTR) (%)	75	77	80	581.280.062	83	578.126.750	85	628.919.953	88	599.062.322	90	484.095.908	1.03.2.15.2.10.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					10.026.055.536		14.087.440.810		15.772.357.377		16.265.330.681		18.674.959.324	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.331.290.402		10.525.279.054		11.884.740.881		12.641.855.386		14.789.691.514	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	6.331.290.402	100	10.525.279.054	100	11.884.740.881	100	12.641.855.386	100	14.789.691.514	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					567.092.126		566.195.157		689.329.769		589.469.761		528.022.986	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	16,67	33,33	50	289.437.665	66,67	283.533.525	83,33	338.399.808	91,67	282.185.299	100	243.760.943	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Meningkatkan akses hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa)	Persentase hunian rusunawa yang dihuni MBR (%)	70	82	83	277.654.461	84	282.661.632	85	350.929.961	86	307.284.462	87	284.262.043	1.04.2.10.2.11.01.0001 - UPTD RUSUNAWA
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					1.006.400.312		1.015.487.894		1.048.711.621		926.072.543		994.117.904	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	0	10	20	1.006.400.312	40	1.015.487.894	60	1.048.711.621	80	926.072.543	100	994.117.904	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					290.344.066		201.816.511		305.852.522		307.717.206		430.119.885	
Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Luas kawasan permukiman rawan kumuh yang ditangani (%)	-	20	35	290.344.066	50	201.816.511	70	305.852.522	90	307.717.206	100	430.119.885	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					1.830.928.630		1.778.662.194		1.843.722.584		1.800.215.785		1.933.007.035	
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Konsumsi Listrik per Kapita (Kwh/ Kapita)	1.237	1.237	1.353	1.830.928.630	1.469	1.778.662.194	1.585	1.843.722.584	1.707	1.800.215.785	1.820	1.933.007.035	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (%)	84	85	86				87				88		
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					14.811.582.228		15.789.419.571		17.398.095.435		18.315.822.816		20.981.709.971	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.634.394.823		14.426.859.805		16.068.797.877		16.867.731.611		19.482.342.642	
Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	9.556.173.931	100	10.111.602.558	100	11.417.676.262	100	12.145.161.251	100	14.208.521.208	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	4.078.220.892	100	4.315.257.247	100	4.651.121.615	100	4.722.570.360	100	5.273.821.434	1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					139.359.048		151.599.564		171.394.599		209.937.919		192.950.922	
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	100	100	27.192.009	100	30.952.210	100	42.513.021	100	45.099.162	100	36.819.182	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	100	100	100	22.660.008	100	25.436.613	100	24.165.296	100	43.454.734	100	24.852.948	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (%)	100	100	100	48.719.017	100	54.929.274	100	62.650.767	100	74.407.838	100	85.254.815	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	0	0	35	40.788.014	50	40.281.467	65	42.065.515	80	46.976.185	95	46.023.977	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					815.760.281		984.703.909		905.509.867		978.939.522		1.028.431.586	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (%)	100	100	100	453.200.156	100	535.946.616	100	497.505.482	100	532.744.179	100	560.239.770	1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana (%)	100	100	100	271.920.094	100	311.567.970	100	293.503.289	100	309.646.507	100	326.143.862	1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (%)	100	100	100	90.640.031	100	137.189.323	100	114.501.096	100	136.548.836	100	142.047.954	1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KERAKARAN					222.068.076		226.256.293		252.393.092		259.213.764		277.984.821	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (%)	100	100	100	9.064.003	100	8.718.932	100	8.950.110	100	8.654.884	100	9.204.795	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%)	100	100	100	213.004.073	100	217.537.361	100	243.442.982	100	250.558.880	100	268.780.026	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					6.633.550.810		8.446.665.273		9.641.131.977		10.097.487.344		11.705.347.195	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.406.755.356		5.721.009.442		6.459.968.470		6.871.569.743		8.038.991.201	
Terselenggaranya urusean pemerintahan daerah yang berjalan lancar dan tertib	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	5.406.755.356	100	5.721.009.442	100	6.459.968.470	100	6.871.569.743	100	8.038.991.201	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					272.656.757		845.364.660		954.556.902		915.377.142		1.187.881.113	
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti rehabilitasi sosial (%)	100	100	100	272.656.757	100	845.364.660	100	954.556.902	100	915.377.142	100	1.187.881.113	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkatkan kompetensinya dalam pelayanan sosial (%)	76	76	76		81		87		93		100		
	persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					0		47.954.128		54.148.163		57.598.250		67.383.705	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korbna tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (%)	0	0	0	0	100	47.954.128	100	54.148.163	100	57.598.250	100	67.383.705	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					589.559.034		1.028.801.117		1.309.803.368		1.313.682.164		1.422.777.031	
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	71	71	75	589.559.034	85	1.028.801.117	95	1.309.803.368	100	1.313.682.164	100	1.422.777.031	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	60	60	66		73		80		88		97		
	persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	0	45	51		56		61		67		74		
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					171.595.404		394.955.513		400.304.204		439.927.815		506.149.724	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (%)	100	100	100	171.595.404	100	394.955.513	100	400.304.204	100	439.927.815	100	506.149.724	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (%)	50	50	54		56		58		60		62		
	persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%)	2,6	2,6	2,7		2,97		3,2		3,5		3,8		
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					181.280.062		375.033.489		424.470.830		459.038.637		435.025.288	
Meningkatnya perlindungan sosiaal korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada	100	100	100	181.280.062	100	375.033.489	100	424.470.830	100	459.038.637	100	435.025.288	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (%)													PERLINDUNGAN ANAK
	persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkatkan kesiapsiagaannya (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					11.704.197		33.546.924		37.880.040		40.293.593		47.139.133	
Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	persentase taman makam pahlawan nasional yang dikelola dengan baik (%)	100	100	100	11.704.197	100	33.546.924	100	37.880.040	100	40.293.593	100	47.139.133	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					1.659.618.609		2.222.086.712		2.444.377.736		2.479.624.146		2.859.341.721	
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					90.640.031		104.627.188		125.301.535		129.823.254		138.071.931	
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	100	100	100	90.640.031	100	104.627.188	100	125.301.535	100	129.823.254	100	138.071.931	2.18.2.07.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					725.120.250		984.703.909		995.010.963		952.037.194		1.104.575.448	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Lulusan Pelatihan Yang Bekerja (%)	26,78	27	27,28	725.120.250	27,78	984.703.909	29,78	995.010.963	33	952.037.194	35	1.104.575.448	2.18.2.07.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					421.476.145		549.292.736		716.008.770		739.523.707		972.358.664	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (%)	43,32	44	45	421.476.145	47	549.292.736	50	716.008.770	55	739.523.707	65	972.358.664	2.18.2.07.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%) (%)	-	55,2	55,7		56,2		56,7		57,2		57,7		
	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) (%)	-	74,18	74,66		75,14		75,61		76,09		76,57		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					422.382.183		583.462.879		608.056.468		658.239.991		644.335.678	
Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	91	91	91,2	422.382.183	91,48	583.462.879	91,66	608.056.468	91,85	658.239.991	92	644.335.678	2.18.2.07.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					852.261.749		1.152.668.546		1.313.383.232		1.383.338.117		1.791.241.111	
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					176.600.078		209.770.639		270.740.816		287.991.251		336.918.524	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (%)	8,49	8,49	8,5	176.600.078	8,51	209.770.639	8,52	270.740.816	8,53	287.991.251	8,54	336.918.524	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					117.832.041		115.089.907		120.826.480		121.168.370		231.628.574	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	117.832.041	100	115.089.907	100	120.826.480	100	121.168.370	100	231.628.574	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					244.432.119		364.451.371		411.526.041		437.746.702		512.116.156	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesejahteraan gender, Pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (%)	100	100	100	244.432.119	100	364.451.371	100	411.526.041	100	437.746.702	100	512.116.156	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					156.108.030		191.112.843		202.881.510		209.436.675		328.029.039	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	persentase desa/kelurahan ramah anak (%)	100	100	100	156.108.030	100	191.112.843	100	202.881.510	100	209.436.675	100	328.029.039	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					157.289.481		272.243.786		307.408.385		326.995.119		382.548.818	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	157.289.481	100	272.243.786	100	307.408.385	100	326.995.119	100	382.548.818	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					12.486.883.398		12.273.790.793		12.787.624.735		12.627.594.294		13.611.878.244	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.015.425.756		11.733.067.225		12.205.376.380		11.983.119.061		12.852.837.340	
Peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	12.015.425.756	100	11.733.067.225	100	12.205.376.380	100	11.983.119.061	100	12.852.837.340	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					159.064.003		213.078.398		213.425.164		215.146.046		316.108.392	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Ketersediaan cadangan pangan (%)	101,89	100	100	159.064.003	100	213.078.398	100	213.425.164	100	215.146.046	100	316.108.392	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					134.443.212		147.082.235		183.976.151		195.203.719		201.252.749	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	91,1	91,2	91,2	134.443.212	91,25	147.082.235	91,3	183.976.151	91,35	195.203.719	91,4	201.252.749	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					100.305.217		102.313.594		105.490.680		155.391.255		160.751.650	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Penduduk Rawan Pangan yang ditangani (%)	2,7	2,7	2,7	100.305.217	5,4	102.313.594	8,1	105.490.680	10,8	155.391.255	13,5	160.751.650	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					77.645.210		78.249.341		79.356.360		78.734.213		80.928.113	
Menigkatnya pengawasan dan mutu dan kemanan pangan	Persentase Tingkat Keamanan Produk Pangan Segar yang aman dari Cemaran Mikroba, Bahan kimia /Berbahaya dan Residu Pestisida .f%)	96,3	96,3	96,5	77.645.210	96,7	78.249.341	96,8	79.356.360	96,9	78.734.213	97	80.928.113	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					344.322.496		1.178.069.209		1.296.716.006		1.267.002.767		1.927.320.718	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENKETA TANAH GARAPAN					81.928.857		52.313.594		62.650.767		69.239.069		73.638.363	
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (%)	-	-	100	81.928.857	100	52.313.594	100	62.650.767	100	69.239.069	100	73.638.363	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					0		770.870.100		851.002.100		796.672.680		1.270.648.211	
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (%)	-	-	-	0	100	770.870.100	100	851.002.100	100	796.672.680	100	1.270.648.211	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					80.817.611		82.313.594		82.650.767		89.239.069		82.843.159	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (Ha)	1	1	1	80.817.611	1	82.313.594	1	82.650.767	1	89.239.069	1	82.843.159	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.10.07 - PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT					60.331.999		111.032.526		111.600.877		107.893.952		192.047.954	
Meningkatnya tata kelola tanah ulayat	Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan (%)	-	-	14,29	60.331.999	29,18	111.032.526	43,77	111.600.877	55,41	107.893.952	70	192.047.954	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG					77.192.009		60.516.263		65.800.439		68.946.976		106.023.977	
Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola (%)	0	30	30	77.192.009	35	60.516.263	40	65.800.439	45	68.946.976	50	106.023.977	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					44.052.020		101.023.132		123.011.056		135.011.021		202.119.054	
Meningkatnya tertib pertanahan dar kepastian	Persentase bidang tanah yang sudah	-	12,84	12,84	44.052.020	13,34	101.023.132	13,84	123.011.056	14,34	135.011.021	14,84	202.119.054	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN.



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
hukum bagi pemegang hak atas tanah	terdaftar / bersertifikat (%)													KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					3.062.352.990		3.110.803.967		3.201.935.303		3.275.173.904		3.875.436.640	
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					181.280.062		217.973.308		223.752.741		216.372.090		230.119.885	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRF	Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	100	181.280.062	100	217.973.308	100	223.752.741	100	216.372.090	100	230.119.885	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					552.904.190		387.189.323		307.401.316		329.823.254		306.481.522	
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Nilai Indeks Udara Model EU (Indeks)	0,22	0,22	0,21	22.660.008	0,2	146.156.797	0,19	106.850.329	0,18	110.292.093	0,18	106.819.182	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase badan air yang memenuhi baku mutu (%)	7,14	7,14	14,29		21,43		28,57		35,71		42,86		
	Tutupan Lahan (Hektar)	0,19	0,19	0,21		0,22		0,24		0,26		0,28		
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data hasil pemantauan lingkungan sebagai dasar pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Persentase sampel uji kualitas lingkungan yang dianalisis tepat waktu (%)	100	100	100	530.244.182	100	241.032.526	100	200.550.987	100	219.531.161	100	199.662.340	1.04.2.10.2.11.01.0002 - UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					634.480.218		697.514.586		705.509.867		722.213.940		920.479.540	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (%)	16,5	16,5	17,17	634.480.218	17,84	697.514.586	18,51	705.509.867	19,18	722.213.940	19,88	920.479.540	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					63.448.022		169.751.459		170.550.987		182.221.394		192.047.954	
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (%)	100	100	100	63.448.022	100	169.751.459	100	170.550.987	100	182.221.394	100	192.047.954	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					57.192.009		54.875.729		60.275.493		63.274.418		60.626.375	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	78,26	78,26	80	57.192.009	82	54.875.729	85	60.275.493	87	63.274.418	90	60.626.375	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					77.192.009		64.875.729		74.750.548		71.929.301		79.831.170	
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	-	-	30	77.192.009	40	64.875.729	50	74.750.548	60	71.929.301	65	79.831.170	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					77.192.009		80.516.263		85.800.439		88.946.976		86.023.977	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	0	0	30	77.192.009	40	80.516.263	50	85.800.439	60	88.946.976	70	86.023.977	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					72.512.025		74.110.925		80.550.987		82.221.394		92.047.954	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (%)	77	79	80	72.512.025	82	74.110.925	84	80.550.987	86	82.221.394	88	92.047.954	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					77.192.009		56.156.797		61.325.384		60.292.093		66.819.182	
Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan	100	100	100	77.192.009	100	56.156.797	100	61.325.384	100	60.292.093	100	66.819.182	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Hidup (%)													LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					1.268.960.437		1.307.839.848		1.432.017.541		1.457.879.044		1.840.959.081	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) (%)	73,02	73,46	74,56	1.268.960.437	75,66	1.307.839.848	76,76	1.432.017.541	77,86	1.457.879.044	78,96	1.840.959.081	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					4.900.777.397		5.001.876.697		5.355.562.686		5.467.498.277		6.078.197.323	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.264.882.090		4.267.878.813		4.612.137.808		4.653.175.579		5.200.996.056	
Persentase ketercapaia n penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	94,35	0	100	4.264.882.090	100	4.267.878.813	100	4.612.137.808	100	4.653.175.579	100	5.200.996.056	2.12.5.04.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					293.821.684		255.306.032		256.868.914		303.613.316		350.518.609	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase terselenggaranya pendaftaran penduduk (%)	95,91	100	100	293.821.684	100	255.306.032	100	256.868.914	100	303.613.316	100	350.518.609	2.12.5.04.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					196.951.536		229.872.293		236.206.688		258.680.111		267.010.911	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase terselenggaranya pencatatan sipil (%)	35,47	100	100	196.951.536	100	229.872.293	100	236.206.688	100	258.680.111	100	267.010.911	2.12.5.04.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					111.058.084		212.182.964		213.563.891		214.046.876		216.295.249	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (%)	100	100	100	111.058.084	100	212.182.964	100	213.563.891	100	214.046.876	100	216.295.249	2.12.5.04.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					34.064.003		36.636.595		36.785.385		37.982.395		43.376.498	
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan pengelolaan profil kependudukan (%)	100	100	100	34.064.003	100	36.636.595	100	36.785.385	100	37.982.395	100	43.376.498	2.12.5.04.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					1.050.980.413		1.126.042.518		1.271.656.385		1.264.993.368		1.485.668.177	
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					67.980.023		107.189.323		118.451.206		125.037.113		101.075.557	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa (%)	100	100	100	67.980.023	100	107.189.323	100	118.451.206	100	125.037.113	100	101.075.557	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					195.320.016		147.954.128		153.649.260		157.598.250		167.383.705	
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa (%)	100	100	100	195.320.016	100	147.954.128	100	153.649.260	100	157.598.250	100	167.383.705	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					434.480.218		471.357.789		558.074.286		506.375.503		643.371.867	
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	100	100	100	434.480.218	100	471.357.789	100	558.074.286	100	506.375.503	100	643.371.867	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					353.200.156		399.541.278		441.481.633		475.982.502		573.837.048	
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat dalam pembangunan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	100	100	100	353.200.156	100	399.541.278	100	441.481.633	100	475.982.502	100	573.837.048	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)	0	0	50		50		60		60		70		
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					708.270.967		1.050.850.392		989.318.828		1.040.192.534		1.231.699.127	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					116.108.974		111.688.651		114.650.009		110.868.193		117.912.509	
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	75,1	80,4	83,8	116.108.974	86	111.688.651	87,4	114.650.009	88,3	110.868.193	88,9	117.912.509	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri (%)	100	100	100		100		100		100		100		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					227.249.811		295.756.028		316.855.026		389.910.453		540.099.585	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (%)	15,2	15	14,8	227.249.811	14,6	295.756.028	14,4	316.855.026	14,2	389.910.453	14,1	540.099.585	
	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	82	82,3	82,6		82,9		83,20		83,5		83,8		
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					364.912.182		643.405.713		557.813.793		539.413.888		573.687.033	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	56,9	57,7	58,5	364.912.182	59,3	643.405.713	60,1	557.813.793	60,8	539.413.888	61,5	573.687.033	
	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	90,2	91,1	91,8		92,5		93,1		93,7		94,3		
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					9.551.019.812		10.256.250.284		11.494.703.447		12.146.616.333		14.047.816.891	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.191.419.344		8.666.653.143		9.786.178.232		10.409.797.766		12.178.426.224	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Meningkatnya Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	8.191.419.344	100	8.666.653.143	100	9.786.178.232	100	10.409.797.766	100	12.178.426.224	
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					1.223.640.421		1.438.623.833		1.545.271.378		1.547.348.806		1.663.126.920	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (%)	14,28	16,5	20,5	1.223.640.421	24,7	1.438.623.833	30,5	1.545.271.378	36	1.547.348.806	42,5	1.663.126.920	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.15.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN					135.960.047		150.973.308		163.253.837		189.469.761		206.263.747	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
Jumlah Perjalanan Kereta Api Wisata	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani (%)	70	70	60	135.960.047	70	150.973.308	80	163.253.837	90	189.469.761	100	206.263.747	
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					6.722.699.000		7.402.381.752		6.769.426.975		6.804.542.612		8.439.350.066	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.195.396.688		5.300.552.851		4.770.362.014		4.797.814.478		5.312.144.311	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	4.195.396.688	100	5.300.552.851	100	4.770.362.014	100	4.797.814.478	100	5.312.144.311	2.16.2.21.2.20.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					622.188.206		539.265.964		591.485.470		592.015.615		667.019.883	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei) (%)	0	77	78	622.188.206	79	539.265.964	81	591.485.470	83	592.015.615	85	667.019.883	2.16.2.21.2.20.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					1.905.114.106		1.562.562.937		1.407.579.491		1.414.712.519		2.460.185.872	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks Domain Manajemen SPBE (Nilai) (Nilai)	2,27	2,27	2,3	1.905.114.106	2,33	1.562.562.937	2,36	1.407.579.491	2,39	1.414.712.519	2,42	2.460.185.872	2.16.2.21.2.20.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	100	100	100		100		100		100		100		
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					10.814.120.415		10.999.066.782		11.151.552.453		10.965.626.104		11.850.675.690	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.328.157.758		8.496.425.168		8.724.835.372		8.441.367.602		8.979.554.060	
Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	8.328.157.758	100	8.496.425.168	100	8.724.835.372	100	8.441.367.602	100	8.979.554.060	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					349.260.086		289.770.639		294.028.234		295.319.066		299.155.851	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%)	7,25	9	10	349.260.086	11	289.770.639	12	294.028.234	13	295.319.066	14	299.155.851	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					281.280.062		244.378.646		269.002.193		273.097.672		284.095.908	
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)	54	54	56	281.280.062	58	244.378.646	60	269.002.193	62	273.097.672	64	284.095.908	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					238.152.056		274.378.646		223.752.741		259.646.507		276.143.862	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (%)	67	69	70	238.152.056	73	274.378.646	75	223.752.741	78	259.646.507	80	276.143.862	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					304.088.053		248.221.849		252.151.864		247.133.021		256.481.522	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (%)	0	10	10	304.088.053	20	248.221.849	30	252.151.864	40	247.133.021	50	256.481.522	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					850.326.310		993.042.797		928.228.870		998.070.612		1.288.305.420	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (%)	21	21	22	850.326.310	23	993.042.797	24	928.228.870	25	998.070.612	26	1.288.305.420	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Proporsi jumlah UKM non pertanian (*)	19,1	19,1	19,3		19,4		19,49		19,59		19,69		
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					462.856.090		452.849.037		459.553.179		450.991.624		466.939.067	
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalini Kemitraan dan Ekspor (%)	10	11	12	462.856.090	13	452.849.037	14	459.553.179	15	450.991.624	16	466.939.067	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Rasio Kewirausahaan (%)	3,56	3,96	4,09		4,23		4,36		4,49		4,75		
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					6.849.517.868		6.700.998.542		6.846.723.258		6.803.106.952		7.387.380.956	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.397.926.067		5.395.139.697		5.477.775.381		5.498.312.912		6.061.674.832	
Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	5.397.926.067	100	5.395.139.697	100	5.477.775.381	100	5.498.312.912	100	6.061.674.832	2.18.2.07.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					335.368.115		235.411.173		250.603.070		242.336.740		266.939.067	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (%)	549,24	100	100	335.368.115	100	235.411.173	100	250.603.070	100	242.336.740	100	266.939.067	2.18.2.07.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					334.147.246		230.783.985		236.041.666		233.285.207		243.594.808	
Meningkatnya jangkauan promos penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (%)	30,88	37	45	334.147.246	46	230.783.985	47	236.041.666	48	233.285.207	49	243.594.808	2.18.2.07.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					328.768.037		330.783.985		341.101.973		381.752.555		320.915.090	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (%)	99,82	100	100	328.768.037	100	330.783.985	100	341.101.973	100	381.752.555	100	320.915.090	2.18.2.07.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					240.344.066		286.585.152		295.112.390		192.138.415		204.346.458	
Terkendalnya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (%)	100	100	100	240.344.066	100	286.585.152	100	295.112.390	100	192.138.415	100	204.346.458	2.18.2.07.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					212.964.337		222.294.550		246.088.778		255.281.123		289.910.701	
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (%)	100	100	100	212.964.337	100	222.294.550	100	246.088.778	100	255.281.123	100	289.910.701	2.18.2.07.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					4.485.201.716		5.174.954.055		5.206.297.960		4.935.807.524		5.412.207.523	
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					1.042.360.359		1.102.944.939		1.145.407.755		1.124.759.755		1.549.825.209	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase Peningkatan kapasitas daya saing Kepemudaan (%)	0	0	0,62	1.042.360.359	0,65	1.102.944.939	0,67	1.145.407.755	0,69	1.124.759.755	1	1.549.825.209	3.26.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					2.989.641.201		3.692.467.838		3.669.408.572		3.435.065.267		3.488.545.266	
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet yang berdaya saing (%)	0	0	14,7	2.989.641.201	15	3.692.467.838	16	3.669.408.572	17	3.435.065.267	18	3.488.545.266	3.26.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					453.200.156		379.541.278		391.481.633		375.982.502		373.837.048	
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Persentase peningkatan kapasitas anggota kepramukaan (%)	0	0	17	453.200.156	19	379.541.278	21	391.481.633	23	375.982.502	25	373.837.048	3.26.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					266.824.997		268.061.216		270.826.480		247.133.021		388.698.306	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					266.824.997		268.061.216		270.826.480		247.133.021		388.698.306	
Tercapainya kolaborasi integrasi,dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN	Persentase Data Sektoral Yang Memenuhi Standar Data dan Dapat Diakses Secara Online (%)	70	75	80	266.824.997	85	268.061.216	90	270.826.480	95	247.133.021	100	388.698.306	2.16.2.21.2.20.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					265.059.012		213.346.120		225.301.535		229.823.254		247.276.726	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					265.059.012		213.346.120		225.301.535		229.823.254		247.276.726	
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (%)	49,4	60	65	265.059.012	70	213.346.120	75	225.301.535	80	229.823.254	85	247.276.726	2.16.2.21.2.20.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					8.102.271.341		8.139.751.010		9.182.861.813		9.202.711.256		10.635.439.887	
2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.445.031.724		4.455.589.698		4.770.371.933		4.815.887.887		5.352.345.303	
Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	4.445.031.724	100	4.455.589.698	100	4.770.371.933	100	4.815.887.887	100	5.352.345.303	2.22.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					372.216.059		373.942.700		382.482.421		370.363.082		412.581.241	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (%)	51,28	60	64,1	372.216.059	67,95	373.942.700	69,23	382.482.421	71,79	370.363.082	73,08	412.581.241	2.22.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					467.684.058		469.365.260		472.548.674		485.353.528		406.986.997	
Meningkatnya peran serta masvarakat dalam	Prosentase Kesenian Tradisional yang	57,14	59	62,5	467.684.058	64,29	469.365.260	66,07	472.548.674	67,86	485.353.528	69,64	406.986.997	2.22.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
pengembangan kesenian tradisional	Dilestarikan dan Dikembangkan (%)													
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					208.620.055		283.097.579		225.542.763		261.723.679		334.023.616	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (%)	100	100	100	208.620.055	100	283.097.579	100	225.542.763	100	261.723.679	100	334.023.616	2.22.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					345.320.016		345.774.395		1.049.337.479		1.050.095.548		1.755.942.432	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (%)	63,92	65	67	345.320.016	70	345.774.395	74	1.049.337.479	78	1.050.095.548	82	1.755.942.432	2.22.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					2.263.399.429		2.211.981.378		2.282.578.543		2.219.287.532		2.373.560.298	
Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (%)	28.676	31.000	34.000	2.263.399.429	35.000	2.211.981.378	35.000	2.282.578.543	36.000	2.219.287.532	37.000	2.373.560.298	2.22.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					3.820.604.182		4.208.188.764		4.796.052.975		5.012.194.784		6.076.209.714	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.280.290.944		3.566.517.127		4.015.896.529		4.260.318.986		4.971.341.956	
Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	3.280.290.944	100	3.566.517.127	100	4.015.896.529	100	4.260.318.986	100	4.971.341.956	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					519.321.956		620.337.025		757.626.293		728.893.473		1.080.140.085	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (%)	67,45	67,5	67,75	519.321.956	67,9	620.337.025	68	757.626.293	68,3	728.893.473	68,5	1.080.140.085	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					20.991.282		21.334.612		22.530.153		22.982.325		24.727.673	
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase naskah kuno milik daerah yang dilestarikan dan didaftarkan (%)	0	16,67	33,33	20.991.282	50,00	21.334.612	66,67	22.530.153	83,33	22.982.325	100,00	24.727.673	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					61.211.617		87.189.323		98.451.206		108.186.044		124.264.738	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					38.975.213		61.032.526		67.125.822		73.566.510		82.843.159	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (%)	79	79	79,05	38.975.213	79,1	61.032.526	79,15	67.125.822	79,2	73.566.510	79,25	82.843.159	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					22.236.404		26.156.797		31.325.384		34.619.534		41.421.579	
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (%)	40	40	40,05	22.236.404	40,1	26.156.797	40,15	31.325.384	40,2	34.619.534	40,25	41.421.579	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					290.492.049		315.028.770		359.243.420		341.189.949		458.066.542	
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					127.044.027		193.996.244		216.592.653		236.278.322		289.030.576	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produktifitas perikanan budidaya (Kg)	5,16	5,16	5,17	127.044.027	5,18	193.996.244	5,19	216.592.653	5,2	236.278.322	5,21	289.030.576	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					163.448.022		121.032.526		142.650.767		104.911.627		169.035.966	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	44,73	44,74	44,76	163.448.022	44,77	121.032.526	44,78	142.650.767	44,79	104.911.627	44,8	169.035.966	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					15.438.750.822		19.740.775.360		23.374.345.563		23.353.486.797		26.824.715.115	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.492.920.682		6.687.535.114		6.971.019.883		7.361.162.267		8.568.042.256	
Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	5.492.920.682	100	6.687.535.114	100	6.971.019.883	100	7.361.162.267	100	8.568.042.256	3.26.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					8.140.946.662		11.325.813.569		14.613.684.783		14.591.351.149		15.059.793.517	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah Tamu Asing Hotel Berbintang (ribu orang) (Orang)	0,041	0,1	0,128	8.140.946.662	0,158	11.325.813.569	0,183	14.613.684.783	0,213	14.591.351.149	0,269	15.059.793.517	3.26.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					1.025.120.250		641.109.247		687.609.648		487.594.406		1.865.250.768	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata		0	0	10	1.025.120.250	20	641.109.247	30	687.609.648	40	487.594.406	50	1.865.250.768	3.26.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN					425.379.209		529.644.370		539.380.482		448.467.348		657.990.211	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL														
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (%)	0	0	21,92	425.379.209	28,77	529.644.370	35,62	539.380.482	42,47	448.467.348	49,32	657.990.211	3.26.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					354.384.019		556.673.060		562.650.767		464.911.627		673.638.363	
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (%)	0	0	48	354.384.019	55	556.673.060	62	562.650.767	68	464.911.627	75	673.638.363	3.26.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					2.099.675.619		2.791.534.408		2.760.662.686		2.785.502.091		3.187.288.378	
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					871.957.100		874.508.912		941.999.039		945.546.031		1.049.346.676	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Jumlah Produksi Padi (Ton)	18.006,25	18.010	18.065	871.957.100	18.095	874.508.912	18.115	941.999.039	18.145	945.546.031	18.170	1.049.346.676	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Jumlah Produksi Kopi Robusta (Ton)	38,43	40,1	42,85		47,55		52,3		57,53		64,33		
	Jumlah Produksi Kakao (Ton)	592,7	592,7	596,32		598,16		600,01		601,87		603,74		
	Jumlah produksi daging sapi (Ton)	413,07	413,07	413,47		413,87		414,27		414,67		415,7		
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					866.971.898		1.367.128.588		1.230.297.420		1.224.990.487		1.462.641.990	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase Sawah yang Diairi (%)	2,2	2,5	2,5	866.971.898	2,5	1.367.128.588	2,5	1.230.297.420	2,5	1.224.990.487	2,5	1.462.641.990	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					147.742.548		224.948.454		246.713.267		272.628.833		317.565.441	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	-	2,5	2,5	147.742.548	2,75	224.948.454	3	246.713.267	3,25	272.628.833	3,5	317.565.441	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					40.788.014		141.850.875		144.750.548		143.274.418		146.023.977	
Meningkatnya pengendalian dan	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%)	5,24	5,5	6,13	40.788.014	6,51	141.850.875	6,9	144.750.548	7,28	143.274.418	7,66	146.023.977	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
penanggulangan bencana pertanian														PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					172.216.059		183.097.579		196.902.412		199.062.322		211.710.294	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase Penyuluh yang Naik Jenjang jabatan (%)	5	5	5	172.216.059	5	183.097.579	5	196.902.412	5	199.062.322	5	211.710.294	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					2.841.564.978		3.012.658.838		3.104.518.908		3.072.945.057		3.949.265.828	
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					906.400.312		959.082.555		1.074.013.156		1.038.586.030		1.196.623.402	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien,merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	14,29	14,29	28,57	906.400.312	28,57	959.082.555	42,86	1.074.013.156	42,86	1.038.586.030	42,86	1.196.623.402	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					552.904.190		592.887.398		571.258.222		519.700.454		819.226.791	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (%)	69,76	72,09	74,42	552.904.190	76,74	592.887.398	79,07	571.258.222	81,40	519.700.454	83,72	819.226.791	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					861.080.296		959.082.555		918.763.704		968.409.283		980.719.311	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	800.000.000	800.000.000	800.000.000	861.080.296	900.000.000	959.082.555	900.000.000	918.763.704	1.000.000.000	968.409.283	1.000.000.000	980.719.311	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					249.260.086		252.849.037		272.978.344		276.956.275		308.360.646	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	100	100	100	249.260.086	100	252.849.037	100	272.978.344	100	276.956.275	100	308.360.646	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					271.920.094		248.757.293		267.505.482		269.293.015		644.335.678	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (%)	80	82	84	271.920.094	87	248.757.293	90	267.505.482	93	269.293.015	95	644.335.678	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					1.060.932.313		1.093.690.563		1.135.286.457		1.121.745.101		1.298.720.301	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					892.804.307		867.533.766		899.486.018		878.470.683		943.491.529	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri (%)	50	53	55	892.804.307	58	867.533.766	60	899.486.018	62	878.470.683	64	943.491.529	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Proporsi jumlah IKM	3,92	4	4,08		4,16		4,23		4,31		4,39		
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					168.128.006		226.156.797		235.800.439		243.274.418		355.228.772	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Persentase pertumbuhan informasi industri (%)	10	15	18	168.128.006	25	226.156.797	32	235.800.439	40	243.274.418	45	355.228.772	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					32.582.262.920		31.361.636.416		32.310.477.843		31.770.695.220		33.231.998.066	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					22.434.052.777		21.773.622.967		22.570.671.835		22.042.606.464		23.783.221.004	
Meningkatnya Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	22.434.052.777	100	21.773.622.967	100	22.570.671.835	100	22.042.606.464	100	23.783.221.004	4.01.2.16.2.20.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					9.496.794.967		9.225.771.761		9.364.241.233		9.340.422.954		9.032.356.875	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (%)	-	70	75	9.496.794.967	80	9.225.771.761	85	9.364.241.233	88	9.340.422.954	95	9.032.356.875	4.01.2.16.2.20.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan (*)	-	70	75		80		85		88		95		
	Indeks Reformasi Hukum (*)	97,5	72	73,18		74,21		75,24		76,27		77,3		
	Indeks Zakat Nasional (IZN) (Poin)	0,61	0,64	0,67		0,7		0,73		0,76		0,79		
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					651.415.176		362.241.688		375.564.775		387.665.802		416.420.187	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (%)	-	65	70	651.415.176	75	362.241.688	80	375.564.775	85	387.665.802	91	416.420.187	4.01.2.16.2.20.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (%)	-	70	75		80		85		90		94		
	Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)	4,75	4,78	4,8		4,82		4,83		4,85		4,87		
	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) (Indeks)	82	84	88		90		92		94		94		
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					27.427.348.469,44		25.491.581.972,93		27.957.019.840,19		28.156.578.375,01		32.949.710.352,75	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.478.523.197		12.203.806.041		14.231.591.968		14.450.259.892		16.136.816.726	4.02.2.16.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
Meningkatnya Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	12.478.523.197	100	12.203.806.041	100	14.231.591.968	100	14.450.259.892	100	16.136.816.726	
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					14.948.825.272,44		13.287.775.931,93		13.725.427.872,19		13.706.318.483,01		16.812.893.626,75	
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang - undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (%)	100	100	100	203.940.070,18	100	191.816.511,07	100	196.902.411,89	100	243.323.396,97	100	226.566.834,06	4.02.2.16.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (%)	100	100	100		100		100		100		100		
Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	100	100	100	14.744.885.202,26	100	13.095.959.420,86	100	13.528.525.460,3	100	13.462.995.086,04	100	16.586.326.792,69	4.02.2.16.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
5.01 - PERENCANAAN					6.528.198.126,79		6.591.967.239,98		7.259.898.208,31		7.222.388.615,81		8.333.205.809,53	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.798.972.093		5.922.976.045		6.417.555.145		6.408.184.569		7.212.624.119	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Meningkatnya Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	5.798.972.093	100	5.922.976.045	100	6.417.555.145	100	6.408.184.569	100	7.212.624.119	
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					349.523.172		351.061.656		378.624.588		375.329.260		669.188.626	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (%)	100	100	100	349.523.172	100	351.061.656	100	378.624.588	100	375.329.260	100	669.188.626	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (%)	100	100	100		100		100		100		100		
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI					379.702.861,79		317.929.538,98		463.718.475,31		438.874.786,81		451.393.064,53	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH														
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	100	100	100	117.593.253,32	100	105.829.857,05	100	154.871.162,09	100	146.355.905,65	100	150.093.708,52	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	100	100	100	136.815.951,69	100	105.797.248,38	100	155.318.667,57	100	146.192.184,76	100	151.014.188,06	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (%)	100	100	100	125.293.656,78	100	106.302.433,55	100	153.528.645,65	100	146.326.696,4	100	150.285.167,95	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.02 - KEUANGAN					73.770.134.272		71.089.505.179		71.606.936.984		70.924.895.648		75.463.997.119	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.654.217.611		8.407.995.013		8.717.237.284		8.513.989.629		9.145.498.862	
Meningkatnya Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	8.654.217.611	100	8.407.995.013	100	8.717.237.284	100	8.513.989.629	100	9.145.498.862	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					64.322.684.179		61.910.846.073		61.990.690.886		61.530.526.620		65.480.235.682	
Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	10	10	10	758.978.229	40	748.978.229	40	748.978.229	40	748.978.229	40	748.978.229	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (%)	47	47	47		30		30		30		30		
Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Penurunan SILPA (%)	4,5	4,5	4,5	63.503.868.325	4	61.102.868.325	3,5	61.182.713.138	3	60.724.548.872	3	64.674.257.934	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)	100	100	100		100		100		100		100		
Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (%)	100	100	100	59.837.625	100	58.999.519	100	58.999.519	100	56.999.519	100	56.999.519	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					318.883.357		309.810.753		321.205.453		313.716.354		336.985.676	
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)	3	3	3	318.883.357	3	309.810.753	3	321.205.453	3	313.716.354	3	336.985.676	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														DAERAH
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					474.349.125		460.853.340		577.803.361		566.663.045		501.276.899	
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	10,24	11,03	11,6	375.121.895	12	361.626.110	12,62	408.626.110	13,09	397.485.794	13,62	380.099.648	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (%)	25	50	75	52.434.730	100	52.434.730	100	96.384.751	100	96.384.751	100	71.384.751	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan (%)	100	100	100	46.792.500	100	46.792.500	100	72.792.500	100	72.792.500	100	49.792.500	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.03 - KEPEGAWAIAN					5.208.606.287		5.648.863.921,11		5.824.242.242,49		6.123.197.589,98		6.769.231.235,68	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.144.751.057		4.174.931.769		4.243.983.010		4.526.875.378		4.995.334.640	
Meningkatnya Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	4.144.751.057	100	4.174.931.769	100	4.243.983.010	100	4.526.875.378	100	4.995.334.640	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					1.063.855.230		1.473.932.152,11		1.580.259.232,49		1.596.322.211,98		1.773.896.595,68	
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (%)	100	100	100	57.986.001,71	100	113.497.611,62	100	116.506.933,36	100	112.663.865,14	100	119.822.273,56	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	75,97	76,72	77	886.434.111,41	77,5	1.127.627.494,92	78	1.215.402.161,8	79	1.234.076.774,92	80	1.378.111.594,74	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (%)	-	68	70	89.027.657,61	71	180.735.402,01	72	194.897.845,09	73	197.892.443,46	75	220.989.388,03	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (%)	99	100	100	30.407.459,27	100	52.071.643,56	100	53.452.292,24	100	51.689.128,46	100	54.973.339,35	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					579.800.234		553.919.924		571.258.222		592.390.686		674.455.563	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					579.800.234		553.919.924		571.258.222		592.390.686		674.455.563	
Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (%)	-	-	80	0	80	0	80	0	80	0	80	0	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (%)	-	-	85	579.800.234	85	553.919.924	85	571.258.222	85	592.390.686	85	674.455.563	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					422.364.043		423.862.384		435.422.149		376.559.625		302.505.499	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					177.044.027		157.598.498		158.451.206		199.531.161		115.059.943	
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (%)	-	-	100	177.044.027	100	157.598.498	100	158.451.206	100	199.531.161	100	115.059.943	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan					0		0		0		0		0	
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah					0		0		0		0		0	
Meningkatnya fasilitasi pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah					0		0		0		0		0	
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					245.320.016		266.263.886		276.970.943		177.028.464		187.445.556	
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (%)	0	0	0	245.320.016	87	266.263.886	88	276.970.943	88	177.028.464	89	187.445.556	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					8.101.212.659		8.908.517.621		9.256.065.486		8.942.733.724		9.480.875.272	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.385.175.231		8.152.379.903		8.450.472.693		8.136.002.087		8.690.810.910	
Meningkatnya Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	7.385.175.231	100	8.152.379.903	100	8.450.472.693	100	8.136.002.087	100	8.690.810.910	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN					500.732.265		548.596.133		581.660.458		579.315.315		534.580.288	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENGAWASAN														
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindakanjuz Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (%)	76	77	78	500.732.265	79	548.596.133	80	581.660.458	81	579.315.315	82	534.580.288	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					215.305.163		207.541.585		223.932.335		227.416.322		255.484.074	
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan asistensi	Level Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (PK APIP) (Level)	3	3	3,1	215.305.163	3,2	207.541.585	3,3	223.932.335	3,4	227.416.322	3,5	255.484.074	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
7.01 - KECAMATAN														
					20.007.814.225,54		22.820.594.783,79		24.416.629.017,02		24.722.635.956,58		27.562.100.681,33	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
					16.575.477.013,08		17.537.838.743,51		18.902.449.316,85		19.192.365.337,26		21.431.843.191,1	
Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (Talawi)	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	2.227.735.280,56	100	2.356.170.530,82	100	2.539.038.135,41	100	2.577.531.076,06	100	2.877.814.391,84	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN TALAWI
Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (Barangin)	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	5.185.335.200,86	100	5.486.719.796,4	100	5.913.806.757,39	100	6.004.672.022,71	100	6.705.505.329,31	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN BARANGIN
Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (Lembah Segar)	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	7.084.057.017,14	100	7.495.800.052,38	100	8.079.274.074,12	100	8.203.411.843,81	100	9.160.870.077,42	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN LEMBAH SEGAR
Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (Silungkang)	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	2.078.349.514,52	100	2.199.148.363,91	100	2.370.330.349,93	100	2.406.750.394,68	100	2.687.653.392,53	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN SILUNGKANG
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
					518.595.416,61		814.315.509,56		864.757.498,21		865.440.792,49		947.430.991,66	
Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Talawi)	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	8.376.803,74	100	11.334.612,02	100	12.530.153,48	100	12.982.325,37	100	14.727.672,65	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN TALAWI
Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Barangin)	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	6.755.797,43	100	9.348.596,18	100	10.076.292,08	100	10.231.113,57	100	11.425.234,14	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN BARANGIN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Lembah Segar)	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	11.949.471,21	100	14.594.341,81	100	15.730.367,21	100	15.972.063,16	100	12.313.359,75	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN LEMBAH SEGAR
Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Silungkang)	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	11.315.045,38	100	14.168.265,02	100	15.438.939,11	100	15.795.162,53	100	17.719.231,15	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN SILUNGKANG
Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Kelurahan Durian 1)	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	27.413.681,05	100	56.979.284,68	100	61.414.559,48	100	62.358.192,13	100	69.636.305,96	7.01.0.00.0.00.01.0001 - KELURAHAN DURIAN 1
Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Kelurahan Durian 2)	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	44.532.667,96	100	74.269.907,49	100	80.051.086,36	100	81.281.068,61	100	90.767.758,45	7.01.0.00.0.00.01.0002 - KELURAHAN DURIAN 2
Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Kelurahan Lubang Panjang)	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	38.520.007,11	100	68.196.963,61	100	73.505.423,68	100	74.634.832,04	100	83.345.809,5	7.01.0.00.0.00.01.0003 - KELURAHAN LUBANG PANJANG
Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Kelurahan Saringan)	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	44.209.527,19	100	73.943.526,46	100	79.699.299,62	100	80.923.877,23	100	90.368.877,85	7.01.0.00.0.00.01.0004 - KELURAHAN SARINGAN
Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Kelurahan Air Dingin)	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	61.640.031,19	100	87.189.323,21	100	89.501.096,31	100	86.548.835,8	100	92.047.954,03	7.01.0.00.0.00.02.0001 - KELURAHAN AIR DINGIN
Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Kelurahan Aur Mulyo)	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	45.602.157,79	100	75.350.433,43	100	81.215.382,85	100	82.463.253,87	100	92.087.923,1	7.01.0.00.0.00.02.0002 - KELURAHAN AUR MULYO
Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Kelurahan Kubang Sirakuk Utara)	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	61.640.031,19	100	87.189.323,21	100	89.501.096,31	100	86.548.835,8	100	92.047.954,03	7.01.0.00.0.00.02.0003 - KELURAHAN KUBANG SIRAKUK UTARA
Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan)	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	46.487.061,91	100	76.243.895,56	100	82.178.730,59	100	83.441.403,71	100	93.180.236,84	7.01.0.00.0.00.02.0004 - KELURAHAN KUBANG SIRAKUK SELATAN
Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	48.513.102,27	100	78.317.713,67	100	84.413.974,82	100	85.710.992,87	100	95.714.720,18	7.01.0.00.0.00.02.0005 - KELURAHAN PASAR



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
(Kelurahan Pasar)														
Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Kelurahan Tanah Lapang)	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	61.640.031,19	100	87.189.323,21	100	89.501.096,31	100	86.548.835,8	100	92.047.954,03	7.01.0.00.0.00.02.0006 - KELURAHAN TANAH LAPANG
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.579.274.942,54		4.120.173.804,02		4.240.888.652,78		4.252.397.174,32		5.035.219.284,95	
Meningkatnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Talawi)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	0	0	0	139.785.144,21	0	225.018.791,26	0	227.534.281,81	0	233.760.813,4	0	275.003.054,74	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN TALAWI
Meningkatnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Barangin)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	50.450.175,54	100	95.397.134,28	100	97.822.859,25	100	135.177.146,47	100	116.588.055,48	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN BARANGIN
Meningkatnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Lembah Segar)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	101.622.949,76	100	163.243.383,2	100	170.950.268,79	100	166.153.739,03	100	199.505.244,6	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN LEMBAH SEGAR
Meningkatnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Silungkang)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	153.769.889,48	100	239.143.747,6	100	242.758.727,07	100	249.219.181,52	100	292.081.544,68	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN SILUNGKANG
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Durian 1)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	234.277.014,65	100	360.859.078,49	100	372.948.394,94	100	369.924.573,32	100	441.018.051,31	7.01.0.00.0.00.01.0001 - KELURAHAN DURIAN 1
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Durian 2)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	270.262.205,59	100	397.205.057,79	100	412.123.549,27	100	409.701.653,16	100	485.437.698,76	7.01.0.00.0.00.01.0002 - KELURAHAN DURIAN 2
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Lubang Panjang)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	236.021.044,87	100	362.620.594,03	100	374.847.027,34	100	371.852.378,53	100	443.170.859,66	7.01.0.00.0.00.01.0003 - KELURAHAN LUBANG PANJANG
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Saringan)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	323.412.446,71	100	450.888.183,24	100	469.985.376,16	100	468.452.525,3	100	551.045.657,65	7.01.0.00.0.00.01.0004 - KELURAHAN SARINGAN
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Air Dingin)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	170.324.310,03	100	296.265.183,14	100	303.326.502,59	100	299.232.943,45	100	362.075.673,26	7.01.0.00.0.00.02.0001 - KELURAHAN AIR DINGIN
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Aur Mulyo)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	176.255.818,14	100	302.256.160,33	100	309.783.817,84	100	305.789.475,61	100	369.397.449,19	7.01.0.00.0.00.02.0002 - KELURAHAN AUR MULYO
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Kubang Sirakuk Utara)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	170.324.310,03	100	296.265.183,14	100	303.326.502,59	100	299.232.943,45	100	362.075.673,26	7.01.0.00.0.00.02.0003 - KELURAHAN KUBANG SIRAKUK UTARA
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	180.893.273,94	100	306.940.112,02	100	314.832.368,83	100	310.915.596,98	100	375.121.863,59	7.01.0.00.0.00.02.0004 - KELURAHAN KUBANG SIRAKUK SELATAN



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
(Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan)														
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Pasar)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	201.552.051,37	100	327.806.014,1	100	337.322.475,5	100	333.751.263,24	100	400.622.787,35	7.01.0.00.0.00.02.0005 KELURAHAN PASAR
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Tanah Lapang)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	170.324.308,22	100	296.265.181,4	100	303.326.500,8	100	299.232.940,86	100	362.075.671,42	7.01.0.00.0.00.02.0006 - KELURAHAN TANAH LAPANG
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					106.512.209,12		106.767.122,22		128.774.602,47		129.080.408,83		52.262.807,89	
Meningkatnya Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (Talawi)	indeks layanan infrastruktur	100	100	100	15.997.040,34	100	16.046.271,88	100	21.163.514,25	100	21.211.683,7	100	3.880.719,31	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN TALAWI
Meningkatnya Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (Barangin)	Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (%)	100	100	100	34.064.003,12	100	34.590.825,55	100	40.740.131,56	100	41.251.348,65	100	20.386.713,56	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN BARANGIN
Meningkatnya Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (Lembah Segar)	Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (%)	100	100	100	36.239.363,87	100	35.898.665,4	100	41.277.138,14	100	40.991.702,15	100	19.282.138,12	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN LEMBAH SEGAR
Meningkatnya Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (Silungkang)	Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (%)	100	100	100	20.211.801,79	100	20.231.359,39	100	25.593.818,52	100	25.625.674,33	100	8.713.236,9	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN SILUNGKANG
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					118.630.781,29		140.195.149,88		144.420.333,85		146.054.888,39		52.327.635,37	
Meningkatnya Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik (Talawi)	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik (%)	0	0	0	34.064.003,12	0	39.590.825,55	0	40.740.131,56	0	41.251.348,65	0	12.886.713,56	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN TALAWI
Meningkatnya Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik (Barangin)	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik (%)	100	100	100	20.438.401,87	100	26.103.252,62	100	27.160.087,7	100	27.789.395,22	100	9.204.795,4	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN BARANGIN
Meningkatnya Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik (Lembah Segar)	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik (%)	100	100	100	21.344.802,18	100	26.539.199,24	100	27.160.087,7	100	27.356.651,04	100	8.284.315,86	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN LEMBAH SEGAR
Meningkatnya Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik (Silungkang)	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik (%)	100	100	100	42.783.574,12	100	47.961.872,47	100	49.360.026,89	100	49.657.493,48	100	21.951.810,55	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN SILUNGKANG
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					109.323.862,9		101.304.454,6		135.338.612,86		137.297.355,29		43.016.770,36	
Terselenggaranya Pemerintahan Desa	Persentase Terselenggaranya	0	0	0	34.064.003,12	0	31.590.825,55	0	40.740.131,56	0	41.251.348,65	0	12.886.713,56	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN TALAWI



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Dengan Baik(Talawi)	Pemerintahan Desa Dengan Baik (%)													
Terselenggaranya Pemerintahan Desa Dengan Baik(Barangin)	Persentase Terselenggaranya Pemerintahan Desa Dengan Baik (%)	100	100	100	19.532.001,56	100	18.231.359,39	100	26.265.076,74	100	26.923.906,86	100	8.284.315,86	7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BARANGIN
Terselenggaranya Pemerintahan Desa Dengan Baik(Lembah Segar)	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik (%)	100	100	100	20.710.321,97	100	19.364.820,59	100	27.428.590,99	100	28.049.041,73	100	9.480.939,27	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN LEMBAH SEGAR
Terselenggaranya Pemerintahan Desa Dengan Baik(Silungkang)	Persentase Terselenggaranya Pemerintahan Desa Dengan Baik (%)	100	100	100	35.017.536,25	100	32.117.449,07	100	40.904.813,57	100	41.073.058,05	100	12.364.801,67	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN SILUNGKANG
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					4.877.555.537		4.430.814.519		4.647.567.837		4.713.579.461		5.112.563.385	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.770.914.726		2.645.498.445		2.709.645.691		2.827.983.210		3.056.544.362	
Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	2.770.914.726	100	2.645.498.445	100	2.709.645.691	100	2.827.983.210	100	3.056.544.362	8.01.1.05.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					987.680.374		435.946.616		492.256.030		476.018.597		552.287.724	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	0	0	100	987.680.374	100	435.946.616	100	492.256.030	100	476.018.597	100	552.287.724	8.01.1.05.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					509.800.234		653.919.924		671.258.222		649.116.269		690.359.655	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (%)	100	100	100	509.800.234	100	653.919.924	100	671.258.222	100	649.116.269	100	690.359.655	8.01.1.05.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					145.320.016		143.594.662		153.700.658		160.584.185		150.626.375	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (%)	100	-	100	145.320.016	70	143.594.662	75	153.700.658	80	160.584.185	85	150.626.375	8.01.1.05.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					110.640.031		115.908.256		128.451.206		123.858.603		110.457.545	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya ketahanan ekonomi sosial,dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (%)	100	100	100	110.640.031	100	115.908.256	100	128.451.206	100	123.858.603	100	110.457.545	8.01.1.05.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					353.200.156		435.946.616		492.256.030		476.018.597		552.287.724	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (%)	100	100	100	353.200.156	100	435.946.616	100	492.256.030	100	476.018.597	100	552.287.724	8.01.1.05.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL KESELURUHAN					577.868.092.938		597.991.158.787		34.895.207.235,01		36.647.852.486,38		05.917.150.670,25	

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.2.1 INDIKATOR KINERJA MAKRO

Indikator Kinerja Makro (IKM) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai capaian pembangunan daerah secara menyeluruh. IKM menggambarkan hasil kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kebijakan pembangunan daerah. Dengan demikian, IKM bukan hanya berfungsi sebagai alat evaluasi capaian pembangunan, melainkan juga sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Penyajian indikator ini juga penting untuk memastikan adanya arah kebijakan yang berbasis pada data dan kondisi objektif daerah serta untuk memandu perumusan prioritas pembangunan berikutnya, termasuk sebagai dasar evaluasi dan penyesuaian target jika diperlukan. Pemantauan terhadap capaian indikator kinerja makro maka pemerintah daerah dapat lebih cepat merespons tantangan atau memanfaatkan peluang, agar pembangunan dapat berlangsung lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Indikator Kinerja Makro RPJMD Kota Sawahlunto tahun 2025 -2030 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2.
Indikator Kinerja Makro

PROYEKSI INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN									KONDISI AKHIR RPJMD
NO	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	4,27	6,71	7,08	6,97	6,97	5,77	5,77
2	PDRB Per Kapita ADHB	Rp. Juta	80,61	89,48	99,53	110,71	123,5	136,45	136,45
3	PDRB Per Kapita ADHK	Rp. Juta	47,81	50,32	53,16	56,13	59,29	61,93	61,93
4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	77,45	78,11	78,79	79,46	80,13	80,81	80,81
5	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,43	74,75	75,07	75,39	75,71	76,03	76,03
6	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,1	14,32	14,53	14,76	14,97	15,19	15,19
7	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,65	10,78	10,9	11,02	11,13	11,25	11,25
8	Pengeluaran Per Kapita	Rp. ribu	11.354	11.527	11.706	11.891	12.082	12.280	12.280
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	5,30	5,06	4,83	4,61	4,40	4,20	4,20
10	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	1.379	1.358	1.337	1.315	1.294	1.275	1.275
11	Tingkat Kemiskinan	Persentase	1,98	1,92	1,87	1,81	1,76	1,71	1,71
12	Gini Ratio	Indeks	0,297	0,296	0,295	0,294	0,293	0,291	0,291

4.2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang berfungsi sebagai alat ukur kuantitatif yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Tujuan dari penetapan IKU adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja pembangunan daerah yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Secara rinci, Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada RPJMD tahun 2025 -2030 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET						KONDISI AKHIR RPJMD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Angka	4,02	4,27	6,71	7,08	6,97	6,97	5,77	5,77
2	PDRB per kapita ADHB	Rp. Juta	73,59	80,61	89,48	99,53	110,71	123,5	136,45	136,45
3	Tingkat Kemiskinan	Angka	2,33	1,98	1,92	1,87	1,81	1,76	1,71	1,71
4	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Angka	88,44	93,84	94,74	95,63	96,50	97,42	98,31	98,31
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka	5,55	5,30	5,06	4,83	4,61	4,40	4,20	4,20
6	Gini Ratio	Indeks	0,299	0,297	0,296	0,295	0,294	0,293	0,291	0,291
7	Proporsi kontribusi PDRB Kota	Angka	1,54	1,59	1,61	1,63	1,64	1,66	1,68	1,68
8	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	11,23	11,44	11,52	11,60	11,69	11,77	11,85	11,85
9	Proporsi jumlah UKM non pertanian	Angka	19,10	19,20	19,30	19,40	19,49	19,59	19,69	19,69
10	Proporsi jumlah IKM	Angka	3,92	4,00	4,08	4,16	4,23	4,31	4,39	4,39
11	Rasio Kewirausahaan	Rasio	3,56	3,65	3,87	4,09	4,31	4,53	4,75	4,75
12	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	Rasio	1,490	1,673	1,764	1,855	1,946	2,037	2,128	2,128
13	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	14,30	7,610	8,048	8,486	8,924	9,362	13,380	13,380
14	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	24,01	23,69	23,70	23,71	23,71	23,72	23,73	23,73
15	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	52,25	52,96	54,16	55,36	56,56	57,76	62,62	62,62
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	63,35	63,35-64,73	63,66-65,27	63,96-65,81	64,27-66,35	64,57-66,89	64,88-67,43	64,88-67,43
17	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	58,55	58,55	59,92	61,29	62,66	64,03	65,40	65,40
18	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal	%	-	55,20	55,70	56,20	56,70	57,20	57,70	57,70
19	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	%	-	74,18	74,66	75,14	75,61	76,09	76,57	76,57
20	indeks Desa (rata-rata indeks desa)	Indeks	-	78,72	79,02	79,32	79,62	79,92	80,22	80,22
21	Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan	%	8,76	8,86	8,90	8,95	8,99	9,04	9,08	9,08
22	Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	%	8,19	7,81	7,33	6,85	6,36	5,39	4,91	4,91
23	Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Juta/ Orang	50,21	50,881	52,481	54,081	55,681	57,281	58,88	58,881
24	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Indeks	43,04	53,80	55,11	56,42	57,73	59,04	60,35	60,35
25	Indeks Transformasi Pilar Pemerintah	Indeks	-	-	31,10	32,10	33,10	34,10	35,10	35,10
26	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,18	3,85	3,88	3,91	3,94	3,97	4,00	4,00
27	Indeks Kinerja Infrastruktur	Indeks	69,18	70,13	71,33	72,52	73,32	74,92	76,12	76,12
28	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Indeks	114,22	103,52	103,51-102,24	111,65-110,38	110,37-109,1	109,09-107,82	107,81-106,54	107,81-106,54
29	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	60,89	71,91	72,12	72,33	72,55	72,76	72,97	72,97



NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET						KONDISI AKHIR RPJMD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
30	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	64,40	64,43	64,45	64,50	64,55	64,60	64,65	64,65
31	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,43	0,45	0,47	0,49	0,51	0,53	0,55	0,55
32	Konsumsi listrik per kapita	Kwh	1237,00	1237,00	1353,60	1470,20	1586,80	1703,40	1.820,00	1820,00
33	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan	%	49,67	52,02	54,37	56,73	59,08	61,44	63,79	63,79
34	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	8,19	15,95	18,90	21,90	24,91	27,91	33,94	33,94
35	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau dan berkelanjutan	%	91,39	77,17	80,21	83,25	86,29	90,40	92,71	92,71
36	Kapasitas Air Baku	m ³ /detik	0,110	0,149	0,151	0,154	0,156	0,159	0,161	0,161
37	Indek Konektivitas darat	Indeks	55,66	55,92	57,47	59,02	60,57	62,12	63,67	63,67
38	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks	47,79	47,79	49,90	52,01	54,12	56,23	58,34	58,34
39	Indeks Ketahanan Nasional	Indeks	-	3,06	3,07	3,08	3,09	3,10	3,11	3,11
40	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	-	3,20	3,50	3,70	4,20	4,30	4,50	4,50
41	Angka Kriminalitas	Angka	0,037	0,025	0,024	0,022	0,021	0,019	0,018	0,018
42	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	Indeks	-	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	14,00
43	Persentase Pemajuan Kebudayaan yang dilaksanakan	%	68,52	74,00	76,80	78,77	80,76	83,43	85,49	85,49
44	Rasio PDRB Akomodasi Mamin	Rasio	2,30	2,33	2,36	2,40	2,43	2,47	2,50	2,50
45	PAD sektor Pariwisata	%	3,10	3,200	3,400	3,600	3,800	4,000	4,20	4,20
46	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Ekonomi Kreatif daerah	%	4,59	6,205	6,337	6,469	6,602	6,734	6,87	6,866
47	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76,68	77,45	78,11	78,79	79,46	80,13	80,81	80,81
48	Persentase Satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional									
	- Literasi Membaca	%	82,73	82,83	82,90	83,00	83,10	83,20	83,25	83,25
	- Numerasi	%	79,57	79,67	79,70	79,85	79,90	79,91	79,92	79,92
49	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	10,53	10,65	10,78	10,9	11,02	11,13	11,25	11,25
50	Harapan Lama Sekolah	tahun	13,86	14,1	14,32	14,53	14,76	14,97	15,19	15,19
51	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	15,19	16,89	16,85	16,81	16,76	16,72	16,68	16,68
52	Angka Harapan Hidup	tahun	74,12	74,43	74,75	75,07	75,39	75,71	76,03	76,03
53	Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	20	17,30	16,05	14,80	13,55	12,30	11,05	11,05
54	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional	%	99,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	63,90	65,20	66,40	67,50	68,60	69,70	70,60	70,60
56	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,270	0,270	0,270	0,269	0,269	0,268	0,268	0,268



NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET						KONDISI AKHIR RPJMD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
57	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	65,47	67,52	67,706	67,892	68,078	68,264	68,45	68,45
58	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	95,73	95,83	95,93	96,03	96,13	96,23	96,33	96,33
59	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	-	56,70	57,30	57,90	58,50	59,10	59,70	59,70
60	Persentase peningkatan partisipasi pemuda berwirausaha	%	-	0,36	0,43	0,50	0,70	0,80	1,00	1,00
61	Persentase peningkatan prestasi Olahraga	%	-	0,25	0,30	1,20	1,70	1,90	2,05	2,05
62	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	75,04	76,35	77,56	78,17	79,01	80,47	82,72	82,72
63	Indeks inovasi daerah	Indeks	72,87	73,21	74,67	76,14	77,60	79,07	80,53	80,53
64	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Angka	-	3,15	3,16	3,17	3,18	3,19	3,20	3,20
65	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
66	Nilai AKIP Instansi Pemerintah	Angka	64,00	65,23	68,17	70,11	71,02	72,03	73,20	73,20
67	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Angka	3,016	3,20	3,25	3,30	3,35	3,40	3,45	3,45
68	Indeks Profesional ASN	Indeks	-	78,72	81,00	84,00	87,00	90,00	90,00	90,00
69	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkungan Pemerintahan Daerah	Indeks	43,18	50,58	50,60	50,65	50,70	50,75	60,00	60,00
70	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	94,81	94,83	94,85	94,90	94,95	94,98	95,00	95,00
71	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	70,785	70,85	71	72	73	74	75	75

4.2.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator Kinerja Daerah (IKD) beserta target yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Konsumsi listrik per kapita	kWh/kapita	1.237	1.354	1.470	1.587	1.703	1.820	1.820
2	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	84,5	85,6	86,7	87,8	88,9	90	90
3	Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	%	7,81	7,33	6,85	6,36	5,39	4,91	4,91
4	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	(m ³ /detik)	0,149	0,151	0,154	0,156	0,159	0,161	0,161
5	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	%	50,00	52,50	55,00	57,50	60,00	62,5	62,5
6	Indeks tutupan lahan	Indeks	60,54	60,59	60,65	60,70	60,76	60,81	60,81
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71,91	72,12	72,33	72,55	72,76	72,97	72,97
8	Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	%	15,95	18,90	21,90	24,91	27,91	33,94	33,94
9	Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	27,44	30,26	33,31	36,00	39,25	37,98	37,98
10	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	% RT	73,46	74,56	75,66	76,76	77,86	78,96	78,96
11	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	103,52	103,51-102,24	111,65-110,38	110,37-109,1	109,09-107,82	107,81-106,54	107,81-106,54
12	Jumlah Penduduk	Ribu Jiwa	69,70	70,66	71,62	72,56	73,48	74,40	74,40
13	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,46	1,45	1,44	1,42	1,40	1,39	1,39
14	Rasio Penduduk	%	101,17	101,14	101,09	101,02	100,92	100,86	100,86
15	Kepadatan Penduduk	Org/km ²	254,87	258,42	261,91	265,34	268,73	272,08	272,08
II ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,44	5,49	5,55	5,60	5,66	5,71	5,71
2	Tingkat Kemiskinan	%	1,98	1,92	1,87	1,81	1,76	1,71	1,71
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	73,78	73,78	73,78	73,78	73,78	179,83	179,83
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,61	4,66	4,35	4,31	4,2	4,09	4,09
5	Gini Ratio	Indeks	0,297	0,296	0,295	0,294	0,293	0,291	0,291
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76,55	77,45	78,11	78,79	79,46	80,13	80,81
7	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	Juta/Org	93,84	94,74	95,63	96,50	97,42	98,31	98,31
8	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,43	74,75	75,07	75,39	75,71	76,03	76,03
9	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	134	134	134	134	134	0	0
10	Prevalensi Stunting	%	17,30	16,05	14,80	13,55	12,30	11,05	11,05
11	Cakupan penemuan dan pengobatan	%	45	53,60	62,20	70,80	79,40	88,00	88,00



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)								
12	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	%	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
13	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional	%	100	100	100	100	100	100	100
14	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai SKM pada asesmen tingkat nasional								
a	- Angka Literasi	%	82,83	82,90	83,00	83,10	83,20	83,25	83,25
b	- Angka Numerasi	%	79,67	79,70	79,85	79,90	79,91	79,92	79,92
15	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,65	10,78	10,90	11,02	11,13	11,25	11,25
16	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,1	14,32	14,53	14,76	14,97	15,19	15,19
17	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi pendidikan tinggi	%	14,00	14,12	14,24	14,36	14,47	14,58	14,58
18	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	%	74,18	74,66	75,14	75,61	76,09	76,57	76,57
19	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	58,55	59,92	61,29	62,66	64,03	65,40	65,40
20	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	%	55,2	55,70	56,20	56,70	57,20	57,70	57,70
21	Persentase pelestarian cagar budaya	%	39,87	41,69	43,50	45,32	47,13	48,95	48,95
22	Kampung Moderasi Beragama	Indeks	4	6	8	10	12	14	14
23	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	65,4	65,40	65,40	65,40	65,40	69,4	69,4
24	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,270	0,270	0,269	0,269	0,268	0,268	0,268
25	Indeks Perlindungan Khusus Anak	Indeks	79,66	80,16	80,66	81,16	81,66	82,16	82,16
26	Indeks Literasi Digital	Indeks	53,8	53,80	53,80	53,80	53,80	60,35	60,35
27	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	4,78	4,80	4,82	4,83	4,85	4,86	4,86
28	Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab/kota/provinsi	Unit Layanan	1	1	1	1	1	1	1
29	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan	orang	493	647	784	909	1.019	1.128	1.128
III ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	8,82	90,33	92,45	94,58	96,70	11,85	11,85
2	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	2,33	2,35	2,37	2,39	2,41	2,50	2,50



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	ribu orang	0,100	0,128	0,158	0,183	0,213	0,269	0,269
4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi	%	6,205	6,195	6,185	6,165	6,155	6,866	6,866
5	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian	%	10,74	10,76	10,78	10,80	10,82	19,69	19,69
6	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah	%	4	4,08	4,16	4,23	4,31	4,39	4,39
7	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,96	4,09	4,23	4,36	4,49	4,75	4,75
8	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	%	1,673	1,76	1,86	1,95	2,04	2,13	2,128
9	Return on Aset (ROA) BUMD	%	0	0,20	0,40	0,61	0,81	1,01	1,01
10	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	52,96	54,16	55,36	56,56	57,76	62,62	62,62
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	63,35-64,73	63,66-65,27	63,96-65,81	64,27-66,35	64,57-66,89	64,88-67,43	64,88-67,43
12	Indeks Inovasi Daerah	Angka	73,21	74,67	76,14	77,60	79,07	80,53	80,53
13	Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan	%	8,86	8,90	8,95	8,99	9,04	9,08	9,08
14	Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Juta/orang	50,881	52,481	54,081	55,681	57,281	58,881	58,881
15	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Angka	53,8	55,11	56,42	57,73	59,04	60,35	60,35
16	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	%	10	9,78	9,56	9,34	9,12	8,90	8,9
17	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	23,69	23,70	23,71	23,71	23,72	23,73	23,73
18	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	14,30	7,610	8,048	8,486	8,924	9,362	13,380
19	Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi	%	1,52	1,52	1,52	1,53	1,54	1,54	1,54
20	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	77,17	80,21	83,25	86,29	90,40	92,71	92,71
21	Persentase Desa Mandiri	%	9,44	10,54	11,04	11,64	12,54	13,44	13,44
22	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,22	0,23	0,25	0,27	0,30	0,68	0,68
23	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB		2,99	5,69	8,39	11,09	13,79	16,49	16,49
24	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Kabupaten/Kota	Rupiah	831.886	998.616	1.165.346	1.332.075	1.498.805	1.665.535	1.665.535
25	Total Kredit/PDRB	%	13,13	13,83	14,54	15,24	15,95	16,66	16,66
26	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan	%	3,46	3,49	3,52	3,55	3,58	3,61	3,61
IV ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	72,15	73,18	74,21	75,24	76,27	77,30	77,30



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,41	3,44	3,47	3,51	3,54	3,57	3,57
3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,19	3,20	3,21	3,22	3,22	4,00	4,00
4	Survey penilaian integritas (SPI) KPK	Nilai	77,25	78,39	79,53	80,67	81,81	82,95	82,95
5	Indeks Persepsi Anti Korupsi	%	86,05	86,75	87,45	88,14	88,84	89,54	89,54
6	Pelanggaran Peraturan Daerah	Angka	200	198,00	196,00	194,00	192,00	190,00	190
7	Angka Kriminalitas	Angka	4,44	4,38	4,33	4,27	4,22	4,16	4,16
8	Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilu	%	83,01	83,61	84,22	84,82	85,43	86,03	86,03
9	Persentase Kerjasama yang Terlaksana	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
10	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	%	3,06	3,07	3,08	3,08	3,09	3,10	3,1
11	Penilaian Capaian Aksi HAM	Nilai	Kota Peduli HAM	Kota Peduli HAM	Kota Peduli HAM	Kota Peduli HAM	Kota Peduli HAM	Kota Peduli HAM	Kota Peduli HAM
12	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	-	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,10
13	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Indeks	0,64	0,67	0,70	0,73	0,76	0,79	0,79
INDIKATOR KINERJA KUNCI									
I	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
A	Pendidikan								
1	Tingkat partisipasi penduduk usia 5-6 tahun jenjang PAUD	%	75,53	75,90	76,20	76,50	76,70	76,90	76,90
2	Tingkat partisipasi penduduk usia 7-12 tahun jenjang Pendidikan Dasar	%	98,49	98,78	99,07	99,36	99,65	99,85	99,85
3	Tingkat partisipasi penduduk usia 13-15 tahun jenjang Pendidikan menengah pertama	%	97,28	97,38	97,48	97,68	97,78	97,90	97,90
4	Tingkat partisipasi penduduk usia 7-18 tahun jenjang Pendidikan Kesenjangan	%	36,50	36,75	37,00	37,50	37,75	38,00	38,00
B	Kesehatan								
1	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio	1,46	1,46	1,47	1,47	1,47	1,48	1,48
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

[illegible]



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	8,94	8,94	8,94	8,94	8,94	8,94	8,94
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	90,00
E	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	jiwa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	jiwa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	jiwa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
F	SOSIAL								
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100
II	Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
A	Tenaga Kerja								



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,03	0,05	0,1	0,3	0,5	0,53	0,53
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	93,84	94,74	95,63	96,50	97,42	98,31	98,31
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	91	91,20	91,48	91,66	91,85	92	92
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	44	45	47	50	55	65	65
B Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	8,49	8,50	8,51	8,52	8,53	8,54	8,54
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	%	0,234	0,266	0,282	0,293	0,309	0,319	0,319
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	47,31	42,20	37,33	32,45	27,33	22,43	22,43
C Pangan									
1	Persentase ketersediaan cadangan pangan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
D Pertanian									
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	86,07	88,85	91,64	94,43	97,21	100,00	100
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentesp;	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
E Lingkungan Hidup									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Indeks	71,91	72,122	72,334	72,546	72,758	72,97	72,97
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	99,47	99,58	99,68	99,79	99,89	100,00	100



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	78,26	80	82	85	87	90	90
F	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
1	Perekaman KTP elektronik	%	99,34	99,42	99,45	99,50	99,53	99,55	99,55
2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	75,98	80	85	90	93	95	95
3	Kepemilikan akta kelahiran	%	65	68	70	75	80	85	85
4	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	93,59	94,87	96,15	97,44	98,72	100,00	100
G	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa								
1	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	100	0	0	0	0	00	0
H	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana								
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	2,36	2,34	2,33	2,32	2,30	2,29	2,29
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	%	82,30	82,60	82,90	83,20	83,50	83,80	83,80
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	12,82	12,78	12,75	12,73	12,71	12,68	12,68
I	Perhubungan								
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio	0,56	0,57	0,59	0,61	0,62	0,64	0,64
2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	Rasio	0,25	0,32	0,39	0,46	0,53	0,60	0,60
J	Komunikasi dan Informatika								
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan erintegrasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	77,07	77,30	77,54	77,77	78,00	78,24	78,24
K	Koperasi, usaha kecil dan menengah								
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas		9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	14,00
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha		0,70	0,89	1,07	1,26	1,45	1,64	1,64
L	Penanaman Modal								



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	8,83	9,03	9,23	9,43	9,63	9,83	9,83
M	Kepemudaan dan Olahraga								
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		3,01	3,04	3,08	4,02	4,06	4,10	4,10
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan		6,04	6,83	7,62	8,42	9,21	10,00	10
3	Peningkatan prestasi olahraga		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
N	Statistik								
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
O	Persandian								
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	35,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	80
P	Kebudayaan								
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
Q	Perpustakaan								
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
R	Kearsipan								
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps1 40 dan 59 U 43/2009)	%	79,00	79,05	79,10	79,15	79,20	79,25	79,25
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	40,00	40,05	40,10	40,15	40,20	40,25	40,25
III	Urusan Pilihan								
A	Kelautan dan Perikanan								
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	Pariwisata								
1	Persentase pertumbuhan jumlah	%							



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	wisatawan mancanegara per kebangsaan								
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%							
3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%							
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,20
5	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun	%							
C	Pertanian								
1	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/ kota	%	2,50	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,50
2	Peningkatan produktifitas padi per hektar per tahun.	Ton/Ha/Tahun	5,875	5,880	5,885	5,890	5,895	5,900	5,900
D	Perdagangan								
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	49,09	54,79	60,49	66,18	71,88	77,57	77,57
3	Persentase alat & alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	2,08	2,28	2,48	2,68	2,88	3,08	3,08
E	Perindustrian								
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota		4	4,078	4,156	4,234	4,312	4,39	4,39
2	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	100	100	100	100
IV	Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan								
A	Sekretariat Daerah								
1	Persetanse pengadaan konstruksi pada kuartal pertama tahun berikutnya								
2	Persetanse pengadaan konstruksi pada kuartal pertama tahun berikutnya								
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan								
B	Sekretariat DPRD								
1	Persentase penetapan Peraturan Daerah sesuai dengan Propemperda	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
V	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan								
A	Perencanaan								
1	Indeks Kualitas Perencanaan	Nilai							
B	Keuangan								
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
2	Rasio PAD	%	11,03	11,60	12,00	12,62	13,69	13,62	13,62
3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi <i>transfer expenditures</i>)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD	%	-11,00	-10,50	-10,20	-10,00	-9,80	-9,50	-9,50
6	Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	-11,50	-11,00	-10,80	-10,50	-10,00	-9,80	-9,80
7	Manajemen Aset :								
	- Apakah ada daftar asset tetap ?	(Ya/Tidak)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	- Apakah ada manual untuk Menyusun daftar asset tetap ?	(Ya/Tidak)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	- Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan ?	(Ya/Tidak)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	- Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran ?	(Ya/Tidak)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
8	Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	1,25	1,25	1,22	1,20	1,18	1,18	1,18
C	Kepegawaian								
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%							
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	80	80	80	80	80	80	80
D	Pendidikan dan Pelatihan								
1	Rasio jabatan fungsional memiliki sertifikat kompetensi selain guru dan tenaga kesehatan	%	80	80	80	80	80	80	80
E	Penelitian dan Pengembangan								
1	Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi riset dan Inovasi daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
VI	Unsur Pengawas								



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	Inspektorat								
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
VII	Unsur Kewilayahan								
A	Kecamatan Lembah Segar								
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kewilayahan	Indeks	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
B	Kecamatan Barangin								
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kewilayahan	Indeks	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
C	Kecamatan Talawi								
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kewilayahan	Indeks	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
D	Kecamatan Silungkang								
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kewilayahan	Indeks	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
VIII	Unsur Pemerintahan Umum								
A	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik								
1	Persentase penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Persentase Partai Politik yang melaksanakan pendidikan politik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100

BAB V

PENUTUP

5.1. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN RPJMD

5.1.1 Pedoman Transisi

Pada saat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 belum tersusun dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD Tahun 2025-2029 berakhir, maka RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Sawahlunto tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2030-2034.

5.1.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 merupakan paduan bagi Pemerintah Kota Sawahlunto dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan dan merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Wali Kota Sawahlunto berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 kepada masyarakat;
2. RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah yang sepenuhnya dijalankan secara bersama dan diarahkan oleh Wali Kota dalam kewajiban menyelenggarakan pemerintahan daerah;
3. Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Sawahlunto dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029;
4. Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Sawahlunto dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
5. Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Sawahlunto agar segera menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 setelah penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 ini;
6. Penetapan target indikator kinerja daerah dalam RPJMD 2025-2029 dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah daerah dengan DPRD;
7. RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun mulai Tahun 2025-2029;
8. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kota Sawahlunto merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya, yang sebelumnya dirumuskan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);

9. Program-program yang dituangkan dalam RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 dilaksanakan secara operasional oleh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto yang didukung oleh Instansi vertikal yang ada di wilayah Kota Sawahlunto serta masyarakat dan dunia usaha;
10. Program-program dalam RPJMD adalah program yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

5.2 PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD

Pengendalian dan evaluasi RPJMD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk menjamin dan memastikan pelaksanaan pembangunan daerah selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Melalui mekanisme pengendalian pemerintah daerah dapat memantau pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala, serta mengidentifikasi potensi deviasi atau penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan untuk mencapai menilai capaian kinerja pembangunan berdasarkan indikator dan target yang telah dirumuskan. Hasil pengendalian dan evaluasi menjadi dasar bagi pengambilan keputusan strategis, perbaikan kebijakan, penyesuaian program serta penguatan akuntabilitas dan transparansi pembangunan sehingga dapat mendorong terwujudnya pembangunan daerah yang efektif, efisien, adaptif dan berkelanjutan.

5.2.1 Pengendalian Pelaksanaan RPJMD

Pengendalian terhadap RPJMD dilakukan untuk mengawal ketercapaian sasaran pembangunan daerah dengan memastikan pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta menyusun rekomendasi atas penyesuaian kebijakan apabila diperlukan. Pengendalian dilakukan secara menyeluruh baik oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja pembangunan daerah. Pengendalian pelaksanaan pembangunan tidak hanya mencakup penilaian atas kesesuaian pelaksanaan dengan sasaran dan target pembangunan, tetapi juga mempertimbangkan dukungan intervensi pemerintah pusat maupun intervensi lainnya yang dilaksanakan di daerah sebagai bagian dari strategi pencapaian pembangunan. Pengendalian pelaksanaan RPJMD Kota Sawahlunto juga dilakukan berbasis manajemen risiko pembangunan daerah. Dalam proses pengendalian tahunan, pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Risiko yang telah teridentifikasi dan rencana mitigasinya perlu terus dipantau dan disesuaikan secara berkala agar pelaksanaan kebijakan pembangunan tetap pada jalurnya. Pengendalian pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan supervise terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah berjalan sesuai rencana, serta dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, maka dilakukan tindakan korektif dan/atau penyempurnaan kebijakan untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Pengendalian pelaksanaan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 diharapkan dapat menghasilkan tindakan korektif yang berkelanjutan selama periode perencanaan. Tindakan korektif ini terdiri atas :

1. Tindakan konstruktif, berupa penyesuaian pelaksanaan tahunan untuk memastikan bahwa intervensi pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana. Penyesuaian ini meliputi dan tidak terbatas pada perbaikan strategi pelaksanaan, percepatan implementasi, dan penyesuaian teknis lainnya;
2. Tindakan korektif dilakukan dalam konteks kebijakan, yakni dalam kerangka perencanaan antar tahun dalam periode RPJMD untuk memastikan sasaran

pembangunan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai. Penyesuaian kebijakan dalam kerangka pengendalian RPJMD ini fokus pada perencanaan kebijakan antar tahun yang meliputi dan tidak terbatas terminasi program/proyek, penajaman lokus, penyesuaian strategi, desain dan sasaran, serta tata kelola pelaksanaan (regulasi dan kelembagaan).

Tindak lanjut dari proses pengendalian ditetapkan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029. Pengendalian ini menggambarkan keterkaitan yang erat antara aktivitas pemantauan, evaluasi dan pengendalian secara terpadu sepanjang periode jangka menengah, adalah sebagai berikut :

1. Pemantauan pelaksanaan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029, mencakup :
 - Pemantauan atas perkembangan pelaksanaan prioritas Pembangunan daerah, baik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga (K/L), maupun pemangku kepentingan lainnya.
 - Pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan mitigasi risiko pembangunan daerah sebagai bagian dari pendekatan manajemen risiko. Pemantauan pelaksanaan RPJMD dilakukan secara rutin dan berkala serta diselaraskan dengan pemantauan pelaksanaan RKPD. Hasil pemantauan ini menjadi dasar pengambilan keputusan dalam pengendalian operasional terhadap pelaksanaan prioritas pembangunan daerah.
2. Evaluasi saat pelaksanaan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 untuk menilai efektifitas kebijakan dan ketercapaian sasaran secara berkala, mencakup dua hal, yaitu :
 - Evaluasi tahunan melalui evaluasi pelaksanaan RKPD dan evaluasi kinerja perangkat daerah, evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah.
 - Evaluasi paruh waktu yang dilaksanakan pada pertengahan periode RPJMD. Evaluasi ini memberikan umpan balik (feedback) bagi penyesuaian kebijakan pembangunan daerah untuk sisa periode RPJMD.

5.2.2 Evaluasi Akhir RPJMD Tahun 2025-2029

Evaluasi akhir ini dilakukan pada akhir tahun terakhir periode pelaksanaan RPJMD, dan dapat diperbaharui (dimutakhirkan) pada triwulan pertama tahun berikutnya setelah periode pelaksanaan RPJMD. Evaluasi akhir RPJMD bertujuan untuk :

1. Menilai capaian sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh;
2. Mengidentifikasi tantangan, hambatan, dan faktor-faktor penghambat selama periode lima tahun pelaksanaan; dan
3. Memberikan masukan strategis untuk penyusunan dokumen RPJMD periode berikutnya dalam kerangka RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2045.

Mekanisme evaluasi akhir pelaksanaan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 ini mencakup evaluasi kinerja pembangunan secara menyeluruh, serta evaluasi terhadap kebijakan dan program strategis daerah. Hasil evaluasi akhir RPJMD akan menjadi bahan utama dalam perumusan kebijakan pembangunan jangka menengah berikutnya yang dikoordinasikan oleh Bappeda Kota Sawahlunto.

5.3 MANAJEMEN RISIKO PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Manajemen risiko dalam organisasi pemerintah memiliki peran penting, terutama dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencakup penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas dalam pengelolaan urusan publik. Manajemen risiko mendukung pencapaian prinsip-prinsip tersebut, khususnya dalam meminimalkan

potensi risiko yang dapat menghambat pelaksanaan tugas organisasi. dapat diminimalkan. Hal ini dilakukan melalui proses identifikasi dan pengelolaan risiko secara sistematis sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, yang wajib dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.

Dalam konteks organisasi pemerintah, risiko didefinisikan sebagai ketidakpastian yang dapat berdampak pada pencapaian tujuan. Risiko tersebut meliputi, antara lain: korupsi, penurunan penerimaan daerah, kegagalan dalam pelaksanaan program prioritas, hingga penurunan kualitas pelayanan publik. Keberadaan risiko ini tidak hanya mengancam efektivitas organisasi, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko yang efektif menjadi kebutuhan mendesak agar potensi risiko dapat diantisipasi dan dikelola. bagi organisasi pemerintah untuk mengantisipasi dan mengelola potensi risiko tersebut. Dalam sistem pemerintahan daerah, tujuan pembangunan secara jelas tertuang dalam dokumen perencanaan, yang seharusnya sinkron dengan perencanaan nasional (RPJMN). Tujuan tersebut terbagi dalam 3 jenis, yaitu tujuan strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD, tujuan strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan/operasional yang tertuang dalam dokumen Renja Perangkat Daerah.

Dalam penerapannya, pengendalian yang dilakukan dalam proses manajemen risiko terutama dalam rangka mencapai target kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut dilakukan dalam 2 tahapan pengendalian, yaitu pada tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan.

1. Pengendalian pada tahap perencanaan

Pengendalian pada tahapan perencanaan bertujuan untuk menjamin konsistensi perencanaan pembangunan, penganggaran dan pelaksanaannya. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap perencanaan jangka menengah dan jangka pendek yang mencakup:

- a. Konsistensi penjabaran perencanaan pada setiap dokumen perencanaan meliputi konsistensi rumusan tujuan dan sasaran pembangunan berikut indikator kinerja, konsistensi kebijakan yang dituangkan dalam program yang relevan hingga pada rumusan kegiatan indikatif yang mendukung pencapaian target tujuan perencanaan pembangunan. Konsistensi penjabaran ini dilakukan antar dokumen perencanaan yang meliputi: konsistensi dokumen RPJPD dengan RPJPN, RPJMD dengan RPJMN, RKPD dengan RKP dan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renja Perangkat Daerah dengan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.
- b. Penentuan prioritas pembangunan daerah yang diimplementasikan dalam program-program prioritas dengan indikator keberhasilan yang terukur dan berbatas waktu.
- c. Konsistensi perencanaan dan penganggaran, yang menjamin bahwa rencana yang ditetapkan dapat diimplementasikan melalui anggaran yang sesuai.
- d. Identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya. Identifikasi risiko dalam perencanaan pembangunan dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja sasaran, untuk mengantisipasi potensi hambatan pencapaian tujuan pembangunan. Risiko diuraikan mencakup jenis dan penyebabnya, dampak terhadap pencapaian sasaran, serta kategori dan sumber risiko, baik internal maupun eksternal. Berdasarkan identifikasi tersebut, disusun rencana tindak pengendalian (mitigasi) yang bertujuan menurunkan level risiko dan menjaga agar manfaat pembangunan tetap dapat dirasakan masyarakat secara optimal.

2. Pengendalian pada tahap pelaksanaan
Pengendalian pada tahapan pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi ini mencakup :
 - a. Pemantauan terhadap pelaksanaan prioritas pembangunan daerah
 - b. Pemantauan terhadap pelaksanaan mitigasi risiko dalam rangka pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dilakukan.
 - c. Evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah.
 - d. Evaluasi pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Program yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan pengendalian pada proses manajemen risiko dalam rangka menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah, perlu didukung dengan regulasi agar pelaksanaan pengendalian berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Tataunan regulasi tersebut menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi pengendalian, manajemen risiko pembangunan dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi ini diperlukan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, untuk menjaga kualitas pengendalian yang dilakukan, regulasi pengendalian ini dievaluasi secara berkala dan disesuaikan dengan kebijakan tertinggi yang berlaku.

5.4 TATA KELOLA SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA SAWAHLUNTO

5.4.1 Memperkuat Tata Kelola Pembangunan dan Mendorong Transformasi Digital Daerah

Pemerintah Kota Sawahlunto menempatkan tata kelola data yang andal, akurat, mutakhir, dan terintegrasi sebagai fondasi utama pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Data berkualitas diperlukan untuk mendukung perencanaan yang berbasis bukti, pengambilan keputusan yang tepat sasaran, alokasi sumber daya yang efisien, serta evaluasi program yang akuntabel. Tanpa sistem data yang tertata, pembangunan berisiko tidak optimal dan rawan *inefisiensi*. Sejalan dengan kebijakan nasional Satu Data Indonesia, penguatan tata kelola data menjadi prioritas strategis daerah melalui peningkatan integrasi, standardisasi, dan pemanfaatan lintas sektor. Data juga digunakan untuk memantau capaian pembangunan secara *real-time*, memastikan kebijakan sesuai standar, serta mengukur dampak intervensi terhadap indikator kinerja. Dengan demikian, data menjadi instrumen krusial dalam seluruh siklus pembangunan daerah, dari perencanaan hingga evaluasi, guna mewujudkan pembangunan Kota Sawahlunto yang terukur, transparan, dan responsif.

Pemerintah Kota Sawahlunto menyambut baik implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan berkomitmen untuk menginternalisasi prinsip-prinsipnya. Berbagai langkah strategis telah dan akan terus dilakukan, mulai dari peningkatan akurasi, kualitas, serta kemutakhiran data oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga penguatan integrasi dan kolaborasi antar-instansi untuk mencegah tumpang tindih informasi. Penerapan standar data, metadata yang baku, serta penggunaan kode referensi menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem data yang *interoperabel* di seluruh wilayah provinsi. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung perencanaan pembangunan yang lebih *responsif, adaptif*, dan berbasis data.

5.4.2 Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sawahlunto

Sejalan dengan kebijakan nasional Satu Data Indonesia, Pemerintah Kota Sawahlunto memiliki potensi besar untuk mengembangkan dan mengoptimalkan portal data daerah sebagai *single source of truth* bagi informasi pembangunan di tingkat kota. Portal ini dirancang untuk mengintegrasikan data dari berbagai Perangkat Daerah, serta menyediakan akses data yang cepat, efektif, dan efisien bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat. Kunci keberhasilan dari portal ini terletak pada terwujudnya *interoperabilitas* antar sistem data di berbagai level pemerintahan, sehingga memungkinkan pertukaran data yang lancar dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih berbasis bukti (*evidence-based*). Selain itu, pemanfaatan sistem penghubung layanan pemerintah juga dapat diintegrasikan untuk mendorong *efisiensi*, *akuntabilitas*, dan transparansi dalam penyelenggaraan layanan publik, sekaligus mempercepat agenda *transformasi* digital daerah.

Keberadaan *platform* Satu Data Indonesia di tingkat Kota Sawahlunto diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan tata kelola data pemerintah daerah secara menyeluruh. Peningkatan kualitas, integrasi, koordinasi, dan keterbukaan data akan meminimalisasi *duplikasi* dan *inefisiensi* dalam pengelolaan informasi pembangunan. Dengan data yang lebih terstruktur dan dapat diakses secara luas, proses perumusan kebijakan pembangunan diharapkan menjadi lebih *adaptif*, berbasis data, dan *responsif* terhadap kebutuhan masyarakat. Evaluasi dan pengendalian pembangunan juga akan menjadi lebih terukur dan objektif, sehingga mendorong alokasi sumber daya yang lebih efisien dan mendukung pencapaian hasil pembangunan yang optimal bagi masyarakat Kota Sawahlunto.

5.4.3 Portal Satu Data Indonesia Kota Sawahlunto Mendorong Reformasi Birokrasi dan Transformasi Layanan Publik Berbasis Kebutuhan Masyarakat

Implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di Kota Sawahlunto memegang peran strategis dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan mempercepat *transformasi* digital di tingkat daerah. Dengan tersedianya data yang akurat, akuntabel, transparan, dan mudah diakses, tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah diharapkan semakin meningkat. Tata kelola data yang terstandar dan terpercaya juga menjadi landasan utama dalam memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan memperluas adopsi teknologi digital di berbagai aspek pelayanan publik, perencanaan, hingga pengambilan keputusan strategis di Kota Sawahlunto. Penguatan tata kelola data dan pemanfaatan teknologi digital secara menyeluruh, arah kebijakan pembangunan di Kota Sawahlunto diharapkan semakin berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

5.5 KOLABORASI MULTIPIHAK DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kolaborasi multipihak dalam perencanaan pembangunan merupakan strategi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang *inklusif*, berkelanjutan, dan *responsif* terhadap kebutuhan masyarakat. Kolaborasi mencakup peran serta berbagai pemangku kepentingan yang berada di daerah atau tempat pelaksanaan pembangunan dilakukan, termasuk diantaranya adalah pemerintah, pemerintah daerah, DPRD, Dunia Usaha/sector swasta, masyarakat, akademisi dan perguruan tinggi, dan lembaga non-pemerintah, media dan termasuk kelompok rentan, dengan mengedepankan prinsip-prinsip *inklusi*itas, partisipatif, transparansi, aksesibilitas, kesetaraan, keadilan, akuntabilitas, kemitraan, sinergi, serta keberlanjutan.

Kolaborasi multipihak dalam perencanaan pembangunan daerah baik pada dokumen rencana pembangunan daerah maupun dokumen rencana Perangkat Daerah mencakup pada tahapan siklus perencanaan, mulai dari penyusunan, penetapan, pengendalian pelaksanaan, hingga evaluasi hasil. Setiap tahapan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda, sehingga proses pembangunan dapat berjalan secara partisipatif, inklusif, transparan, dan akuntabel.

Adapun ruang lingkup kolaborasi multipihak pada setiap tahapan perencanaan pembangunan, yakni :

1. Kolaborasi multipihak dalam tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah yakni proses yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan tujuan, prioritas, dan strategi pembangunan di suatu daerah. Proses ini penting untuk memastikan bahwa rencana pembangunan yang dihasilkan adalah inklusif, partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan lingkungan. Ruang lingkup kolaborasi pada tahapan ini antara lain melalui pelaksanaan Konsultasi Publik / Forum Perangkat Daerah, pelaksanaan diskusi tematik, kajian dan analisis kebijakan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), pelaksanaan lokakarya atau seminar serta penyampaian saran dan masukan penyusunan rencana pembangunan daerah;
2. Kolaborasi pada tahapan penetapan rencana pembangunan merupakan tahapan rancangan rencana yang telah disusun disahkan menjadi dokumen formal yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan. Dokumen ini biasanya mencakup perincian program, kegiatan, serta alokasi anggaran. Pada tahapan penetapan rencana pembangunan daerah, kolaborasi multipihak sangat penting untuk memastikan bahwa dokumen perencanaan yang akan ditetapkan mencerminkan kesepakatan bersama dan merespon kebutuhan berbagai pihak yang terlibat. Ruang lingkup kolaborasi pada tahapan ini antara lain yakni berupa penyelarasan rencana pembangunan daerah dengan rencana program/kegiatan dari lembaga non pemerintah (masyarakat dan dunia usaha/swasta) serta pelaksanaan sosialisasi terhadap rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan yakni memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terkait dengan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan, yang bertujuan untuk memastikan semua pihak mengetahui secara detail rencana pembangunan yang akan dilakukan serta manfaat yang akan diterimanya, sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap rencana yang dilaksanakan;
3. Kolaborasi pada tahapan pengendalian pelaksanaan rencana bertujuan untuk memastikan bahwa rencana pembangunan yang telah disepakati dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, baik dari segi waktu, anggaran, maupun tujuan. Proses pengendalian ini melibatkan monitoring dan koordinasi antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan. Ruang lingkup kolaborasi pada tahapan ini antara lain yakni pemantauan secara berkala, publikasi informasi laporan kemajuan kegiatan secara berkala kepada pemangku kepentingan serta adanya forum diskusi dan konsultasi terbuka antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta untuk membahas isu-isu dan permasalahan yang muncul selama pelaksanaan rencana.

4. Kolaborasi pada tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana bertujuan untuk mengukur sejauh mana rencana pembangunan yang telah dijalankan mencapai target dan sasaran yang ditetapkan. Evaluasi ini juga menjadi masukan untuk perencanaan pembangunan selanjutnya agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ruang lingkup kolaborasi pada tahapan ini antara lain yakni pelaksanaan *Focus Group Discussions* (FGD) dengan berbagai kelompok untuk mendapatkan perspektif mendalam tentang dampak dan efektivitas rencana pembangunan, penyusunan laporan evaluasi dan rekomendasi perbaikan mencakup temuan, analisis, rekomendasi, dan kesimpulan dari hasil evaluasi serta publikasi laporan evaluasi kepada seluruh pihak terutama yang terdampak dari pelaksanaan rencana pembangunan yang dilaksanakan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

19 AUG 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRA MULYONO, SH, MH
NIP. 19820411 201001 1 014

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

RIYANDA PUTRA

LAMPIRAN I. METADATA INDIKATOR KINERJA DAERAH

1. Metadata Indikator Kinerja Makro

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Manusia
Definisi	Indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup.
Rumus Perhitungan	$IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pengeluaran}}$ IPM dihitung menggunakan rata-rata geometrik dari indeks Indeks Kesehatan (UHH), indeks pengetahuan (rata-rata dari indeks HLS dan RLS), dan indeks pengeluaran.
Interpretasi	Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori : - Rendah : IPM < 60 - Sedang : 60 ≤ IPM < 70 - Tinggi : 70 ≤ IPM < 80 - Sangat tinggi : IPM ≥ 80
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (%)
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
Rumus Perhitungan	$Pa = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]$ Dimana : - a = 0 - z = garis kemiskinan - y_i = Rata-Rata Pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinnan(i=1,2,3,...,q), y_i<z - q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan - n = jumlah penduduk
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk regional.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Maret dan September)

Nama Indikator	Tingkat Pengangguran Terbuka
Definisi	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu : • penduduk yang aktif mencari pekerjaan; • penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru;

	- penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan; - kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Rumus Perhitungan	$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ Keterangan : TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%) PP = Jumlah pengangguran (orang) PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)
Interpretasi	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (<i>supply</i>) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antarkelompok tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	2 kali per Tahun

Nama Indikator	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
Definisi	Merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu
Rumus Perhitungan	$LPE = \frac{PDRB\ ADHK(t) - PDRB\ ADHK(t - 1)}{PDRB\ ADHK(t - 1)} \times 100\%$ Keterangan : t = Tahun Tertentu (t-1) = Tahun Sebelum
Interpretasi	Hasil perhitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	PDRB Per Kapita ADHB (Rp Juta)
Definisi	PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
Rumus Perhitungan	$PDRB\ Per\ Kapita\ ADHB = \frac{PDRB\ ADHB}{Populasi}$ Keterangan : PDRB ADHB = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku populasi = jumlah penduduk regional t = periode
Interpretasi	Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Rasio Gini
Definisi	Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva <i>Lorenz</i> dan aspek matematis.
Rumus Perhitungan	$Rasio\ Gini = 1 - \sum_{i=1}^n (p_i - p_{i-1}) (y_i - y_{i-1})$ Dimana : i = 1 p_i = proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i y_i = proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i n = jumlah observasi
Interpretasi	Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. - Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). - Sedangkan, nilai 1 menunjukkan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut : - Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang. - Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukkan ketimpangan sedang. - Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukkan pemerataan relatif baik. Secara visual, rasio gini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva <i>Lorenz</i>, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut dari termiskin ke terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran digambar pada sumbu vertikal. Rasio gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (<i>perfect equality</i>) dan kurva <i>Lorenz</i>. Semakin jauh jarak kurva <i>Lorenz</i> dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Maret dan September)

2. Metadata Indikator Kinerja Sasaran Visi

Nama Indikator	PDRB Per Kapita ADHB (Rp Juta)
Definisi	PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
Rumus Perhitungan	$PDRB\ Per\ Kapita\ ADHB = \frac{PDRB\ ADHB}{Populasi}$ Keterangan : PDRB ADHB = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku populasi = jumlah penduduk regional t = periode
Interpretasi	Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)
Definisi	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB.
Rumus Perhitungan	$\text{Kontribusi PDRB Industri Pengolahan} = \frac{X}{Y} \times 100\%$ Keterangan : X = Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan Y = Nilai Total PDRB ADHB
Interpretasi	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap nilai PDRB ADHB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor Industri Pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB Daerah, ceteris paribus.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (%)
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
Rumus Perhitungan	$Pa = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]$ Dimana : a = 0 z = garis kemiskinan y_i = Rata-Rata Pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i=1,2,3,...,q), y_i<z q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = jumlah penduduk
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk regional.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Maret dan September)

Nama Indikator	Rasio Gini
Definisi	Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva <i>Lorenz</i> dan aspek matematis.
Rumus Perhitungan	$\text{Rasio Gini} = 1 - \sum_{i=1}^n (p_i - p_{i-1}) (y_i - y_{i-1})$ Dimana : i = 1 p_i = proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i y_i = proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i n = jumlah observasi
Interpretasi	Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1.

	- Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). - Sedangkan, nilai 1 menunjukkan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut : - Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang. - Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukkan ketimpangan sedang. - Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukkan pemerataan relatif baik. Secara visual, rasio gini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva <i>Lorenz</i>, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut dari termiskin ke terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran digambar pada sumbu vertikal. Rasio gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (<i>perfect equality</i>) dan kurva <i>Lorenz</i>. Semakin jauh jarak kurva <i>Lorenz</i> dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Maret dan September)

Nama Indikator	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
Definisi	Merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu
Rumus Perhitungan	$LPE(t) = \frac{PDRB\ ADHK(t) - PDRB\ ADHK(t-1)}{PDRB\ ADHK(t-1)} \times 100\%$ Keterangan : t = Tahun Tertentu (t-1) = Tahun Sebelum
Interpretasi	Hasil perhitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Definisi	Suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. (Permendagri No. 18/2020).
Rumus Perhitungan	$EPPD = [CKM + CKUP] \times 0.75 + [PKM] \times 0.25$ Keterangan : CKM = Capaian Kinerja Makro CKUP = Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan PKM = Perubahan Kinerja Makro
Interpretasi	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi : - Skor kinerja 1,00 – 1,80 dengan status kinerja Sangat Rendah; - Skor kinerja 1,81 – 2,60 dengan status kinerja Rendah; - Skor kinerja 2,61 – 3,40 dengan status kinerja Sedang; - Skor kinerja 3,41 – 4,20 dengan status kinerja Tinggi; - Skor kinerja 4,21 – 5,00 dengan status kinerja Sangat Tinggi.
Sumber Data	Kementerian Dalam Negeri
Frekuensi	Satu kali per tahun

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Manusia
Definisi	Indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup.
Rumus Perhitungan	$IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pengeluaran}}$ IPM dihitung menggunakan rata-rata geometrik dari indeks Indeks Kesehatan (UHH), indeks pengetahuan (rata-rata dari indeks HLS dan RLS), dan indeks pengeluaran.
Interpretasi	Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori : - Rendah : IPM < 60 - Sedang : 60 ≤ IPM < 70 - Tinggi : 70 ≤ IPM < 80 - Sangat tinggi : IPM ≥ 80
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
Definisi	Tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk
Rumus Perhitungan	$\text{Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja} = \frac{PDRB \text{ ADHK}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}} \times 100 \%$ (Permendagri No. 18/2020)
Interpretasi	1. Sebagai gambaran kemampuan tenaga kerja nasional dan daerah dalam menghasilkan barang dan jasa, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke level yang tinggi. 2. Tingkat produktivitas tenaga kerja merupakan rasio antara jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK dengan total penduduk yang bekerja. 3. Semakin tinggi nilai aktual Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja semakin baik kualitas pembangunan ketenagakerjaan
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Definisi	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).
Rumus Perhitungan	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKTL)$ Keterangan : IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Dinas PKP2LH Kota Sawahlunto)
Interpretasi	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) : - Sangat Baik : 90 ≤ IKLH ≤ 100 - Baik : 70 ≤ IKLH < 90 - Sedang : 50 ≤ IKLH < 70 - Kurang : 25 ≤ IKLH < 50 - Sangat Kurang : 0 ≤ IKLH < 25
Sumber Data	Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara dan tutupan lahan, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
Frekuensi	Tahunan

3. Metadata Indikator Kinerja Utama

Misi 1 :

Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perekonomian yang Berwawasan Lingkungan

Nama Indikator	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
Definisi	Merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu
Rumus Perhitungan	$LPE(t) = \frac{PDRB\ ADHK(t) - PDRB\ ADHK(t-1)}{PDRB\ ADHK(t-1)} \times 100\%$ Keterangan : t = Tahun Tertentu (t-1) = Tahun Sebelum
Interpretasi	Hasil perhitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	PDRB Per Kapita ADHB (Rp Juta)
Definisi	PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
Rumus Perhitungan	$PDRB\ Per\ Kapita\ ADHB = \frac{PDRB\ ADHB}{Populasi}$ Keterangan : PDRB ADHB = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku populasi = jumlah penduduk regional t = periode
Interpretasi	Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (%)
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
Rumus Perhitungan	$Pa = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]$ Dimana : a = 0 z = garis kemiskinan y_i = Rata-Rata Pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinnn(i=1,2,3,...,q), y_i<z q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = jumlah penduduk
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk regional.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Maret dan September)

Nama Indikator	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)						
Definisi	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PDRB Daerah.						
Rumus Perhitungan	<table><tr><td>Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)</td><td>=</td><td>$\frac{\text{PMTB Kota Sawahlunto}}{\text{PDRB ADHK Kota Sawahlunto}}$</td><td>x 100%</td></tr></table> Keterangan : PMTB = Nilai PMTB berdasarkan PDRB Sisi Pengeluaran (Milliar Rupiah) PDRB ADHK = Total Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Milliar Rupiah)			Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	=	$\frac{\text{PMTB Kota Sawahlunto}}{\text{PDRB ADHK Kota Sawahlunto}}$	x 100%
Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	=	$\frac{\text{PMTB Kota Sawahlunto}}{\text{PDRB ADHK Kota Sawahlunto}}$	x 100%				
Interpretasi	Semakin tinggi Pembentukan Modal tetap Bruto (% PDRB), semakin besar peranan atau kontribusi komponen PMTB terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto.						
Sumber Data	Badan Pusat Statistik						
Frekuensi	Tahunan						

Nama Indikator	Tingkat Pengangguran Terbuka		
Definisi	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu : • penduduk yang aktif mencari pekerjaan; • penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru; • penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan; • kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.		
Rumus Perhitungan	$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ Keterangan : TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%) PP = Jumlah pengangguran (orang) PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)		
Interpretasi	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (<i>supply</i>) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak dimanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antarkelompok tersebut.		
Sumber Data	Badan Pusat Statistik Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)		
Frekuensi	2 kali per Tahun		

Nama Indikator	Rasio Gini
Definisi	Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva <i>Lorenz</i> dan aspek matematis.
Rumus Perhitungan	$Rasio\ Gini = 1 - \sum_{i=1}^n (p_i - p_{i-1}) (y_i - y_{i-1})$ Dimana : i = 1 p_i = proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i y_i = proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i n = jumlah observasi
Interpretasi	Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. • Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). • Sedangkan, nilai 1 menunjukkan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut : • Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang. • Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukkan ketimpangan sedang. • Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukkan pemerataan relatif baik. Secara visual, rasio gini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva <i>Lorenz</i>, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut dari termiskin ke terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran digambar pada sumbu vertikal. Rasio gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (<i>perfect equality</i>) dan kurva <i>Lorenz</i>. Semakin jauh jarak kurva <i>Lorenz</i> dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Maret dan September)

Nama Indikator	Proporsi Kontribusi PDRB Kota (%)		
Definisi	Proporsi kontribusi PDRB Kota merupakan share PDRB ADHB Kota Sawahlunto terhadap PDRB ADHB Provinsi Sumatera Barat.		
Rumus Perhitungan	Proporsi Kontribusi PDRB Kota = PDRB ADHB Kota Sawahlunto PDRB ADHB Provinsi Sumatera Barat x 100%		
Interpretasi	Semakin tinggi proporsi kontribusi PDRB Kota, semakin besar peranan atau kontribusi Kota Sawahlunto terhadap ekonomi Provinsi Sumatera Barat.		
Sumber Data	BPS		
Frekuensi	Tahunan		

Nama Indikator	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)
Definisi	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB.
Rumus Perhitungan	$\text{Kontribusi PDRB Industri Pengolahan} = \frac{X}{Y} \times 100\%$ Keterangan : X = Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan Y = Nilai Total PDRB ADHB
Interpretasi	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap nilai PDRB ADHB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor Industri Pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB Daerah, ceteris paribus.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)						
Definisi	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.						
Rumus Perhitungan	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	=	<table><tr><td>Volume Usaha Koperasi Daerah</td><td rowspan="2">x 100%</td></tr><tr><td>PDRB ADHB</td></tr></table>	Volume Usaha Koperasi Daerah	x 100%	PDRB ADHB	
Volume Usaha Koperasi Daerah	x 100%						
PDRB ADHB							
Interpretasi	Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut.						
Sumber Data	Badan Pusat Statistik						
Frekuensi	Tahunan						

Nama Indikator	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)						
Definisi	Ekspor barang dan jasa (% PDRB) merupakan share ekspor barang dan jasa terhadap PDRB Kota Sawahlunto Ekspor Barang dan Jasa didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/ pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri). Ekspor-Impor ke dan dari suatu wilayah Kota Sawahlunto terdiri dari: • Ekspor ke luar provinsi/Kota Sawahlunto • Impor dari luar provinsi/Kota Sawahlunto						
Rumus Perhitungan	<table><tr><td>Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)</td><td>=</td><td>$\frac{\text{Ekspor Barang dan Jasa ADHK}}{\text{PDRB ADHK Kota Sawahlunto}}$</td><td>x 100%</td></tr></table> Keterangan : Ekspor Barang dan Jasa = Nilai PMTB berdasarkan PDRB Sisi Pengeluaran (Milliar Rupiah) PDRB ADHK = Total Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Milliar Rupiah)			Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	=	$\frac{\text{Ekspor Barang dan Jasa ADHK}}{\text{PDRB ADHK Kota Sawahlunto}}$	x 100%
Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	=	$\frac{\text{Ekspor Barang dan Jasa ADHK}}{\text{PDRB ADHK Kota Sawahlunto}}$	x 100%				

Interpretasi	Semakin tinggi Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB), semakin besar peranan atau kontribusi komponen Ekspor Barang dan Jasa terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		
Definisi	Tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk		
Rumus Perhitungan	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rupiah)/orang	=	$\frac{\text{PDRB ADHK}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}}$
Interpretasi	- Sebagai gambaran kemampuan tenaga kerja nasional dan daerah dalam menghasilkan barang dan jasa, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke level yang tinggi. - Tingkat produktivitas tenaga kerja merupakan rasio antara jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK dengan total penduduk yang bekerja. - Semakin tinggi nilai aktual Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja semakin baik kualitas pembangunan ketenagakerjaan		
Sumber Data	Badan Pusat Statistik		
Frekuensi	Tahunan		

Nama Indikator	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)
Definisi	Tenaga Kerja Formal adalah tenaga kerja yang dengan status pekerjaan utama termasuk dalam pekerja dengan kategori berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, dan buruh/karyawan/pegawai.
Rumus Perhitungan	$Tenaga\ Kerja\ Formal = \left(\frac{\sum_{i=3}^4 y_i}{\sum_{i=1}^7 y_i} \right) \times 100\%; i = 1,2,3,\dots,7$ Keterangan : <i>Tenaga Kerja Formal</i> = Proporsi penciptaan lapangan kerja formal y_i = Jumlah pekerja dari status pekerjaan utama ke-i 1 = Berusaha sendiri 2 = Berusaha dibantu buruh tidak tetap 3 = Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar 4 = Buruh/karyawan/pegawai 5 = Pekerja bebas di pertanian 6 = Pekerja bebas di nonpertanian 7 = Pekerja keluarga/tak dibayar
Interpretasi	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal dengan satuan nilai dalam bentuk persentase menunjukkan seberapa dominan pekerja dengan status pekerjaan utama yang termasuk dalam pekerja formal sesuai dengan ketentuan nasional yang berlaku. Semakin tinggi nilai persentasenya, maka semakin dominan kekuatan ekonomi nasional dalam menciptakan lapangan kerja formal.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Peningkatan Investasi
Definisi	Persentase Peningkatan Investasi adalah ukuran yang menggambarkan tingkat pertumbuhan atau kenaikan nilai investasi yang terealisasi dalam suatu wilayah (misalnya, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional) selama periode waktu tertentu (dibandingkan dengan periode waktu sebelumnya). Investasi yang dimaksud dapat mencakup berbagai jenis, seperti Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), baik dalam bentuk modal tetap bruto (pembangunan fisik) maupun investasi finansial. Indeks ini mencerminkan daya tarik investasi suatu wilayah dan pertumbuhan aktivitas ekonomi.
Rumus Perhitungan	Persentase Peningkatan Investasi = $\frac{(\text{Nilai Investasi Akhir} - \text{Nilai Investasi Awal})}{\text{Nilai Investasi Awal}} \times 100\%$ Keterangan : • Nilai Investasi Akhir: Ini adalah nilai investasi pada periode waktu setelah terjadi peningkatan. • Nilai Investasi Awal: Ini adalah nilai investasi pada periode waktu sebelumnya atau nilai investasi mula-mula. • (Nilai Investasi Akhir-Nilai Investasi Awal): Selisih ini menunjukkan besarnya peningkatan nilai investasi. • 100%: Faktor pengali untuk mengubah rasio menjadi bentuk persentase.
Interpretasi	Nilai indeks positif menunjukkan peningkatan nilai investasi. Semakin tinggi nilai positif, semakin besar tingkat peningkatannya. Nilai indeks negatif menunjukkan penurunan nilai investasi. Nilai indeks nol menunjukkan tidak ada perubahan.
Sumber Data	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi/Kabupaten/Kota
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Desa
Defenisi	Pengukuran pembangunan desa di Indonesia mengalami perubahan signifikan dari Indeks Desa Membangun (IDM) ke Indeks Desa (ID) mulai tahun 2025 berdasarkan Permendesa PDT Nomor 9 Tahun 2024. Perubahan tersebut mencakup : penyederhanaan nama, penghitungan dimensi, penambahan indikator, serta perubahan metode pengumpulan data. Perubahan ini juga menyentuh aspek metodologi, fokus pengukuran, dan implikasi kebijakan pembangunan desa. Indeks Desa Membangun (IDM) digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan di tingkat desa dan untuk menilai status kemajuan desa berdasarkan tiga dimensi utama : sosial, ekonomi, dan ekologi. Dimensi ini diterjemahkan dalam indikator yang mencakup akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga keberlanjutan lingkungan. Indeks Desa (ID) menawarkan pendekatan yang lebih sederhana namun berupaya lebih komprehensif dalam menangkap dinamika pembangunan desa. Dalam pengukuran ID, terdapat enam komponen dimensi yang diukur yaitu: Dimensi Layanan Dasar, Dimensi Sosial, Dimensi Ekonoi, Dimensi Lingkungan, Dimensi Aksesibilitas dan Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa. Dalam penyusunan Indeks Desa (ID), 6 dimensi dibentuk oleh sejumlah 13 Sub Dimensi dan 48 indikator. Dalam pengukurannya, klasifikasi status kemajuan serta kemandirian desa antara IDM dan ID ditetapkan dengan ambang batas yang berbeda pula.

Nama Indikator	Indeks Desa																		
Rumus Perhitungan	$IDM = \frac{\sum \text{Indikator Pembangunan Desa}}{\text{Jumlah Indikator}}$ Keterangan Rumus: - Indikator Pembangunan Desa: Merupakan ukuran atau variabel yang mencakup berbagai aspek pembangunan desa, seperti tingkat kemiskinan, akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Setiap indikator diberikan bobot yang mencerminkan pentingnya dalam pembangunan desa. - Jumlah Indikator: Jumlah total indikator atau variabel yang digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan desa. Setiap indikator memiliki skor atau nilai tertentu berdasarkan data yang dihimpun. - Hasil dihitung dalam skala 0 hingga 100, dengan nilai 100 menunjukkan desa yang sepenuhnya maju dalam semua aspek pembangunan yang diukur. Perbedaan klasifikasi status kemajuan dan kemandirian Desa berdasar IDM dan ID<table><thead><tr><th>Klasifikasi Status Desa</th><th>IDM</th><th>ID</th></tr></thead><tbody><tr><td>Desa Sangat Tertinggal</td><td>IDM < 0,4907</td><td>0% ≤ ID 48,48%</td></tr><tr><td>Desa Tertinggal</td><td>0,4907 < IDM ≤ 0,5989</td><td>49,49% ≤ ID ≤ 57,38%</td></tr><tr><td>Desa Berkembang</td><td>0,5989 < IDM ≤ 0,7072</td><td>57,39% ≤ ID ≤ 6934%</td></tr><tr><td>Desa Maju</td><td>0,7072 < IDM ≤ 0,8155</td><td>69,35% ≤ ID ≤ 79,62</td></tr><tr><td>Desa Mandiri</td><td>IDM > 0,8155</td><td>79,63% ≤ ID ≤ 100%</td></tr></tbody></table>	Klasifikasi Status Desa	IDM	ID	Desa Sangat Tertinggal	IDM < 0,4907	0% ≤ ID 48,48%	Desa Tertinggal	0,4907 < IDM ≤ 0,5989	49,49% ≤ ID ≤ 57,38%	Desa Berkembang	0,5989 < IDM ≤ 0,7072	57,39% ≤ ID ≤ 6934%	Desa Maju	0,7072 < IDM ≤ 0,8155	69,35% ≤ ID ≤ 79,62	Desa Mandiri	IDM > 0,8155	79,63% ≤ ID ≤ 100%
Klasifikasi Status Desa	IDM	ID																	
Desa Sangat Tertinggal	IDM < 0,4907	0% ≤ ID 48,48%																	
Desa Tertinggal	0,4907 < IDM ≤ 0,5989	49,49% ≤ ID ≤ 57,38%																	
Desa Berkembang	0,5989 < IDM ≤ 0,7072	57,39% ≤ ID ≤ 6934%																	
Desa Maju	0,7072 < IDM ≤ 0,8155	69,35% ≤ ID ≤ 79,62																	
Desa Mandiri	IDM > 0,8155	79,63% ≤ ID ≤ 100%																	
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IDM menunjukkan bahwa desa tersebut semakin maju dalam hal pembangunan, baik dari sisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur.																		
Sumber Data	Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), dan data terkait lainnya																		
Frekuensi	Tahunan																		

Nama Indikator	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)
Definisi	Proporsi Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap Total PDRB ADHB Kota Sawahlunto.
Rumus Perhitungan	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan = Nilai PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Total PDRB ADHB x 100%
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, semakin tinggi rasionya terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kota Sawahlunto, ceteris paribus.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)
Definisi	Ketidacukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup

	untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment/PoU</i>) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya
Rumus Perhitungan	$PoU = \int_{x < MDER} f(x)dx$ Keterangan : PoU = Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal $MDER$ = Kebutuhan Minimum Energi yang diukur dengan kkal (<i>Minimum Dietary Energy Requirement</i>) $f(x)$ = Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu
Interpretasi	Mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan dibawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasi semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya.
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja Pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan (Juta/orang)		
Definisi	Tingkat kemampuan tenaga kerja pada lapangan usaha sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan dalam menghasilkan produk.		
Rumus Perhitungan	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja Pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan (Juta/orang)	=	$\frac{\text{Nilai PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan}}$
Interpretasi	Semakin tinggi Produktivitas Tenaga Kerja sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan, semakin baik kualitas pembangunan sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan.		
Sumber Data	Badan Pusat Statistik		
Frekuensi	Tahunan		

Misi 2 :
Mewujudkan Smart Governance Berbasis IT

Nama Indikator	Indeks Masyarakat Digital Indonesia
Definisi	Indeks Masyarakat Digital Indonesia merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya.
Rumus Perhitungan	Pengukuran IMDI bersumber dari data primer dan berbagai data sekunder. Data primer diperoleh melalui survei kepada responden individu dan responden perusahaan Indonesia dengan skala 1-100. IMDI terdiri dari empat pilar penyusun, yaitu : 1. Infrastruktur dan Ekosistem; 2. Keterampilan Digital; 3. Pemberdayaan; 4. Pekerjaan

Interpretasi	IMDI dapat menjadi acuan dalam perencanaan kebijakan dan program pengembangan SDM digital di Indonesia karena nilai IMDI dapat menjadi basis pengukuran tingkat kompetensi digital masyarakat Indonesia hingga tingkat kabupaten dan kota. Hasil pengukuran indeks dapat dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan fokus target berdasarkan indikator-indikator di setiap pilar, mendorong koordinasi yang lebih baik antar pemangku kepentingan, serta menjadi acuan bagi setiap pemangku kepentingan di level kabupaten/kota maupun provinsi di Indonesia untuk merencanakan dan menetapkan program prioritas pembangunan SDM digital di wilayah masing-masing.
Sumber Data	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah
Definisi	Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kemajuan dan kapabilitas pemerintah dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, kualitas layanan publik, dan tata kelola pemerintahan. Indeks ini mencerminkan sejauh mana pemerintah telah bertransformasi secara digital dalam berbagai aspek operasional dan pelayanannya, yang diukur melalui berbagai indikator yang dikelompokkan ke dalam pilar-pilar transformasi digital pemerintah yang telah ditetapkan.
Rumus Perhitungan	$\text{Indeks Pilar Pemerintah} = \frac{\sum \text{Skor Indikator}}{\text{Jumlah Indikator}} \times 100$ Keterangan : • Skor Indikator: nilai dari masing-masing indikator (biasanya dalam skala 0–1 atau 0–100). • Bobot: persentase atau proporsi pentingnya setiap indikator terhadap keseluruhan indeks. • Jumlah Indikator: total indikator yang digunakan dalam pilar pemerintah (misalnya: digitalisasi layanan publik, keterbukaan data, kapasitas SDM digital, keamanan sistem, dsb).
Interpretasi	Nilai indeks yang lebih tinggi menunjukkan tingkat transformasi digital yang lebih baik pada pilar tersebut. Perbandingan nilai indeks dari waktu ke waktu atau antar unit pemerintahan dapat memberikan wawasan tentang kemajuan dan disparitas.
Sumber Data	Kementerian/Lembaga terkait
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Pelayanan Publik
Definisi	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.
Rumus Perhitungan	Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik. 1. Menentukan nilai untuk setiap indikator <i>nilai per indikator</i> $= \frac{\text{nilai F01} + \text{nilai F02} + \text{nilai F03}}{3} \times \text{bobot per indikator}$ 2. Menentukan nilai setiap aspek <i>nilai per aspek</i> = $\sum \text{nilai per indikator}$ 3. Menentukan indeks <i>nilai indeks</i> = $\sum (\text{nilai aspek}_n \times \text{bobot aspek}_n)$

Interpretasi	Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Prinsip-prinsip tersebut adalah: 1. Keadilan (<i>Fairness</i>); 2. Partisipasi (<i>Participation</i>); 3. Akuntabilitas (<i>Accountability</i>); 4. Transparansi (<i>transparency</i>); 5. Berdayaguna (<i>useful</i>); 6. Aksesibilitas (<i>accessibility</i>) Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indikator dihasilkan melalui persilangan antara prinsip dan aspek yang dijadikan dasar penilaian. Berdasarkan persilangan tersebut diperoleh 37 indikator 111 penilaian yang diisi melalui Formulir F01 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), Formulir F02 (Evaluator) dan Formulir F03 (Pengguna Layanan). Perhitungan Indeks Pelayanan Publik dikategorikan menjadi: <table><tr><th>Range Nilai</th><th>Kategori</th><th>Makna</th></tr><tr><td>0 – 1,00</td><td>F</td><td>Gagal</td></tr><tr><td>1,01 – 1,50</td><td>E</td><td>Sangat Buruk</td></tr><tr><td>1,51 – 2,00</td><td>D</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>2,01 – 2,50</td><td>C-</td><td>Cukup (Dengan Catatan)</td></tr><tr><td>2,51 – 3,00</td><td>C</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>3,01 – 3,50</td><td>B-</td><td>Baik (Dengan Catatan)</td></tr><tr><td>3,51 – 4,00</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4,01 – 4,50</td><td>A-</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>4,51 – 5,00</td><td>A</td><td>Pelayanan Prima</td></tr></table>	Range Nilai	Kategori	Makna	0 – 1,00	F	Gagal	1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk	1,51 – 2,00	D	Buruk	2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)	2,51 – 3,00	C	Cukup	3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)	3,51 – 4,00	B	Baik	4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik	4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima
Range Nilai	Kategori	Makna																													
0 – 1,00	F	Gagal																													
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk																													
1,51 – 2,00	D	Buruk																													
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)																													
2,51 – 3,00	C	Cukup																													
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)																													
3,51 – 4,00	B	Baik																													
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik																													
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima																													
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.																														
Frekuensi	Tahunan																														

Misi 3 :
Penguatan Infrastruktur Penunjang Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat

Nama Indikator	Indeks Kinerja Infrastruktur (IKI)
Defenisi	Nilai indeks yang menggambarkan kondisi dan kualitas infrastruktur di suatu wilayah atau sektor tertentu, Indeks ini mencakup berbagai aspek infrastruktur fisik seperti jalan, bangunan, air bersih, sanitasi, drainase, saluran irigasi.
Rumus Perhitungan	$IKI = (0,2 \times \text{Jalan Mantap}) + (0,15 \times \text{Akses Air bersih}) + (0,15 \times \text{Akses Sanitasi}) + (0,2 \times \text{Drainase}) + (0,1 \times \text{Bangunan Gedung}) + (0,2 \times \text{Saluran Irigasi})$ Keterangan: • IKI = Indeks Kinerja Infrastruktur • 0,2 : 0,15 : 0,1 : Bobot • Jalan Mantap, Akses Air Bersih, Akses Sanitasi, Drainase dalam Kondisi Baik, Bangunan Gedung Pemerintah dalam kondisi Baik, Saluran Irigasi dalam kondisi baik adalah capaian komponen kinerja infrastruktur
Interpretasi	Nilai yang menunjukkan kualitas infrastruktur suatu wilayah, semakin tinggi nilai IKI semakin baik kualitas infrastruktur wilayah tersebut. Interpretasi Skor 0-60 : Kurang 61-75 : Cukup 76-90 : Baik 91-100 : Sangat Baik
Sumber Data	Dinas PUPR
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)
Definisi	IRBI dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.
Rumus Perhitungan	$\text{Risk} = \text{Hazard} \times \frac{\text{Vulnerability}}{\text{Capacity}}$ Keterangan : Hazard = (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Vulnerability = (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan Capacity = Kapasitas dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu : 1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; 2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; 3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; 4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana; 5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; 6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; 7. Pengembangan sistem pemulihan bencana
Interpretasi	Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan. Pembagian kelas tingkat Indeks Risiko Bencana sebagai berikut : - Rendah : Indeks < 13 - Sedang : Indeks 13 - 144 - Tinggi : Indeks > 144
Sumber Data	BNPB
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Definisi	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).
Rumus Perhitungan	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKTL)$ Keterangan : IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Dinas PKP2LH Kota Sawahlunto)
Interpretasi	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) : - Sangat Baik : $90 \leq IKLH \leq 100$ - Baik : $70 \leq IKLH < 90$ - Sedang : $50 \leq IKLH < 70$

	- Kurang : $25 \leq \text{IKLH} < 50$ - Sangat Kurang : $0 \leq \text{IKLH} < 25$
Sumber Data	Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara dan tutupan lahan, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah
Defenisi	Ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan sampah.
Rumus Perhitungan	$\text{IKPS} = \sum_{i=1}^n (\text{Nilai Indikator}_i \times \text{Bobot}_i)$ Keterangan Rumus: • Nilai Indikator: Skor capaian dari masing-masing komponen pengelolaan sampah, seperti: - o Pengurangan sampah - o Penanganan sampah - o Regulasi dan kebijakan - o Kelembagaan dan SDM - o Pendanaan - o Partisipasi masyarakat - o Infrastruktur dan teknologi • Bobot: Nilai bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator sesuai dengan prioritas atau kebijakan nasional (misalnya, pengurangan sampah diberi bobot lebih besar daripada dokumentasi). • N : Jumlah total indikator yang diukur. • Nilai akhir dinyatakan dalam skala 0 – 100, dengan skala penilaian tertentu.
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, semakin baik kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan oleh daerah tersebut.
Sumber Data	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)
Defenisi	Upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi
Rumus Perhitungan	Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dengan menggunakan 71 indikator sehingga perangkat pengukuran dimaksud dapat digunakan dengan mekanisme dan prosedur yang sama. Diharapkan hasil yang didapatkan dari proses pengukuran tersebut berupa rekomendasi dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana yang juga sebagai input pengukuran penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota.
Interpretasi	Wilayah dengan IKD tinggi memiliki kapasitas yang kuat dalam menghadapi bencana. Mereka memiliki infrastruktur yang memadai, sistem peringatan dini yang efektif, serta partisipasi masyarakat yang tinggi dalam upaya pengurangan risiko
Sumber Data	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Layanan Infrastruktur Dasar
Defenisi	Proporsi peningkatan volume atau cakupan layanan akses air minum perpipaan, sanitasi aman dan hunian layak kepada masyarakat atau fasilitas pengguna, dibandingkan dengan kapasitas layanan pada periode sebelumnya.

Nama Indikator	Indeks Layanan Infrastruktur Dasar								
Rumus Perhitungan	<table><tr><td>Indeks layanan Infrastruktur Dasar</td><td>=</td><td>Capaian layanan akses air minum perpipaan, sanitasi aman dan hunian layak</td></tr><tr><td></td><td></td><td>3</td></tr></table>			Indeks layanan Infrastruktur Dasar	=	Capaian layanan akses air minum perpipaan, sanitasi aman dan hunian layak			3
Indeks layanan Infrastruktur Dasar	=	Capaian layanan akses air minum perpipaan, sanitasi aman dan hunian layak							
		3							
	Keterangan: • Kapasitas dapat diukur dalam satuan: ◦ Persentase peningkatan (%), atau ◦ Jumlah penduduk/rumah tangga yang terlayani • Tahun Sebelumnya adalah baseline Indeks layanan infrastruktur dasar • Tahun Ini adalah kapasitas setelah ada peningkatan rata-rata capaian air minum perpipaan, sanitasi aman dan hunian layak.								
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks layanan infrastruktur dasar, semakin besar kapasitas layanan infrastruktur dasar								
Sumber Data	PDAM, BUMD Air Minum, Dinas PUPR, Dinas Cipta Karya, Sistem Informasi Air Minum (SIM-SPAM), Sistem informasi sanitasi (SI INSAN), DPKP2LH dan Bappenas								
Frekuensi	Tahunan								

Nama Indikator	Indeks Konektivitas Darat						
Definisi	Persentase Jalan dalam kondisi mantap, Persentase Jembatan dalam Kondisi Mantap, Persentase Drainase dalam kondisi baik, Persentase Jalan yang telah memenuhi Standar keselamatan/						
Rumus Perhitungan	<table><tr><td rowspan="2">Indeks Konektivitas Darat</td><td rowspan="2">=</td><td>Capaian Jalan kondisi mantap, Jembatan kondisi mantap, Drainase kondisi baik, dan Jalan yang memenuhi standar keselamatan</td></tr><tr><td>4</td></tr></table>			Indeks Konektivitas Darat	=	Capaian Jalan kondisi mantap, Jembatan kondisi mantap, Drainase kondisi baik, dan Jalan yang memenuhi standar keselamatan	4
Indeks Konektivitas Darat	=	Capaian Jalan kondisi mantap, Jembatan kondisi mantap, Drainase kondisi baik, dan Jalan yang memenuhi standar keselamatan					
		4					
Interpretasi	Nilai indeks yang lebih tinggi menunjukkan konektivitas darat yang lebih baik. Perbandingan nilai indeks antar waktu atau antar wilayah dapat memberikan informasi tentang perubahan atau disparitas dalam konektivitas.						
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS)						
Frekuensi	Tahunan						

Nama Indikator	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan		
Defenisi	Indikator yang menggambarkan tingkat keteraturan dan kelengkapan administrasi pertanahan dalam suatu wilayah.		
Rumus Perhitungan	$\text{Indeks TAP} = \left(\frac{\sum_{i=1}^n (S_i \times B_i)}{\sum_{i=1}^n B_i} \right) \times 100$ Keterangan Rumus: S_i = Skor dari komponen administrasi pertanahan ke-i (misalnya: jumlah bidang tanah terdaftar, peta bidang digital, data pemilik, data penggunaan tanah, dll.) B_i = Bobot dari komponen administrasi pertanahan ke-i (berdasarkan pentingnya komponen terhadap keteraturan data pertanahan) n = Jumlah total komponen yang dinilai - Skor akhir dikalikan 100 untuk menghasilkan indeks dalam skala 0–100		
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tertib dan lengkap administrasi pertanahan di wilayah tersebut.		

Nama Indikator	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan
Sumber Data	Kementerian ATR/BPN, Dinas Pertanahan Daerah, Sistem Informasi Pertanahan
Frekuensi	Tahunan atau sesuai pembaruan sistem administrasi pertanahan

Misi 4 :

Peningkatan Nilai-nilai Keagamaan dan Pelestarian Budaya Melalui Pengembangan Komunitas Seni Demi Mendukung Terwujudnya Kota Wisata yang Estetik dan Memiliki Fungsi Ekonomi dan Mensejahterakan

Nama Indikator	Indeks Ketahanan Nasional
Definisi	Indeks yang menunjukkan tingkat ketahanan nasional suatu bangsa meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya (Lemhannas RI, 2008).
Rumus Perhitungan	$IKN = \frac{\sum_{i=1}^k Vi Gi}{100}$ Keterangan : k = Banyaknya variabel dalam gatra G Vi = Bobot variabel Gi Gi = Sub indeks untuk variabel Gi
Interpretasi	Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, keberlangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya (Lemhanas, RI). Ketahanan Pertahanan diartikan sebagai kemampuan menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan, menjaga kedaulatan negara serta mengatasi terjadinya Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATHG) dari dalam maupun luar. Dalam prosesnya, pengukuran ketahanan nasional meliputi 3 dimensi, yaitu dimensi gatra, dimensi wilayah/spasial. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan merupakan salah satu pengukuran ketahanan nasional berdasarkan gatra. Dimensi gatra adalah pengukuran ketahanan nasional melalui pengukuran ketahanan masing-masing gatra, kemudian diagregasikan menjadi ketahanan nasional. Berdasarkan dimensi ini ketahanan nasional adalah resultante dan agregasi menyeluruh dari ketahanan masing-masing gatra. Setiap gatra dirinci menjadi beberapa aspek, aspek dirinci menjadi beberapa variabel, dan variabel dirinci lagi menjadi beberapa indikator. Secara umum dinamika dari setiap variabel diukur dengan melihat dua indikator penting, yaitu - indikator kebijakan dan - indikator kinerja. Oleh karena itu dalam setiap variabel selalu ada indikator kebijakan dan indikator-indikator kinerja yang merupakan implikasi dari kebijakan tersebut. Setiap indikator dinilai berdasarkan parameter yang terukur. Indeks Ketahanan Nasional dengan kisaran 1 sampai 5 : • Indeks 1 menunjukkan kondisi rawan; • Indeks 2 menunjukkan kondisi kurang tangguh; • Indeks 3 menunjukkan kondisi cukup tangguh; • Indeks 4 menunjukkan kondisi tangguh; • Indeks 5 menunjukkan kondisi sangat tangguh.
Sumber Data	Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Harmoni Indonesia
Definisi	Indeks Harmoni Indonesia (IHI) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat harmoni atau keharmonisan sosial di tengah masyarakat Indonesia berdasarkan aspek kehidupan beragama, kehidupan sosial, dan kehidupan berbangsa. IHI dikembangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai alat untuk memetakan dan memantau kondisi kerukunan serta potensi konflik sosial di daerah.
Rumus Perhitungan	IHI = (NR + NT + NM) / 3 x 25 Keterangan : - NR = Nilai Kehidupan Beragama - NT = Nilai Kehidupan Bermasyarakat (Toleransi Sosial) - NM = Nilai Kehidupan Berbangsa (Kesadaran Kebangsaan)
Interpretasi	Semakin tinggi skor IHI, semakin harmonis kondisi sosial masyarakat
Sumber Data	- Survei Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) dan IHI oleh Kementerian Agama RI - Badan Pusat Statistik (BPS) – dalam kerja sama survei sosial - Survei Persepsi Masyarakat terhadap toleransi dan interaksi sosial - Laporan Pemerintah Daerah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
Frekuensi	Tahunan (Biasanya dilakukan di akhir tahun oleh Kementerian Agama dan BPS)

Nama Indikator	Angka Kriminalitas
Definisi	Angka kriminalitas adalah jumlah kejahatan yang terjadi dalam satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun yang bersangkutan, dikalikan 10.000. Kriminalitas adalah tindakan yang melanggar hukum, undang-undang, norma, dan nilai yang berlaku di masyarakat
Rumus Perhitungan	$\text{Angka Kriminalitas} = \frac{\text{Jumlah Tindak Kriminal dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 10.000$ (Permendagri 86/2017)
Interpretasi	Semakin tinggi angka kriminalitas berarti semakin rendah tingkat keamanan di suatu wilayah.
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan
Definisi	Indeks yang menunjukkan tingkat ketahanan nasional dari aspek pertahanan dan keamanan kondisi dinamik suatu bangsa meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya (Lemhannas RI, 2008).
Rumus Perhitungan	$\text{Indeks } G = \frac{\sum_{i=1}^k Vi Gi}{100}$ Keterangan : - k = Banyaknya variabel dalam gatra G - Vi = Bobot variabel Gi - Gi = Sub indeks untuk variabel Gi
Interpretasi	Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin

	identitas, integritas, keberlangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya (Lemhanas, RI). Dalam prosesnya, pengukuran ketahanan nasional meliputi 3 dimensi, yaitu dimensi gatra, dimensi wilayah/spasial. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan merupakan salah satu pengukuran ketahanan nasional berdasarkan gatra. Dimensi gatra adalah pengukuran ketahanan nasional melalui pengukuran ketahanan masing-masing gatra, kemudian diagregasikan menjadi ketahanan nasional. Berdasarkan dimensi ini ketahanan nasional adalah resultante dan agregasi menyeluruh dari ketahanan masing-masing gatra. Setiap gatra dirinci menjadi beberapa aspek, aspek dirinci menjadi beberapa variabel, dan variabel dirinci lagi menjadi beberapa indikator. Secara umum dinamika dari setiap variabel diukur dengan melihat dua indikator penting, yaitu - indikator kebijakan dan - indikator kinerja. Oleh karena itu dalam setiap variabel selalu ada indikator kebijakan dan indikator-indikator kinerja yang merupakan implikasi dari kebijakan tersebut. Setiap indikator dinilai berdasarkan parameter yang terukur. Ketahanan Pertahanan diartikan sebagai kemampuan menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan, menjaga kedaulatan negara serta mengatasi terjadinya Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATHG) dari dalam maupun luar. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan dengan kisaran 1 sampai 5 : • Indeks 1 menunjukkan kondisi rawan; • Indeks 2 menunjukkan kondisi kurang tangguh; • Indeks 3 menunjukkan kondisi cukup tangguh; • Indeks 4 menunjukkan kondisi tangguh; • Indeks 5 menunjukkan kondisi sangat tangguh.
Sumber Data	Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Pemajuan Kebudayaan yang Dilaksanakan									
Definisi	Persentase pemajuan kebudayaan yang dilaksanakan adalah jumlah objek pemajuan kebudayaan yang diduga, ditetapkan, dilindungi, dikembangkan dan dilestarikan									
Rumus Perhitungan	<table><tr><td>Persentase Pemajuan Kebudayaan yang Dilaksanakan</td><td>=</td><td><table><tr><td>Jumlah Pemajuan Kebudayaan yang Dilaksanakan</td><td rowspan="2">x 100%</td></tr><tr><td>Total Pemajuan Kebudayaan</td></tr></table></td></tr></table>				Persentase Pemajuan Kebudayaan yang Dilaksanakan	=	<table><tr><td>Jumlah Pemajuan Kebudayaan yang Dilaksanakan</td><td rowspan="2">x 100%</td></tr><tr><td>Total Pemajuan Kebudayaan</td></tr></table>	Jumlah Pemajuan Kebudayaan yang Dilaksanakan	x 100%	Total Pemajuan Kebudayaan
Persentase Pemajuan Kebudayaan yang Dilaksanakan	=	<table><tr><td>Jumlah Pemajuan Kebudayaan yang Dilaksanakan</td><td rowspan="2">x 100%</td></tr><tr><td>Total Pemajuan Kebudayaan</td></tr></table>	Jumlah Pemajuan Kebudayaan yang Dilaksanakan	x 100%	Total Pemajuan Kebudayaan					
Jumlah Pemajuan Kebudayaan yang Dilaksanakan	x 100%									
Total Pemajuan Kebudayaan										
Interpretasi	Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) adalah warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda yang tercatat dan telah ditetapkan oleh SK Wako, Provinsi dan Nasional (WBTBI) yang memberikan manfaat budaya tetapi juga dapat berdampak positif pada ekonomi lokal melalui pariwisata. Situs bersejarah yang terawat dengan baik dapat menarik pengunjung dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Masyarakat Kota Sawahlunto									
Sumber Data	Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto									
Frekuensi	Tahunan									

Misi 5 :
Meningkatkan Fungsi Ekonomi Sektor Pariwisata Untuk Kesejahteraan Masyarakat Melalui Optimalisasi Potensi Kepariwisataan

Nama Indikator	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)
Definisi	Rasio PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum adalah persen bagian PDRB daerah yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi penyediaan akomodasi bagi wisatawan dan penyediaan jasa makan dan minum.

Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum}}{\text{Nilai Tambah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB Daerah, ceteris paribus.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	PAD Sektor Pariwisata
Definisi	Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari kegiatan pariwisata, yang merupakan bagian penting dari pendapatan daerah.
Rumus Perhitungan	Sektor pariwisata menyumbang PAD melalui berbagai jenis pajak dan retribusi, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan retribusi tempat rekreasi.
Interpretasi	Meningkatnya PAD dari pariwisata dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sumber Data	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi (%)
Definisi	PDRB pada definisi BPS merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada satu daerah. Dengan demikian, Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persen bagian PDRB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas ekonomi kreatif dari 17 subsektor yang termasuk: 1. Fesyen 2. Kuliner 3. Kriya 4. Film, Animasi dan Video 5. Pengembang Permainan 6. Aplikasi 7. Musik 8. Seni Pertunjukan 94 9. Fotografi 10. Desain Komunikasi Visual 11. Televisi dan Radio 12. Seni Rupa 13. Desain Produk 14. Periklanan 15. Penerbitan 16. Arsitektur 17. Desain Interior Untuk tingkat kabupaten/kota disepakati bahwa PDRB Ekonomi Kreatif meliputi lapangan usaha Jasa Lainnya.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif}}{\frac{\text{PDRB Ekonomi Kreatif Kota Sawahlunto}}{\text{PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi}}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh subsektor ekonomi kreatif, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB provinsi, ceteris paribus. Namun dalam penerjemahannya ke depan, perlu diperhatikan nilai rupiah dari PDRB subsektor ekonomi kreatif untuk menghindari misinterpretasi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Misi 6 :

Kota Sawahlunto Menuju Kota Sehat dan Destinasi Pendidikan Utama yang Berkarakter di Sumatera Barat

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Manusia
Definisi	Indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup.
Rumus Perhitungan	$IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pengeluaran}}$ IPM dihitung menggunakan rata-rata geometrik dari indeks Indeks Kesehatan (UHH), indeks pengetahuan (rata-rata dari indeks HLS dan RLS), dan indeks pengeluaran.
Interpretasi	Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori : - Rendah : IPM < 60 - Sedang : 60 ≤ IPM < 70 - Tinggi : 70 ≤ IPM < 80 - Sangat tinggi : IPM ≥ 80
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk : a. Literasi membaca b. Numerasi
Definisi	Jumlah satuan pendidikan di daerah X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar 84 kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di daerah X. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1. Perlu intervensi khusus 2. Dasar 3. Cakap 4. Mahir Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.
Rumus Perhitungan	$\% \text{ Satdik min. SKM} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Satdik min. SKM}}{n}$ Keterangan : Satdik min.SKM = Satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca atau numerasi n = Jumlah satuan pendidikan
Interpretasi	Misal : Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Numerasi (%) tahun 2023 sebesar 44,44%. Artinya, terdapat 44,44 % satuan

	pendidikan di Kota Sawahlunto yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi (paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”).
Sumber Data	Asesmen Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)
Definisi	Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut : - Tidak punya ijazah = 0 tahun - SD = 6 tahun - SMP = 9 tahun - SMA = 12 tahun - D1/D2 = 14 tahun - D3 = 15 tahun - D4 = 16 tahun - S1 = 17 tahun - S2 = 19 tahun - S3 = 22 tahun Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini : - Tidak pernah sekolah = 0 tahun; - Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1; - Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1; - Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir; - Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir –1.
Rumus Perhitungan	$RLS\ 15+=\frac{1}{P15+}\sum_{i=1}^nXi$ Keterangan : P15+ = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas di suatu wilayah Xi = Lama sekolah penduduk ke- i
Interpretasi	Misal: RLS Kota Sawahlunto Tahun 2023 = 10,44 tahun, artinya secara rata-rata, penduduk Kota Sawahlunto yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 10,44 tahun atau telah menamatkan kelas X.
Sumber Data	Susenas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Harapan Lama Sekolah (Tahun)
Definisi	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang.
Rumus Perhitungan	$HLS = FK \sum_{i=7}^k \left[\frac{Ei_i}{Pi} \right]$ Keterangan : Pi = Jumlah penduduk yang berusia 7 tahun ke atas di suatu wilayah pada tahun tertentu

	E_i = Jumlah penduduk yang berusia 7 tahun ke atas yang masih sekolah di suatu wilayah pada tahun tertentu i = Usia (7, 8, 9,.....,k) FK = Faktor koreksi pesantren
Interpretasi	Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Misal : HLS Kota Sawahlunto pada tahun 2023 sebesar 13,69 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal di Kota Sawahlunto pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,69 tahun atau setara dengan Diploma II.
Sumber Data	Susenas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Proporsi Penduduk Berusia 15 tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)			
Definisi	- Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun keatas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. - Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100% (seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di daerah tersebut sudah menyelesaikan Pendidikan tinggi). - Jenjang pendidikan tinggi mencakup : - Diploma I-IV - S1 - S2 - S2 Terapan - S3			
Rumus Perhitungan	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	=	$\frac{\text{Jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang lulus atau berijazah pendidikan tinggi}}{\text{Jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas}} \times 100\%$	
Interpretasi	- Positif - Tingginya proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi Pendidikan semakin baik			
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS)			
Frekuensi	Tahunan			

Nama Indikator	Usia Harapan Hidup (UHH)(tahun)			
Definisi	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada tahun tertentu.			
Rumus Perhitungan	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian. yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program <i>Micro Computer Program for Demographic Analysis</i> (MCPDA) atau <i>Mortpack</i> .			
Interpretasi	Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.			
Sumber Data	Badan Pusat Statistik			
Frekuensi	Tahunan			

Nama Indikator	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (%)
Definisi	Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010. a. Sangat pendek = Zscore < -3,0 b. Pendek = Zscore ≥ -3,0 s/d Zscore < -2,0.
Rumus Perhitungan	Cara perhitungan (1) (1) Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB (5)P = \frac{JAB (5) P \text{ stunting}}{JAB (5)} \times 100 \%$ Keterangan : PAB (5)P = Prevalensi anak balita yang stunting menderita pendek (<i>stunting</i>) JAB (5)P <i>stunting</i> = Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu pada waktu tertentu JAB (5) = Jumlah anak balita pada waktu yang sama Cara perhitungan (2) (2) Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB (5)SP = \frac{JAB (5) SP \text{ stunting}}{JAB (5)} \times 100 \%$ Keterangan : PAB(5)SP = Prevalensi anak balita yang stunting menderita sangat pendek (<i>stunting</i>) JAB (5)SP <i>stunting</i> = Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu JAB (5) = Jumlah anak balita pada waktu yang sama Cara perhitungan (3) Prevalensi stunting = PAB(5)P + PAB(5)SP
Interpretasi	Prevalensi stunting yang tinggi di suatu wilayah menggambarkan beberapa masalah serius, termasuk : 1. Kekurangan Gizi: Stunting adalah indikator kekurangan gizi kronis. Prevalensi stunting yang tinggi menunjukkan bahwa banyak anak di wilayah tersebut menderita kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. 2. Akses Pelayanan Kesehatan: Prevalensi stunting yang tinggi dapat mencerminkan akses yang terbatas ke pelayanan kesehatan berkualitas, termasuk pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak. 3. Kemiskinan: Stunting sering kali terkait dengan kemiskinan. Keluarga yang miskin mungkin tidak mampu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan stunting. 4. Pendidikan: Tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, juga berpengaruh terhadap prevalensi stunting. Orang tua yang berpendidikan cenderung lebih memahami pentingnya gizi dan kesehatan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.

	5. Faktor Lingkungan: Faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan akses terbatas ke air bersih juga dapat berkontribusi terhadap prevalensi stunting.
Sumber Data	SSGI
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)
Definisi	Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah.
Rumus Perhitungan	Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah peserta jaminan kesehatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia dikali 100%. $\text{Cakupan Kepesertaan JKN} = \frac{\text{Jumlah peserta JKN}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100 \%$
Interpretasi	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang tinggi di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting: 1. Akses Pelayanan Kesehatan : Cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan. 2. Kesadaran Masyarakat : Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. 3. Komitmen Pemerintah Daerah : Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional. 4. Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) : Cakupan yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian Universal Health Coverage (UHC), yaitu kondisi di mana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan.
Sumber Data	BPJS DJSN
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
Definisi	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya mewujudkan Keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Keluarga Berkualitas adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. (UU NO.52/2009 dan Peraturan BKKBN Nomor 3 Tahun 2022)
Rumus Perhitungan	Pengukuran iBangga dilakukan oleh BKKBN meliputi dimensi: a. Ketenteraman; b. Kemandirian; dan c. Kebahagiaan. • Dimensi Ketenteraman terdiri atas indikator : a. kegiatan ibadah; b. legalitas Keluarga; c. jaminan kesehatan; d. keharmonisan Keluarga. • Dimensi Kemandirian terdiri atas indikator : a. pemenuhan kebutuhan dasar; b. jaminan keuangan; c. keberlangsungan pendidikan; d. kesehatan Keluarga; e. akses media online/daring.

	• Dimensi Kebahagiaan terdiri atas indikator : a. interaksi Keluarga; b. interaksi sosial.
Interpretasi	Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kriteria sebagai berikut : • Nilai iBangga < 40 : kurang baik (rentan) • Nilai iBangga 40 – 70 : cukup baik (berkembang) • Nilai iBangga > 70 : baik (tangguh)
Sumber Data	BKKBN
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Ketimpangan Gender
Definisi	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.
Rumus Perhitungan	Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki $G_p = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}\right)^{\frac{1}{2}} \times (PR_p \times SE_p)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_p}$ $G_L = \sqrt[3]{1 \times (PR_L \times SE_L)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_L}$ 2. Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks lakilaki dengan rata-rata harmonic $HARM(G_p, G_L) = \left[\frac{(G_p)^{-1} + (G_L)^{-1}}{2} \right]^{-1}$ 3. Menghitung indeks masing – masing dimensi $IKR = \frac{\left(\sqrt{\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}} + 1 \right)}{2}$ $IPK = \frac{TPAK_p + TPAK_L}{2}$ $IP = \frac{\left(\sqrt{PR_p \times SE_p} + \sqrt{PR_L \times SE_L} \right)}{2}$ 4. Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometric $G_{p,L} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$ 5. Menghitung Indeks Kesetaraan Gender $Indeks\ Kesetaraan\ Gender = \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{p,L}}$ 6. Menghitung Indeks Ketimpangan Gender $IKG = 1 - \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{p,L}}$ Keterangan : G_p : Indeks Perempuan

	GL : Indeks Laki-laki MTF : Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas Kesehatan MHPK20 : Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun PRP : Persentase perempuan di legislative PRL : Persentase laki-laki di legislative SEP : Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas SEL : Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas TPAKP : Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja TPAKL : Persentase angkata kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja HARM (GP, GL) : Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonic IKR : Indeks dimensi kesehatan reproduksi IP : Indeks dimensi pemberdayaan IPK : Indeks dimensi pasar tenaga kerja GPL : Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometric IKG : Indeks Ketimpangan Gender
Interpretasi	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) bernilai antara 0 dan 1. Semakin kecil nilainya maka tingkat ketimpangan gender di suatu wilayah akan semakin setara dan sebaliknya.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, dan Sekretaris Dewan (Sekwan)
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Perlindungan Anak
Definisi	Indikator yang menggambarkan pencapaian pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak meliputi hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, dan perlindungan khusus.
Rumus Perhitungan	$IPA = \sum 5j = 1 (Wj \times \text{Indeks } Kj)$ Menghitung angka indikator penyusun Indeks Perlindungan Anak (IPA) yang terdiri dari 5 klaster dengan 27 indikator: A. KLASSTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN 1. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran 2 2. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang pernah mengunjungi perpustakaan/ memanfaatkan taman bacaan masyarakat 3. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang pernah menggunakan internet 4. Persentase anak berusia 10-17 tahun yang pernah mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar 5. Persentase anak berusia 10-17 tahun yang ikut serta dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja atau sekolah B. KLASSTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF 1. Persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun 2. Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak 3. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang tidak tinggal bersama kedua orang tua 4. Angka kesiapan sekolah

	C. KLASSTER KESEHATAN 1. Persentase perempuan pernah kawin berusia 15-49 Tahun yang melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga Kesehatan 2. Persentase balita stunting 3. Persentase anak berusia 0-5 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif 4. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang konsumsi kalornya < 1400 kkal 5. Persentase anak berusia 0-17 Tahun yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak 6. Persentase Anak berusia 0-17 Tahun yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak 7. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang merokok 8. Persentase anak berusia 12-23 Bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap D. KLASSTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA 1. 1. Persentase anak berusia 7-17 tahun yang tidak sekolah 2. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang mengunjungi peninggalan sejarah dan warisan budaya Indonesia 3. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang mengikuti kursus (selain bimbingan belajar) 4. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang masih bersekolah yang pernah mengikuti ekstrakurikuler 5. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang terlibat dalam pertunjukan seni E. KLASSTER PERLINDUNGAN KHUSUS 1. Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja 2. Rasio anak berusia 5-17 tahun (disabilitas/non disabilitas) yang pernah mengakses internet 3. Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak berusia 7-17 Tahun (disabilitas/non disabilitas) 4. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan 5. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang telantar II. melakukan normalisasi indikator penyusun Indeks Perlindungan Anak (IPA) III. menghitung Indeks Perlindungan Anak (IPA)
Interpretasi	sebagai indikator yang mengukur capaian pembangunan perlindungan anak baik secara nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
Sumber Data	BPS dan KemenPPPA
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Gender
Definisi	Alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kesetaraan gender dalam pembangunan suatu negara. IPG menghitung perbedaan pencapaian antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu: 1. Kesehatan: Diukur dengan angka harapan hidup saat lahir. 2. Pendidikan: Diukur dengan angka melek huruf dewasa dan tingkat partisipasi pendidikan dasar hingga tinggi. 3. Pendapatan: Diukur dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan.

Rumus Perhitungan	<table><tr><td>IPG</td><td>=</td><td>$\frac{\text{IPM Perempuan}}{\text{IPM Laki-Laki}}$</td><td>x 100%</td></tr></table> Keterangan : IPG: adalah Indeks Pembangunan Gender. IPM Perempuan: adalah Indeks Pembangunan Manusia untuk perempuan. IPM Laki-laki: adalah Indeks Pembangunan Manusia untuk laki-laki. Rumus ini menunjukkan perbandingan antara IPM perempuan dan IPM laki-laki, yang kemudian dikalikan dengan 100 untuk mendapatkan persentase. Penting untuk dicatat bahwa: IPM itu sendiri dihitung berdasarkan tiga dimensi: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Semakin mendekati angka 100, semakin baik kesetaraan gender dalam pembangunan. Semakin jauh dari 100, semakin besar <u>kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan</u>	IPG	=	$\frac{\text{IPM Perempuan}}{\text{IPM Laki-Laki}}$	x 100%
IPG	=	$\frac{\text{IPM Perempuan}}{\text{IPM Laki-Laki}}$	x 100%		
Interpretasi	Sebagai indikator yang mengukur capaian pembangunan gender secara nasional, provinsi dan kabupaten/kota.				
Sumber Data	BPS				
Frekuensi	Tahunan				

Nama Indikator	Indeks Kesejahteraan Sosial
Defenisi	Indikator komposit yang menggambarkan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat berdasarkan beberapa dimensi penting, seperti: pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan sosial, partisipasi sosial, ketahanan keluarga, dan akses terhadap layanan sosial dasar.
Rumus Perhitungan	$IKS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ Keterangan: • IKS = Indeks Kesejahteraan Sosial • X₁, X₂, ..., X_n = Skor masing-masing dimensi kesejahteraan sosial (sudah dinormalisasi dalam skala 0–100) • n = Jumlah dimensi indikator
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi tingkat kesejahteraan sosial masyarakat di suatu wilayah
Sumber Data	Dinas Sosial, BPS, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kemensos
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Peningkatan Partisipasi Pemuda Berwirausaha								
Definisi	Persentase Jumlah Pemuda berumur 16-30 yang berwirausaha dibandingkan dengan jumlah Pemuda yang berumur 16 – 30 tahun di kota Sawahlunto								
Rumus Perhitungan	<table><tr><td rowspan="2">Persentase Peningkatan Partisipasi Pemuda Berwirausaha</td><td rowspan="2">=</td><td>Jumlah Pemuda yang Berwirausaha (tahun n) - Jumlah Pemuda yang Berwirausaha (tahun n -1)</td><td rowspan="2">x 100%</td></tr><tr><td>Jumlah Pemuda yang Berwirausaha (tahun n -1)</td></tr></table>				Persentase Peningkatan Partisipasi Pemuda Berwirausaha	=	Jumlah Pemuda yang Berwirausaha (tahun n) - Jumlah Pemuda yang Berwirausaha (tahun n -1)	x 100%	Jumlah Pemuda yang Berwirausaha (tahun n -1)
Persentase Peningkatan Partisipasi Pemuda Berwirausaha	=	Jumlah Pemuda yang Berwirausaha (tahun n) - Jumlah Pemuda yang Berwirausaha (tahun n -1)	x 100%						
		Jumlah Pemuda yang Berwirausaha (tahun n -1)							
Interpretasi	Data tentang pemuda dalam berwirausaha sangat berdampak terhadap perekonomian daerah ataupun nasional. Sikap positif dapat mendorong pemuda utk aktif dalam mencari peluang dan mengatasi segala hambatan yang ada								
Sumber Data	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga								
Frekuensi	Tahunan								

Nama Indikator	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga			
Definisi	Jumlah Perolehan Medali tahun (n) kurangi jumlah perolehan medali tahun (n-1) dibandingkan dengan jumlah perolehan medali tahun (n-1)			
Rumus Perhitungan	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga = Jumlah Perolehan Medali (tahun n) - Jumlah Perolehan Medali (tahun n-1) Jumlah Perolehan Medali (tahun n-1) x 100%			
Interpretasi	Data Atlet berprestasi membutuhkan pemahaman yang komprehensif tentang berbagai factor yang mempengaruhi atlet untuk mencapai prestasinya. Atlet sangat penting untuk mendapatkan dukungan yang sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing atlet untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi			
Sumber Data	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga			
Frekuensi	Tahunan			

Misi 7 :
Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Atas Pengukuran Indeks Kinerja yang Ditetapkan oleh Kementerian dan Lembaga Lainnya

Nama Indikator	Indeks reformasi birokrasi
Definisi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian pelaksanaan program reformasi birokrasi pada instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang mencakup berbagai aspek perubahan birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Rumus Perhitungan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) = $\sum(\text{Nilai Komponen} \times \text{Bobot})$ Total Bobot
Interpretasi	Semakin tinggi skor IRB, menunjukkan reformasi birokrasi berjalan baik dan efektif
Sumber Data	Kementerian PANRB
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Inovasi Daerah
Definisi	Himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Rumus Perhitungan	Indeks Inovasi Daerah = Skor Total Skor total maksimum x 100
Interpretasi	Indeks inovasi daerah dapat dijadikan ukuran yang menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi yang dimilikinya guna tercapainya kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan berdaya saing
Sumber Data	Kementerian Dalam Negeri
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Definisi	Suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. (Permendagri No. 18/2020).
Rumus Perhitungan	EPPD = [CKM + CKUP] x 0.75 + [PKM] x 0.25 Keterangan : CKM = Capaian Kinerja Makro CKUP = Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan PKM = Perubahan Kinerja Makro

Interpretasi	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi : • Skor kinerja 1,00 – 1,80 dengan status kinerja Sangat Rendah; • Skor kinerja 1,81 – 2,60 dengan status kinerja Rendah; • Skor kinerja 2,61 – 3,40 dengan status kinerja Sedang; • Skor kinerja 3,41 – 4,20 dengan status kinerja Tinggi; • Skor kinerja 4,21 – 5,00 dengan status kinerja Sangat Tinggi.
Sumber Data	Kementerian Dalam Negeri
Frekuensi	Satu kali per tahun

Nama Indikator	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah
Definisi	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah adalah ukuran komposit yang menggambarkan kualitas dan konsistensi proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, keterpaduan, partisipatif, serta ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.
Rumus Perhitungan	$\text{Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah} = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{Skor}_i \times \text{Bobot}_i)}{\sum_{i=1}^n \text{Bobot}_i}$ Keterangan : • Skor i = Nilai dari setiap aspek penilaian (0–100) • Bobot i = Bobot pentingnya aspek tersebut terhadap kualitas perencanaan • Aspek penilaian meliputi, misalnya: ➤ Kelengkapan dokumen ➤ Konsistensi antar dokumen (RPJMD–RKPD–Renja) ➤ Keterpaduan dengan prioritas nasional ➤ Tingkat partisipasi masyarakat ➤ Penggunaan sistem informasi (SIPD) ➤ Ketepatan waktu penyusunan
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, semakin baik kualitas tata kelola perencanaan
Sumber Data	Bappeda (dokumen RPJMD, RKPD, Renja, Renstra)
Frekuensi	Tahunan, 5 tahunan, 20 Tahunan

Nama Indikator	Nilai AKIP Instansi Pemerintah
Definisi	Nilai AKIP adalah nilai yang diberikan kepada instansi pemerintah sebagai hasil evaluasi penerapan <i>Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)</i> .
Rumus Perhitungan	Nilai ini mencerminkan sejauh mana instansi tersebut berhasil dalam mengelola dan mencapai kinerja, termasuk dalam hal perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja Tingkatan Nilai AKIP : AA : Sangat Memuaskan (nilai absolut > 90-100) A : Memuaskan (nilai absolut > 80-90) BB : Sangat Baik (nilai absolut > 70-80) B : Baik (nilai absolut > 60-70) CC : Cukup (nilai absolut > 50-60) C : Kurang (nilai absolut > 30-50) D : Sangat Kurang (nilai absolut > 0-30)
Interpretasi	Semakin tinggi nilai AKIP, semakin baik pula akuntabilitas dan kinerja instansi tersebut.
Sumber Data	Kementerian PANRB
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)
Definisi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan (maturity level) penyelenggaraan sistem pengendalian intern pada instansi pemerintah daerah, yang

	mencerminkan sejauh mana sistem pengendalian intern diterapkan secara efektif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
Rumus Perhitungan	$\text{Nilai SPIP} = \frac{\text{Jumlah nilai komponen SPIP (dari 5 unsur)}}{\text{Jumlah unsur SPIP (5)}}$ Keterangan : • Jumlah nilai komponen SPIP: Penjumlahan skor dari 5 komponen utama SPIP. • Jumlah unsur SPIP: Tetap 5 unsur (komponen utama sistem pengendalian). • Penilaian dilakukan oleh Inspektorat atau BPKP, bisa melalui self-assessment, review, dan verifikasi lapangan. • Hasil nilai tersebut menjadi rujukan pengukuran maturitas SPIP daerah.
Interpretasi	Semakin tinggi level maturitas, semakin baik pelaksanaan sistem pengendalian intern
Sumber Data	Laporan Penilaian Maturitas SPIP
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Profesionalitas ASN
Definisi	Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran yang menggambarkan tingkat kompetensi, kualifikasi, kinerja, disiplin, integritas, dan komitmen terhadap pelayanan publik dari ASN di suatu instansi pemerintah. Indeks ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana ASN memenuhi standar profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Rumus Perhitungan	$\text{Indeks Profesionalitas ASN} = \frac{\sum (\text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin})}{\text{Jumlah ASN}}$
Interpretasi	Semakin tinggi skor, semakin profesional ASN pada instansi tersebut
Sumber Data	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah									
Definisi	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menunjukkan tingkat kepatuhan, kualitas, dan efektivitas pengelolaan arsip di lingkungan pemerintahan daerah (provinsi/kabupaten/kota), berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Kearsipan Nasional (ANRI) atau Lembaga Kearsipan Daerah.									
Rumus Perhitungan	<table><tr><td>Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah</td><td>=</td><td><table><tr><td>Skor Total Hasil Pengawasan Kearsipan</td><td rowspan="2">x 100</td></tr><tr><td>Skor Maksimal</td></tr></table></td></tr></table> Keterangan : • Skor Total Hasil Pengawasan: Penjumlahan dari seluruh poin nilai yang diperoleh berdasarkan hasil evaluasi terhadap aspek-aspek pengelolaan arsip (seperti: kebijakan kearsipan, SDM, sarana prasarana, pengelolaan arsip aktif-inaktif, pengawasan internal, dll.) • Skor Maksimal: Nilai maksimum yang bisa dicapai (biasanya = 100 poin). • Output: Nilai indeks dalam skala 0–100.				Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	=	<table><tr><td>Skor Total Hasil Pengawasan Kearsipan</td><td rowspan="2">x 100</td></tr><tr><td>Skor Maksimal</td></tr></table>	Skor Total Hasil Pengawasan Kearsipan	x 100	Skor Maksimal
Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	=	<table><tr><td>Skor Total Hasil Pengawasan Kearsipan</td><td rowspan="2">x 100</td></tr><tr><td>Skor Maksimal</td></tr></table>	Skor Total Hasil Pengawasan Kearsipan	x 100	Skor Maksimal					
Skor Total Hasil Pengawasan Kearsipan	x 100									
Skor Maksimal										
Interpretasi	Semakin tinggi skor, menunjukkan tata kelola kearsipan semakin baik dan sesuai standar nasional kearsipan									
Sumber Data	• Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan oleh ANRI atau LKD • Formulir Penilaian Mandiri Kearsipan (AMANI/IKM) • Berita Acara Hasil Pengawasan Kearsipan • Dokumentasi Audit Arsip Internal • Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN)									

Frekuensi	Tahunan (Biasanya dilakukan dalam siklus audit/pengawasan kearsipan per tahun anggaran)

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
Definisi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat pembangunan literasi di masyarakat berdasarkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan fasilitas layanan perpustakaan serta aktivitas literasi di suatu daerah. IPLM dikembangkan untuk menilai kemampuan masyarakat dalam mengakses, memahami, dan menggunakan informasi melalui aktivitas membaca, belajar, dan berpartisipasi dalam kegiatan literasi yang difasilitasi oleh perpustakaan dan lembaga sejenis.
Rumus Perhitungan	$IPLM = \frac{\sum_{i=1}^n (w_i \times I_i)}{\sum_{i=1}^n w_i}$ Keterangan : • I_i = Skor indikator ke-i pada dimensi pembangunan literasi masyarakat • w_i = Bobot indikator ke-i • n = Jumlah indikator yang digunakan dalam penghitungan • IPLM memiliki rentang nilai dari 0 sampai 100, di mana makin tinggi nilai IPLM, makin baik tingkat pembangunan literasi masyarakat di wilayah tersebut.
Interpretasi	Semakin tinggi skor IPLM, semakin baik pembangunan dan pencapaian literasi masyarakat di wilayah tersebut
Sumber Data	Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi/Kabupaten/Kota, BPS, data survei literasi daerah
Frekuensi	Tahunan (1 kali per tahun, disesuaikan dengan pelaporan nasional)

Nama Indikator	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
Definisi	Satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 19 Tahun 2020
Rumus Perhitungan	Pengelolaan keuangan daerah yang benar akan mendorong peningkatan ekonomi daerah. Terdapat 6 (Enam) Dimensi yang digunakan yaitu : • Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (Dimensi 1), • Kualitas anggaran belanja dalam APBD (Dimensi 2), • Transparansi pengelolaan keuangan daerah (Dimensi 3), • Penyerapan anggaran (Dimensi 4), • Kondisi keuangan daerah (Dimensi 5), • Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Dimensi 6)
Interpretasi	Semakin besar nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah menunjukkan semakin efektif, semakin efisien, semakin transparan, dan semakin akuntabel kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah tersebut
Sumber Data	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Frekuensi	Tahunan

4. Metadata Indikator Kinerja Daerah
4a. Metadata IUP RPJPD Berdasarkan 4 Aspek
I. Aspek Geografi Dan Demografi

Nama Indikator	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)
Definisi	Ketidacukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment/PoU</i>) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya
Rumus Perhitungan	$PoU = \int_{x < MDER} f(x)dx$ Keterangan : PoU = Proporsi populasi yang mengalami ketidacukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal MDER = Kebutuhan Minimum Energi yang diukur dengan kkal (<i>Minimum Dietary Energy Requirement</i>) f(x) = Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu
Interpretasi	Mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan dibawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasikan semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya.
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Konsumsi listrik perkapita (Kwh)
Definisi	Konsumsi Listrik per kapita (Kwh/Kapita) adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung dari sumber energi.
Rumus Perhitungan	$KLpk = \frac{KLpln + KLnonpln}{P}$ Keterangan : KLpk = Konsumsi listrik per kapita KLpln = Total Konsumsi Listrik yang disalurkan oleh PT. PLN KLnonpln = Total Konsumsi Listrik yang disalurkan oleh Non PT. PLN P = Jumlah Penduduk Catatan: Jumlah pemakaian tenaga listrik adalah total penjualan listrik PT. PLN dan non PT. PLN yang disalurkan ke pelanggan. Perhitungan indikator masih difokuskan pada wilayah usaha PT. PLN.
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengetahui kualitas pemenuhan kebutuhan listrik dan rata-rata konsumsi listrik per kapita yang didukung oleh pengelolaan ketenagalistrikan guna mencapai keberhasilan pembangunan nasional.
Sumber Data	Kementerian ESDM, PT PLN, dan BPS
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Kapasitas Air Baku (m3/detik)
Definisi	Debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air lainnya.
Rumus Perhitungan	Total kapasitas debit pengambilan air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri dan lain-lain di setiap sumber air meliputi mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, dan atau sumber air lainnya.
Interpretasi	-
Sumber Data	Buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Kapasitas Air Baku (m3/detik)
Definisi	Debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air lainnya.
Rumus Perhitungan	Total kapasitas debit pengambilan air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri dan lain-lain di setiap sumber air meliputi mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, dan atau sumber air lainnya.
Interpretasi	-
Sumber Data	1. Buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
Frekuensi	1. Buku Informasi Pusat Statistik Infrastruktur PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) – Per Tahun

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Definisi	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).
Rumus Perhitungan	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKTL)$ Keterangan : IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Dinas PKP2LH Kota Sawahlunto)
Interpretasi	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) : - Sangat Baik : $90 \leq IKLH \leq 100$ - Baik : $70 \leq IKLH < 90$ - Sedang : $50 \leq IKLH < 70$ - Kurang : $25 \leq IKLH < 50$ - Sangat Kurang : $0 \leq IKLH < 25$
Sumber Data	Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara dan tutupan lahan, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman
Definisi	Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T)

Rumus Perhitungan	$PSA = \frac{JRTSPAL + JRTIPLT}{JRTS} \times 100 \%$ Keterangan : PSA = Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi aman JRTSPAL = Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T JRTIPLT = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangka septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mendapatkan data akses sanitasi aman sebagai pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Akses terhadap sanitasi yang aman serta sanitasi sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virus yang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat
Sumber Data	• Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS • Data Infrastruktur Kementerian PUPR
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
Definisi	Timbulan Sampah Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan; karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan; a. Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, vermi composting, biodigester, dsb. b. Daur ulang materi (material recovery) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti; plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Rantai nilai daur ulang materi biasanya melibatkan beberapa langkah seperti industri daur ulang swasta yang membeli, memproses, dan memperdagangkan bahan mulai dari pengambilan hingga diproses ulang menjadi produk, bahan, atau zat yang memiliki nilai pasar. Pada rantai daur ulang materi ini melibatkan pemulung informal, lapak, pengepul, bandar, dan pendaur ulang rantai akhir. Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank

	Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta. Catatan : Mengacu pada definisi global dari UN-Habitat, bahwa makna dari waste recovery sepadan dengan kegiatan pengolahan sampah. Pemulihan (recovery) itu sendiri merupakan setiap kegiatan yang secara prinsip utamanya adalah sampah memiliki fungsi untuk mengganti bahan material lain untuk memenuhi fungsi tertentu, dalam alur produksi atau ekonomi yang lebih luas. Kegiatan pengolahan sampah menjadi energi dan/atau bahan bakar lainnya tidak dihitung ke dalam indikator sampah terolah.
Rumus Perhitungan	Langkah ke-1: Menghitung Jumlah Sampah Terolah Terdapat dua alternatif menghitung jumlah sampah terolah: Cara (1) $SO = ST - MFPA + RPD$ Keterangan : SO = Sampah terolah (ton/hari) ST = Sampah terkumpul (ton/hari) MFPA = Sampah yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir sampah (ton/hari) RPD = Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) Cara (2) $SO = MFPD + DPA - RPD$ Keterangan : SO = Sampah terolah (ton/hari) MFPD = Sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan daur ulang sampah (ton/hari) DPA = Material daur ulang yang diambil dari fasilitas pemrosesan akhir oleh sektor informal (ton/hari) RPD = Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) Langkah ke-2: Menghitung Timbulan Sampah $TS = TP \times (TPRT + TPNRT)$ Keterangan : TS = Timbulan sampah (kg/hari) TP = Total populasi (orang) TPRT = Timbulan sampah per kapita dari rumah tangga (kg/orang/hari) TPNRT = Timbulan sampah per kapita dari non-rumah tangga (kg/hari) Jika tidak terdapat informasi TPNRT, maka pendekatan dapat di estimasi menggunakan perhitungan berikut: $TS = 70 \% \text{ dari rumah tangga} + 30 \% \text{ dari non rumah tangga}$ $TS = \frac{TSRT}{70 \%}$ Keterangan : TS = Timbulan sampah (ton/hari) TSRT = Timbulan sampah rumah tangga (ton/hari) Langkah ke-3: Menghitung Tingkat Sampah Terolah $\% SO = \frac{SO}{TS} \times 100 \%$ Keterangan : % SO = Tingkat sampah terolah (%) SO = Sampah terolah (ton/hari) TS = Timbulan sampah (ton/hari)
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengolahan sampah di daerah
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS dan Podes (masih dalam proses uji coba)

	- Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - SI INSAN Kementerian PUPR
Frekuensi	- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS dan Podes: Tahunan - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Tahunan - SI INSAN Kementerian PUPR: Tahunan

Nama Indikator	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)
Definisi	Pengumpulan Sampah Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah adalah rumah tangga yang : - Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap danrutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga atau lebih yang terpisah misal: fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu; atau - Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200m, dilayani dengan frekuensi tetap danrutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu. Catatan : Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota. Penting untuk diketahui bahwa : (a) Sampah terkumpul Sampah Terkumpul mengacu pada jumlah sampah yang mencapai fasilitas pengelolaan sampah (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah mempertimbangkan rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah. Praktik lapangan yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota, sampah yang terkumpul dibuang ke lingkungan (tidak diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah). Dalam hal ini rumah tangga tersebut memiliki pelayanan pengumpulan sampah, namun sampah terkumpul mencemari lingkungan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan suatu Kabupaten/Kota memiliki nilai yang tinggi dalam “Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah”, namun jumlah “sampah terkumpul” dan diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah rendah.
Rumus Perhitungan	Unit Satuan : Persentase Rumah tangga Cara Perhitungan : $PRTLTP = \frac{JRTLTP}{JRTS} \times 100 \%$ Keterangan : PRTLTP = Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah

	JRTLP = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap layanan penuh pengumpulan sampah JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya Sumber : - Diadaptasi dari Metadata SDGs, 2021 - Rancangan Platform Pengelolaan Persampahan Nasional
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pelayanan rumah tangga untuk pengumpulan sampah.
Sumber Data	- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) MKP BPS - Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS (masih dalam tahap pengusulan
Frekuensi	- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) MKP BPS: 3 Tahunan. - Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS: Tahunan

Nama Indikator	Indeks Kualitas Tutupan Lahan														
Definisi	Merupakan alat ukur yang mengukur tingkat kualitas penutupan lahan dalam suatu wilayah. IKTL dibuat dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti tipe dan luas dari tutupan lahan, stabilitas ekosistem, dan tingkat degradasi lahan.														
Rumus Perhitungan	2009-2012 ITH $\frac{LHP + LHS}{LKH}$ - Tutupan hutan primer dan hutan sekunder (tidak termasuk hutan tanaman) - Hanya dalam kawasan hutan 2013 ITH $\frac{LHP + LHS}{LWP}$ Tidak hanya dalam kawasan hutan tetapi juga di luar kawasan hutan (luas wilayah provinsi) 2014-2016 ITH/IKTL $100 - [(84,3 - (TH \times 100) \times \frac{50}{54,3}]$ - Tutupan hutan termasuk hutan tanaman - Provinsi Papua memiliki tutupan hutan >84,3 sehingga IKTL >100 2017-2018 IKTL - Ditambah tutupan belukar dan belukar rawa yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, danau dan pantai, lereng >25% (0,6 dari tutupan hutan) - RTH, kebun raya dan taman keanekaragaman hayati (0,6 dari tutupan hutan) KATEGORI NILAI IKLH <table><tr><td>UNGGUL</td><td>$X > 90$</td></tr><tr><td>SANGAT BAIK</td><td>$82 < X \leq 90$</td></tr><tr><td>BAIK</td><td>$74 < X \leq 82$</td></tr><tr><td>CUKUP</td><td>$66 < X \leq 74$</td></tr><tr><td>KURANG</td><td>$58 < X \leq 66$</td></tr><tr><td>SANGAT KURANG</td><td>$50 < X \leq 58$</td></tr><tr><td>WASPADA</td><td>$X < 50$</td></tr></table> 84,3 merupakan tutupan hutan tertinggi (Papua) UU 41/1999 : mempertahankan keCUKUPANan kawasan hutan dan penutupannya minimal 30% (artinya cukup) Dalam perhitungan IKTL dengan tutupan hutan 30% nilai IKTL nya 50 (dalam kategori IKLH nilai 50 kondisinya sangat kurang) %TH 30 IKTL 50 54,3 84,3 100 50 $IKTL = 100 - [(84,3 - (TH \times 100) \times \frac{50}{54,3}]$	UNGGUL	$X > 90$	SANGAT BAIK	$82 < X \leq 90$	BAIK	$74 < X \leq 82$	CUKUP	$66 < X \leq 74$	KURANG	$58 < X \leq 66$	SANGAT KURANG	$50 < X \leq 58$	WASPADA	$X < 50$
UNGGUL	$X > 90$														
SANGAT BAIK	$82 < X \leq 90$														
BAIK	$74 < X \leq 82$														
CUKUP	$66 < X \leq 74$														
KURANG	$58 < X \leq 66$														
SANGAT KURANG	$50 < X \leq 58$														
WASPADA	$X < 50$														
Interpretasi	faktor penyebab perubahan penutupan lahan diantaranya pertumbuhan penduduk, mata pencaharian, aksesibilitas, dan fasilitas pendukung kehidupan serta kebijakan pemerintah.														
Sumber Data	Kementerian Lingkungan Hidup														
Frekuensi	Tahunan														

Nama Indikator	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)
Definisi	IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.
Rumus Perhitungan	$\text{Risk} = \text{Hazard} \times \frac{\text{Vulnerability}}{\text{Capacity}}$ Keterangan : Hazard = (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Vulnerability = (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan Capacity = Kapasitas dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu : - Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; - Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; - Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; - Penanganan tematik kawasan rawan bencana; - Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; - Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; - Pengembangan sistem pemulihan bencana
Interpretasi	Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan. Pembagian kelas tingkat Indeks Risiko Bencana sebagai berikut : - Rendah : Indeks < 13 - Sedang : Indeks 13 - 144 - Tinggi : Indeks > 144
Sumber Data	BNPB
Frekuensi	Tahunan

II. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Nama Indikator	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
Definisi	Merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu
Rumus Perhitungan	$LPE(t) = \frac{PDRB\ ADHK(t) - PDRB\ ADHK(t-1)}{PDRB\ ADHK(t-1)} \times 100\%$ Keterangan : t = Tahun Tertentu (t-1) = Tahun Sebelum
Interpretasi	Hasil perhitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (%)
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
Rumus Perhitungan	$P\alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]$ Dimana : a = 0 z = garis kemiskinan y_i = Rata-Rata Pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinnn(i=1,2,3,...,q), y_i<z q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = jumlah penduduk
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk regional.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Maret dan September)

Nama Indikator	PDRB Per Kapita ADHB (Rp Juta)
Definisi	PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
Rumus Perhitungan	$PDRB \text{ Per Kapita ADHB} = \frac{PDRB \text{ ADHB}}{Populasi}$ Keterangan : PDRB ADHB = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku populasi = jumlah penduduk regional t = periode
Interpretasi	Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Tingkat Pengangguran Terbuka
Definisi	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu : • penduduk yang aktif mencari pekerjaan; • penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru; • penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan; • kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Rumus Perhitungan	$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ Keterangan : TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%) PP = Jumlah pengangguran (orang) PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)
Interpretasi	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (<i>supply</i>) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak dimanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antarkelompok tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	2 kali per Tahun

Nama Indikator	Rasio Gini
Definisi	Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva <i>Lorenz</i> dan aspek matematis.
Rumus Perhitungan	$Rasio\ Gini = 1 - \sum_{i=1}^n (p_i - p_{i-1}) (y_i - y_{i-1})$ Dimana : i = 1 p_i = proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i y_i = proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i n = jumlah observasi
Interpretasi	Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. • Rasio Gini bernilai 0 menunjukan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). • Sedangkan, nilai 1 menunjukan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut : • Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang. • Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukan ketimpangan sedang. • Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukan pemerataan relatif baik. Secara visual, rasio gini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva <i>Lorenz</i>, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut dari termiskin ke terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran digambar pada sumbu vertikal. Rasio gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (<i>perfect equality</i>) dan kurva <i>Lorenz</i>. Semakin jauh jarak kurva <i>Lorenz</i> dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Maret dan September)

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Manusia
Definisi	Indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup.
Rumus Perhitungan	$IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pengeluaran}}$ IPM dihitung menggunakan rata-rata geometrik dari indeks Indeks Kesehatan (UHH), indeks pengetahuan (rata-rata dari indeks HLS dan RLS), dan indeks pengeluaran.
Interpretasi	Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusiayase makin baik. Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori : - Rendah : $IPM < 60$ - Sedang : $60 \leq IPM < 70$ - Tinggi : $70 \leq IPM < 80$ - Sangat tinggi : $IPM \geq 80$
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Usia Harapan Hidup (UHH)(tahun)
Definisi	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada tahun tertentu.
Rumus Perhitungan	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian. yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program <i>Micro Computer Program for Demographic Analysis</i> (MCPDA) atau <i>Mortpack</i> .
Interpretasi	Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)
Definisi	Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010. a. Sangat pendek = $Zscore < -3,0$ b. Pendek = $Zscore \geq -3,0$ s/d $Zscore < -2,0$.
Rumus Perhitungan	Cara perhitungan (1) (1) Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB (5)P = \frac{JAB (5) P \text{ stunting}}{JAB (5)} \times 100 \%$

Nama Indikator	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
Definisi	Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.
Rumus Perhitungan	$AKI = \frac{JKI}{JLH} \times 100.000$

	Keterangan : AKI = Angka kematian ibu JKI = Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau estimasi pada waktu tertentu JLH = Jumlah kelahiran hidup
Interpretasi	Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) adalah ukuran yang digunakan untuk memantau jumlah kematian ibu yang terjadi sebagai akibat langsung dari komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Angka Kematian Ibu (AKI) yang rendah di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting : 1. Kualitas Pelayanan Kesehatan: AKI yang rendah biasanya mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan yang baik, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan antenatal, persalinan, dan pascapersalinan. 2. Akses Pelayanan Kesehatan: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan akses yang baik ke pelayanan kesehatan. Ini bisa berarti bahwa fasilitas kesehatan mudah dijangkau dan terjangkau oleh masyarakat. 3. Pendidikan Kesehatan: AKI yang rendah bisa mencerminkan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya pelayanan kesehatan selama kehamilan dan persalinan. 4. Status Gizi: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan status gizi ibu yang baik. Gizi yang baik selama kehamilan sangat penting untuk mencegah komplikasi yang bisa mengancam nyawa ibu. 5. Kesadaran Masyarakat: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan selama kehamilan dan persalinan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)
Definisi	Persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu
Rumus Perhitungan	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu.
Interpretasi	Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan. Indikator ini mencakup dua aspek penting : 1. Penemuan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis. 2. Pengobatan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu yang didiagnosis dengan tuberkulosis.
Sumber Data	Data Program Kementerian Kesehatan BPS Provinsi Sumatera Barat
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)
Definisi	Persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap.
Rumus Perhitungan	Jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dibandingkan dengan semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan.
Interpretasi	Ini adalah indikator penting dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah.
Sumber Data	Data Program Kementerian Kesehatan BPS Provinsi Sumatera Barat
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)
Definisi	Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah.
Rumus Perhitungan	Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah peserta jaminan kesehatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia dikali 100%. <i>Persentase cakupan kepesertaan JKN</i> = $\frac{\text{Jumlah peserta JKN}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100 \%$
Interpretasi	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang tinggi di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting: - Akses Pelayanan Kesehatan : Cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan. - Kesadaran Masyarakat : Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. - Komitmen Pemerintah Daerah : Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional. - Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) : Cakupan yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian Universal Health Coverage (UHC), yaitu kondisi di mana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan.
Sumber Data	BPJS DJSN
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)
Definisi	Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut : a. Tidak punya ijazah = 0 tahun b. SD = 6 tahun c. SMP = 9 tahun d. SMA = 12 tahun e. D1/D2 = 14 tahun

	f. D3 = 15 tahun g. D4 = 16 tahun h. S1 = 17 tahun i. S2 = 19 tahun j. S3 = 22 tahun Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini : • Tidak pernah sekolah = 0 tahun; • Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1; • Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1; • Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir; • Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir –1.
Rumus Perhitungan	$RLS\ 15+ = \frac{1}{P15+} \sum_{i=1}^n Xi$ Keterangan : P15+ = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas di suatu wilayah Xi = Lama sekolah penduduk ke- i
Interpretasi	Misal: RLS Kota Sawahlunto Tahun 2023 = 10,44 tahun, artinya secara rata-rata, penduduk Kota Sawahlunto yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 10,44 tahun atau telah menamatkan kelas X.
Sumber Data	Susenas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Harapan Lama Sekolah (Tahun)
Definisi	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang.
Rumus Perhitungan	$HLS = FK \sum_{i=7}^k \left[\frac{Ei_i}{Pi} \right]$ Keterangan : Pi = Jumlah penduduk yang berusia 7 tahun ke atas di suatu wilayah pada tahun tertentu Ei = Jumlah penduduk yang berusia 7 tahun ke atas yang masih sekolah di suatu wilayah pada tahun tertentu i = Usia (7, 8, 9,.....,k) FK = Faktor koreksi pesantren
Interpretasi	Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Misal : HLS Kota Sawahlunto pada tahun 2023 sebesar 13,69 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal di Kota Sawahlunto pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,69 tahun atau setara dengan Diploma II.
Sumber Data	Susenas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk : a. Literasi membaca b. Numerasi
Definisi	Jumlah satuan pendidikan di daerah X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar 84 kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di daerah X. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang

	diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1. Perlu intervensi khusus 2. Dasar 3. Cakap 4. Mahir Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.
Rumus Perhitungan	$\% \text{ Satdik min. SKM} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Satsdik min. SKM}}{n}$ Keterangan : Satsdik min.SK M = Satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca atau numerasi n = Jumlah satuan pendidikan
Interpretasi	Misal : Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Numerasi (%) tahun 2023 sebesar 44,44%. Artinya, terdapat 44,44 % satuan pendidikan di Kota Sawahlunto yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi (paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”).
Sumber Data	Asesmen Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Proporsi Penduduk Berusia 15 tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)
Definisi	• Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun keatas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. • Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100% (seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di daerah tersebut sudah menyelesaikan Pendidikan tinggi). • Jenjang pendidikan tinggi mencakup : - Diploma I-IV - S1 - S2 - S2 Terapan - S3
Rumus Perhitungan	$Z = \frac{X}{Y} \times 100 \%$ Keterangan : Z = Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%) X = Jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang lulus atau berijazah pendidikan tinggi Y = Jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas

Interpretasi	• Positif • Tingginya proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi Pendidikan semakin baik
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)																							
Definisi	Pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas lulusan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi. • Bidang keahlian menengah (semi-skilled) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat kompleksitas sedang untuk menyelesaikan tugas yang umumnya bersifat rutin dan tidak membutuhkan kemampuan mental tinggi. • Bidang keahlian tinggi (skilled) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja dengan pengetahuan dan keterampilan komprehensif atas pekerjaan yang dilakukannya sehingga mampu menyelesaikan tugas yang sifatnya kompleks dan membutuhkan kemampuan mental tinggi. Indikator ini diperoleh dengan membagi jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi dengan jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian rendah atau menengah atau tinggi. <table><tr><th>Tingkat Pendidikan Rendah</th><th>Tingkat Pendidikan Menengah</th><th>Tingkat Pendidikan Tinggi</th></tr><tr><td>• Tidak/ belum tamat SD</td><td>• SMA/ MA/ SMLB/ Paket C</td><td>• Diploma I/ II/ III</td></tr><tr><td>• SD/ MI/ SDLB/ Paket A</td><td>• SMK</td><td>• Diploma IV</td></tr><tr><td>• SMP/ MTs/ SMPLB/ Paket B</td><td>• MAK</td><td>• S1</td></tr><tr><td></td><td></td><td>• S2</td></tr><tr><td></td><td></td><td>• S2 Terapan</td></tr><tr><td></td><td></td><td>• S3</td></tr></table>			Tingkat Pendidikan Rendah	Tingkat Pendidikan Menengah	Tingkat Pendidikan Tinggi	• Tidak/ belum tamat SD	• SMA/ MA/ SMLB/ Paket C	• Diploma I/ II/ III	• SD/ MI/ SDLB/ Paket A	• SMK	• Diploma IV	• SMP/ MTs/ SMPLB/ Paket B	• MAK	• S1			• S2			• S2 Terapan			• S3
Tingkat Pendidikan Rendah	Tingkat Pendidikan Menengah	Tingkat Pendidikan Tinggi																						
• Tidak/ belum tamat SD	• SMA/ MA/ SMLB/ Paket C	• Diploma I/ II/ III																						
• SD/ MI/ SDLB/ Paket A	• SMK	• Diploma IV																						
• SMP/ MTs/ SMPLB/ Paket B	• MAK	• S1																						
		• S2																						
		• S2 Terapan																						
		• S3																						
Rumus Perhitungan	$\beta = \frac{A}{C} \times 100 \%$ Keterangan : β = Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (kota x) A = Jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas, yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi, pada tahun tertentu di kota X C = Jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas, yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada tahun tertentu di kota X																							
Interpretasi	Positif : Meningkatnya persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi menggambarkan peningkatan <i>link and match</i> tenaga kerja antara dunia pendidikan (<i>supply</i>) dan lapangan kerja (<i>demand</i>) dengan klasifikasi keahlian yang sesuai dengan tingkat pendidikan.																							
Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS)																							
Frekuensi	Tahunan																							

Nama Indikator	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)
Definisi	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Kota Sawahlunto. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja.
Rumus Perhitungan	$\text{Cakupan Jamsos Naker} = \frac{\text{Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah semesta penduduk bekerja}} \times 100 \%$ Dimana : Peserta = Pekerja Penerima Upah (PPU), Jasa Konstruksi, dan Pekerja Bukan Penerima Upah Semesta Penduduk Bekerja = Penduduk Bekerja yang berusia 15-65 tahun
Interpretasi	Semakin tinggi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko-risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak.
Sumber Data	BPJS Ketenagakerjaan dan BPS, Susenas.
Frekuensi	Setiap bulan dan survei dua kali setahun, bulan Maret dan September setiap tahunnya.

Nama Indikator	Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)
Definisi	Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakkan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan 3) dan buruh/karyawan/pegawai (status pekerjaan 4). Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (status pekerjaan 3 dan 4) terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja. Penyandang disabilitas yang dihitung dalam indikator ini adalah penyandang disabilitas kategori sedang dan berat.
Rumus Perhitungan	$\% PD \text{ formal} = \frac{\sum PD \text{ formal}}{\sum AKPD} \times 100 \%$ Dimana : PD formal = Pekerja penyandang disabilitas sektor formal AKPD = Angkatan kerja penyandang disabilitas
Interpretasi	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal merupakan proporsi penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar dan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai terhadap total angkatan kerja penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal mendapatkan jobs security, penghasilan yang stabil, serta cakupan perlindungan sosial yang lebih baik untuk mendapatkan kehidupan yang layak dibandingkan mereka yang bekerja di sektor informal.
Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Kampung Moderasi Beragama)
Definisi	Kampung Moderasi Beragama adalah Kampung dengan sifat toleransi umat beragama yang tinggi dan menciptakan kerukunan antar umat beragama di tengah masyarakat.
Rumus Perhitungan	Moderasi beragama diukur dari 4 indikator : Komitmen kebangsaan, Toleransi, Anti kekerasan, Adaptif budaya lokal
Interpretasi	Semakin banyak Kampung Moderasi Beragama pada suatu daerah, semakin tinggi toleransi umat beragama di daerah tersebut.
Sumber Data	Kementerian Agama
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Pelestarian Cagar Budaya
Definisi	Persentase pelestarian cagar budaya adalah jumlah cagar budaya (<i>tangible dan Intangible</i>) yang dilestarikan dibandingkan dengan jumlah cagar budaya yang terdata.
Rumus Perhitungan	Persentase Pelestarian Cagar Budaya $= \frac{\text{Jumlah cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah cagar budaya yang terdata}} \times 100 \%$ (Permendagri 18/2020)
Interpretasi	Cagar budaya merupakan warisan sejarah yang tidak hanya mencerminkan identitas suatu bangsa, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan antara generasi. Pelestarian cagar budaya sangat penting untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai historis, budaya, dan artistik yang ada di dalamnya. Pelestarian cagar budaya tidak hanya memberikan manfaat budaya tetapi juga dapat berdampak positif pada ekonomi lokal melalui pariwisata. Situs bersejarah yang terawat dengan baik dapat menarik pengunjung dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi komunitas setempat.
Sumber Data	Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Perlindungan Khusus Anak
Definisi	Indikator yang menggambarkan pencapaian pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak meliputi hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, dan perlindungan khusus.
Rumus Perhitungan	$IPKA = \sum 5j = 1 (Wj \times \text{Indeks } Kj)$ Menghitung angka indikator penyusun Indeks Perlindungan Anak (IPA) yang terdiri dari 5 klaster dengan 27 indikator : A. KLASSTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN - Persentase anak berusia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran - Persentase anak berusia 5-17 tahun yang pernah mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan Masyarakat - Persentase anak berusia 5-17 tahun yang pernah menggunakan internet - Persentase anak berusia 10-17 tahun yang pernah mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar - Persentase anak berusia 10-17 tahun yang ikut serta dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja atau sekolah B. KLASSTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF - Persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun

	7. Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak 8. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang tidak tinggal bersama kedua orang tua 9. Angka kesiapan sekolah D. KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN 10. Persentase perempuan pernah kawin berusia 15-49 Tahun yang melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga Kesehatan 11. Persentase balita stunting 12. Persentase anak berusia 0-5 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif 13. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang konsumsi kalornya < 1400 kkal 14. Persentase anak berusia 0-17 Tahun yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak 15. Persentase Anak berusia 0-17 Tahun yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak 16. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang merokok 17. Persentase anak berusia 12-23 Bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap E. KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA 18. Persentase anak berusia 7-17 tahun yang tidak sekolah 19. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang mengunjungi peninggalan sejarah dan warisan budaya Indonesia 20. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang mengikuti kursus (selain bimbingan belajar) 21. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang masih bersekolah yang pernah mengikuti ekstrakurikuler 22. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang terlibat dalam pertunjukan seni E. KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS 23. Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja 24. Rasio anak berusia 5-17 tahun (disabilitas/non disabilitas) yang pernah mengakses internet 25. Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak berusia I7-17 Tahun (disabilitas/non disabilitas) 26. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan 27. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang terlantar
Interpretasi	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPHA) menghitung capaian yang menggambarkan kondisi anak yang membutuhkan perlindungan khusus seperti anak penyandang disabilitas, pekerja anak dan anak terlantar baik secara nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
Definisi	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya mewujudkan Keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Keluarga Berkualitas adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. (UU NO.52/2009 dan Peraturan BKKBN Nomor 3 Tahun 2022)
Rumus Perhitungan	Pengukuran iBangga dilakukan oleh BKKBN meliputi dimensi: a. Ketenteraman; b. Kemandirian; dan c. Kebahagiaan.

	• Dimensi Ketenteraman terdiri atas indikator : e. kegiatan ibadah; f. legalitas Keluarga; g. jaminan kesehatan; h. keharmonisan Keluarga. • Dimensi Kemandirian terdiri atas indikator : f. pemenuhan kebutuhan dasar; g. jaminan keuangan; h. keberlangsungan pendidikan; i. kesehatan Keluarga; j. akses media online/daring. • Dimensi Kebahagiaan terdiri atas indikator : c. interaksi Keluarga; d. interaksi sosial.
Interpretasi	Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kriteria sebagai berikut : • Nilai iBangga < 40 : kurang baik (rentan) • Nilai iBangga 40 – 70 : cukup baik (berkembang) • Nilai iBangga > 70 : baik (tangguh)
Sumber Data	BKKBN
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Ketimpangan Gender
Definisi	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.
Rumus Perhitungan	Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut: • Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki$G_p = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}\right)^{\frac{1}{2}} \times (PR_p \times SE_p)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_p}$$G_L = \sqrt[3]{1 \times (PR_L \times SE_L)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_L}$ • Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks lakilaki dengan rata-rata harmonic$HARM(G_p, G_L) = \left[\frac{(G_p)^{-1} + (G_L)^{-1}}{2} \right]^{-1}$ • Menghitung indeks masing – masing dimensi$IKR = \frac{\left(\sqrt{\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}} + 1 \right)}{2}$$IPK = \frac{TPAK_p + TPAK_L}{2}$$IP = \frac{\left(\sqrt{PR_p \times SE_p} + \sqrt{PR_L \times SE_L} \right)}{2}$

	- Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometric$G_{P,L} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$ - Menghitung Indeks Kesetaraan Gender$\text{Indeks Kesetaraan Gender} = \frac{HARM(G_P, G_L)}{G_{P,L}}$ - Menghitung Indeks Ketimpangan Gender$IKG = 1 - \frac{HARM(G_P, G_L)}{G_{P,L}}$ Keterangan : G_P : Indeks Perempuan G_L : Indeks Laki-laki MTF : Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas Kesehatan MHPK20 : Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun PR_P : Persentase perempuan di legislative PR_L : Persentase laki-laki di legislative SE_P : Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas SE_L : Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas $TPAK_P$: Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja $TPAK_L$: Persentase angkata kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja $HARM(G_P, G_L)$: Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonic IKR : Indeks dimensi kesehatan reproduksi IP : Indeks dimensi pemberdayaan IPK : Indeks dimensi pasar tenaga kerja G_{PL} : Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometric IKG : Indeks Ketimpangan Gender
Interpretasi	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) bernilai antara 0 dan 1. Semakin kecil nilainya maka tingkat ketimpangan gender di suatu wilayah akan semakin setara dan sebaliknya.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, dan Sekretaris Dewan (Sekwan)
Frekuensi	Tahunan

III. Aspek Daya Saing Daerah

Nama Indikator	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
Definisi	Tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk
Rumus Perhitungan	$\text{Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja} = \frac{PDRB\ ADHK}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}} \times 100 \%$ (Permendagri No. 18/2020)
Interpretasi	- Sebagai gambaran kemampuan tenaga kerja nasional dan daerah dalam menghasilkan barang dan jasa, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke level yang tinggi. - Tingkat produktivitas tenaga kerja merupakan rasio antara jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK dengan total penduduk yang bekerja. - Semakin tinggi nilai aktual Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja semakin baik kualitas pembangunan ketenagakerjaan
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)
Definisi	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB.
Rumus Perhitungan	$\text{Kontribusi PDRB Industri Pengolahan} = \frac{X}{Y} \times 100\%$ Keterangan : X = Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan Y = Nilai Total PDRB ADHB
Interpretasi	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap nilai PDRB ADHB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor Industri Pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB Daerah, ceteris paribus.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)
Definisi	Rasio PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum adalah persen bagian PDRB daerah yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi penyediaan akomodasi bagi wisatawan dan penyediaan jasa makan dan minum.
Rumus Perhitungan	$\text{Rasio PDRB Akomodasi Makan Minum} = \frac{x_n}{y_n} \times 100\%$ Keterangan: Xn = Nilai Tambah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Yn = Total PDRB ADHB Daerah
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB Daerah, ceteris paribus.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu orang)
Definisi	Jumlah tamu wisatawan mancanegara yang menginap di hotel berbintang di Kota Sawahlunto
Rumus Perhitungan	<i>Data jumlah tamu wisatawan mancanegara (di setiap Hotel berbintang daerah tertentu dalam periode 1 (satu) tahun</i>
Interpretasi	Semakin banyak jumlah tamu mancanegara yang menginap di hotel berbintang di Kota Sawahlunto maka akan semakin meningkatkan devisa dari sektor pariwisata.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik; Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi (%)
Definisi	PDRB pada definisi BPS merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada satu daerah. Dengan demikian, Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persen bagian PDRB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas ekonomi kreatif dari 17 subsektor yang termasuk: 1. Fesyen 2. Kuliner 3. Kriya 4. Film, Animasi dan Video 5. Pengembang Permainan

	6. Aplikasi 7. Musik 8. Seni Pertunjukan 94 9. Fotografi 10. Desain Komunikasi Visual 11. Televisi dan Radio 12. Seni Rupa 13. Desain Produk 14. Periklanan 15. Penerbitan 16. Arsitektur 17. Desain Interior Untuk tingkat kabupaten/kota disepakati bahwa PDRB Ekonomi Kreatif meliputi lapangan usaha Jasa Lainnya.
Rumus Perhitungan	$\text{Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif} = \frac{EK}{TQ} \times 100\%$ Keterangan: EK = PDRB Ekonomi Kreatif Kota Sawahlunto TQ = PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh subsektor ekonomi kreatif, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB provinsi, ceteris paribus. Namun dalam penerjemahannya ke depan, perlu diperhatikan nilai rupiah dari PDRB subsektor ekonomi kreatif untuk menghindari misinterpretasi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian (%)
Definisi	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah non pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama.
Rumus Perhitungan	$\text{Proporsi UKM} = \frac{\text{Jumlah unit UKM Non Pertanian}}{\text{Total Jumlah Unit Usaha}} \times 100\%$
Interpretasi	Usaha kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari UMKM yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi UKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi usaha mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Sumber Data	Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM BPS
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)
Definisi	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap seluruh unit industri pada tahun yang sama.
Rumus Perhitungan	$\text{Proporsi IKM} = \frac{\text{Jumlah Unit Industri Kecil dan Menengah}}{\text{Total Jumlah Unit Industri}} \times 100\%$
Interpretasi	Industri kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari industri mikro, kecil dan menengah yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi IKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi industri mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Rasio Kewirausahaan Daerah
Definisi	Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
Rumus Perhitungan	Rasio Kewirausahaan Daerah $= \frac{\text{Berusaha dibantu buruh tetap daerah}}{\text{Total angkatan kerja daerah}} \times 100\%$
Interpretasi	Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)
Definisi	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.
Rumus Perhitungan	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB $= \frac{\text{Volume usaha koperasi daerah}}{\text{PDRB ADHB}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Return on Asset (ROA) BUMD
Definisi	Return On Asset (ROA) adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Return On Asset (ROA) dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan.
Rumus Perhitungan	$\text{Return on Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$
Interpretasi	Return On Asset (ROA) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Dengan demikian, data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang

	pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan.
Sumber Data	LKPD, BPS, Laporan keuangan BUMD
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)
Definisi	Tenaga Kerja Formal adalah tenaga kerja yang dengan status pekerjaan utama termasuk dalam pekerja dengan kategori berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, dan buruh/karyawan/pegawai.
Rumus Perhitungan	$\text{Tenaga Kerja Formal} = \left(\frac{\sum_{i=3}^4 y_i}{\sum_{i=1}^7 y_i} \right) \times 100\%; i = 1,2,3,\dots,7$ Keterangan : Tenaga Kerja Formal y_i 1 2 3 4 5 6 7 = Proporsi penciptaan lapangan kerja formal = Jumlah pekerja dari status pekerjaan utama ke-i = Berusaha sendiri = Berusaha dibantu buruh tidak tetap = Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar = Buruh/karyawan/pegawai = Pekerja bebas di pertanian = Pekerja bebas di nonpertanian = Pekerja keluarga/tak dibayar
Interpretasi	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal dengan satuan nilai dalam bentuk persentase menunjukkan seberapa dominan pekerja dengan status pekerjaan utama yang termasuk dalam pekerja formal sesuai dengan ketentuan nasional yang berlaku. Semakin tinggi nilai persentasenya, maka semakin dominan kekuatan ekonomi nasional dalam menciptakan lapangan kerja formal.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)
Definisi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas.
Rumus Perhitungan	$TPAKp = \frac{PAKp}{P(15 + p)} \times 100\%$ Keterangan : TPAKp = Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%) PAKp = Jumlah angkatan kerja perempuan (orang) P(15+p) = Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas (orang)
Interpretasi	TPAK menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja (<i>labor supply</i>) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Pembagian berdasarkan jenis kelamin (perempuan) menunjukkan ukuran dan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja. Kegunaan indikator ini antara lain untuk memproyeksikan pasokan tenaga kerja, menetapkan kebijakan tenaga kerja, merancang kebijakan perawatan, menentukan kebutuhan pelatihan, dan merencanakan pembiayaan sistem perlindungan sosial.

Sumber Data	Badan Pusat Statistik Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	2 kali per Tahun

Nama Indikator	Indeks Inovasi Daerah
Definisi	Himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Rumus Perhitungan	$\text{Indeks Inovasi Daerah} = \frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor total maksimum} \times 100}$
Interpretasi	Indeks inovasi daerah dapat dijadikan ukuran yang menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi yang dimilikinya guna tercapainya kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan berdaya saing
Sumber Data	Kementerian Dalam Negeri
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)
Definisi	Proporsi Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap Total PDRB ADHB Kota Sawahlunto.
Rumus Perhitungan	$Ag (\%) = \frac{Ag}{TQ} \times 100\%$ Keterangan : Ag (%) = Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Ag = Nilai PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan TQ = Total PDRB ADHB
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, semakin tinggi rasionya terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kota Sawahlunto, ceteris paribus.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja Pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan (Juta/orang)
Definisi	Tingkat kemampuan tenaga kerja pada lapangan usaha sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan dalam menghasilkan produk.
Rumus Perhitungan	$\text{Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Ag)} = \frac{\text{PDRB(Ag) ADHK}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja (Ag)}} \times 100 \%$
Interpretasi	Semakin tinggi Produktivitas Tenaga Kerja sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan, semakin baik kualitas pembangunan sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Masyarakat Digital Indonesia
Definisi	Indeks Masyarakat Digital Indonesia merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya.

Rumus Perhitungan	Pengukuran IMDI bersumber dari data primer dan berbagai data sekunder. Data primer diperoleh melalui survei kepada responden individu dan responden perusahaan Indonesia dengan skala 1-100. IMDI terdiri dari empat pilar penyusun, yaitu : • Infrastruktur dan Ekosistem; • Keterampilan Digital; • Pemberdayaan; • Pekerjaan
Interpretasi	IMDI dapat menjadi acuan dalam perencanaan kebijakan dan program pengembangan SDM digital di Indonesia karena nilai IMDI dapat menjadi basis pengukuran tingkat kompetensi digital masyarakat Indonesia hingga tingkat kabupaten dan kota. Hasil pengukuran indeks dapat dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan fokus target berdasarkan indikator-indikator di setiap pilar, mendorong koordinasi yang lebih baik antar pemangku kepentingan, serta menjadi acuan bagi setiap pemangku kepentingan di level kabupaten/kota maupun provinsi di Indonesia untuk merencanakan dan menetapkan program prioritas pembangunan SDM digital di wilayah masing-masing.
Sumber Data	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase stabilitas harga dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok
Definisi	Persentase stabilitas harga dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok adalah perbandingan standar deviasi harga rata-rata selama bulan Januari sampai Desember dengan rata-rata harga barang kebutuhan pokok selama bulan Januari sampai Desember yang dinyatakan dalam persentase (Permendagri No.18/2020). Barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat (Permen Perdagangan RI No. 22 Tahun 2021). Jenis barang kebutuhan pokok menurut Perpres No.59 Tahun 2020 adalah: 1. Barang kebutuhan pokok hasil pertanian: - Beras - Kedele bahan baku tahu dan tempe - Cabe - Bawang merah 2. Barang kebutuhan pokok hasil industri: - Gula - Minyak goreng - Tepung terigu 3. Barang kebutuhan pokok hasil peternakan & perikanan: - Daging sapi - Daging ayam ras - Telur ayam ras - Ikan segar (bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang
Rumus Perhitungan	$KVpt = \frac{Sn}{P} \times 100 \%$ KVpt = Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu Sn = Standar deviasi harga rata-rata selama bulan Januari sampai Desember P = rata-rata harga barang kebutuhan pokok selama bulan Januari sampai Desember (Permendagri No.18/2020)

	Perhitungan koefisien variasi harga dilakukan dengan langkah-langkah : 1. menghitung rata-rata harga setahun per komoditas; 2. menghitung standar deviasi untuk data komoditas; 3. menghitung koefisien variasi dengan cara membagi standar deviasi tiap komoditas terhadap rata-rata harga per komoditas; 4. menghitung realisasi koefisien variasi per tahun didapatkan dengan cara menghitung rata-rata koefisien variasi seluruh komoditas.
Interpretasi	Semakin kecil persentase stabilitas harga dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu) menunjukkan bahwa harga barang kebutuhan pokok selama satu tahun tersebut berada dalam keadaan stabil. Target Persentase stabilitas harga dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu) tahun 2020-2024 berada pada kisaran 5,9 % – 6 % (Permen Perdagangan Republik Indonesia No.46 Tahun 2020),
Sumber Data	Disperindagkop
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)
Definisi	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PDRB Daerah.
Rumus Perhitungan	$\text{Pembentukan Modal Tetap Bruto (\% PDRB)} = \frac{\text{PMTB Kota Sawahlunto}}{\text{PDRB ADHK Kota Sawahlunto}} \times 100\%$ Keterangan : PMTB = Nilai PMTB berdasarkan PDRB Sisi Pengeluaran (Milliar Rupiah) PDRB ADHK = Total Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Milliar Rupiah)
Interpretasi	Semakin tinggi Pembentukan Modal tetap Bruto (% PDRB), semakin besar peranan atau kontribusi komponen PMTB terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)
Definisi	Ekspor barang dan jasa (% PDRB) merupakan share ekspor barang dan jasa terhadap PDRB Kota Sawahlunto Ekspor Barang dan Jasa didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/ pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri). Ekspor-Import ke dan dari suatu wilayah Kota Sawahlunto terdiri dari: • Ekspor ke luar provinsi/Kota Sawahlunto • Import dari luar provinsi/Kota Sawahlunto

Rumus Perhitungan	$\text{Ekspor barang dan jasa (\% PDRB)} = \frac{\text{Ekspor barang dan jasa ADHK}}{\text{PDRB ADHK}} \times 100\%$ Keterangan : Ekspor Barang = Nilai PMTB berdasarkan PDRB Sisi dan Jasa Pengeluaran (Milliar Rupiah) PDRB ADHK = Total Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Milliar Rupiah)
Interpretasi	Semakin tinggi Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB), semakin besar peranan atau kontribusi komponen Ekspor Barang dan Jasa terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Proporsi Kontribusi PDRB Kota (%)
Definisi	Proporsi kontribusi PDRB Kota merupakan share PDRB ADHB Kota Sawahlunto terhadap PDRB ADHB Provinsi Sumatera Barat.
Rumus Perhitungan	$\text{Proporsi Kontribusi PDRB Kota} = \frac{\text{PDRB ADHB Kota Sawahlunto}}{\text{PDRB ADHB Provinsi Sumatera Barat}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi proporsi kontribusi PDRB Kota, semakin besar peranan atau kontribusi Kota Sawahlunto terhadap ekonomi Provinsi Sumatera Barat.
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau (%)
Definisi	Maka rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi: • Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; • Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut : • Ketahanan bangunan (durable housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat; • Kecukupan luas tempat tinggal (<i>sufficient living space</i>) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2 \text{ m}^2$; • Memiliki akses air minum layak; • Memiliki akses sanitasi layak.
Rumus Perhitungan	• Bagi kabupaten/kota yang telah menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh menggunakan rumus sebagai berikut: Persentase Rumah Tangga yang mengakses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan Persentase Rumah Tangga yang mengakses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan $PHLTB = \frac{JRTHLTB}{JRT \times 100}$

	PHLTB : Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan JRTHLTB : jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan JRT : Jumlah rumah tangga • Bagi kabupaten/kota yang belum menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh maka dapat menggunakan 108 indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak). $PHLTB(\text{proksi}) = \frac{JRTHLTB(\text{proksi})}{JRT \times 100}$ PHLTB (proksi) : Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan JRTHLTB (proksi) : jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan JRT : Jumlah rumah tangga Segregasi pengolahan data ini dapat digunakan untuk tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, perkotaanperdesaan, dan desil pengeluaran.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan.
Sumber Data	• Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS • Data Kementerian PUPR (untuk mengetahui status pelaksanaan PBG dan SLF di Kabupaten/Kota)
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Desa Mandiri (%)
Definisi	Desa Mandiri (Desa Sembada) adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
Rumus Perhitungan	Persentase Desa Mandiri (%) $= \frac{\text{Jumlah Desa Mandiri di Kota Sawahlunto}}{\text{Total Jumlah Desa di Kota Sawahlunto}} \times 100 \%$
Interpretasi	Klasifikasi Status Desa berdasarkan ambang batas Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai berikut : • Mandiri (IDM > 0,815) Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik. • Maju (IDM > 0,707 dan ≤ 0,815) Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah baik. • Berkembang (IDM > 0,599 dan ≤ 0,707) Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah cukup baik. • Tertinggal (IDM > 0,491 dan ≤ 0,599) Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih terbatas. • Sangat Tertinggal (IDM ≤ 0,491)

	Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih sangat terbatas.
Sumber Data	Kementerian Desa PDTT
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB (%)
Definisi	- Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. - PDRB adalah Penjumlahan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu regional/negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen, di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode penghitungan. - Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah.
Rumus Perhitungan	$RPDRB(t) = \frac{\text{Penerimaan Pajak Daerah}(t)}{PDRB(t)} \times 100 \%$ Keterangan : $RPDRB_t$ = Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) pada tahun t.
Interpretasi	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa Semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah.
Sumber Data	BPS, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB
Definisi	Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh Bank. Produk simpanan yang ditawarkan bank kepada pihak ke tiga ini antara lain : simpanan giro, tabungan, deposito dan simpanan deposito. Simpanan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, saran perintah lainnya, atau pemindah bukuan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat yang telah disepakati dimana nasabah bertindak sebagai penitip dana dan bank sebagai penerima titipan dana. Deposito merupakan jenis simpanan uang yang penarikannya dapat dilakukan dalam jangka waktu yang telah dijanjikan antara bank dan nasabah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan

	nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) adalah persentase rasio total dana pihak ketiga perbankan di suatu daerah terhadap PDRB daerah tersebut pada suatu waktu tertentu. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) menggambarkan tingkat besaran perbandingan DPK perbankan suatu daerah terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian daerahnya. Nilai Total DPK/PDRB menggambarkan tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah, dimana peningkatan angka rasio Total DPK/PDRB (%), menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah.
Rumus Perhitungan	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) = $\frac{\text{Total Dana Pihak Ketiga}}{\text{PDRB}} \times 100 \%$ Keterangan : Total Dana Pihak Ketiga (DPK) : Total DPK Bank Umum + Total DPK BPR-BPRS (di suatu daerah) PDRB : Produk Domestik Regional Bruto (atas dasar harga berlaku)
Interpretasi	Semakin tinggi rasio total dana pihak ketiga terhadap PDRB menunjukkan semakin meningkat jumlah simpanan masyarakat
Sumber Data	Total Dana Pihak Ketiga (Otoritas Jasa Keuangan (OJK)) PDRB (Badan Pusat Statistik (BPS))
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Kabupaten/Kota (Rupiah)
Definisi	Nilai transaksi saham per kapita adalah total nilai transaksi saham yang dilakukan oleh investor berdasarkan domisili (daerah/Provinsi/Kabupaten/Kota) selama setahun dibagi dengan jumlah penduduk daerah tersebut (Provinsi/Kabupaten/Kota). Total nilai transaksi saham merupakan hasil dari volume atau jumlah saham yang ditransaksikan dikali dengan harga saham.
Rumus Perhitungan	Nilai transaksi saham/kapita $= \frac{\text{Nilai transaksi saham per daerah selama setahun}}{\text{Jumlah penduduk per daerah}}$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai transaksi saham per kapita menunjukkan partisipasi masyarakat yang masuk dalam pasar modal meningkat, dengan kata lain ukuran atau likuiditas di pasar modal meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan kapitalisasi pasar modal.
Sumber Data	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Total Kredit/PDRB
Definisi	Total Kredit adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di lingkup daerah. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu regional/wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.

	Total Kredit/PDRB (%) menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di suatu daerah terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) daerah tersebut pada suatu waktu tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Total Kredit/PDRB (\%)} = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{PDRB}} \times 100 \%$ Keterangan : Total Kredit : Total penyaluran kredit Bank Umum + Total penyaluran kredit BPR-BPRS di lingkup daerah) PDRB : Produk Domestik Regional Bruto (atas dasar harga berlaku)
Interpretasi	Total Kredit/PDRB (%) menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di lingkup daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai Total Kredit/PDRB (%) menunjukkan semakin berfungsinya perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha-usaha dalam perekonomian lingkup daerah tersebut.
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)
Definisi	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%) adalah persen bagian PDRB Daerah yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait Jasa Keuangan.
Rumus Perhitungan	$\text{Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (\%)} = \frac{\text{Nilai Tambah Sektor Jasa Keuangan}}{\text{Total PDRB ADHB}} \times 100 \%$
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait Jasa Keuangan, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB Daerah, ceteris paribus..
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

IV. Aspek Pelayanan Umum

Nama Indikator	Indeks Reformasi Hukum																																				
Definisi	Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. <table><tr><th colspan="4">Indeks Reformasi Hukum</th></tr><tr><th>No</th><th>Kategori</th><th>Nilai/Angka</th><th>Prediket</th></tr><tr><td>1</td><td>AA</td><td>> 90 - 100</td><td>Istimewa</td></tr><tr><td>2</td><td>A</td><td>> 80 - 90</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>BB</td><td>> 70 - 80</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>B</td><td>> 60 - 70</td><td>Cukup Baik</td></tr><tr><td>5</td><td>CC</td><td>> 50 - 60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>6</td><td>C</td><td>> 30 - 50</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>7</td><td>D</td><td>0 - 30</td><td>Sangat Buruk</td></tr></table> Pada penghitungan IRH, Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri (<i>self-assesment</i>) yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri. Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan verifikasi terhadap <i>self-assesment</i> tersebut dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penilaian.	Indeks Reformasi Hukum				No	Kategori	Nilai/Angka	Prediket	1	AA	> 90 - 100	Istimewa	2	A	> 80 - 90	Sangat Baik	3	BB	> 70 - 80	Baik	4	B	> 60 - 70	Cukup Baik	5	CC	> 50 - 60	Cukup	6	C	> 30 - 50	Buruk	7	D	0 - 30	Sangat Buruk
Indeks Reformasi Hukum																																					
No	Kategori	Nilai/Angka	Prediket																																		
1	AA	> 90 - 100	Istimewa																																		
2	A	> 80 - 90	Sangat Baik																																		
3	BB	> 70 - 80	Baik																																		
4	B	> 60 - 70	Cukup Baik																																		
5	CC	> 50 - 60	Cukup																																		
6	C	> 30 - 50	Buruk																																		
7	D	0 - 30	Sangat Buruk																																		

Interpretasi	Semakin tinggi nilai IRH, maka semakin berhasil pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum oleh lembaga yang bersangkutan.
Sumber Data	Kementerian Hukum dan HAM
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Definisi	SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.
Rumus Perhitungan	Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut : $\text{Indeks Domain (i)} = \frac{1}{BD} \sum_{j=m}^n N A_{ij} \times B A_{ij}$ Keterangan: NDj = nilai indeks domain ke-j BDj = nilai bobot domain ke j
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks domain dan bobot domain maka akan semakin besar pula nilai indeks SPBE yang dihasilkan.
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Pelayanan Publik
Definisi	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.
Rumus Perhitungan	Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik. - Menentukan nilai untuk setiap indikator$\text{nilai per indikator} = \frac{\text{nilai F01} + \text{nilai F02} + \text{nilai F03}}{3} \times \text{bobot per indikator}$ - Menentukan nilai setiap aspek$\text{nilai per aspek} = \sum \text{nilai per indikator}$ - Menentukan indeks $\text{nilai indeks} = \sum (\text{nilai aspek}_n \times \text{bobot aspek}_n)$
Interpretasi	Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Prinsip-prinsip tersebut adalah: - Keadilan (<i>Fairness</i>); - Partisipasi (<i>Participation</i>);

	9. Akuntabilitas (<i>Accountability</i>); 10. Transparansi (<i>transparency</i>); 11. Berdayaguna (<i>useful</i>); 12. Aksesibilitas (<i>accessibility</i>) Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indikator dihasilkan melalui persilangan antara prinsip dan aspek yang dijadikan dasar penilaian. Berdasarkan persilangan tersebut diperoleh 37 indikator 111 penilaian yang diisi melalui Formulir F01 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), Formulir F02 (Evaluator) dan Formulir F03 (Pegguna Layanan). Perhitungan Indeks Pelayanan Publik dikategorikan menjadi: <table><tr><th>Range Nilai</th><th>Kategori</th><th>Makna</th></tr><tr><td>0 – 1,00</td><td>F</td><td>Gagal</td></tr><tr><td>1,01 – 1,50</td><td>E</td><td>Sangat Buruk</td></tr><tr><td>1,51 – 2,00</td><td>D</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>2,01 – 2,50</td><td>C-</td><td>Cukup (Dengan Catatan)</td></tr><tr><td>2,51 – 3,00</td><td>C</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>3,01 – 3,50</td><td>B-</td><td>Baik (Dengan Catatan)</td></tr><tr><td>3,51 – 4,00</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4,01 – 4,50</td><td>A-</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>4,51 – 5,00</td><td>A</td><td>Pelayanan Prima</td></tr></table>	Range Nilai	Kategori	Makna	0 – 1,00	F	Gagal	1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk	1,51 – 2,00	D	Buruk	2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)	2,51 – 3,00	C	Cukup	3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)	3,51 – 4,00	B	Baik	4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik	4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima
Range Nilai	Kategori	Makna																													
0 – 1,00	F	Gagal																													
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk																													
1,51 – 2,00	D	Buruk																													
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)																													
2,51 – 3,00	C	Cukup																													
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)																													
3,51 – 4,00	B	Baik																													
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik																													
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima																													
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.																														
Frekuensi	Tahunan																														

Nama Indikator	Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK (Nilai)
Definisi	Survey Penilaian Integritas (SPI) adalah indeks yang diukur dengan survei masyarakat yang dibangun untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/PD)
Rumus Perhitungan	Penilaian Internal (0,305) + Penilaian Eksternal (0,328) + Penilaian Eksper (0,367) – Faktor Koreksi (0,2)
Interpretasi	Hasil dari Survey Penilaian Integritas (SPI) dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi di masing-masing K/L/PD sesuai karakteristik dan temuan pemetaan empiris
Sumber Data	Komisi Pemberantasan Korupsi
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)
Definisi	Gambaran tentang situasi dan kondisi korupsi pada unit kerja Persepsi atau penilaian masyarakat terhadap berbagai bentuk perilaku korupsi di masyarakat yang tercakup dalam tiga subdimensi yaitu subdimensi keluarga, subdimensi komunitas, dan subdimensi publik.
Rumus Perhitungan	1. Menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian 2. Mencari bobot rata-rata indikator 3. Mencari nilai indeks per unsur yang diperoleh dari rumus $1/10 \times$ bobot rata-rata tiap indikator. 4. Menghitung nilai indeks IPK dengan menjumlahkan seluruh indeks per unsur
Interpretasi	Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100. 1 = 25 - 43,75 : Tidak Bersih dari Korupsi 2 = 43,76 - 62,50 : Kurang Bersih dari Korupsi 3 = 62,51 - 81,25 : Cukup Bersih dari Korupsi 4 = 81,26 - 100,00 : Bersih dari Korupsi

Sumber Data	Komisi Pemberantasan Korupsi
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilu
Definisi	Kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, public policy. (Budiardjo, 2009)
Rumus Perhitungan	Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilu $= \frac{\text{Jumlah Pengguna Hak Pilih}}{\text{Jumlah Daftar Pemilih Tetap}} \times 100 \%$
Interpretasi	Semakin tinggi Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilu, semakin demokratis negara tersebut. Tingginya partisipasi pemilih dapat dibaca sebagai penerimaan masyarakat atas penerapan sistem demokrasi di suatu Negara dan harapan bagi terwujudnya kemajuan Negara. Sementara rendahnya partisipasi pemilih dapat menunjukkan bentuk ketidakpercayaan serta perilaku apatis masyarakat terhadap proses politik serta kehidupan bernegara.
Sumber Data	KPU Kota Sawahlunto
Frekuensi	Lima Tahunan

Nama Indikator	Angka Kriminalitas
Definisi	Angka kriminalitas adalah jumlah kejahatan yang terjadi dalam satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun yang bersangkutan, dikalikan 10.000. Kriminalitas adalah tindakan yang melanggar hukum, undang-undang, norma, dan nilai yang berlaku di masyarakat
Rumus Perhitungan	Angka Kriminalitas $= \frac{\text{Jumlah Tindak Kriminal dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 10.000$ (Permendagri 86/2017)
Interpretasi	Semakin tinggi angka kriminalitas berarti semakin rendah tingkat keamanan di suatu wilayah.
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Pelanggaran Peraturan Daerah
Definisi	Perbuatan yang bersifat melawan, melanggar dan menyimpang terhadap Peraturan Daerah yang dilakukan oleh seseorang atas dasar kesadaran.
Rumus Perhitungan	Mengidentifikasi seberapa banyak orang yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah yang dimasukkan ke dalam laporan Pelanggaran.
Interpretasi	Peraturan Daerah adalah peraturan perundangan-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah dapat mengatur berbagai hal, seperti : pajak dan retribusi daerah, kebersihan dan ketertiban umum, Administrasi Kependudukan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan lain-lain.
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kota Sawahlunto
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Kerjasama Wajib yang Dilaksanakan
Definisi	Kerja Sama Wajib merupakan kerja sama antar daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efesien jika dikelola bersama.

Rumus Perhitungan	$\% \text{ kerjasama wajib yang dilaksanakan} = \frac{\text{jumlah kerjasama yang dilaksanakan}}{\text{jumlah total kerjasama}} \times 100\%$
Interpretasi	Kerja sama meliputi : 1. Kesepakatan Bersama merupakan dokumen kerja sama antara suatu daerah dengan daerah lain yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum. 2. Perjanjian Kerja Sama yang merupakan dokumen kerja sama antara suatu daerah dengan daerah lain yang memuat hak dan kewajiban.
Sumber Data	Bagian Pemerintahan Setdako Sawahlunto
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan
Definisi	Indeks yang menunjukkan tingkat ketahanan nasional dari aspek pertahanan dan keamanan kondisi dinamik suatu bangsa meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya (Lemhannas RI, 2008).
Rumus Perhitungan	$\text{Indeks } G = \frac{\sum_{i=1}^k V_i G_i}{100}$ Keterangan : k = Banyaknya variabel dalam gatra G V_i = Bobot variabel G_i G_i = Sub indeks untuk variabel G_i
Interpretasi	Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, keberlangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya (Lemhanas, RI). Dalam prosesnya, pengukuran ketahanan nasional meliputi 3 dimensi, yaitu dimensi gatra, dimensi wilayah/spasial. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan merupakan salah satu pengukuran ketahanan nasional berdasarkan gatra. Dimensi gatra adalah pengukuran ketahanan nasional melalui pengukuran ketahanan masing-masing gatra, kemudian diintegrasikan menjadi ketahanan nasional. Berdasarkan dimensi ini ketahanan nasional adalah resultante dan agregasi menyeluruh dari ketahanan masing-masing gatra. Setiap gatra dirinci menjadi beberapa aspek, aspek dirinci menjadi beberapa variabel, dan variabel dirinci lagi menjadi beberapa indikator. Secara umum dinamika dari setiap variabel diukur dengan melihat dua indikator penting, yaitu - indikator kebijakan dan - indikator kinerja. Oleh karena itu dalam setiap variabel selalu ada indikator kebijakan dan indikator-indikator kinerja yang merupakan implikasi dari kebijakan tersebut. Setiap indikator dinilai berdasarkan parameter yang terukur. Ketahanan Pertahanan diartikan sebagai kemampuan menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan, menjaga kedaulatan

	negara serta mengatasi terjadinya Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATHG) dari dalam maupun luar. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan dengan kisaran 1 sampai 5 : - Indeks 1 menunjukkan kondisi rawan; - Indeks 2 menunjukkan kondisi kurang tangguh; - Indeks 3 menunjukkan kondisi cukup tangguh; - Indeks 4 menunjukkan kondisi tangguh; - Indeks 5 menunjukkan kondisi sangat tangguh.
Sumber Data	Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Definisi	Suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. (Permendagri No. 18/2020).
Rumus Perhitungan	$EPPD = [CKM + CKUP] \times 0.75 + [PKM] \times 0.25$ Keterangan : CKM = Capaian Kinerja Makro CKUP = Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan PKM = Perubahan Kinerja Makro
Interpretasi	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi : 6. Skor kinerja 1,00 – 1,80 dengan status kinerja Sangat Rendah; 7. Skor kinerja 1,81 – 2,60 dengan status kinerja Rendah; 8. Skor kinerja 2,61 – 3,40 dengan status kinerja Sedang; 9. Skor kinerja 3,41 – 4,20 dengan status kinerja Tinggi; 10. Skor kinerja 4,21 – 5,00 dengan status kinerja Sangat Tinggi.
Sumber Data	Kementerian Dalam Negeri
Frekuensi	Satu kali per tahun

4b. Metadata Indikator Kinerja Kunci

Urusan Pendidikan

Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk : a. Literasi membaca b. Numerasi
Definisi	Jumlah satuan pendidikan di daerah X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar 84 kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di daerah X. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: - Perlu intervensi khusus - Dasar - Cakap - Mahir Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.

Rumus Perhitungan	$\% \text{ Satdik min. SKM} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Satsdik min. SKM}}{n}$ Keterangan : Satsdik min.SK M = Satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca atau numerasi n = Jumlah satuan pendidikan
Interpretasi	Misal : Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Numerasi (%) tahun 2023 sebesar 44,44%. Artinya, terdapat 44,44 % satuan pendidikan di Kota Sawahlunto yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi (paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”).
Sumber Data	Asesmen Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Harapan Lama Sekolah (Tahun)
Definisi	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang.
Rumus Perhitungan	$HLS = FK \sum_{i=7}^k \left[\frac{Ei_i}{Pi} \right]$ Keterangan : Pi = Jumlah penduduk yang berusia 7 tahun ke atas di suatu wilayah pada tahun tertentu Ei = Jumlah penduduk yang berusia 7 tahun ke atas yang masih sekolah di suatu wilayah pada tahun tertentu i = Usia (7, 8, 9,.....,k) FK = Faktor koreksi pesantren
Interpretasi	Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Misal : HLS Kota Sawahlunto pada tahun 2023 sebesar 13,69 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal di Kota Sawahlunto pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,69 tahun atau setara dengan Diploma II.
Sumber Data	Susenas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)
Definisi	Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut : a. Tidak punya ijazah = 0 tahun b. SD = 6 tahun c. SMP = 9 tahun d. SMA = 12 tahun e. D1/D2 = 14 tahun f. D3 = 15 tahun g. D4 = 16 tahun h. S1 = 17 tahun

	i. S2 = 19 tahun j. S3 = 22 tahun Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini : 1. Tidak pernah sekolah = 0 tahun; 2. Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1; 3. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1; 4. Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir; 5. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir –1.
Rumus Perhitungan	$RLS\ 15+=\frac{1}{P15+}\sum_{i=1}^nXi$ Keterangan : P15+ = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas di suatu wilayah Xi = Lama sekolah penduduk ke- i
Interpretasi	Misal: RLS Kota Sawahlunto Tahun 2023 = 10,44 tahun, artinya secara rata-rata, penduduk Kota Sawahlunto yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 10,44 tahun atau telah menamatkan kelas X.
Sumber Data	Susenas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Urusan Kesehatan

Nama Indikator	Usia Harapan Hidup (UHH)(tahun)
Definisi	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada tahun tertentu.
Rumus Perhitungan	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian. yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program <i>Micro Computer Program for Demographic Analysis</i> (MCPDA) atau <i>Mortpack</i> .
Interpretasi	Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Keluarga Sehat
Definisi	IKS adalah alat yang komprehensif untuk menilai kualitas hidup keluarga dengan mengintegrasikan aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan.
Rumus Perhitungan	Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) telah menetapkan 12 Indikator Keluarga Sehat, yaitu : 1. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB) 2. Ibu melahirkan di fasilitas kesehatan 3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap 4. Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif 5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan 6. Pengidap TB Paru Mendapatkan Penanganan Sesuai Standar 7. Pengidap Hipertensi Harus Diobati secara Teratur 8. Seseorang dengan Gangguan Jiwa Diobati dan Tidak Ditelantarkan

	9. Anggota Keluarga Tidak Ada yang Merokok 10. Keluarga merupakan anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 11. Keluarga memiliki akses ke sarana air bersih 12. Keluarga memiliki akses atau menggunakan jamban bersih
Interpretasi	Kategori IKS • Keluarga Sehat : IKS > 0,8 (80%) • Keluarga Pra Sehat : IKS 0,5 <-> 0,8 (50% s/d 80%) • Keluarga Tidak Sehat : IKS < 0,5 (50%)
Sumber Data	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto
Frekuensi	Tahunan

Urusan Pekerjaan Umum

Nama Indikator	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)
Defenisi	Nilai indeks yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan infrastruktur publik yang disediakan oleh pemerintah, seperti jalan, jembatan, drainase, air bersih, sanitasi, fasilitas transportasi, dan lainnya.
Rumus Perhitungan	$IKLI = \left(\frac{\sum(\text{Nilai Jawaban Responden})}{\text{Jumlah Responden} \times \text{Skor Maksimal}} \right) \times 100$ Keterangan: • Nilai Jawaban Responden: Penilaian tiap responden terhadap pertanyaan terkait layanan infrastruktur, biasanya dengan skala likert (misalnya 1–4 atau 1–5). • Jumlah Responden: Total individu yang mengisi survei. • Skor Maksimal: Nilai tertinggi dalam skala likert (misalnya 4 atau 5). • Hasil IKLI: Disajikan dalam bentuk indeks (0–100) agar mudah dibandingkan antar wilayah atau tahun.
Interpretasi	Nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih baik terhadap layanan infrastruktur
Sumber Data	Survei pengguna, Dinas PUPR, Bappeda, atau lembaga independen
Frekuensi	Tahunan / 2 Tahunan

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Nama Indikator	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan (%)
Definisi	Maka rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi: • Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; • Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut : • Ketahanan bangunan (durable housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat;

	- Kecukupan luas tempat tinggal (<i>sufficient living space</i>) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2 \text{ m}^2$; - Memiliki akses air minum layak; - Memiliki akses sanitasi layak.
Rumus Perhitungan	- Bagi kabupaten/kota yang telah menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh menggunakan rumus sebagai berikut:$PHLTB = \frac{JRTHLTB}{JRT \times 100}$ PHLTB : Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan JRTHLTB : jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan JRT : Jumlah rumah tangga - Bagi kabupaten/kota yang belum menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh maka dapat menggunakan 108 indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak). $PHLTB(\text{proksi}) = \frac{JRTHLTB(\text{proksi})}{JRT \times 100}$ PHLTB (proksi) : Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan JRTHLTB (proksi) : jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan JRT : Jumlah rumah tangga Segregasi pengolahan data ini dapat digunakan untuk tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, perkotaanperdesaan, dan desil pengeluaran.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan.
Sumber Data	- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS - Data Kementerian PUPR (untuk mengetahui status pelaksanaan PBG dan SLF di Kabupaten/Kota)
Frekuensi	Tahunan

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Nama Indikator	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas
Defenisi	Indikator yang menggambarkan kinerja pemerintah dan aparat keamanan dalam menjaga ketertiban umum (trantib), ketentraman masyarakat (bum), dan perlindungan masyarakat (linmas).
Rumus Perhitungan	$\text{Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas} = \frac{\sum \text{Skor Kinerja Program Trantibumlinmas}}{\text{Jumlah Program Trantibumlinmas}} \times 100$ Keterangan: - Skor Kinerja Program Trantibumlinmas diukur berdasarkan penilaian terhadap sejumlah faktor, seperti tingkat partisipasi masyarakat dalam program keamanan, efektivitas patroli dan penegakan hukum, serta hasil survei kepuasan publik. - Jumlah Program Trantibumlinmas adalah jumlah program yang dievaluasi dalam pengukuran ini (misalnya program keamanan, kegiatan bimbingan sosial, pengawasan ketertiban umum, dll.)
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin efektif pelaksanaan kebijakan dan program yang berkaitan dengan trantibumlinmas
Sumber Data	Dinas Satpol PP, Kepolisian, Bappeda, Dinas Sosial, Polda, Instansi Pemerintah Daerah terkait
Frekuensi	Tahunan

Urusan Sosial

Nama Indikator	Indeks Kesejahteraan Sosial
Defenisi	Indikator komposit yang menggambarkan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat berdasarkan beberapa dimensi penting, seperti: pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan sosial, partisipasi sosial, ketahanan keluarga, dan akses terhadap layanan sosial dasar.
Rumus Perhitungan	$IKS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ Keterangan: IKS = Indeks Kesejahteraan Sosial X₁, X₂, ..., X_n = Skor masing-masing dimensi kesejahteraan sosial (sudah dinormalisasi dalam skala 0–100) n = Jumlah dimensi indikator
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi tingkat kesejahteraan sosial masyarakat di suatu wilayah
Sumber Data	Dinas Sosial, BPS, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kemensos
Frekuensi	Tahunan

Urusan Tenaga Kerja

Nama Indikator	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
Definisi	Tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk
Rumus Perhitungan	$\text{Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja} = \frac{\text{PDRB ADHK}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}} \times 100 \%$ (Permendagri No. 18/2020)
Interpretasi	4. Sebagai gambaran kemampuan tenaga kerja nasional dan daerah dalam menghasilkan barang dan jasa, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke level yang tinggi. 5. Tingkat produktivitas tenaga kerja merupakan rasio antara jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK dengan total penduduk yang bekerja. 6. Semakin tinggi nilai aktual Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja semakin baik kualitas pembangunan ketenagakerjaan
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Defenisi	Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan terhadap IPM laki-laki, yang digunakan untuk mengukur kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek dasar pembangunan manusia: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.
Rumus Perhitungan	$IPG = \left(\frac{\text{IPM Perempuan}}{\text{IPM Laki-laki}} \right) \times 100$ Atau jika menggunakan skala desimal: $IPG = \frac{\text{IPM Perempuan}}{\text{IPM Laki-laki}}$ Keterangan Rumus: - IPM Perempuan Indeks Pembangunan Manusia untuk penduduk perempuan, dihitung dari: - Angka harapan hidup perempuan - Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah perempuan - Pengeluaran riil per kapita perempuan - IPM Laki-laki

	• Sama seperti IPM perempuan, namun untuk penduduk laki-laki. • $\times 100$, Untuk menyajikan IPG dalam bentuk persentase (biasa digunakan oleh BPS).
Interpretasi	Semakin mendekati 100 atau 1.000, semakin kecil kesenjangan pembangunan gender
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PPPA
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Ketimpangan Gender
Definisi	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.
Rumus Perhitungan	Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki $G_p = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}\right)^{\frac{1}{2}} \times (PR_p \times SE_p)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_p}$$G_L = \sqrt[3]{1 \times (PR_L \times SE_L)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_L}$ 2. Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks lakilaki dengan rata-rata harmonic $HARM(G_p, G_L) = \left[\frac{(G_p)^{-1} + (G_L)^{-1}}{2} \right]^{-1}$ 3. Menghitung indeks masing – masing dimensi $IKR = \frac{\left(\sqrt{\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}} + 1 \right)}{2}$$IPK = \frac{TPAK_p + TPAK_L}{2}$$IP = \frac{\left(\sqrt{PR_p \times SE_p} + \sqrt{PR_L \times SE_L} \right)}{2}$ 4. Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometric $G_{p,L} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$ 5. Menghitung Indeks Kesetaraan Gender $Indeks\ Kesetaraan\ Gender = \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{p,L}}$ 6. Menghitung Indeks Ketimpangan Gender $IKG = 1 - \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{p,L}}$

	Keterangan : G_P : Indeks Perempuan G_L : Indeks Laki-laki MTF : Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas Kesehatan MHPK20 : Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun PR_P : Persentase perempuan di legislative PR_L : Persentase laki-laki di legislative SE_P : Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas SE_L : Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas $TPAK_P$: Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja $TPAK_L$: Persentase angkata kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja HARM (G_P, G_L) : Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonic IKR : Indeks dimensi kesehatan reproduksi IP : Indeks dimensi pemberdayaan IPK : Indeks dimensi pasar tenaga kerja G_{PL} : Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometric IKG : Indeks Ketimpangan Gender
Interpretasi	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) bernilai antara 0 dan 1. Semakin kecil nilainya maka tingkat ketimpangan gender di suatu wilayah akan semakin setara dan sebaliknya.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, dan Sekretaris Dewan (Sekwan)
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Perlindungan Anak
Definisi	Indikator yang menggambarkan pencapaian pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak meliputi hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, dan perlindungan khusus.
Rumus Perhitungan	$IPA = \sum 5j = 1 (Wj \times Indeks K_j)$ Menghitung angka indikator penyusun Indeks Perlindungan Anak (IPA) yang terdiri dari 5 klaster dengan 27 indikator: F. KLASSTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN 6. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran 2 7. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang pernah mengunjungi perpustakaan/ memanfaatkan taman bacaan masyarakat 8. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang pernah menggunakan internet 9. Persentase anak berusia 10-17 tahun yang pernah mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar 10. Persentase anak berusia 10-17 tahun yang ikut serta dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja atau sekolah

	G. KLASSTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF 5. Persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun 6. Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak 7. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang tidak tinggal bersama kedua orang tua 8. Angka kesiapan sekolah H. KLASSTER KESEHATAN 9. Persentase perempuan pernah kawin berusia 15-49 Tahun yang melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga Kesehatan 10. Persentase balita stunting 11. Persentase anak berusia 0-5 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif 12. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang konsumsi kalornya < 1400 kkal 13. Persentase anak berusia 0-17 Tahun yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak 14. Persentase Anak berusia 0-17 Tahun yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak 15. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang merokok 16. Persentase anak berusia 12-23 Bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap I. KLASSTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA 1. 6. Persentase anak berusia 7-17 tahun yang tidak sekolah 7. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang mengunjungi peninggalan sejarah dan warisan budaya Indonesia 8. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang mengikuti kursus (selain bimbingan belajar) 9. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang masih bersekolah yang pernah mengikuti ekstrakurikuler 10. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang terlibat dalam pertunjukan seni J. KLASSTER PERLINDUNGAN KHUSUS 6. Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja 7. Rasio anak berusia 5-17 tahun (disabilitas/non disabilitas) yang pernah mengakses internet 8. Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak berusia 7-17 Tahun (disabilitas/non disabilitas) 9. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan 10. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang telantar II. melakukan normalisasi indikator penyusun Indeks Perlindungan Anak (IPA) III. menghitung Indeks Perlindungan Anak (IPA)
Interpretasi	Semakin tinggi IPA, semakin terpenuhi hak Anak dan perlindungan khusus Anak di daerah tersebut
Sumber Data	BPS dan KemenPPPA
Frekuensi	Tahunan

Urusan Pangan	
Nama Indikator	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
Defenisi	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat ketahanan pangan suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota) berdasarkan tiga dimensi utama.
Rumus Perhitungan	$IKP = \frac{\sum (Skor Dimensi \times Bobot Dimensi)}{\sum Bobot}$ Atau jika bobot sama rata: $IKP = \frac{Skor Ketersediaan + Skor Akses + Skor Pemanfaatan}{3}$

	Keterangan Rumus: Tiga Dimensi Utama IKP: 1. Ketersediaan Pangan o Indikator: Produksi pangan lokal, cadangan pangan, luas panen, distribusi pangan. o Sumber: Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, BPS. 2. Akses Pangan o Indikator: Persentase penduduk miskin, harga pangan, aksesibilitas geografis, infrastruktur distribusi. o Sumber: BPS, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan. 3. Pemanfaatan Pangan o Indikator: Angka gizi buruk, stunting, ketersediaan air bersih dan sanitasi, pengetahuan gizi. o Sumber: Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BPS. Setiap dimensi memiliki skor 0–100 berdasarkan normalisasi indikator turunan.
Interpretasi	Nilai IKP semakin tinggi menunjukkan ketahanan pangan yang semakin baik
Sumber Data	Badan Pangan Nasional (Bapanas), BPS, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian
Frekuensi	Tahunan

Urusan Pertanahan

Nama Indikator	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan
Defenisi	Indikator yang menggambarkan tingkat keteraturan dan kelengkapan administrasi pertanahan dalam suatu wilayah.
Rumus Perhitungan	$\text{Indeks TAP} = \left(\frac{\sum_{i=1}^n (S_i \times B_i)}{\sum_{i=1}^n B_i} \right) \times 100$ Keterangan Rumus: S_i = Skor dari komponen administrasi pertanahan ke-i (misalnya: jumlah bidang tanah terdaftar, peta bidang digital, data pemilik, data penggunaan tanah, dll.) B_i = Bobot dari komponen administrasi pertanahan ke-i (berdasarkan pentingnya komponen terhadap keteraturan data pertanahan) n = Jumlah total komponen yang dinilai - Skor akhir dikalikan 100 untuk menghasilkan indeks dalam skala 0–100
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tertib dan lengkap administrasi pertanahan di wilayah tersebut.
Sumber Data	Kementerian ATR/BPN, Dinas Pertanahan Daerah, Sistem Informasi Pertanahan
Frekuensi	Tahunan atau sesuai pembaruan sistem administrasi pertanahan

Urusan Lingkungan Hidup

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Definisi	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).
Rumus Perhitungan	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKTL)$ IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Dinas PKP2LH Kota Sawahlunto)
Interpretasi	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) : - Sangat Baik : $90 \leq IKLH \leq 100$ - Baik : $70 \leq x < 90$ - Sedang : $50 \leq x < 70$ - Kurang : $25 \leq x < 50$ - Sangat Kurang : $0 \leq x < 25$

Sumber Data	Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara dan tutupan lahan, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
Frekuensi	Tahunan

Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota

Nama Indikator	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan
Defenisi	Ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh instansi penyelenggara administrasi kependudukan, seperti pelayanan KTP, KK, akta kelahiran, dan lainnya.
Rumus Perhitungan	$IKM = \left(\frac{\sum_{i=1}^n (Skor\ Unsur_i \times Bobot_i)}{n} \right) \times 25$ Keterangan Rumus: - Skor Unsur: Nilai persepsi masyarakat terhadap masing-masing unsur pelayanan (biasanya menggunakan skala 1–4 atau 1–5). - Bobot Unsur: Tingkat kepentingan relatif dari setiap unsur layanan (umumnya bobot sama jika tidak ditentukan berbeda). - n: Jumlah unsur pelayanan yang dinilai (umumnya terdiri dari 9 unsur seperti prosedur, waktu pelayanan, biaya, produk, kompetensi petugas, perilaku petugas, sarana prasarana, penanganan pengaduan, dan kepastian jadwal). - Dikalikan 25 agar hasilnya berada dalam rentang skala 0–100.
Interpretasi	Skor IKM digunakan sebagai dasar pembenahan dan peningkatan kualitas layanan adminduk.
Sumber Data	Survei Kepuasan Masyarakat, Dinas Dukcapil, Laporan Evaluasi Layanan Publik
Frekuensi	Semesteran atau Tahunan

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Nama Indikator	Indeks Desa Membangun (IDM)
Defenisi	IDM digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan di tingkat desa dan untuk menilai status kemajuan desa berdasarkan tiga dimensi utama : sosial, ekonomi, dan ekologi. Dimensi ini diterjemahkan dalam indikator yang mencakup akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga keberlanjutan lingkungan. Pengukuran pembangunan desa di Indonesia mengalami perubahan signifikan dari Indeks Desa Membangun (IDM) ke Indeks Desa (ID) mulai tahun 2025 berdasarkan Permendesa PDT Nomor 9 Tahun 2024. Perubahan tersebut mencakup : penyederhanaan nama, penghitungan dimensi, penambahan indikator, serta perubahan metode pengumpulan data. Perubahan ini juga menyentuh aspek metodologi, fokus pengukuran, dan implikasi kebijakan pembangunan desa. Indeks Desa (ID) menawarkan pendekatan yang lebih sederhana namun berupaya lebih komprehensif dalam menangkap dinamika pembangunan desa. Dalam pengukuran ID, terdapat enam komponen dimensi yang diukur yaitu: Dimensi Layanan Dasar, Dimensi Sosial, Dimensi Ekonoi, Dimensi Lingkungan, Dimensi Aksesibilitas dan Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa. Dalam penyusunan Indeks Desa (ID), 6 dimensi dibentuk oleh sejumlah 13 Sub Dimensi dan 48 indikator. Dalam pengukurannya, klasifikasi status kemajuan serta kemandirian desa antara IDM dan ID ditetapkan dengan ambang batas yang berbeda pula.

Nama Indikator	Indeks Desa Membangun (IDM)																		
Rumus Perhitungan	$IDM = \frac{\sum \text{Indikator Pembangunan Desa}}{\text{Jumlah Indikator}}$ Keterangan Rumus: - Indikator Pembangunan Desa: Merupakan ukuran atau variabel yang mencakup berbagai aspek pembangunan desa, seperti tingkat kemiskinan, akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Setiap indikator diberikan bobot yang mencerminkan pentingnya dalam pembangunan desa. - Jumlah Indikator: Jumlah total indikator atau variabel yang digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan desa. Setiap indikator memiliki skor atau nilai tertentu berdasarkan data yang dihimpun. - Hasil dihitung dalam skala 0 hingga 100, dengan nilai 100 menunjukkan desa yang sepenuhnya maju dalam semua aspek pembangunan yang diukur. Perbedaan klasifikasi status kemajuan dan kemandirian Desa berdasar IDM dan ID <table><tr><th>Klasifikasi Status Desa</th><th>IDM</th><th>ID</th></tr><tr><td>Desa Sangat Tertinggal</td><td>IDM < 0,4907</td><td>0% ≤ ID 48,48%</td></tr><tr><td>Desa Tertinggal</td><td>0,4907 < IDM ≤ 0,5989</td><td>49,49% ≤ ID ≤ 57,38%</td></tr><tr><td>Desa Berkembang</td><td>0,5989 < IDM ≤ 0,7072</td><td>57,39% ≤ ID ≤ 69,34%</td></tr><tr><td>Desa Maju</td><td>0,7072 < IDM ≤ 0,8155</td><td>69,35% ≤ ID ≤ 79,62%</td></tr><tr><td>Desa Mandiri</td><td>IDM > 0,8155</td><td>79,63% ≤ ID ≤ 100%</td></tr></table>	Klasifikasi Status Desa	IDM	ID	Desa Sangat Tertinggal	IDM < 0,4907	0% ≤ ID 48,48%	Desa Tertinggal	0,4907 < IDM ≤ 0,5989	49,49% ≤ ID ≤ 57,38%	Desa Berkembang	0,5989 < IDM ≤ 0,7072	57,39% ≤ ID ≤ 69,34%	Desa Maju	0,7072 < IDM ≤ 0,8155	69,35% ≤ ID ≤ 79,62%	Desa Mandiri	IDM > 0,8155	79,63% ≤ ID ≤ 100%
Klasifikasi Status Desa	IDM	ID																	
Desa Sangat Tertinggal	IDM < 0,4907	0% ≤ ID 48,48%																	
Desa Tertinggal	0,4907 < IDM ≤ 0,5989	49,49% ≤ ID ≤ 57,38%																	
Desa Berkembang	0,5989 < IDM ≤ 0,7072	57,39% ≤ ID ≤ 69,34%																	
Desa Maju	0,7072 < IDM ≤ 0,8155	69,35% ≤ ID ≤ 79,62%																	
Desa Mandiri	IDM > 0,8155	79,63% ≤ ID ≤ 100%																	
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IDM menunjukkan bahwa desa tersebut semakin maju dalam hal pembangunan, baik dari sisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur.																		
Sumber Data	Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), dan data terkait lainnya																		
Frekuensi	Tahunan																		

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
Definisi	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya mewujudkan Keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Keluarga Berkualitas adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. (UU NO.52/2009 dan Peraturan BKKBN Nomor 3 Tahun 2022)
Rumus Perhitungan	Pengukuran iBangga dilakukan oleh BKKBN meliputi dimensi: a. Ketenteraman; b. Kemandirian; dan c. Kebahagiaan. - Dimensi Ketenteraman terdiri atas indikator : a. kegiatan ibadah; b. legalitas Keluarga; c. jaminan kesehatan; d. keharmonisan Keluarga. - Dimensi Kemandirian terdiri atas indikator : a. pemenuhan kebutuhan dasar; b. jaminan keuangan;

	c. keberlangsungan pendidikan; d. kesehatan Keluarga; e. akses media online/daring. • Dimensi Kebahagiaan terdiri atas indikator : a. interaksi Keluarga; b. interaksi sosial.
Interpretasi	Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kriteria sebagai berikut : • Nilai iBangga < 40 : kurang baik (rentan) • Nilai iBangga 40 – 70 : cukup baik (berkembang) • Nilai iBangga > 70 : baik (tangguh)
Sumber Data	BKKBN
Frekuensi	Tahunan

Urusan Perhubungan

Nama Indikator	Rasio Konektivitas
Definisi	Indeks Rasio Konektivitas adalah ukuran yang menggambarkan tingkat keterhubungan atau aksesibilitas suatu wilayah atau entitas (misalnya rumah tangga, individu, bisnis, atau infrastruktur) terhadap jaringan atau layanan tertentu dibandingkan dengan total populasi atau jumlah entitas yang ada di wilayah tersebut.
Rumus Perhitungan	$JKA = \text{Jumlah Keluarga di BKB} \cup \text{BKR} \cup \text{BKL} \cup \text{UPPKA} \cup \text{PIK-R}$ Keterangan : Rasio Konektivitas bisa merujuk ke beberapa hal tergantung konteksnya (misalnya: jaringan, infrastruktur, sistem sosial, dll). Tapi secara umum, Rasio Konektivitas mengukur tingkat keterhubungan antar elemen dalam suatu sistem atau jaringan.
Interpretasi	Menggambarkan tingkat ketersediaan dan adopsi suatu jaringan atau layanan. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat konektivitas yang lebih baik.Dapat digunakan untuk mengidentifikasi disparitas konektivitas antar wilayah atau kelompok populasi. Penting untuk perencanaan pembangunan infrastruktur dan layanan.
Sumber Data	Survei Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh BPS
Frekuensi	Dilakukan dua kali setahun (semesteran) atau tahunan.

Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

Nama Indikator	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah
Definisi	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kemajuan dan kapabilitas pemerintah dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, kualitas layanan publik, dan tata kelola pemerintahan. Indeks ini mencerminkan sejauh mana pemerintah telah bertransformasi secara digital dalam berbagai aspek operasional dan pelayanannya, yang diukur melalui berbagai indikator yang dikelompokkan ke dalam pilar-pilar transformasi digital pemerintah yang telah ditetapkan.
Rumus Perhitungan	$\text{Indeks Pilar Pemerintah} = \frac{\sum \text{Skor Indikator}}{\text{Jumlah Indikator}} \times 100$ Keterangan : - Skor Indikator: nilai dari masing-masing indikator (biasanya dalam skala 0–1 atau 0–100). - Bobot: persentase atau proporsi pentingnya setiap indikator terhadap keseluruhan indeks. - Jumlah Indikator: total indikator yang digunakan dalam pilar pemerintah (misalnya: digitalisasi layanan publik, keterbukaan data, kapasitas SDM digital, keamanan sistem, dsb).

Interpretasi	Nilai indeks yang lebih tinggi menunjukkan tingkat transformasi digital yang lebih baik pada pilar tersebut. Perbandingan nilai indeks dari waktu ke waktu atau antar unit pemerintahan dapat memberikan wawasan tentang kemajuan dan disparitas.
Sumber Data	Kementerian/Lembaga terkait
Frekuensi	Tahunan

Urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Nama Indikator	Kontribusi UMKM terhadap PDRB
Definisi	Kontribusi UMKM terhadap PDRB adalah ukuran yang menggambarkan besarnya peran atau sumbangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi suatu wilayah (provinsi atau kabupaten/kota) selama periode waktu tertentu (biasanya satu tahun). Indeks ini dihitung sebagai persentase nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha yang termasuk dalam kategori UMKM.
Rumus Perhitungan	$\text{Kontribusi UMKM terhadap PDRB} = \left(\frac{\text{PDRB dari UMKM}}{\text{Total PDRB}} \right) \times 100\%$ Keterangan : • PDRB dari UMKM = total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh sektor UMKM di suatu wilayah. • Total PDRB = nilai tambah bruto dari seluruh kegiatan ekonomi di wilayah tersebut (termasuk usaha besar, pemerintah, investasi, dll).
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks, semakin besar kontribusi UMKM terhadap perekonomian regional. Indeks ini menunjukkan seberapa penting sektor UMKM dalam menciptakan nilai tambah dan menggerakkan ekonomi wilayah.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Tahunan

Urusan Penanaman Modal

Nama Indikator	Persentase Peningkatan Investasi
Definisi	Persentase Peningkatan Investasi adalah ukuran yang menggambarkan tingkat pertumbuhan atau kenaikan nilai investasi yang terealisasi dalam suatu wilayah (misalnya, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional) selama periode waktu tertentu (dibandingkan dengan periode waktu sebelumnya). Investasi yang dimaksud dapat mencakup berbagai jenis, seperti Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), baik dalam bentuk modal tetap bruto (pembangunan fisik) maupun investasi finansial. Indeks ini mencerminkan daya tarik investasi suatu wilayah dan pertumbuhan aktivitas ekonomi.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Peningkatan Investasi} = \frac{(\text{Nilai Investasi Akhir} - \text{Nilai Investasi Awal})}{\text{Nilai Investasi Awal}} \times 100\%$ Keterangan : • Nilai Investasi Akhir: Ini adalah nilai investasi pada periode waktu setelah terjadi peningkatan. • Nilai Investasi Awal: Ini adalah nilai investasi pada periode waktu sebelumnya atau nilai investasi mula-mula. • (Nilai Investasi Akhir-Nilai Investasi Awal): Selisih ini menunjukkan besarnya peningkatan nilai investasi. • 100%: Faktor pengali untuk mengubah rasio menjadi bentuk persentase.
Interpretasi	Nilai indeks positif menunjukkan peningkatan nilai investasi. Semakin tinggi nilai positif, semakin besar tingkat peningkatannya. Nilai indeks negatif menunjukkan penurunan nilai investasi. Nilai indeks nol menunjukkan tidak ada perubahan.

Sumber Data	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi/Kabupaten/Kota
Frekuensi	Tahunan

Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
Definisi	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan pemuda secara holistik di suatu wilayah dalam lima domain utama, yaitu: pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, kesempatan kerja dan kewirausahaan, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan inklusi. IPP menggambarkan sejauh mana pemuda memiliki akses terhadap sumber daya dan peluang yang mendukung pertumbuhan dan partisipasi aktif mereka dalam pembangunan nasional. IPP disusun dalam skala 0 sampai 100, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat pembangunan pemuda yang lebih baik.
Rumus Perhitungan	$\text{Indeks Domain} = \frac{\text{Skor Indikator 1} + \text{Skor Indikator 2} + \dots + \text{Skor Indikator ke-n}}{\text{Jumlah Indikator dalam Domain}}$ Keterangan : Metodologi dan rumus pasti dapat bervariasi dari waktu ke waktu dan mungkin tidak dipublikasikan secara detail.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IPP, semakin baik capaian pembangunan pemuda dalam berbagai aspek penting kehidupannya. IPP juga bisa digunakan untuk membandingkan kinerja pembangunan kepemudaan antar daerah atau antar waktu.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS), Kemendikbudristek
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Partisipasi Olahraga
Definisi	Indeks Partisipasi Olahraga (IPO) adalah indikator komposit yang menggambarkan tingkat keterlibatan penduduk dalam aktivitas olahraga dan/atau aktivitas fisik secara teratur dalam periode tertentu. IPO mencerminkan perilaku aktif masyarakat terhadap olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat dan produktif. Indeks ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program peningkatan budaya olahraga di masyarakat.
Rumus Perhitungan	$\text{Indeks Partisipasi} = \frac{\text{Jumlah Individu yang Berolahraga Minimal Frekuensi Tertentu}}{\text{Total Jumlah Populasi atau Sampel}} \times 100\%$ Keterangan : - Jumlah Individu yang Berolahraga Minimal Frekuensi Tertentu: Ini adalah jumlah orang yang melakukan aktivitas olahraga dengan frekuensi yang ditetapkan (misalnya, minimal 1 kali seminggu, 3 kali seminggu, dll.). - Total Jumlah Populasi atau Sampel: Ini adalah total jumlah orang dalam kelompok yang diukur.
Interpretasi	Dapat digunakan sebagai indikator penunjang kualitas hidup, kesehatan masyarakat, serta keberhasilan program promosi olahraga.
Sumber Data	BPS (Survei Sosial Ekonomi Nasional / Susenas), Kemenpora (Survei SKJ, Survei Partisipasi Olahraga Nasional)
Frekuensi	Setiap 2 Tahun (biennial)

Urusan Statistik

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
Definisi	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan pembangunan statistik pada Unit Pengelola Statistik (UPS) di kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan instansi lainnya.

	Indeks ini menilai aspek kelembagaan, sumber daya manusia, proses bisnis statistik, serta ketersediaan dan kualitas data statistik yang dikelola oleh UPS.
Rumus Perhitungan	$IPS\ UPS = \frac{\sum (Skor\ Komponen \times Bobot\ Komponen)}{\sum Bobot}$ Keterangan : ❖ Kelembagaan Statistik (Bobot 25%) ❖ Ketersediaan Unit Pengelola Data ❖ Penetapan SDM statistik ❖ SOP Pengelolaan Data ❖ Proses Bisnis Statistik (Bobot 25%) • Perencanaan dan Pengumpulan Data • Pengolahan dan Penyajian • Diseminasi dan Pemanfaatan Data
Interpretasi	IPS dapat digunakan untuk Mengidentifikasi kelemahan atau gap statistik dalam organisasi. Menyusun roadmap pembangunan statistik sektoral. Meningkatkan koordinasi dan integrasi sistem statistik nasional
Sumber Data	Dokumen pembentukan UPS, regulasi internal, SK penunjukan UPS
Frekuensi	Tahunan

Urusan Persandian

Nama Indikator	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Definisi	SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.
Rumus Perhitungan	Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut : $Indeks\ Domain\ (i) = \frac{1}{BD} \sum_{j=m}^n NAij \times BAij$ Keterangan: NDj = nilai indeks domain ke-j BDj = nilai bobot domain ke j
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks domain dan bobot domain maka akan semakin besar pula nilai indeks SPBE yang dihasilkan.
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Frekuensi	Tahunan

Urusan Kebudayaan

Nama Indikator	Persentase Pelestarian Cagar Budaya
Definisi	Persentase pelestarian cagar budaya adalah jumlah cagar budaya (<i>tangible dan Intangible</i>) yang dilestarikan dibandingkan dengan jumlah cagar budaya yang terdata. Pelestarian menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Pelestarian Cagar Budaya bertujuan untuk : a). melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia; b). meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya; c). memperkuat kepribadian bangsa; d). meningkatkan

	kesejahteraan rakyat; dan e).mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional. Pelestarian menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Pelestarian Cagar Budaya bertujuan untuk : a). melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia; b). meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya; c). memperkuat kepribadian bangsa; d). meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan e).mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional. Cagar budaya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisas-isanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap. Struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. Situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Warisan budaya adalah peninggalan yang merepresentasikan sistem nilai, kepercayaan, tradisi, gaya hidup, dan jejak-jejak suatu kebudayaan yang terus menerus diwariskan dari masa lalu hingga sekarang. Warisan budaya terdiri dari dua jenis, yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Warisan budaya benda adalah warisan budaya berupa benda-benda material atau fisik yang dapat dilihat dan juga diraba, seperti candi, keris, batik, dan lain-lain. Warisan Budaya Tak Benda adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya takbenda setelah melalui proses penetapan Budaya Takbenda. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia, Warisan budaya takbenda Indonesia terdiri atas: a).tradisi dan ekspresi lisan; b).seni pertunjukan; c).adat-istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan; d).pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta; dan/atau e).keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional.
Rumus Perhitungan	Persentase Pelestarian Cagar Budaya $= \frac{\text{Jumlah cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah cagar budaya yang terdata}} \times 100 \%$

Interpretasi	Pelestarian cagar budaya tidak hanya memberikan manfaat budaya tetapi juga dapat berdampak positif pada ekonomi lokal melalui pariwisata. Situs bersejarah yang terawat dengan baik dapat menarik pengunjung dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi komunitas setempat.
Sumber Data	Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto
Frekuensi	Tahunan

Urusan Perpustakaan

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
Definisi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat pembangunan literasi di masyarakat berdasarkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan fasilitas layanan perpustakaan serta aktivitas literasi di suatu daerah. IPLM dikembangkan untuk menilai kemampuan masyarakat dalam mengakses, memahami, dan menggunakan informasi melalui aktivitas membaca, belajar, dan berpartisipasi dalam kegiatan literasi yang difasilitasi oleh perpustakaan dan lembaga sejenis.
Rumus Perhitungan	$IPLM = \frac{\sum_{i=1}^n (w_i \times I_i)}{\sum_{i=1}^n w_i}$ Keterangan : - Ii = Skor indikator ke-i pada dimensi pembangunan literasi masyarakat - wi = Bobot indikator ke-i - n = Jumlah indikator yang digunakan dalam penghitungan - IPLM memiliki rentang nilai dari 0 sampai 100, di mana makin tinggi nilai IPLM, makin baik tingkat pembangunan literasi masyarakat di wilayah tersebut.
Interpretasi	Semakin tinggi skor IPLM, semakin baik pembangunan dan pencapaian literasi masyarakat di wilayah tersebut
Sumber Data	Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi/Kabupaten/Kota, BPS, data survei literasi daerah
Frekuensi	Tahunan (1 kali per tahun, disesuaikan dengan pelaporan nasional)

Urusan Kearsipan

Nama Indikator	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah
Definisi	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menunjukkan tingkat kepatuhan, kualitas, dan efektivitas pengelolaan arsip di lingkungan pemerintahan daerah (provinsi/kabupaten/kota), berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Kearsipan Nasional (ANRI) atau Lembaga Kearsipan Daerah.
Rumus Perhitungan	$Indeks = (Skor\ Total\ Hasil\ Pengawasan\ Kearsipan / Skor\ Maksimal) \times 100$ Keterangan : Skor Total Hasil Pengawasan: Penjumlahan dari seluruh poin nilai yang diperoleh berdasarkan hasil evaluasi terhadap aspek-aspek pengelolaan arsip (seperti: kebijakan kearsipan,

	SDM, sarana prasarana, pengelolaan arsip aktif-inaktif, pengawasan internal, dll.) • Skor Maksimal: Nilai maksimum yang bisa dicapai (biasanya = 100 poin). • Output: Nilai indeks dalam skala 0–100.
Interpretasi	Semakin tinggi skor, menunjukkan tata kelola kearsipan semakin baik dan sesuai standar nasional kearsipan
Sumber Data	• Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan oleh ANRI atau LKD • Formulir Penilaian Mandiri Kearsipan (AMANI/IKM) • Berita Acara Hasil Pengawasan Kearsipan • Dokumentasi Audit Arsip Internal • Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN)
Frekuensi	Tahunan (Biasanya dilakukan dalam siklus audit/pengawasan kearsipan per tahun anggaran)

Urusan Kelautan dan Perikanan

Nama Indikator	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)
Definisi	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) adalah rasio antara indeks harga yang diterima pembudidaya ikan (It) dengan indeks harga yang dibayar pembudidaya ikan (Ib). NTPi digunakan untuk mengukur daya beli atau tingkat kesejahteraan ekonomi pembudidaya ikan, termasuk pembudidaya ikan air tawar, air payau, dan laut. Jika NTPi > 100, artinya pendapatan pembudidaya lebih tinggi dibandingkan pengeluarannya (daya beli naik). Jika NTPi < 100, maka pengeluaran lebih tinggi dari pendapatan (daya beli menurun).
Rumus Perhitungan	Indeks Harga yang Diterima Pembudidaya (It) $NTPi = \frac{\text{Indeks Harga yang Diterima Pembudidaya (It)}}{\text{Indeks Harga yang Dibayar Pembudidaya (Ib)}} \times 100$ Indeks Harga yang Dibayar Pembudidaya (Ib) Keterangan : • It (Indeks Harga yang Diterima) = Rata-rata harga jual hasil budidaya perikanan (contoh: ikan nila, lele, udang vaname, bandeng, rumput laut). • Ib (Indeks Harga yang Dibayar) = Biaya untuk keperluan konsumsi rumah tangga dan produksi usaha (contoh: pakan, listrik, vitamin, tenaga kerja, pupuk kolam, dll.)
Interpretasi	Nilai > 100 = pendapatan > pengeluaran → kesejahteraan meningkat
Sumber Data	• Survei BPS Nilai Tukar Petani Perikanan • Data harga komoditas budidaya (ikan, udang, kepiting, rumput laut, dll.) • Data harga kebutuhan rumah tangga dan produksi (pakan, listrik, pupuk, dll.) • Laporan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah • Sistem Informasi KKP atau SIKOMANDAN
Frekuensi	Bulanan oleh BPS (Namun dapat digunakan sebagai nilai rata-rata tahunan untuk laporan daerah)

Urusan Pariwisata

Nama Indikator	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum
Definisi	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, dan Minum adalah persentase kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan dan minuman terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku di suatu wilayah dalam periode tertentu (biasanya tahunan). Sektor ini mencerminkan aktivitas ekonomi hotel, penginapan, restoran, kafe, rumah makan, warung, dan sejenisnya.
Rumus Perhitungan	Rasio PDRB Akomodasi, Makan, dan Minum (%) = $(\text{PDRB Sektor Akomodasi \& Mamin} / \text{Total PDRB}) \times 100\%$ Keterangan :

	• PDRB Sektor Akomodasi & Mamin: Diambil dari sektor "Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum" dalam tabel PDRB menurut lapangan usaha (ADHB). • Total PDRB: Total seluruh sektor PDRB atas dasar harga berlaku. • Data diperoleh dari publikasi BPS provinsi/kabupaten.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin besar kontribusi sektor pariwisata & kuliner dalam perekonomian daerah
Sumber Data	• Badan Pusat Statistik (BPS) – Publikasi PDRB menurut Lapangan Usaha (ADHB & ADHK) • Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota • Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Dinas Perdagangan/UMKM • Publikasi Statistik Daerah atau Statistik Sektoral
Frekuensi	Tahunan (Umumnya dirilis oleh BPS setiap tahun dalam publikasi PDRB)

Urusan Pertanian

Nama Indikator	Nilai Tukar Petani (NTP)
Definisi	Nilai Tukar Petani (NTP) adalah indikator kesejahteraan relatif petani yang mengukur kemampuan tukar (daya beli) hasil produksi pertanian terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun dibutuhkan untuk produksi. NTP menunjukkan tingkat keseimbangan antara harga yang diterima petani dan harga yang dibayar petani.
Rumus Perhitungan	$NTP = \frac{\text{Indeks Harga yang Diterima Petani (It)}}{\text{Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)}} \times 100$ Keterangan : • It (Indeks Harga yang Diterima Petani): Indeks yang menggambarkan perubahan rata-rata harga produk pertanian yang dijual petani. • Ib (Indeks Harga yang Dibayar Petani): Indeks yang menggambarkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga petani (konsumsi rumah tangga) dan biaya produksi serta penambahan barang modal (input produksi).
Interpretasi	Menunjukkan tingkat kesejahteraan dan daya beli petani terhadap konsumsi dan produksi
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pertanian, survei harga komoditas pertanian dan input produksi
Frekuensi	Bulanan dan tahunan

Urusan Perdagangan

Nama Indikator	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
Definisi	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB adalah persentase nilai tambah bruto (gross value added) yang dihasilkan oleh sektor perdagangan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada suatu wilayah dalam periode tertentu. Sektor perdagangan meliputi kegiatan perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi mobil dan sepeda motor.
Rumus Perhitungan	$\text{Kontribusi Sektor Perdagangan (\%)} = \left(\frac{\text{PDRB Sektor Perdagangan}}{\text{Total PDRB}} \right) \times 100$ Keterangan : • PDRB Sektor Perdagangan: Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (atau konstan) yang berasal dari sektor perdagangan besar dan eceran. • Total PDRB: Jumlah seluruh nilai tambah bruto dari seluruh sektor ekonomi dalam wilayah tertentu.
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, semakin besar peran sektor perdagangan dalam membentuk PDRB
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS): Tabel PDRB Menurut Lapangan Usaha
Frekuensi	Tahunan

Urusan Perindustrian

Nama Indikator	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB
Definisi	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB adalah persentase nilai tambah bruto (gross value added) dari sektor industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada suatu wilayah dalam periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Kontribusi Sektor Industri (\%)} = \left(\frac{\text{PDRB Sektor Industri}}{\text{Total PDRB}} \right) \times 100$ Keterangan : - PDRB Sektor Industri: Nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan. - Total PDRB: Total nilai tambah bruto dari seluruh sektor ekonomi dalam satu wilayah.
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, menunjukkan sektor industri menjadi pilar utama perekonomian daerah.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Triwulanan, Tahunan

Unsur Sekretariat Daerah

Nama Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi
Definisi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian pelaksanaan program reformasi birokrasi pada instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang mencakup berbagai aspek perubahan birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Rumus Perhitungan	$\text{Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)} = \frac{\sum (\text{Nilai Komponen} \times \text{Bobot})}{\text{Total Bobot}}$
Interpretasi	Semakin tinggi skor IRB, menunjukkan reformasi birokrasi berjalan baik dan efektif
Sumber Data	Kementerian PANRB
Frekuensi	Tahunan

Unsur Sekretariat DPRD

Nama Indikator	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD
Defenisi	Ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan Anggota Dewan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD.
Rumus Perhitungan	$\text{IKM} = \left(\frac{\sum_{i=1}^n (\text{Skor Unsur}_i \times \text{Bobot}_i)}{n} \right) \times 25$ Keterangan Rumus: - Skor Unsur: Nilai persepsi masyarakat terhadap masing-masing unsur pelayanan (biasanya menggunakan skala 1–4 atau 1–5). - Bobot Unsur: Tingkat kepentingan relatif dari setiap unsur layanan (umumnya bobot sama jika tidak ditentukan berbeda). - n: Jumlah unsur pelayanan yang dinilai (umumnya terdiri dari 9 unsur seperti prosedur, waktu pelayanan, produk, kompetensi petugas, perilaku petugas, sarana prasarana, penanganan pengaduan, dan kepastian jadwal). - Dikalikan 25 agar hasilnya berada dalam rentang skala 0–100.
Interpretasi	Skor Tingkat Kepuasan digunakan sebagai dasar pembenahan dan peningkatan kualitas layanan Sekretariat DPRD.
Sumber Data	Survei Kepuasan Anggota DPRD Kota Sawahlunto
Frekuensi	Semesteran atau Tahunan

Unsur Perencanaan

Nama Indikator	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah
Definisi	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah adalah ukuran komposit yang menggambarkan kualitas dan konsistensi proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, keterpaduan, partisipatif, serta ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.
Rumus Perhitungan	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah = $\frac{\sum_{i=1}^n (Skor_i \times Bobot_i)}{\sum_{i=1}^n Bobot_i}$ Keterangan : - Skor i = Nilai dari setiap aspek penilaian (0–100) - Bobot i = Bobot pentingnya aspek tersebut terhadap kualitas perencanaan - Aspek penilaian meliputi, misalnya: - Kelengkapan dokumen - Konsistensi antar dokumen (RPJMD–RKPD–Renja) - Keterpaduan dengan prioritas nasional - Tingkat partisipasi masyarakat - Penggunaan sistem informasi (SIPD) - Ketepatan waktu penyusunan
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, semakin baik kualitas tata kelola perencanaan
Sumber Data	Bappeda (dokumen RPJMD, RKPD, Renja, Renstra)
Frekuensi	Tahunan

Unsur Keuangan

Nama Indikator	Opini BPK atas laporan keuangan
Definisi	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah pernyataan profesional yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kewajaran penyajian informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan kriteria akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Semakin tinggi kualitas opini (misal WTP), maka semakin baik pengelolaan keuangan daerah
Sumber Data	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD
Frekuensi	Tahunan (setelah LKPD selesai diaudit oleh BPK)

Unsur Kepegawaian

Nama Indikator	Indeks profesionalitas ASN
Definisi	Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran yang menggambarkan tingkat kompetensi, kualifikasi, kinerja, disiplin, integritas, dan komitmen terhadap pelayanan publik dari ASN di suatu instansi pemerintah. Indeks ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana ASN memenuhi standar profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Rumus Perhitungan	Indeks Profesionalitas ASN = $\frac{\sum (\text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin})}{\text{Jumlah ASN}}$
Interpretasi	Semakin tinggi skor, semakin profesional ASN pada instansi tersebut
Sumber Data	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Frekuensi	Tahunan

Unsur Pendidikan dan Pelatihan

Nama Indikator	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi
Definisi	Indeks Profesionalitas ASN – Dimensi Kompetensi adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat kecakapan atau kemampuan ASN dalam menjalankan tugas jabatannya, berdasarkan kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki dengan standar kompetensi jabatan.

Rumus Perhitungan	$\text{Indeks Kompetensi ASN} = \left(\frac{\sum \text{ASN yang Kompetensinya Sesuai dengan Jabatannya}}{\text{Jumlah Seluruh ASN yang Dinilai}} \right) \times 100$ Keterangan : • ASN yang Kompetensinya Sesuai: ASN yang memiliki hasil uji kompetensi yang memenuhi standar jabatan sesuai PermenPANRB dan Permen BKN. • Jumlah Seluruh ASN yang Dinilai: ASN yang telah menjalani uji kompetensi sesuai regulasi dalam periode tertentu.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai menunjukkan ASN makin kompeten menjalankan fungsinya
Sumber Data	Badan Kepegawaian Daerah (BKD/BKPSDM)
Frekuensi	Tahunan

Unsur Penelitian dan Pengembangan

Nama Indikator		Persentase kebijakan berbasis bukti
Definisi		Persentase Kebijakan Berbasis Bukti adalah proporsi dokumen kebijakan (peraturan, program, atau kegiatan) yang disusun berdasarkan hasil kajian, data, analisis, atau riset yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, terhadap total jumlah kebijakan yang disusun dalam satu periode tertentu, dinyatakan dalam bentuk persentase.
Rumus Perhitungan		$\text{Persentase Kebijakan Berbasis Bukti} = \left(\frac{\text{Jumlah Kebijakan Berbasis Bukti}}{\text{Total Jumlah Kebijakan}} \right) \times 100$ Keterangan : - Jumlah Kebijakan Berbasis Bukti: Dokumen kebijakan (misalnya: RPJMD, RKPD, Renja, Perkada, Perda, Program, atau kegiatan) yang dilengkapi dengan justifikasi berbasis data, kajian akademik, riset, statistik, survei, atau analisis kebijakan. - Total Jumlah Kebijakan: Keseluruhan dokumen kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah pada periode tertentu (misalnya dalam satu tahun anggaran).
Interpretasi		Semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin kuatnya penerapan prinsip evidence-based policy
Sumber Data		Bappeda (Dokumen RPJMD, RKPD, Renstra, Renja)
Frekuensi		Tahunan

Unsur Pengawasan

Nama Indikator	Maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintahan (SPIP)
Definisi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan (maturity level) penyelenggaraan sistem pengendalian intern pada instansi pemerintah daerah, yang mencerminkan sejauh mana sistem pengendalian intern diterapkan secara efektif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
Rumus Perhitungan	$\text{Nilai SPIP} = \frac{\text{Jumlah nilai komponen SPIP (dari 5 unsur)}}{\text{Jumlah unsur SPIP (5)}}$ Keterangan : • Jumlah nilai komponen SPIP: Penjumlahan skor dari 5 komponen utama SPIP. • Jumlah unsur SPIP: Tetap 5 unsur (komponen utama sistem pengendalian). • Penilaian dilakukan oleh Inspektorat atau BPKP, bisa melalui self-assessment, review, dan verifikasi lapangan. • Hasil nilai tersebut menjadi rujukan pengukuran maturitas SPIP daerah.
Interpretasi	Semakin tinggi level maturitas, semakin baik pelaksanaan sistem pengendalian intern
Sumber Data	Laporan Penilaian Maturitas SPIP
Frekuensi	Tahunan

Unsur Pemerintahan Umum

Nama Indikator	Indeks Demokrasi Indonesia
Definisi	• IDI merupakan indeks komposit yang mengukur kualitas demokrasi di Indonesia. IDI diukur sejak tahun 2009 (IDI 2009). Pada tahun 2021 metode pengukuran IDI mengalami perubahan karena terdapat perluasan konsep demokrasi yang digunakan. Pada IDI 2009 s.d 2020 konsep demokrasi hanya dilihat dari ranah politik, sedangkan pada IDI metode baru, demokrasi tidak hanya mencakup ranah politik, tetapi juga mencakup ranah ekonomi dan sosial. Selain itu, metode baru juga menghitung nilai IDI pada tingkat pusat. IDI 2021 merupakan IDI pertama yang dihitung dengan menggunakan metode baru. • IDI metode baru terdiri dari tiga angka indeks: • IDI tingkat provinsi (merupakan agregasi dari nilai 34 provinsi) • IDI tingkat pusat (Kementerian/Lembaga), dan • IDI tingkat nasional (merupakan agregasi dari nilai IDI provinsi dan pusat). • IDI metode baru terdiri atas 3 aspek dan 22 indikator, yaitu: • Aspek Kebebasan (7 indikator); • Aspek Kesetaraan (7 indikator); • Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi (8 indikator).
Metode Perhitungan	<pre>graph LR subgraph Provincial D34P[Data 34 Provinsi] --> SI34P[Skor Indikator 34 provinsi] SI34P --> IA34P[Indeks Aspek 34 provinsi] IA34P -- "Bobot: 0,61" --> ID34P[Indeks Demokrasi 34 Provinsi] end subgraph National DP[Data Pusat] --> SIP[Skor Indikator Pusat] SIP --> IAP[Indeks Aspek Pusat] IAP -- "Bobot: 0,39" --> IDP[Indeks Demokrasi Pusat] end ID34P --> IDN[Indeks Demokrasi Nasional] IDP --> IDN IDN --> IDN</pre> • Metode penghitungan IDI menggunakan triangulasi, yakni mengkombinasikan antara metode penelusuran kuantitatif dan kualitatif, dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (<i>cross validate</i>) data yang didapat dengan metode yang lain. • Pendekatan kuantitatif yaitu melalui penelusuran dan analisis isi surat kabar lokal dengan oplah terbesar di provinsi tersebut. Pengumpulan berita juga dilakukan melalui proses <i>web scrapping</i> dari berbagai portal online dan reviu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi (SK Gubernur, Perda, SE, SK DPRD, data pemilih, data pelanggaran pemilu, dan lainnya). Data ini kemudian dikoding. • Pendekatan kualitatif yaitu ketika hasil data kuantitatif divalidasi melalui FGD yang melibatkan para ahli dan narasumber yang relevan. Tujuannya antara lain untuk menggali dan menjaring data kualitatif, mendapatkan informasi tambahan (verifikasi, konfirmasi, atau diskonfirmasi), serta melakukan eksplorasi atas kasus-kasus yang memiliki tingkat relevansi tinggi dengan indikator- indikator IDI. • IDI dihitung secara tertimbang menggunakan skala 0-100. • Bobot pada aspek, variabel, dan indikator diperoleh dengan AHP yang melibatkan juri dari kalangan akademisi, peneliti, praktisi, pejabat pemerintah, Ormas LSM, serta pers.
Interpretasi	Makin tinggi nilai IDI, makin baik kualitas demokrasi. Ada tiga kategori nilai: Kategori Tinggi (>80) Kategori Sedang (60-80) Kategori Rendah (<60)
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS) RI
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks harmoni indonesia
Definisi	Indeks Harmoni Indonesia (IHI) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat harmoni atau keharmonisan sosial di tengah masyarakat Indonesia berdasarkan aspek kehidupan beragama, kehidupan sosial, dan kehidupan berbangsa. IHI dikembangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai alat untuk memetakan dan memantau kondisi kerukunan serta potensi konflik sosial di daerah.
Rumus Perhitungan	IHI = (NR + NT + NM) / 3 x 25 Keterangan : - NR = Nilai Kehidupan Beragama - NT = Nilai Kehidupan Bermasyarakat (Toleransi Sosial) - NM = Nilai Kehidupan Berbangsa (Kesadaran Kebangsaan)
Interpretasi	Semakin tinggi skor IHI, semakin harmonis kondisi sosial masyarakat
Sumber Data	- Survei Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) dan IHI oleh Kementerian Agama RI - Badan Pusat Statistik (BPS) – dalam kerja sama survei sosial - Survei Persepsi Masyarakat terhadap toleransi dan interaksi sosial - Laporan Pemerintah Daerah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
Frekuensi	Tahunan (Biasanya dilakukan di akhir tahun oleh Kementerian Agama dan BPS)



LAMPIRAN II : MANAJEMEN RISIKO PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

MISI/ TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RESIKO	SEBAB RESIKO	DAMPAK RESIKO	ANALISIS RESIKO	RESIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Misi 1: Meningkatkan pertumbuhan sektor perekonomian yang berwawasan lingkungan								
Tujuan 1: Terwujudnya pertumbuhan perekonomian yang berwawasan lingkungan	Eksplorasi sumber daya alam yang berlebihan	Kurangnya regulasi dan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya	Kerusakan lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, menurunnya kualitas hidup	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Tinggi	Sangat Tinggi	Meningkatkan regulasi, memperkuat pengawasan, dan mendorong ekonomi hijau	Sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha melalui media dan forum diskusi	Monitoring berkala setiap 6 bulan dengan laporan evaluasi
Sasaran 1.1. Terciptanya Ekosistem Usaha yang mendukung pertumbuhan UMKM, Industri dan perdagangan secara berkelanjutan	Rendahnya akses UMKM terhadap pembiayaan	Persyaratan kredit perbankan yang ketat, kurangnya literasi keuangan	Pertumbuhan UMKM terhambat, sulit berkembang	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 1)	Fasilitasi kredit mikro- Pelatihan literasi keuangan- Kerja sama dengan lembaga keuangan	Laporan rutin ke dinas terkait dan pemangku kepentingan (bank, koperasi)	Monitoring tingkat penyaluran kredit & jumlah UMKM penerima
	Keterbatasan infrastruktur pendukung usaha	Infrastruktur logistik belum merata, biaya distribusi tinggi	Tingginya biaya operasional UMKM/industri, daya saing menurun	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 2)	Peningkatan infrastruktur jalan, pasar, gudang- Program subsidi transportasi/logistik	Koordinasi dengan dinas PU, perhubungan, dan asosiasi usaha	Pemantauan proyek infrastruktur & evaluasi biaya distribusi
	Persaingan produk impor yang lebih murah	Kurangnya proteksi pasar, rendahnya kualitas/standar produk lokal	UMKM kehilangan pangsa pasar	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 3)	Program sertifikasi & peningkatan kualitas- Promosi produk lokal- Kebijakan proteksi terbatas	Komunikasi publik lewat kampanye “Bangga Buatan Lokal”	Pemantauan volume impor & penjualan produk lokal
	Rendahnya kapasitas SDM UMKM dan industri	Keterbatasan pelatihan, lemahnya inovasi	Produksi tidak efisien, sulit bersaing	Probabilitas: Sedang, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 4)	Pelatihan manajemen usaha & digital marketing- Inkubasi bisnis	Komunikasi dengan UMKM melalui forum/pendampingan	Evaluasi jumlah peserta & keberhasilan usaha pascapelatihan
	Perubahan regulasi dan kebijakan perdagangan	Kebijakan pusat/daerah yang tidak konsisten	Ketidakpastian iklim usaha, investasi menurun	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 5)	- Harmonisasi regulasi- Dialog rutin pemerintah- pelaku usaha	Publikasi regulasi secara terbuka, forum konsultasi	Monitoring implementasi regulasi & keluhan usaha
	Risiko bencana alam yang mengganggu ekosistem usaha	Tanah longsor, gempa dll.	Kerugian aset usaha, supply chain terhenti	Probabilitas: Rendah, Dampak: Tinggi	Sedang (Prioritas 6)	- Program ketahanan bencana- Edukasi asuransi usaha	Sosialisasi dengan BPBD & asosiasi usaha	Pemantauan indeks kerentanan bencana & kesiapan UMKM
Sasaran 1.2. Meningkatnya iklim investasi yang kondusif untuk	Kurangnya kepastian hukum dan regulasi investasi	Regulasi tumpang tindih, perubahan kebijakan mendadak	Investor enggan masuk, turunnya realisasi investasi	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 1)	Harmonisasi regulasi, kepastian hukum investasi, forum konsultasi	Publikasi regulasi jelas, konsultasi publik dengan investor	Monitoring realisasi investasi, kepuasan investor



MISI/ TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RESIKO	SEBAB RESIKO	DAMPAK RESIKO	ANALISIS RESIKO	RESIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
mendorong pertumbuhan usaha dan peningkatan produktivitas tenaga kerja daerah	Keterbatasan infrastruktur pendukung investasi	Kapasitas infrastruktur (jalan, listrik, internet) belum memadai	Biaya investasi meningkat, daya tarik investasi menurun	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 2)	Peningkatan infrastruktur jalan, listrik, telekomunikasi	Koordinasi lintas dinas, laporan ke stakeholder	Evaluasi pembangunan infrastruktur dan daya dukungnya
	Proses perizinan yang lambat dan berbelit	Birokrasi panjang, sistem digitalisasi belum optimal	Investasi tertunda, menurunnya minat investor baru	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 3)	Simplifikasi dan digitalisasi perizinan	Layanan OSS (Online Single Submission), sosialisasi	Pemantauan waktu proses perizinan dan jumlah izin terbit
	Kualitas tenaga kerja yang belum sesuai kebutuhan industri	Rendahnya keterampilan dan mismatch kompetensi	Produktivitas rendah, daya saing berkurang	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 4)	Program pelatihan vokasi dan peningkatan SDM	Kerja sama dengan dunia usaha dan lembaga pendidikan	Evaluasi tenaga kerja terserap dan produktivitasnya
	Tingkat keamanan dan stabilitas daerah yang rendah	Tingginya kriminalitas atau konflik sosial	Investor ragu, berkurangnya minat penanaman modal	Probabilitas: Sedang, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 5)	Penguatan keamanan dan stabilitas sosial daerah	Sosialisasi keamanan dan keterlibatan masyarakat	Monitoring tingkat kriminalitas dan keamanan daerah
	Risiko bencana alam yang menghambat investasi	Banjir, gempa, dan bencana alam lainnya	Kerugian aset investasi, kegiatan usaha terhenti	Probabilitas: Rendah, Dampak: Tinggi	Sedang (Prioritas 6)	Program mitigasi bencana, edukasi asuransi investasi	Koordinasi dengan BPBD, komunikasi risiko ke investor	Pemantauan indeks kerentanan bencana dan dampaknya
Sasaran 1.3. Meningkatnya kemandirian desa dalam pengelolaan potensi lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa	Rendahnya kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan potensi lokal	Aparatur desa belum mendapat pelatihan manajemen dan teknis	Pengelolaan potensi desa tidak optimal, lambat berkembang	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 1)	Pelatihan manajemen dan pengelolaan potensi lokal untuk aparatur desa	Koordinasi dengan dinas pemberdayaan masyarakat dan lembaga pelatihan	Evaluasi kinerja aparatur desa dan peningkatan kapasitasnya
	Kurangnya akses modal bagi BUMDes dan usaha masyarakat desa	Akses ke lembaga keuangan terbatas, persyaratan sulit	BUMDes sulit berkembang, usaha masyarakat terhambat	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 2)	Fasilitasi akses permodalan, kerja sama dengan bank dan koperasi	Komunikasi dengan lembaga keuangan dan stakeholder terkait	Pemantauan jumlah BUMDes/UMKM desa yang memperoleh akses modal
	Keterbatasan infrastruktur desa untuk mendukung kegiatan ekonomi	Jalan, pasar desa, listrik, dan internet belum memadai	Aktivitas ekonomi desa kurang produktif, biaya tinggi	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 3)	Pembangunan dan peningkatan infrastruktur desa (jalan, pasar, internet)	Koordinasi lintas sektor pembangunan desa	Monitoring progres pembangunan infrastruktur desa
	Kurangnya inovasi dan diversifikasi produk lokal	Kurangnya pelatihan, minimnya teknologi tepat guna	Produk desa kurang kompetitif, sulit menembus pasar	Probabilitas: Sedang, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 4)	Pelatihan inovasi produk, pengembangan teknologi tepat guna	Sosialisasi inovasi dan promosi produk lokal	Evaluasi jumlah produk inovatif desa dan daya saingnya



MISI/ TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RESIKO	SEBAB RESIKO	DAMPAK RESIKO	ANALISIS RESIKO	RESIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Sasaran 1.4. Terwujudnya ketahanan pangan dengan meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan	Lemahnya partisipasi masyarakat dalam program desa	Kurang kesadaran masyarakat, minimnya pemberdayaan	Program desa tidak berjalan efektif, potensi lokal terabaikan	Probabilitas: Sedang, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 5)	Program pemberdayaan dan sosialisasi partisipasi masyarakat	Dialog rutin desa, musyawarah desa	Pemantauan partisipasi masyarakat dalam program desa
	Risiko bencana alam yang menghambat pengelolaan potensi desa	Banjir, longsor, kekeringan di wilayah desa	Kerugian aset desa dan masyarakat, penurunan aktivitas ekonomi	Probabilitas: Rendah, Dampak: Tinggi	Sedang (Prioritas 6)	Program mitigasi bencana, edukasi asuransi usaha desa	Koordinasi dengan BPBD dan sosialisasi kesiapsiagaan	Monitoring indeks kerentanan desa terhadap bencana
	Penurunan produktivitas pertanian akibat perubahan iklim	Curah hujan tidak menentu, kekeringan, banjir	Penurunan hasil panen, berkurangnya ketersediaan pangan	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 1)	Program adaptasi perubahan iklim, irigasi modern, varietas tahan iklim ekstrem	Sosialisasi adaptasi iklim kepada petani/nelayan	Monitoring produktivitas pertanian & perikanan tahunan
	Kerusakan ekosistem perikanan akibat penangkapan berlebihan	Overfishing, penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan	Menurunnya stok ikan, krisis perikanan berkelanjutan	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 2)	Pengelolaan perikanan berkelanjutan, pengawasan alat tangkap	Koordinasi dengan kelompok nelayan dan dinas kelautan	Pemantauan stok ikan dan keberlanjutan ekosistem
	Keterbatasan akses sarana produksi (pupuk, benih, pakan)	Distribusi sarana produksi terbatas, harga mahal	Produksi terhambat, biaya usaha meningkat	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 3)	Subsidi pupuk/benih/pakan, penguatan distribusi sarana produksi	Komunikasi dengan distributor pupuk/benih/pakan	Evaluasi distribusi dan harga sarana produksi
	Serangan hama dan penyakit tanaman/ikan	Kurangnya sistem pengendalian hama terpadu	Gagal panen, kerugian besar bagi petani/nelayan	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 4)	Pengendalian hama terpadu, penyediaan vaksin/obat ikan	Penyuluhan rutin oleh penyuluh pertanian/perikanan	Monitoring tingkat serangan hama & penyakit
	Kurangnya teknologi dan inovasi di sektor pertanian dan perikanan	Rendahnya penelitian dan penerapan teknologi tepat guna	Produktivitas rendah, sulit bersaing dengan produk impor	Probabilitas: Sedang, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 5)	Pelatihan teknologi pertanian & perikanan, riset dan inovasi	Kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset	Evaluasi penerapan teknologi dan inovasi
	Keterbatasan akses pasar bagi hasil pertanian dan perikanan	Kurangnya infrastruktur distribusi dan informasi pasar	Pendapatan petani/nelayan menurun, distribusi pangan tidak merata	Probabilitas: Sedang, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 6)	Pengembangan infrastruktur distribusi dan digitalisasi pemasaran	Promosi digitalisasi pasar & pelibatan koperasi	Pemantauan distribusi produk dan harga di pasar

Misi 2: Mewujudkan Smart Governance berbasis IT



MISI/ TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RESIKO	SEBAB RESIKO	DAMPAK RESIKO	ANALISIS RESIKO	RESIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tujuan 2: Terwujudnya smart governance berbasis IT	Kegagalan sistem IT atau serangan siber	Keamanan siber yang lemah, kurangnya pemeliharaan sistem, SDM kurang terlatih	Kebocoran data, gangguan layanan publik, hilangnya kepercayaan masyarakat	Kemungkinan: Tinggi, Dampak: Tinggi	Sangat Tinggi	Meningkatkan keamanan siber, backup data rutin, pelatihan SDM, audit sistem berkala	Menyampaikan prosedur keamanan kepada pegawai dan masyarakat melalui pelatihan, portal resmi, dan media sosial	Pemantauan keamanan jaringan real-time, evaluasi setiap 3 bulan, audit tahunan
Sasaran 2.1: Terselenggaranya pemerintahan digital yang terintegrasi dan responsif dalam mendukung transparansi	Keterbatasan infrastruktur TIK di daerah	Kurangnya jaringan internet, server, dan perangkat	Pemerintahan digital tidak berjalan optimal	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 1)	Peningkatan infrastruktur TIK (server, jaringan, perangkat)	Koordinasi dengan dinas komunikasi dan informatika	Monitoring kualitas jaringan dan server secara berkala
	Rendahnya literasi digital aparatur dan masyarakat	Minim pelatihan dan pendampingan transformasi digital	Sistem digital tidak termanfaatkan dengan baik	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 2)	Program literasi digital bagi ASN dan masyarakat	Sosialisasi manfaat layanan digital kepada ASN dan publik	Evaluasi tingkat adopsi digital ASN dan masyarakat
	Ancaman keamanan data dan kebocoran informasi	Sistem keamanan siber belum optimal	Kehilangan kepercayaan publik, kebocoran data sensitif	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 3)	Penerapan standar keamanan siber dan enkripsi data	Komunikasi dengan BSSN dan stakeholder keamanan data	Audit keamanan data secara rutin
	Kurangnya integrasi antar sistem pemerintahan	Silo data antar instansi, koordinasi minim	Layanan publik digital tidak terintegrasi	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Sedang (Prioritas 4)	Integrasi sistem informasi antar instansi	Forum koordinasi lintas instansi	Monitoring tingkat integrasi antar instansi
	Resistensi perubahan budaya kerja menuju digital	Aparatur terbiasa dengan cara kerja manual	Lambatnya adopsi digitalisasi dan pelayanan tidak efisien	Probabilitas: Sedang, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 5)	Sosialisasi dan perubahan budaya kerja digital	Sosialisasi perubahan pola kerja berbasis digital	Evaluasi kecepatan adopsi budaya digital
	Ketergantungan pada vendor teknologi tertentu	Kontrak jangka panjang dengan penyedia tunggal	Risiko biaya tinggi dan keterbatasan inovasi	Probabilitas: Rendah, Dampak: Tinggi	Sedang (Prioritas 6)	Diversifikasi penyedia teknologi dan kontrak fleksibel	Negosiasi dengan penyedia teknologi dan laporan transparansi	Monitoring ketergantungan teknologi dan biaya operasional
Sasaran 2.2: Terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien	Lambannya respon dalam pelayanan publik	Sistem belum terotomatisasi sepenuhnya	Kepuasan masyarakat menurun	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 1)	Digitalisasi proses layanan dan monitoring kinerja	Survey kepuasan masyarakat secara rutin	Evaluasi waktu respon dan penyelesaian layanan
	Proses birokrasi masih berbelit	Regulasi dan SOP terlalu kompleks	Waktu layanan lama, menimbulkan ketidakpuasan	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 2)	Simplifikasi regulasi dan SOP pelayanan	Sosialisasi SOP baru kepada aparatur dan masyarakat	Monitoring implementasi SOP yang disederhanakan



MISI/ TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RESIKO	SEBAB RESIKO	DAMPAK RESIKO	ANALISIS RESIKO	RESIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Kurangnya kompetensi aparatur dalam pelayanan	Minimnya pelatihan kompetensi aparatur	Layanan publik tidak profesional	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 3)	Pelatihan kompetensi aparatur secara berkala	Komunikasi internal dan eksternal terkait standar pelayanan	Evaluasi kinerja aparatur dalam pelayanan publik
	Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan publik	Fasilitas pelayanan publik tidak memadai	Akses layanan publik terbatas	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Sedang (Prioritas 4)	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Publikasi pembangunan/perbaikan sarana pelayanan	Monitoring ketersediaan sarana dan prasarana layanan
	Rendahnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan	Kurangnya adopsi sistem digitalisasi	Pelayanan publik menjadi tidak efektif dan transparan	Probabilitas: Sedang, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 5)	Penguatan adopsi teknologi pelayanan publik	Sosialisasi penggunaan teknologi layanan publik	Evaluasi tingkat pemanfaatan teknologi dalam pelayanan
	Kurangnya pengawasan dan evaluasi kinerja pelayanan	Belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi	Kinerja pelayanan publik tidak terukur dengan baik	Probabilitas: Sedang, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 6)	Penerapan sistem monitoring dan evaluasi kinerja ASN	Laporan evaluasi kinerja secara terbuka	Monitoring hasil evaluasi kinerja dan tindak lanjutnya

Misi 3 : Penguatan Infrastruktur Penunjang Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan 3: Terwujudnya infrastruktur yang inklusif, tangguh bencana dan berkelanjutan	Keterlambatan pembangunan infrastruktur	Keterbatasan anggaran, hambatan perizinan, cuaca ekstrem	Penurunan kualitas layanan publik, terganggunya mobilitas	Kemungkinan: Tinggi, Dampak: Tinggi	Tinggi	Optimalisasi perencanaan proyek, percepatan perizinan, penyediaan dana cadangan	Pelaporan rutin progres ke publik dan stakeholder terkait	Monitoring bulanan progres proyek dan penggunaan anggaran
Sasaran 3.1: Meningkatnya pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh bencana	Kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia	Penebangan liar, alih fungsi lahan, pencemaran industri	Kerusakan ekosistem, menurunnya kualitas hidup masyarakat	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 1)	Program rehabilitasi hutan, pengelolaan limbah, dan konservasi	Koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan lingkungan	Monitoring kualitas udara, air, dan lahan secara berkala
	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan	Kurangnya edukasi dan partisipasi masyarakat	Meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Sedang	Tinggi (Prioritas 2)	Kampanye kesadaran lingkungan dan pemberdayaan masyarakat	Sosialisasi pentingnya menjaga lingkungan melalui media dan komunitas	Evaluasi tingkat partisipasi masyarakat dalam program lingkungan
	Keterbatasan anggaran pengelolaan lingkungan	Prioritas anggaran lebih banyak untuk sektor lain	Program lingkungan tidak berjalan optimal	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 3)	Optimalisasi alokasi anggaran lingkungan	Transparansi alokasi anggaran lingkungan	Audit penggunaan anggaran lingkungan
	Peningkatan frekuensi bencana alam (banjir, tanah longsor,	Perubahan iklim global dan degradasi lingkungan	Kerugian ekonomi, korban jiwa, kerusakan infrastruktur	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 4)	Penguatan infrastruktur mitigasi bencana dan sistem peringatan dini	Peringatan dini bencana melalui media massa dan aplikasi digital	Monitoring kejadian bencana dan efektivitas mitigasi



MISI/ TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RESIKO	SEBAB RESIKO	DAMPAK RESIKO	ANALISIS RESIKO	RESIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	kekeringan)							
	Kurangnya kesiapsiagaan aparaturnya dalam menghadapi bencana	Minimnya pelatihan mitigasi bencana dan sistem peringatan dini	Tingginya kerentanan masyarakat terhadap bencana	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Sedang (Prioritas 5)	Pelatihan kesiapsiagaan bencana bagi aparaturnya dan masyarakat	Sosialisasi mitigasi bencana di sekolah dan desa	Evaluasi efektivitas pelatihan kesiapsiagaan bencana
	Lemahnya penegakan hukum terkait lingkungan hidup	Pengawasan tidak optimal, sanksi tidak tegas	Menurunnya kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan lingkungan	Probabilitas: Sedang, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 6)	Penegakan hukum lingkungan yang tegas dan konsisten	Publikasi sanksi dan penegakan hukum lingkungan secara terbuka	Monitoring tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan lingkungan
Sasaran 2. Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas	Keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur	Pendapatan daerah terbatas, ketergantungan pada dana pusat	Pembangunan infrastruktur tidak optimal	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 1)	Meningkatkan alokasi anggaran infrastruktur dan mencari alternatif pendanaan	Transparansi penggunaan anggaran infrastruktur	Audit realisasi anggaran pembangunan infrastruktur
	Kualitas infrastruktur rendah akibat lemahnya pengawasan	Pengawasan lemah terhadap kontraktor dan pelaksana	Infrastruktur cepat rusak dan tidak berfungsi maksimal	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 2)	Penguatan sistem pengawasan proyek dan standar kualitas	Publikasi hasil pengawasan kualitas proyek	Monitoring kualitas hasil pembangunan infrastruktur
	Ketimpangan akses infrastruktur antar wilayah	Fokus pembangunan hanya di wilayah perkotaan	Ketidakadilan dalam pembangunan, masyarakat desa tertinggal	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 3)	Pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah perkotaan dan pedesaan	Dialog pembangunan dengan masyarakat desa dan kota	Evaluasi pemerataan akses infrastruktur antar wilayah
	Kerusakan infrastruktur akibat bencana alam	Lokasi infrastruktur berada di daerah rawan bencana	Kerugian ekonomi dan gangguan konektivitas masyarakat	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 4)	Pembangunan infrastruktur berbasis mitigasi bencana	Sosialisasi mitigasi bencana terkait infrastruktur	Monitoring dampak bencana terhadap infrastruktur
	Keterlambatan proyek pembangunan infrastruktur	Proses perencanaan dan pengadaan tidak efektif	Pelayanan publik dan konektivitas masyarakat terganggu	Probabilitas: Sedang, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 5)	Percepatan proses perencanaan dan pengadaan proyek	Koordinasi lintas instansi untuk percepatan proyek	Evaluasi keterlambatan proyek dan penyebabnya
	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga infrastruktur	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan	Infrastruktur cepat rusak dan biaya pemeliharaan meningkat	Probabilitas: Sedang, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 6)	Program edukasi dan pemberdayaan masyarakat untuk pemeliharaan	Kampanye kesadaran masyarakat menjaga infrastruktur	Monitoring tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan
Misi 4 : Peningkatan Nilai-Nilai Keagamaan Dan Pelestarian Budaya Melalui Pengembangan Komunitas Seni Demi Mendukung Terwujudnya Kota Wisata Yang Estetik Dan Memiliki Fungsi Ekonomi Dan Mensejahterakan								



MISI/ TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RESIKO	SEBAB RESIKO	DAMPAK RESIKO	ANALISIS RESIKO	RESIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tujuan 4: Terwujudnya ketahanan sosial budaya dan agama untuk menciptakan masyarakat yang harmonis	Kerusakan infrastruktur akibat bencana alam	Gempa bumi, banjir, tanah longsor	Kerugian material besar, terganggunya aktivitas masyarakat	Kemungkinan: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi	Desain infrastruktur tahan bencana, peningkatan sistem peringatan dini	Sosialisasi mitigasi bencana kepada masyarakat	Evaluasi tahunan ketahanan infrastruktur
Sasaran 4.1: Meningkatnya ketahanan Sosial kehidupan beragama yang menjunjung nilai toleransi, kerukunan dan moderasi beragama	Meningkatnya potensi konflik antar umat beragama	Provokasi, diskriminasi, dan perbedaan kepentingan kelompok	Kerukunan masyarakat terganggu, potensi konflik horizontal meningkat	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 1)	Membangun forum komunikasi lintas agama dan budaya	Dialog lintas agama secara rutin	Monitoring kejadian konflik sosial dan keagamaan
	Penyebaran paham radikal dan intoleransi	Penyalahgunaan media sosial dan kurangnya literasi digital	Munculnya kelompok intoleran yang merusak persatuan	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 2)	Penguatan literasi digital untuk menangkal radikalisme	Kampanye anti-radikalisme di media sosial dan media massa	Evaluasi efektivitas kampanye anti-radikalisme
	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang moderasi beragama	Minimnya sosialisasi tentang nilai toleransi dan moderasi	Menurunnya semangat kebhinekaan dan kebangsaan	Probabilitas: Sedang, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 3)	Sosialisasi nilai toleransi dan moderasi melalui pendidikan	Integrasi materi toleransi dalam kurikulum pendidikan	Survey tingkat pemahaman masyarakat tentang moderasi
	Kesenjangan sosial-ekonomi memicu disharmoni sosial	Ketidakadilan distribusi sumber daya dan kesempatan ekonomi	Masyarakat terpecah dan ketidakstabilan sosial meningkat	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 4)	Program pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi	Sosialisasi program bantuan sosial secara transparan	Monitoring kesenjangan sosial dan distribusi bantuan
	Kurangnya peran tokoh agama dalam menjaga kerukunan	Tokoh agama pasif atau kurang diberdayakan	Kurangnya teladan positif bagi masyarakat	Probabilitas: Sedang, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 5)	Pemberdayaan tokoh agama sebagai agen perdamaian	Menghadirkan tokoh agama dalam diskusi publik	Evaluasi keterlibatan tokoh agama dalam program pemerintah
	Kurangnya koordinasi antar lembaga dalam menangani isu intoleransi	Belum ada mekanisme terpadu dalam pencegahan konflik sosial	Penanganan isu intoleransi lambat dan tidak efektif	Probabilitas: Sedang, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 6)	Membangun mekanisme koordinasi terpadu lintas lembaga	Rapat koordinasi antar lembaga pemerintah dan ormas	Monitoring sinergi program lintas lembaga
Sasaran 4.2: Meningkatnya komunitas seni dalam pelestarian cagar budaya dan	Menurunnya minat generasi muda terhadap seni, budaya, dan adat istiadat	Pengaruh globalisasi dan budaya populer modern	Warisan budaya tergerus, identitas lokal melemah	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 1)	Meningkatkan program edukasi seni dan budaya di sekolah serta komunitas	Kampanye budaya di media massa dan media sosial	Monitoring partisipasi generasi muda dalam kegiatan budaya



MISI/ TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RESIKO	SEBAB RESIKO	DAMPAK RESIKO	ANALISIS RESIKO	RESIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
adat istiadat	Kerusakan cagar budaya akibat kurangnya perawatan	Minimnya program pemeliharaan dan konservasi	Cagar budaya rusak dan hilang nilai sejarahnya	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 2)	Penguatan regulasi dan anggaran untuk konservasi cagar budaya	Publikasi program perawatan cagar budaya	Audit kondisi cagar budaya secara berkala
	Komersialisasi seni dan budaya yang mengurangi nilai autentik	Orientasi pada keuntungan ekonomi semata	Nilai budaya asli hilang, digantikan nilai komersial	Probabilitas: Sedang, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 5)	Mendorong keseimbangan antara komersialisasi dan pelestarian	Sosialisasi pentingnya menjaga nilai autentik budaya	Evaluasi keseimbangan aspek ekonomi dan nilai budaya
	Kurangnya dukungan anggaran untuk pelestarian seni dan budaya	Prioritas anggaran pemerintah lebih fokus pada sektor lain	Kegiatan pelestarian budaya terhambat	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 3)	Menyediakan dana khusus untuk pelestarian seni dan adat istiadat	Transparansi penggunaan dana pelestarian budaya	Monitoring penggunaan anggaran untuk pelestarian budaya
	Hilangnya pengetahuan lokal akibat tidak adanya regenerasi pelaku seni	Kurangnya pelatihan dan kaderisasi pelaku seni	Tradisi dan kearifan lokal tidak berlanjut	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 4)	Pelatihan dan regenerasi pelaku seni dan budaya	Keterlibatan tokoh adat dan seniman dalam komunikasi publik	Evaluasi jumlah pelaku seni yang mengikuti program kaderisasi
	Kurangnya dokumentasi dan digitalisasi warisan budaya	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi	Dokumentasi budaya hilang, sulit dipelajari generasi mendatang	Probabilitas: Sedang, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 6)	Digitalisasi dan dokumentasi sistematis warisan budaya	Penyebarluasan arsip budaya melalui platform digital	Monitoring perkembangan dokumentasi digital warisan budaya

Misi 5 : Meningkatkan Fungsi Ekonomi Sektor Pariwisata Untuk Kesejahteraan Masyarakat Melalui Optimalisasi Potensi Kepariwisata

Tujuan 5: Peningkatan fungsi ekonomi sektor pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat	Penurunan jumlah wisatawan	Krisis ekonomi, isu keamanan, pandemi	Penurunan pendapatan daerah dan masyarakat	Kemungkinan: Tinggi, Dampak: Sedang	Sedang	Promosi intensif, diversifikasi destinasi wisata	Publikasi melalui media sosial, event promosi daerah	Monitoring data kunjungan wisatawan bulanan/ Triwulan/ Semester dan Tahunan
Sasaran 5.1: Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian	Penurunan jumlah wisatawan akibat faktor eksternal (bencana, pandemi, keamanan)	Terjadinya krisis global, bencana alam, atau isu keamanan	Pendapatan pariwisata menurun tajam	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 1)	Diversifikasi pasar wisata dan siapkan protokol krisis	Informasi terbuka terkait kondisi keamanan dan mitigasi krisis	Monitoring jumlah kunjungan wisatawan
	Kurangnya infrastruktur penunjang pariwisata	Belum memadai transportasi, akomodasi, fasilitas umum	Destinasi wisata tidak menarik bagi wisatawan	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 2)	Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pariwisata	Publikasi pembangunan infrastruktur wisata	Evaluasi perkembangan infrastruktur pariwisata



MISI/ TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RESIKO	SEBAB RESIKO	DAMPAK RESIKO	ANALISIS RESIKO	RESIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Kerusakan lingkungan akibat aktivitas pariwisata yang tidak terkendali	Overkapasitas pengunjung tanpa regulasi jelas	Kerusakan alam menurunkan daya tarik wisata	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 3)	Penerapan regulasi ramah lingkungan di destinasi wisata	Kampanye pariwisata berkelanjutan	Audit dampak lingkungan dari aktivitas pariwisata
	Kurangnya promosi dan pemasaran destinasi wisata	Kurangnya anggaran promosi, strategi pemasaran lemah	Destinasi kurang dikenal di pasar nasional/internasional	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 4)	Penguatan promosi melalui media digital dan event pariwisata	Promosi destinasi melalui platform digital dan kerja sama internasional	Evaluasi efektivitas promosi dan pemasaran
	Rendahnya kualitas SDM pariwisata	Kurangnya pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja pariwisata	Pelayanan wisata tidak profesional, menurunkan kepuasan	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 5)	Pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga kerja pariwisata	Publikasi program peningkatan kualitas SDM	Monitoring kepuasan wisatawan dan kualitas layanan
	Ketergantungan pada wisata musiman	Tidak ada diversifikasi produk wisata	Fluktuasi pendapatan pariwisata sepanjang tahun	Probabilitas: Sedang, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 6)	Pengembangan produk wisata baru sepanjang tahun	Kampanye wisata sepanjang tahun dengan paket tematik	Monitoring fluktuasi kunjungan per musim
Sasaran 5.2: Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung perekonomian daerah	Kurangnya akses permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif	Akses kredit terbatas, skema pembiayaan kurang mendukung	Pertumbuhan ekonomi kreatif terhambat	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 1)	Meningkatkan akses pembiayaan melalui kredit usaha kreatif	Publikasi program pembiayaan kreatif	Monitoring jumlah pelaku kreatif yang mendapat akses pembiayaan
	Rendahnya literasi digital dan teknologi pada pelaku ekonomi kreatif	Kurangnya pelatihan digital, keterbatasan akses teknologi	Produk kreatif kalah bersaing di pasar digital	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Sedang	Tinggi (Prioritas 2)	Pelatihan literasi digital dan teknologi	Kampanye literasi digital untuk pelaku kreatif	Evaluasi efektivitas pelatihan digital
	Kurangnya infrastruktur pendukung industri kreatif	Minimnya pusat kreatif, ruang pameran, sarana produksi	Industri kreatif sulit berkembang secara optimal	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 3)	Pengembangan infrastruktur pendukung industri kreatif	Publikasi pembangunan pusat-pusat kreatif	Monitoring ketersediaan infrastruktur industri kreatif
	Kurangnya promosi dan jejaring pasar produk kreatif	Promosi terbatas, minim dukungan pameran dan festival	Produk kreatif kurang dikenal luas	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 4)	Meningkatkan promosi melalui festival, pameran, dan media digital	Promosi kolaborasi dengan platform e-commerce	Evaluasi efektivitas promosi dan jejaring pasar
	Kurangnya perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI)	Kesadaran rendah terhadap pentingnya pendaftaran HKI	Banyak karya kreatif dijiplak tanpa perlindungan hukum	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Sedang (Prioritas 5)	Mendorong pendaftaran dan perlindungan HKI	Sosialisasi pentingnya perlindungan HKI	Monitoring jumlah pendaftaran HKI



MISI/ TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RESIKO	SEBAB RESIKO	DAMPAK RESIKO	ANALISIS RESIKO	RESIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Ketergantungan pada tren pasar yang cepat berubah	Produk kreatif mudah ditinggalkan saat tren bergeser	Pendapatan pelaku ekonomi kreatif tidak stabil	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 6)	Diversifikasi produk kreatif agar tidak hanya bergantung pada tren	Kampanye produk kreatif berkelanjutan	Analisis tren pasar dan diversifikasi produk kreatif
Misi 6: Kota Sawahlunto menuju kota sehat dan destinasi pendidikan utama yang berkarakter di Sumatera Barat								
Tujuan 6: Terwujudnya SDM yang berdaya saing	Kesenjangan keterampilan tenaga kerja	Kurikulum pendidikan tidak sesuai kebutuhan industri	Pengangguran meningkat, daya saing menurun	Kemungkinan: Tinggi, Dampak: Tinggi	Tinggi	Pelatihan vokasi, kerja sama dengan industri	Publikasi program pelatihan dan peluang kerja	Evaluasi serapan tenaga kerja per tahun
Sasaran 6.1: Meningkatnya kualitas pendidikan	Rendahnya kompetensi guru dan tenaga pendidik	Kurangnya pelatihan dan pengembangan profesional	Mutu pendidikan menurun, hasil belajar siswa rendah	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 1)	Peningkatan kualitas guru melalui pelatihan dan sertifikasi	Publikasi program peningkatan kompetensi guru	Evaluasi kompetensi guru secara berkala
	Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan	Minimnya anggaran pendidikan dan infrastruktur	Proses belajar terganggu, kualitas belajar tidak maksimal	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 2)	Peningkatan anggaran dan pembangunan infrastruktur pendidikan	Sosialisasi pembangunan sarana prasarana pendidikan	Monitoring kondisi sarana prasarana pendidikan
	Tingginya angka putus sekolah	Faktor ekonomi keluarga dan rendahnya motivasi belajar	Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 3)	Program beasiswa dan bantuan pendidikan bagi siswa miskin	Kampanye pentingnya pendidikan bagi keluarga miskin	Monitoring angka putus sekolah tiap tahun
	Kesenjangan akses pendidikan antar wilayah	Perbedaan pembangunan wilayah dan keterbatasan transportasi	Ketidakmerataan kualitas pendidikan	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 4)	Pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan sekolah di daerah terpencil	Laporan pemerataan akses pendidikan kepada publik	Evaluasi kesenjangan pendidikan antar wilayah
	Rendahnya literasi digital di kalangan siswa dan guru	Minimnya pelatihan digital dan fasilitas TIK	Siswa kurang siap menghadapi era digital	Probabilitas: Sedang, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 5)	Pelatihan literasi digital dan penyediaan fasilitas TIK	Kampanye literasi digital di sekolah	Monitoring pemanfaatan TIK dalam pembelajaran
	Kurikulum yang kurang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	Kurangnya kolaborasi dengan dunia usaha dan industri	Lulusan tidak sesuai kebutuhan pasar kerja	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 6)	Pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan pasar kerja	Sosialisasi kurikulum berbasis industri kepada sekolah dan masyarakat	Evaluasi keterkaitan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja
	Sasaran 6.2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Kurangnya akses layanan kesehatan di daerah terpencil	Infrastruktur transportasi terbatas, distribusi fasilitas tidak merata	Masyarakat sulit mendapatkan layanan kesehatan dasar	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Tinggi	Pembangunan puskesmas dan posyandu di daerah terpencil	Publikasi program pemerataan layanan kesehatan	Monitoring akses layanan kesehatan di wilayah terpencil



MISI/ TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RESIKO	SEBAB RESIKO	DAMPAK RESIKO	ANALISIS RESIKO	RESIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat	Kurangnya edukasi kesehatan dan sosialisasi pola hidup sehat	Tingginya angka penyakit akibat pola hidup tidak sehat	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Sedang	Tinggi (Prioritas 2)	Kampanye pola hidup sehat berbasis masyarakat	Kampanye kesehatan melalui media cetak dan digital	Evaluasi tingkat kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat
	Keterbatasan jumlah dan kompetensi tenaga medis	Distribusi tenaga medis tidak merata, pelatihan kurang optimal	Pelayanan kesehatan tidak optimal	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Sedang (Prioritas 3)	Peningkatan jumlah dan kompetensi tenaga medis	Sosialisasi program pelatihan tenaga medis	Monitoring distribusi tenaga medis dan kompetensinya
	Tingginya prevalensi penyakit menular dan tidak menular	Faktor lingkungan, pola makan, perilaku berisiko	Angka kesakitan dan kematian meningkat	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 4)	Program pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Publikasi program pengendalian penyakit	Monitoring prevalensi penyakit menular dan tidak menular
	Minimnya sarana prasarana kesehatan yang memadai	Kurangnya anggaran kesehatan dan pemeliharaan fasilitas	Mutu pelayanan kesehatan menurun	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Sedang (Prioritas 5)	Pengadaan sarana prasarana kesehatan yang memadai	Sosialisasi pembangunan dan perbaikan fasilitas kesehatan	Evaluasi kondisi sarana prasarana kesehatan
	Rendahnya cakupan imunisasi dan program kesehatan preventif	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya imunisasi	Meningkatnya risiko wabah penyakit	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Sedang (Prioritas 6)	Peningkatan cakupan imunisasi dan program preventif	Kampanye pentingnya imunisasi bagi masyarakat	Monitoring cakupan imunisasi dan program preventif
Sasaran 6.3: Terciptanya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesetaraan gender	Norma budaya dan tradisi yang masih bias gender	Terhambatnya pencapaian kesetaraan gender	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 1)	Kampanye kesetaraan gender melalui pendidikan dan media	Publikasi program kesetaraan gender di media massa	Evaluasi perubahan kesadaran gender di masyarakat
	Tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan diskriminasi	Kurangnya penegakan hukum dan perlindungan korban	Meningkatnya kerentanan perempuan dan anak	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 2)	Peningkatan layanan perlindungan korban KDRT dan diskriminasi	Sosialisasi layanan pengaduan KDRT dan diskriminasi	Monitoring jumlah kasus KDRT dan diskriminasi
	Kurangnya akses perempuan dan kelompok rentan pada layanan publik	Keterbatasan fasilitas ramah gender dan inklusif	Perempuan dan kelompok rentan sulit mendapatkan hak dasar	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Sedang	Tinggi (Prioritas 3)	Pengembangan fasilitas ramah gender dan inklusif	Kampanye akses layanan publik untuk kelompok rentan	Evaluasi akses layanan publik bagi kelompok rentan



MISI/ TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RESIKO	SEBAB RESIKO	DAMPAK RESIKO	ANALISIS RESIKO	RESIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Minimnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	Kurangnya kebijakan afirmatif dan dukungan struktural	Ketidakadilan gender dalam pengambilan keputusan	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Sedang (Prioritas 4)	Mendorong kebijakan afirmatif untuk partisipasi perempuan	Publikasi partisipasi perempuan dalam politik dan kepemimpinan	Monitoring keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan
	Rendahnya kualitas pengasuhan dalam keluarga	Kurangnya edukasi tentang parenting dan pola asuh	Anak tumbuh dengan kualitas pendidikan dan mental rendah	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 5)	Pelatihan parenting dan edukasi pola asuh keluarga	Sosialisasi program parenting di sekolah dan komunitas	Monitoring efektivitas program parenting
	Stigma sosial terhadap penyandang disabilitas dan kelompok minoritas	Kurangnya kampanye kesetaraan dan inklusivitas di masyarakat	Diskriminasi sosial yang menghambat partisipasi masyarakat	Probabilitas: Sedang, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 6)	Kampanye inklusi sosial untuk disabilitas dan kelompok minoritas	Kampanye anti diskriminasi berbasis komunitas	Evaluasi partisipasi penyandang disabilitas dan kelompok minoritas
Sasaran 6.4: Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga	Rendahnya partisipasi pemuda dalam kegiatan pembangunan	Kurangnya wadah dan program pemberdayaan pemuda	Pemuda kurang berkontribusi dalam pembangunan	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Sedang	Tinggi (Prioritas 1)	Meningkatkan program pemberdayaan dan kepemudaan	Publikasi kegiatan pemuda di media sosial dan lokal	Monitoring jumlah dan partisipasi pemuda dalam kegiatan pembangunan
	Minimnya pembinaan dan pelatihan olahraga bagi pemuda	Terbatasnya program pelatihan dan pembinaan atlet	Prestasi olahraga daerah sulit berkembang	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 2)	Mengembangkan program pembinaan dan pelatihan olahraga	Sosialisasi program pelatihan atlet daerah	Evaluasi kualitas pembinaan olahraga
	Keterbatasan sarana dan prasarana olahraga	Fasilitas olahraga belum merata dan terawat dengan baik	Kesempatan latihan dan pembinaan berkurang	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 3)	Membangun dan merawat sarana olahraga secara merata	Kampanye pembangunan sarana olahraga	Monitoring ketersediaan dan kondisi sarana olahraga
	Kurangnya dukungan pendanaan untuk kegiatan kepemudaan dan olahraga	Keterbatasan anggaran daerah untuk pemuda dan olahraga	Kegiatan kepemudaan dan olahraga tidak optimal	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Sedang (Prioritas 4)	Mengalokasikan anggaran khusus untuk pemuda dan olahraga	Transparansi penggunaan anggaran kepemudaan dan olahraga	Evaluasi realisasi anggaran kegiatan kepemudaan dan olahraga
	Rendahnya motivasi dan kesadaran pemuda terhadap peran sosial	Kurangnya edukasi dan kampanye kesadaran peran pemuda	Pemuda kurang peduli terhadap pembangunan sosial	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 5)	Melaksanakan kampanye motivasi dan kesadaran sosial bagi pemuda	Sosialisasi pentingnya peran pemuda dalam pembangunan	Monitoring tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial



MISI/ TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RESIKO	SEBAB RESIKO	DAMPAK RESIKO	ANALISIS RESIKO	RESIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Kurangnya akses pemuda ke ajang kompetisi olahraga tingkat regional/nasional	Minimnya jejaring dan kesempatan mengikuti kompetisi	Berkurangnya peluang prestasi olahraga di tingkat tinggi	Probabilitas: Sedang, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 6)	Memfasilitasi akses pemuda ke kompetisi tingkat regional/nasional	Publikasi jadwal dan hasil kompetisi olahraga	Evaluasi prestasi olahraga pemuda di tingkat regional/nasional
Misi 7 : Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah Daerah Yang Berdaya Saing Tinggi Atas Pengukuran Indeks Kinerja Yang Ditetapkan Oleh Kementerian Dan Lembaga Lainnya								
Tujuan 7: Terwujudnya Kinerja Pemerintah Daerah yang berdaya saing	Rendahnya kualitas pelayanan publik	Kurangnya kompetensi ASN, minimnya inovasi	Menurunnya kepercayaan masyarakat	Kemungkinan: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi	Pelatihan ASN, penerapan e-government	Laporan kinerja terbuka ke publik	Survey kepuasan masyarakat tahunan
Sasaran 7.1: Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Akuntabilitas dan Pengawasan yang berkualitas	Kualitas dokumen perencanaan pembangunan rendah	Penyusunan perencanaan tidak berbasis data yang valid	Program pembangunan tidak tepat sasaran	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 1)	Meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data dan evidence based	Publikasi hasil perencanaan pembangunan secara terbuka	Monitoring kualitas dokumen perencanaan pembangunan
	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah lemah	Kurangnya transparansi dalam pelaporan kinerja	Menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 2)	Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan kinerja	Sosialisasi laporan kinerja secara transparan	Evaluasi rutin atas akuntabilitas kinerja perangkat daerah
	Sistem pengawasan internal tidak berjalan optimal	Keterbatasan fungsi dan kapasitas APIP	Potensi penyimpangan dan inefisiensi anggaran	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Sedang	Tinggi (Prioritas 3)	Mengoptimalkan peran APIP dalam pengawasan internal	Laporan hasil audit internal disampaikan secara rutin	Audit internal berkala untuk memastikan fungsi pengawasan berjalan
	Data dan informasi pembangunan tidak akurat dan terintegrasi	Belum adanya sistem data pembangunan yang terintegrasi	Pengambilan keputusan yang salah atau lambat	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Sedang (Prioritas 4)	Membangun sistem data pembangunan yang terintegrasi	Sosialisasi pemanfaatan sistem data pembangunan	Monitoring kualitas dan integrasi data pembangunan
	Kurangnya kompetensi aparatur dalam perencanaan dan pengawasan	Minimnya pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM	Kinerja perencanaan dan pengawasan tidak optimal	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 5)	Menyelenggarakan pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur	Penyebarluasan program peningkatan kapasitas aparatur	Evaluasi tingkat kompetensi aparatur pasca pelatihan
	Rendahnya partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pengawasan	Kurangnya mekanisme pelibatan masyarakat secara aktif	Aspirasi masyarakat tidak terakomodasi	Probabilitas: Sedang, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 6)	Membuka ruang partisipasi publik dalam perencanaan dan pengawasan	Dialog publik dan forum konsultasi dengan masyarakat	Monitoring tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbang dan forum publik
Sasaran 7.2: Terwujudnya profesionalitas ASN	Rendahnya kompetensi ASN dalam melaksanakan	Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas ASN	Pelayanan publik tidak optimal	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 1)	Meningkatkan program pelatihan dan sertifikasi ASN	Sosialisasi program peningkatan kapasitas ASN	Monitoring hasil pelatihan ASN



MISI/ TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RESIKO	SEBAB RESIKO	DAMPAK RESIKO	ANALISIS RESIKO	RESIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	tugas							
	Kurangnya integritas dan etika kerja ASN	Budaya kerja yang belum sepenuhnya menjunjung integritas	Turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 2)	Memperkuat penerapan kode etik ASN	Kampanye integritas dan kode etik ASN	Evaluasi penerapan kode etik ASN secara berkala
	Minimnya inovasi dan kreativitas ASN dalam pelayanan publik	Lingkungan kerja tidak mendukung inovasi	Pelayanan publik menjadi stagnan dan tidak responsif	Probabilitas: Sedang, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 4)	Mendorong budaya kerja inovatif melalui kompetisi inovasi ASN	Publikasi hasil inovasi ASN secara luas	Monitoring jumlah inovasi ASN tiap tahun
	Tingkat kedisiplinan ASN yang rendah	Kurangnya pengawasan dan penerapan reward & punishment	Menurunnya produktivitas kerja ASN	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 3)	Penerapan reward and punishment secara konsisten	Sosialisasi peraturan disiplin ASN	Evaluasi tingkat kedisiplinan ASN
	Terbatasnya sistem merit dalam manajemen ASN	Proses rekrutmen, mutasi, dan promosi belum sepenuhnya berbasis merit	Kualitas manajemen ASN menurun dan tidak objektif	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 5)	Menerapkan sistem merit dalam manajemen ASN	Sosialisasi sistem merit dan rekrutmen berbasis kompetensi	Audit pelaksanaan sistem merit dalam manajemen ASN
	Rendahnya motivasi dan kepuasan kerja ASN	Kesejahteraan ASN belum optimal dan beban kerja tinggi	ASN cenderung bekerja tanpa semangat dan kurang produktif	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 6)	Meningkatkan kesejahteraan dan manajemen beban kerja ASN	Forum diskusi dan survei kepuasan ASN	Survey kepuasan dan motivasi ASN secara rutin
Sasaran 7.3: Meningkatnya tata kelola arsip dan literasi masyarakat	Pengelolaan arsip tidak tertata dengan baik	Belum optimalnya penerapan sistem kearsipan digital	Dokumen dan arsip sulit diakses saat dibutuhkan	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 1)	Mengimplementasikan sistem arsip digital terintegrasi	Sosialisasi sistem arsip digital ke OPD	Monitoring efektivitas sistem arsip digital
	Kehilangan arsip penting akibat bencana atau kelalaian	Tidak adanya backup data arsip yang memadai	Hilangnya data penting yang berdampak pada pelayanan publik	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 2)	Membuat backup arsip secara berkala (fisik dan digital)	Laporan berkala terkait keamanan arsip	Audit dan evaluasi backup arsip secara rutin
	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi	Kurangnya sosialisasi tentang literasi	Masyarakat kurang memahami informasi yang benar	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 3)	Sosialisasi pentingnya literasi melalui berbagai media	Kampanye literasi melalui media cetak, digital, dan event masyarakat	Evaluasi efektivitas kampanye literasi



MISI/ TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RESIKO	SEBAB RESIKO	DAMPAK RESIKO	ANALISIS RESIKO	RESIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Kurangnya minat baca masyarakat	Pengaruh budaya digital hiburan yang lebih dominan	Rendahnya kualitas SDM masyarakat	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 4)	Program kampanye minat baca masyarakat	Penyelenggaraan lomba baca dan literasi	Monitoring program peningkatan minat baca
	Keterbatasan sarana dan prasarana literasi (perpustakaan, akses digital)	Fasilitas literasi belum merata dan kurang modern	Akses literasi masyarakat terbatas	Probabilitas: Sedang, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 5)	Peningkatan sarana prasarana literasi, perpustakaan, dan akses digital	Sosialisasi pembangunan sarana literasi kepada masyarakat	Evaluasi pemanfaatan sarana literasi
	Kurangnya kompetensi SDM dalam pengelolaan arsip dan literasi	Kurangnya pelatihan SDM di bidang arsip dan literasi	Pengelolaan arsip dan literasi menjadi tidak profesional	Probabilitas: Sedang, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 6)	Pelatihan SDM terkait arsip dan literasi	Publikasi kegiatan pelatihan SDM	Evaluasi kompetensi SDM pasca pelatihan
Sasaran 7.4: Meningkatnya kualitas Pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah	Ketidaktepatan dalam perencanaan anggaran daerah	Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah	Program pembangunan tidak berjalan optimal	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 1)	Meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data dan kebutuhan	Sosialisasi standar perencanaan anggaran	Monitoring konsistensi perencanaan dengan realisasi
	Keterlambatan penyerapan anggaran	Proses administrasi yang berbelit dan lambat	Hambatan pada realisasi program prioritas	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 2)	Simplifikasi proses administrasi anggaran	Laporan realisasi anggaran secara berkala	Evaluasi rutin penyerapan anggaran per triwulan
	Kebocoran atau penyalahgunaan anggaran	Pengawasan internal yang lemah	Kerugian keuangan daerah dan hilangnya kepercayaan publik	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 3)	Penguatan fungsi pengawasan internal	Transparansi hasil audit internal	Audit keuangan secara periodik
	Pendapatan daerah tidak mencapai target	Basis data potensi pendapatan daerah belum akurat	Defisit anggaran dan berkurangnya pelayanan publik	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 4)	Optimalisasi basis data dan intensifikasi pajak/retribusi daerah	Publikasi target dan realisasi pendapatan daerah	Monitoring capaian pendapatan daerah setiap bulan
	Sistem pelaporan keuangan kurang transparan	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi	Menurunnya akuntabilitas keuangan daerah	Probabilitas: Sedang, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 5)	Mengembangkan sistem pelaporan digital berbasis transparansi	Sosialisasi penggunaan aplikasi pelaporan digital	Evaluasi kualitas pelaporan keuangan
	Kurangnya kompetensi SDM dalam pengelolaan keuangan daerah	Minimnya pelatihan dan pengembangan SDM	Kualitas laporan keuangan menurun dan berisiko disclaimer	Probabilitas: Sedang, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 6)	Pelatihan rutin pengelolaan keuangan bagi SDM terkait	Publikasi kegiatan pelatihan SDM	Uji kompetensi dan evaluasi pasca pelatihan